



PROSIDING VENNAS AIHII

Konvensi Nasional Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia

*“Membangun Kedaulatan Maritim,
Memperkuat Hubungan Internasional Indonesia”*

Tanjungpinang, 23 Oktober 2018

ISSN: 2549-6689



9 772549 668881



Prosiding Vennas AIHII

Volume 9/2018

“Membangun Kedaulatan Maritim, Memperkuat Hubungan Internasional Indonesia”

Dewan Redaksi:

Advisor : Ketua Umum Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (PP AIHII) Dr. Yusron, M.Si

Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Sayed Fauzan Riyadi

Head of Editorial Board : Muhammad Riza Widyarsa

Editor : Ariski Aznor

Design-Layout : Ady Muzwardy
Desri Gunawan
Dhani Akbar
Glory Yolanda Yahya

Diterbitkan oleh : Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Bersama Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (PP-AIHII)

SAMBUTAN PENGURUS PUSAT AIHII

Puji Syukur kepada Tuhan YME atas terselenggaranya Konvensi Nasional IX Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (Vennas IX AIHII) di Kota Tanjungpinang pada 22 sampai dengan 25 Oktober 2018. Vennas IX AIHII menorehkan beberapa tradisi baru, terutama dimulainya pelaksanaan diseminasi paper sesuai dengan komunitas epistemik yang sesuai dengan minat kajian para dosen anggota AIHII. Kemudian dilaksanakan juga diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat atas permintaan para anggota, sesuai dengan kebutuhan baik untuk peningkatan kum jabatan fungsional maupun untuk akreditasi program studi. Yang tidak kalah penting adalah disepakatinya gelar untuk sarjana Ilmu Hubungan Internasional yaitu S.Hub.Int.

Penghargaan yang setinggi-tingginya saya, mewakili para pengurus pusat AIHII kepada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) sebagai tuan rumah Vennas IX AIHII. Juga kepada para perwakilan dari kampus lain yang hadir dan turut aktif dalam rangkaian kegiatan Vennas IX AIHII.

Prosiding ini mewakili tradisi publikasi yang terus ditingkatkan dari satu Vennas ke Vennas lainnya. Tentunya masih banyak kekurangan dari prosiding ini. Namun merupakan tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan AIHII untuk dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ini. Semoga dengan segala keterbatasannya, prosiding ini dapat memberikan kontribusi ilmiah maupun praktis bagi perkembangan Ilmu Hubungan Internasional Indonesia.

Jakarta, Desember 2018

Dr. Yusran, M.Si

Daftar Isi

Bagian I: Pertemuan Komunitas Epistemik

Evaluasi Kebijakan Kelautan Indonesia dalam Pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (Dian Azmawati).....	I-1
Peranan Indonesia dalam Memperkuat Budaya Maritim di Asia Tenggara (Lili Yulyadi Arnakim, Galuh Dian Prama Dewi).....	I-7
Indonesia dan Rezim <i>United Nations Convention On The Law Of The Sea</i> 1982: Lika-Liku Perjuangan dan Relevansi Kepentingan Maritim Era Kekinian(Arthuur Jeverson Maya).....	I-23
Kedaulatan Maritim Indonesia yang (tidak) Berdaulat?(Muhammad Iqbal, Puji Wahono, Bagus Sigit Sunarko)	I-41
Pengelolaan Sumberdaya dan Ekonomi Perbatasan: Kajian Ekonomi Politik Kemaritiman Berkeadilan (Pazli)	I-53
Diplomasi Maritim Indonesia dalam Kerangka Politik Luar Negeri Bebas Aktif (Indrawati, Agung Yudhistira Nugroho)	I-71
Persepsi Pemuda di Sumatera Selatan Terhadap Diplomasi Publik (Azhar)	I-104
Faktor Penghambat Diplomasi CPO Indonesia di Pasar Eropa (Denada Faraswacyen L. Gaol).....	I-131
Diplomasi Pariwisata Bencana di Indonesia (Harits Dwi W).....	I-145
Border Diplomacy in Handling Disputes on Tanjung Datu (Case Between Indonesia and Malaysia) (Elyta, Uly Nuzulian)	I-157
<i>The Power Of Emak-Emak</i> : Tenaga Penggerak bagi Perempuan Desa Bakalan Sebagai Pelaku Citizen Diplomacy Berbasis Kearifan Lokal (Setyasih Harini)	I-168
Merawat Korban ‘Susi –Effect’ di Philipina Selatan (Sidik Jatmika)	I-179
Korean Wave : Apa Faktor yang Berkontribusi terhadap Kesuksesannya? (Sofia Trisni, Rika Isnarti, Anita Afriani S, Ferdian)	I-192
Signifikansi Pengaruh Organisasi Non-Pemerintah dalam Diplomasi Lingkungan: Perspektif <i>English School</i> (Verdinand Robertua).....	I-207
<i>Collaborative Governance</i> Dalam Kebijakan Investasi Di Kawasan Free Trade Zone Bintan (Ady Muzwardi, Gloria Yolanda Yahya, Oksep Adhayanto)	I-220
Multinational Corporation’s Social Responsibility: Case Study of Danone-Aqua’s Corporate Social Responsibility (CSR) in Polanharjo District, Klaten Regency, 2012-2017 (Bambang Wahyu Nugroho, Arsyta Dewi Mayasari Sindhutomo)	I-231
Dinamika Perkembangan Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok terhadap Regionalisme Uni Eropa (V.L. Sinta Herindrasti).....	I-258
Membangun Kedaulatan Negara dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (Studi Komparasi Perspektif Islam dan Liberal) (Siti Muslikhati)	I-271

Bagaimana Negara-Negara Pos-Kolonial Memandang Keamanan Manusia? (Studi Kasus: Dilema State-Building dan Pembangunan Manusia di Asia Tenggara) (Azhari Setiawan, Andree).....	I-285
Tata Kelola Lingkungan Regional: ASEAN Menuju Komitmen Kesepakatan Paris (Masitoh Nur Rohma).....	I-324
Islam dalam Dinamika Politik Singapura (Sugeng Riyanto).....	I-340
Pemetaan Partai Politik di Timur Tengah; Partai Politik Zuama dan Non-Zuama di Libanon (Mohammad Riza Widyarsa)	I-375
Konflik Yaman: Houthi Menyerang, Arab Saudi Merespon (Ahmad Fuadi).....	I-389
Tantangan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terkait Isu Perlindungan TKI Di Arab Saudi (Anna Yulia Hartati).....	I-403
Prospek Pengaruh Iran atas Pemerintahan Irak Pasca Kemenangan Melawan ISIS (Ariski Aznor)	I-419
Analisis Persepsi Masyarakat Skouw - Wutung Terhadap Pembangunan Perbatasan Republik Indonesia – Papua New Guinea (Melpayanty Sinaga, Barisen Rumabar)	I-436
Border Governance, Konstruksi Politik Identitas Perbatasan, Nasionalisme atau melawan? (Saiman Pakpahan).....	I-454
Mengurai Fenomena Migrasi Modern di Indonesia dan Turki: Suatu Telaah Fungsional Negara (Wahyuni Kartikasari)	I-464
Route of Narcotics Smuggling in Southeast Asia Region (Case Study in Border of Riau Province) (Rendi Prayuda, Fitrisia Munir)	I-477

Bagian II: Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat

Program Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Dalam Rangka Mengurangi Tingkat Ketergantungan Lulusan pada Dunia Kerja (Sugito, Sri Handari Wahyuningsih, Agus Nugroho Setiawan),.....	II-1
Pengabdian Masyarakat : Peningkatan Pemahaman Siswa SMA terhadap Prosedur Sidang PBB (Sofia Trisni, Rika Isnarti , Anita Afriani S, Poppy Irawan)	II-14
Moral Pancasila Terinspirasi Kode Moral Al Quran (Djumadi M. Anwar)	II-23
Pendampingan Bp3tki Kota Tanjungpinang Dalam Menanggulangi Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Ilegal (Dhani Akbar, M. Riza Widyarsa).....	II-36

BAGIAN I
PERTEMUAN KOMUNITAS EPISTEMIK



Evaluasi Kebijakan Kelautan Indonesia dalam Pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing.

Dian Azmawati

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
dianazmawati@umy.ac.id

Abstrak

Indonesia sebagai negara maritim dengan luas laut 70% dari keseluruhan luas wilayahnya, memiliki berbagai potensi dan kekayaan dari sumber daya laut yang sangat besar. Pemerintah memiliki tanggungjawab dalam mengelola dan menjaga sumber daya laut tersebut untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu usaha yang telah dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia adalah melakukan pemberantasan illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing serta pengembangan ekonomi maritim dan kelautan. Pemberantasan IUU fishing merupakan prioritas utama pemerintah dalam melindungi sumber daya kelautan dan perikanan, agar pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan bisa optimal. Tulisan ini akan mengevaluasi penerapan kebijakan yang diambil pemerintah RI melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dalam pemberantasan IUU fishing, dan seberapa jauh pengaruhnya terhadap pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia.

Kata Kunci: *kebijakan pemerintah, pemberantasan IUU fishing, pengembangan ekonomi maritim*

Latar belakang Masalah

Indonesia sebagai negara kepulauan, atau disebut juga negara maritim, yang terbesar dan terluas di dunia, memiliki lebih dari 17.000 pulau tersebar di sepanjang garis ekuator, dari Sabang di ujung Barat hingga Merauke di ujung Timur. Luas perairan Indonesia lebih dari 60% dari keseluruhan luas teritorialnya, dan memiliki panjang garis pantai lebih dari 99.000 km. Hal tersebut membuat Indonesia menjadi negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Secara geografis, posisi Indonesia menjadi penghubung antara dua samudera besar, samudera Hindia dan samudera Pasifik, dan penghubung dua benua, Asia dan Australia. Perairan Indonesia merupakan penghubung perdagangan bagi banyak negara di dunia. Dengan kondisi geografis seperti ini, banyak keuntungan yang dimiliki oleh Indonesia, ditambah lagi dengan melimpahnya potensi kekayaan laut di perairan Indonesia.

Indonesia termasuk dalam negara berstatus *Middle Income Country*, dengan pendapatan per kapita sekitar US \$4,300, dan menduduki posisi keempat dalam *United Nations Development Programme (UNDP) Human Development Index* sebagai salah satu negara yang memiliki *human development* tercepat di dunia (*UNODC Country Programme for Indonesia, 2012-2015*). Meskipun indikator macroekonomi Indonesia menunjukkan kecenderungan positif, namun permasalahan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi pemerintah. Menurut *UNDP Human Development Report* tahun 2010, lebih dari 32 juta penduduk Indonesia masih

hidup di bawah garis kemiskinan sehingga Indonesia menduduki posisi ke 108 dari 169 negara dan dikategorikan sebagai Medium Development Country. Fakta bahwa sebagian besar nelayan tradisional Indonesia masuk pada kategori masyarakat miskin atau di bawah garis kemiskinan menunjukkan belum tergalinya potensi kekayaan maritim Indonesia yang melimpah.

Indonesia sebagai negara Kepulauan

Indonesia merupakan negara kepulauan berdasarkan pasal 46 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut/*United Nations Convention On Law of the Sea* (UNCLOS 1982). Disebutkan bahwa negara kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. UU Republik Indonesia no. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia pasal 2 ayat (1) menegaskan Negara Republik Indonesia adalah Negara Kepulauan. Keseluruhan luas laut Indonesia (*Total Indonesian Waters*) 5,8 juta km² yang terdiri atas luas Perairan Kepulauan atau laut Nusantara (*Total Archipelagic Waters*) 2,3 juta km², luas Perairan Teritorial (*Total Territorial Waters*) 0,8 juta km²; luas Perairan ZEE Indonesia (*Total EEZ of Indonesian Waters*) 2,7 juta km²; dan panjang garis pantai (*Coast Line of Indonesia*) 95.181 km (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2009:1). Indonesia mempunyai kedaulatan penuh atas wilayahnya dan berhak untuk mengelola dan memanfaatkan sebesar-besarnya potensi kekayaan lautnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

Berdasarkan UU Republik Indonesia no. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara, pasal 1 angka 8, yang dimaksud ZEEI adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UU yang mengatur mengenai Perairan Indonesia (UU RI no. 6 tahun 1966 tentang Perairan Indonesia), dengan batas terluar 200 (duaratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.

Wilayah Laut Indonesia mengandung potensi ekonomi kelautan yang sangat besar dan beragam. Sedikitnya terdapat 13 (tiga belas) sektor yang dapat dikembangkan bagi kemakmuran masyarakat Indonesia, meliputi perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil budidaya, industri bioteknologi kelautan, pertambangan dan energi, pariwisata bahari, transportasi laut, industri dan jasa maritim, pulau-pulau kecil, sumber daya non-konvensional, bangunan kelautan, benda-benda berharga dan warisan budaya, dan jasa lingkungan konversi dan biodiversitas (Endang Retnowati, 2011)

Pembangunan Maritim Masa Presiden Joko Widodo

Sejak masa kampanye pemilihan Presiden RI pada tahun 2014, Joko Widodo berpasangan dengan Jusuf Kalla, merencanakan program Nawa Cita, yaitu sembilan agenda prioritas bagi

perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan (Kompas.com. 2014). Perhatian khusus dari pemerintahan Jokowi terhadap pembangunan maritim di Indonesia terpapar dalam program pertama Nawa Cita, yaitu menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim (Kompas.com, 2014).

Gagasan memperkuat jati diri sebagai negara maritim dikuatkan dengan agenda politik luar negeri Indonesia di bawah presiden Joko Widodo, yang memberi penekanan pada 4 (empat) prioritas utama, yaitu:

1. Berkomitmen untuk mengedepankan identitas Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) dalam pelaksanaan diplomasi dan membangun kerjasama internasional. Polugri yang mencerminkan identitas negara kepulauan ini diwujudkan melalui 5 (lima) agenda aksi: Diplomasi Maritim untuk mempercepat penyelesaian permasalahan perbatasan Indonesia; menjamin integritas wilayah NKRI, kedaulatan Maritim dan keamanan/kesejahteraan pulau-pulau terdepan; mengamankan sumber daya alam dan ZEE; mengintensifkan diplomasi pertahanan; dan mendorong penyelesaian sengketa teritorial di kawasan.
2. Meningkatkan peran global melalui diplomasi middle power yang menempatkan Indonesia sebagai kekuatan regional dengan keterlibatan global secara selektif, dengan memberi prioritas pada permasalahan yang secara langsung berkaitan dengan kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia,
3. Memperluas mandala keterlibatan regional di kawasan Indo-Pasifik, dengan “mengintegrasikan” dua samudera: Samudera Hindia dan Samudera Pasifik sebagai lingkungan strategis pelaksanaan polugri di kawasan. Salah satu dari 5 (lima) agenda untuk mewujudkan peran aktif tersebut, adalah mendorong kerjasama maritim komprehensif (*comprehensive maritime cooperation*) khususnya melalui Indian Ocean Rim Association (IORA).
4. Merumuskan dan melaksanakan politik luar negeri (polugri) yang melibatkan peran, aspirasi dan kepentingan masyarakat. (Nazaruddin Nasution, 2018)

Keseriusan pemerintah membangun maritim Indonesia, kembali ditegaskan Presiden Joko Widodo ketika menyampaikan pidato pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-9 *East Asia Summit* (EAS) tanggal 13 November 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar. Dalam pidatonya tersebut, Presiden menyatakan konsep Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia sehingga agenda

pembangunan akan difokuskan pada 5 (lima) pilar utama, yaitu: membangun kembali budaya maritim Indonesia; menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan laut dengan menempatkan nelayan pada pilar utama; memberi prioritas pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, *deep seaport*, logistik, industri perkapalan dan pariwisata maritim; menerapkan diplomasi maritim, melalui usulan peningkatan kerjasama di bidang maritim dan upaya menangani sumber konflik, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut dengan penekanan bahwa laut harus menyatukan berbagai bangsa dan negara dan bukan memisahkan; membangun kekuatan maritim sebagai bentuk tanggung jawab menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim (www.kemlu.go.id).

EAS merupakan sebuah forum regional dengan anggota 18 negara, yaitu 10 negara anggota ASEAN dan 8 negara mitra wicara ASEAN, yaitu, India, Jepang, Korea Selatan, RRT, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Rusia. EAS dibentuk pada tanggal 14 Desember 2005 di Kuala Lumpur. Pada KTT EAS tersebut di atas, selain kepala negara ke 18 anggota EAS, hadir pula Sekjend ASEAN, serta Sekjend PBB dan Presiden Asian Development Bank sebagai *guest of the Chair* (www.kemlu.go.id).

Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUU Fishing)

Salah satu dari lima pilar utama dalam konsep Indonesia sebagai poros maritim dunia adalah menerapkan diplomasi maritim yang mengusulkan peningkatan kerjasama di bidang maritim dan upaya menangani sumber konflik. Satu dari berbagai sumber konflik yang disebutkan presiden Joko Widodo adalah pencurian ikan atau sering disebut *illegal, unreported, unregulated fishing (IUU fishing)*. IUU fishing merupakan salah satu sumber kerugian yang cukup besar bagi Indonesia dan termasuk ke dalam kategori kejahatan transnational. Menurut laporan yang dibuat oleh ASEAN News, kerugian yang diderita oleh Indonesia sebagai akibat dari pencurian ikan ini mencapai US \$ 3 miliar/tahun (Nicky Lung, OpenGov.2018). Jumlah kerugian yang besar. Untuk memberantas kejahatan pencurian ikan tersebut, pemerintah mengambil langkah “shock therapy” dengan menenggelamkan ratusan kapal penangkap ikan asing ilegal yang ditemui di perairan Indonesia. Tindakan penenggelaman kapal penangkap ikan asing tersebut dikomandoi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dan menjadi bahan pemberitaan yang cukup populer di Indonesia bahkan di level internasional.

Dalam berperang melawan kejahatan pencurian ikan di perairan Indonesia, pemerintah juga bekerjasama dengan berbagai negara lainnya, khususnya menjalin kemitraan dengan negara-negara yang terlibat dalam penangkapan ikan ilegal. Kerjasama kemitraan tersebut berupa

kerjasama bilateral dan kerjasama dalam kerangka ASEAN. Kerjasama bilateral dilakukan salah satunya dengan pemerintah Thailand ketika pada bulan April 2015, Indonesia dan Thailand bersama-sama mengumumkan pembentukan kelompok kerja untuk menangani praktik penangkapan ikan secara ilegal. Kerjasama dalam kerangka ASEAN dilakukan melalui ASEAN-US Meeting on Anti-Piracy and Counter-Terrorism, ASEAN Maritime Forum, ASEAN-Japan Maritime Port and Transport Security, serta ASEAN-EU Experts meeting on Maritime Security. Berbagai kerjasama ini merupakan kesempatan untuk mengatasi permasalahan di balik penangkapan ikan ilegal dan permasalahan keamanan secara lebih luas (M. Najery Al Syahrin, 2018)

Capaian dan Hambatan

Tahun 2018 ini, pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla genap berusia tiga tahun. Dalam mengatasi IUU fishing, pemerintah dapat dikatakan cukup berhasil. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara aktif bergerak menanggulangi pencurian ikan di perairan Indonesia oleh kapal penangkap ikan asing ilegal, dibantu berbagai aparat penegak hukum dan beberapa kementerian lainnya.

Menteri Kelautan dan perikanan Susi Pudjiastuti, dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 yang mengusung tema “Pengembangan Ekonomi Maritim dan Peningkatan Produktivitas Sumber Daya Laut”, di Gedung Bina Graha Jakarta tanggal 18 Oktober 2018 lalu, menyampaikan bahwa kinerja KKP menjadi indikator keberhasilan kabinet kerja dalam sektor kelautan dan perikanan. Tak hanya pemberantasan pencurian ikan atau IUU fishing, KKP juga mengelola sumber daya ikan dan laut yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan stakeholder KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, 2018)

Kesimpulan

Permasalahan IUU fishing sangat merugikan perekonomian Indonesia. Presiden Joko Widodo selama 3 tahun pemerintahannya memberi fokus lebih kepada pembangunan maritime Indonesia, dan penanggulangan masalah IUU fishing merupakan salah satu program ditindaklanjuti dengan serius. Di luar berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi, sejauh ini program penanggulangan pencurian ikan oleh kapal asing ilegal di perairan Indonesia dapat berjalan dengan baik dan menunjukkan keberhasilan.

Namun keberhasilan tersebut belum diikuti dengan tindak lanjut berikutnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya nelayan tradisional dan kecukupan gizi dari sektor laut. Untuk itu perlu koordinasi yang lebih luas antara kementerian kelautan dan

perikanan RI dengan berbagai institusi dan kementerian lainnya agar tujuan utama peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia lewat pembangunan maritim dapat benar-benar terwujud.

Daftar Pustaka

- Nasution, Nazaruddin, *Dinamika Politik Luar Negeri Indonesia*, Yayasan Bina Insan Cita, Jakarta, 2018.
- UNODC, Country Programme for Indonesia, 2012-2015
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pusat Data, Statistik dan Informasi, 2009, *Kelautan dan Perikanan dalam Angka*, 2009.
- Retnowati, Endang, *Nelayan Indonesia dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi dan Hukum)*, Jurnal Perpektif vol. XVI no. 3, edisi Mei, 2011.
- Paskarina, Caroline, *Kebijakan Poros Maritim Jokowi dan Sinergitas Strategi Ekonomi dan Keamanan Laut Indonesia*. Available from:
https://www.researchgate.net/publication/327477984_Kebijakan_Poros_Maritim_Jokowi_dan_Sinergitas_Strategi_Ekonomi_dan_Kemampuan_Laut_Indonesia [accessed Oct 21 2018].
- Al Syahrin, M Najeri, Kompas.com, dengan judul "Nawa Cita", 9 Agenda Prioritas Jokowi-JK", <https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK>.
- Ditjen KSA/Dit.MWAK, <https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Presiden-Jokowi-Deklarasikan-Indonesia-Sebagai-Poros-Maritim-Dunia.aspx> (accessed Oct. 21 2018)
- Lung, Nicky, <https://www.opengovasia.com/indonesian-government-building-an-integrated-system-to-tackle-iuu-fishing/> (accessed Oct 21 2018)
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, <https://kkp.go.id/artikel/111-tak-hanya-illegal-fishing-ini-capaian-tiga-tahun-kinerja-kkp> (accessed Oct 21 2018)

Peranan Indonesia dalam Memperkuat Budaya Maritim di Asia Tenggara

Lili Yulyadi Arnakim, Galuh Dian Prama Dewi

University of Bina Nusantara Jakarta

Lili.yulyadi@binus.edu; Galuh.dewi@binus.edu

Abstract

Indonesia as the largest archipelagic country in Southeast Asia and the world, plays a significant role in organizing and maintaining the culture, as well as identity of the maritime community. The maritime community has almost the same tradition as the archipelagic countries in Southeast Asia, such as communal, traditional economics, belief in myths and superstition, gotong royong, religious, complementary among others, and not prioritizing competition. Along with the agenda of unifying the ASEAN community, by the theme of ASEAN identity, this paper will discuss how Indonesia plays role in strengthening maritime culture as one of the foundations in the formation of ASEAN identity in Southeast Asia. This paper uses qualitative methods that emphasize processes, events, and authenticity with a descriptive approach, and supported by secondary data. Using the basis of constructive thinking and the state analysis unit, this paper argues that Indonesia can play a role by making realistic approaches to the formation of ASEAN identity through collective identity. The maritime community will be feeling and conceiving when they have common knowledge, especially in four areas, i.e. homogeneity, interdependency, common fate, and self-restraint. These four elements will be felt and carried out when the Indonesian maritime community interacts with other maritime communities. In this case, the State acts as a facilitator to facilitate the interaction.

Key words: maritime culture, constructivism, Indonesia, collective identity, common interest.

Abstrak

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara dan dunia, memainkan peranan yang sangat penting dalam menyelenggarakan dan memelihara budaya, serta identitas masyarakat maritim. Masyarakat maritim mempunyai tradisi yang hampir sama dengan negara-negara kepulauan yang ada di Asia Tenggara, seperti komunal, ekonomi tradisional, kepercayaan terhadap mitos dan takhayul, gotong royong, religius, saling melengkapi, dan tidak mengutamakan kompetisi. Seiring dengan agenda penyatuan masyarakat ASEAN, dengan membawa tema ASEAN identity, tulisan ini akan mendiskusikan tentang bagaimana Indonesia berperan dalam memperkuat budaya maritim sebagai salah satu pondasi dalam pembentukan ASEAN identity di Asia Tenggara. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif yang lebih menekankan pada proses, peristiwa, dan otentisitas dengan pendekatan deskriptif, dan jenis data sekunder. Dengan menggunakan dasar berpikir konstruktivisme dan unit analisa negara, tulisan ini berargumen bahwa Indonesia dapat berperan dengan melakukan pendekatan-pendekatan yang realistik di dalam pembentukan ASEAN identity melalui collective identity. Masyarakat maritim akan merasakan dan memahami collective identity ketika mereka memiliki common knowledge, khususnya dalam empat hal, yaitu homogeneity, interdependency, common fate, dan self-restraint. Keempat unsur tersebut akan dapat dirasakan dan dilakukan ketika masyarakat

maritim Indonesia saling berinteraksi dengan masyarakat maritim yang lain. Dalam hal ini, Negara bertindak sebagai fasilitator untuk mempermudah terjadinya interaksi tersebut.

Kata kunci: *budaya maritim, konstruktivisme, Indonesia, collective identity, common knowledge*

Pendahuluan

Sejak tahun 1950-an, pembangunan maritim telah menjadi salah satu perhatian pemerintah, meskipun bukan yang utama. Pengembangan perniagaan dan industri melalui dukungan kebijakan yang berpihak pada intensifikasi kegiatan pelayaran, perkapalan, kelautan termasuk pengembangan infrastruktur, diplomasi, dan pertahanan menjadi serangkaian strategi dalam mencapai cita-cita maritim bangsa Indonesia. Keberadaan Indonesia di wilayah strategis Pantai dan Samudra Hindia Pasifik yang merupakan salah satu jalur lalu lintas terpenting dalam aktifitas perdagangan internasional, berada di antara Benua Asia dan Australia, Indonesia dengan kepemilikan pulau sebanyak lebih dari 17 ribu dan dikelilingi oleh sekitar 70% wilayah laut menjadikan Indonesia memiliki potensi maritim yang kuat baik di regional Asia Tenggara maupun dunia. Fakta semakin meningkatnya aktifitas perekonomian global yang tersentral pada perdagangan dan investasi, maraknya *maritime criminality*, dan tantangan *maritime security* lainnya mendorong negara-negara berkembang untuk membangun penguatan maritim sebagai komponen vital dalam strategi nasional negara untuk memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan maritim secara komprehensif.

Secara regional, salah satu kawasan yang kini menjadikan maritim sebagai sebuah strategi vital dalam pembangunan adalah the *African Union*. Organisasi yang terdiri dari negara-negara *developing* dan *underdeveloped* di Afrika, membentuk *The Africa Integrated Maritime Strategy* (AIMS) 2050 (International Maritime Organization, 2017) memuat kerangka perlindungan dan eksploitasi berkelanjutan pada semua jalur air Afrika yang dapat dilalui dan kegiatan maritim didalamnya atau *Africa's Maritime Domain* (AMD) karena berpotensi mampu menjadi sumber *capital* pencapaian kesejahteraan bersama (African Union, 2012). Sementara itu di Asia Tenggara, *maritime strategy* termasuk dalam salah satu agenda ASEAN Connectivity 2025.

Pengembangan tata pemerintahan maritim dunia berawal dari sebuah visi abad 21 melalui pembentukan sistem maritim internasional tahun 1980an. Pembentukan rezim internasional ini berkaitan dengan penyebaran epidemik isu *marine*, *maritime*, dan *naval* pada akhir Perang Dingin. Kemudian, sistem diadopsi secara nasional yang secara kontekstual dan hukum mengatur tentang keberadaan laut lepas dan sumber daya di dalamnya dengan tujuan untuk menjamin generasi selanjutnya dapat menikmati kekayaan laut yang melimpah. Konvensi Hukum Laut 1982 memprioritaskan pengaturan tentang standard internasional untuk konservasi dan pengelolaan

tentang penangkapan ikan (*fishing*) dan segala aktifitas yang melibatkan jalur air yang dapat dilalui (*navigable waterway*) dengan penerapan *exclusive economic zone* (EEZ) sepanjang 200 mil (The Institute of East and West Studies, 1995).

Jauh sebelum Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS), Indonesia telah mendeklarasikan kedaulatan perairan melalui Deklarasi Juanda 1957 yang menegaskan tentang konsepsi Wawasan Nusantara. Sementara itu, melalui UNCLOS 1982 memperkuat pengakuan bahwa Indonesia sebagai Negara Kepulauan terbesar di dunia. Melihat posisi Indonesia secara geografis, luas total wilayah Indonesia adalah 7.81 juta km², terdiri dari luas lautan 3.25 juta km², dan 2.55 juta km² ZEE dengan luas terumbu karang mencapai 50.875 km² dan menyumbang 18% luas total terumbu karang dunia serta 65% luas total di *coral triangle* (Roza, 2017), diperkaya dengan gugusan 17.504 pulau dan luas daratan 1.91 juta km² (Statistics Indonesia, 2017).

Indonesia, dari peralihan strategi nasional kepada strategi maritim terlihat dari visi *Indonesia's Global Maritime Fulcrum* (GMF) yang disampaikan pada pertemuan KTT ke-9 *East Asia Summit* tahun 2014. Sebagai bentuk legalitas visi sekaligus alat untuk memfasilitasi pencapaian visi tersebut, pada tahun 2017 pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden No. 16 tentang Kebijakan Laut Indonesia. Tindakan kemaritiman seperti pengembangan, pengelolaan dan peningkatan produktifitas sumber daya laut, pembangunan infrastruktur, serta berbagai rangkaian diplomasi maritim menjadi sebuah paket kebijakan yang dinilai mampu menghasilkan kebangkitan ekonomi nasional dalam skala ekspektasi. Selain itu, efisiensi distribusi barang dan jasa sebagai akibat dari pembangunan fasilitas *maritime domain* dapat menjadi pendorong bagi peningkatan terjadinya variasi dan volume kegiatan ekonomi yang menjangkau masyarakat nelayan dan masyarakat pesisir sebagai bagian dari unsur determinan pembangunan masyarakat nasional.

Keberhasilan Indonesia dalam memanfaatkan dirinya sebagai wilayah maritim telah ditunjukkan jauh pada masa penguasaan kerajaan-kerajaan Nusantara seperti Majapahit dan Sriwijaya yang telah menguasai hampir seluruh wilayah lautan dan daratan Nusantara, bahkan beberapa wilayah yang saat ini menjadi bagian dari Asia Tenggara. Sedangkan, Indonesia pada era pembentukan negara, kemerdekaan, dan pembangunan lebih difokuskan kepada daratan. Karena itu, pada era Soeharto dengan memfokuskan pembangunan pada agrarian, muncul identitas Indonesia sebagai negara “agraris”, dengan melihat pada dominasi penduduk sebagai petani dan luasan area daratan Indonesia yang dilihat lebih berpotensi dalam pengembangan pertanian. Sebagai akibat dari perubahan strategi tersebut, pada akhirnya mendorong Indonesia kepada perubahan dan penguatan identitas daratan selama era kepemimpinan Orde Baru.

Seiring dengan dinamika politik Indonesia dan perubahan rezim, pada era kepemimpinan Jokowi, mengacu kepada penyampaian gagasan *Global Maritime Fulcrum* (GMF), memberikan tanda bagi adanya perubahan pendekatan yaitu kembali memfokuskan Indonesia dan mengidentifikasi identitas Indonesia sebagai negara maritim sekaligus menjadi central kekuatan maritim dunia. Disamping itu, selain mendapatkan dukungan dari sisi geografis, keberadaan visi, aturan, dan implementasi dari kebijakan maritim domestik dan luar negeri memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara maritim (*maritime nation*) selain Yunani, Norwegia, Belanda dan Jepang.

Tulisan ini akan membicarakan peran Indonesia dalam memperkuat budaya maritim di Asia Tenggara. Secara sistematis, tulisan ini dibagi kedalam tiga bagian: *Pertama*, Indonesia sebagai negara maritim dan budaya serta identitas kemaritiman yang sedang dalam proses pemeliharaan sesuai dengan Nawacita Jokowi. *Kedua*, pendekatan yang menerangkan tentang peranan Indonesia dalam mempromosikan dan mendorong negara-negara di Asia Tenggara untuk bersama-sama memanfaatkan budaya maritim. Terakhir berupa kesimpulan bagaimana Indonesia melalui *norm entrepreneurship* mencoba untuk memperkuat budaya maritim negara-negara di Asia Tenggara sehingga menghasilkan penguatan terhadap ASEAN *identity*.

Budaya Maritim

Dalam konteks negara bangsa maritim, terdapat perbedaan karakter dan identitas antara “masyarakat pulau” (*island society*) dan “masyarakat kepulauan” (*archipelago society*). Masyarakat pulau terdiri dari kumpulan penduduk yang hidup di satu pulau besar atau benua dengan suatu lingkungan sosio-kultural dari satu daratan luas (pulau) yang terpisah dari laut. Kehidupan sosialnya terkonsentrasi di atas daratan yang memiliki sejarah tertentu dan budaya serta bahasa yang homogen. Sedangkan masyarakat kepulauan tinggal di atas pulau yang berbeda-beda dimana laut dianggap sebagai penghubung alami untuk menghubungkan masyarakat antar pulau; darat dan laut yang tidak terpisahkan secara eksistensial; komunitas sosialnya menunjukkan identitas, budaya; adanya keberadaan masyarakat nusantara tertentu dalam interkoneksinya di antara berbagai pulau, dan juga pembangunan kosmologi tertentu dalam keseimbangan struktural darat dan laut (Gaspersz.et.al, 2018).

Problem utama yang mengakar dalam masyarakat kepulauan dan mengancam pembangunan adalah kemiskinan struktural. Perspektif struktural melihat kemiskinan disebabkan oleh faktor luar dimana individu tidak dapat memanipulasi faktor-faktor tersebut (Davids, 2010), sehingga dapat berpengaruh pada kondisi dimana orang miskin hidup: pengangguran, setengah pengangguran, pendidikan yang buruk, dan kesehatan yang buruk (Elesh, 1970).

Dalam kategori masyarakat kepulauan sudah tergambar jelas bahwa masyarakat kategori ini secara sengaja atau tidak telah termarginalkan oleh adanya keterbatasan akses terhadap transportasi, teknologi komunikasi, juga kurangnya ketersediaan bahan dasar lokal dan infrastruktur untuk mendukung pembangunan bersama. Kemiskinan masyarakat kepulauan yang belum berkembang dapat dilihat dari penyebab faktor-faktor kerentanan (*vulnerability*), tantangan geografis, dan kebijakan pembangunan nasional yang sangat eksploitatif daripada rekonstruktif. Faktor-faktor seperti ini mengganggu keseimbangan alam yang, pada gilirannya, mengacaukan sistem tata kosmologis masyarakat nusantara (Gaspersz.et.al, 2018). Untuk itu, kehadiran peran Indonesia dalam skala domestik dan regional Asia Tenggara sangat penting untuk “membebaskan” Indonesia dari karakter kemiskinan struktural sehingga dapat memenuhi pembangunan nasional secara komprehensif dan pembangunan regional sesuai dengan kapasitasnya sebagai negara maritim berdasarkan atas kekuatan geografis, demografis, dan kemampuan *leadership* regional melalui penguatan budaya maritim.

Budaya maritim menjadi suatu unsur penting dalam turut membentuk identitas suatu bangsa. Identitas bangsa Indonesia telah melekat secara konstitusional di dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 35-36C ketika Indonesia ditetapkan sebagai sebuah negara-bangsa. Dengan menjunjung tinggi prinsip “Bhinneka Tunggal Ika” diharapkan mampu membawa keanekaragaman suku bangsa, bahasa, hukum adat, dan budaya lainnya pada satu kesatuan bangsa dan negara, yaitu Indonesia.

Merujuk kepada faktor histori, keanekaragaman yang terbentuk salah satunya bersumber dari letak geografis Indonesia yang berada di antara Benua Asia dan Australia serta dilalui Samudra Hindia dan Pasifik yang menjadikan Indonesia sebagai wilayah persilangan budaya dalam interaksi dan komunikasi antar bangsa di kawasan ini. Sebagai akibat dari intensitas persilangan budaya dan proses penjelajahan dari berbagai bangsa, memunculkan masyarakat Bahari dalam sejarah Nusantara yakni kumpulan masyarakat yang merupakan hasil perpindahan dari masyarakat daratan benua lain ke Nusantara.

Identitas maritim di Nusantara telah melekat sejak kepemimpinan kerajaan-kerajaan maritime di Nusantara, seperti Sriwijaya, Mataram, Singosari, Majapahit. Identitas sebagai kerajaan maritim muncul sebagai akibat dari kemampuannya dalam penguasaan area perairan yang menjadi jalur perdagangan utama Nusantara, pembangunan kapal/perahu dan infrastruktur di kawasan laut/pantai, sampai dengan kemampuannya dalam membentuk undang-undang tertulis tentang pengaturan aktifitas laut.

Indonesia sebagai sebuah negara yang memiliki potensi besar, selain dalam jumlah populasi, juga mengalami pergerakan ekonomi yang luar biasa dengan pencapaian GDP lebih dari

\$930B (ASEANup, 2018) pada tahun 2017 dan terbesar di Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia sebagai salah satu negara yang termasuk dalam *the emerging market* di Asia sekaligus magnet kekuatan di Asia Tenggara, menegaskan perannya dalam turut memperkuat ASEAN *identity* melalui penerapan budaya maritim dalam bidang ekonomi, politik, budaya social, dan keamanan.

Oleh karena sistem nilai budaya merupakan pedoman bagi terselenggaranya sistem sosial yang direpresentasikan dengan kehidupan bersama dan sistem teknologi melalui rekayasa, inovasi dan penggunaan peralatan, maka dalam pembangunan budaya maritim perlu mempertimbangkan sistem nilai budaya maritim itu sendiri. Dalam pembahasan ini, gagasan pengembangan nilai budaya maritim dimulai dari budaya politik maritim, dilanjutkan dengan ekonomi maritim, sosial maritim, dan keamanan maritim.

Budaya Politik Maritim

Masyarakat maritim mempunyai sistem politik yang sangat kental dipengaruhi oleh unsur-unsur kekeluargaan dan social yang berdasarkan nilai dan norma budaya yang mengakar pada masyarakat kelompok nelayan dan pelayar. Dari gabungan berbagai suku bangsa unsur-unsur tersebut terlihat dari kekuatan komunalisme, religius, kolektifitas, rukun dan setia kawan, menjunjung tinggi norma, kreatif-inovatif, sifat berani dan petualang, berani mengambil resiko, adaptif, berwawasan kelautan dan kepulauan, multikulturalisme, nasionalisme, keterbukaan, bijak dalam memanfaatkan lingkungan ekosistem laut dan sekitarnya, efisiensi ekonomi, tolong menolong, memanfaatkan hasil bersama dan adil yang tumbuh berkembang sebagai hasil pengalaman berinteraksi dengan laut, ancaman bahaya dan dinamika situasi dari proses bekerja, dan lingkungan sosial budaya para *stakeholder* dan sosial menjadi kekuatan utama masyarakat maritim dalam mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa. Bangsa Indonesia memelihara nilai-nilai ini dengan memperdalam jati diri bangsa sebagaimana terdapat dalam Konstitusi Indonesia pasal 35-36C, yaitu bahasa Indonesia, bendera negara Merah Putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, lambang negara Garuda Pancasila, semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara Pancasila, hukum dasar UUD 1945, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, konsepsi Wawasan Nusantara, dan Kebudayaan Daerah yang diterima sebagai Kebudayaan Nasional.

Dari skala minor, kesuksesan budaya politik sangat ditentukan oleh kesuksesan bagaimana keluarga membina dan memelihara nilai-nilai luhur tersebut ke dalam sebuah masyarakat. Dalam implementasi yang lebih luas, nilai-nilai kekeluargaan ini terimplementasikan dalam sistem pemerintahan dan pelayanan masyarakat, antara lain *pertama*, pengambilan keputusan politik secara musyawarah mufakat berdasarkan suara mayoritas. *Kedua*, proses penyelesaian hukum

yang diawali secara kekeluargaan. Ketika jalur keluarga sudah tidak mampu menjembatani persoalan maka baru akan ditempuh melalui jalur hukum. *Ketiga*, keluarga turut menjadi rujukan dan menjadi pengaruh dalam pilihan politik seperti partai politik, wakil konstituen, kepala daerah, dan kepala negara. *Keempat*, proses pengambilan kebijakan negara secara rasional dalam level individu yang melibatkan pengaruh dari sisi pengalaman pribadi yang berkaitan dengan keluarga.

Begitu juga dalam kegiatan bermasyarakat, istilah gotong royong masih sering diucapkan dan dilakukan di level masyarakat pedesaan. Gotong royong digunakan sebagai sarana dalam membantu salah satu anggota masyarakat yang memerlukan bantuan dari anggota masyarakat lain untuk memudahkan dan meringankan pekerjaan. Melalui kegiatan gotong royong ini, pemeliharaan dan penguatan nilai-nilai luhur dapat terus berjalan sekaligus mempererat hubungan antar kelompok dan memperkuat norma social.

Dengan demikian mengacu pada pandangan (Johnston, 1995) budaya politik dipandang sebagai kode politik, aturan, resep, dan asumsi yang memaksakan suatu tatanan kasar pada konsepsi lingkungan politik. Budaya terdiri dari asumsi dan aturan keputusan bersama yang memaksakan tingkat ketertiban pada konsepsi individu dan kelompok dari hubungan mereka dengan lingkungan sosial, organisasi atau politik mereka. Dalam hal ini pola budaya dan pola perilaku tidak sama, sejauh bagaimana budaya mempengaruhi perilaku dan berinteraksi dengan lingkungan. Dari pemahaman tersebut, secara teori budaya politik maritim dapat eksis dalam satu kelompok entitas sosial yakni komunitas, organisasi, dan negara maritim. Meskipun (Johnston, 1995) pilihan perilaku mengenai bagaimana budaya strategis ini mempengaruhi pilihan spesifik individu atau kelompok menjadi persoalan kompleks yang tetap akan terkait dengan budaya strategis.

Budaya Ekonomi

Hampir semua negara-negara di Asia Tenggara memiliki sistem ekonomi yang sama berdasarkan tradisi seperti basis produk pertanian dan perikanan atau munculnya pasar-pasar tradisional dan transaksi-transaksi informal di tengah masyarakat. Ekonomi tradisional ini direpresentasikan dengan bervariasinya model pasar malam dan pasar kagetan yang bergerak secara informal dan nomaden. Fenomena pasar malam dan dadakan ini seolah menjadi *trend* di kalangan masyarakat bawah untuk memenuhi *supply* dan *demand* kebutuhan secara tidak terencana namun berpola secara tradisi. *Small Medium Enterprises* (SME) menjadi sebuah istilah modern dalam pelaku ekonomi yang merepresentasikan aktor-aktor ekonomi pada level menengah ke bawah.

Dalam konteks tersebut, pemerintah Indonesia melalui support regulasi, pembangunan infrastruktur dan *human knowledge* terlihat begitu relatif kuatnya dorongan untuk perkembangan SME dalam aktifitas ekonomi. Seperti pada Pemerintahan Jokowi-JK dari sisi ide, telah muncul beberapa inisiatif untuk memajukan SME, walaupun pada skala nasional belum sepenuhnya mencapai target dan hasil yang diharapkan dominasi SME dan *stakeholders* tertentu.

Sosial Budaya Maritim

Salah satu karakteristik dalam budaya maritim adalah keterbukaan pikiran untuk menerima perbedaan pikiran atau dalam istilah lain *open-minded people*. Karena intensitas implementasi secara tidak langsung dari perilaku *open-minded* di kalangan social masyarakat maritim, ketika ide demokrasi masuk dan berkembang akhirnya terbiasa juga dengan system demokrasi. Itulah sebabnya Indonesia sebagai negara yang memiliki bervariasi suku, agama, pandangan, bisa memadukan unsur-unsur tersebut, misalnya antara Islam dengan demokrasi. Sementara di tempat lain khususnya masyarakat pedalaman yang tinggal di daerah kaki-kaki gunung biasanya masih terdapat kendala untuk menerima masyarakat dari luar.

Di kalangan masyarakat maritime, terdapat sebuah istilah: “Di mana pun pantai berada, di situ perahu bebas ditambatkan.” Istilah tersebut dapat dipahami sebagai berikut: Indonesia itu negara pantai. Terlebih dengan luasan pantai dan letak strategis berada di dua samudera besar. Pantai itu milik bersama. Siapa pun bisa menyandarkan perahunya. Oleh karena itu, budaya maritim seperti kebanyakan masyarakat Indonesia yang hidup di pinggir pantai sudah terbiasa menerima tamu dari berbagai suku, agama, kelompok, dan negara. Mereka bisa menerima kehadiran orang yang berbeda. Kehadiran mereka yang berbeda itu tidak diterjemahkan sebagai musuh, tapi justru dianggap dan sering diperlakukan sebagai sahabat.

Karena itu, hasil dari *positive thinking*-nya masyarakat Indonesia memunculkan perilaku ramah-tamah, dan ini menjadi karakteristik yang bahkan menjadi model bagi negara lain. Sisi keramahtamahan penduduk maritime seolah mewakili keindahan alam Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat pesisir dan maritim lebih kuat tradisi dan religinya. Bahkan, jika mengambil contoh dari salah satu agama, Islam, mereka dapat menjadi contoh simbol dari Islam Indonesia yang modern. Dalam ajarannya, Islam tidak mengenal falsafah kebencian ataupun tidak mudah menghakimi orang lain. Sesuai dengan jati diri Indonesia yang mengenal falsafah Bhinneka Tunggal Ika-pun juga memberikan semacam doktrin meskipun berbeda-beda tetapi kita tetap hidup dalam satu kesatuan kemanusiaan.

Keamanan Maritim

Dalam sejarah maritim Indonesia, laut menjadi kekuatan pemersatu wilayah, bukan sebagai pemisah antar wilayah Nusantara, dan lebih luasnya Kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu untuk turut mengamankan wilayah Nusantara, sarana transportasi dan komunikasi harus terus ditingkatkan dan diintegrasikan untuk dapat menjangkau wilayah-wilayah yang berada seluruh pelosok kepulauan Indonesia.

Indonesia memiliki jangkauan dan nilai kekayaan laut yang luas, dan bisa dikelola serta dimanfaatkan secara ekonomis dan non ekonomis. Dari total produksi perikanan menurut *region* Asia Tenggara tahun 2015 sebanyak 44 juta metric ton, produksi Indonesia adalah yang paling tinggi yaitu 50.3% dari total produksi Asia Tenggara, diikuti oleh Vietnam dengan 14.9% dan Myanmar sebesar 12.1% (SEAFDEC, 2018). Sedangkan untuk produksi tangkap laut Asia Tenggara, dari total 16.72 juta metric ton dengan nilai \$19.48 juta, Indonesia menyumbang jumlah produksi tertinggi yaitu 36.2% atau 6.06 juta metric ton disusul Myanmar dengan 17% atau 2.85 juta metrik ton dan Vietnam dengan 16.9% atau \$2.84 juta (SEAFDEC, 2018). Namun pada kenyataannya, pada masa ini pengelolaan kekayaan sumber alam laut belum maksimal dan bahkan tertinggal dibandingkan dengan pengelolaan di negara-negara Asia Tenggara yang pendapatan perikananannya lebih sedikit. Pada hakikatnya, luasnya laut menjadi sebuah kekuatan bagi negara dalam *maritime trade* atau *maritime security*, namun persoalan di Indonesia justru malah menjadikannya rentan terhadap ancaman yang dapat mengganggu keamanan dan kesejahteraan rakyat.

Sekilas, resiko dan ancaman di laut Indonesia bisa dibedakan menjadi dua jenis ancaman yaitu traditional maupun non-traditional. Ancaman traditional adalah resiko yang datang dari semua unsur yang mampu mempengaruhi keamanan maritim baik yang timbul dari tindakan negara lain atau ketentaraan yang disengaja yang bersifat penjajahan atau intervensi. Adapun ancaman yang non-traditional bersumber dari semua unsur yang menargetkan keamanan kemanusiaan seperti Terorisme, Penyelundupan, Pembajakan, Pertambahan Penduduk, tindakan melawan warisan budaya bawah air, imigran gelap, ancaman dunia maya serta eksploitasi SDA laut illegal dan perilaku serta kondisi alam lingkungan, misalnya bencana alam dan kecelakaan maritim.

Untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah laut Negara, serta pencapaian kemakmuran ekonomi bangsa dan rakyatnya, setiap negara memiliki strategi keamanan laut (nasional) sendiri. Bagi Negara maritime, dari sinilah kemudian diturunkan konsep Keamanan Maritim (*Maritime Security*), sehingga jelas terlihat bahwa Keamanan Maritim merupakan subordinat dari Strategi Keamanan Nasional yang difungsikan untuk menjaga kedaulatan dan

keutuhan wilayah Negara Maritim. Dalam Strategi Keamanan Nasional biasanya berbentuk strategi (*grand Strategy*) menjaga keamanan dan pertahanan sekaligus untuk mencapai kepentingan nasional (*National Interest*).

Grand strategy dalam meningkatkan budaya maritim yang dilakukan oleh Indonesia adalah mengikuti sistem pertahanan dan ketahanan nasional melalui konsep “ketahanan nasional” (*national resilience*). Dalam isu keamanan dan pertahanan maritim, Indonesia masih melihat doktrin dan prinsip-prinsip dasar dari Strategi Keamanan Nasional sepenuhnya yang berlaku untuk bidang keamanan maritim dan harus memandu garis aksi yang ditetapkan dalam Strategi ini.

Selain itu, kepentingan nasional yang diartikan sebagai sasaran dan tujuan yang akan dicapai oleh suatu negara dalam berinteraksi dengan ruang lingkup kemaritiman juga perlu dicapai. Diantara kepentingan nasional yang bisa dilihat dari negara maritim adalah kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara, serta pencapaian kemakmuran ekonomi bangsa dan rakyatnya. Seiring dengan keamanan dan pembangunan ekonomi, penegakan hukum dan keselamatan laut serta tata kelola kelembagaan laut termasuk ekonomi, infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat juga termasuk didalamnya sarana, prasarana dan industri maritim perlu dijadikan sebagai proyek nasional. Seperti, pengelolaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di laut, budaya dan warisan arkeologi bahari. Hal lain yang juga tidak kalah penting adalah perlindungan manusia terutama saat berada di laut sebagai salah satu hak asasi yang perlu dilindungi. Perlindungan ini wajib menjadi salah satu agenda nasional penting jika suatu negara hendak mengklaim bahwa negara tersebut merupakan negara maritim.

Dalam konteks ini, Indonesia memahami keamanan dan pertahanan secara menyeluruh dalam konsep “ketahanan nasional/*national resilience*”. Ketahanan nasional mencakup semua aspek kehidupan termasuk, ideologi, politik, ekonomi, social tanpa meninggalkan elemen militer. Ketahanan nasional merupakan konsep keamanan dan pertahanan pada era Presiden Soeharto yang digodok oleh BAPENAS untuk menanggulangi ancaman dari dalam dan luar negeri (Sebastian, 2006, p. 11).

Anwar (2000) menjelaskan ketahanan nasional sebagai berikut: “...*perseverance and tenacity which enable the development of national strength to cope with all challenges, threats, obstacles and disturbances coming from outside as well as from within the country, directly or indirectly endangering the national identity, integrity, survival and the struggle for national objectives*“ (Anwar, 2000, p. 84).

Konsep ketahanan nasional mempunyai karakteristik yang “*inward-looking*.” Ini bermakna bahwa tujuan utamanya adalah pencapaian keamanan dan identitas nasional dengan kemandirian atau “*self-reliance*” (Lemhanas, sebagaimana dikutip oleh Anwar, 2000, p. 85). Kedua, ketahanan nasional juga, menurut Algappa (sepertimana dikutip oleh Sebastian, 2006, p. 11) mempunyai rasa nasionalisme yang kuat, karena merasakan perjuangan yang panjang dalam mendapatkan kemerdekaan dan proses yang rumit serta susah dalam membangun bangsa, karena keterlibatan pihak asing yang disebabkan oleh konflik di dalam negeri antara fraksi dan golongan.

Kehidupan berbangsa di Indonesia direfleksikan dengan delapan aspek yang disebut dengan ASTRAGATRA, yang terdiri 3 aspek natural dan 5 aspek social. Tiga aspek (*trigatra*) mencakupi letak geografi, sumber daya alam, dan kemampuan rakyat (Anwar, 2000). Adapun 5 aspek (*pancagatra*) sosial mencakupi factor ideologi, politik, ekonomi, sosail budaya, serta pertahanan dan keamanan (Anwar, 2000, p. 85). Multidimensi aspek keamanan dan ketahanan nasional tergantung kepada kemampuan dan kapabilitas negara bangsa untuk meggunakan tiga aspek natural tersebut sebagai pondasi untuk membentuk dan menciptakan lima aspek social bangsanya. Oleh karena itu, aspek-aspek ini sangat berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Jika negara lemah dalam mengelola sebagian aspek naturalnya, maka akan mempengaruhi kelemahan dan kemunduran pada aspek social lainnya.

Sejak presiden Joko Widodo menggantikan peran kepemimpinan Indonesia pada tahun 2014, Indonesia menamakan negaranya sebagai negara maritim, dan sedang berusaha untuk menata negara berdasarkan konsep negara maritim. Oleh karena itu, Indonesia memperkenalkan inisiatif baru seperti Poros Dunia Maritim (*Maritim Fulcrum/Nexus*).

Peran Indonesia dalam Memperkuat Budaya Maritim di Asia Tenggara

Dalam menjalin kerjasama dengan sesama negara maritim di Asia Tenggara, maka yang diperlukan adalah membangun hubungan yang konstruktif berdasarkan bilateral antara Indonesia dan negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Kemunculan isu-isu atau konflik dianatara negara-negara tetangga sebenarnya disebabkan oleh ketiadaan *shared* dan *common knowledge* yang membentuk identitas kolektif yang tercantum pada empat faktor seperti *interdependence*, *common fate*, *homogeneity*, dan *self restraint*. Persengketaan perbatasan di pulau Ambalat merupakan akibat dari ketiadaannya *self restraint* dari kedua negara dan mengutamakan kepentingan nasional khususnya pada sumber kekayaan alam yang terdapat di pulau tersebut dan kesatuan teritorial.

Begitu juga dengan isu tenaga kerja Indonesia (TKI), dan penangkapan ikan secara illegal yang kedua negara tidak mempunyai rasa *collective identity* (identitas kolektif), khususnya ketidaksamaaan dalam melihat ketergantungan (*interdependence*) antara kedua negara dalam isu

TKI. Indonesia melihatnya sebagai usaha menciptakan ketergantungan yang sehat, dimana masyarakat Indonesia boleh kerja dan dapat uang untuk menghidupi keluarganya, dan diwaktu yang sama, seperti Malaysia mendapatkan kemajuan dari hasil buruh Indonesia. Berbeda dengan harapan di Indonesia, masyarakat Malaysia justru melihat TKI (legal maupun illegal) menjadi sebuah ancaman terhadap keamanan dan kestabilan politik di Malaysia hingga terdapat usaha-usaha untuk memberhentikan pengambilan tenaga kerja dari Indonesia (Liow, 2003).

Illegal logging merupakan isu yang sebenarnya dipicu oleh masyarakat kedua negara yang tidak bertanggung jawab kepada negaranya masing-masing. Pemerintahan kedua negara dalam isu *illegal logging* ikut bertanggung jawab karena ini merupakan tindakan para oknum baik dari kalangan masyarakat maupun jajaran pejabat pemerintah kedua negara yang terlibat dalam kasus ini. Sehingga apabila mereka yang melakukan atau terlibat dalam aktivitas ini mampu bertanggung jawab maka niscaya kedua negara mampu menanggulangi tantangan tersebut secepat mungkin. Maka, untuk menanggulangi isu ini perlu lebih ditingkatkan kerjasama keamanan antara kedua negara khususnya di sepanjang perbatasan laut.

Isu-isu yang berkaitan dengan masalah lingkungan dan masyarakat di kedua negara sebenarnya banyak yang muncul dikarenakan ketidakfahaman dan mencoba untuk membedakan identitas yang sebenarnya mempunyai unsur kolektif dan dijadikannya menjadi identitas nasional yang sempit. Salah satu penyebabnya adalah ketiadaannya pengetahuan bersama (*common knowledge*) dan perbedaan cara dalam memahami isu-isu tersebut baik di kalangan masyarakat maupun pemerintahan kedua negara.

Oleh karena itu, dengan ketiadaan pengetahuan bersama khususnya pada kelompok kaum muda di kedua masyarakat Indonesia dan Malaysia, maka pihak ketiga dengan menggunakan alat (*tool*) seperti internet, media ceta, dan media elektronik lainnya semakin mudah untuk menyebarkan isu-isu perselisihan paham mulai dari masalah antar kerajaan hingga pada masalah individu dan golongan rakyat Indonesia dan Malaysia. Pada akhirnya peranan media yang memaparkan maklumat kepada segenap lapisan masyarakat sangat berperan dalam memperluas perselisihan faham di kalangan masyarakat kedua negara.

Media masa pada era maklumat kini tidak terbatas pada sumber-sumber tertentu seperti koran, majalah, televisi, radio dan media tradisional lainnya, tetapi juga mencakup media internet seperti melalui *website*, email, blog, dan pesan ringkas seperti SMS, MMS, *chats* dan sebagainya. Kajian tentang peranan surat kabar dalam hubungan Malaysia-Indonesia telah banyak dilakukan dan hasilnya kebanyakan menunjukkan ketidaksamaan cara memandang dalam berbagai isu seperti diumpamakan oleh Md Sidin Ahmad Ishak dan Junaidi, bagai air dengan tebing (Ishak & Junaidi, 2009).

Perselisihan paham antara masyarakat kedua negara pada sekarang ini, tidak lain dan tiada bukan, diperkuat hanya karena pengaruh media-massa dan internet, khususnya, melalui *website* and *blog* yang memprovokasi masyarakat kedua negara dalam isu-isu mulai dari pengakuan perbatasan, dan budaya maritim. Media sebetulnya dijadikan alat oleh pihak tertentu untuk menjadikan hubungan antara masyarakat khususnya dalam level keadaan yang tidak harmoni, dan turut menjadikan hubungan pemerintahan juga terlibat dalam perselisihan. Maka dari itu, akan ada pihak-pihak yang bertepuk tangan riang sambil menyaksikan dan bahkan meraih manfaat dari keadaan yang tidak harmoni diantara kedua negara. Media seharusnya tidak dijadikan instrumen yang mengganggu hubungan masyarakat kedua negara maritim. Sebaliknya, media-massa harus menjadi *instrument* dalam membina hubungan yang harmoni melalui pembentukan ”*collective identity*” yang dapat pula terbentuk melalui penggunaan efektif media. Begitu juga dengan negara-negara maritim yang lainnya di Asia Tenggara.

”Collective Identity” sebagai penguat budaya maritim di Asia Tenggara

Salah satu kerangka yang muncul pada zaman post-positivisme ini adalah apa yang dikenal dengan “collective identity” yakni usaha untuk memahami identitas dan kepentingan. Pendekatan ini diajukan oleh Alexander Went dalam konstruksi sosial pada tingkat politik internasional (Went, 1999). Dalam pendekatan ini, Went menggagas pendekatan konstruktivis sebagai alternatif untuk memahami hubungan internasional baik secara bilateral maupun multilateral. Menurut Went, norma-norma dalam politik dan hubungan internasional sebenarnya terbentuk dari pemahaman identitas sebuah masyarakat di sebuah negara. Sehingga norma anarkis yang dipahami oleh realist sebenarnya adalah tidak terwujud, dan akan terwujud dengan hanya bergantung pada apa yang dilakukan oleh negara, dan bagaimana masyarakat di sebuah negara mengidentifikasi diri mereka dengan masyarakat di negara lain. Dengan terbentuknya sebuah identitas kolektif maka dengan itu akan muncul sebuah kepentingan bersama atau yang dikenal *shared interest*.

Dengan adanya identitas kolektif menurut Went, ada empat faktor penting yang harus dibina oleh setiap masyarakat. Faktor-faktor tersebut adalah '*interdependence*', '*Common Fate*', '*Homogeneity*', dan '*Self-Restraint*' (Went, 1999). Konsep *interdependence* atau saling ketergantungan adalah konsep yang sangat populer pada pendekatan liberalisme dalam menggalang kerjasama di tingkat internasional. Namun pada liberalisme, ketergantungan antara negara hanyalah sebatas ketergantungan kepentingan dan tidak mempelajari bagaimana aktor-aktor saling bergantung apabila perubahan pada satu aktor atau negara akan mempengaruhi aktor lain dan hasil perubahan itu juga sebenarnya bergantung pada pilihan aktor lain. Menurut Went,

saling ketergantungan menyebabkan para aktor, baik masyarakat atau negara, untuk terlibat dalam “ideological labour” – *berbentuk perbincangan, diskusi, pendidikan, dan sosialisasi*- untuk menciptakan representasi bersama tentang saling ketergantungan dan rasa kekitaan (Went, 1999). Untuk meniadakan adanya unsur eksploitasi dalam ketergantungan, Went menyarankan agar masyarakat harus kembali pada budaya Lockean (Lock, 1980).

Common fate (nasib yang sama) meliputi tingkah laku (*behaviour*) dan identitas. Dalam hubungan internasional, *common fate* selalu disebut dalam pendekatan realist sebagai kepentingan bersama (*common interest*). Oleh karena itu, kerjasama akan mudah untuk dicapai tatkala kepentingan beberapa aktor itu sama. Dalam pendekatan konstruktivis, *common fate* meliputi dua elemen baik dalam tindakan maupun identitas. Oleh karena itu, *common fate* merupakan elemen penting untuk membentuk identitas kolektif di dalam negeri maupun tingkat internasional.

Homogeneity atau kesamaan antara beberapa aktor juga sangat penting dalam membangun identitas kolektif. Untuk membentuk adanya persamaan, tidak cukup hanya dengan budaya, bahasa, agama dan tatanan sosial yang sama, tetapi perlu adanya persamaan dalam nilai dan praktek kehidupan sehari-hari. Lebih dari itu, kesamaan akan mudah membentuk identitas kolektif meskipun aktor-aktor politik internasional baik dalam skala bilateral atau multilateral mampu menyamakan ideologi dan nilai pada tingkat identitas dan juga tindakan.

Self-Restraint (daya kontrol terhadap diri sendiri) diperlukan untuk menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu terbentuknya identitas kolektif. Ini karena telah banyak usaha kerjasama dan saling ketergantungan telah berubah menjadi sistem eksploitasi yang disebabkan karena tidak adanya daya kontrol untuk tidak menjadi aktor yang rakus. Pendekatan konstruktifis ini dalam menjelaskan hubungan bilateral, multilateral antara Indonesia dan negara negara maritim lainnya seperti Malaysia di Kawasan Asia Tenggara diharapkan mampu menjelaskan akar permasalahan perselisihan paham dan mampu memberikan solusi alternatif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara tersebut yang seharusnya mempunyai identitas kolektif sebagaimana telah terjadi dalam sejarah.

Kesimpulan

Dalam memperkuat budaya maritim di Kawasan Asia Tenggara, Indonesia sepatutnya membuat koordinasi dan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara untuk menunjukkan, mendorong, dan membentuk identitas bersama (*collective identity*) agar semua negara menyadari akan pentingnya kerjasama dan keterlibatan bersama dikalangan negara maritim. Untuk selanjutnya supaya lebih kokoh lagi Indonesia dalam membawa *one ASEAN identity* yang dimulai dengan kesamaan budaya maritim di kawasan Asia Tenggara. Peran yang harus dimainkan oleh

Indonesia sebagai negara maritim terbesar adalah menyatukan *identity* ASEAN yang dimulai dengan penyebaran dan penguatan budaya maritim yang dikenal *open-minded positive-thinking*, gotong royong dan mampu membangunkan kesadaran *collective identity* di negara negara Asia Tenggara yang lainnya.

Daftar Pustaka

- Anwar, D. F. (2000). National versus regional resilience? An Indonesian perspective. In D. D. Cunha (Ed.), *Southeast Asian Perspectives on Security* (pp. 81-96). Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Sebastian, L. C. (2006). *Realpolitik Ideology: Indonesia's Use of Military Force*. ISEAS Publications. Singapore.
- ASEANup. (2018, March 26). Retrieved from ASEANup: <https://aseanup.com/indonesia-infographics-population-wealth-economy/>
- International Maritime Organization. (2017, April). *Implementing sustainable maritime security measures in West and Central Africa*. Retrieved October 10, 2018, from IMO: http://www.imo.org/en/OurWork/Security/WestAfrica/Documents/WCA%20Strategy_English_April%202017.pdf
- African Union. (2012). Retrieved October 10, 2018, from http://cggrps.org/wp-content/uploads/2050-AIM-Strategy_EN.pdf
- The Institute of East and West Studies. (1995). Marine Policy, Maritime Security and Ocean Diplomacy in the Asia-Pacific. (D. K. et.al, Ed.) *East and West Studies Series 37*, pp. 3-17.
- Gaspersz.et.al, S. G. (2018). The Welfare-Based Development in The Context of Maritime Culture: Encounters with anthropological perspective. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. 175, p. 3. IOP Publishing.
- Dauids, Y. D. (2010). *Explaining Poverty: A Comparison Between Perceptions and Conditions of Poverty in South Africa*. PhD Thesis, Stellenbosch University, Department of Political Science.
- Elesh, D. (1970). *Poverty Theories and Income Maintenance: Validity and Policy Relevance*. Research Grant, Wisconsin University, Institute for Research and Poverty.

- Roza, E. (2017, September 1). *kkp*. Retrieved October 13, 2018, from Kementerian Kelautan dan Perikanan: <https://kkp.go.id/artikel/2233-maritim-indonesia-kemewahan-yang-luar-biasa>
- Statistics Indonesia. (2017, Nivember 21). *Statistics Indonesia*. Retrieved October 11, 2018, from Statistics Indonesia: <https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/05/1366/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-provinsi-2002-2016.html>
- Johnston, A. I. (1995). Thinking about Strategic Culture. *International Security*, 19(4), 45-46. Retrieved October 11, 2018, from <http://www.fb03.uni-frankfurt.de/45431264/Johnston-1995---Thinking-about-Strategic-Culture.pdf>
- SEAFDEC. (2018, October 16). *Southeast Asian Fisheries Development Center*. Retrieved October 2018, from Southeast Asian Fisheries Development Center: <http://www.seafdec.org/fishstat2015/>
- Went, Alexander. (1999). *Social theory of International Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ishak, Md Sidin Ahmad dan Junaidi. (2009). “Peranan Surat Khabar dalam Hubungan Malaysia-Indonesia: Bagai Aur dengan Tebing.” dalam *Setengah Abad Hubungan Malaysia-Indonesia*. Kuala Lumpur: Arah Publications; (pp.380-399).
- Lock, John. (1980). *Second treatise of Government*. Edited by C. B. Mc Pherson. Indiana & Cambridge: Hacket Publishing Company.
- Liow, Joseph Chinyong. (2003). *The Politics of Indonesia-Malaysia Relations: One Kin Two Nations*. London dan New York: Routledge Curzon.

Indonesia dan Rezim *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982: Lika-Liku Perjuangan dan Relevansi Kepentingan Maritim Era Kekinian

Arthuur Jeverson Maya
Universitas Kristen Indonesia
Arthuur.jmaya@uki.ac.id

Abstrak

Indonesia adalah salah satu pemain kunci yang memperjuangkan kelahiran UNCLOS 1982 dalam Konferensi UNCLOS III di Montego Bay, Jamaika. Ia meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Ini menjadi rezim mengatur perilaku untuk mencapai kepentingan maritimnya sampai saat ini. Makalah ini bertujuan mengetahui lika-liku proses perjuangan dan relevansi aturan main rezim terhadap kepentingan maritim tersebut di era kekinian. Pemecahan masalah menggunakan teori strategi diplomasi warrior dan shopkeeper dari Harold Nicolson, teori relevansi rezim (internasional) berbasis kepentingan dari Andreas Hasenclever, Peter Mayer, dan Volker Rittberger, ditambah konsep kepentingan maritim nasional Natalie Klein. Hasilnya ditemukan perjuangan Indonesia ditempuh melalui negosiasi menggunakan kekuatan nasional membuatnya gagal dalam Konferensi UNCLOS I (1958) dan UNCLOS II (1960), namun berhasil di Konferensi UNCLOS III (1982) ketika menggunakan kompromi. Kendati demikian rezim UNCLOS 1982 yang diadopsinya tidak relevan karena merugikan kepentingan maritim berkaitan aspek kontrol kedaulatan laut tidak utuh, ancaman keamanan, kerugian ekonomi, dan masalah sosial.

Kata kunci: *UNCLOS 1982, strategi diplomasi, relevansi rezim Internasional berbasis kepentingan, kepentingan maritim Indonesia.*

Abstract

Indonesia is one of the key players who fought for the birth of UNCLOS 1982 at the UNCLOS III Conference in Montego Bay, Jamaica. It ratified through Law Number 17 of 1985. This became international regime regulated behavior to achieve its maritime interests. This paper aims to determine of the struggle and relevance of the regime to the Indonesian maritime interests in present era. For problem solving uses warrior and shopkeeper diplomacy strategy theory from Harold Nicolson, relevance interest-based regimes theory from Andreas Hasenclever, Peter Mayer, and Volker Rittberger, and national maritime interest concept from Natalie Klein. The result found Indonesian through struggles pursued negotiations using national power made fail at the UNCLOS I Conference (1958) and UNCLOS II (1960), but succeeded at the UNCLOS III Conference (1982) when using compromise. Nevertheless the UNCLOS regime of 1982 irrelevant because impacted costs maritime interests related uncontrollability sovereignty of the sea, security threats, economic losses, and social problems.

Keywords: *UNCLOS 1982, diplomacy strategy, relevance interest-based regimes, Indonesian maritime interest.*

Latar Belakang Permasalahan

“Lautan gelap adalah rahim kehidupan. Dari melindungi samudera kehidupan muncul. Kita memilikinya dalam tubuh kita, dalam darah kita, dengan keasinan air mata kita ... Mencabut masa lalu, manusia, penggerak bumi yang ada sekarang, kembali ke kedalaman lautan. Penguasaan [lautan] bisa menandai awal dari akhir peradaban manusia, dan untuk kehidupan seperti yang kita kenal di bumi ini. Juga bisa menjadi kesempatan terunik untuk meletakkan fondasi yang kokoh bagi masa depan yang damai dan semakin sejahtera bagi semua orang.” (Avid Pardo). (Buttigieg 2012)

Pada tahun 1609, Hugo de Grotius mempublikasikan pemikiran “*Mare Liberium*” mengenai prinsip-prinsip “*Res Communis*,” lautan yang bebas dan tidak dapat dimiliki negara manapun. Ia ditentang Jhon Selden melalui “*Mare Clausum*” tentang “*Res Nullius*” tahun 1635. Dia berkata “okupasi adalah unsur penting dalam kepemilikan, sejarah membuktikan negara-negara telah menjalankan kekuasaannya atas kelautan ... [oleh sebab itu] lautan dapat diambil, dimiliki, dan dikelola oleh mereka apabila dikehendaki (Tanaka, 2012). Tahun 1702, Cornelis Bynkershoek mengkritik ketidakjelasan Seldon mengenai ukuran kontrol negara atas lautan dengan menerbitkan “*De Dominio Mares*” berbunyi “kedaulatan teritorial [negara] berakhir ketika kekuatan senjata berakhir.” (Tanaka, 2012). menjadi doktrin teritorial laut (UNCLOS 1982). sejauh tiga mil mengacu jarak tembakan peluru meriam pantai. Ini adalah titik penting kelahiran hukum laut internasional modern.

Mulai tahun 1793, Amerika Serikat (AS), Inggris, Perancis, Kanada, Spanyol, Portugal, Jerman, dan negara-negara maritim besar lain menetapkan 3 mil teritorial laut mereka, sambil bertikai menentukan perairan netral untuk pelayaran hingga berakhirnya perang dunia I (pertama) (Tanaka, 2012). Terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa (LBB) melahirkan Konferensi Kodifikasi Den Haag bulan Maret-April 1930 menuntaskan konsep laut teritorial, kendati belum disepakati limitnya, tanggung jawab dan yurisdiksi negara pantai atas kapal-kapal asing, hak lintas damai dan pengejaran seketika, dan kewarganegaraan di lautan. Pasca perang dunia II, Inggris dengan Norwegia bersengketa di Mahkamah Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas kepemilikan dan pemanfaatan kekayaan perikanan laut sejauh empat mil. AS mengeluarkan Deklarasi Truman tentang landas kontinental¹ untuk mengeksplorasi kekayaan alam dasar laut dan tanah di bawahnya.

Mempertimbangkan persatuan, kepentingan, keamanan, dan keselamatan bangsa, Indonesia menetapkan Deklarasi Djuanda yang kontroversial, ditentang, dan dikecam oleh banyak negara maritim dan mantan kolonial untuk diperjuangkan menjadi hukum laut internasional (*United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS*). Ia gagal dalam Konferensi UNCLOS I di Jenewa, Swiss, tanggal 29 April 1958, dan gagal kembali di putaran Konferensi UNCLOS II tanggal 17 Maret-26 April 1960, bertempat sama. Ini baru berhasil ketika putaran Konferensi UNCLOS III berlangsung yang berpuncak tanggal 10 Desember 1982, di Montego Bay, Jamaika, 118 negara menandatangani UNCLOS III menyepakati 320

¹ Landas kontinental adalah kepemilikan suatu negara terhadap dasar laut dan tanah bawah permukaan lautan berjarak tertentu berlaku kedaulatan observasi, eksplorasi, dan eksploitasi sumber daya alam, termasuk pemasangan dan pemanfaatan instalasi kabel dan pipa bawah laut. United Nations, p. 49.

pasal dan sembilan lampiran mengenai pengaturan lautan termasuk seluruh prinsip Deklarasi Djuanda. (Tanaka 2012; UNCLOS 1982).

Kelahiran UNCLOS 1982 mendapat reaksi positif Indonesia dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 (UU Nomor 17 Tahun 1985) meratifikasinya. Ia menjadi rezim dipertahankan tanpa perubahan untuk mengatur perilakunya hingga saat ini, kendati banyak masalah maritim yang dihadapi belum tuntas, kompleks, berlarut-larut, dan menuntut kecanggihan pemecahan masalah, seperti sengketa perbatasan laut dengan negara-negara tetangga, pemancingan ilegal, pembajakan kapal, kerusakan lingkungan, dan lainnya. Ada pemikiran aturan main rezim UNCLOS 1982 semakin kurang relevan dengan rencana strategis pencapaian kepentingan maritim nasional era sekarang seiring terpaan globalisasi yang semakin masif (Hong 2012).

Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dirumuskan permasalahan mengacu pertanyaan bagaimana lika-liku perjuangan Indonesia dalam kelahiran rezim UNCLOS 1982?, dan apakah rezim tersebut semakin “relevan” atau “tidak relevan” dengan kepentingan maritim Indonesia era kontemporer saat ini?

Tujuan dan manfaat

Makalah ini bertujuan mengetahui “cerita terpendam” dari perjuangan Indonesia dibalik kelahiran rezim maritim UNCLOS 1982, dan tingkat relevansi (relevan atau tidak relevan) terhadap kepentingan maritimnya di era sekarang. Ia bermanfaat untuk memberikan telaah kritis dan rekomendasi positif bagi PBB, komunitas internasional, pemerintah Indonesia, dan akademisi untuk meninjau ulang kembali pasal-pasal UNCLOS III yang telah usang dan tidak relevan di era sekarang, sekaligus penyesuaiannya terhadap pencapaian kepentingan maritim Indonesia.

Kerangka teoritik

Kerangka teoritik untuk menjawab permasalahan menggunakan teori strategi diplomasi *warrior* dan *shopkeeper* dari Harold Nicolson, teori relevansi rezim (internasional) berbasis kepentingan (*relevance interest-based regimes, RIbR*) dari Andreas Hasenclever, Peter Mayer,

dan Volker Rittberger, ditambah konsep kepentingan maritim nasional (*national maritime interest*, NMI) Natalie Klein.

Strategi diplomasi *warrior-shopkeeper*

Nicolson menyebut diplomasi sebagai kegiatan terpenting politik luar negeri suatu negara menyasarkan pembangunan hubungan internasional melalui keterampilan negosiasi yang kompleks untuk mempengaruhi aktor-aktor internasional agar sejalan dan menyetujui tujuan nasional yang telah ditetapkan (sharp, 2009). Ia memiliki empat pola, yaitu: (1) bilateral, negosiasi tertutup antara dua negara mengharapkan timbal balik kepentingan; (2) multilateral, negosiasi terbuka antara tiga atau lebih negara yang saling mengemukakan pandangan pemecahan masalah bagi kepentingan bersama; (3) asosiasi, negosiasi dua atau lebih negara dengan cara membentuk persahabatan, perserikatan, dan persekutuan untuk kepentingan bersama; dan (4) konferensi, negosiasi tiga atau lebih negara dalam forum-forum formal menggunakan prosedur parlementer agar mencapai konsensus pemecahan masalah demi kepentingan bersama. (Roy, 1995).

Keempat pola diplomasi dikelola oleh utusan duta besar (diplomat) baik pemerintah dan/atau non-pemerintah yang keberhasilannya dapat ditentukan dua strategi, yaitu (1) 'ksatria' (*warrior*), atau (2) 'penjaga toko' (*shopkeeper*). Diplomasi ksatria mengajarkan teknik negosiasi menimbulkan kegaduhan dan rasa takut internasional karena menekankan kekuatan nasional, —status, superioritas, keunggulan ekonomi, dan/atau kedigdayaan militer. Berbanding terbalik ketika suatu negara menggunakan diplomasi *shopkeeper*. Ia berupaya meraih kemenangan negosiasi dengan mengedepankan hubungan persahabatan, saling pengertian, dan berkonsekuensi timbal balik memuaskan melalui kompromi (Sharp, 2009). Ini digunakan penulis untuk menganalisis lika-liku perjuangan Indonesia dalam kelahiran rezim UNCLOS 1982.

Relevance interest-based regimes

Landasan untuk menganalisa relevansi kepentingan maritim Indonesia dengan rezim UNCLOS III era kontemporer menggunakan pendekatan RIbR oleh Hasenclever, Mayer, dan Rittberger. Mengikuti Stephen Krasner, mereka mendefinisikan rezim internasional "seperangkat prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan mengatur ekspektasi [kepentingan] para anggotanya dalam berperilaku di area hubungan internasional." Prinsip adalah keyakinan mereka atas kebenaran, fakta, dan penyebab dari suatu permasalahan. Norma

merupakan standar perilaku mereka yang dituangkan berdasarkan hak dan kewajiban untuk menyikapinya. Aturan sebagai ketentuan-ketentuan spesifik mengenai keharusan atau larangan berkenaan perilaku mereka. Dan prosedur pembuatan keputusan menjadi praktek-praktek umum untuk membuat dan mengimplementasikan prinsip, norma, dan aturan tersebut (Hasenclever et al ., 2004)

Menentang realisme yang (dianggap) terlalu memaksakan kekuatan (*power*), perspektif neo-liberalisme menekankan kepentingan (*interest*) sebagai basis perilaku negara mengikuti rezim internasional. Ia menciptakan RibR meyakini pembentukan, pengadopsian, dan keikutsertaan negara terhadap rezim harus memiliki relevansi (keterkaitan) erat dengan kepentingan nasional melalui pertimbangan rasionalitas “untung” dan “rugi.” Hanya aturan main rezim yang menguntungkan kepentingan tersebut menjadi relevan sehingga penting untuk dijaga dan dipertahankan oleh penganutnya, apabila merugikan maka tidak relevan, dan sepantasnya rezim dimaksud gugur digantikan rezim lain yang lebih canggih untuk memecahkan permasalahan-permasalahan dihadapi (Hasenclever et al ., 2004)

National maritime interest

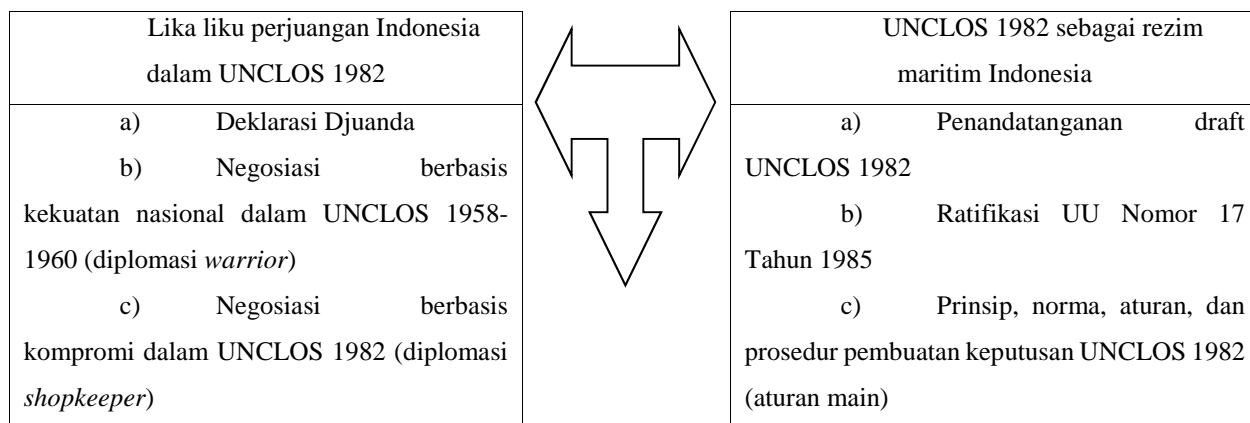
Mempertajam analisis relevansi RibR di atas ditambahkan konsep kepentingan nasional perspektif maritim. Ia disebut Klein sebagai NMI menjadi bentuk harapan suatu negara-bangsa yang ingin dicapai menyesuaikan tujuan dan cita-cita nasional berkaitan langsung dengan pengelolaan nilai-nilai lautan. Ini terbagi empat aspek penting yaitu politik, keamanan, ekonomi, dan sosial (Klein,2011): Aspek politik adalah kepentingan sentral negara atas lautan dalam mengontrol dan mengatur urusan kedaulatan lautan.

Aspek keamanan berupa perlindungan atas kedaulatan lautan, kekayaan di dalamnya, kapal dan/atau warga negara yang ada dari kemungkinan-kemungkinan ancaman, baik bersifat tradisional berbentuk agresi negara lain, maupun non tradisional dari para aktor non negara. Aspek ekonomi berkenaan pemanfaatan lautan bersama kekayaannya untuk kesejahteraan bangsa melalui aktivitas-aktivitas navigasi, pelayaran, pelabuhan, pariwisata, dan eksploitasi sumber daya laut dan dasar tanah di bawahnya. Dan, aspek sosial sebagai penggunaan lautan menjadi sendi-sendi kehidupan dalam agenda pembangunan berkelanjutan masyarakat pesisir negara bersangkutan (Klein, 2011).

Berdasarkan uraian teori strategi diplomasi *warrior-shopkeeper* dan RibR dari Nicolson, Hasenclever, Mayer, dan Rittberger, ditambah konsep NMI Klein dijadikan landasan penulis menjelaskan lika-liku perjuangan Indonesia dalam kelahiran rezim maritim UNCLOS

1982, dan tingkat relevansi terhadap kepentingan maritimnya di era kekinian sebagaimana Bagan 1 berikut:

Bagan 1. Operasionalisasi kerangka teoritik



Relevansi rezim UNCLOS 1982 dengan pencapaian kepentingan maritim Indonesia
Korelasi “untung (relevan)” atau “rugi (irrelevan)” aturan main (pasal-pasal) UNCLOS 1982 dengan terakomodasinya kepentingan maritim Indonesia — politik (kedaulatan), keamanan (bahaya ancaman), ekonomi (pendapatan), dan sosial (kesejahteraan).

Argumen utama

Perjuangan Indonesia ditempuh melalui strategi diplomasi (*warrior*) bernegosiasi menggunakan kekuatan nasional yang gagal di Konferensi UNCLOS I (1958) dan II (1960). Ia digantikan keberhasilan diplomasi (*shopkeeper*) berbasis kompromi dalam Konferensi UNCLOS III (1982). Ini mendirikan rezim UNCLOS 1982 yang tidak relevan mengatur perilaku Indonesia untuk pencapaian kepentingan maritimnya saat ini, seiring beragam pasal-pasalnya tidak mampu menyelesaikan sengketa kedaulatan, menimbulkan ancaman dari aktor negara dan non-negara, berdampak kerugian ekonomi, dan mengganggu kesejahteraan masyarakat pesisir.

Deklarasi Djuanda, Nota Protes, dan diplomasi *warrior* yang gagal dalam Konferensi UNCLOS 1958-1960

“Usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Ya, bangsa pelaut dalam arti seluas-luasnya. Bukan sekedar menjadi jongos-jongos di kapal. Tetapi bangsa pelaut dalam arti kata cakrawala samudera. Bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga, bangsa pelaut yang mempunyai armada militer, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang lautan itu sendiri.” (Soekarno) (Kementerian Kelautan, 2013)

Pasca kemerdekaan hukum laut Indonesia menganut warisan kolonial Belanda *Territoriale Zee en Maritieme Kriegen Ordonnantie* (TZMKO), sehingga setiap pulau-pulaunya memiliki laut teritorial sendiri-sendiri mengacu asas teritorial tiga mil (*De Dominio Mares*), di luar itu adalah laut bebas bagi pelayaran internasional. Mantan presiden Soekarno, Menteri Kehakiman Soepomo, dan Menteri Negara Mohammad Yamin melihat bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan. Mereka perlu merumuskan landasan hukum pengganti TZMKO karena sangat merugikan dan membahayakan keutuhan, keamanan, dan keselamatan negara. Terbukti, ketika Belanda melaksanakan agresi militer 1945-1949 dengan memblokade laut dan mendaratkan personel-personelnya hingga Irian Barat (Fletcher, 1994).

Tanggal 30 Juli 1953, Soekarno menunjuk Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo membentuk Panitia Inter-Departemental untuk mempersiapkan UU Wilayah Perairan Indonesia dan Lingkungan Maritim. Ia dibubarkan ketika belum selesai bekerja di antara kegentingan situasi nasional yang penuh konflik dan bayang-bayang kudeta militer. Tanggal 9 September 1957, kedudukan Sastroamidjojo digantikan Djuanda Kartawidjaja memimpin Kabinet Djuanda. Dia merealisasikan program Pancakarya — membentuk Dewan Nasional, normalisasi keadaan publik, pembatalan persetujuan Konferensi Meja Bundar (KMB), memperjuangkan Irian Barat, dan mempercepat proses pembangunan.

Bulan Agustus 1957, Kartawidjaja memerintah Wakil Konferensi Hukum Laut, Mochtar Kusumaatmadja mencari landasan hukum yang sesuai untuk mengikat kesatuan Indonesia secara utuh. Kusumaatmadja menawarkan asas-asas negara kepulauan (*archipelagic state*) sebagai rumusan hukum laut nasional. Ini diangkat dalam Musyawarah Nasional (Munas) tanggal 10-14 September mencapai hasil penting berupa pengaturan kembali batas-batas perairan nasional dengan ditetapkannya Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember mengacu batas laut teritorial 12 mil (sulistiyo, 2015). berbunyi:

“1. Bahwa negara Indonesia sebagai negara kepulauan yang mempunyai sifat dan corak tersendiri; 2. Bahwa demi kesatuan wilayah negara Indonesia, semua kepulauan dan laut yang terletak di antaranya satu kesatuan yang bulat; 3. Ketentuan Pemerintah kolonial sebagaimana tercantum TZMKO 1939 Pasal 1, ayat (1) tidak sesuai lagi dengan kepentingan, keamanan, dan keselamatan negara Indonesia; 4. Bahwa setiap negara berdaulat berhak dan berkewajiban mengambil tindakan-tindakan yang

dipandanginya perlu untuk melindungi keutuhan dan keselamatan negaranya.”
(Kementrian Pariwisata, 2017).

Deklarasi Djuanda memicu Nota Protes keras AS tanggal 30 Desember 1957 menyebutkan tidak mengakui secara sah teritorial laut Indonesia lebih dari 3 mil, menyusul Nota Protes Inggris, Australia, dan Belanda tanggal 3 Januari 1958, Perancis dan Selandia Baru tanggal 8-11 Januari berisi kecaman atas perilaku Indonesia yang melanggar hukum internasional dan kebebasan pelayaran dan bernavigasi di lautan bebas. Soekarno tidak bergeming, Kusumaatmadja berkata santai, “jika begitu, keputusan dan tindakan pemerintah betul-betul benar. Jika tindakan kita ditentang oleh ‘imperialis,’ itu tandanya suatu tindakan yang benar bagi tanah air.” Dia menyuruh Kartawidjaja, bersama Duta Besar untuk Swiss Ahmad Subardjo Djojohadisuryo, staf Mahkamah Pelayaran Goesti Chariji Kusuma dan Muhammad Pardi membawanya menjadi rumusan hukum internasional untuk dinegosiasikan ‘ngotot’ dalam Konferensi UNCLOS I dihadiri 81 negara.

Pertentangan hebat datang kembali dari AS, Inggris, Perancis, Belanda, dan mantan negara-negara kolonial lainnya. Mereka (negosiator) menyebutnya ‘imperialis kapitalis’ bernafsu memecah-belah dan merampok kekayaan bangsa yang “berstatus merdeka.” Hanya Ekuador, Filipina, dan Yugoslavia mendukung Deklarasi Djuanda untuk dimasukkan dalam draft UNCLOS 1958. Ini menggagalkan titik temu lebar zona laut teritorial yang masih simpang siur antara 3 mil, 12 mil, atau 200 mil, kekaburan batasan zona laut tambahan, (UNCLOS 1982). dan veto negara kepulauan, hanya kebebasan pelayaran dan penerbangan di udara di zona penangkapan ikan, dan peletakan kabel dan pipa bawah laut berhasil disepakati.

Kegagalan di atas direspon cepat oleh Soekarno dengan memasukan Deklarasi Djuanda dalam ketetapan UU Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia tanggal 18 Februari 1960 memperkuat landasan hukumnya. Total luas wilayah (darat dan laut) Indonesia membesar 2,5 kali lipat menjadi 5,19 juta km² (kecuali Irian Jaya). Ia menyuruh Sastroamidjojo bernegosiasi kembali dalam Konferensi UNCLOS II dihadiri 88 negara bermodalkan prestise nasional yang sedang tinggi karena kedekatan dengan Uni Soviet dan memiliki militer terkuat di dunia setelah AS, Uni Soviet, dan Inggris. Namun, negosiasi tetap berlangsung alot, penuh pertentangan, lalu buntu, dan tidak menghasilkan kemajuan apapun, selain kesepakatan untuk mengadakan konferensi selanjutnya. Soekarno langsung menerbitkan Perpu UU Nomor 8 Tahun 1962 memberikan jaminan “Lalu-lintas Laut Damai Kapal Asing dalam Perairan Indonesia” tanggal 3 Agustus (maritimenews, 2016).

Keberhasilan diplomasi *shopkeeper* dan kelahiran rezim UNCLOS 1982

“Ketika Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) diadopsi 25 tahun lalu pada tahun 1982, ada harapan besar bahwa peraturan dan tatanan [dunia] telah datang dalam urusan kelautan, dan sumber daya laut akan menguntungkan umat manusia secara keseluruhan. Ada banyak prestasi [besar diplomasi] kita [Indonesia] dalam arah ini sejak saat itu.” (Hasjim Djalal) (Djalal, 2007)

Tanggal 12 Maret 1967, Soekarno digantikan ‘kontroversial’ oleh mantan presiden Soeharto. Ia melanjutkan langkah-langkah persiapan lebih matang seiring terpilihnya Indonesia menjadi anggota “*Committee of the Peaceful Uses of the Sea-Bed and Ocean Floor beyond the Limit of National Jurisdiction*” dalam rangka mempersiapkan Konferensi UNCLOS III yang mulai digelar bulan Desember 1973. (Suara Pembaharu, 2016). Ia menjadikan diplomasi *shopkeeper* senjata utama. Para diplomat Indonesia gencar bernegosiasi secara bersahabat, memberikan pengertian, dan menjelaskan keuntungan timbal balik bahwa Indonesia sama-sama berkepentingan memastikan Samudera Hindia yang stabil dan damai untuk dunia atas prinsip-prinsip Deklarasi Djuanda dalam ketentuan UNCLOS III. Mereka menempuh kompromi melalui penyebaran tulisan bertema “*The Indonesian Delegation to the Conference on the Law of the Sea,*” negosiasi multilateral menysar pertemuan-pertemuan politik organisasi internasional seperti ASEAN, Gerakan Non Blok (GNB), Kelompok 77, *Asia Africa Legal Consultative Assembly* (AALCA), dan lainnya untuk meraih simpati dan dukungan negara-negara Asia dan Afrika bekas jajahan kolonial.

Negosiasi bilateral bersama diplomat AS, Uni Soviet, negara maritim lain Inggris, Perancis, Australia, Belanda, Selandia Baru, dan Jepang turut dilakukan, sebagai contoh, Soeharto memerintah Kusumaatmadja dalam beberapa kesempatan bertemu diplomat Andrei Andreyevich Gromyko (Uni Soviet), Andrew Young (AS), David Owen (Inggris), dan Max van der Stoel (Belanda) selalu menyatakan “[prinsip-prinsip Deklarasi Djuanda] tidak seperti perajin tukang sepatu, tukang ledeng, atau tukang kayu yang bekerja dalam batas-batas hukum internasional yang ada, tetapi arsitektur untuk [UNCLOS 1982 sebagai] misi membangun dunia baru dan lebih baik.”

Bulan September 1974, Soeharto membujuk Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka melakukan komitmen bersama (*joint statement*) mendukung prinsip negara kepulauan beralasan sama-sama menguntungkan kedua negara. Diplomat lainnya mendatangi negara-negara terkurung daratan (*land-locked states*, LLS) seperti Laos, Swiss, Luksemburg, Austria, Paraguay, dan lainnya bertukar kepentingan — Indonesia berkomitmen mendukung tuntutan LLS atas hak akses pelayaran dan eksploitasi di lautan bebas, apabila didukung dalam

Konferensi UNCLOS III. Kombinasi duta besar dan akademisi (*think-thank*) nasional semakin aktif berpartisipasi dalam forum-forum *Law of the Sea Institute* (LSI), *International Ocean Institute* (IOI), dan *Southeast Asian Policy on Ocean and Law* (SEAPOL) mensosialisasikan Deklarasi Djuanda sejalan dengan hukum kebiasaan internasional, dan lain sebagainya (Djalal, 2011)

Perjuangan *shopkeeper* membuahkan hasil perlahan, tetapi pasti hingga pertemuan Konferensi UNCLOS III, delegasi 118 negara menandatangani draft UNCLOS 1982 berisi 320 pasal dan sembilan lampiran. Ia menyangkut seluruh isi pesan Deklarasi Djuanda, UU Nomor 4 Prp Tahun 1960, dan Perpu UU Nomor 8 Tahun 1962, seperti pasal 3 tentang laut teritorial 12 mil, pasal 46 dan 47, negara kepulauan, pasal 52 dan 53, hak lintas damai dan hak lintas alur laut kepulauan, bersama kodefikasi lainnya yang merefleksikan persamaan kepentingan maritim Indonesia dan negara peserta, di antaranya zona laut tambahan 24 mil, zona ekonomi eksklusif (ZEE)² bersama landas kontinen 200 mil, status laut bebas, hak dan kewajiban negara pantai, pengguna, dan LLS, penanganan tindak kejahatan di laut, eksploitasi sumber daya berbasis konservasi dan pelestarian lingkungan, penyelesaian sengketa secara damai, arbitrase khusus, dan lain sebagainya (UNCLOS, 1982). Ini diletakan mantan Menteri Sekretaris Negara Sudharmono dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang meratifikasinya melalui UU Nomor 17 Tahun 1985, tanggal 31 Desember, dan berlaku efektif secara internasional tanggal 16 November 1994 setelah negara ke-60 Guyana meratifikasinya (Kementerian Sekretaris Negara Indonesia, 1985).

Demikian UNCLOS 1982 menjadi rezim maritim mengatur perilaku Indonesia berlandaskan prinsip sebagai acuan keyakinan fakta bahwa lautan dapat dimilikinya terbatas (*res nullius*), sekaligus warisan bersama manusia yang penting untuk dijaga keberlangsungan kebaikan-kebaikan perdamaian, keamanan, keselamatan, pemanfaatan, dan pembangunan berkelanjutan untuk nasional, internasional, dan global (*res communis*). Norma memberikan hak fundamental dalam menetapkan batas-batas kepemilikan, pengelolaan, dan pengaturan, juga menuntut kewajiban sederajat terhadap kepentingan komunitas internasional, seperti eksploitasi sumber daya di laut bebas berbasis kelestarian, memberikan akses kebebasan pelayaran bagi kapal asing, menghormati kedaulatan negara lain, dan lain sebagainya.

² Zona ekonomi eksklusif (ZEE) adalah kepemilikan suatu negara atas lautan 200 mil dari garis pangkal daratan berlaku yurisdiksi terbatas untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan perikanan, pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan, pelestarian lingkungan laut dan riset ilmiah kelautan. United Nations, p. 40

Prinsip dan norma tersebut mengacu aturan spesifik tentang keharusan dan larangan sesuai dalam 320 pasal dan sembilan lampiran draft UNCLOS 1982, di antaranya pembatasan lebar teritorial laut 12 mil, zona tambahan 24 mil, ZEE dan landas kontinen 200 mil diukur dari pangkal pantai daratan, kerja sama internasional dalam memerangi tindak kejahatan laut, hak pengejaran seketika, eksploitasi sumber daya berketeraturan, penyelesaian sengketa melalui resolusi konflik yang damai, dan lainnya. Dan, prosedur pembuatan keputusan sebagai praktek-praktek umum membuat dan mengimplementasikan prinsip, norma, dan aturan UNCLOS 1982 tersebut berbasis antarpemerintah dalam proses interaksi politik normal di lingkup nasional maupun internasional (Friedhim, 1993).

Irrelevansi berbagai aturan main rezim UNCLOS 1982 dengan pencapaian kepentingan maritim nasional era kekinian

“Konvensi UNCLOS [1982], seperti kebanyakan hukum internasional, tidak sempurna dan terus berkembang ... Ada lebih dari seratus klaim negara pantai yang berlebihan dan ilegal di seluruh dunia dimaksudkan mengganggu hak kebebasan bernavigasi vital ... Diterapkan secara tidak sempurna dalam perangkat yang dibuat oleh pakar-pakar hukum internasional Konvensi tersebut mengabaikan kesempatan untuk menggunakan hukum perjanjian internasional sebagai mekanisme dalam mempengaruhi perubahan undang-undang domestik dan perilaku negara-negara yang tidak patuh. Di sisi lain, ada tekanan vokal untuk membentuk kembali interpretasi Konvensi dari Eropa, beberapa negara anggota, dan Lembaga Swadaya Masyarakat dengan cara merongrong kebebasan laut, mengurangi kepentingan ekonomi, dan kepentingan keamanan nasional di masa depan.” (Kraska, 2007).

Saat ini Indonesia dipimpin Presiden Joko Widodo yang berambisi besar mendirikan “Indonesia sebagai poros maritim dunia yang kuat dan mandiri (Setkab, 2016). Ia masih setia menggunakan rezim UNCLOS 1982 yang berusia 31 tahun sejak pengadopsian UU Nomor 17 Tahun 1985. Persoalan mengemuka ketika aturan mainnya tidak relevan (irrelevan) untuk mengakomodasi kepentingan maritim Indonesia di antara perubahan zaman globalisasi sekarang yang mengaburkan batas negara tradisional, penuh kecepatan, dan sangat dinamis (Kraska, 2007). Berbagai pasal-pasalnya mulai usang dan irasional, ditampilkan tidak menguntungkan, melainkan merugikan kepentingan tersebut, baik politik, keamanan, ekonomi, dan sosial, seiring ketidakmampuan menyelesaikan sengketa perbatasan, ancaman bersumber aktor negara dan non-negara, berdampak kerugian ekonomi, dan mengganggu kesejahteraan masyarakat pesisir.

Sebagai contoh dalam pasal 48, pasal 57, dan pasal 76 mengenai tata cara pengukuran zona maritim 200 mil ZEE dan landas kontinen sangat multitafsir, — “diperlakukan berbeda melalui dua kali pengukuran” atau “langsung mengikuti atas perairan ZEE dan dasar tanah

kontinen mempertimbangkan jarak sama.” Ia berimbas sengketa perbatasan laut berlarut-larut Indonesia di Selat Malaka yang memahami pengukuran ZEE dan landas kontinen berbeda, dengan negara tetangga Malaysia mengikuti penarikan jarak sama, sengketa ZEE dengan Vietnam, landas kontinen bersama Thailand, dan seterusnya. Ini diperumit kekaburan definisi pasal 6 dan pasal 121 tentang tatanan pulau dan karang sebagai wilayah maritim suatu negara, ditambah pasal 122 dan pasal 123 mengenai status dan perlakuan terhadap laut tertutup atau semi tertutup (tunduk di bawah dua atau lebih kedaulatan negara) memperbolehkan adanya aktifitas maritim bersama di sana tanpa kejelasan lebih lanjut apabila area tersebut dipersengketakan (UNCLOS, 1982). semakin memanaskan konflik Cina, Filipina, Taiwan, Malaysia, Vietnam, dan Brunei Darussalam yang mengklaim banyaknya pulau kecil dan batu karang saat laut surut bersama batas teritorial dan ZEE tumpang tindih di Laut Cina Selatan menyeret-nyeret ZEE Indonesia di Kepulauan Natuna dalam “sembilan garis putus-putus” (*nine-dashed line*) yang dikategorikan zona perikanan tradisional Cina (ANRI, 2011; Kompas, 2016).

Akibatnya meluas, ‘sakit hati’ Indonesia sering diuji ketika banyak nelayan-nelayan mereka melakukan aksi-aksi pemancingan ilegal di ZEEnya melemparkan total kerugian fantastis Rp 260 triliun (2016) (CNN Indonesia, 2016). Selain itu, banyak nelayannya kerap dituduh melanggar ZEE dan ditangkap oleh aparaturnegara mereka memicu insiden buruk, seperti kapal MV Sie Mie Lie berisi lima nelayan Riau ditangkap Malaysia, (Republika, 2014). MV 5 GT berisi lima nelayan Sumatera Utara ditangkap kembali Malaysia bulan Januari 2016 (Tempo, 2016). Insiden penabrakan kapal patroli KRI Hiu 11 oleh Cina bulan Maret, hingga penangkapan Vietnam terhadap KRI Hiu Macan bulan Mei 2017 (Kompas, 2016). dan lain sebagainya. Ini persoalan kesejahteraan serius ketika berdampak profesi nelayan menjadi terlalu beresiko dan semakin ditinggalkan, dari hanya 1,6 juta orang nelayan tahun 2003, tinggal 800 ribu nelayan saja sekarang (Detik, 2017). dan tingkat kemiskinan masyarakat pesisir sangat mengkhawatirkan sebesar 32,4% (Sindo, 2013).

Irrelevansi lainnya adalah pasal 100, 101, 102, 103, dan 111 mengenai penanganan tindak pidana kejahatan laut pembajakan kapal hanya mengatur di laut bebas, bukan di laut teritorial dan ZEE, padahal mayoritas kasus-kasusnya justru terjadi di sana. Indonesia yang berkapabilitas maritim minim, dibandingkan luas zona maritimnya 5,1 juta km², dihadapkan banyak aksi-aksi pembajakan kapal terjadi dari 40 kasus tahun 2010, 108 kasus tahun 2015, dan 49 kasus tahun 2016 (International Maritime Berau, 2010-2017). bersama kejahatan penyelundupan barang terlarang, narkoba, dan senjata mencatat kerugian Rp 30-40 triliun per-

tahun (Gatra, 2009). Ini merugikannya seiring upaya AS bersama ‘antek-anteknya,’ didukung Singapura terus gencar membuat internasionalisasi pengamanan ZEE yang ditafsirkan serampangan sebagai ‘laut bebas’ di Alur Laut Kepulauan Indonesia I (ALKI I), terutama Selat Malaka (Oktavian, 2014).

Banyak pasal-pasal lain turut irrelevant bagi kepentingan maritim Indonesia seperti Pasal 17, 18, dan 19 mengenai hak lintas damai sebagai pergerakan kapal secara cepat dan terus menerus terkecuali mengalami kesulitan dalam keadaan memaksa, namun tidak dirincikan kongkret istilah “kesulitan” dan “memaksa” tersebut (UNCLOS, 1982), Ia membuat kapal-kapal asing “parkir” sembarangan di sepanjang pesisir Sumatera sampai Riau untuk menunggu bongkar muat pelabuhan milik Singapura dan Malyasia, bukan Indonesia (Muharen, 2017; Merdeka, 2017). Celaknya, mereka sangat mengganggu aktivitas nelayan sekitar sambil membuang limbah menambah kerugian kerusakan lingkungan laut Rp 9 triliun per-tahun (Energi Today, 2015).

Selain itu, rezim UNCLOS 1982 belum mengatur berbagai fenomena baru yang mendapat perbedaan penafsiran internasional sehingga berpotensi membawa konflik dan kerugian kepentingan maritim Indonesia di masa depan, seperti ketentuan bersama pendayagunaan ruang sumber daya di landas kontinen, aktivitas pencarian sumber daya maritim baru, pemanfaatan maritim dalam eko-turisme, perlakuan berkelanjutan terhadap kabel, pipa, instalasi, dan bangunan-bangunan bawah laut yang tidak terpakai lagi berkemungkinan besar mempengaruhi keamanan navigasi dan pelayaran (Son, 2014). Pada akhirnya ahli-ahli hukum maritim sinis, seperti Carlos Iván Fuentes selalu menyebut rezim UNCLOS 1982 tidak sempurna (*imperfection*) dan tidak kompatibel (*incompatible*) sebagai hukum laut internasional, karena terlalu “normatif” dan “pluralisme (Fuentes, 2016).”

Kendati demikian, penting bagi kita (Indonesia) mengkritik, membenahi, mengusulkan, dan memperjuangkan perbaikan-perbaikan aturan mainnya mengingat lautan adalah pemersatu bangsa ini, ia jantung kehidupan 140 juta masyarakat yang tinggal di pesisir (Helmi, 2011). menopang lapangan kerja 40 juta rakyat, menyumbang lebih 30% PDB senilai \$1,2 triliun per-tahun, apabila mampu dikelola maksimal (Kompas, 2014). Mengingat pernyataan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, “kalau kita hanya mengandalkan yang di daratan saja, kita akan menghadapi persoalan serius pada 20, 30, 50 tahun mendatang (KP3P, 2015).”

Kesimpulan dan rekomendasi

Indonesia adalah salah satu pemain kunci yang memperjuangkan kelahiran UNCLOS 1982. Berawal era Soekarno berkeinginan prinsip-prinsip Deklarasi Djuanda diakui sebagai rumusan hukum internasional yang gagal dicapai dalam konferensi UNCLOS I (1958) dan II (1960) karena penggunaan strategi diplomasi menekankan status kemerdekaan bangsa, kejayaan militer, dan aliansi kuat bersama Uni Soviet. Ini berubah drastis fase Soeharto yang mengedepankan cara-cara kompromi saling menguntungkan melalui pola propaganda tulisan, negosiasi multilateral dalam pertemuan politik ASEAN, GNB, Kelompok 77, AALCA, dan lainnya, juga negosiasi bilateral bersama AS, Uni Soviet, Inggris, Perancis, Australia, Belanda, Selandia Baru, Jepang, dan LLS, ditambah aktif dalam forum-forum akademisi internasional. Ia berhasil memasukan isi pesan Deklarasi Djuanda dalam draft penandatanganan UNCLOS 1982 di Konferensi UNCLOS III yang disepakati internasional.

Kelahiran UNCLOS 1982 menjadi rezim maritim yang tidak sempurna dan tidak kompatibel dalam mengatur urusan Indonesia untuk mencapai kepentingan maritim saat ini. Ia terbukti kurang relevan ketika berbagai aturan main pasal-pasalanya multitafsir dan tidak jelas sehingga menggajal penyelesaian tapal batas dengan negara tetangga, sekaligus memperburuk konflik di laut Cina Selatan menyeret-nyeret ZEE di Natuna, mendorong upaya internasionalisasi ZEE di ALKI I selat malaka, memicu insiden ketegangan antaraparatur penegak hukum, berbaur aksi pemancingan ilegal, dan parkir sembarangan kapal-kapal asing sambil membuang limbah yang sangat merugikan ekonomi, dan menghambat kesejahteraan sosial bagi masyarakat pesisir, khususnya nelayan. Selain itu, rezim UNCLOS 1982 belum memiliki aturan baru yang berpotensi membawa konflik dan kerugian lebih besar di masa depan, seperti sumber daya maritim landas kontinen, pencarian sumber daya baru, eko-turisme, dan perlakuan terhadap kabel, pipa, instalasi, dan bangunan-bangunan laut yang tidak terpakai.

Berdasarkan temuan di atas penulis memberikan dua rekomendasi kepada PBB, komunitas internasional, pemerintah Indonesia, dan pakar-pakar hukum laut internasional yang independen: (1) hendaknya bersama-sama melakukan pengkajian, perumusan, dan perundingan ulang pasal-pasal UNCLOS yang menjadi sumber sengketa antarnegara, multitafsir isi pesannya, ketidakjelasan makna, maupun terlalu sempit ruang lingkungannya, termasuk penambahan pasal-pasal baru menyesuaikan fenomena, kondisi, dan kebutuhan riil saat ini; (2) hendaknya pemerintah Indonesia menjadi motor penggerak revisi UNCLOS 1982 di dunia internasional dengan menggunakan diplomasi *shopkeeper* sebagai cara terbaik mempertimbangkan pengalaman dan berbagai kerugian sebagaimana dibahas dalam makalah ini.

Daftar Pustaka

- Friedheim, R.L., *Negotiating the New Ocean Regime*, University of South Carolina Press, Carolina, 1993.
- Fuentes, C.I., *Normative Plurality in International Law: A Theory of the Determination of Applicable Rules*, Springer, New York, 2016.
- Hasenclever, A., P. Mayer, & V. Rittberger, *Theories of International Regimes*, Cambridge University Press, New York, 2004.
- Helmi, A., *Strategi Adaptasi Nelayan terhadap Perubahan Ekologis Kawasan Pesisir (Studi Kasus: Desa Pulau Panjang, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan)*, Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2011.
- Hong, N., *UNCLOS and Ocean Dispute Settlement: Law and Politics in the South China Sea*, Routledge, New York, 2012.
- Klein, N., *Maritime Security and the Law of the Sea*, Oxford University Press, Oxford, 2011.
- Oktavian, R., *Kerjasama Trilateral Indonesia-Malaysia-Singapura dalam Menanggulangi Perompakan Kapal di Selat Malaka*, Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang, 2014.
- Roy, S.L., *Diplomasi*, Grafindo Raja Perkasa, Jakarta, 1995.
- Sharp, P., *Diplomatic Theory of International Relations*, Cambridge University Press, New York, 2009.
- Tanaka, Y., *The International Law of the Sea*, Cambridge University Press, New York, 2012.
- Buttigieg, J., 'The Common Heritage of Mankind From the Law of the Sea to the Human Genome and Cyberspace', *The Common Heritage of Mankind SymMel*, vol. 8, 2012.
- Fletcher, H.F., 'The Archipelagic State and full recognition of Indonesian National Independence', *The Indonesia Quarterly*, vol. XXII, no. 2, 1994.
- Kraska, J., 'The Law of the Sea Convention: A National Security Success: Global Strategic Mobility through the Rule of Law', *George Washington International Law Review*, vol. 39, no. 1, 2007.
- Djalal, H., *25 years since the adoption of the Convention: Reflecting on the past and the way forward*, Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea and the United Nations University, Tokyo, 2007.
- , *Regime of Archipelagic States*, Asean Regional Forum Seminar, Manila, 2011.

- Arsip Nasional Republik Indonesia, *Beranda Depan Negara dalam Bingkai NKRI*, no. 56, ANRI, Jakarta, 2011.
- International Maritime Bureau, *Piracy and Armed Robbery Against Ships: Annual Report 1 January 2010-December 2016*, ICC-IMB, London, 2011-2017.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Menjaga Kedaulatan Laut Mewujudkan Kedaulatan Bangsa*, Mina Bahari, Jakarta, 2015.
- Kementerian Sekretaris Negara Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut)*, Kemensetneg, Jakarta, 1985.
- United Nations, *Convention on the Law of the Sea 1982*, UNCLOS 1982, Montego Bay, 1982.
- Sulistiyono, E., 'Deklarasi Djuanda dan Hari Nusantara', *Kompas*, 13 Desember 2015.
- 'China Langgar Hukum Laut di Natuna, Protes Keras Indonesia dibenarkan', *Kompas* (daring), <<http://internasional.kompas.com/read/2016/03/24/20114501/.China.Langgar.Hukum.Laut.di.Natuna.Protes.Keras.Indonesia>>, akses 11 Juli 2017.
- 'Deklarasi Djuanda dan Implikasinya terhadap Kewilayahan Indonesia', *Kementerian Pariwisata Indonesia* (daring), <http://www.kemepar.go.id/userfiles/file/4547_1355-djuanda.pdf>, akses 5 Juli 2017.
- 'Deklarasi Djuanda Dan Kemenangan Laut Indonesia', *Suara Pembaharu* (daring), <<http://www.suarapembaharu.com/2016/12/deklarasi-djuanda-dan-kemenangan-laut.html>>, akses 7 Juli 2017.
- 'Ini Masalah Utama Kemiskinan Masyarakat Pesisir', *Sindo* (daring), <<https://ekbis.sindonews.com/read/1013402/34/ini-masalah-utama-kemiskinan-masyarakat-pesisir-1434457234>>, akses 10 Juli 2017.
- 'Jokowi Sebut Pencurian Ikan Rugikan Indonesia Rp260 Triliun', *CNN Indonesia* (daring), <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161010133844-20-164420/jokowi-sebut-pencurian-ikan-rugikan-indonesia-rp260-triliun/>>, akses 11 Juli 2017.
- 'Kapal Patroli Anak Buah Menteri Susi Ditangkap Vietnam', *Jawa Pos* (daring), <<http://www.jawapos.com/read/2017/05/24/132218/kapal-patroli-anak-buah-menteri-susi-ditangkap-vietnam>>, akses 12 Juli 2017.
- 'Kerusakan Lingkungan buat Indonesia Rugi Rp 9 Triliun', *Energy Today* (daring), <<http://energitoday.com/id/2015/01/kerusakan-lingkungan-buat-indonesia-rugi-rp-9-triliun/>>, akses 11 Juli 2017.

- 'Laut Indonesia dapat Menyumbang Pendapatan 1,2 Triliun Dollar AS', *Kompas* (daring), <<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/08/11/133800526/Laut.Indonesia.Dapat.Menyumbang.Pendapatan.1.2.Triliun.Dollar.AS>>, akses 11 Juli 2017.
- 'Lima Nelayan Indonesia Ditangkap Malaysia', *Republika* (daring), <<http://www.republika.co.id/berita/internasional/asean/14/04/24/n4ixs0-lima-nelayan-indonesia-ditangkap-malaysia>>, akses 8 Juli 2017.
- 'Membangun Kelautan untuk Mengembalikan Kejayaan sebagai Negara Maritim', *KP3P* (daring), <<http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/ver2/news/read/115/membangun-kelautan-untuk-mengembalikan-kejayaan-sebagai-negara-maritim.html>>, akses 10 Juli 2017.
- 'Menteri Susi: Ironi Kalau Tangkapan Ikan Nelayan Minim', *Detik* (daring), <<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3507405/menteri-susi-ironi-kalau-tangkapan-ikan-nelayan-minim>>, akses 10 Juli 2017.
- 'Momentum Pembinaan Maritim Indonesia', *Gatra* (daring), <<http://arsip.gatra.com/2009-04-06/majalah/artikel.php?pil=23&id=125021>>, akses 11 Juli 2017.
- 'Nelayan Indonesia Ditangkap Polisi Maritim Malaysia', *Tempo* (daring) <<https://m.tempo.co/read/news/2016/02/04/090742313/nelayan-indonesia-ditangkap-polisi-maritim-malaysia>>, akses 8 Juli 2017.
- 'Parkir kapal, cara orang asing akali aturan moratorium Menteri Susi', *Merdeka* (daring), <<https://www.merdeka.com/uang/parkir-kapal-cara-orang-asing-akali-aturan-moratorium-menteri-susi.html>>, akses 11 Juli 2017.
- 'Perjuangan Panjang Deklarasi Djuanda dan Archipelagic Principal State', *Maritime News* (daring), <<http://maritimnews.com/perjuangan-panjang-deklarasi-djuanda-dan-archipelagic-principal-state/>>, akses 5 Juli 2017.
- 'Pidato di Sidang IMO, Presiden Jokowi Komitmen Jadikan Indonesia Poros Maritim Dunia', *Sekretaris Kabinet Indonesia* (daring), <<http://setkab.go.id/pidato-di-sidang-imo-presiden-jokowi-komitmen-jadikan-indonesia-poros-maritim-dunia/>>, akses 8 Juli 2017.
- Kuwado, F.J., 'Ke Mana TNI AL Saat Kapal KKP Berkonflik dengan Kapal China di Natuna?', *Kompas* (daring), <<http://nasional.kompas.com/read/2016/03/22/17235591/Ke.Mana.TNI.AL.Saat.Kapal.KKP.Berkonflik.dengan.Kapal.China.di.Natuna>>, akses 12 Juli 2017.

- Muharen, A., 'Apa Yang Sesungguhnya Terjadi di Selat Malaka?', Qureta (daring), <<http://www.quireta.com/post/apa-yang-sesungguhnya-terjadi-di-selat-malaka>>, akses 11 Juli 2017.
- Son, N.H., 'The South China Sea Three Priority Measures in Maintaining Peace and Stability in the South China Sea', *Kyoto Review of Southeast Asia* (daring) . <<https://kyotoreview.org/issue-15/three-priority-mesures-in-maintaining-peace-and-stability-in-the-south-china-sea/>>, akses 13 Juli 2017.
- Sun, Z., 'Book Review: How Indonesia became an archipelagic state in 'Sovereignty and the Sea', *Jakarta Post* (daring), <<http://www.thejakartapost.com/academia/2017/06/22/book-review-how-indonesia-became-an-archipelagic-state-in-sovereignty-and-the-sea.html>> , akses 8 Juli 2017.

Kedaulatan Maritim Indonesia yang (tidak) Berdaulat?

Muhammad Iqbal, Puji Wahono, Bagus Sigit Sunarko

Universitas Jember

cacakiqbal@gmail.com; wahono.fisip@unej.ac.id; sigit.fisip@unej.ac.id

Abstrak

Tulisan ini menganalisis bagaimana problematika kedaulatan maritim Indonesia sejak pencanangan kebijakan Poros Maritim Dunia oleh Presiden Joko Widodo. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif serta studi dokumentasi, tulisan ini menunjukkan bahwa paradigma pembangunan kedaulatan maritim terkesan masih “setengah hati” untuk tidak dikatakan tidak seserius gelora narasi dan mimpi besar Poros Maritim Dunia. Pengarusutamaan kedaulatan maritim (mainstreaming maritime sovereignty) tidak terjadi baik dalam sektor politik luar negeri maupun dalam negeri. Strategi dan doktrin pembangunan di kabinet pemerintahan Jokowi masih cenderung land heavy. Pemberdayaan dan peningkatan sea power tidak diimbangi distribusi anggaran yang signifikan terutama pada institusi strategis terkait kedaulatan maritim. Akibatnya, sumberdaya ekonomi, politik, dan budaya maritim yang berlimpah dimiliki Indonesia belum terkelola secara mandiri dan berdaulat seutuhnya. Dari perspektif hubungan internasional, tantangan utamanya adalah mereformasi total strategi diplomasi maritim serta mengarusutamakan doktrin serta strategi pertahanan dan keamanan maritim (maritime security). Terkait hal ini, pemerintah idealnya perlu mengambil tiga posisi langkah berikut. Pertama, mendesain ulang regulasi dan Kebijakan Kelautan Indonesia dengan substansi pengarusutamaan maritim. Kedua, memperkuat kebijakan anggaran maritim sebagai prioritas utama. Ketiga, mempersiapkan generasi bangsa secara terencana, sistematis dan komprehensif untuk memiliki budaya dan kesadaran maritim (maritime culture and awareness).

Kata kunci: *Poros Maritim Dunia, Pengarusutamaan Kedaulatan Maritim, Kesadaran Maritim*

Abstract

This paper analyzes how the problems of Indonesian maritime sovereignty since the launching of the Global Maritime Fulcrum policy by President Joko Widodo. By using descriptive analysis methodology and documentation study, this paper shows that the paradigm of developing maritime sovereignty is still considered "half-hearted" not to be said to be as serious as the surge of narrative and the big dream of the Global Maritime Fulcrum. Mainstreaming maritime sovereignty does not occur both in the foreign and domestic political policy. The development strategy and doctrine in the Jokowi government cabinet still tends to be land heavy. Empowerment and increase in sea power are not offset by a significant budget distribution especially in strategic institutions related to maritime sovereignty. As a result, the abundant economic, political and maritime culture resources possessed by Indonesia have not been managed independently and are fully sovereign. From an international relations perspective, the main challenge is to reform the total strategy of maritime diplomacy and to mainstream doctrine and maritime security defense and security strategies. Regarding this matter, the government ideally needs to take the following three steps. First, redesigning Indonesian Marine Regulations and Policies with the substance of maritime mainstreaming. Second, strengthening maritime budget policy as a top priority. Third, prepare the nation's generation in a planned, systematic and comprehensive manner to have a maritime culture and awareness.

Keywords: *Global Maritime Fulcrum, Mainstreaming Maritime Sovereignty, Maritime Awareness*

Pengantar

Indonesia adalah Negara Kepulauan Terbesar di Dunia! Potensi ekonomi maritim Indonesia 1,33 triliun US Dolar per tahun, 79% wilayahnya adalah laut dengan dikaruniai aset 17.508 pulau (5.707 pulau berpenghuni), membentang 99.000 km garis pantai, dan kedaulatan

negara didukung 263 juta penduduk (Kemenko Maritim, 2017). Semua karunia itu sangat penting bagi Kedaulatan Maritim. Secara umum narasi Poros Maritim Dunia Presiden Joko Widodo memberikan harapan baru. Bung Karno pernah berkata *Jas Merah!* Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Maka, narasi itu seperti mengulang catatan sejarah ketika orasi Presiden Soekarno mengamanatkan pada bangsa Indonesia untuk kembali menjadi bangsa samudera. “*Kembalilah Menjadi Bangsa Samudera!*”, begitulah judul pidato kenegaraan yang dikenal sebagai Amanat Presiden Sukarno pada resepsi pembukaan Musyawarah Nasional Maritim pertama di Jakarta pada tanggal 23 September 1963.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan RI perhatian dan orientasi pemimpin bangsa untuk menegakkan kedaulatan maritim nyaris tergolong “melupakan sejarah” sebagai jati diri bangsa maritim. Tercatat hanya pada masa Bung Karno keseriusan menata dan menginstitutionalkan maritim dan tentu saja Presiden Jokowi. Karena itulah narasi Poros Maritim Dunia Presiden Jokowi bisa disebut sebagai harapan baru.

Dinamika sejarahnya adalah begini, Ali Sadikin memimpin Kompartemen Kemaritiman dalam Kabinet Dwikora I dan II dari tahun 1964 sampai 1966. Jatjdjan Sastroredjo menggantikannya di Kabinet Ampera tahun 1966 sampai 1967. Namun setelah 1967, sudah tidak ada lagi kementerian yang menangani secara khusus bidang kemaritiman. Zaman Orde Baru justru merombak total orientasi pembangunan dengan paradigma daratan dan lebih memprioritaskan sektor agraris (*land heavy*). Posisi kemaritiman dilebur ke dalam Departemen/Kementerian Perhubungan dari Kabinet Ampera II hingga Kabinet Indonesia Bersatu II (Masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) berakhir. Baru di tahun 2014 pemerintahan Presiden Jokowi, haluan kelautan secara nasional digelorakan kembali dengan membentuk Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Sampai tulisan ini dibuat ada tiga kali *reshuffle* menteri. Indroyono Soesilo menjabat dari 27 Oktober 2014 sampai 12 Agustus 2015, lalu Rizal Ramli dari 12 Agustus 2015 sampai 27 Juli 2016, dan saat ini Luhut Binsar Panjaitan dari 27 Juli 2016.

Kalau mengacu pada catatan sejarah tersebut, lebih setengah abad yang lalu orasi Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia itu begitu menggelora untuk menegaskan bahwa negara Indonesia bisa menjadi bangsa yang kuat dan sejahtera apabila menguasai lautan. Orasi itu persisnya begini:

“...Negara Indonesia hanjalah bisa mendjadi kuat djikalau ia djuga menguasai Lautan; negara jang rakjatnya tjuma hidup, hidup adem tentrem kadyo siniram banju waju sewindu lawase di lereng-lereng gunung, keradjaan jang demikian itu tidak bisa mendjadi kuat, apalagi mendjadi sedjahtera. Djikalau negara

Indonesia ingin mendjadi kuat, sentausa, sedjahtera, maka dia harus kawin djuga dengan laut..." (Departemen Penerangan RI, 1963: 7).

Menjadi bangsa yang benar-benar menguasai lautan bagi "Sang Nahkoda Agung" merupakan tuntutan zaman sebagaimana sejarah telah membuktikan di masa Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Kejayaan Sriwijaya dan Majapahit kala itu membuktikan bahwa bangsa Indonesia pernah menjadi negeri yang sangat berdaulat dan berjaya atas lautan. Penguasaan teknologi, armada kapal, gugus pasukan dan kemampuan pengelolaan perdagangan internasional sekaligus membuktikan berlangsungnya praktik diplomasi maritime yang benar-benar sangat hebat membanggakan pada zamannya. Demikian pula beberapa kerajaan seperti Samudera Pasai, Aceh, Makassar, Ternate dan Tidore telah terbukti mampu berdaulat dan berjaya dengan strategi dan doktrin kedaulatannya atas alur laut beserta seluruh sumberdaya maritimnya. "*Jalesveva Jayamahe*", di lautan kita jaya. Kini, kejayaan kerajaan-kerajaan maritim Indonesia kala itu yang wilayah kedaulatan ekonomi dan politik maritimnya membentang luas hingga mencakup sekitar Hindia hingga Pasifik, telah terpenggal seolah terkenang hanya menjadi romantisme sejarah.

Kedaulatan dan kejayaan atas lautan dengan semua sumberdaya yang sangat berlimpah itu sejatinya bertujuan untuk Indonesia benar-benar menjadi bangsa yang kuat, sejahtera dan memberikan kesejahteraan kepada seluruh rakyat Indonesia hingga dapat hidup di dalam negaranya sendiri. Artinya, berdaulat atas lautan adalah berarti benar-benar mandiri tanpa eksploitasi serta tetap bersahabat dalam hubungan internasional dengan semua bangsa di dunia. Maritim Indonesia yang berdaulat pada hakikatnya adalah memosisikan bangsa Indonesia sebagai *mercusuar* pembangunan dan perhubungan bangsa-bangsa dan perjuangan aktif dalam menjaga perdamaian dunia yang kekal dan abadi.

Pembangunan menurut Amartya Kumar Sen sesungguhnya adalah perluasan kemerdekaan (Sen, 1999). Maka, pembangunan maritim sesungguhnya adalah perluasan kemerdekaan sebagai bangsa bahari yang berdaulat sebenar-benarnya. Pemerintah kalau boleh dikatakan baru "menyapa" laut sebatas wacana atau program kerja, akan tetapi masih kita anggap gagal hadir berdaulat sepenuhnya di laut secara efektif. Penegasan narasi Poros Maritim Dunia yang dikonstruksi pada awal kontestasi Pemilu 2014 di Indonesia faktanya baru tertuang dalam Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) tiga tahun kemudian dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017. Boleh dikata KKI ini merupakan skenario awal implementasi mimpi besar Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia. Sebuah

kebijakan politik yang dapat kita anggap sebagai harapan baru. Sebuah kebijakan penting dan strategis sebagai upaya untuk mengaskan kembali jati diri Indonesia sebagai bangsa maritim.

Masalahnya, setelah 73 tahun kemerdekaan pada kenyataannya Indonesia ternyata cukup rentan dalam menghadapi banyak ancaman dan gangguan atas kedaulatan maritimnya. Termasuk pula kerugian keuangan negara di bidang maritim. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pernah mengatakan bahwa kerugian negara mencapai Rp 3.000 triliun karena tindak pencurian ikan dan beragam tindak pidana (Tempo.co, 2015).

Kedaulatan NKRI juga sangat rentan terhadap eskalasi konflik di Laut China Selatan serta potensi *dispute* dan konflik dengan sepuluh negara perbatasan (Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand, Timor Leste, India, Papua New Guinea, Palau, dan Australia). Belum lagi soal rivalitas Amerika Serikat dan sekutunya dengan China di kawasan Asia Pasifik. Ditambah persoalan garis batas wilayah yang belum delimitasi bahkan disengketakan; sebagian batas ZEE belum ditetapkan, serta belum semua batas laut teritorial dan batas landas kontinen disepakati dengan negara tetangga. Ada pula masalah konsep "*Nine Dotted Lines*" China di kawasan Natuna yang masih tidak jelas dasar hukum dan koordinatnya. Kriminalitas di laut masih marak terjadi juga dapat berdampak pada gangguan atas kedaulatan NKRI. Daerah perbatasan pun berpeluang menjadi tempat persembunyian dan basis kelompok gerakan pengancam ketertiban dan keamanan, penyelundupan (*smuggling*), dan kriminal lainnya, seperti jalur *human trafficking*, narkoba, dan aksi terorisme. Persoalan degradasi nasionalisme masyarakat di pulau-pulau pantai terluar dan daerah perbatasan juga menjadi ancaman serius atas kedaulatan bangsa akibat tata kelola pemerintahan, pelayanan publik yang buruk serta ketimpangan distribusi hasil pembangunan dan ada "bau tak sedap" dalam perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Semua kerentanan dan ancaman itu menjadi PR besar atas pertanyaan apakah benar kita berdaulat atas maritim seutuhnya? Pertanyaan mendasar yang masih terasa gamang untuk memastikan jawabannya antara lain adalah apakah dengan penegasan adanya KKI menegaskan pula bahwa Indonesia sudah berdaulat atas laut dan sepenuhnya efektif mengelola seluruh potensi maritimnya? Sejujurnya kita katakan belum berdaulat sepenuhnya. Sekiranya pembelaan (atau ada pembenaran) yang bernada optimistik bahkan heroik bahwa Indonesia memang berdaulat atas wilayah ekonomi politik maritimnya, apa saja bukti-bukti konkritnya?

Metode

Tulisan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yakni dengan mendeskripsikan berbagai data, permasalahan, kebijakan dan program-program yang terkait dengan konsepsi kedaulatan negara maritim. Unit analisis utama dalam penelitian ini adalah argumentasi yang dihasilkan dalam tulisan maupun ucapan para aktor pembuat keputusan dan tokoh-tokoh nasional sebagai representasi dari lembaga negara yang memiliki otoritas langsung (*first hand policy*) serta pemikiran atau pandangan ahli (*first hand perspective*) dalam kaitannya dengan aspek maritim. Metode pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi dan pustaka yang dilakukan dengan cara membaca dokumen, artikel buku atau jurnal, teks-teks pidato, berita maupun berbagai laporan serta mengkaji dan meneliti beberapa regulasi dan dokumen yang terkait langsung dengan maritim Indonesia. Hasilnya kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis *Interactive Model* dari Miles dan Huberman (1994). Teknik analisis ini membagi langkah-langkah berupa reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusions*), serta menginterpretasikan data dengan melakukan proses *check* dan *recheck* (triangulasi) sebagai upaya validasi (*validity*) atas temuan yang telah didapat.

Membenahi paradigma pembangunan maritim.

Dengan menyitir kerangka pemikiran Thomas Kuhn tentang struktur revolusi ilmiah, Daniel M. Rosyid (2010) mengusulkan pergeseran paradigma (*paradigm shifts*) pembangunan kemaritiman. Ada empat paradigma dalam melangsungkan pembangunan, yaitu paradigma benua (pulau besar), paradigma kelautan, paradigma “pulau kecil” dan paradigma kepulauan. Usulan ini ia pandang seharusnya menjadi agenda besar dan penting guna mewujudkan kedaulatan maritim Indonesia.

Paradigma kelautan yang dimaksud tersebut diilustrasikan oleh Rosyid seperti “*water world*” (dalam film Hollywood yang diperankan oleh Kevin Costner). Cara pandang manusia di atas perahu yang ekstrim seolah tidak pernah lagi melihat darat. Paradigma “pulau kecil” ia pandang sebagai cara pandang yang terlalu sempit, bersifat isolasionis, tertutup, tidak ramah pada pendatang. Paradigma kepulauan adalah paradigma “berlabuh” dari laut yang penuh gelombang ke darat yang tenang. Selama kemerdekaan RI, pembangunan bangsa dibangun dengan paradigma “pulau besar”. Paradigma ini menggambarkan cara pandang manusia yang seolah-olah tidak pernah melihat laut. Paradigma semacam ini bercirikan agraris, cenderung feodal dan hirarkis. Inilah yang dianggap sangat memengaruhi pola kebijakan pembangunan semasa Orde Baru dengan lebih gencar memprioritaskan pembangunan daratan dibanding laut.

Akibatnya, potensi dahsyat sumberdaya laut tidak pernah menjadi sumber utama kesejahteraan seluruh rakyat dengan prinsip yang adil dan makmur. Maka yang paling realistis adalah paradigma kepulauan. Paradigma kepulauan adalah paradigma "jalan tengah". Bangsa Indonesia menyebutnya "tanah air" (bukan "tanah dan air"), yang melihat dimensi "pulau besar" dan "*water world*" secara seimbang. Paradigma kepulauan dinilai lebih inklusif, dinamis dan lebih *outward-looking* dibanding dengan paradigma lainnya.

Seperti diketahui sebagaimana legitimasi Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS), Indonesia memang merupakan negara kepulauan atau *archipelagic state*. Menurut kajian Safri Burhanuddin dkk. (2003) kata *archipelago* memang sering diterjemahkan sebagai "kepulauan" yaitu berupa kumpulan pulau yang dipisahkan oleh permukaan air laut. Sesungguhnya ada perbedaan pengertian yang fundamental antara kepulauan dan *archipelago*. Kepulauan diartikan sebagai kumpulan pulau. Sedangkan istilah *archipelago* berasal dari bahasa Latin "*archipelagus*" yang berasal dari kata *archi* yang berarti utama dan *pelagus* yang berarti laut, sehingga memiliki arti "laut utama". Istilah ini mengacu pada Laut Tengah pada masa Romawi. Oleh sebab itu, makna asli dari kata *archipelago* sebenarnya bukan merupakan "kumpulan pulau", tetapi laut, di mana terdapat sekumpulan pulau. Konsep *archipelagic state* (menurut Adrian Lapijan) yang dikembangkan Indonesia mengacu pada makna negara kepulauan "seharusnya diganti dengan konsep negara bahari", yaitu negara laut yang memiliki banyak pulau. Dalam istilah sejarahwan maritim yang paling otoritatif berbicara soal maritim ini "Indonesia adalah negeri bahari yang terdiri dari gugusan laut yang ditaburi pulau-pulau". Oleh karena itu, upaya untuk menegakkan kedaulatan maritim sudah seharusnya dimulai dengan mereposisi pembenahan atas paradigma pembangunan maritim.

Salah Paradigma, Minim Anggaran.

Sekarangnya ada tiga kesalahan paradigma pembangunan maritim hingga membuat Indonesia saat ini tidak benar-benar berdaulat atas maritimnya sendiri. *Pertama*, menjadikan laut hanya sebagai halaman belakang. Ini sangat berbeda jika laut adalah teras depan rumah ibu pertiwi. Kita akan lebih banyak mencurahkan perhatian, daya pikat dan berbagai usaha untuk membuat halaman depan rumah terus indah kokoh mempesona. Lain halnya dengan apa yang sudah sekian kali pergantian rezim dalam melakukan pembangunan. Darat dijadikan sebagai teras depan karena itu harus tampak indah dan gagah. Bagian belakang dibiarkan belakangan saja pembangunannya. Mungkin saja karena kesalahan paradigma ini yang membuat alokasi anggaran untuk TNI Angkatan Darat jauh lebih besar porsinya dibanding TNI AL dan TNI AU.

Padahal konsep strategi pertahanan maritim yang tangguh adalah justru dengan memperkuat modernisasi alutsista dan territorial atas lautan. Lebih baik menghadang segala ancaman luar dari lautan daripada menunggu ancaman sudah masuk di daratan. Sejak masa imperialisme kolonialisme (bahkan hingga kini) Inggris Britania Raya, Spanyol, Portugis, Jepang, dan Belanda serta Amerika Serikat telah mencatatkan diri sebagai negara adidaya yang serius memperkuat basis strategi dan doktrin pertahanan kedaulatan negaranya dengan menguasai laut. Menjadikan laut sebagai wajah depan yang kokoh dan tangguh bagi rumah mereka.

Kedua, nyaris tidak ada atau miskin kesadaran maritim (*maritime awareness*) pada masyarakat dan generasi bangsa. Kesalahan ada pada paradigma sistem Pendidikan dan desain kebudayaan yang berorientasi pada prestasi dan capaian bermatra darat. Status sosial ekonomi kaum pekerja atau profesi dinilai “lebih bergengsi” jika bidang profesinya terkait daratan bukan kelautan. Akibatnya kesadaran maritim generasi bangsa sangat minim. Diyakini cukup banyak generasi milenial nyaris tidak tahu lagi bentangan geografi dan peta bumi serta kelautan Indonesia. Bahkan kerap kita jumpai dalam gurauan generasi milenial, makna laut terkesan buruk, diibaratkan tempat pembuangan segala kesialan atau ketololan. Misalnya di kalangan anak muda populer istilah “*ke laut aja!*” Mereka lupa padahal nenek moyang mereka adalah pelaut, yang gemar mengarung luas samudera, menerjang ombak tiada takut, bahkan menempuh badai sudah biasa.

Ketiga, tidak ada agenda besar untuk mengarusutamakan maritim (*mainstreaming maritime agenda*) ke dalam segenap kebijakan dan keputusan politik negara. Maka tidak heran jika selama ini Kementerian/Lembaga yang ada kaitannya dengan maritime justru hanya menerima porsi anggaran yang relatif sangat rendah. Bahkan TNI AL dan TNI AU sebagai institusi utama pertahanan keamanan maritim NKRI sangat jauh anggaran per-tahun yang diterimanya dibandingkan dengan TNI AD. Tentu ini bukan berarti mengabaikan matra Angkatan Darat. Harus kita akui pula dalam alokasi anggaran untuk Kementerian Pertahanan dalam Nota Keuangan APBN tahun-tahun belakangan ini tercatat sebagai Kementerian terbesar yang teralokasi APBN. Namun seharusnya, jika benar-benar ingin menjadikan kedaulatan maritim Indonesia menjelma sebagai Poros Maritim Dunia, maka sudah seharusnya ada kebijakan dan keputusan politik bahkan regulasi hukum dengan segenap sektor maupun lintas sektoral ditopang oleh pengarusutamaan maritim. Tuntutan perlunya modernisasi alutsista terkesan dipenuhi sekadarnya, meski beban kewajibannya membentang luas di seluruh kedaulatan lautan NKRI.

Instansi terkait kedaulatan maritim di Indonesia antara lain terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Maritim, TNI AL, TNI AU, Kepolisian RI (Polair), Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan (Laut), Badan Informasi Geospasial, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, dan Badan Keamanan Laut.

Tabel 1 berikut ini membuktikan bahwa kebijakan politik anggaran maritim tergolong sangat minim dan nyaris tidak didukung adanya pengarusutamaan maritim. Bahkan tampaknya di masa pemerintahan Presiden Jokowi porsi anggaran untuk Kementerian yang terkait langsung dengan maritim justru dari tahun 2015 (berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) sampai tersusunnya RAPBN 2019 relatif menunjukkan tren yang menurun dari tahun ke tahun. Maka, salahkah apabila muncul pertanyaan seriuskah menjalankan Poros Maritim Dunia? Bagaimana “nasib masa depan kedaulatan maritim” bila dirancang dengan *grand strategy* yang minim anggaran dan tanpa agenda pengarusutamaan maritim?

Tabel 1. Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Terkait Sektor Kedaulatan Kemaritiman, 2014-2019 (miliar rupiah)

	KEMENTERIAN/LEMBAGA	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	Outlook	RAPBN
1	Kementerian Pertahanan	86.185,6	101.363,0	108.732,8	108.011,8	107.682,4	107.157,9
2	Kepolisian Negara Republik Indonesia	43.952,5	61.972,8	79.272,4	84.007,7	95.031,5	76.213,5
3	Kementerian Perhubungan	28.722,8	47.118,0	42.902,5	45.983,7	48.203,1	41.554,9
4	Kementerian Kelautan dan Perikanan	5.865,7	9.276,5	10.567,5	9.299,6	7.287,6	5.483,0
5	Badan Informasi Geospasial	688,4	644,4	685,2	845,0	790,9	727,7
6	Badan Keamanan Laut	-	-	1.876,2	955,8	559,0	447,4
7	Kemenko Bidang Kemaritiman	-	106,1	413,2	350,5	300,3	254,2
8	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	127,8	173,9	179,8	186,3	203,5	194,0
Total Belanja (86 K/L)		577.164,8	732.137,1	767.809,9	763.575,1	847.435,2	840.284,0

Sumber Data: Diolah kembali dari Nota Keuangan APBN Kementerian Keuangan RI (Tahun 2014-2019)

Diskusi

Menjadi negara maritim adalah sebuah *geostrategic default*, pilihan tak terelakkan bagi Indonesia sebagai negara kepulauan bercirikan Nusantara (Rosyid dan Ekowanti, 2014). Kita patut bangga ketika Poros Maritim Dunia digelorkan. Kita pantas menaruh harapan baru yang besar sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Seketika itu menjadi marak dan terbukanya diskusi di banyak forum hingga memunculkan berbagai gagasan, strategi, dan segala kreativitas bangsa untuk lebih memperkuat, lebih mempertajam, bahkan mentransformasi seluruh potensi kemaritiman itu menjadi kekuatan dan kedaulatan Indonesia atas laut (*sea power and maritime sovereignty*).

Menjadi negara maritim artinya memiliki kapasitas untuk memanfaatkan laut sebagai ruang hidup (*lebensraum*) untuk kepentingan nasional. Kepentingan kita di laut tidak hanya di wilayah di mana kita berdaulat, tapi juga di perairan internasional. Tentu tantangan pertama kita adalah meningkatkan kehadiran kita sebagai bangsa di laut kedaulatan kita secara efektif (Rosyid dan Ekowanti, 2014).

Strategi membangun kedaulatan maritim Indonesia –sekiranya dikehendaki benar-benar berdaulat atas laut dalam arti yang memang sebenar-benarnya– adalah perlu merevitalisasi konsep Tri Sakti Bung Karno pada tahun 1963 yaitu kedaulatan dalam politik, kemandirian dalam ekonomi, dan kepribadian dalam berkebudayaan. Barulah kemudian harus ada pengarusutamaan maritim ke dalam desain utama pembangunan dan kebijakan politik anggaran yang dijalankan dengan mereduksi kesalahan-kesalahan paradigma pembangunan maritim. Bukan hanya berdaulat atas maritim saja bahkan kita bisa memperoleh bonus yang lebih hebat dari bonus demografi yaitu bonus sebagai negara Poros Maritim Dunia. Tanpa melakukan semua itu niscaya frasa kedaulatan maritim Indonesia yang tidak berdaulat memperoleh sandaran pembenarnya.

Daftar Pustaka

- Adam, Latif dan Inne Dwiastuti. 2015. Membangun Poros Maritim Melalui Pelabuhan. *Masyarakat Indonesia: Majalah Ilmu-ilmu Sosial Indonesia* Vol. 41 No. 2 Desember. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Press.
- Anggoro, Kusnanto. 2009. Strategi Pertahanan Kepulauan, Diplomasi Kelautan dan Kekuatan Matra Laut Indonesia. *Jurnal Diplomasi* Vol. 1 No. 2 Edisi September. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Departemen Luar Negeri RI.
- Arsana, I Made Andi. 2007. *Batas Maritim Antarnegara, Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Arsana, I Made Andi. 2009. Mengelola Laut Indonesia: Tantangan Sebuah Negara Kepulauan. *Jurnal Diplomasi* Vol. 1 No. 2 Edisi September. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Departemen Luar Negeri RI.
- Burhanuddin, Safri dkk. 2003. *Sejarah Maritim Indonesia: Menelusuri Jiwa Bahari Bangsa Indonesia dalam Proses Integrasi Bangsa (Sejak jaman Prasejarah hingga Abad XVII)*. Jakarta: Pusat Kajian Sejarah dan Budaya Maritim Asia Tenggara Lembaga Penelitian

- Universitas Diponegoro berkerja sama dengan BRKP Departemen Kelautan dan Perikanan.
- Departemen Penerangan RI, 1963. *Kembalilah Menjadi Bangsa Samudera!* Amanat Presiden Sukarno pada resepsi pembukaan Munas Maritim ke-I, 23 September.
- Djalal, Hasjim. 2009. Mengelola Potensi Laut Indonesia. *Jurnal Luar Negeri*, Vol. 26 No. 3 September-Desember. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Departemen Luar Negeri RI.
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, 2017. *Indonesia Poros Maritim Dunia*. Paparan Kemenko Maritim atas 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2015. *Diplomasi Poros Maritim, Ekonomi Kelautan dalam Perspektif Politik Luar Negeri*. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK).
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2016. *Diplomasi Maritim: Keamanan Maritim dalam Perspektif Politik Luar Negeri*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi Internasional (Pusat P2K OI).
- Lapian, Adrian B. 2009. *Orang Laut-Bajak Laut-Raja Laut, Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Limbong, Bernhard. 2015. *Poros Maritim*. Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. 1994. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks, CA Sage Publications.
- Pamungkas, Cahyo. 2015. Nasionalisme Masyarakat di Perbatasan Laut: Studi Kasus Masyarakat Melayu-Karimun. *Masyarakat Indonesia: Majalah Ilmu-ilmu Sosial Indonesia* Vol. 41 No. 2 Desember. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Press.
- Pramono, Agung. 2017. Dapatkah Konflik Laut Cina Selatan Dikelola? *Strategi Politik, Ekonomi & Keamanan* Vol. 1 No. 2. Oktober/November. Jakarta: The Yudhoyono Institute.
- Prasetya, Ade. 2016. *Ekonomi Maritim Indonesia*. Yogyakarta: Diandra Kreatif.
- Prasetyo, Sigit Aris. 2009. Arti Penting Samudera Hindia dan Visi Poros Maritim. *Jurnal Hubungan Luar Negeri*, Vol. 31 Nomor 3 Edisi Juli-Desember. Jakarta: Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri RI.

- Prawirosusanto, Khidir Marsanto. 2015. Orang Laut, Pemukiman, dan Kekerasan Infrastruktur. *Masyarakat Indonesia: Majalah Ilmu-ilmu Sosial Indonesia* Vol. 41 No. 2 Desember. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Press.
- Priamarizki, Adhi and Keoni Indrabayu Marzuki. 2016. Joko Widodo's Second Cabinet Reshuffle: Political Cartel and Paradox of Political Stability. *Indonesian Quarterly*, Vol. 44 No. 3 Third Quarter. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
- Purdjianto, Tedjo Edhy. 2009. Peran TNI Angkatan Laut dalam Penegakan Kedaulatan Negara dan Keamanan di Laut. *Jurnal Diplomasi* Vol. 1 No. 2 Edisi September. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Departemen Luar Negeri RI.
- Raharjo, Sandy Nur Ikfal. 2015. Tinjauan Buku Menegosiasikan Batas Wilayah Maritim Indonesia dalam Bingkai Negara Kepulauan. *Masyarakat Indonesia: Majalah Ilmu-ilmu Sosial Indonesia* Vol. 41 No. 2 Desember. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Press.
- Rosyid, Daniel Mohammad 2010. *Paradigma Pembangunan Kepulauan Indonesia Abad 21: Pidato Pengukuhan Guru Besar*. Jurusan Teknik Kelautan ITS Surabaya.
- Rosyid, Daniel Mohammad, dan Masroro Lilik Ekowanti, 2014. Agenda Maritime Mainstreaming Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean 2015: Agenda Teknologi Rendah Energi, *Jurnal Pertahanan*, Volume 4, Nomor 3.
- Rosyidin, Mohamad. 2016. Isu Natuna dan Kebijakan Realpolitik Indonesia. *Analisis CSIS* Vol. 45 No. 4 Kuartal Keempat. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
- Salim. 2016. *Ketahanan Pangan dari Laut Sea Power Perspective "My Fish My Life"*. Yogyakarta: Diandra Kreatif.
- Salim. 2017. *Konsep Neogeopolitik Maritim Indonesia Abad 21 Ancaman Zionis dan China*. Yogyakarta: Diandra Kreatif.
- Salusu, J. 2009. Indonesia Negara Maritim: Sebuah Refleksi dan Visi. *Jurnal Luar Negeri*, Vol. 26 No. 3 September-Desember. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Departemen Luar Negeri RI.
- Satria, Arif. 2015. *Politik Kelautan dan Perikanan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Setiawan, Azhari. 2016. Modernisasi Alutsista Indonesia: Sebuah Evaluasi. *Analisis CSIS* Vol. 45 No. 4 Kuartal Keempat. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

- Tempo.co. 2015. Susi: Kerugian Negara Rp 3.000 Triliun Itu Sungguhan!
<https://bisnis.tempo.co/read/677717/susi-kerugian-negara-rp-3-000-triliun-itu-sungguhan/full&view=ok> (diakses 12 Oktober 2018).
- Witjaksono. 2017. *Reborn Maritim Indonesia Perspektif Sistem Ekonomi Kelautan Terintegrasi (SEKTI)*. Jakarta: PT. Adhi Kreasi Pratama Komunikasi.
- Yusuf, Chandra Motik (Editor). 2010. *75 Tahun Prof. Dr. Hasjim Djalal MA, Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim*. Jakarta: Lembaga Laut Indonesia.
- Zuhdi, Susanto. 2015. Membangun Kehidupan Harmoni di Samudera Hindia: Suatu Perspektif dan Pendekatan Sejarah Maritim. *Jurnal Hubungan Luar Negeri*, Vol. 31 No. 3 Edisi Juli-Desember. Jakarta: Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri RI.

Pengelolaan Sumberdaya dan Ekonomi Perbatasan: Kajian Ekonomi Politik Kemaritiman Berkeadilan

Pazli
Universitas Riau.
Pazliku@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia adalah negara agraris sekaligus negara maritim. Sejak lama penduduknya bekerja disektor pertanian, tanah dan lahan daratan objeknya.....petani. struktur ekonomi negara masih di dominasi pertanian.Kini Indonesia berkomitmen membangun kemaritiman. Potensi itu terdapat pada 5,8 juta km2 wilayah Indonesia, dimana dua pertiga bagiannya adalah berupa laut. Terdiri dari 17.500 lebih pulau, yang terangkai oleh garis pantai sepanjang 81.000 km. Lebih kurang 70 persen potensi kekayaan bangsa Indonesia berada di lautan. Tantanganya 25,4 persen dari seluruh orang miskin di Indonesia adalah Nelayan. Ini mengindikasikan bahwa mereka yang berhubungan langsung dengan aspek kelautan dan kemaritiman belum sejahtera. Pertanyaanya “Mengapa SDA dan ekonomi kemaritiman khususnya di perbatasan menghadapi banyak tantangan kepada subjek/aktor kemaritiman?. Lalu seperti apa kebijakan alternatif yang diperlukan untuk terwujudnya SDA dan ekonomi kemaritiman yang berdaulat untuk aktornya?”. Sumberdaya dan ekonomi kemaritiman yang berkedaulatan yaitu mengintegrasikan dan menyelaraskan hak-hak dan kewajiban aktor negara-aktor swasta domestik dan asing dan aktor rakyat dalam politik dan ekonomi kebijakan kemaritiman. Selayaknya sumberdaya yang ada harus di tata-kelolah dirasakan manfaatnya secara inklusif, yaitu perencanaan dan intervensi teritori: oleh masing-masing aktor setempat dengan modal sumberdaya setempat dan untuk aktor setempat, ringkasnya kekayaan teritori untuk warganya. Interaksi dengan dunia luar teritori kerjasama dalam kontek hubungan internasional) tetap diupayakan dengan meminimalisir kebocoran SDA dan kekayaan di teritori dalam konteks terjadinya pertukaran yang menguntungkan secara ekonomi dan politik.

Kata Kunci: *Ekonomi kemaritiman, Kedaulatan Negara, Rakyat secara Inklusif terhadap Asing.*

Latar Belakang

Secara historis sebelum masa penjajahan Indonesia melalui Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, dan sejumlah Kesultanan Islam pernah menjadi negara maritim yang tangguh, cukup makmur, dan disegani oleh masyarakat dunia dengan wilayah kekuasaan membentang dari Campa (India), Nusantara, Siam (Thailand), hingga sebagian Tiongkok.

Hingga hari ini secara historis masih terdapat dua konsep brand yang melekat jika menyebut Indonesia; nenek moyangku orang Pelaut dan Indonesia negara agraris. Agraria, yang mencakup Tanah dan isinya, Air dan potensinya, Udara dan dirgantaranya, semuanya ada dan sangat penting bagi bangsa Indonesia.

Republik Indonesia sejak awal kemerdekaan ingin mencapai cita-cita bangsa untuk wujudkan kesejahteraan, kemakmuran, dan pemerataan seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana diatur dalam rentetan konstitusi negara; Pancasila, UUD 1945 pasal 33, UUPA No 5/ 1960 tentang Pokok-pokok Agraria. UUPA NO 5 tahun 1960 menjadi landasan bagi

pembangunan daratan yakni perkebunan. Semangat dan isi UUPA No. 5/1960 tersebut telah berpengaruh dominan pada pembangunan perkebunan di Indonesia (Soetrisno, 1989). Sedangkan terhadap sumberdaya kemaritiman pemerintah pada masa Pemerintahan Presiden Soekarno sangat serius secara kelembagaan dengan membentuk Kementerian Koordinator Maritim pada 1966, tapi umurnya hanya enam bulan.

Pemerintah Indonesia dibawa rezim Orde Baru fokus membangun perkebunan yang bersandar kepada aspek agraria. Penelitian yang dilakukan Hadi (2007) menyatakan, perkebunan besar sebagai sumber devisa non migas, sumber kesempatan kerja serta lapangan investasi bagi investor nasional maupun internasional. Kontribusi perkebunan juga dipandang memberikan efek berganda kepada perekonomian nasional sebagaimana Frasetiandy (2009), “penyerapan tenaga kerja baik tenaga lokal maupun pendatang; peningkatan PDRB atau menambah APBD melalui perpajakan akan berdampak secara jangka panjang bagi meningkatkan kondisi perekonomian suatu daerah”.

Menjadikan komersialisasi agraria seperti membukanya untuk investasi asing sebagai sumber pendapatan ekonomi nasional. Investasi asing yang padat modal dipayungi dengan UUPM (Undang-Undang Penanaman Modal) dan GBHN. Lahan perkebunan yang semula digarap petani dengan payung hukum UUPA No. 5/1960, baik di pulau Jawa dan diluar pulau Jawa ditata dengan memberikan fasilitas HGU (Hak Guna Usaha) kepada Investor Asing. Beberapa kebijakan agraria diarahkan untuk mendukung pembangunan perkebunan di Indonesiapada masa pemerintah Orde Baru antara lain;

1. Undang-undang No. 5/1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan, UU No.11/1967 tentang Pertambangan, kemudian Undang-undang UU No.1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (UUPMA) yang kemudian diganti dengan UU No. 11/1970.
2. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menhut, Mentan, Kepala BPN No. 364/Kpts-II/90, 519/Kpts/HK. 050/7/90, tentang Pelepasan Kawasan Hutan dan No. 23/Kpts-VIII-1990 prosedur HGU, PP No. 40/1996 tentang HGU, SK No.76/Kpts-II/1997 tentang pelimpahan wewenang pencabutan SKB Menhut, Mentan dan Kepala BPN No. 364/Kpts-II/90, 519/Kpts/HK.050/7/90, SK Menhutbun No. 728/Kpts-II/1998 tentang kebijakan yang mengatur luas maksimum pelepasan kawasan hutan untuk budidaya perkebunan, Keppres. No. 34/2003 tentang kebijakan nasional di bidang pertanahan, UU No. 26/2007 tentang Tata Ruang, PP No.18/2010 tentang Usaha Budi Daya Tanaman Skala Luas, yang semuanya itu menjadi landasan kebijakan penatagunaan lahan untuk menopang pembangunan perkebunan.

3. Peraturan pemerintah No.14/1968 tentang Perusahaan Negara Perkebunan (PNP). Berdasarkan UU No.9/1969 PNP mengalami perubahan bentuk hukum dari perusahaan negara menjadi Perseroan Terbatas, yang saat ini dikenal dengan PTPN. Semangat dan implementasinya didominasi *power* pemerintah dan pasar.

Demikian banyaknya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mendukung pembangunan perkebunan yang juga aspek agraria yang terdapat di daratan. Bagaimanapun juga Indonesia juga telah lama terdoktrin sebagai negara agraris yang cenderung mengedepankan pembangunan pada wilayah agraris bahkan mengarah kepada implementasi perkembangan perkotaan. Sehingga orientasi pembangunan masih lebih cenderung pada wilayah teresterial atau menuju pedalaman/pegunungan.

Namun demikian sampai hari ini pembangunan perkebunan yang juga menggunakan agraria tanah dan lahan sebagai basis pengembangannya masih mendapatkan kritikan, bahwa perkebunan tidak berkontribusi kepada perekonomian bangsa, dipandang tidak mensejahterakan buruh dan keluarganya. "Perkebunan besar tidak mendorong perkembangan ekonomi lokal, bersifat anti pembangunan, tidak memiliki kaitan (*linkages*) yang berarti dengan perekonomian sekitarnya" Saith (1989). Menurut Kartasmita (2005) "Efek dari perkebunan besar terhadap sikap penduduk tidak seperti yang diharapkan, rakyat ternyata tidak dengan sendirinya menjadi mandiri, malah justru menambah ketergantungannya dari perusahaan untuk macam-macam persoalan di masyarakat. Ada kesan bahwa uluran tangan perusahaan justru dianggap sebagai suatu kewajiban".

Perumusan Masalah.

Pada Era Reformasi, tepatnya di awal Pemerintahan Presiden KH. Abdurrahman Wahid (September 1999), dibentuklah Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) sekaligus DMI (Dewan Maritim Indonesia) yang sejak 2010 namanya berubah menjadi KKP dan DEKIN (Dewan Kelautan Indonesia). Kemudian pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam agenda pembangunan Nasional menekankan pada percepatan pembangunan Kelautan.

Sebagai negara dengan luas wilayah laut yang sangat besar percepatan pembangunan kelautan merupakan tantangan yang harus diupayakan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dalam kaitan ini penegakan kedaulatan dan yurisdiksi nasional perlu diperkuat sesuai dengan konvensi PBB tentang Hukum Laut yang telah diratifikasi. Disamping itu, tantangan utama lainnya adalah bagaimana mengembangkan industri kelautan, industri perikanan, dan peningkatan pendayagunaan potensi laut dan dasar laut bagi kesejahteraan

rakyat Indonesia. Disamping itu upaya menjaga daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut juga merupakan tantangan dalam pembangunan kelautan.

Sudah seberapa banyak kebijakan yang disiapkan pemerintah untuk menunjang pembangunan kelautan dan kemaritiman Indonesia, sehingga makalah ini ingin mendiskusikan apa yang menjadi tema pertemuan ini yaitu Benua Maritim. Untuk itu permasalahan utama yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah: **“Bagaimana Kebijakan Kelautan dan Kemaritiman di Indonesia pada aspek penatagunaan (penguasaan, pemilikan dan peruntukannya) kepada subjek/aktor maritim. Sudah adakah kebijakan yang berkeadilan? Kalau belum, apa gagasan dan kontribusi pemikiran untuk terwujudnya Benua Maritim yang berkeadilan?.**

Tujuan Makalah

Penyajian makalah ini bertujuan untuk:

- (1) Ikut menyukseskan dan memenuhi tujuan yang akan dicapai dalam Konvensi AIHII-2016 di Universitas Hasanuddin.
- (2) Menguraikan fenomena yang belum berkeadilan dalam pembangunan kemaritiman untuk menuju Benua Maritim Indonesia pada aspek penatagunaan potensi Maritim (aspek penguasaan, pemilikan dan peruntukannya);
- (3) Menganalisis kebijakan-kebijakan kemaritiman yang pernah ada, pada aspek substansi kebijakan, implementasinya sehingga diketahui benar apakah pembangunan kemaritiman yang ada sudah memenuhi unsur-unsur berkeadilan atau tidak;
- (4) Mengemukakan implikasi dan bagaimana gagasan-gagasan konstruksi pembangunan kemaritiman yang belum “berkeadilan” menjadi “berkeadilan” kepada subjek kemaritiman (perusahaan negara, perusahaan swasta dan rakyat).

Manfaat yang Diharapkan.

Makalah ini diharapkan secara teoritis keilmuan berkontribusi kepada pengembangan formulasi kebijakan kemaritiman yang berkeadilan khususnya pada aspek penatagunaan(penguasaan, pemilikan dan peruntukan) bagi pemerintah, dunia usaha, rakyat sebagai petani nelayan serta pengambil kebijakan lainnya. Secara khusus penelitian ini diharapkan pada praxis (kegunaan) dapat diimplementasikan dalam dimensi pembangunan lainnya yang berhubungan dengan aspek kelautan yang memuat interaksi hak dan kepentingan

ketiga subjek/aktor seperti pembangunan tol laut, pelabuhan dan dermaga dan fasilitas umum seperti rumah sakit kelautan dan lembaga pendidikan kelautan.

Tinjauan Pustaka

A. Dimensi Benua Maritim Indonesia.

Kemaritiman memerlukan totalitas, dan visi politik yang kuat. Inggris sebagai Super Power Maritim kedua setelah Spanyol menguasai seantero jagad dengan semboyan *England rules the waves*, merosot pengaruhnya di pertengahan abad ke dua puluh, ketika armada lautnya tidak mampu lagi menopang imperiumnya. Sebagai Negara dengan doktrin kemaritiman, Inggris masih berusaha mempertahankan sisa-sisa hegemoninya dengan tetap menguasai pulau di koridor sempit Atlantik - Laut Tengah, ujung selatan Afrika, ujung selatan anak benua India, hingga kepulauan Malvinas di ujung selatan Benua Amerika. Semua Itu dipertahankan mati-matian sebagai bagian dari doktrin mempertahankan kehidupan organisme negara. Ekonomi Biaya Tinggi (Perang Malvinas 1982).

Visi kemaritiman Amerika Serikat, banyak dipengaruhi oleh pandangan Laksamana AT Mahan -Mantan Gubernur Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (US Naval War College) yang menulis buku "*The influence of Sea Power*", pada tahun 1890. Amerika Serikat yang secara geografis terpencil di antara Lautan Pasifik dan Lautan Atlantik, untuk dapat unggul di kedua palagan tersebut memerlukan armada perang yang cukup dan masif untuk mengamankan jalur logistik perang maupun perdagangan, operasi intelijen, penggelaran pasukan, *surveillance* dan intelijen serta *deterrence factor* lainnya. Itu sangat mahal. Sehingga Amerika disamping pendekatan *hard power* juga menjalankan strategi *soft power* untuk memastikan dominasi dan keunggulan hegemoni lautnya.

Amerika Serikat mendesain dan memastikan seluruh hukum dan peraturan di laut sejalan dengan kepentingan Nasional Strategisnya. Misalnya dalam UNCLOS 1982 (Konvensi Hukum Laut), dinyatakan bahwa Negara Kepulauan seperti Indonesia harus membuka dan menjamin sebagian jalur laut teritorialnya secara bebas dan damai dapat dilalui oleh armada perang dan kapal dagang asing. Laut di luar zona ekonomi eksklusif merupakan laut bebas (*high sea*). Armada Perang Amerika dapat lego jangkar atau berpatroli di laut bebas. Negara-negara yang memiliki jalur perairan laut sempit (*choke points*) seperti Selat Malaka, selat Hormuz atau selat Turki dalam rangka memastikan keamanan jalur harus membuka diri kepada protokol dan kerja sama Internasional. Hal ini dimaksudkan agar Negara-negara lain tidak perlu harus

membangun kekuatan armada sendiri, yang potensial merupakan ancaman bagi supremasi kemaritiman Amerika.

Pendekatan *smart* dan *soft* dilakukan melalui jalur organisasi. Organisasi Maritim Internasional (IMO) misalnya. Badan ini memiliki kewenangan mutlak bak Laksamana Raja Dilaut. Pelayaran dalam perdagangan internasional, harus sesuai dengan standar praktek tertinggi dalam kaitannya dengan keselamatan kemaritiman, efisiensi navigasi dan pencegahan serta pengendalian polusi biota laut dari kapal. Sertifikasi teknis kelaikan kapal, awak pelayaran, muatan, hukum asuransi dan sebagainya berkiblat ke sana. Ini merupakan *creative barrier* yang tidak memungkinkan negara-negara kecil untuk merubah keseimbangan dominasi penguasaan laut . Industri manufaktur, barang dan jasa di Amerika Serikat dan Inggris berkembang dan dikembangkan sesuai dengan visi kemaritimannya.

B.Pendekatan untuk Pembangunan Berkeadilan.

Pembangunan yang berhubungan dengan agraria (Daratan, Udara dan Lautan) sebenarnya berawal dari perspektif pembangunan yang dilakukan di negara-negara berkembang, sebagaimana menurut Islam dan Henault, ada empat model pendekatan yang mempengaruhi proses pembangunan di negara berkembang yaitu: (i) model pertumbuhan GNP, (ii) model pemerataan dan pemenuhan kebutuhan dasar, (iii) model pembangunan sumberdaya manusia (*People Centered Development*), (iv) model pembangunan berkelanjutan (dalam Mustopadidjaya, 2003).

Pertumbuhan tidak identik dengan “pembangunan”, sebab walaupun pertumbuhan ekonomi tinggi dapat dicapai namun masih dibarengi oleh masalah pengangguran, kemiskinan di pedesaan, distribusi pendapatan yang timpang dan ketidakseimbangan struktural (Sjahrir, 1986). Hal ini memperkuat keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat yang diperlukan (*necessary*) tetapi tidak mencukupi (*sufficient*) bagi proses pembangunan (Esmara 1986 dan Meier, 1989)³

Salah satu paradigma baru dalam pembangunan adalah untuk mencapai pembangunan berkeadilan seperti pertumbuhan dengan distribusi kebutuhan pokok (*basic needs*),

3. Pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan produksi barang dan jasa secara nasional , sedangkan pembangunan berdimensi lebih luas. Todaro (1987:86-91) menyatakan bahwa defenisi pembangunan haruslah didefenisikan kembali menjadi “suatu usaha untuk mengurangi atau untuk menghapuskan kemiskinan, ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan mengurangi pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh” Meier (1989:h.6) menyatakan bahwa defenisi pembangunan ekonomi terwujud melalui upaya meniadakan setidaknya mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan. Myrdal (1968) mengartikan pembangunan sebagai upayah mengubah system sosial kearah yang lebih baik. Perubahan terutama nilai-nilai dan kelembagaan (dimensi kualitatif) menjadi jauh lebih penting dari pertumbuhan ekonomi.

pembangunan mandiri (*self-reliant development*), pembangunan berkelanjutan dengan perhatian terhadap alam (*ecodevelopment*), pembangunan yang memperhatikan ketimpangan pendapatan menurut etnis (*ethnodevelopment*). Pandangan-pandangan yang berkembang dalam teori-teori pembangunan terutama di bidang ekonomi memang mengalir makin deras ke arah manusia sebagai pusat perhatian dan sasaran sekaligus pelaku utama pembangunan subjek dan objek sekaligus, (Kartasasmita, 1997). Maka berkembang kelompok pemikiran yang disebut sebagai paradigma pembangunan sosial yang tujuannya adalah untuk menyelenggarakan pembangunan yang berkeadilan (Kartasasmita, 1997).

C.Konsep, Teori dan Taksonomi Keadilan

Menurut Daniel Webster” keadilan adalah kepentingan manusia yang paling luhur di atas permukaan bumi” (Daniel dalam Paton, 1951). Terminologi hakekat keadilan dapat dilihat dari aliran *filsafat hukum* mengartikan keadilan sebagai hubungan yang ideal antara manusia, dari aliran *historical jurisprudence* dimana keadilan diwujudkan dalam jiwa dan bangsa, aliran *sociological jurisprudence* keadilan diwujudkan dalam hukum kehidupan, aliran *marxis jurisprudence* keadilandiwujudkan dalam ideologi kelas, sedangkan aliran *legal positivisme* keadilan diwujudkan dalam kepastian dalam undang-undang, etika, politik, ekonomi dan ilmu hukum.

Keadilan juga dilihat dari sudut ilmu politik ekonomi sangat berkaitan dengan aliran utilitarisme, yaitu menggambarkan tentang kebahagiaan, kenikmatan hidup dan tidak adanya kesengsaraan Ricard A. Prosner (1981), sedangkan Charles E Merriam (1945) keadilan dari segi politik berkaitan dengan tujuan negara yaitu, *eksternal security, internal order, freedom, justice, general walfare*.

Plato berpendapat “ada keadilan individual dan ada keadilan kolektif dalam negara. Keadilan individu dimana individu itu dapat menguasai dan mengendalikan dirinya sesuai dengan panggilannya yang ditentukan oleh bakat, kemampuan dan keterampilannya. Sedangkan keadilan kolektif dalam negara didasarkan kepada kebutuhan dan keinginan manusia yang begitu banyak dan beraneka ragam dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menurut Plato perlu adanya pembagian kerja sesuai dengan bakat, bidang keahlian dan ketrampilan setiap warga negara (Friedmann, 1994).

Aristoteles dalam *nicomachean ethics* memandang keadilan sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan, pengertian keadilan menjadi (1) *distributive justice*, (2) *Corrective atau remedial justice*. Distributive justice (keadilan membagi) memberikan

petunjuk tentang pembagian barang-barang dan kehormatan kepada masing-masing orang menurut tempatnya di masyarakat.

Keadilan ini menghendaki perlakuan yang sama menurut hukum, sedangkan *corrective atau remedial justice* (keadilan memperbaiki) adalah terutama mengenai ukuran prinsip-prinsip teknis yang mengatur administrasi hukum yang menghendaki suatu ukuran umum guna tindakan yang objektif.

Program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan yaitu; Pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang; Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung (Rawls, 1973).

Hans Kelsen, mengkonsepkan keadilan menjadi: *Pertama* keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional, yang dirasionalkan melalui pengetahuan yang berwujud suatu kepentingan-kepentingan, namun kepentingan pada akhirnya dapat menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian terhadap konflik kepentingan dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan (Rawls, 1973). *Kedua*, konsep keadilan dan legalitas. Keadilan” mengandung makna legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa (Rawls, 1973).

Prinsip-prinsip keadilan seperti persamaan dihadapan hukum, toleransi, konsistensi dan prosedural, merupakan prinsip konstitusi bagi terciptanya keadilan dalam semua sistem hukum. Keadilan yang merupakan makna dan tujuan utama kehidupan negara hukum akan berhubungan dengan hak milik yang pada intinya berwujud pada: keadilan dalam pembagian atau distribusi dalam hubungan ini penatagunaan potensi kemaritiman yang meliputi; penguasaan, pemilikan dan peruntukan kepada aktor/subjek kemaritiman berdasarkan sejumlah regulasi yang ada yakni Undang-Undang, Peraturan secara hirarkis, yakni penatagunaan potensi kemaritiman yang dalam implementasinya sesuai dengan Regulasi yang secara Materiil berpihak kepada subjek kemaritiman dengan memenuhi prinsip-prinsip berkeadilan.

Perspektif Pembangunan Berkeadilan Di Indonesia

M. Hatta (1932), menegaskan bahwa: “supaya tercapainya suatu masyarakat yang berdasarkan berkeadilan dan kebenaran, haruslah rakyat insaf akan haknya dan harga dirinya, kemudian haruslah ia berhak menentukan nasibnya sendiri dan perihal bagaimana ia mesti hidup dan bergaul. Pendeknya, cara mengatur pemerintahan negeri, cara menyusun perekonomian negeri, semuanya harus diputuskan oleh rakyat dengan mufakat.” Menurut Laksmono (2012) terdapat tiga dimensi dan latar belakang kemiskinan dan khususnya ketidakadilan yang relevan dibicarakan: keadilan sosial, keadilan ekonomi dan keadilan lingkungan. Keadilan sosial mencakup dua elemen yakni pemasalahan keterbelakangan (*underdevelopment*) serta praktek diskriminasi.

Keadilan ekonomi dapat terlihat ketika terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun terjadi kesenjangan (tingginya angka kemiskinan, diskriminasi terhadap penduduk lokal) sebagai akibat persoalan ketidakadilan. Keadilan lingkungan berkaitan dengan potensi konflik sosial dan konflik komunal, konflik bersumber dari berbagai bentuk persingungan atau friksi akibat ekspansi industry. Persoalan di sekitar isu agraria dan kebijakan agraria memang merupakan masalah yang paling sensitive di negeri ini (Laksmono, 2012). Seiring dengan berjalanya peran pasar yang meluas, maka banyak ruang publik yang berangsur dikuasai swasta untuk kepentingan usaha.

Menurut Sarbini (2004)⁴ dalam pengembangan ekonomi kerakyatan kita menolak isi dan jiwa kapitalisme yang bersifat negative, yaitu berusaha mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa peduli akibat-akibatnya, akhirnya selalu menimbulkan eksploitasi, kemiskinan dan konsentrasi kekuatan-dan kekuasaan dalam bentuk monopoli. Pemerataan bukan pemeratakan hasil pembangunan tetapi pemeratakan kesempatan dan kemampuan untuk berproduksi, pemeratakan alat-alat produksi.

Karena rakyat Indonesia banyak di pedesaan, maka dalam rangka pemerataan asset, pertama yang harus menerima adalah desa (Sarbini, 2004). Asset-asset itu antara lain, kepemilikan dan penguasaan faktor produksi tanah, modal peralatan teknologi, kesempatan untuk mendapatkan kredit, kesempatan dan kemampuan memasarkan produksi, serta pendidikan dan keterampilan (Sarbini, 2004). Berbagai masalah yang berakar dari paradigma pasar bebas yang mencari laba sebesar-besarnya bisa dicarikan solusinya dengan mendorong paradigma pembangunan global yang lebih berkeadilan. "Paradigma pembangunan harus

⁴Kapitalisme secara relative lebih unggul dalam memajukan efisiensi dan produktifitas. Kita tidak bisa menolok kapitalisme sebagai keseluruhan, tetapi yang kita tolak adalah isi dan jiwa kapitalisme yang bersifat sangat negative (Sarbini, 1989).

diubah, bukan lagi mengejar laba, tapi martabat kemanusiaan. Prinsipnya keadilan adalah prasyarat kelestarian," (Dillon, 2013).

Menurut Dillon (2013) pembangunan ke depan semestinya dilakukan dengan pendekatan basis (*bottom up*), berdasarkan hak untuk pembangunan (*right to develop*). "Sehingga semua orang memberikan kontribusi sesuai dengan fitrah dia, tanggung jawab dia, hak dia dan kemampuannya," (Dillon 2013). "Karena itu pembangunan itu haruslah dimulai dari pertanian dan perdesaan. Dillon menekankan bahwa strategi pertumbuhan ke depan haruslah bersifat jangka panjang (*long term*), *komprehensif*, *ambitious*, memberikan peluang kepada semua kelompok untuk berkontribusi (*public private people partnership*).

Dalam penguasaan asset-aset oleh sektor ekonomi rakyat, maka yang paling rentan adalah status kepemilikan dan penguasaan, para petani dan nelayan serta merta dipandang sebagai orang miskin oleh sektor modern (terutama perbankan) karena ketiadaan bukti legal akan kepemilikan dan penguasaannya. Keterbatasan power masyarakat yang ditunjukkan dengan angka kemiskinan dan ketidakberdayaan rakyat secara umum dalam setiap aspek pembangunan, mengharuskan bergesernya konsep negara "peronda" ke konsep negara "kesejahteraan", artinya pembatasan negara dan pemerintah dari kehidupan sosial, pemerintah pasif dalam ekonomi masyarakat, dimana hanya sebagai penjaga ketertiban dan keamanan harus bergeser untuk bertindak aktif di tengah kehidupan masyarakat.

Kerangka Konsep dan Ukuran

Berdasarkan literatur yang ada maka dimensi pokok "tidak berkeadilan" dan Kelautan, Kemaritiman yang terdapat dalam konsep pembangunan diantaranya;

- (1) **Marginalisasi** yakni: upaya menggiring ke posisi peminggiran suatu subjek oleh subjek penatagunaan kemaritiman lainnya, yang terlihat pada tiga aspek utama yaitu; pada akses, pada kontrol dan pada kemanfaatan. Dengan kata lain marginalisasi merupakan sebuah proses sosial yang membuat masyarakat menjadi marginal, baik terjadi secara alamiah maupun hasil kreatifitas sehingga masyarakat tertentu ditransformasikan kepada kedudukan sosial eksklusif yang terpinggirkan yakni menurut sifatnya terjadi dan berakibat adanya ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dalam masyarakat (individu dalam masyarakat

tidak mampu mengakses dan menikmati pelayanan publik, program serta kebijakan yang dibuat oleh pemerintah).⁵

- (2) **Monopoli yakni penguasaan** pihak-pihak yang didahului sebuah peran dominan sejak aspek hulu sampai ke aspek hilirnya, sehingga tercipta monopoli secara dominasi kepada pihak lain pada aspek sumberdaya yang khusus (sebagai penyedia/produsen jenis barang yang dihasilkan). Pada aspek skala ekonomi atau ruang lingkup pasar secara luas (hara-hara produksi dari barang yang di hasilkan, teknologi yang exclusive, promosi) dan aspek kebijakan yang mendukung aspek pertama dan kedua (peraturan perundangan yang mendorong atau menghambat);
- (3) **Dominasi** yaitu penguasaan subjek kemaritiman tertentu terhadap subjek kemaritiman lainnya, melalui perusahaan negara dan perusahaan swasta yang bekerja pada aspek perencanaan dan implementasi penatagunaan (penguasaan potensi, pemilikan, peruntukan) untuk pembangunan .
- (4) **Ekonomi Kelautan (marine economy)** adalah kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayah pesisir dan lautan, dan kegiatan ekonomi di darat (lahan atas) yang menggunakan SDA dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa (goods and services) yang dibutuhkan umat manusia (Dahuri, 2003).
- (5) **Ekonomi maritim (maritime economy)** hanya mencakup transportasi laut (**sea transportation**), industri galangan kapal dan perawatannya (**ship building and maintenance**), pembangunan dan pengoperasioan pelabuhan (**port construction and operations**) beserta industri dan jasa terkait (Stopford, 2004).

Pembahasan Benua Maritim Berkeadilan.

A.Potensi Kelautan dan Kemaritiman Menjadi Benua Maritim

⁵ Menurut J. Yee, marginalisasi dapat pula difahami dalam tiga level, yakni level individu, masyarakat dan struktur global. Marginalisasi ditingkat individu biasanya terjadi dalam bentuk tercerabutnya individu dalam partisipasi atau keikutsertaan mereka dalam aktifitas masyarakat. Marginalisasi dilevel masyarakat (*community*) terjadi dalam dimensi yang lebih luas. Ia terjadi karena program-program dan kebijakan pembangunan lebih memihak pada kalangan sosial atas daripada kalangan bawah. Misalnya masyarakat kelas bawah tidak memiliki akses yang cukup luas untuk masuk dalam pasar kerja karena *eligibility* yang terlalu kompetitif sementara pemerintah tidak berhasil memberdayakan mereka. Sedangkan marginalisasi ditingkat global memiliki bentuk yang lebih kompleks dan luas. Kapitalisme menciptakan ketidakadilan dan ketidakmerataan distribusi sumber daya dan pelayanan publik. Barang-barang publik diambil alih oleh privat sementara masyarakat lokal tidak mampu mengakses sumber daya yang ada disekitar mereka dengan gratis. Di tingkat yang lebih praktis dan lokal, marginalisasi biasanya memiliki beberapa bentuk yang khas, antara lain: masyarakat lokal kehilangan hak dan kedaulatan untuk mengatur diri mereka sendiri (*self governing community*) dalam mengelola aktivitas ekonomi; hilangnya sebagian besar kekayaan masyarakat lokal karena pengelolaan negara yang tidak adil. Biasanya keuntungan dari hasil kekayaan alam diambil untuk pemerintah pusat bahkan oleh asing; masyarakat lokal berpotensi kehilangan identitas diri mereka karena adanya lalu lintas barang, manusia dan nilai yang keluar masuk

Posisi strategis Indonesia banyak memberikan manfaat, setidaknya dalam tiga aspek, yaitu; alur laut kepulauan bagi pelayaran internasional (*innocent passage, transit passage, dan archipelagic sea lane passage*). Di laut Indonesia terkandung kekayaan alam yang sangat besar dan beragam, baik berupa SDA terbarukan (seperti perikanan, terumbu karang, hutan mangrove, rumput laut, dan produk-produk bioteknologi); SDA tak terbarukan (seperti minyak dan gas bumi, timah, bijih besi, bauksit, dan mineral lainnya); energi kelautan (seperti pasang-surut, gelombang, angin, dan *OTEC* atau *ocean thermal Energy Conversion*); maupun jasa-jasa lingkungan kelautan untuk pariwisata bahari, transportasi laut, dan sumber keragaman hayati serta plasma nutfah.

Kekayaan SDA dan jasa-jasa lingkungan kelautan tersebut dapat kita dayagunakan untuk kemajuan dan kemakmuran bangsa melalui sedikitnya 11 sektor ekonomi kelautan: (1) perikanan tangkap, (2) perikanan budidaya, (3) industri pengolahan hasil perikanan, (4) industri bioteknologi kelautan, (5) pertambangan dan energi, (6) pariwisata bahari, (7) hutan mangrove, (8) perhubungan laut, (9) sumberdaya wilayah pulau-pulau kecil, (10) industri dan jasa maritim, dan (11) SDA non-konvensional. Total nilai ekonomi dari kesebelas sektor ekonomi kelautan itu diperkirakan mencapai 1,2 trilyun dolar AS/tahun, dan dapat menyediakan lapangan kerja untuk 40 juta orang. Hari ini sudah pantas disebut sebagai bagian “Benua Maritim Indonesia”.

B. Aspek Penguasaan Kelautan Dan Kemaritiman.

Hari ini kontribusi seluruh sektor kelautan terhadap PDB lebih kurang 20%. Sedangkan negara-negara dengan potensi kelautan dan kemaritiman yang lebih kecil dari Indonesia, seperti Islandia, Korea Selatan, Tiongkok, Norwegia, Jepang dan Thailand, kontribusi bidang kelautannya rata-rata sudah di atas 30% PDB (Dahuri, 2003)

Secara umum di Indonesia nelayan dan masyarakat pesisir masih terlilit derita kemiskinan, sedangkan kerusakan Daerah pesisir terutama ekosistem pesisir (terumbu karang, hutan mangrove, dan estuaria) terus terjadi seperti Pantai Utara Jawa, sebagian Selat Malaka, Pantai Timur Riau dan Kepulauan Riau dan muara Sungai Ajkwa di Papua. Praktik penangkapan ikan ilegal (*illegal fishing*) oleh nelayan asing di perairan kepulauan Riau *illegal logging*, dan kegiatan ekonomi ilegal lainnya seperti penambangan emas tidak berizin di daerah Aliran Sungai yang menuju ke Laut masih saja terjadi.

Ini menjadi bukti bahwa pada aspek penguasaan ekonomi kelautan dan ekonomi kemaritiman yang mencakup kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayah pesisir dan lautan, dan kegiatan ekonomi di darat (lahan atas) yang menggunakan SDA dan jasa-jasa lingkungan

kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa (goods and services), transportasi laut (**sea transportation**), industri galangan kapal dan perawatannya (**ship building and maintenance**), pembangunan dan pengoperasian pelabuhan (**port construction and operations**) beserta industri dan jasa terkait belum dikuasai oleh Indonesia.

C. Aspek Pemilikan Kelautan Dan Kemaritiman.

Permasalahan kelautan dan kemaritiman lain yang selalu menjadi masalah dalam hubungan antara sesama negara maritim adalah belum tuntasnya batas-batas wilayah laut dengan negara-negara tetangga, dan ancaman terhadap kedaulatan wilayah NKRI, ini menandakan bahwa pada aspek pemilikan belum memegang “*Sertifikat Maritim*” yang sesungguhnya.

D.Aspek Peruntukan Kelautan Dan Kemaritiman.

Berbagai masalah didaratan dan di lautan yang dihadapi bangsa dewasa ini adalah tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, kesenjangan antara penduduk kaya vs miskin, disparitas pembangunan antar wilayah (Jawa vs luar Jawa, KBI vs KTI, dan perkotaan vs perdesaan) yang sangat timpang dan rentannya kedaulatan pangan dan energi nasional, daya saing dan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang masih rendah, dan kerusakan SDA dan lingkungan, sektor kelautan dan kemaritiman belum sepenuhnya diketahui peruntukannya untuk kalangan ekonomi yang mana. Indonesia secara fakta sudah tertinggal jauh dengan negara lainnya dalam berbagai aspek kemaritiman. Keterbelakangan inilah yang terus dipacu oleh pemerintahan sekarang (Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla) dan cenderung ke arah perbaikan.

E.Kesalahan Penatagunaan dan Beban Kemaritiman.

Jika semua stake holder terjun ke laut dan ke maritim bermakna aspek menjadikan laut dan maritim sebagai basis baru kehidupan secara ekonomi, sosial dan budaya untuk kesejahteraan ditengah ketiadaan regulasi yang mumpuni maka mulai hari ini kelautan dan kemaritiman akan sangat terbebani dengan aspek penguasaan, pemilikan dan peruntukan untuk beberapa sektor baik terkait maupun tidak terkait langsung.Sedangkan tantangan eksternal (global) yang akan dihadapi adalah perubahan Iklim Global (*Global Climate Change*) beserta segenap implikasi (dampak) nya seperti pemanasan suhu perairan (laut), peningkatan

permukaan laut (*sea level rise*), pemasaman laut (*ocean acidification*), cuaca ekstrem, dan lainnya.

F. Identifikasi Fenomena Masalah Kedepan.

Masalah yang teridentifikasi dari fenomena fenomena yang ada adalah: Indonesia belum punya aturan main yang cukup dari sisi regulasi perundang-undang terutama pada aspek penguasaan, pemilikan dan peruntukan aspek laut dan kemaritiman yang betul-betul menata dan mengakomodir subjek/aktor ekonomi dan politik kelautan dan ekonomi-politik kemaritiman.

Beberapa Indikasi yang muncul adalah lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan pada tahun 2002 dengan alasan “*ineffective occupation*” atau wilayah yang diterlantarkan, semrawutnya penataan selat Malaka yang sejatinya menjadi sumber devisa; hal lainnya adalah pelabuhan dalam negeri belum menjadi international hub port, ZEE yang masih terlantar, penamaan dan pengembangan pulau-pulau kecil, terutama di wilayah perbatasan negara tidak kunjung tuntas, serta makin maraknya praktik illegal fishing, illegal drug trafficking, illegal people, dan semakin meningkatnya penyelundupan di perairan Indonesia.

Penutup.

Pembangunan Benua Maritim aspek kelautan dan kemaritiman yang tidak memiliki kebijakan penatagunaan laut dan maritim dalam ekonomi pembangunan aspek penguasaan, pemilikan dan peruntukannya maka dikhawatirkan “Benua Maritim” akan bernasib sama dengan Pembangunan Perkebunan yang tidak berkeadilan kepada subjeknya. Pembangunan “Benua Maritim” tidak akan berkeadilan dan hanya menimbulkan eksek secara berkepanjangan sebab kusut masai sejak hulu sampai ke hilir, antara lain:

1. Memunculkan marginalisasi yaitu ketidaksetaraan penguasaan asset akses, kesempatan, kemanfaatan dari ekonomi kelautan dan ekonomi kemaritiman.
2. Peranan negara mau tidak mau akan sangat dominan sehingga berlansung dominansi dan bertentangan dengan UUD 1945, pasal 33.
3. Memunculkan kolaborasi dan kolusi fungsi dan peranan negara, perusahaan negara, swasta sehingga terjadi tindakan memonopoli rakyat pada penguasaan, pemilikan dan peruntukan asset, akses dan kemanfaatan didalam Benua Maritim Indonesia.

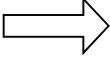

Pembangunan “Benua Maritim Indonesia memerlukan power yang sangat besar, power sumberdaya alam, sumberdaya teknologi, sumberdaya finalcial dan sumberdaya manajemen.

Pembangunan Benua Maritim Indonesia yang berkeadilan adalah dengan menitikberatkan pada aspek pembangunan ekonomi kelautan (*marine economy*) dan ekonomi kemaritiman (*maritime economy*) sejak perencanaan regulasi kebijakan dan implementasinya yang memenuhi prinsip-prinsip keadilan baik *Intra Generation* maupun *Inter Generation* di Indonesia.

Pemikiran.

Untuk itu harapan dan gagasan yang dapat ditawarkan dalam konvensi ini yakni dari Jurusan Hubungan Internasional Universitas Riau yang juga berbasiskan kepada sumberdaya kelautan dan kemaritiman adalah.

Dimensi Pokok (Penatagunaan Potensi Kelautan dan Kemaritiman)		Pembangunan Kelautan dan Kemaritiman Berkeadilan menuju “Benua Maritim”.
Penguasaan aset penting/akses penting oleh subjek pembangunan terhadap kebijakan dan faktor produksi.		Berkenaan dengan adanya; (a) sumber-sumber/asal penguasaan, pemilikan dan peruntukan potensi ekonomi kelautan (<i>marine economy</i>) , (b) luas penguasaan, pemilikan dan peruntukan ekonomi kemaritiman, (c) akses terhadap perencanaan penyusunan dokumen RTRW peruntukan wilayah ekonomi kelautan (<i>marine economy</i>), (d) akses ekonomi pembiayaan penguasaan, pemilikan dan peruntukan potensi ekonomi kelautan(<i>marine economy</i>) , (e) terakomodir hak-hak subjek dalam landasan dasar kebijakan pembangunan ekonomi kelautan (<i>marine economy</i>) dan ekonomi kemaritiman(<i>maritime economy</i>) , (f) Perlakuan dan partisipasi yang sama terhadap asset pengelolaan ekonomi kelautan (<i>marine economy</i>) dan ekonomi kemaritiman (<i>maritime economy</i>).
Adanya demokrasi ekonomi antara sesama subjek pembangunan yang berkelanjutan.	⇒	

<p>Reduksi dominasi power terhadap hak-hak perusahaan Negara dan Swasta.</p>		<p>Berkenaan dengan adanya (a) penguasaan, pemilikan dan peruntukan wilayah untuk pembangunan aspek-aspek ekonomi kelautan dan ekonomi kemaritiman, (b) pengolahan hasil potensi kelautan (c) kemanfaatan dan pemasaran produksi utama dan sampingan ekonomi kelautan dan ekonomi kemaritiman.</p>
<p>Negara harus berperan dalam distribusi asset penting/faktor produksi kepada Rakyat.</p>		<p>Berkenaan dengan adanya (a) keberpihakan kebijakan pemerintah kepada rakyat dalam hal substansi kebijakan dan implementasi penatagunaan dan pembangunan <i>ekonomi kelautan (marine economy)</i>. kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayah pesisir dan lautan, dan kegiatan ekonomi di darat (lahan atas) yang menggunakan SDA dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa (<i>goods and services</i>).</p>

Pembangunan Benua Maritim Indonesia pada aspek pembangunan ekonomi kelautan (**marine economy**) diberikan secara nyata kepada Rakyat dimasing masing wilayah pedesaan yang memiliki wilayah adminitrasi dengan asset wilayah laut potensi dan sumberdaya yang terkandung di dalamnya dikelola dengan BUMD Desa sebagaimana diatur dalam UU NO 6/2014 tentang DesaPembangunan Benua Maritim Indonesia pada aspek pembangunan ekonomi maritim (*maritime economy*) yaitu mengintegrasikan dan menyelaraskan hak-hak dan kewajibana aktor negara negara-aktor swasta dan aktor rakyat dalam politik dan ekonomi kemaritiman. Dengan mereduksi power terhadap mendominasi; Penguatan demokrasi ekonomi terhadap monopoli; Penguatan/penyetaraan hak subjek agraria terhadap marginalisasi dan Penguatan kewajiban pemerintah untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Daftar Pustaka

- Dahuri, R. 2003. Paradigma Baru Pembangunan Indonesia Berbasis Kelautan. Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB. p. 125.
- Dahuri, R. 2003. Keanekaragaman Hayati Laut: Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia. PT. Gramedia Pustakatama, Jakarta p. 412.
- Dahuri, R., T. Kusumastanto, A. Hartono, P. Anas and P. Hartono. 2009. Enhancing Sustainable Ocean Development: An Indonesian Experience. Center for Coastal and

- Marine Resource Studies, Bogor Agricultural University and Partnership for Government Reform. Kreasi Warna Publishing, Jakarta. p. 224.
- Stopford, M. 2004. *Maritime Economics*. 2nd Edition. Routledge Publishing Co., London. p. 562
- Dillon, H.S. 2013. *Keadilan Prasyarat Kelestarian*, Jakarta : Jurnal Nasional.
- Duffy, K. 1995. *Social Exclusion and Human Dignity in Europe*, Strasbourg: Council of Europe.
- Eryatno. 2003. *Ilmu System; Meningkatkan Mutu dan efektifitas Manageman*. Bogor: IPB Press.
- Esmara, Hendra. 1986. *Politik Perencanaan Pembangunan: Teori, Kebijakan dan Prospek*. Jakarta :Gramedia.
- [Forum Keadilan]. 1996. *Majalah Dwi Mingguan No 8 tahun 1985 dan No 10, 11, 12, dan 13*.
- Frasetiandy, Dwitho. 2009. *Menakar Dampak Sosial Perkebunan Sawit*. [Diakses 2013/2/07]
- Islamy, M Irfan. 2000. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- J. Yee. 2005. *Critical anti-racism praxis: The concept of whiteness implicated*. Dalam S. Hick, J. Fook dan R. Pozzuto (Ed), *Social work, a critical turn*. Toronto: Thompson, hal 87-104.
- Kartasmita, Ginanjar, Dkk . 2005. *Perubahan dan Pembangunan*. Bandung: Ikatan Alumni ITB.
- Levitas, R. 1998. *The Inclusive Society: Social Exclusion and New Labour*. Macmillan :Basingstoke.
- Lipton, Michael. 1974. " Towards a theory of landreform," dalam David Lehman, Ed., *Agrarian reform and agrarian reformism*, London, Faber 7, P.269-281. Sebagaimana dikutip Wiradi, dalam Thondronegoro & Wiradi, Ed, *ibid.*, hal 316.
- Mustopadidjaja, AR. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi Kinerja*, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Jakarta: Duta Pertiwi Foundation.
- Rawls, Jhon.2006. *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- 2005. *A Theory of Justice*, Massachusetts: Harvard Univerity Press, Rusuanto ,
Bur Keadilan Sosisl : Pandangan deontologi Rawls dan Hebermas, sabine, George H.

- Teori politik I, Bina Cipta. Jakarta 1977, judul Asli. A History of Political Theory ,
 terjemahan Hadiarmodjo, scholten, paul struktur ilmu hukum. Bandung: PT Alumni.
 -----1972 . "A Theori of Justice, USA, Clarendon Press.
- Saith, A. 1989. Location, linkage and leakage: Malaysian Rural Industrialization in national
 perspective. The Hague, ISS working paper No. 56.
- Sarbini, Sumawinata. 2004. Politik Ekonomi Kerakyatan. Gramedia. Jakarta.
- [Social Exclusion Unit] . 1997. Social Exclusion Unit: Purpose, work priorities and working
 methods, London: The Stationery Office
- Soetrisno, Loekman. 1989. Masalah dan prospek PIR-BUN. Prisma XXVIII (4); pp. 65-72.
- Soesastro . Hadi. 2007, "Microeconomic Policy Reform : Strategy for Regional Cooperation,"
 EABER Working Papers 21856, East Asian Bureau of Economic Research.
- [UU No. 5 Tahun 1960] Undang-undang tentang Peraturan dasar pokok pokok agraria LN
 tahun 1960 No 104, TLN No. 204

Diplomasi Maritim Indonesia dalam Kerangka Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Indrawati, MA, Agung Yudhistira Nugroho, MA

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

In.indrawati17@gmail.com

Abstrack

This paper examines the implementation of Indonesian foreign policy through maritime diplomacy. The purpose of this paper is to know how Indonesia explores maritime resources as an instrument of Indonesian diplomacy while applying the principles of free and active foreign policy. This was done in an effort to achieve Indonesia's interests to become the World Maritime Axis. The data collection process is carried out with library research or secondary data supported by interviews with related parties. This research is very useful to understand how Indonesia carries out its foreign policy with the principle of being free and active through diplomacy. The diplomacy carried out by Indonesia using the assets owned by Indonesia is maritime resources. Indonesia's cooperation in the maritime field has become a tangible form of Indonesian diplomacy.

Keywords: foreign policy, diplomacy, maritime, free, active

Abstrak

Tulisan ini mengkaji tentang pelaksanaan politik luar negeri Indonesia melalui diplomasi maritim. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk melihat bagaimana Indonesia mengeksplorasi sumber daya maritim sebagai alat diplomasi Indonesia dengan tetap menerapkan prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif. Hal ini dilakukan dalam upaya mencapai kepentingan Indonesia untuk menjadi Poros Maritim Dunia. Apakah prinsip Politik Luar Negeri Indonesia “Bebas” dan “Aktif” yang telah diterapkan sejak masa awal kemerdekaan masih relevan diterapkan di era globalisasi ini demi mencapai kepentingan Indonesia di bidang kemaritiman. Proses pengumpulan data yang dilakukan dengan library research atau data sekunder yang didukung dengan wawancara dengan pihak terkait. Penelitian ini sangat berguna untuk memahami bagaimana Indonesia menjalankan politik luar negerinya dengan prinsip bebas dan aktif melalui diplomasi. Diplomasi yang dilakukan Indonesia menggunakan asset yang dimiliki Indonesia yaitu maritim. Kerjasama yang dilakukan Indonesia dibidang kemaritiman menjadi bentuk nyata dari diplomasi Indonesia tersebut.

Kata kunci: politik luar negeri, diplomasi, maritim, bebas, aktif

Pendahuluan

Usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali...

Bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga....

Bangsa pelaut armada militer.....

Bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi

Indonesia merupakan negara yang terletak di antara benua dua benua, Asia dan Australia serta dua samudera. Posisi ini membuat posisi Indonesia menjadi sangat strategis. Kepemilikan kurang lebih 17.499 pulau menjadikan Indonesia sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia. (Indonesia Merupakan Negara Kepulauan yang terbesardi Dunia, 2015)

Pengakuan dunia terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, mendorong Indonesia untuk dapat menjadi poros maritim dunia. Visi Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia sendiri juga telah didukung oleh berbagai pihak, salah satunya adalah pemerintah Tiongkok. Pemerintah Tiongkok telah menawarkan dana bantuan sebesar 40 miliar dollar AS kepada pemerintah Indonesia guna mewujudkan visi Indonesia Poros Global Maritim (Tawakal, 2015).

Peran Indonesia sebagai negara maritim dalam kancah internasional dapat dilihat dalam konvensi UNCLOS (*The United Nations Convention on the Law of the Sea*). Indonesia telah berhasil memasukkan keistimewaan negara kepulauan dalam hukum internasional khususnya hukum laut internasional. Melalui Mochtar Kusumaatmadja, pada tahun 1982 Wawasan Nusantara diadopsi ke dalam konvensi UNCLOS dengan sebutan konsep negara kepulauan atau *archipelagic state concept* (Saleh, 2009). Keberhasilan memasukkan konsep Negara kepulauan ini kemudian mendorong Indonesia untuk meratifikasi UNCLOS pada tahun 1985 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 (Sunardi, 2015).

Menjadi poros maritim dunia, Indonesia menerapkan lima pilar utama, yaitu: *pertama*, membangun budaya maritim; *kedua*, penjagaan dan pengelolaan sumber daya laut; *ketiga*, membangun infrastruktur dan konektivitas mariim; *keempat*, kerjasama maritim melalui diplomasi; *kelima*, pembangunan kekuatan pertahanan maritim. Kelima pilar tersebut disampaikan oleh Presiden Indonesia, Jokowi dalam KTT ke-9 Asia Timur yang diselenggarakan di Nay Pyi Taw, Myanmar, November 2014 (Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, 2015).

Pemerintahan Jokowi telah memprioritaskan bidang kemaritiman dalam beberapa agenda berikut: (Program Kerja, n.d.)

- a. Mengamankan kepentingan dan keamanan maritim Indonesia, khususnya batas negara, kedaulatan maritim, dan sumber daya alam.

- b. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya dengan membangun 10 pelabuhan baru dan merenovasi yang lama.

Diplomasi maritim yang diterapkan Indonesia melalui kelima pilar dan agenda tersebut tidak dapat lepas dari politik luar negeri Indonesia. Terlebih politik luar negeri merupakan perwujudan dari kepentingan negara terhadap hubungan internasional. Indonesia telah menerapkan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang sejak awal kemerdekaan. Konsep luar negeri bebas aktif tersebut masih diterapkan hingga saat ini. Meskipun Indonesia telah berganti kepemimpinan dan pemerintahan, Pada dasarnya, prinsip politik luar negeri “Bebas, Aktif” tidak banyak mengalami perubahan ditengah perubahan pemimpin di Indonesia. Pada masa Soekarno, “Bebas-Aktif” di gambarkan dengan “mendayung diantara dua karang” seperti yang disampaikan oleh Mohammad Hatta. Pada masa SBY, prinsip “Bebas- Aktif” digambarkan dengan “*Navigating in the Turbulance Ocean*”. Pada termin kedua pemerintahan SBY, prinsip “Bebas- Aktif” bertransformasi menjadi “*Thousand Friends Zero Enemy.*” (Setiawati D. S., 2013, p. 17).

Dimasa Pemerintahan Jokowi ini prinsip politik luar negeri bebas aktif juga masih menjadi pijakan. Hal ini terlihat dari aktifnya Indonesia terlibat dalam forum-forum internasional berbagai bidang. Politik luar negeri bebas aktif juga kemudian memberi peran terhadap upaya Indonesia menjadi poros maritim dunia. Prioritas Indonesia di bidang kemaritiman dicerminkan dalam rumusan Politik luar negeri. Politik Luar Negeri Indonesia yang mencerminkan identitas negara kepulauan ini diwujudkan melalui 5 (lima) agenda aksi: (Program Kerja, n.d.)

- a. Diplomasi maritim untuk mempercepat penyelesaian permasalahan perbatasan Indonesia, termasuk perbatasan darat, dengan 10 negara tetangga Indonesia;
- b. Menjamin integritas wilayah NKRI, kedaulatan maritim dan keamanan/kesejahteraan pulau-pulau terdepan;
- c. Mengamankan sumberdaya alam dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE);
- d. Mengintensifkan diplomasi pertahanan, dan;
- e. Meredam rivalitas maritim di antara negara-negara besar dan mendorong penyelesaian sengketa teritorial di kawasan.

Politik Luar Negeri Indonesia yang bebas dan aktif ditujukan untuk mencapai kepentingan Indonesia guna menjadi poros maritime dunia. Dengan prinsip yang sudah ada tersebut lalu bagaimana prinsip tersebut diterjemahkan dalam diplomasi maritime Inonesia?

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggambarkan fakta-fakta yang tersedia untuk kemudian menganalisis dan data-data yang dikumpulkan (Hadari, 2005). Teknik pengumpulan data akan digunakan pengumpulan data dengan menggunakan bahan-bahan sekunder baik yang bersifat teoritis maupun empiris tentang obyek penelitian yang caranya diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*).

Pembahasan

1. Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia

Setiap negara menjalankan politik luar negeri pada hekekatnya adalah untuk mencapai kepentingan nasional. Untuk mencapai kepentingan nasional, pelaksanaan politik luar negeri setiap negara dilandaskan pada prinsip-prinsipnya masing-masing. Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat pun memiliki landasan prinsip luar negerinya sendiri. Landasan dan prinsip tersebut merupakan pedoman bagi perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia.

Landasan Politik Luar Negeri Indonesia sendiri dibagi menjadi tiga kategori, yaitu *pertama*, landasan Ideologi, landasan Ideologi tersebut adalah Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai landasan Ideologi politik luar negeri Indonesia diperkuat dengan penjelasan Mohammad Hatta. Hatta menyebutkan bahwa kelima sila yang ada dalam pancasila memuat pedoman dasar bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ideal mencakup seluruh sendi kehidupan manusia. (Wuryandari, 2008, p. 28) Pancasila sebagai dasar Negara bersifat mengikat seluruh kehidupan nasional bangsa Indonesia dalam kegiatan politik negara.

Kedua, Landasan Konstitusional, landasan konstitusional Politik Luar Negeri Indonesia adalah UUD 1945. UUD 1945 sebagai landasan konstitusional terlihat jelas pada pembukaan UUD 1945. Sebagai Landasan konstitusional, UUD memuat garis-garis besar kebijakan luar negeri Indonesia dan mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Terdapat pasal-pasal yang termuat dalam batang tubuh UUD yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara yang juga dapat dijadikan landasan dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia.

Ketiga, adalah landasan Operasional. Landasan operasional berkenaan dengan bagaimana landasan dan prinsip Politik Luar Negeri dapat diwujudkan sebagai realisasi dari sifatnya yang idealis menjadi normatif yang tertuang dalam bentuk ketentuan atau Undang-Undang. Perwujudannya sendiri akan berubah-ubah tergantung pada periode pemerintahan yang berkuasa sesuai dengan kepentingan nasional yang ingin dicapai pada masa tersebut.

Indonesia menetapkan prinsip politik luar negeri Indonesia dengan prinsip “Bebas, Aktif”. Prinsip politik bebas aktif ini pertama kali diperkenalkan oleh salah satu proklamator Indonesia, Mohammad Hatta. Hal ini disampaikan Hatta dalam pidatonya berjudul “Mendayung di antara Dua Karang”.

Pidato Hatta tersebut memuat prinsip politik Luar Negeri Indonesia yang lahir ditengah pertarungan dua blok besar. Menyikapi pertarungan dua kekuatan besar tersebut, Indonesia mengusung prinsip politik luar negeri Indonesia ‘bebas, aktif’. Menurut Mochtar Kusumaatmaja sendiri “bebas” adalah Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila. Aktif, berarti di dalam menjalankan kebijaksanaan luar negerinya, Indonesia tidak bersifat pasif-reaktif atas kejadian-kejadian internasionalnya, melainkan bersifat aktif. (Kusumaatmaja, 1983)

Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia “Bebas, Aktif” ini juga telah tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Pada dasarnya, prinsip politik luar negeri “Bebas, Aktif” tidak banyak mengalami perubahan ditengah perubahan pemimpin di Indonesia. Namun Implementasi dan penggambaran dari prinsip “Bebas, Aktif” yang mengalami transformasi dari setiap kepemimpinan. Pada masa Soekarno, “Bebas-Aktif” di gambarkan dengan “mendayung diantara dua karang” seperti yang disampaikan oleh Mohammad Hatta. Pada masa SBY, prinsip “Bebas- Aktif” digambarkan dengan “*Navigating in the Turbulance Ocean*”. Pada termin kedua pemerintahan SBY, prinsip “Bebas- Aktif” bertransformasi menjadi “*Thousand Friends Zero Enemy.*” (Setiawati S. M., 2013)

Prinsip politik luar negeri Indonesia yang telah dijalankan sejak lama tersebut masih dipertahankan di era pemerintahan Jokowi-JK. Prinsip politik luar negeri “bebas-aktif” dapat dilihat dalam rumusan visi dan misi hubungan luar negeri Jokowi-JK, yakni “terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Berdasarkan visi mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan kepribadian nasional tersebut terlihat makna “bebas”. Di dalamnya juga termaktub sikap dan sifat “aktif” untuk dapat merealisasikan kemandirian nasional atas landasan kerjasama positif dan konstruktif yakni gotong-royong. (Situmorang).

Mentri Luar Negeri Indonesia juga menyatakan bahwa Politik Luar Negeri Indonesia masih menganut prinsip bebas-aktif. Bebas dalam artiaan komitmen Indonesia untuk bebas menentukan sikap atas masalah-masalah Internasional dan terlepas dari kutub-kutub kekuatan

dunia. Aktif dalam artian aktif berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dunia. (Yani & Montratama, 2017)

Politik luar negeri Indonesia diimplementasikan untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia. Salah satu kepentingan Indonesia yang ingin dicapai dimasa pemerintahan Jokowi ini adalah di sector kemaritiman. Kemaritiman, menjadi agenda khusus yang diusung oleh pemerintahan Jokowi. Hal ini terlihat ketika konsep nawacita yang di galakkan oleh Presiden Joko Widodo yang sedikit banyak menempatkan konsep kemaritiman dalam agenda pemerintahannya.

Salah satu bentuk implementasi nawacita yaitu konsep tol laut. Tol laut yang akan dibangun oleh Joko Widodo dapat memperkuat hubungan laut antar wilayah Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Tol Laut ini diharapkan dapat menjangkau pembangunan infrastruktur antar wilayah laut yang selama ini banyak terbengkalai. Dengan demikian pembangunan ekonomi yang berbasis maritim sedikit banyak dapat tercapai dengan lebih tepat sasaran.

Pembangunan maritim Indonesia juga ditujukan untuk sektor perdagangan, dimana difokuskan pada pertumbuhan sektor perikanan yang selama ini masih kurang digalakkan dengan serius oleh pemerintah. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi besar dalam bidang perairan baik itu transportasi laut, perikanan, maupun industri kelautan lainnya. Untuk itu pemerintah dapat menggali lebih dalam tentang bagaimana pemanfaatan sumber daya yang ada. Hal inilah yang dilihat oleh Pemerintahan Joko Widodo sebagai “*abundant mines*” yang harus di eksplorasi dan ditingkatkan manfaat yang terkandung didalamnya karena dari sinilah potensi besar Indonesia dapat ditingkatkan. Sektor industri maritim Indonesia yang selama ini selalu mengaju pada industri perikanan luar negeri sudah saatnya beralih menjadi bentuk swadaya sendiri yang lebih menguntungkan bagi masyarakat Indonesia dan dapat mendatangkan devisa yang besar bagi negara.

Mengacu pada landasan Operasional dimana pemerintah disini melakukan peningkatan kerjasama internasional yang bertujuan memanfaatkan secara optimal berbagai potensi positif yang ada pada forum-forum kerjasama internasional, maka fokus pemerintah saat ini dalam mengubah arah diplomasi menjadi diplomasi maritim. Diplomasi maritim ini sendiri bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan di bidang industri maritim seperti pengolahan sumber daya laaut, export perikanan, pertahanan maritim dan lain sebagainya.

2. Kemaritiman sebagai Kepentingan Indonesia

Potensi laut Indonesia dapat diibaratkan sebagai “*Sleeping Giant*” (Sutisna, 2012). Hal ini karena potensi kelautan Indonesia yang besar belum di kelola dan dimanfaatkan dengan maksimal. Dengan potensi kelautan yang besar, Indonesia memiliki prospek ekonomi berbasis kelautan yang sangat potensial. Indonesia dapat memanfaatkan kekayaan laut sebagai basis ekonomi kelautan disepanjang wilayah pesisir Indonesia. Selain itu, wilayah Indonesia menjadi tempat perlintasan jalur perdagangan internasional yang akan berdampak positif pada perekonomian Indonesia sendiri. Tiongkok merupakan salah satu negara yang kemudian berinfestasi terhadap infrastruktur maritim Indonesia, dikarenakan Indonesia merupakan jalur sutra perdagangan maritim bagi Tiongkok.

Pembangunan tol laut Indonesia dengan bantuan investasi dari negara luar berpotensi semakin memperlancar perdagangan baik domestik maupun internasional. Pembangunan tol laut ini menciptakan konektivitas yang tidak hanya meningkatkan interaksi ekonomi tetapi juga interaksi dibidang-bidang lain. Menjadi poros maritim dunia, Indonesia perlu mengupayakan keunggulan yang dimilikinya. Nilai perdagangan dunia yang ditransportasikan melalui wilayah laut Indonesia sebesar US\$ 1.500 atau sekitar 70% dari total nilai perdagangan dunia (Salim, 2017). Namun sayangnya keuntungan dari lalu lalang perdagangan dunia tersebut justru belum bisa diserap secara maksimal oleh Indonesia, hal ini disebabkan masih kurangnya konektivitas maritim Indonesia.

Kepemilikan aset maritim yang dimiliki Indonesia belum dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini kemudian mendorong pemerintahan Jokowi untuk menjadi poros maritim dunia. Dengan menjadi poros maritim dunia, maka Indonesia dapat menjadi acuan bagi negara-negara lain dibidang kemaritiman.

Menjadi Poros Maritim Dunia, memberi kemungkinan Indonesia mengalami kemajuan dibidang ekonomi. Hal ini tidak lain karena posisinya Indonesia sebagai lintas perdagangan internasional. Potensi kemajuan ekonomi melalui maritim kemudian mendorong pemerintahan Jokowi untuk terus mencapai kepentingan maritim. Pemerintah Jokowi sendiri menargetkan adanya kemajuan dari negara tingkat menengah bawah dengan penghasilan per kapita penduduknya tahun 2015 US\$ 3.592 menuju negara tingkat penghasilan menengah atas dengan pendapatan per kapita penduduknya mencapai US\$ 10.000, pada tahun 2045. Dengan kata lain, jika kebijakan poros maritim dunia tercapai sebagaimana diharapkan maka Indonesia mampu berdaulat dari segi perekonomian. (Nainggolan, 2015)

Menjadi poros maritim dunia selain akan memajukan bidang ekonomi juga akan memajukan bidang lain. Bidang lain yang akan maju melalui maritim adalah bidang pertahanan

laut. Dengan menjadi Poros Maritim dunia, secara esensi berarti juga bertujuan “mengatur” dunia dan secara terminology berarti penyeimbang kekuatan maritim di kawasan dan dunia (Yani & Montratama, 2017). Poros maritim dunia dapat dimaknai sebagai visi Indonesia untuk menguasai jalur pelayaran maritim penting dunia (Yani & Montratama, 2017).

3. Implementasi Prinsip Politik Luar Negeri Melalui Diplomasi Maritim

Diplomasi merupakan alat bagi negara untuk mencapai tujuan politik luar negerinya. Jika politik luar negeri dikategorikan sebagai ‘substansi hubungan luar negeri’, sementara diplomasi adalah ‘metode’ nya (Roy, 1995, p. 33). Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia dengan cara diplomasi maritim menjadi salah satu program penting pemerintah. Cara diplomasi maritim dilakukan dengan tujuan mencapai kepentingan Indonesia guna menjadi Poros maritim dunia.

Aset maritim yang dimiliki, mendorong Indonesia untuk menjadi poros maritim. Poros maritim dunia dapat mendorong Indonesia menjadi negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, pemberdayaan seluruh potensi maritim demi kemakmuran bangsa, pemerataan ekonomi Indonesia melalui tol laut, dan melaksanakan diplomasi maritim dalam politik luar negeri Indonesia lima tahun kedepan (Rahmawaty, 2014).

Keseriusan pemerintah dalam melakukan diplomasi maritim juga dapat dilihat dari pidato Jokowi:

“Melalui diplomasi maritim, kami mengajak semua mitra-mitra Indonesia untuk bekerja sama di bidang kelautan ini. Bersama-sama kita harus menghilangkan sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut. Laut harus menyatukan, bukan memisahkan, kita semua”. (Presiden RI, Ir. Joko Widodo, 2014). (Setiadji, 2018)

Diplomasi maritim adalah manajemen hubungan internasional melalui domain kelautan, dalam artian menggunakan aset-aset kelautan yang dimiliki untuk mengelola hubungan internasional (Le Mière, 2014, p. 7). Diplomasi maritim dapat dibagi menjadi cooperative, persuasive and coercive diplomasi maritim.

Diplomasi maritim dapat dilakukan dengan memanfaatkan asset-aset kelautan maupun kekuatan kelautan. Diplomasi maritim dapat dilakukan dengan misi seperti mengunjungi pelabuhan, latihan bersama, pelatihan dan bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana (Le Mière, 2014, p. 7).

Pelaksanaan diplomasi menggunakan aset maritim yang dimiliki Indonesia dengan bebas dan aktif. Instrumen dari pelaksanaan diplomasi maritim Indonesia adalah dengan kemitraan strategis dan kerjasama (Yani & Montratama, 2017). Kemitraan strategis sendiri memiliki pola yang sama-sama menguntungkan yang umumnya juga bersifat bilateral maupun multilateral.

1. Kerjasama bilateral

Kerjasama bilateral dilakukan sebagai bentuk diplomasi Indonesia baik dengan negara tetangga maupun mitra strategis Indonesia. Kerjasama bilateral Indonesai dibidang kemaritiman diantaranya:

a. Kerjasama Kemaritiman Indonesia-Tiongkok

Kerjasama maritim antara Indonesia dan Tiongkok merupakan implementasi visi kemaritiman kedua negara. Pada pertemuan antara Duta Besar China untuk Indonesia Xie Feng dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indriyono Soesilo di Jakarta pada 15 Juli 2015, kesepakatan kerjasama dapat dicapai. Isu yang diangkat dalam kerjasama ini adalah pengembangan IPTEK maritim, peningkatan kunjungan wisatawan dari China, pembangunan pembangkit listrik, pembangunan galangan kapal serta kerjasama di bidang perikanan. (Junida, 2015)

b. *Plan of Action on Maritime Cooperation*, Indonesia-Australia

Kerjasama maritime antara Indonesia dan Australia dengan poin yang dibahas mulai dari ekonomi hingga penanggulangan terorisme. (Mardiastuti, 2018)

c. Japan- Indonesia *Maritime Partnership*

Kerjasama Indonesia dan Jepang dibidang kemaritiman ditandatangani pada tanggal 21 Desember 2016. Dalam kerjasama ini focus utamanya adalah kerja sama pembangunan infrastruktur, peningkatan konektivitas dan investasi di sektor maritim. (Lisbet, 2017). Dalam kerjasama ini, Jepang mendorong pengembangan enam pulau terluar Indonesia sebagai pusat perikanan seperti Biak, Moa, Morotai, Natuna, Sabang and Saumlaki,” (Hurst, 2018)

d. Kerjasama Maritim Indonesia- Selandia Baru

Kerjasama Indonesia-Selandia Baru telah resmi ditandatangani pada 24 Juli 2015 di Jakarta. Kerjasama ini berfokus pada isu energy panas bumi, pariwisata bahari dan iptek kelautan (RI-Selandia Baru Kerjasama Khusus Maritim, 2015).

e. Kerjasama Indonesia dan India

Pada tahun 2015, Indonesia dan India telah berhasil melaksanakan enam kerjasama maritime. Keenam kerjasama tersebut diantaranya latihan gabungan kemaritiman multilateral, latihan gabungan militer bilateral, patroli gabungan, kunjungan kapal. India ke Indonesia, kunjungan kapal Indonesia ke India, dan perjanjian pertahanan dan keamanan maritim. (Kurniawan & Puspitasari, 2017)

Selain kerjasama bilateral yang telah dijelaskan tersebut, masih ada beberapa kerjasama bilateral lain Indonesia dibidang maritim seperti Kerjasama Indonesia-Korea Selatan, Kerjasama Indonesia- Rusia, Indonesia- Inggris, Indonesia- Italia, Indonesia- Belanda, Indonesia- Filipina, dan masih ada beberapa kerjasama dengan beberapa Negara lain terkait kemaritiman.

Kerjasama-kerjasama tersebut bergerak diberbagai isu terkait kemaritiman. Isu-isu dalam kerjasama tersebut diantaranya ekonomi, pertahanan, teknologi dan keamanan.

2. Kerjasama Multilateral

a. *Indian Ocean Rim Assosiation (IORA)*

IORA merupakan organisasi regional diwilayah Samudera Hindia yang memiliki peran strategis dibidang ekonomi yang menghubungkan perdagangan internasional dar Asia ke Eropa dan sebaliknya. Pilar kerjasama IORA terdiri dari ekonomi, keamanan dan keselamatan maritim, dan pendidikan serta kebudayaan (Indian Ocean Rim Association, n.d.).

b. *Trilateral Maritime Patrol Indomalphi*

Merupakan kerjasama trilateral atau tiga Negara antara Indonesia, Malaysia dan Filipina. Dalam kerjasama ini isu utamanya adalah keamanan laut dimana ketiga Negara ini melakukan Patroli maritim bersama yang diluncurkan pada bulan Oktober 2017 yang mencakup patroli udara dan patroli kelautan. (htt)

c. International Coral Reef Initiative (ICRI)

Indonesia bersama Australia dan Monako dipercaya menjadi Ketua Bersama Sekretariat pada Desember 2017. ICRI merupakan kemitraan global terkait Terumbu Karang yang beranggotakan 38 negara termasuk didalamnya Indonesia (Rahman, 2018)

d. Kerjasama Kemaritiman ASEAN-RRT

Presiden Jokowi menyampaikan tiga hal utama terkait kerjasama kemitraan ASEAN-RRT yaitu (Presiden Jokowi Tekankan Kerja Sama Ekonomi dan Maritim dalam Kemitraan ASEAN-RRT, 2014):

- Pentingnya peningkatan kerja sama di bidang ekonomi. Kerja sama tersebut diharapkan dapat ditujukan pada peningkatan kesejahteraan bersama, pertumbuhan ekonomi yang seimbang, investasi yang berkualitas, dan perdagangan yang adil
 - Pentingnya pembangunan infrastruktur regional. Investasi dalam pembangunan jalan, *deep-sea port*, zona industri, serta pasar tradisional, sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi ASEAN dan kebutuhan masyarakat.
 - Pentingnya peningkatan kerja sama di bidang konektivitas, termasuk konektivitas maritim. Dalam kaitan ini, Indonesia menyambut baik Tahun Kerja Sama Maritim ASEAN-RRT 2015.
- e. Indonesia memprakarsai dan memperkuat kerja sama regional di Asia Timur di bidang maritim melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Kuala Lumpur pada 21-22 November 2015
- f. Indonesia mendorong kerjasama maritim dalam pertemuan D-8 yang diselenggarakan pada 20 Oktober 2017. D-8 merupakan kelompok Negara-negara berkembang yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Pakistan, Iran, Nigeria, Egypt and Turkey. (Almanar, 2017)

Selain dari kerjasama-kerjasama diatas, Indonesia juga terlibat diberbagai kerjasama kemitraan yang bersifat multilateral dibidang kemaritiman lain seperti *Heads of Asian Coast Guard agencies Meeting (HACGAM)*, *Indonesia Maritime Partnership Initiative* bersama Jepang, Tiongkok, India, Korea Selatan dan Singapura.

Kesimpulan

Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia serta kepemilikan wilayah laut dan pulau yang luas menjadikan daya tawar tersendiri dalam hubungan internasional. Kepemilikan aset kelautan yang melimpah menjadikan Indonesia berambisi menjadi poros maritim dunia. Tujuan menjadi poros maritim dunia tersebut mendorong Indonesia melakukan kegiatan-kegiatan diplomasi dengan memanfaatkan aset maritim yang dimiliki. Diplomasi maritim Indonesia merupakan salah satu bentuk dari implementasi konsep politik luar negeri bebas aktif yang diterapkan Indonesia.

Prinsip Politik Luar Negeri bebas aktif dijalankan dengan diplomasi maritim yang tujuannya adalah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Implementasi tersebut kemudin terlihat dari keaktifan Indonesia dalam forum-forum Internasional yang bersifat kemaritiman. Prinsip yang telah ada ini ditengah era globalisasi justru mendorong pencapaian

kepentingan nasional. Kerjasama kemitraan Indonesia baik bilateral maupun multilateral bebas dilakukan dengan negara manapun terlepas dari kutub-kutub kekuatan dunia. Kerjasama maritim yang dilakukan Indonesia juga turut aktif dalam penyelesaian berbagai masalah dunia seperti ekonomi, pertahanan dan keamanan.

Daftar Pustaka

- (n.d.). Retrieved from <https://medium.com/@fpci.ui/diplomasi-maritim-indonesia-dalam-mengatasi-perompakan-di-laut-maritime-piracy-3eb5933eb8f7>
- Rahmawaty, A. (2014, December 24). *Poros Maritim Dunia dan Peran Indonesia di Internasional*. Retrieved September 15, 2015, from Jurnal Maritim: <http://jurnalmaritim.com/2014/12/poros-maritim-dunia-dan-peran-indonesia-di-internasional/>
- Abdurrahman, H. (2014). *Diskursus Islam Politik & Spiritual*. Bogor: Al Azhar Press.
- Al-Faruqi, I. R. (2001). *Atlas Budaya Islam, Menjelajah Khazanah Peradaban Gemilang*. Bandung: Mizan.
- Almanar, A. (2017, October 18). *Indonesia to Push Maritime Partnerships at D-8 Summit in Istanbul*. Retrieved Agustus 20, 2018, from [jakartaglobe.id](http://jakartaglobe.id/news/indonesia-to-push-maritime-partnerships-at-d-8-summit-in-istanbul/): <http://jakartaglobe.id/news/indonesia-to-push-maritime-partnerships-at-d-8-summit-in-istanbul/>
- Amidi. (2017, January 9). *Pandangan Masyarakat Tentang Danone Aqua*. (A. D. Sindhutomo, Interviewer)
- Anghie, A. (2004). *Imperialism, Sovereignty and The Making of International Law*. New York: Cambridge University Press.
- Arrow, K. J. (1969). *The Organization of Economic Activity: Issues Pertinent to the Choice of Market versus Non-market Allocation*. 1-16.
- Azheri, B. (2012). *Corporate Social Responsibility, dari Voluntary menjadi Mandatory*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Azheri, B. (2012). *Corporate Social Responsibility, dari Voluntary Menjadi Mandatory*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten. (2017). *Kecamatan Polanharjo Dalam Angka*. Klaten: Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten.
- Boediono. (2007). *CSR Tidak Hanya Filantropi: Tidak Mungkin Membangun Negeri Tanpa Melibatkan Pebisnis*. Kompas.

- Brown, C. (2001). *Understanding International Relations*. London: Palgrave.
- Brown, R. C. (1992). *Comparative Politics : Notes and Readings, terj. Henry Sitanggang*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Budiman, A. (1995). *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Cara, C. C. (2014, September 16). *Solopos*. Retrieved December 27, 2017, from Solopos Digital Media: <http://www.solopos.com/2014/09/16/konflik-aqua-klaten-dishub-ancam-tutup-jalan-ke-pabrik-tirta-investama-536484>
- Danone Aqua Group. (2011-2012). *Komitmen untuk Indonesia Laporan Berkelanjutan*. Jakarta: Danone Aqua.
- Danone Aqua Group. (2013-2014). *Komitmen untuk Indonesia Laporan Berkelanjutan*. Jakarta: Danone Aqua.
- Danone Aqua Group. (2015-2016). *Komitmen untuk Indonesia Laporan Berkelanjutan*. Jakarta: Danone Aqua.
- Deliarnov. (2006). *Ekonomi Politik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Dr. dr. Siti Fadilah Supari, S. J. (2008). *Saatnya Dunia Berubah : Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung*. Jakarta: Sulaksana Watinsa Indonesia (SWI).
- Dwi Condro Triono, P. (2011). *Ekonomi Islam Madzhab Hamfara*. Yogyakarta: Irtikaz.
- Fajar ND, M. (2013). *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fajar, M. (2013). *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gulo, W. (2002). *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Haas, E. B. (1958). *The Uniting of Europe : Political, Social and Economic Forces 1950-57*. Standford: Stanford Univ. Press.
- Hadari, N. (2005). *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamalik, O. (1994). *Media Pendidikan*. Bandung: Cipta Aditya Bakti.
- Harjono. (2017, January 10). *Pandangan Masyarakat Tentang Aqua*. (A. D. Sindhutomo, Interviewer)
- Harry Eckstein and David Apter, e. (1963). *Comparative Politics : A Reader*. New York: Free Press.
- Hawari, M. (2011). *ReIdeologi Islam*. Bogor: Al Azhar Press.

- Hinsley, F. W. (1963). *Power and the Pursuit of Peace : Theory and Practice in the History of Relations between States*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hurd, I. (2015). *International law and the politics*. (O. J. Sending, V. Pouliot, & I. B. Neumann, Eds.) Cambridge: Cambridge University Press.
- Hurst, D. (2018, Juni 29). *Japan, Indonesia Strengthen Maritime Ties Amid 60th Anniversary*. Retrieved Juli 30, 2018, from thediplomat.com:
<https://thediplomat.com/2018/06/japan-indonesia-strengthen-maritime-ties-amid-60th-anniversary/>
- Indian Ocean Rim Association*. (n.d.). Retrieved Agustus 2018, 20, from kemlu.go.id:
<https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-regional/Pages/IORA.aspx>
- Indonesia Merupakan Negara Kepulauan yang terbesardi Dunia*. (2015, Oktober 28). Retrieved Agustus 20, 2018, from bphn.go.id:
<https://bphn.go.id/news/2015102805455371>
- Iskandar. (2012, December 11). *soloraya*. Retrieved December 26, 2017, from Solopos Digital Media: <http://www.solopos.com/2012/12/11/ratusan-warga-polanharjo-geruduk-pabrik-aqua-2-356655>
- JACKSON, J. H. (2008). Sovereignty: Outdated Concept . In P. S. Wenhua Shan, *Studies in International Trade Law, Volume 7 Redefining Sovereignty in International Economic Law* (p. 4). OXFORD AND PORTLAND, OREGON: Hart Publishing.
- Jain, S. C., & Puri, Y. (1981). Role of Multinational Corporations in Developing Countries: Policy Makers Views. *Jstor*, 57-66.
- Jones, W. S. (1991). *The Logic of International Relations*. New York: HarperCollins Publishers Inc.
- Junida, A. I. (2015, Juli 15). *Indonesia - Tiongkok rintis kerja sama maritim*. Retrieved Agustus 10, 2018, from Antaranews.com:
<https://www.antaranews.com/berita/507288/indonesia-tiongkok-rintis-kerja-sama-maritim>
- Keliat, M. (2009). Keamanan Maritim dan Implikasi Kebijakannya Bagi Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 111-129.
- Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia. (2015, Januari 15). Diplomasi Indonesia Akan Menonjolkan Karakter Sebagai Negara Maritim . *Fokus Utama*, p. 5.
- Kurniawan, D., & Puspitasari, I. (2017). Hedging Maritim Indonesia di Tengah Persaingan Strategis India-China. *Indonesian Perspective*, 85-103.
- Kusumaatmaja, M. (1983). *Politik Luar Negeri Indonesia dan pelaksanaannya dewasa ini*. Bandung: Alumni.

- Le Mière, C. (2014). *Maritime Diplomacy in the 21st Century*. New York: Routledge.
- Leifer, M. (1986). *Politik Luar Negeri Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Lisbet. (2017, Januari). *Peningkatan Kerjasama Bilateral Indonesia-Jepang*. Retrieved Agustus 10, 2018, from berkas.dpr.go.id:
http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-IX-2-II-P3DI-Januari-2017-238.pdf
- Maliki, A. A. (2009). *Politik Ekonomi Islam*. Bogor: Al Azhar Press.
- Mardiastuti, A. (2018, Maret 16). *Ini 9 Poin Kerja Sama Maritim Indonesia-Australia*. Retrieved Juli 30, 2018, from news.detik.com:
<https://news.detik.com/berita/3919793/ini-9-poin-kerja-sama-maritim-indonesia-australia>
- Marshall, E. M. (1995). *Transforming The Way We Work: The Power of the Collaborative Workplace*. New York: American Management Assosiation.
- Mas'oeed, D. M. (2003). *Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Melissen, J. (2005). *The New Public Diplomacy*. New York: Palgrave Macmillan.
- Nabhani, T. A. (2004). *Nidzoomul Iqtishodiy Fil Islam*. Beirut: Daarul Ummah.
- Nainggolan, P. P. (2015). *KEBIJAKAN POROS MARITIM DUNIA JOKO WIDODO DAN Politica*, 167-190.
- Papp, D. S. (1988). *Contemporary International Relations : Framework for Understanding*. New York: Macmillan Publishing Company.
- Pasopati, G. (2015, 3 23). *Jokowi dan Shinzo Abe Sepakati Forum Maritim*. Retrieved from <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150324030119-92-41322/jokowi-dan-shinzo-abe-sepakati-forum-maritim/>
- Pouliot, V. (2011). *Multilateral Diplomacy* (Vol. Summer). International Journal.
- Prasetyia, F. (2013). Retrieved October 23, 2017, from <http://ferryfebub.lecture.ub.ac.id/files/2013/01/Bagian-V-Teori-Eksternalitas.pdf>
- Presiden Jokowi Tekankan Kerja Sama Ekonomi dan Maritim dalam Kemitraan ASEAN-RRT*. (2014, November 14). Retrieved Juli 30, 2018, from [kemlu](http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Presiden-Jokowi-Tekankan-Kerja-Sama-Ekonomi-dan-Maritim-dalam-Kemitraan-ASEAN-RRT.aspx):
<https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Presiden-Jokowi-Tekankan-Kerja-Sama-Ekonomi-dan-Maritim-dalam-Kemitraan-ASEAN-RRT.aspx>
- Program Kerja*. (n.d.). Retrieved from http://maritim.go.id/?page_id=44

- Rahman, M. (2018, Juli 3). *Menteri Susi: kepemimpinan ICRI bentuk diplomasi maritim*. Retrieved Agustus 20, 2018, from Antaranews.com: <https://www.antaranews.com/berita/723753/menteri-susi-kepemimpinan-icri-bentuk-diplomasi-maritim>
- Rais, M. A. (2008). *Agenda Mendesak Bangsa : Selamatkan Indonesia*. Yogyakarta: PPSK Press.
- RI-Selandia Baru Kerjasama Khusus Maritim*. (2015, Juli 27). Retrieved Agustus 20, 2018, from batasnegeri.com: <http://www.batasnegeri.com/ri-selandia-baru-kerjasama-bidang-maritim-khusus/>
- Roy, S. (1995). *Diplomas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saleh, M. (2009). Aspek Hukum Internasional Mengenai Peperangan Di Wilayah Laut Negara Kepulauan. *Jurnal Hukum*, 123-146.
- Salim. (2017). *Konsep Neogeopolitik Maritim Indonesia Abad 21, Menjawab Ancaman Zionis dan China*. Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia.
- Setiadji, A. (2018, September 08). *Diplomasi Maritim untuk Kedaulatan Indonesia*. Retrieved September 10, 2018, from maritimnews.com: <http://maritimnews.com/2017/05/diplomasi-maritim-untuk-kedaulatan-indonesia/>
- Setiawati, D. S. (2013). Relevansi Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif Dalam Tatanan Arsitektur Perubahan Tatanan Politik Internasional. *Refleksi 65 Tahun Politik Luar negeri Indonesia Bebas Aktif* (p. 11). Yogyakarta: Institute of International Studies.
- Setiawati, S. M. (2013). Relevansi Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif Dalam Tatanan Arsitektur Perubahan Tatanan Politik Internasional. Makalah disampaikan pada *Seminar Refleksi 65 Tahun Politik Luar negeri Indonesia Bebas Aktif* (p. 1). Yogyakarta: institute of International Studies.
- Sheehy, B. (2014). CSR; Problems and Solutions. *Springer*, 111-20.
- Situmorang, M. (n.d.). *Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia*. Retrieved September 5, 2018, from media.neliti.com: <https://media.neliti.com/media/publications/98738-ID-orientasi-kebijakan-politik-luar-negeri.pdf>
- Snyder, A. M. (2007). Holding Multinational Corporations Accountable: Is Non-Financial Disclosure The Answer? *Columbia Business Law Review*, 566-567.
- Soetomo. (2006). *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- SoloposTV. (2014, November 2). *SoloposTV*. Retrieved December 27, 2017, from Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=Lnl6qBHVjEs>

- Sriyono. (2017, January 2). *Pandangan Masyarakat Tentang Danone Aqua*. (A. D. Sindhutomo, Interviewer)
- Staniland, M. (1985). *What Is Political Economy? A Study of Social Theory and Underdevelopment*. London: Yale University Press.
- Stiglitz, J. E. (2006). The Multinational Corporation. In J. E. Stiglitz, *Making Globalization Work* (pp. 187-210). New York: W. W. Norton & Company, Inc.
- Stopford, J. (1999). Multinational Corporations. *Jstor*, 12-24.
- Strange, S. (1988). *States and Markets*. London: Printer Publishers.
- Sugianto, B. A., & Hanggarini, P. (2010). Persepsi Publik atas Kinerja Multi Jalur Diplomasi Departemen Luar Negeri Republik Indonesia (2002-2007). *QJurnal*.
- Sukamto. (2017, January 2). *Pandangan Masyarakat Tentang Danone Aqua*. (A. D. Sindhutomo, Interviewer)
- Sunardi, L. (2015, Februari 2). *DIPLOMASI MARITIM: RI Ratifikasi Seluruh Perjanjian*. Retrieved Mei 26, 2015, from <http://industri.bisnis.com>: <http://industri.bisnis.com/read/20150202/98/397700/diplomasi-maritim-ri-ratifikasi-seluruh-perjanjian>
- Sutisna, D. H. (2012, Juli 20). *Potensi Ekonomi Kelautan Mampu Menyejahterakan Rakyat Indonesia*. Retrieved september 15, 2015, from Dewan Kelautan Indonesia: <http://www.dekin.kkp.go.id/?q=news&id=20120802100908355974768552433825750659740299>
- Tawakal, M. I. (2015, March 09). *Menyusun Strategi Diplomasi Maritim*. Retrieved Mei 26, 2015, from kompasiana.com: <http://luar-negeri.kompasiana.com/2015/03/09/menyusun-strategi-diplomasi-maritim-710973.html>
- Tempo. (2004, December 15). *home: bisnis*. Retrieved 26 December, 2017, from TEMPO.CO: <https://bisnis.tempo.co/read/52980/petani-klaten-minta-pabrik-aqua-ditutup>
- Tempo. (2005, April 8). *bisnis*. Retrieved December 26, 2017, from TEMPO.CO: <https://nasional.tempo.co/read/60706/pabrik-aqua-didenda-rp-100-juta>
- Tempo. (2005, May 8). *bisnis*. Retrieved December 26, 2017, from TEMPO.CO: <https://nasional.tempo.co/read/59335/aqua-janji-naikkan-setoran-ke-pemerintah-klaten>
- Tentang Aqua: Komitmen Ganda*. (2011). Retrieved October 17, 2017, from Danone Aqua: http://aqua.com/tentang_aqua/komitmen-ganda

- Umi. (2017, January 5). Pandangan Masyarakat Tentang Danone Aqua. (A. D. Sindhutomo, Interviewer)
- Wolfe, T. A. (1999). *Introduction to International Relations : Power and Justice*, terj. Mercedes Marbun. Bandung: Putra A. Bardin.
- Wuryandari, G. (2008). *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yani, Y. M., & Montratama, I. (2017). *Quo Vadis Politik Luar Negeri Indonesia*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Zain, Q. (2015). Collaboration Strategy dalam Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR): Studi Kasus Aqua Danone Klaten. *Jurnal Hubungan Internasional*, 88.
- Zain, Q. (2015). Collaboration Strategy dalam Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR): Studi Kasus Aqua Danone Klaten. *Journal Hubungan Internasional*, 1-18.
- Zakaria, R. (2017, January 13). Harmonization in Business , Social and Environment through Protection, Management and Collaboration. (A. D. Sindhutomo, Interviewer)
- Zakaria, R. (2017, January 13). Harmonization in Business , Social and Environment through Protection, Management and Collaboration. (A. D. Sindhutomo, Interviewer)

Diplomasi Maritim Indonesia di Asia Tenggara dalam Upaya Mewujudkan Visi Poros Maritim Dunia

Najamuddin Khairur Rijal
Universitas Muhammadiyah Malang
najamuddin@umm.ac.id

Abstrak

Tulisan ini membahas mengenai diplomasi maritim Indonesia di Asia Tenggara dalam upaya mewujudkan visi Poros Maritim Dunia. Visi PMD merupakan cita-cita pemerintahan Joko Widodo untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang maju, mandiri, kuat serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional. Salah satu pilar strategi untuk mewujudkan visi PMD tersebut adalah melalui diplomasi maritim, dengan fokus perhatian utama adalah di kawasan Asia Tenggara dan organisasi regional ASEAN. Melalui kerangka konseptual diplomasi maritim oleh Christian Le Miere, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia mengintegrasikan berbagai bentuk diplomasi maritim. Pertama, cooperative maritime diplomacy dengan mendorong kerja sama dengan negara tetangga seperti Malaysia, Filipina dan Vietnam. Kedua, persuasive maritime diplomacy dengan menginisiasi dan mengusulkan berbagai kesepakatan regional di bidang maritim melalui mekanisme ASEAN. Ketiga, coercive maritime diplomacy dengan menunjukkan tindakan tegas melalui pembakaran dan penenggelaman kepada kapal asing yang melakukan pelanggaran di wilayah maritim Indonesia. Kata Kunci: ASEAN, Asia Tenggara, diplomasi maritim, poros maritim

Abstract

This paper discusses Indonesia's maritime diplomacy in Southeast Asia in effort to realize the vision of the World Maritime Nexus (WMN). WMN's vision is the idea of Joko Widodo's administration to realize Indonesia as a maritime country that is advanced, independent, strong and able to contribute positively to the security and peace in the region and in the world. One of the pillars of the strategy to realize the WMN's vision is through maritime diplomacy, with the main focus of attention is in the Southeast Asia region and ASEAN regional organizations. Used the conceptual framework of maritime diplomacy by Christian Le Miere, the results indicate that the Indonesian government integrates various forms of maritime diplomacy. First, cooperative maritime diplomacy by encouraging cooperation with neighboring countries such as Malaysia, the Philippines and Vietnam. Second, persuasive of maritime diplomacy by initiating and proposing various regional agreements in the maritime field through the ASEAN mechanism. Third, coercive maritime diplomacy by demonstrating decisive action through burning and drowning on foreign vessels that have committed violations in Indonesia's maritime territory.

Keywords: ASEAN, Maritime diplomacy, Southeast Asia, World Maritime Nexus

Pendahuluan

Tulisan ini membahas mengenai diplomasi maritim yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dalam upaya untuk mewujudkan visi menjadi Poros Maritim Dunia (PMD). PMD sendiri merupakan salah satu “jargon” unggulan dari pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang maju, mandiri, kuat serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional.

Pada level internasional, gagasan PMD diungkapkan oleh Jokowi saat berpidato di forum Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur (*East Asia Summit/EAS*) ke-9 di Naypyidaw, Myanmar pada 13 November 2014. Lebih lanjut, salah satu pilar dari visi PMD yang secara khusus berkaitan dengan posisi dan peran Indonesia di level internasional, dan terkait relasi Indonesia dengan negara-negara lain sebagai realisasi karakter politik luar negeri yang bebas-aktif, adalah diplomasi maritim.

Menurut Madu, diplomasi maritim merupakan sokoguru politik luar negeri Indonesia. Melalui diplomasi maritim, lanjutnya, kebijakan luar negeri perlu diabdikan dan ditujukan untuk mencapai kepentingan nasional sesuai dengan Trisakti (Madu, 2014), yakni berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan kepribadian dalam kebudayaan. Adapun diplomasi yang dijadikan sebagai haluan politik luar negeri Indonesia adalah *middle power diplomacy*. Maksud dari “diplomasi kekuatan menengah” yang ditegaskan Jokowi dalam penjabaran visinya adalah, “menempatkan Indonesia sebagai kekuatan regional dengan keterlibatan global secara selektif, dan memberi prioritas pada permasalahan yang secara langsung berkaitan dengan kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia” (Jokowi & Kalla, 2014).

Oleh karena itu, untuk mendukung realisasi PMD, diplomasi Indonesia akan mendorong penguatan kerja sama maritim dalam berbagai mekanisme bilateral regional maupun multilateral (Kementerian Luar Negeri RI, 2015). Melalui mekanisme regional dan guna menempatkan Indonesia sebagai kekuatan regional, dapat dimaknai bahwa sasaran pertama dan utama kebijakan pemerintah untuk perwujudan visi PMD, adalah pada kawasan Asia Tenggara dan organisasi regional ASEAN. Untuk itulah, tujuan utama penelitian ini adalah melihat realisasi diplomasi maritim di kawasan Asia Tenggara dan ASEAN untuk mewujudkan visi PMD.

Hasil kajian penelitian terdahulu yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa ada beberapa penelitian sebelumnya yang telah membahas mengenai PMD, khususnya terkait diplomasi maritim dan kebijakan luar negeri Indonesia, namun dengan sudut pandang dan fokus yang berbeda. Riska mengkaji mengenai diplomasi maritim pemerintah Indonesia terhadap aktivitas *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan China di wilayah perairan Natuna (Riska, 2017). Nugraha dan Sudirman memandang perlunya diplomasi maritim sebagai strategi pembangunan keamanan maritim Indonesia (Nugraha & Sudirman, 2016). Putra mengkaji mengenai keterlibatan Indonesia dalam diplomasi pertahanan untuk mewujudkan keamanan maritim di kawasan Asia Tenggara (Putra, 2017).

Selanjutnya, Muhamad membahas mengenai upaya yang perlu dilakukan oleh Indonesia menuju PMD (Muhamad, 2014). Yusran dan Asnelly mengkaji tantangan politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif dalam tinjauan posmodernisme dalam mewujudkan Indonesia sebagai PMD (Yusran & Asnelly, 2016). Dinarto mengkaji mengenai pentingnya tata kelola keamanan maritim Indonesia di era Presiden Joko Widodo dari sisi kelembagaan, kerangka hukum, dan sumber daya (Dinarto, 2016). Yakti dan Susanto mengkaji mengenai apakah konsep-konsep terkait PMD merupakan perubahan atau kesinambungan dari strategi maritim Indonesia dalam periode-periode sebelumnya (Yakti & Susanto, 2017). Namun demikian, dalam berbagai penelitian tersebut, kajian tentang upaya mewujudkan PMD melalui diplomasi maritim di Asia Tenggara dan ASEAN belum ditemukan.

Lebih lanjut, diplomasi maritim secara sederhana dapat dipahami sebagai manajemen hubungan antar negara melalui domain maritim. Menurut Miere, diplomasi maritim tidak hanya berarti penggunaan diplomasi untuk mengelola konflik dan ketegangan antar negara terkait permasalahan maritim melalui penyusunan instrumen hukum internasional. Namun juga, diplomasi maritim merupakan penggunaan aset atau sumber daya dalam domain maritim untuk mengatur hubungan antar negara (Miere, 2014).

Jika diplomasi secara umum melibatkan diplomat sebagai representasi negara, maka diplomasi maritim tidak hanya melibatkan *policy maker* (aktor negara) untuk mencapai tujuan (kepentingan nasional). Diplomasi maritim dapat pula melibatkan analis dan akademisi untuk mengkaji mengenai tren dan perkembangan yang terjadi dalam hubungan internasional dan keamanan global. Dalam kaitannya dengan itu, Miere mengategorikan diplomasi maritim ke dalam tiga bentuk, yakni *cooperative*, *persuasive*, dan *coercive* (Miere, 2014).

Diplomasi maritim *cooperative* mensyaratkan kerja sama antaraktor dalam menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan aspek kemaritiman, meliputi pertukaran personel, program pendidikan, pertemuan kolaboratif, dan lainnya yang bertujuan untuk *confidence-building*. Diplomasi maritim *persuasive* berbeda dengan *cooperative* dalam hal kolaborasi antar aktor. Tujuan dari *persuasive diplomacy* adalah untuk meningkatkan pengakuan negara atau pihak lain terhadap kekuatan nasional yang dimiliki oleh suatu negara sekaligus membangun “wibawa” (*prestige*) negara tersebut dalam sistem internasional.

Adapun *coercive* dilakukan dengan penggunaan instrumen kekuatan militer untuk mengamankan kepentingan nasional suatu negara di perairan. Oleh Miere, bentuk ini disebut juga dengan *hard maritime diplomacy* yang melibatkan penggunaan senjata atau kekuatan militer dalam menghadapi ancaman keamanan maritim. Sementara bentuk *cooperative* disebut juga *soft maritime diplomacy* yang menggunakan instrumen non-militeristik dan mengedepankan kerja sama. Ketiga bentuk diplomasi maritim tersebut selanjutnya menjadi kerangka untuk melihat bentuk diplomasi maritim menuju visi PMD yang dilakukan pemerintah Indonesia di Asia Tenggara dan ASEAN.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berfokus pada deskripsi mengenai upaya diplomasi maritim Indonesia di Asia Tenggara untuk mewujudkan visi sebagai PMD. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi melalui studi kepustakaan. Data primer bersumber dari telaah terhadap berbagai laporan kinerja tahunan pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri. Adapun data sekunder yang dikumpulkan bersumber dari berbagai literatur yang relevan melalui penelusuran data dan informasi dari sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, dan artikel *online*. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan empat komponen, yaitu *data collection* (koleksi data), *data*

reduction (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusions drawing* (penarikan kesimpulan) (Miles & Huberman, 1992).

Hasil Penelitian

Gagasan dan Konsep Poros Maritim Dunia

Gagasan PMD telah dikemukakan oleh Jokowi-Jusuf Kalla sejak awal kampanyenya sebagai Calon Presiden (capres) dan Calon Wakil Presiden (cawapres) pada pemilihan umum tahun 2014. Kemudian, dalam pidato kemenangannya pada 22 Juli 2014, Jokowi menegaskan pentingnya semangat gotong-royong untuk mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai negara maritim. Kata Jokowi, “Semangat gotong royong itulah yang akan membuat bangsa Indonesia bukan saja akan sanggup bertahan dalam menghadapi tantangan, tapi juga dapat berkembang menjadi poros maritim dunia, locus dari peradaban besar politik masa depan” (Prasetya, 2014).

Selanjutnya, dalam pidato kenegaraan setelah resmi dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2014, Jokowi kembali menegaskan visi maritimnya untuk mewujudkan *Jalesveva Jayamahe*, yaitu untuk mengembalikan kejayaan Indonesia di masa lalu sebagai negara maritim. Menurutnya, samudra, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban Indonesia. Dalam pidato tersebut, Jokowi mengutip pernyataan Presiden Soekarno, “bahwa untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara kuat, negara makmur, negara damai, kita harus memiliki jiwa cakrawarti samudera; jiwa pelaut yang berani mengarungi gelombang dan hampasan ombak yang menggulung” (Setiadji, 2014).

Adapun di level internasional, gagasan PMD diungkapkan oleh Jokowi dalam pidatonya di hadapan para pemimpin negara anggota EAS pada 13 November 2014 di Myanmar. Jokowi menegaskan bahwa PMD ditopang oleh lima pilar utama (Kementerian Luar Negeri RI, 2014). Kelima pilar tersebut adalah pembangunan kembali budaya maritim Indonesia melalui redefinisi identitas nasional sebagai bangsa maritim; menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut; mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim; melakukan diplomasi maritim untuk membangun bidang kelautan; dan membangun kekuatan pertahanan maritim.

Menurut Kementerian Luar Negeri dalam laporan kinerjanya, melalui penyampaian konsep PMD di fora internasional, Indonesia telah menegaskan posisinya yang siap membuka kerja sama di bidang maritim dengan berbagai negara untuk mendukung kemajuan perekonomian Indonesia (Kementerian Luar Negeri RI, 2015). Kebijakan ini juga disebut terobosan baru dalam sejarah kebijakan luar negeri Indonesia, sebab selama ini pemerintahan

sebelumnya belum sepenuhnya memposisikan aspek maritim sebagai fokus utama, dan pembangunan nasional lebih banyak berorientasi darat. Menurut Lembong, konsepsi poros maritim ini menunjukkan adanya upaya pengarusutamaan pembangunan nasional di laut untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim (Lembong, 2015).

Gagasan PMD, menurut Suropati dkk., secara substantif mengandung dua aspek. Pertama, tekad pemerintah untuk mengubah paradigma berpikir bangsa dari berorientasi pada pembangunan darat (*continental oriented*) menjadi berorientasi kelautan atau maritim (*maritim oriented*). Kedua, perwujudan visi maritim tidak sebatas pada lingkup nasional, melainkan juga pada tataran dunia (Suropati, Sulaiman, & Ian Montratama, 2016). Namun di sisi lain, gagasan PMD juga menimbulkan ambiguitas dan perdebatan terkait definisi dan tujuan operasional tentang apa dan bagaimana konsepsi PMD itu.

Dalam berbagai diskusi dan kajian ilmiah, mengemuka tiga istilah dalam mendefinisikan PMD, terutama tentang definisi dari kata “poros” (Suropati et al., 2016). Pertama, kata “poros” dimaknai sebagai pusat atau sumbu (*Global Maritime Fulcrum*), sehingga PMD sebagai visi untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat dari aktivitas kelautan dunia. Kedua, “poros” sebagai *alignment* (*Global Maritime Axis*), seperti pada tahun 1965, Soekarno membentuk poros politik Beijing-Pyongyang-Hanoi-Jakarta. Melalui PMD, Indonesia hendak membangun *alignment* dengan kekuatan lain sehingga dapat menunjang posisi strategis dan kepentingan nasional Indonesia. Ketiga, “poros” sebagai jalur pelayaran maritim (*Global Maritim Nexus*). Visi PMD bertujuan untuk menguasai jalur pelayaran maritim yang penting bagi dunia, yang melewati perairan Indonesia.

Dalam konteks tulisan ini, konsep PMD kemudian dimaknai sebagai sebuah cita-cita untuk, bukan hanya mengamankan tetapi juga, menguasai seluruh perairan Indonesia, sebagaimana pemaknaan yang ketiga di atas. Asumsi itu sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia yang menjadi rujukan tentang konsepsi kebijakan poros maritim. Dalam buku putih *Kebijakan Kelautan Indonesia*, terdapat tujuh pilar strategi kebijakan maritim untuk mewujudkan visi poros maritim: (i) pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia; (ii) pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut; (iii) tata kelola dan kelembagaan laut; (iv) ekonomi dan infrastruktur kelautan serta peningkatan kesejahteraan; (v) pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut; (vi) budaya bahari; dan (vii) diplomasi maritim (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI, 2017).

Adapun pembahasan mengenai diplomasi maritim menjadi penting sasaran utama agenda pembangunan nasional terkait realisasi politik luar negeri bebas aktif, sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, adalah meneguhkan jati diri Indonesia sebagai negara maritim. Adapun arah kebijakan dan strategi yang dilakukan salah satunya adalah memperkuat diplomasi maritim. Tujuannya adalah untuk mempercepat penyelesaian perbatasan Indonesia dengan 10 negara tetangga, menjamin integritas wilayah NKRI, kedaulatan maritim dan keamanan/kesejahteraan pulau-pulau terdepan, dan mengamankan sumber daya alam dan ZEE (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014).

Hal itu tersirat pula dalam pidato yang disampaikan Joko Widodo di EAS ke-9, bahwa, “Melalui diplomasi maritim, kami mengajak semua mitra-mitra Indonesia untuk bekerja sama di bidang kelautan ini. Bersama-sama kita harus menghilangkan sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut. Laut harus menyatukan, bukan memisahkan, kita semua” (Setiadji, 2014).

Adapun agenda aksi untuk mewujudkan itu, salah satunya adalah dengan mengonsolidasikan kepemimpinan Indonesia di ASEAN serta memperkuat kerja sama dan menjamin sentralitas ASEAN. Hal itu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan maritim yang dialami Indonesia banyak bersentuhan dengan negara-negara tetangga di kawasan, seperti sengketa batas maritim, klaim kepemilikan wilayah maritim, kasus *illegal fishing*, perompakan, penyelundupan dan lainnya. Berdasarkan uraian di atas, maka bagian selanjutnya menguraikan mengenai bagaimana diplomasi maritim sebagai bagian dari implementasi misi untuk mewujudkan visi sebagai PMD yang dilakukan Indonesia di kawasan Asia Tenggara dan di level ASEAN.

Diplomasi Maritim Indonesia di Asia Tenggara

Diplomasi maritim Indonesia untuk merealisasikan visinya sebagai PMD dilakukan melalui upaya mendiskusikan, untuk tidak mengatakan menyelesaikan, permasalahan-permasalahan kemaritiman dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, seperti masalah batas maritim maupun batas ZEE. Pada tahun 2015, Indonesia mendorong pembentukan berbagai forum kerja sama kemaritiman dengan negara lain dan berhasil membentuk sebanyak dua forum. Menurut Kementerian Luar Negeri (2016), “forum kerja sama kemaritiman merupakan lembaga, badan, atau wadah antar negara yang dibentuk untuk mengedepankan

kerja sama dalam bidang kemaritiman antara lain bidang keamanan dan keselamatan laut, pengelolaan sumber daya kelautan dan pengelolaan perbatasan.”

Adapun forum yang dimaksud adalah forum RI-Malaysia tentang *Technical Meeting on Maritime Delimitation* dan forum Indonesia-Vietnam mengenai penetapan batas ZEE kedua negara. Hasil forum RI-Malaysia menyepakati penunjukan *special envoy* sebagai upaya akselerasi penyelesaian masalah perbatasan maritim dan darat dengan Malaysia, mengingat kompleksnya permasalahan perbatasan antar kedua negara (Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, 2016; Kementerian Luar Negeri, 2016).

Dengan Vietnam, Indonesia juga aktif meningkatkan kerja sama kemaritiman melalui berbagai forum pertemuan teknis penetapan batas ZEE RI-Vietnam. Dalam berbagai pertemuan teknis yang telah digelar, hasil pertemuan menunjukkan adanya indikasi perubahan sikap Vietnam untuk menjadikan penyelesaian penetapan batas ZEE sebagai prioritas dalam kerangka kemitraan strategis Vietnam. Vietnam juga menegaskan kembali persetujuannya untuk menjadikan UNCLOS 1982 sebagai dasar hukum penarikan garis batas ZEE (Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, 2016). Hasil perundingan dengan Vietnam ini, ke depan akan memberi kejelasan batas hak berdaulat RI untuk pengelolaan perikanan.

Selain menggagas pembentukan forum, Indonesia juga mendorong kesepakatan melalui perundingan. Sepanjang tahun 2017, adanya sebanyak 44 naskah kesepakatan hasil perundingan di bidang diplomasi maritim, politik, keamanan, dan perbatasan yang berhasil dicapai (Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, 2018), salah satunya dengan Filipina. Indonesia mencapai kesepakatan tentang pembukaan Jalur Konektivitas Laut Bitung-Davao melalui deklarasi bersama di Manila, pada 28 April 2017. Pembukaan jalur konektivitas laut ini merupakan usulan Indonesia yang disampaikan dalam pertemuan *Senior Officials' Meeting (SOM) ke-25 Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP EAGA)* dan *Ministerial Meeting ke-20 BIMP EAGA*, di Puerto Princesa, Palawan, Filipina pada 2016.

Indonesia juga mendorong untuk mengaktifkan forum trilateral bersama Malaysia dan Filipina sebagai tindak lanjut dari *Trilateral Cooperative Arrangement* Indonesia-Malaysia-Filipina tahun 2016. Implementasinya kemudian adalah dengan dilaksanakannya aktivitas patroli bersama, yaitu *trilateral maritime patrol* di Tarakan, Indonesia; *trilateral air patrol* di Subang, Malaysia; dan *trilateral port visit* di Tawi-tawi, Filipina (Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, 2018).

Diplomasi Maritim melalui Mekanisme ASEAN

Selain secara bilateral atau trilateral, diplomasi maritim Indonesia juga ditujukan untuk mendorong penguatan kerja sama maritim melalui berbagai mekanisme di ASEAN, baik mekanisme internal ASEAN maupun mekanisme ASEAN yang melibatkan negara lain seperti EAS dan *ASEAN Regional Forum* (ARF). Melalui forum internal ASEAN maupun forum yang melibatkan ASEAN dengan negara lain, Indonesia terus mendorong implementasi *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DoC)* dan diselesaikannya *Code of Conduct in The South China Sea (CoC)* (Kementerian Luar Negeri, 2016). Meskipun Indonesia bukan *claimant state*, masalah Laut China Selatan (LCS) menjadi perhatian Indonesia karena kepentingan Indonesia terkait aspek-aspek maritim juga terdampak seiring dinamika ketegangan antar *claimant state* di LCS.

Adapun melalui forum EAS, tahun 2015 Indonesia menggagas kerja sama maritim dengan disepakatinya *EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation*. Gagasan ini menjadi penting karena EAS melibatkan 10 negara ASEAN dan 8 negara non-ASEAN yang memiliki pengaruh dan kepentingan strategis di kawasan. Lima pilar dan kerja sama utama dalam *EAS Statement* yang menjadi usulan Indonesia adalah pembangunan ekonomi maritim berkelanjutan; pemajuan perdamaian, stabilitas dan keamanan; upaya mengatasi berbagai tantangan lintas batas; konektivitas maritim; dan kerja sama antar lembaga penelitian (Kementerian Luar Negeri, 2016).

Lebih lanjut, dalam forum-forum EAS maupun ARF, diplomasi Indonesia utamanya diarahkan pada upaya pemberantasan *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* yang selama ini merugikan Indonesia, baik dari ekonomi, ekologi, maupun sosial. Indonesia secara aktif mendorong usulan agar *IUU Fishing* dimasukkan sebagai kejahatan lintas batas. Dalam forum EAS, Indonesia juga mendorong pembentukan suatu mekanisme atau instrumen hukum ASEAN guna memberantas *IUU Fishing* dan memasukkannya dalam kategori kejahatan transnasional (Kementerian Luar Negeri, 2016). Kemudian, dalam forum ARF, Indonesia berhasil mendorong disepakatinya *ARF Statement on Cooperation to Prevent, Deter, and Eliminate IUU Fishing* pada *24th ARF Minister's Meeting* pada Agustus 2017. Selain itu, Indonesia mengusulkan agar *IUU Fishing* diakui secara global sebagai kejahatan lintas batas dalam Pertemuan ke-4 *ASEAN-EU High Level Dialogue on Maritime Security Cooperation* (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2018).

Terkait *IUU Fishing*, dalam forum-forum internal ASEAN, Indonesia juga berhasil mendorong disepakatinya kesepakatan kerja sama di sektor perikanan untuk mencegah

masuknya produk perikanan hasil *IUU Fishing* ke dalam *regional supply chain* melalui forum *the 37th Meeting of the ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry (37thAMAF)*. Indonesia juga memprakarsai *ASEAN Guidelines for Preventing the Entry of Fish and Fishery Products from IUU Fishing Activities into the Supply Chain*, yang selanjutnya disahkan dalam oleh Pertemuan Menteri Pertanian ASEAN di Filipina (Kementerian Luar Negeri, 2016). Kemudian, sebagai tuan rumah pertemuan ke-7 *ASEAN Maritime Forum (AMF)* dan ke-5 *Expanded-AMF* tahun 2017 di Jakarta, Indonesia mendorong diangkatnya beberapa isu penting usulan Indonesia seperti *IUU Fishing, crimes in fisheries, bajak laut, dan perampokan bersenjata di laut* (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2018).

Perhatian besar Indonesia pada persoalan *IUU Fishing* juga ditunjukkan dengan inisiatif untuk membentuk Konvensi Regional tentang *IUU Fishing*. Konvensi tersebut diharapkan dapat lahir melalui penyelenggaraan *Regional Conference on the Establishment of a Regional Convention against IUU Fishing and Its Related Crimes* secara berkala, yang pertama kali digelar di Bali pada tahun 2016. Selain itu, pada tahun yang sama, Indonesia juga menyelenggarakan simposium internasional tentang kejahatan perikanan melalui *Symposium Fisheries Crime (FishCRIME)* (Riska, 2017)

Lebih lanjut, capaian diplomasi Indonesia juga berhasil memasukkan beberapa poin penting dalam proses perundingan *High Level Task Force (HLTF) on ASEAN Community's Post-2015 Vision*, seperti perluasan kerja sama maritim ASEAN untuk menanggulangi terorisme, kejahatan lintas negara dan *transboundary challenges* di wilayah laut, termasuk *IUU fishing, penyelundupan, dan trafficking in persons*. Pertemuan HLTF ini dipandang memiliki arti strategis karena akan melandasi arah kerja sama ASEAN pada periode 2016-2025 (Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, 2016).

Tahun 2015, Indonesia juga memprakarsai pembentukan *ASEAN Seaport Interdiction Task Force (ASITF)* yang mana prakarsa ini didukung oleh seluruh negara anggota ASEAN. ASITF dipandang penting dan krusial bagi Indonesia mengingat wilayah perairan Indonesia yang luas sehingga rawan bagi pintu masuk bagi berbagai produk ilegal, termasuk narkoba. Indonesia juga mengajukan usulan pentingnya pembentukan *ASEAN Coast Guard Forum (ACGF)* pada pertemuan ke-5 AMF di Vietnam dan ditindaklanjuti dengan pertemuan *Experts' Group Meeting (EGM) on the ACGF* pada tahun 2015 di Filipina (Kementerian Luar Negeri, 2016).

Kemudian pada tahun 2017, Indonesia mengusulkan dirinya sebagai *Chair Marine Protected Area (MPA) Technical Working Group (TWG)* sekaligus sebagai *Co-Chair*

Threatened Species TWG periode 2018-2020, usulan Indonesia untuk menjadi tuan rumah *MPA Regional Exchange (REX)*, *Q2* di Raja Ampat; *Governance Working Group (CMWG dan FRWG) Meeting April 2018*; *CCA Blue Carbon Training, Q3* di Bali, serta *Our Ocean Conference*, di Bali, yang pada akhirnya usulan tersebut diterima sebagai kesepakatan bersama (Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, 2018).

Selain itu, selain melalui mekanisme ASEAN, upaya realisasi PMD melalui agenda diplomasi maritim juga dilakukan pemerintah Indonesia dengan penindakan hukum melalui kebijakan membakar dan menenggelamkan kapal-kapal asing yang melakukan aktivitas penangkapan ikan ilegal di wilayah perairan Indonesia. Sepanjang tahun 2015, pemerintah telah melakukan penenggelaman kapal ilegal sebanyak 113 kapal dan menangkap 157 kapal ilegal dari berbagai negara seperti Malaysia, Filipina, Vietnam, Thailand, Papua Nugini, Tiongkok, Panama, dan lainnya. Adapun pada tahun 2016, penindakan hukum berupa proses lebih lanjut oleh aparat (*ad hoc*) dilakukan kepada 136 unit dari 149 unit kapal ikan asing yang melakukan pelanggaran *illegal fishing* (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2017). Hingga Maret 2017, pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) 511 telah menenggelamkan 317 kapal asing. Satgas 511 sendiri adalah kerjasama multiinstansi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, Kepolisian RI, dan Kejaksaan Agung untuk pemberantasan *illegal fishing* yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 115 tahun 2015 (Yakti & Susanto, 2017).

Diskusi

Uraian di atas menunjukkan bahwa upaya diplomasi maritim Indonesia untuk mewujudkan visi PMD dilakukan melalui berbagai cara atau bentuk. Gagasan PMD menjadikan pemerintah Indonesia harus bekerja keras untuk memaksimalkan berbagai cara guna mencapai kepentingan nasionalnya terkait aspek maritim. Menurut Rustam, kesungguhan Indonesia menjadi PMD ditunjukkan dengan adanya ambisi untuk membangun tol laut guna menjamin konektivitas laut, wacana peningkatan armada laut untuk pengamanan di seluruh wilayah maritim Indonesia, dan promosi gagasan PMD secara bilateral, regional, dan multilateral dalam berbagai pertemuan (Rustam, 2017). Adapun cara yang dilakukan Indonesia, sebagaimana temuan penelitian ini, adalah dengan mengintegrasikan tiga bentuk diplomasi maritim sebagaimana yang dikemukakan oleh Miere.

Pertama, diplomasi maritim secara *cooperative* dilakukan melalui kerja sama secara bilateral dengan Malaysia, Vietnam, dan Filipina serta trilateral yang melibatkan Indonesia-Malaysia-Filipina. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai masalah kemaritiman,

seperti kompleksitas penetapan batas maritim, penetapan batas ZEE, konektivitas laut, maupun guna menghadapi ancaman keamanan maritim bersama. Cara yang dilakukan Indonesia adalah melalui pertemuan teknis dan pertemuan kolaboratif dengan Malaysia dan Vietnam, deklarasi bersama terkait konektivitas laut dengan Filipina, serta partoli bersama di wilayah perairan Indonesia-Malaysia-Filipina.

Kedua, diplomasi maritim Indonesia juga dilakukan dalam bentuk *persuasive* guna memperoleh dan meningkatkan pengakuan negara lain terhadap kedaulatan maritim Indonesia. Cara yang dilakukan Indonesia adalah dengan menggagas kerja sama maritim antar regional melalui EAS dan ARF. Kemudian, dalam berbagai forum terus mendorong usulan agar *IUU Fishing* dimasukkan sebagai kejahatan transnasional, mendorong pembentukan suatu mekanisme atau instrumen hukum guna memberantas *IUU Fishing*, dan mendorong berbagai kesepakatan tentang *IUU Fishing*. Hal ini berkaitan erat dengan kepentingan maritim Indonesia sebagai negara kepulauan yang menghadapi berbagai ancaman keamanan maritim, khususnya terkait *IUU Fishing*. Sekaligus dapat dilihat sebagai upaya Indonesia untuk menegaskan kedaulatan maritimnya, integritas teritorial, identitas nasional, dan “wibawa” (*prestige*) negara dalam sistem internasional.

Ketiga, penggunaan diplomasi maritim dalam bentuk *coercive* ditunjukkan Indonesia melalui kebijakan tegas terhadap kapal-kapal asing yang melakukan pelanggaran di wilayah teritorial maritim Indonesia. Tindakan tegas itu ditunjukkan melalui penindakan hukum hingga pembakaran dan penenggelaman kapal. Bentuk *coercive* ini juga menunjukkan upaya “*showing the flag*”, dalam arti mengerahkan komponen kekuatan maritim sebagai penanda eksistensi negara di wilayah kedaulatan maritimnya melalui pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran kedaulatan maritim tersebut.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa upaya mewujudkan visi PMD, khususnya melalui diplomasi maritim, perlu mengintegrasikan cara-cara *soft maritime diplomacy* (*cooperative* dan *persuasive*) dan *hard maritime diplomacy* (*coercive*). Jika *hard maritime diplomacy* lebih identik dengan tindakan atau kebijakan personal negara untuk menjaga kedaulatan maritimnya dari segala bentuk ancaman, maka *soft maritime diplomacy* menuntut kerja sama dan kolaborasi negara dengan berbagai aktor (negara, organisasi internasional/regional, dan rezim internasional/regional) untuk secara sinergis menghadapi ancaman keamanan maritim bersama. Hal ini menunjukkan bahwa masalah keamanan maritim tidak bisa dihadapi sendiri oleh negara, dan karena itu perlunya *goes hand by hand* untuk menangani persoalan tersebut. Dalam konteks ini, Indonesia menyadari visi PMD hanya dapat

berusaha diwujudkan melalui partisipasi dan keterlibatan aktifnya untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan berbagai aktor, tetapi dengan tidak kehilangan kepentingan nasionalnya dan dengan tetap menunjukkan wibawa dan identitas nasionalnya.

Namun demikian, menurut penulis, pendekatan *hard* juga perlu dilakukan secara hati-hati. Mengingat cara-cara *hard* dapat menjadi “batu sandungan” dalam mencapai kepentingan yang berusaha dipromosikan melalui cara-cara *soft*. Keaktifan Indonesia menyampaikan gagasan, usulan, rekomendasi, dan lainnya di berbagai forum-forum bilateral, trilateral, maupun multilateral menunjukkan betapa Indonesia berusaha meneguhkan identitas kemaritimannya. Tetapi pada saat yang sama, agresivitas Indonesia di laut melalui kebijakan pembakaran dan penenggalan kapal asing berpotensi mengusik hubungan baik yang berusaha dibangun Indonesia dengan negara lain melalui berbagai instrumen kerja sama, khususnya dengan negara-negara tetangga.

Selain itu, cara kerja sama, persuasi, dan koersi yang dilakukan Indonesia sebagai bentuk diplomasi maritim menunjukkan bahwa diplomasi maritim bukan hanya domain dari angkatan laut, melainkan melibatkan berbagai elemen pemerintahan dan berbagai pemangku kepentingan. Pandangan ini berbeda dengan pemahaman Nugraha dan Sudirman yang lebih memaknai diplomasi maritim sebagai gugus tugas utama yang ada pada angkatan laut dan karena itu diplomasi maritim disamakan dengan diplomasi angkatan laut (Nugraha & Sudirman, 2016). Oleh karena itu, perwujudan cita-cita PMD bukan hanya domain satu unsur atau aktor dalam pemerintahan melainkan harus didukung dan melibatkan segala komponen melalui keterlibatan aktif dan kontribusi yang konstruktif semua pihak, baik melalui cara-cara kerja sama, persuasif, bahkan koersif jika diperlukan.

Kesimpulan

PMD adalah visi untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang maju, mandiri, dan kuat. Visi ini tidak terlepas dari hakikat alamiah Indonesia sebagai negara kepulauan. Salah satu upaya untuk mewujudkan visi PMD tersebut adalah melalui diplomasi maritim, khususnya dalam konteks regional Asia Tenggara mengingat kawasan ini adalah sokoguru kebijakan luar negeri Indonesia. Diplomasi maritim yang kemudian ditunjukkan Indonesia adalah dengan mendorong kerja sama dengan berbagai negara sebagai upaya *confidence-building*, menginisiasi berbagai instrumen dan kesepakatan tentang maritim pada berbagai forum, sekaligus pula menunjukkan eksistensi negara di wilayah maritim melalui tindakan tegas atas pelanggaran terkait *illegal fishing*. Temuan dalam penelitian menunjukkan

bahwa diplomasi maritim Indonesia dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai cara dan dengan melibatkan berbagai aktor menuju pada satu cita-cita untuk menegaskan diri sebagai poros maritim. Penelitian ini memberikan kontribusi pada kajian diplomasi maritim bahwa diplomasi maritim bukan sekadar dan bukan hanya domain angkatan laut, melainkan juga elemen negara yang lain.

Daftar Pustaka

- Dinarto, D. (2016). *Reformasi Tata Kelola Keamanan Maritim Indonesia di Era Presiden Joko Widodo*. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/309726899_Reformasi_Tata_Kelola_Keamanan_Maritim_Indonesia_di_Era_Presiden_Joko_Widodo
- Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika. (2016). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika 2015*. Jakarta: Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI.
- Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika. (2018). *Laporan Kinerja 2017*. Jakarta: Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI.
- Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN. (2016). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN 2015*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI.
- Jokowi, & Kalla, J. (2014). *Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian: Visi Misi dan Program Aksi*. Jakarta: Tim Jokowi-JK.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2017). *Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 2016*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI. (2017). *Kebijakan Kelautan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia.
- Kementerian Luar Negeri RI. (2016). *Buku II Informasi Kinerja Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri Tahun 2015*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri.
- Kementerian Luar Negeri RI. (2018). *Laporan Kinerja Tahun 2017*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- Kementerian Luar Negeri RI. (2014). Presiden Jokowi Deklarasikan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia. Retrieved November 24, 2017, from <https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Presiden-Jokowi-Deklarasikan->

Indonesia-Sebagai-Poros-Maritim-Dunia.aspx

- Kementerian Luar Negeri RI. (2015). *Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri Tahun 2014*. Jakarta.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (2014). *Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Buku I: Agenda Pembangunan Nasional*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Lembong, B. (2015). *Poros Maritim*. Jakarta: Pustaka Margaretha.
- Madu, L. (2014). Reorientasi Politik Luar Negeri Indonesia pada Pemerintahan Joko Widodo 2014-2019. *Transnasional: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 9(2), 104–117.
- Miere, C. Le. (2014). *Maritime Diplomacy in the 21st Century: Drivers and Challenges*. New York: Routledge.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Muhamad, S. V. (2014). Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia. *Info Singkat Hubungan Internasional: Kajian Singkat Terhadap Isu-Isu Terkini, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data Dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI*, VI(21), 5–8.
- Nugraha, M. H. R., & Sudirman, A. (2016). Maritime Diplomacy sebagai Strategi Pembangunan Keamanan Maritim Indonesia. *Jurnal Wacana Politik*, 1(2), 175–182.
- Prasetya, E. (2014). Ini Pidato Lengkap Jokowi di Atas Kapal Pinisi. Retrieved November 24, 2017, from <https://www.merdeka.com/politik/ini-pidato-lengkap-jokowi-di-atas-kapal-pinisi.html>
- Putra, A. R. (2017). Partisipasi Indonesia dalam Diplomasi Pertahanan untuk Keamanan Maritim di Asia Tenggara (Studi tentang Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery Against Ships in Asia). *Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan*, 3(2), 1–16.
- Riska, E. (2017). Diplomasi Maritim Indonesia terhadap Aktivitas Penangkapan Ikan Ilegal (Illegal Fishing) Oleh Nelayan China di ZEEI Perairan Kepulauan Natuna. *Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan*, 3(2), 33–47.
- Rustam, I. (2017). Kebijakan Keamanan Maritim di Perbatasan Indonesia: Kasus Kejahatan di Laut Sulawesi-Laut Sulu. *Jurnal Penelitian Politik*, 14(2), 161–177.
- Setiadji, A. (2014). Diplomasi Maritim untuk Kedaulatan Indonesia. Retrieved November 24, 2017, from <http://maritimnews.com/diplomasi-maritim-untuk-kedaulatan-indonesia/>
- Suropati, U., Sulaiman, Y., & Ian Montratama. (2016). *Arungi Samudera Bersama Sang Naga*:

Sinergi Poros Maritim Dunia dan Jalur Sutra Maritim Abad Ke-21. Jakarta: Elex Media Komputindo.

- Yakti, P. D., & Susanto, J. (2017). Poros Maritim Dunia Sebagai Pendekatan Strategi Maritim Indonesia: Antara Perubahan atau Kesenambungan Strategi ? *Global & Strategis*, 11(2), 108–125. <https://doi.org/10.20473/jgs.v11i2.5355>
- Yusran, & Asnelly, A. (2016). Tantangan Politik Luar Negeri Bebas Aktif dalam Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia: Tinjauan Postmodernisme. In *Prosiding Konvensi Nasional Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional, Benua Maritim Indonesia Dalam Perspektif Ilmu Hubungan Internasional* (pp. 286–303). Makassar: Universitas Hasanuddin.

Persepsi Pemuda di Sumatera Selatan Terhadap Diplomasi Publik

Azhar

Universitas Sriwijaya (UNSRI)

azhar@fisip.unsri.ac.id

Abstract

This paper is a research result which aims to determine the perception of youth in South Sumatra towards public diplomacy. This research use exploratory and descriptive methods. Sampling technique in this research is purposive sampling. The purpose of this research I to uncover the perception of college students toward public diplomacy in South Sumatra. More over, it describes the knowledge of college students on the definition, useful of diplomacy public. Furthermore, It examines the impact of college students perception on their interest of public diplomacy (the impact of cognitive, affective and behavioral).

The results of this research showed that a few people have already known what is diplomacy, especially about public diplomacy. Furthermore, there are many youth feel not benefited from public diplomacy, but quite a few feel the benefits of diplomacy on a larger scale, such as their perception of public diplomacy for, social exchange, culture and world peace. In conclusion, South Sumatra youth have a fundamental knowledge of public diplomacy, where the knowledge is mostly obtained from social media. But many still feel not benefited from the public diplomacy.

Keywords: *Diplomacy, Perception, Youth, South Sumatra, Indonesia*

Abstrak

Paper ini merupakan hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui persepsi pemuda di Sumatera Selatan terhadap diplomasi publik. Dalam penelitian ini menggunakan metode eksploratif dan deskriptif dalam hal ini. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Tujuan penelitian ini pertama untuk mengungkap persepsi Mahasiswa/i di Sumatera Selatan terhadap diplomasi publik. Kemudian untuk mendeskripsikan pengetahuan pemuda tentang definisi dan manfaat dari diplomasi publik. Selanjutnya mengkaji pengaruh persepsi Mahasiswa terhadap minat mereka untuk ikut berperan dalam diplomasi publik Indonesia (Mengkaji efek kognitif, afektif dan behavioural).

Temuan menunjukkan bahwa cukup banyak pemuda di Sumatera Selatan yang telah mengetahui apa itu diplomasi, terutama tentang diplomasi publik. Lebih lanjut bahwa masih banyak orang yang belum merasakan manfaat dari diplomasi publik, namun cukup banyak yang merasakan manfaat diplomasi dalam skala yang lebih besar, seperti persepsi mereka atas diplomasi publik untuk pertukaran sosial, budaya dan perdamaian dunia. Terakhir, pemuda Sumatera Selatan telah mempunyai pengetahuan mendasar terkait diplomasi publik, dimana pengetahuan tersebut paling banyak didapatkan dari media sosial. Namun masih banyak yang belum merasakan manfaat yang signifikan dari diplomasi publik tersebut bagi kepentingan pribadi.

Kata Kunci: *Diplomasi, Persepsi, Pemuda, Sumatera Selatan, Indonesia.*

Pendahuluan

Diplomasi adalah suatu interaksi praktik sosial yang dilakukan suatu negara dengan negara lain (Hurd, 2015). Dalam prosesnya, negara-negara melakukan serangkaian dialog yang didalamnya terdapat tawar-menawar (negosiasi) terkait kepentingan nasional mereka (Pouliot, 2011). Proses negosiasi dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan, surat menyurat dan pertukaran nota. Secara tradisional, diplomasi merupakan alat untuk memenuhi kepentingan-kepentingan negara di luar wilayah yurisdiksi suatu negara. Pada zaman kemerdekaan Indonesia, diplomasi digunakan untuk mendapatkan pengakuan internasional bahwa Republik Indonesia adalah negara yang berdaulat berdasarkan hukum (*De Jure*) dan berdasarkan pada kenyataan/fakta (*De Facto*).

Dewasa ini, dengan berkembangnya situasi di dunia, globalisasi dan perkembangan teknologi informasi telah mendorong para aktor sehingga menyebabkan perubahan pada cara kerja diplomasi tradisional menjadi lebih modern, misalnya diplomasi publik. Diplomasi tidak melulu membicarakan masalah-masalah peperangan tapi juga mengulas isu-isu baru seperti kesehatan, kebudayaan, pendidikan, pariwisata, hak asasi manusia dan lain-lain. Oleh sebab itu, terdapat perbedaan antara diplomasi tradisional dan diplomasi publik. Jika diplomasi tradisional hanya tentang hubungan antara perwakilan-perwakilan negara dan aktor internasional lainnya, maka diplomasi publik mempunyai target yang berbeda yakni masyarakat umum yang berada di luar negeri (Melissen, 2005). Diplomasi publik juga dapat diartikan sebagai upaya untuk mengenalkan atau memberikan pemahaman tentang negara, sikap, institusi, budaya, kepentingan nasional dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negaranya kepada publik mancanegara (Wang, 2006). Dari pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa diplomasi publik mempunyai peranan penting dalam mempromosikan kepentingan negara yaitu dengan melakukan pemahaman, pemberian informasi dan mempengaruhi publik di luar negara. Menurut Joseph Nye, Diplomasi dapat dikategorikan sebagai *soft power* yaitu suatu tindakan untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan apa yang diinginkan tanpa menggunakan *hard power* ataupun kekerasan. Walaupun kekerasan dan peperangan masih ada di bumi ini, namun kebanyakan negara lebih memilih untuk mencapai kepentingan nasionalnya dengan menggunakan *soft power*, karena itulah diplomasi publik menjadi pilihan utama kebanyakan negara.

Diplomasi publik mulai dipraktikkan setelah Perang Dunia I, trauma terhadap perang membuat kebanyak negara-negara di Eropa memilih diplomasi publik untuk menjaga hubungan dengan negara-negara lain, diplomasi itu dikenal dengan istilah *democratic diplomacy*. Diplomasi publik setelah itu banyak di terapkan oleh negara-negara Eropa seperti pada tahun 1990, Perancis menerapkan diplomasi *Politique d'influence*, untuk memulihkan citra negaranya setelah kalah dalam perang dunia. Hingga diplomasi jenis ini dikenal dengan sebutan diplomasi publik setelah Edmund Gullion cendikiawan dari Fletcher School of Law and Diplomacy pada tahun 1965 menyebutnya dalam penelitiannya tentang budaya dan program internasional Amerika Serikat (Jay Wang (dikutip oleh Citra)).

Menurut Citra, diplomasi publik memiliki 3 (tiga) perbedaan dengan diplomasi biasa (tradisional). Menurutnya, diplomasi publik lebih bersifat terbuka dan jangkauannya luas karena diplomasi tradisional umumnya bersifat tertutup seperti di ruang rapat yang jauh dari publik hanya sebatas pertemuan antara diplomat atau aparatur negara. Kedua, diplomasi publik

sifatnya berterusan antara pemerintah ke pemerintah negara lainnya. Ketiga, isu-isu yang diangkat oleh diplomasi tradisional berhubungan dengan kebijakan dan perilaku dari pemerintah sedangkan diplomasi publik lebih kepada sikap dan perilaku publik. Selain itu menurut Evan Potter (Dikutip oleh Citra), isu yang diangkat oleh diplomasi publik tidak hanya meliputi permasalahan kebijakan luar negeri tetapi juga masalah nasional. Hal tersebut berarti diplomasi publik tidak hanya berlangsung di luar negeri tapi juga di dalam negeri yang berarti bukan hanya aktor-aktor yang terlibat dalam kebijakan pemerintah saja tetapi juga aktor lintas pemerintah seperti swasta, lembaga swadaya masyarakat, media, masyarakat dan individu.

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan mengukur pengetahuan dan menganalisis persepsi pemuda Sumatera Selatan terhadap diplomasi publik. Penelitian ini juga sangat penting karena dengan mengetahui persepsi mereka akan lebih mudah untuk mendorong pemuda-pemudi bangsa untuk aktif berperan dalam ranah diplomasi guna meningkatkan hubungan persahabatan antar bangsa dan menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia seperti yang dimimpi-mimpikan bangsa Indonesia yang tercatat dalam pembukaan UUD 1945 alenia keempat, ikut serta dalam ketertiban dunia. Keterlibatan publik telah mendorong peneliti untuk mencari tahu lebih lanjut. Bagaimana persepsi pemuda Indonesia, khususnya di pulau Sumatera Selatan terhadap diplomasi publik. Kemudian dijabarkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No.39, Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi bahwa “hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia.”

Tinjauan Teori

A. Teori Persepsi

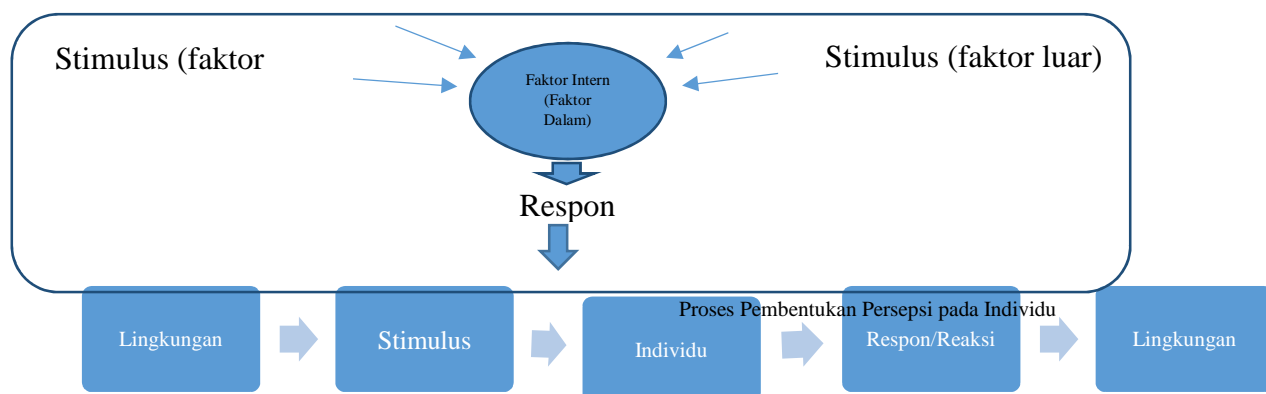
Menurut Kotler (2000), persepsi adalah suatu cara bagaimana seseorang melakukan pengaturan, seleksi dan mengartikan suatu informasi untuk menciptakan pengertian akan sesuatu. Pengertian Pemuda itu sendiri menurut Undang-undang No.40 tahun 2009 tentang kepemudaan adalah warga negara Indonesia yang mempunyai rentang umur 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Pemuda juga dikenal dalam kosakata Bahasa Indonesia yang lain seperti generasi muda atau kaum muda. Jadi secara keseluruhan pengertian dari pemuda adalah seorang individu yang sedang dalam proses perkembangan baik secara fisik maupun psikis. Berdasarkan teori diatas maka pengertian dari persepsi pemuda terhadap diplomasi publik adalah proses penilaian atau interpretasi generasi muda untuk memahami dan mengerti tentang

diplomasi publik. Dalam memakna sesuatu, individu pada umumnya dipengaruhi juga oleh lingkungan, pengalaman dan proses belajar individu itu sendiri.

Menurut Walgito (1981) proses terbentuknya persepsi ditentukan oleh Lingkungan, Stimulus, individu dan respon/reaksinya. Proses terbentuknya persepsi dapat dilihat pada

Gambar 1 berikut :

Gambar 1. Proses Terbentuknya Persepsi (Walgito,1981)



Gambar 1. Memberikan gambaran bahwa dalam proses pembentukan persepsi, lingkungan sekitar individu memberikan rangsangan atau stimulus. Tidak semua rangsangan diterima oleh individu, namun faktor internal atau faktor dalam yang menentukan stimulus yang mana di terima oleh individu. Sebagai hasil diharapkan individu memberikan respon sebagai reaksi terhadap stimulus yang dia terima.

B. Efek Perubahan Sikap

Menurut Effendy (2000), perubahan sikap pada individu adalah sebab atau efek dari rangsangan / stimulus yang dia dapatkan dari lingkungan. Perubahan sikap tersebut meliputi perubahan kognitif, afektif dan behavioural.

a. Efek Kognitif

Efek yang timbul dari individu yang bersifat pengetahuan / informatif. Informasi atau stimulus dari lingkungan luar memberikan informasi yang bermanfaat dan mengembangkan keterampilan kognitif. Misalnya dalam hal diplomasi publik. Mahasiswa mendapatkan pengetahuan tentang diplomasi publik dari seminar publik. Pengetahuan ini nantinya akan memberikan rangsangan untuk membentuk efek lainnya.

b. Efek Afektif

Berkaitan dengan Efek ini merupakan lanjutan dari efek kognitif. Efek ini berhubungan dengan perasaan. Pengetahuan yang didapat oleh seorang individu tentang sesuatu mempengaruhi perasaannya. Misalnya perasaan senang, sedih, tertawa terbahak-bahak, dan menangis. Contohnya apabila mahasiswa mendapatkan informasi tentang manfaat diplomasi untuk kelangsungan hidup bangsa Indonesia tentu mempengaruhi perasaan mereka.

c. Efek Konatif

Efek ini muncul sebagai dorongan dari efek-efek sebelumnya. Berhubungan dengan niat, tekad, upada dan usaha untuk melakukan suatu tindakan. Contohnya mahasiswa yang mendapat imbauan tentang manfaat diplomasi publik di seminar mendapatkan efek kognitif, efek afektif, sehingga terdorong untuk ikut serta berperan dalam praktik diplomasi publik (Efek Konatif).

Tinjauan Pustaka

Dalam pencarian pustaka, kita menemukan banyak peneliti di Indonesia memiliki persepsi positif terhadap diplomasi publik (Effendi, 2005; Citra, n.d; Asep, 2014). Tonny berpendapat diplomasi publik bermanfaat untuk membentuk citra positif negara di luar negeri. Dalam tulisannya “Diplomasi publik sebagai pendukung hubungan Indonesia-Malaysia” Tonny mengatakan hubungan antara Indonesia dan Malaysia sangatlah rentan konflik dan kesalahpahaman. Masyarakat antar negara tersebut memiliki persepsi negatif satu sama lainnya, sehingga menjadi salah satu pendorong permusuhan dan permasalahan kedua negara tersebut. Berangkat dari permasalahan itulah diplomasi publik menjadi penting untuk memperkuat kesepahaman dan menjadi jembatan untuk mengenal lebih dekat. Effendi (2005), mengutip Mark mengatakan tingkat aktifitas diplomasi akan membantu dalam proses pendukung hubungan Indonesia dan Malaysia seperti dalam **Tabel.1** berikut :

Tabel 1. Tingkatan Aktifitas Diplomasi

Hirarki	Aktifitas
Meningkatkan pengetahuan dan pengenalan masyarakat	Menghimbau masyarakat memikirkan tentang negara tersebut
Meningkatkan apresiasi masyarakat	Menciptakan persepsi positif, mengajak melihat beberapa isu
Meningkatkan keterkaitan dan keterkaitan dan ketertarikan masyarakat	Memperkuat hubungan kerjasama pendidikan pendidikan kearah kegiatan bersama, mengundang masyarakat untuk mengunjungi tempat

Mempengaruhi masyarakat	Mengajak perusahaan untuk berinvestasi, mendapatkan dukungan masyarakat
-------------------------	---

(Sumber: Mark Leonard (2002) dikutip oleh Effendi 2013)

Effendi menambahkan pemerintah tidak dapat bergerak sendiri dalam praktik pelaksanaan diplomasi publik. Diperlukan peranan serta masyarakat, akademisi, profesional, pebisnis, dan lain-lain untuk ikut serta dalam membentuk citra positif guna membangun kesepahaman bersama. Pemerintah harus memposisikan diri sebagai jembatan masyarakat dua negara tersebut, kemudian citra menilai diplomasi tidak hanya membentuk citra luar negeri tapi diplomasi publik juga merupakan instrumen politik luar negeri pada proses pembentukan dan implementasi kebijakan. Diplomasi menentukan proses pembuatan dan dimana suatu kebijakan tersebut diimplementasikan. Diplomasi publik berfungsi untuk mengumpulkan informasi dan pertimbangan yang menjadi sumber dalam pembuatan kebijakan seperti faktor-faktor yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kebijakan yang akan dibuat tersebut proses ini melibatkan aktor-aktor non-negara seperti swasta, lembaga swadaya masyarakat, individu yang selanjutnya juga akan ikut dilibatkan dalam proses implementasi. Selain untuk membangun citra positif keluar negeri, diplomasi publik juga dapat digunakan dalam membangun citra positif dalam negeri. Asep (2014), dalam kertas kerjanya “Diplomasi publik dalam membangun citra negara” mengatakan diplomasi memiliki hubungan erat dengan *public relation*, keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu membentuk persepsi dan opini publik. Diplomasi publik yang berkaitan dengan keterlibatan publik, mengikut sertakan publik dalam praktik diplomasi berarti menerapkan ilmu *public relations*, selanjutnya ilmu tersebut mengkaji pembentukan opini publik sehingga akhirnya terbentuklah citra yang positif.

Dalam studi persepsi publik terhadap diplomasi publik, Bima & Peni (2010), membuat penelitian mengenai persepsi publik terhadap kinerja multi jalur diplomasi departemen luar negeri (2002-2007). Mereka menggunakan metode penelitian deskriptif-analitis dan teknik pengumpulan data dari studi dokumen, literatur meliputi buku-buku, majalah, koran, dari pencarian online, wawancara terhadap 21 orang aktor diplomasi publik dengan teknik wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dan juga survei/kuesioner tertutup dengan skala Likert. Hasil penelitian tersebut, Bima & Peni Publik menganggap departemen luar negeri masih kurang mampu dalam penerapan lima faktor tujuan pendiriannya yaitu 1) pemberdayaan masyarakat moderat Indonesia, 2) memajukan *people to people contact*, (3) penyebaran informasi tentang politik luar negeri, 4) merangkul dan mempengaruhi publik luar negeri dan 5) mengumpulkan saran dan masukan untuk pelaksanaan politik luar negeri. Disisi lain publik ingin dilibatkan secara aktif namun mereka merasa diplomasi publik Indonesia cenderung hanya

digunakan sebagai media sosialisasi dari aktivitas dan kebijakan diplomasi dan politik luar negeri Republik Indonesia saja.

Dari pustaka di atas, peneliti tidak menemukan penelitian yang berfokus pada persepsi pemuda terhadap diplomasi publik. Oleh karena itulah, penelitian ini mencari tahu persepsi pemuda dengan mengambil sampel mahasiswa dan mahasiswi di beberapa universitas di Kota Palembang dan Indralaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis dengan teknik survey/kuesioner. Metode penelitian dijelaskan lebih lanjut.

Metode Penelitian

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analitis yaitu penelitian yang berfokus pada pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan (deskripsi) dan menganalisis subjek dan objek penelitiannya. Penelitian ini tidak hanya terbatas pada pencarian dan penyusunan data tetapi juga menganalisis dan menerjemahkan data tersebut. Artinya, jawaban dari penelitian ini ditemukan dari data-data yang peneliti kumpulkan. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari kuesioner yang diisi oleh mahasiswa-mahasiswi SUMSEL yang masih dalam status aktif berkuliah dan data sekunder didapatkan dari buku-buku, majalah, surat kabar, dari pencarian online.

B. Teknik dan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Purposive sampling*. Purposive sampling adalah pengambilan sampel bukan ditentukan oleh strata, random atau asalnya, namun didasarkan pada tujuan tertentu. Tujuan dan pertimbangan pengambilan sampel penelitian ini adalah sampel harus memiliki pengetahuan tentang diplomasi publik. Penelitian ini mengambil sampel dari mahasiswa-mahasiswi di beberapa Universitas Negeri dan Swasta di Sumatera Selatan yaitu Universitas Sriwijaya, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Universitas Binadarma, UIGM, Universitas Muhammadiyah. Metode penyebaran kuesioner yang digunakan antara lain adalah dengan mendatangi langsung responden dan melalui media elektronik.

3.3 Instrumen Pengukuran

Penelitian ini menggunakan kuesioner skala likert dengan 5 titik dengan kategori penilaian: sangat tidak benar, tidak benar, ragu-ragu, benar, sangat benar yang ditandai dengan nilai 1 s/d 5. Responden diminta untuk memberikan respon terhadap beberapa pertanyaan dengan lima pilihan tersebut. Indikator dan pengukuran variabel dilampirkan pada **Tabel 2**.

Tabel 2. Indikator dan Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Pengetahuan tentang diplomasi publik	Upaya untuk mengenalkan atau memberikan pemahaman tentang negara, sikap, institusi, budaya, kepentingan nasional dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negaranya kepada publik dalam dan luar negeri.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan tentang diplomasi publik • Sumber informasi diplomasi publik • Pro dan kontra terhadap diplomasi publik dan diplomasi publik Indonesia.
Manfaat dari diplomasi publik	Diplomasi publik membantu menjembati masyarakat dalam dan luar negeri. Memberikan pemahaman akan kepentingan bersama	<ul style="list-style-type: none"> • Manfaat Diplomasi publik • Kualitas dan kemajuan pendidikan mahasiswa • Beasiswa • Pertukaran budaya • Perdamaian dunia
Kesiapan diri terlibat dalam praktik diplomasi publik	Kesiapan mahasiswa/i	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan berbahasa asing • Kemampuan penguasaan IPTEK

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bagian ini membahas mengenai persepsi pemuda di Sumatera Selatan terhadap diplomasi publik. Pembahasan ini dilakukan setelah mendapatkan data dari hasil penyebaran kuesioner dan observasi secara langsung. Pengambilan sampel/data dari kuesioner fisik dilakukan di lima universitas di Palembang yaitu; Universitas Sriwijaya, Universitas Binadarma, UIGM, Universitas Muhammadiyah, dan Universitas Islam Negeri Raden Fatah. Sebanyak 474 kuesioner fisik berhasil dikumpulkan dari total 500 kuesioner. Sebelum membahas tentang persepsi pemuda di Sumatera Selatan terhadap diplomasi publik, terlebih dahulu akan disajikan mengenai karakteristik responden yang dijadikan objek penelitian.

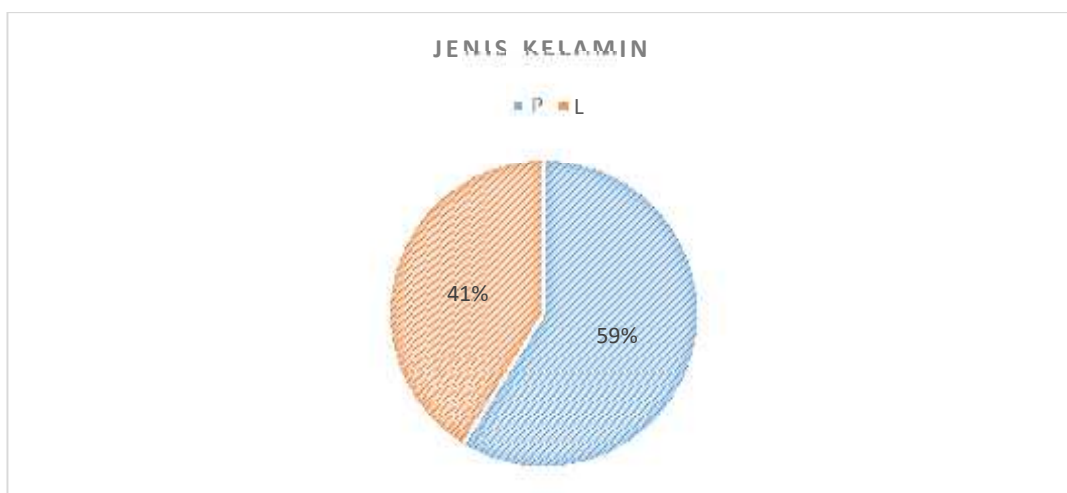
A. Identitas Umum Responden

Bagian ini berisikan identitas responden yang terdiri dari 2 (dua) pertanyaan yaitu: jenis kelamin dan asal universitas. Hasilnya peneliti mendapatkan 41% responden perempuan dan 59% responden Lelaki (lihat grafik 1).

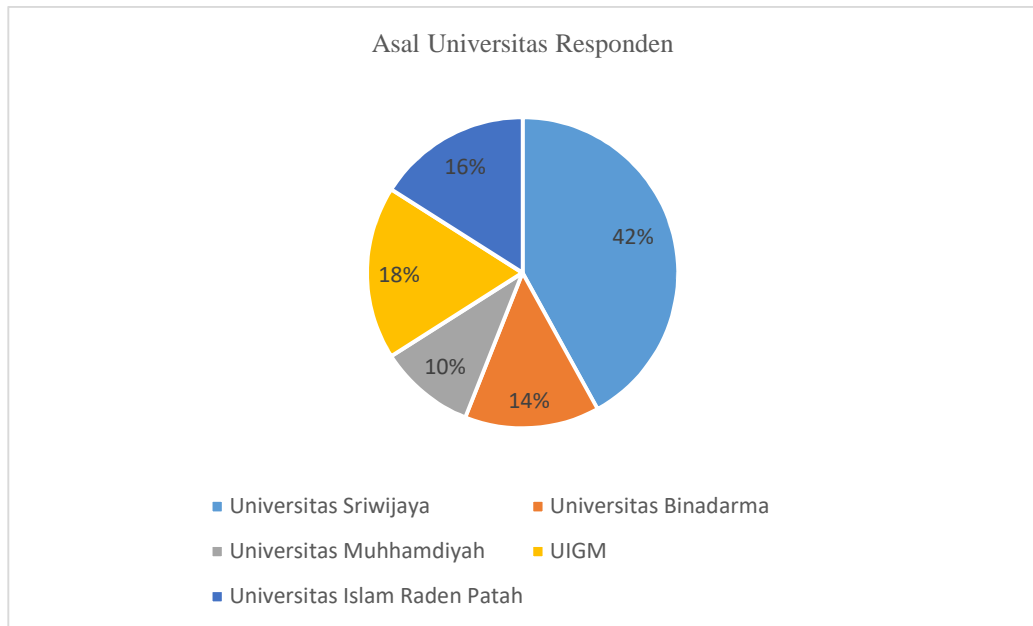
Berdasarkan grafik 1 diatas bahwa lebih dari setengah responden berjenis kelamin laki-laki, 41% responden penelitian adalah Perempuan. Sedangkan 59% responden adalah laki-laki.

Sedangkan asal universitas responden dapat dilihat juga dari grafik 2, dimana 42% responden berasal dari Universitas Sriwijaya, 14% dari Universitas Binadarma, 18% berasal dari UIGM, 10% berasal dari Universitas Muhammadiyah, dan 16% berasal dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah. Dapat dilihat dari data grafik 1 dan 2 mayoritas responden adalah laki-laki dan mayoritas responden berasal dari Universitas Sriwijaya.

Grafik 1. Kontribusi responden berdasarkan jenis kelamin



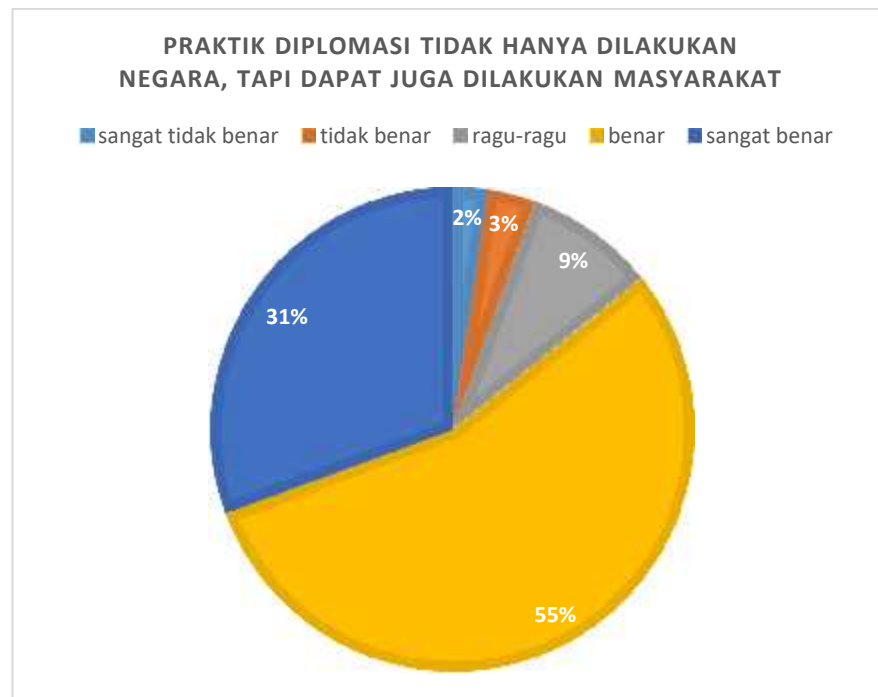
Grafik 2. Asal Universitas Responden



B. Pengetahuan Tentang Diplomasi Publik

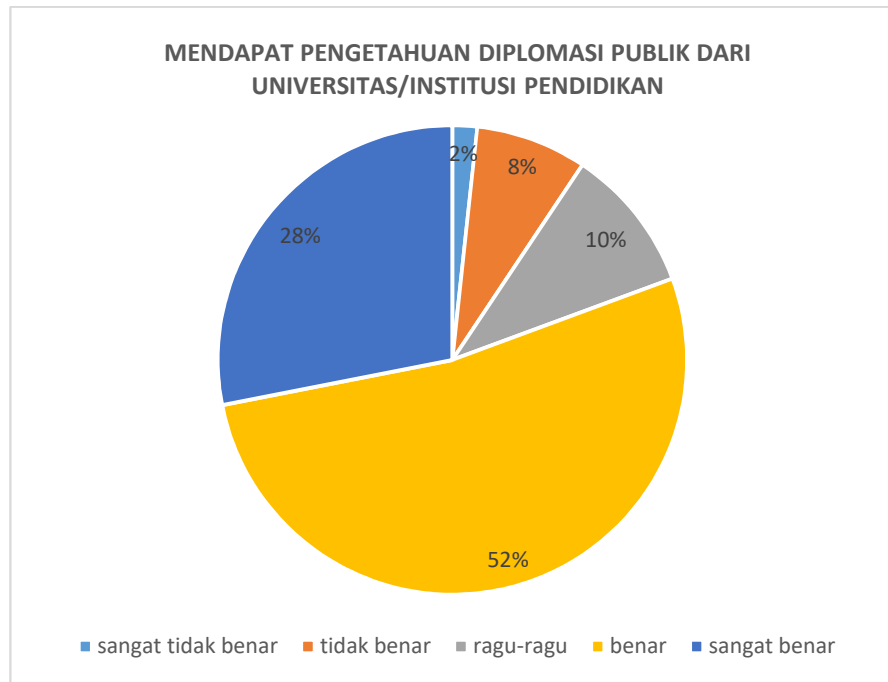
Untuk mengetahui pengetahuan responden tentang Diplomasi Publik, peneliti menanyakan 3 pertanyaan singkat yaitu 1) Praktik Diplomasi tidak hanya dilakukan negara, tapi dapat juga dilakukan masyarakat, 2) mendapatkan pengetahuan tentang diplomasi publik dari universitas/institusi pendidikan dan 3) saya mendapatkan pengetahuan tentang diplomasi publik dari teman dan keluarga 4) saya mendapatkan pengetahuan diplomasi Publik dari Media Sosial 5) saya merasa diplomasi tidak hanya hubungan negara dengan negara, tapi juga masyarakat dengan masyarakat. Hasil pengolahan data dapat dilihat pada grafik 3,4, 5, 6, dan 7.

Grafik 3. Pengetahuan responden tentang diplomasi publik

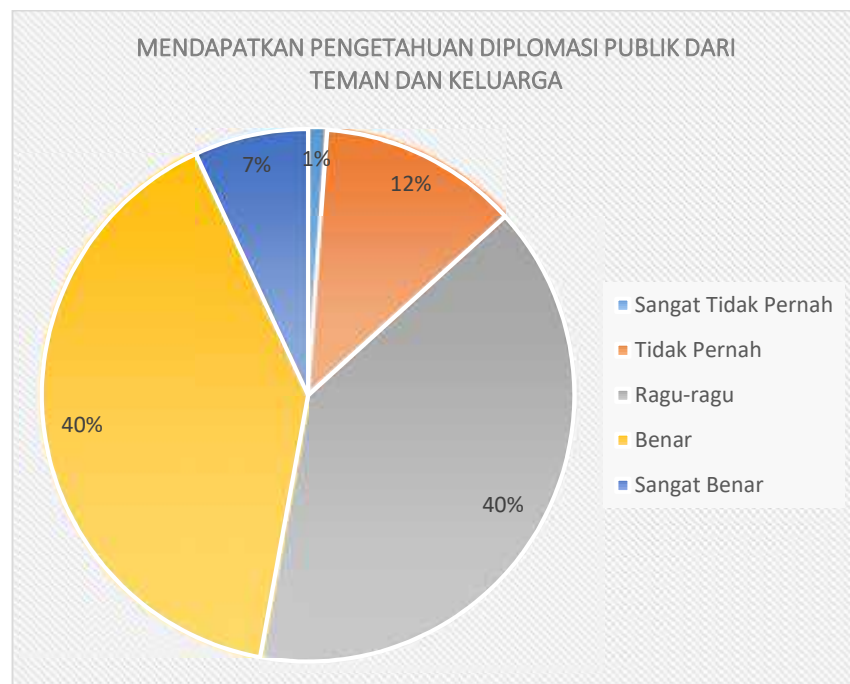


Berdasarkan Grafik 3, sebagian besar responden telah mengetahui bahwa diplomasi tidak hanya dilakukan oleh negara, namun juga dapat dilakukan oleh masyarakat. Berdasarkan data dari grafik 3, bahwa 31% responden menganggap sangat benar bahwa diplomasi dapat dilakukan juga oleh masyarakat. Sebanyak 55% responden menganggap benar jika diplomasi tidak hanya dilakukan oleh negara, namun juga oleh masyarakat. Dari data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar responden mengetahui bahwa praktik diplomasi tidak hanya identik dengan kegiatan yang dilakukan oleh negara, akan tetapi masyarakat juga dapat melakukan praktik diplomasi.

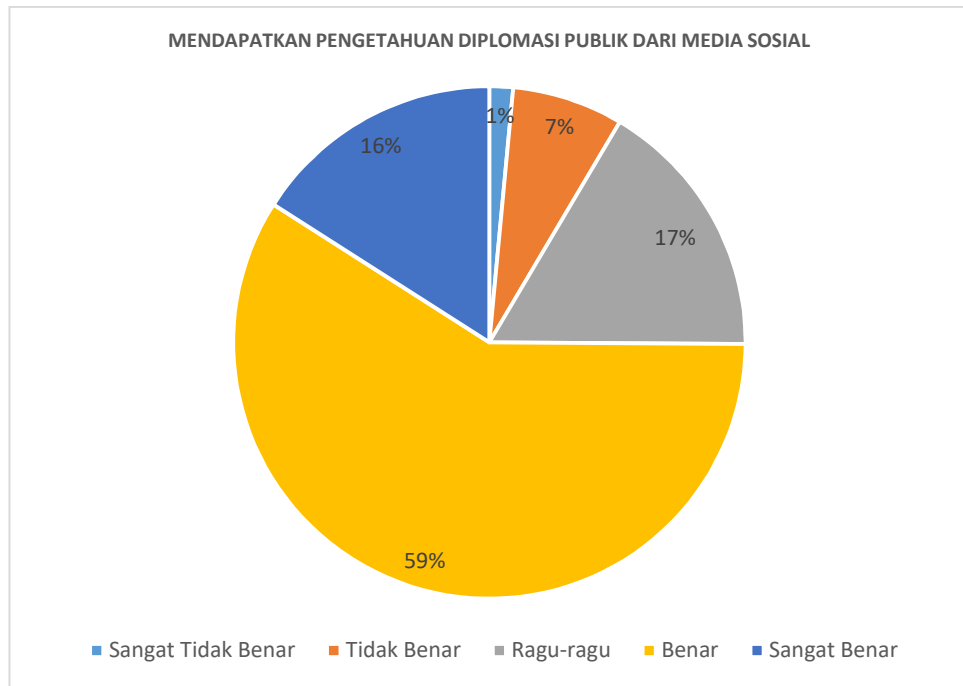
Grafik 4. Pengetahuan Responden tentang Diplomasi Publik berasal dari Universitas/Institusi Pendidikan



Grafik 5. Pengetahuan Responden tentang Diplomasi Publik berasal dari Teman dan Keluarga



Grafik 6. Pengetahuan Responden tentang Diplomasi Publik berasal dari Media Sosial.



Berdasarkan data dari grafik 4, 5, dan 6, dapat di lihat darimana responden mendapatkan pengetahuan terkait diplomasi publik. Dalam grafik 4 dapat dilihat bahwa 80 % responden mendapatkan informasi tentang diplomasi publik dari institusi/lembaga perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya peranan lembaga perguruan tinggi dalam menyampaikan informasi tentang diplomasi publik.

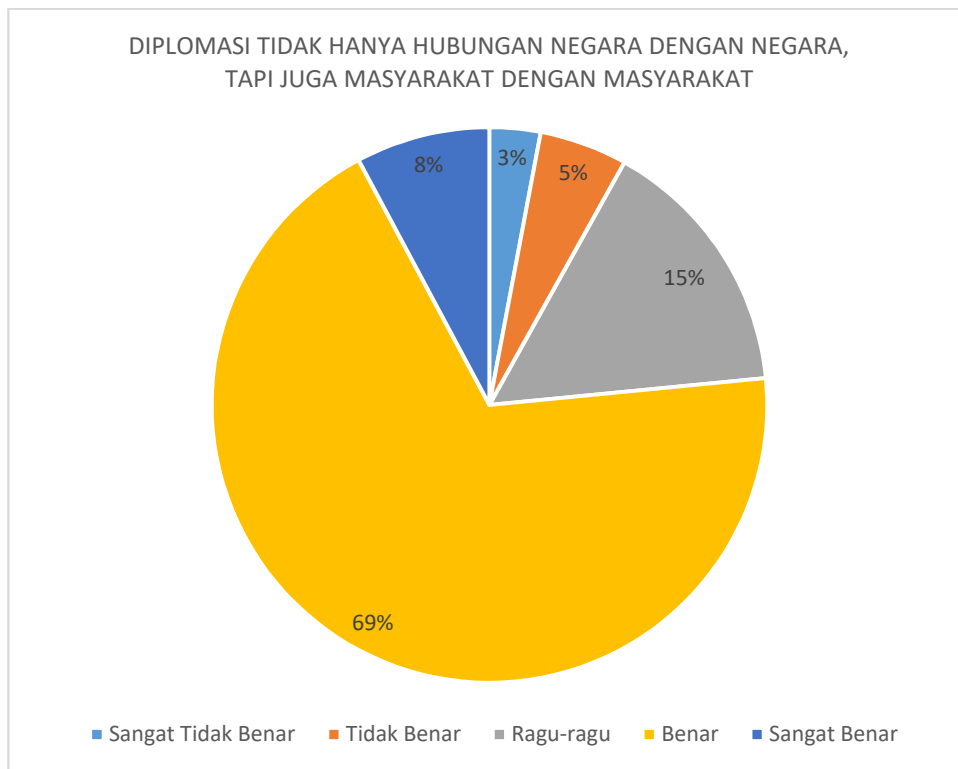
Selanjutnya, berdasarkan grafik 4, universitas dan institusi pendidikan juga dianggap sebagai sumber pengetahuan responden terkait diplomasi publik. Sekitar 28% responden menjawab sangat benar jika pengetahuan tentang diplomasi publik berasal dari universitas atau institusi pendidikan, dan 52% lainnya menjawab benar pengetahuan terkait diplomasi publik berasal dari universitas atau institusi pendidikan. Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan jika pengetahuan diplomasi publik salah satunya berasal dari universitas atau institusi pendidikan.

Berdasarkan grafik 5, bahwa 40% responden menjawab bahwa benar dan 7% sangat benar mereka mendapatkan pengetahuan tentang diplomasi publik berasal dari teman dan keluarga. Hal ini dapat dilihat dari grafik 5, bahwa 47% responden setuju jika teman dan keluarga sebagai sumber pengetahuan terkait diplomasi publik, sedangkan 40% ragu-ragu jika sumber pengetahuan terkait diplomasi publik berasal dari keluarga dan teman. Hal ini menunjukkan jika pengetahuan responden terkait diplomasi publik tidak dapat disimpulkan berasal atau dipengaruhi informasi yang responden dapat dari teman dan keluarga responden.

Sebagian besar responden juga mendapatkan pengetahuan tentang diplomasi publik berasal dari media sosial. Berdasarkan grafik 6 Sekitar 59% responden menganggap media sosial sebagai sumber pengetahuan diplomasi publik, dan 16% menganggap sangat benar jika media sosial sebagai sumber pengetahuan diplomasi publik. Jika kita gabungkan bahwa 75% dari total responden mendapatkan informasi diplomasi publik dari media sosial.

Hal ini menunjukkan pentingnya akses informasi terutama dari media sosial dalam menambah pengetahuan responden. Hal ini juga menunjukkan pentingnya media sosial sebagai wadah berkembangnya pengetahuan terkait diplomasi publik, bahkan menjadi alat dari diplomasi publik itu sendiri.

Grafik 7. Pengetahuan Responden tentang diplomasi tidak hanya hubungan negara dengan negara, tapi juga masyarakat dengan masyarakat.



Berdasarkan grafik 7, sebagian besar responden menganggap sangat benar jika diplomasi juga dapat dilakukan antar masyarakat dengan masyarakat. Hal ini menjadi penting karena diplomasi publik adalah praktik diplomasi yang ditujukan untuk mempengaruhi masyarakat, dan dapat dilakukan oleh masyarakat kepada masyarakat lainnya. Berdasarkan grafik 7 dapat disimpulkan jika pengetahuan responden terkait diplomasi publik sebagai praktik diplomasi anatar masyarakat dengan masyarakat cukup besar.

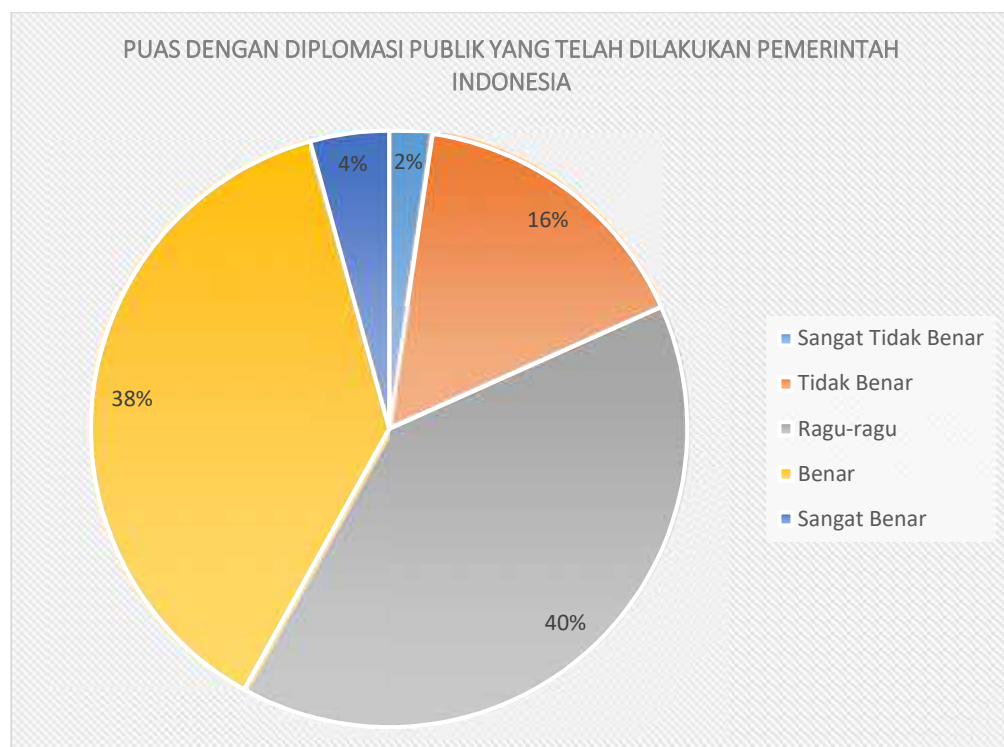
Berdasarkan data yang didapat dari 474 responden penelitian ini, Pemuda Sumatera Selatan cukup mengetahui tentang apa itu diplomasi publik. Walaupun sebatas pengetahuan

dasar jika diplomasi tidak hanya praktik yang identik dengan negara, dan praktik diplomasi yang dapat dilakukan antara masyarakat dengan masyarakat lainnya. Pemuda di Sumatera Selatan juga tidak dapat disimpulkan mendapatkan sebagian besar pengetahuan terkait diplomasi publik dari keluarga dan teman. Berdasarkan data diatas juga dapat dilihat bahwa media sosial dan universitas atau institusi pendidikan merupakan salah satu akses utama pemuda di Sumatera Selatan mendapatkan pengetahuan terkait diplomasi Publik.

C. Manfaat dari Diplomasi Publik

Pada sesi ini peneliti mengajukan pertanyaan terkait manfaat dari Diplomasi Publik kepada Respoden. Pertanyaan yang diajukan adalah 1) Puas dengan diplomasi publik yang telah dilakukan pemerintah Republik Indonesia 2) Merasakan manfaat dari diplomasi publik 3) Manfaat diplomasi publik dalam mendapatkan beasiswa 4) Diplomasi publik adalah praktek diplomasi yang berguna untuk pertukaran sosial dan budaya 5) Diplomasi publik mempunyai andil dalam perdamaian dunia. Hasil pengolahan data dapat di lihat pada **Grafik 8, Grafik 9, Grafik 10, Grafik 11, dan Grafik 12.**

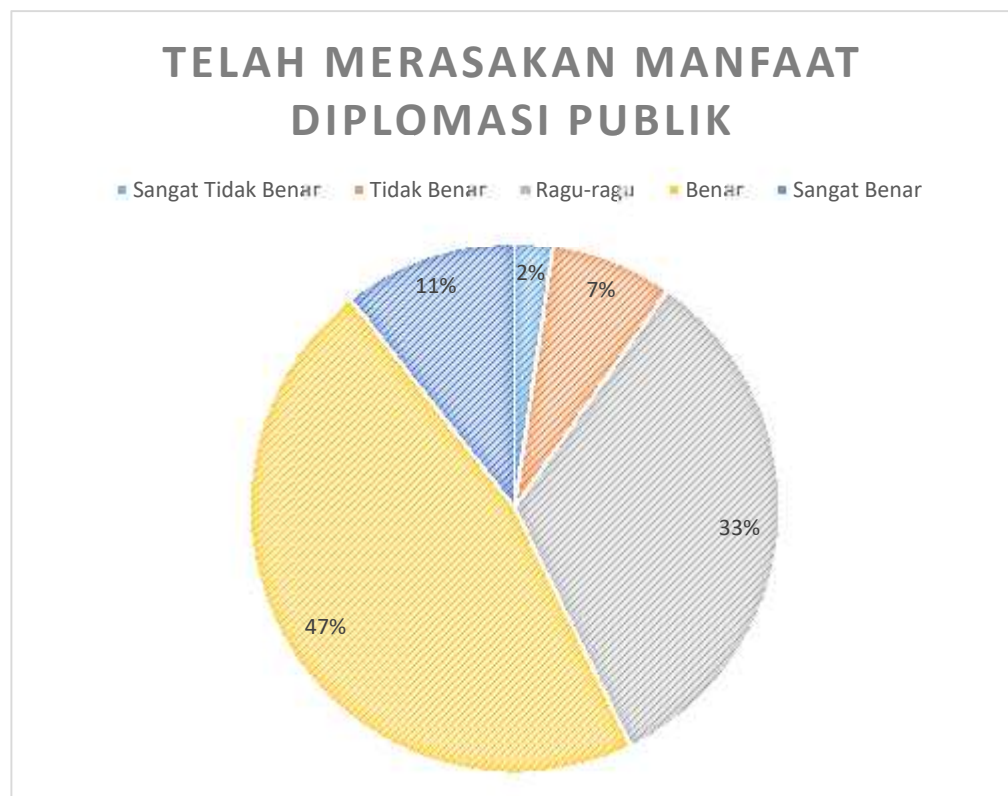
Grafik 8. Puas dengan diplomasi publik yang telah dilakukan pemerintah Republik Indonesia



Berdasarkan data yang didapat dari grafik 8, sebagian besar responden puas dengan diplomasi publik yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Berdasarkan grafik

8, 38% responden setuju jika diplomasi publik yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia telah memuaskan. Sedangkan 40% lainnya ragu-ragu jika diplomasi publik yang dilakukan Pemerintah Indonesia telah memuaskan. Dari data diatas juga dapat dilihat bahwa 16% responden merasa tidak benar jika praktik diplomasi publik yang dilakukan Pemerintah Indonesia telah memuaskan responden. Berdasarkan data diatas responden telah merasakan jika praktik diplomasi publik yang dilakukan Pemerintah Indonesia telah mereka rasakan manfaatnya, hal ini dibuktikan dengan tingkat kepuasan yang didapat dari responden penelitian. Namun sebagian besar responden justru merasa jika manfaat diplomasi publik yang dilakukan pemerintah Indonesia belum mereka rasakan.

Grafik 9. Merasakan manfaat dari diplomasi publik



Berdasarkan data dari grafik 9, sebanyak 47% responden penelitian menganggap benar jika manfaat diplomasi publik telah mereka rasakan, namun sebesar 33% responden menjawab ragu-ragu jika manfaat diplomasi publik telah mereka rasakan. Data ini menjadi menarik, karena responden yang telah merasa puas dengan manfaat dari diplomasi publik dengan responden yang merasa ragu-ragu telah merasakan manfaat diplomasi publik hampir sama besar, hanya terpaut 14%. Dapat disimpulkan sepertiga responden penelitian masih ragu-ragu jika manfaat dari diplomasi publik telah mereka rasakan. Hal ini menarik, karena merujuk pada grafik 8, terdapat hubungan jika responden masih belum dapat menentukan apakah manfaat

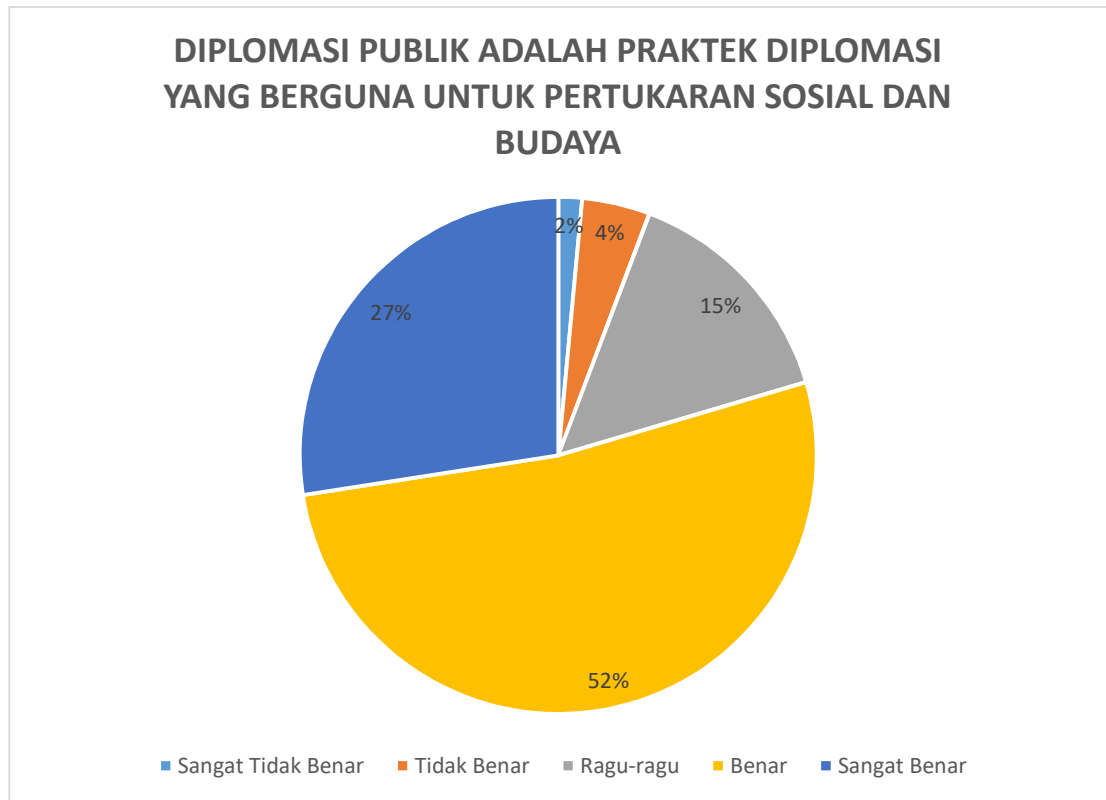
diplomasi publik telah mereka rasakan dari praktik diplomasi publik yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Hal ini menunjukkan masih banyak pemuda Sumatera Selatan yang masih ragu jika mereka telah puas dengan praktik diplomasi publik.

Grafik 10. Manfaat diplomasi publik dalam mendapatkan beasiswa



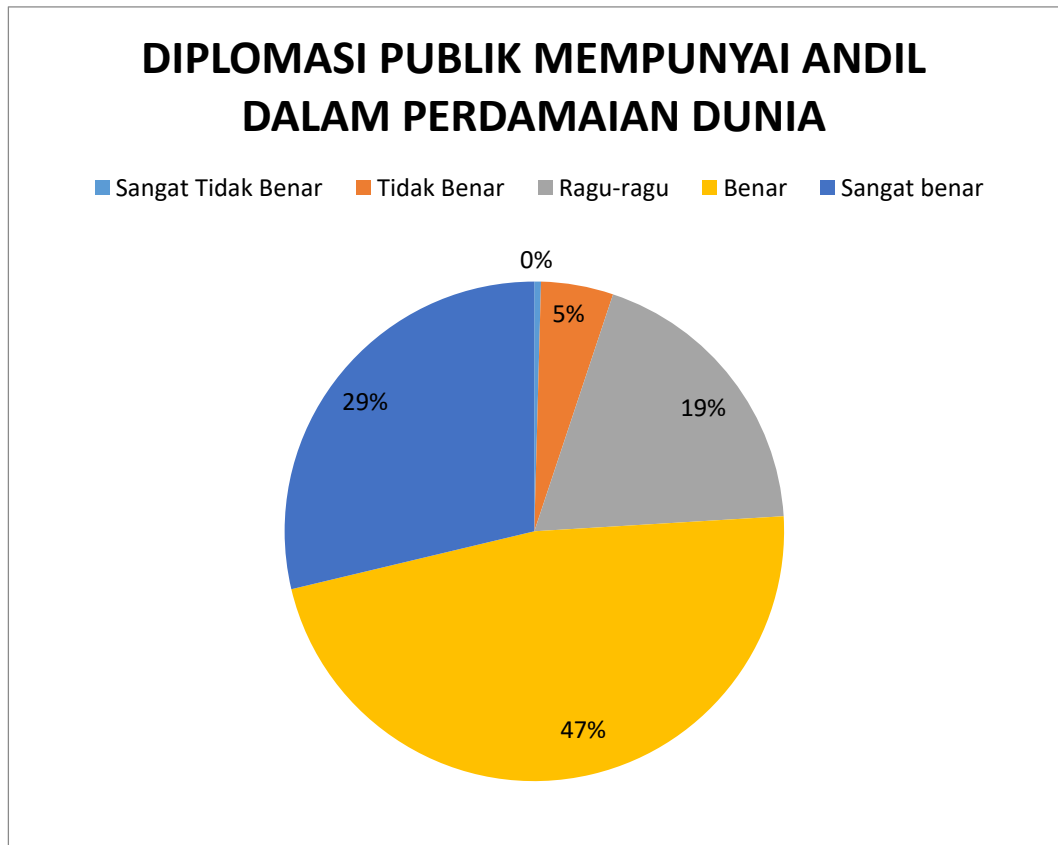
Berdasarkan data dari grafik 10, sejalan dengan grafik 8 dan 9, responden masih ragu-ragu jika manfaat diplomasi publik telah mereka rasakan, terutama manfaat diplomasi publik dalam mendapatkan beasiswa. Sekitar 38% responden menganggap benar jika manfaat diplomasi publik dalam mendapatkan beasiswa. Namun 31% responden ragu-ragu jika diplomasi publik memberikan manfaat bagi mereka dalam mendapatkan beasiswa. Bahkan 18% responden menganggap tidak benar jika diplomasi publik mereka rasakan manfaatnya dalam mendapatkan beasiswa. Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan jika responden masih belum dan ragu-ragu jika diplomasi publik memberikan manfaat dalam mendapatkan beasiswa.

Grafik 11. Diplomasi publik adalah praktek diplomasi yang berguna untuk pertukaran sosial dan budaya



Berdasarkan Grafik 11, hasil yang berbeda dari grafik 8,9, dan 10 ditemukan. Apabila dari grafik tersebut jawaban ragu-ragu cukup banyak, maka data pada grafik 11 yang menunjukkan diplomasi publik berguna untuk pertukaran sosial dan budaya menunjukkan hasil yang berbeda. Sebagian besar responden penelitian menganggap benar jika diplomasi publik berguna untuk pertukaran sosial dan budaya. Sebanyak 27% responden menganggap sangat benar jika diplomasi publik berguna untuk pertukaran sosial dan budaya, dan 52% responden juga merasa benar jika diplomasi public berguna untuk bertukar sosial dan budaya. Walaupun masih terdapat jawaban ragu-ragu sebesar 15%, namun tidak terlalu mendominasi. Dapat disimpulkan dari data dalam grafik 11, jika responden merasa jika diplomasi publik berguna dalam pertukaran sosial dan budaya. Hal ini menjadi temuan yang menarik karena sebagian besar responden melihat jika diplomasi publik mempunyai andil dalam hal sosial dan budaya. Data ini juga menunjukkan jika diplomasi publik lebih terlihat manfaatnya dimata responden dalam hal pertukaran sosial dan budaya.

Grafik 12. Diplomasi publik mempunyai andil dalam perdamaian dunia



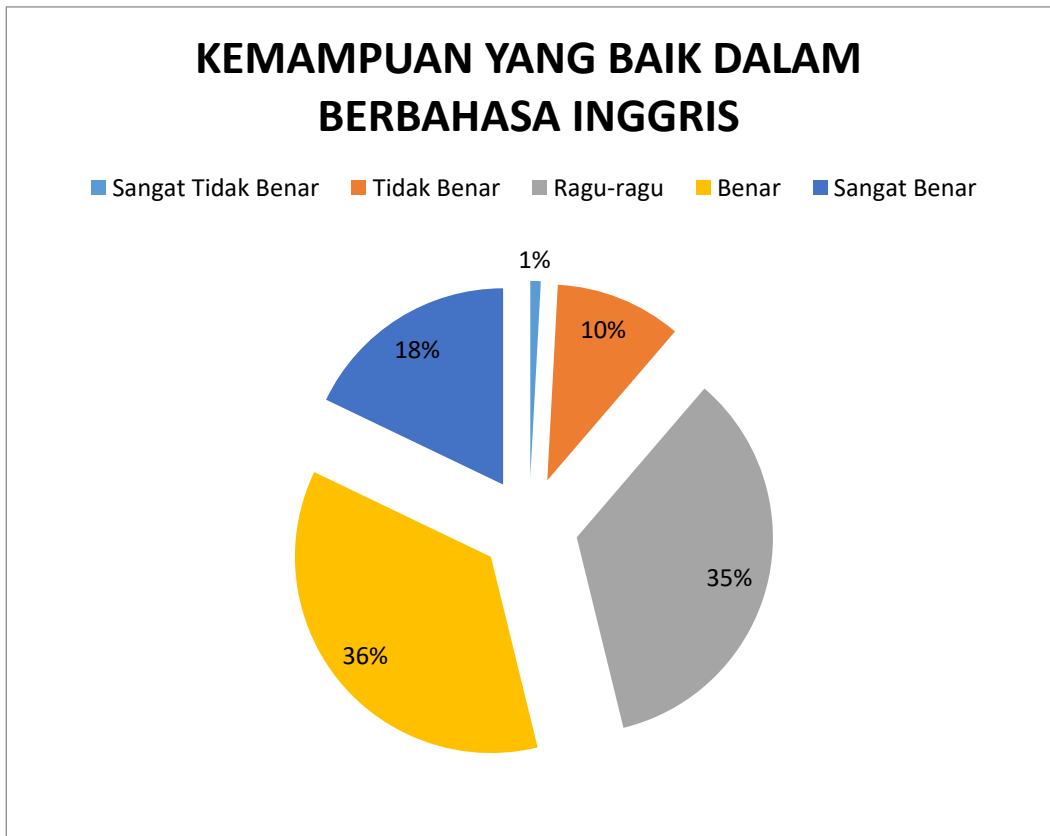
Berdasarkan data dari grafik 12, sebagian besar responden merasa jika diplomasi publik mempunyai andil dalam perdamaian dunia. Sebanyak 29% responden merasa sangat benar jika diplomasi publik mempunyai andil dalam perdamaian dunia, 47% lainnya juga merasa benar jika diplomasi publik mempunyai andil dalam perdamaian dunia. Bahkan responden yang tidak setuju jika diplomasi publik mempunyai andil dalam perdamaian dunia dibawah 1%. Dapat disimpulkan jika sebagian responden justru merasakan manfaat diplomasi publik dalam skala yang lebih luas, yakni dalam skala global. Berdasarkan data dari grafik 8, 9, dan 10 jawaban responden yang setuju jika diplomasi mempunyai manfaat tidak terlalu mendominasi. Hal ini disebabkan karena skala manfaat yang lebih kecil yakni personal (dalam hal beasiswa) dan diplomasi publik yang dilakukan Pemerintah Indonesia.

Berdasarkan data yang didapat dari 474 responden penelitian ini, Pemuda Sumatera Selatan sebagian besar belum merasakan manfaat diplomasi publik. Namun pemuda Sumatera Selatan justru lebih merasakan manfaat diplomasi publik dari sisi sosial dan budaya, terutama dalam pertukaran sosial dan budaya. Menariknya pemuda di Sumatera Selatan lebih merasakan manfaat diplomasi publik dalam skala yang lebih luas, dimana diplomasi publik dianggap mempunyai andil dalam perdamaian dunia.

D. Kesiapan Diri Terlibat Dalam Praktik Diplomasi Publik

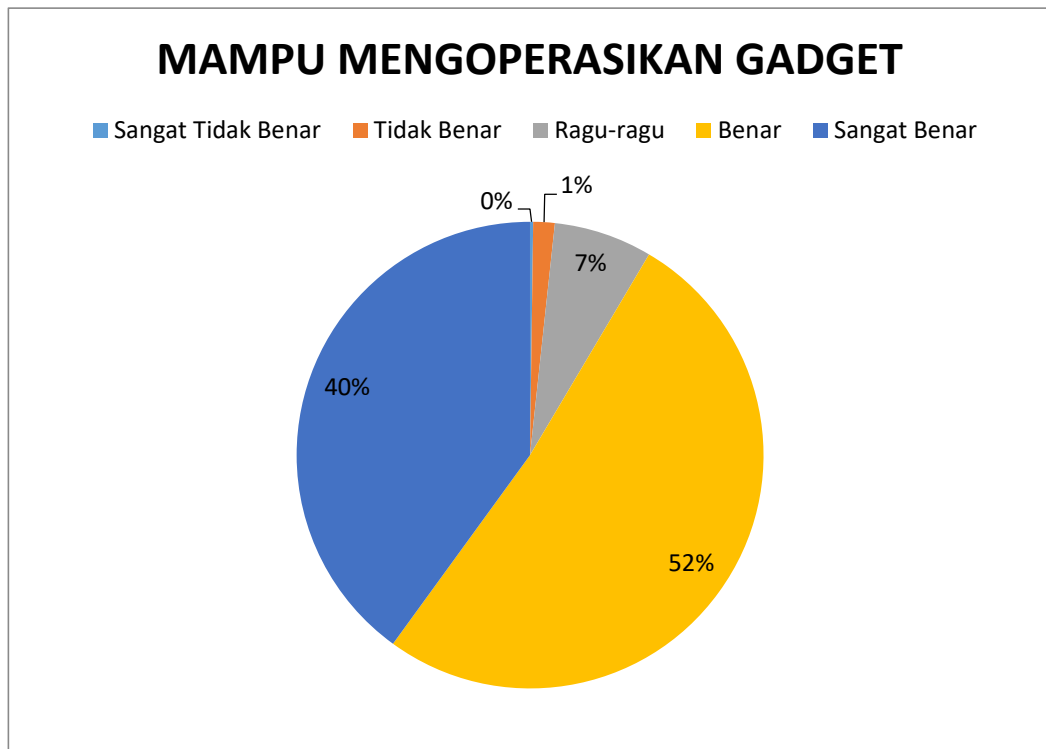
Pada bagian ini, peneliti mengajukan pertanyaan terkait kesiapan diri terlibat dalam praktik diplomasi publik kepada responden. Pertanyaan yang diajukan adalah 1) saya mempunyai kemampuan yang baik dalam berbahasa Inggris 2) saya mempunyai kemampuan dalam mengoperasikan gadget 3) saya mempunyai kemampuan dalam membuat situs daring 4) saya mempunyai ilmu pengetahuan tentang diplomasi 5) saya sudah melakukan praktik diplomasi 6) saya pernah berinteraksi dengan warga negara asing yang berada di luar negeri. Hasil pengolahan data dapat dilihat dalam **Grafik 13, Grafik 14, Grafik 15, Grafik 16, Grafik 17, Grafik 18.**

Grafik 13. Mempunyai kemampuan yang baik dalam berbahasa Inggris



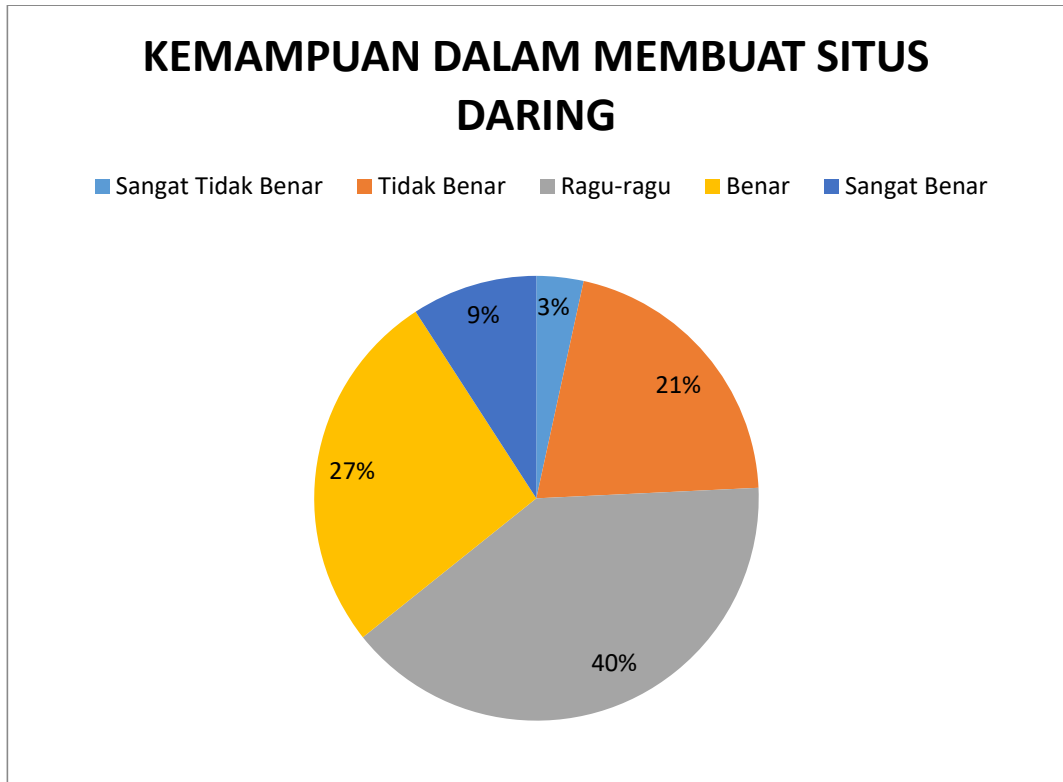
Berdasarkan data dari grafik 13, lebih dari setengah responden merasa benar jika mempunyai kemampuan yang baik dalam berbahasa Inggris. Sekitar 18% responden merasa sangat benar jika mereka mempunyai kemampuan yang baik dalam berbahasa Inggris, sedangkan 36% responden menjawab benar. Namun sekitar 35% responden menjawab ragu-ragu, dan 10% responden menjawab tidak benar jika mereka mempunyai kemampuan berbahasa Inggris yang baik. Hal ini menunjukkan jika bahasa Inggris sebagai bahasa internasional yang dapat memudahkan proses diplomasi publik kepada masyarakat global menjadi patokan tercapainya diplomasi publik, maka setengah responden penelitian menganggap dirinya telah cukup siap dengan kemampuan bahasa Inggris yang mereka miliki.

Grafik 14. saya mempunyai kemampuan dalam mengoperasikan gadget



Berdasarkan data diatas, dapat segera disimpulkan bahwa responden penelitian mempunyai kemampuan dalam mengoperasikan gadget. Lebih dari 92% responden menjawab jika mereka mampu mengoperasikan gadget. Hal ini menjadi penting karena gadget seperti telepon pintar menjadi sarana diplomasi publik yang cukup penting, terlebih lagi berdasarkan data dari grafik sebelumnya, media sosial menjadi salah satu akses utama dalam mendapatkan pengetahuan terkait diplomasi publik. Gadget dan media sosial adalah bagian yang tidak terpisahkan, kemampuan dalam mengoperasikan gadget secara tidak langsung juga memberikan andil dalam kemampuan responden untuk terlibat dalam praktik diplomasi publik.

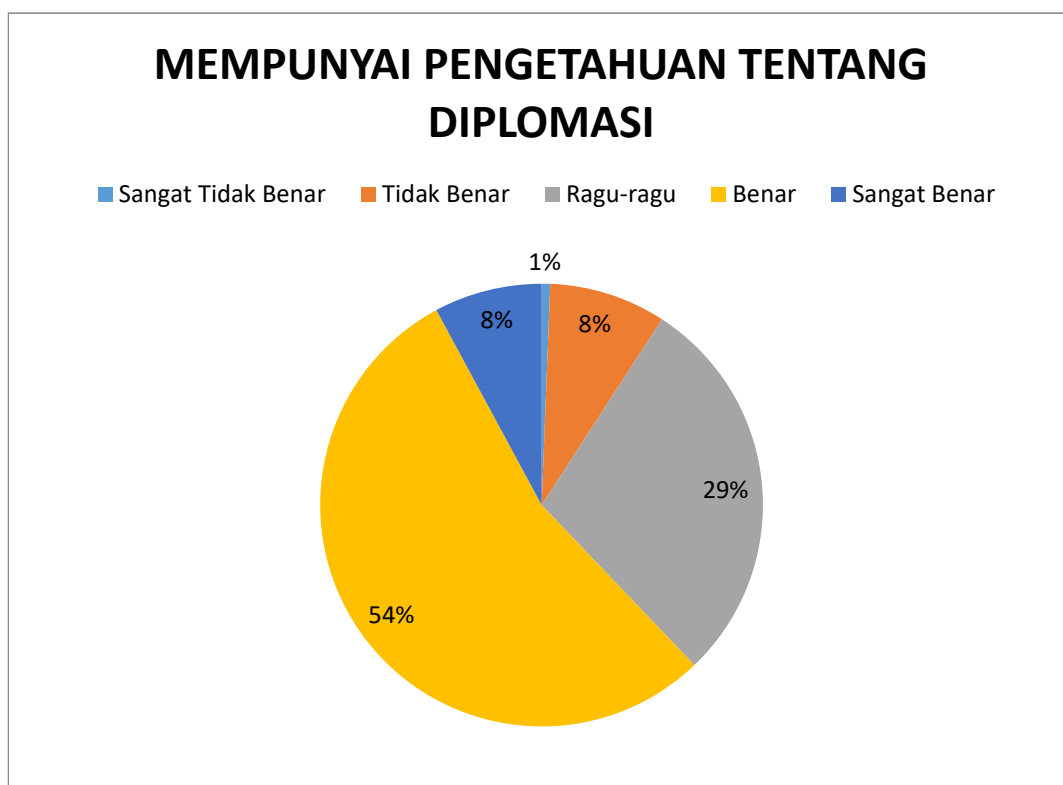
Grafik 15. saya mempunyai kemampuan dalam membuat situs daring



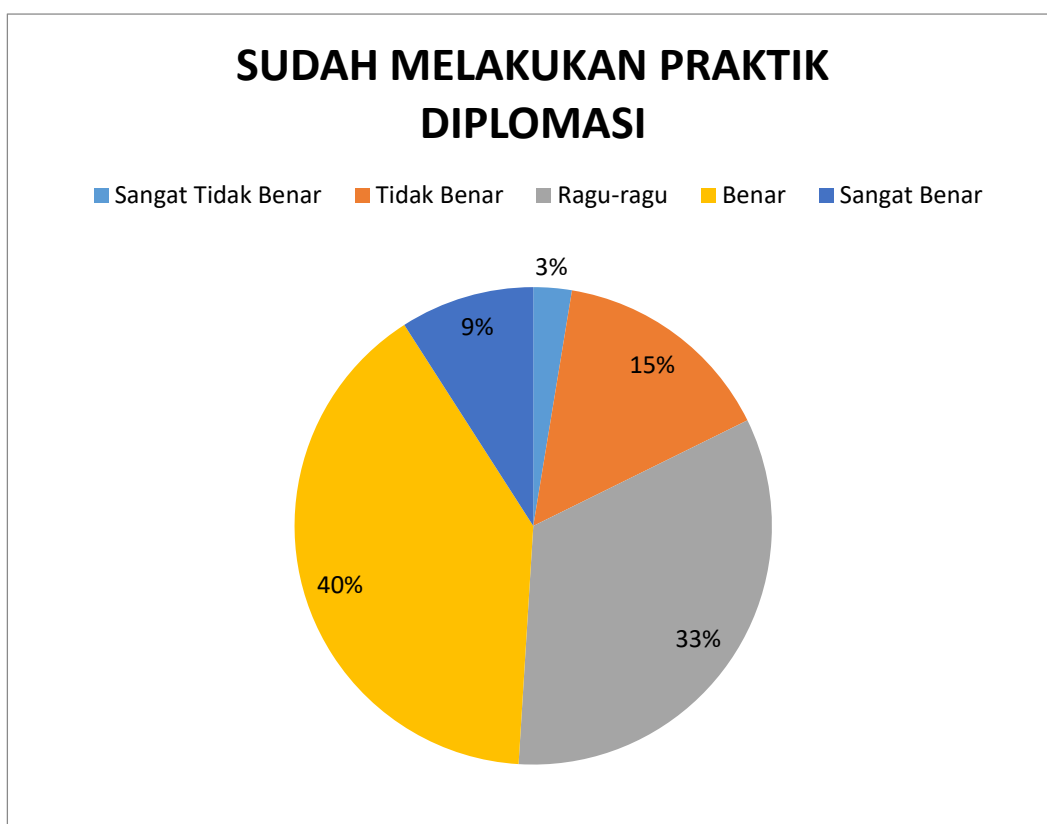
Berdasarkan data dari grafik 15, dapat dilihat jika 27% responden menjawab benar jika mereka mempunyai kemampuan dalam membuat situs daring, namun sekitar 40% menjawab ragu-ragu, dan sekitar 21% menjawab tidak benar jika mereka mempunyai kemampuan dalam membuat situs daring. Situs daring dapat digunakan sebagai sarana diplomasi publik, seperti pembuatan situs yang dapat dijadikan media diplomasi publik. Namun lebih dari setengah responden belum siap untuk melakukan praktik diplomasi publik apabila dilihat dari kemampuan mereka dalam membuat situs daring.

Berdasarkan data dari grafik 16, sebanyak 54% responden menjawab benar jika mereka telah mempunyai pengetahuan tentang diplomasi, 8% responden lainnya menjawab tidak benar jika mereka mempunyai kemampuan pengetahuan tentang diplomasi, walaupun 29% responden menjawab ragu-ragu. Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa setengah responden penelitian merasa mempunyai pengetahuan terkait diplomasi.

Grafik 16. saya mempunyai ilmu pengetahuan tentang diplomasi

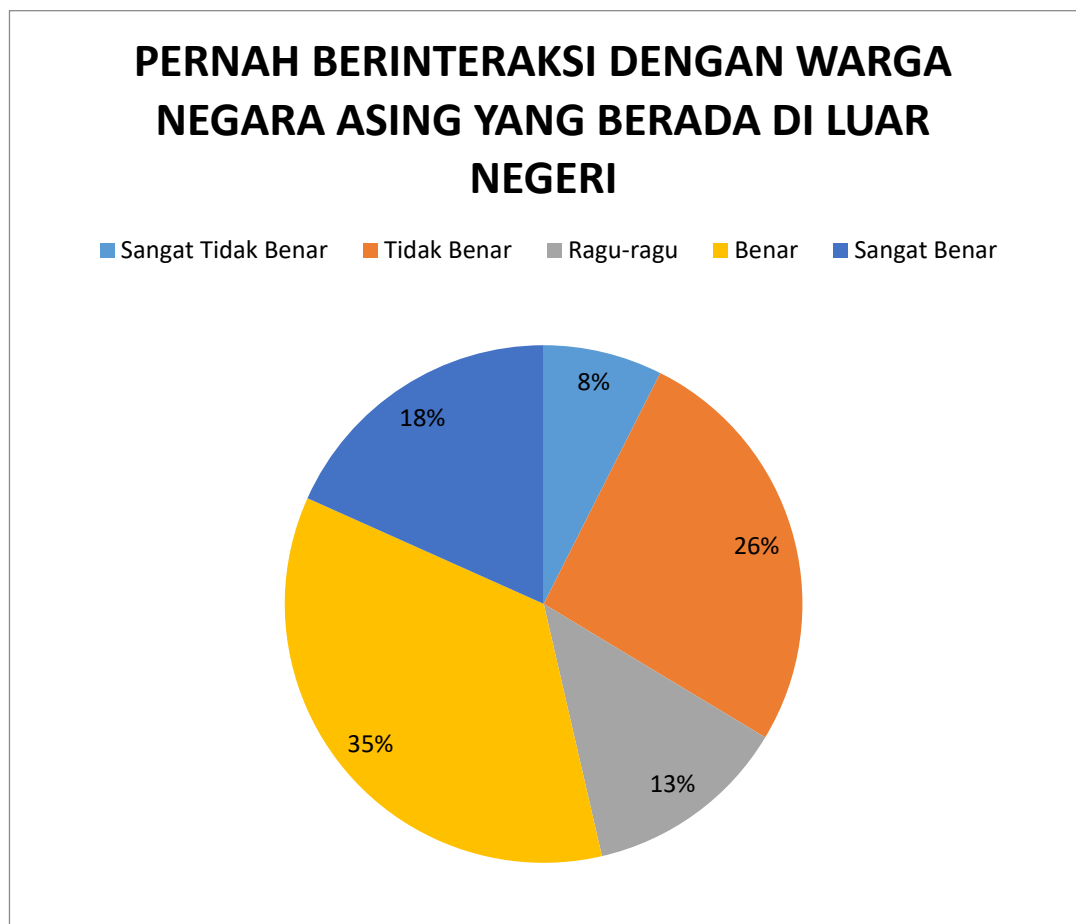


Grafik 17. saya sudah melakukan praktik diplomasi i



Berdasarkan data dari grafik 17, sekitar 40% responden menjawab benar jika mereka telah melakukan praktik diplomasi, namun sekitar 33% menjawab ragu-ragu, dan 15% lainnya menjawab tidak benar jika mereka telah melakukan praktik diplomasi. hal ini penting dalam melihat kesiapan untuk melakukan diplomasi publik, jika dilihat dari pengalaman seseorang yang telah menganggap dirinya melakukan praktik diplomasi.

Grafik 18. saya pernah berinteraksi dengan warga negara asing yang berada di luar negeri.



Berdasarkan data dari grafik 18, 18% responden menjawab sangat benar jika mereka pernah berinteraksi dengan warga negara asing, sedangkan 35% responden menjawab benar. Walaupun lebih dari 50% responden merespon benar pernah berinteraksi dengan warga negara asing, 26% responden menjawab tidak benar, diikuti dengan 8% responden yang menjawab sangat tidak benar pernah berinteraksi dengan orang asing. Hal ini menandakan setengah responden telah mempunyai pengalaman dalam berinteraksi dengan warga asing, dan menunjukkan jika mereka telah mempunyai pengalaman dalam berinteraksi dengan masyarakat yang mempunyai nilai budaya yang berbeda.

Berdasarkan data yang didapat dari 474 responden penelitian ini, Pemuda Sumatera Selatan telah mempunyai kesiapan dalam melakukan diplomasi publik apabila dilihat dari kemampuan mereka dalam mengoperasikan gadget/menggunakan media sosial, namun sebagian besar pemuda Sumatera Selatan belum mempunyai kesiapan dalam melakukan diplomasi publik apabila dilihat dari kesiapan bahasa Inggris mereka.

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang didapat dan diolah dalam penelitian ini dapat disimpulkan jika pemuda Sumatera Selatan telah mempunyai pengetahuan dasar yang cukup terkait diplomasi publik, dimana pengetahuan tersebut sebagian besar didapat dari media sosial dan universitas atau institusi pendidikan. Namun, pemuda di Sumatera Selatan masih mempunyai persepsi jika manfaat dari diplomasi publik belum terlalu mereka rasakan kecuali dalam skala global yakni diplomasi publik mempunyai andil dalam perdamaian dunia, sosial dan budaya. Pemuda Sumatera Selatan apabila dinilai kesiapannya untuk melakukan praktik diplomasi publik, maka pemuda Sumatera Selatan baru sebagian yang siap dari sisi kemampuan bahasa dan menjadikan gadget sebagai sarana dalam untuk melakukan diplomasi publik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitiannya, maka pemerintah Indonesia (kementerian luar negeri) dan perguruan tinggi perlu melakukan beberapa upaya antara lain:

1. Mensosialisasikan pencapaian diplomasi publik yang telah dicapai pemerintah Indonesia dan target yang akan dicapai kepada masyarakat.
2. Menjelaskan dan kepada masyarakat, khususnya bahwa diplomasi tidak hanya bermanfaat bagi bangsa dan negara tapi juga mempunyai dampak positif bagi mereka.
3. Mensosialisasikan diplomasi publik melalui perguruan tinggi dan media sosial, karena berdasarkan penelitian ini pemuda Sumatera Selatan menganggap perguruan tinggi dan media sosial sebagai sumber pengetahuan mereka atas diplomasi.
4. Mendorong dan memotivasi agar pemuda untuk meningkatkan kemampuannya bahasa asing dan mempunyai keahlian dalam menggunakan media sosial dan gadget dalam melakukan diplomasi publik.

Daftar Pustaka

- Effendy, O.U. (2000). *Dinamika Komunikasi*. Bandung : PT Remaha Rosdakarya
- Effendi, T. D. (2005). *Diplomasi Publik Sebagai Pendukung Hubungan Indonesia-Malaysia*.
- Hurd, I. (2015). *International law and the politics*. (O. J. Sending, V. Pouliot, & I. B. Neumann, Penyunt.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Melissen, J. (2005). *The New Public Diplomacy*. New York: Palgrave Macmillan.
- Nye, J. S. (2008). Public Diplomacy and Soft Power. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 616(1), 94–109.
<https://doi.org/10.1177/0002716207311699>
- Pouliot, V. (2011). *Multilateral Diplomacy* (Vol. Summer). *International Journal*.
- Roy Olton dan Jack C. Plano. *Internasional Relations Dictionary*. Diterjemahkan oleh Wawan Juanda (Jakarta: Putra A. Bardhin CV. Cetakan Kedua, 1999), 201.
- Sugianto, B. A., & Hanggarini, P. (2010). Persepsi Publik atas Kinerja Multi Jalur Diplomasi Departemen Luar Negeri Republik Indonesia (2002-2007). *QJurnal*.
- Walgito, Bimo.1981.*Pengantar Psikologi Umum*.Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Wang, J. (2006). Public diplomacy and global business. *Journal of Business Strategy*, 27, 41–49. <https://doi.org/10.1108/02756660610663826>

Faktor Penghambat Diplomasi CPO Indonesia di Pasar Eropa

Denada Faraswacyen L. Gaol

Universitas Budi Luhur,

denada.faraswacyen@budiluhur.ac.id

Abstrak

Indonesia merupakan negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Selama puluhan tahun Indonesia memasok CPO ke pasar internasional termasuk Uni Eropa sebagai bahan baku industri pangan, kosmetik, obat-obatan, dan lain-lain. Namun sejak 2015 ekspor CPO Indonesia mengalami hambatan nontariff yaitu isu deforestasi, kebijakan labelling "palm oil free", isu kesehatan, dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode deskriptif, dan data sekunder dari sumber ilmiah berupa jurnal, dokumen, laporan, publikasi media massa beberapa tahun terakhir, dan rilis website resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat diplomasi CPO Indonesia ke pasar Eropa dibagi dalam dua penyebab yaitu faktor internal berupa sertifikasi lahan sawit (ISPO) yang tidak diakui oleh Eropa, kegagalan pemerintah me-lobby APEC untuk memasukkan perkebunan sawit dalam kategori hutan, dan kurangnya sinergi lintas instansi untuk satu suara menghasilkan strategi nasional. Sedangkan hambatan eksternal berupa kebijakan proteksionisme terhadap infant industry, label non environmental goods yang mengandung CPO pada produk makanan yang beredar di Eropa, promosi Renewable Energy Directive (RED) kepada semua negara Uni Eropa untuk segera memberlakukan kebijakan tersebut, paradoks Kebijakan UE yang mengangkat isu lingkungan tetapi upayanya memperluas perkebunan minyak nabati local dengan menggusur lahan pertanian lainnya dan tidak mampu menyerap gas emisi karbon karena hanya jenis tanaman pendek yang penyerapan tidak lebih maksimal dari tanaman kelapa sawit, dan terakhir adalah joint campaign negara produsen CPO.

Kata kunci: CPO, diplomasi, hambatan nontarif, Uni Eropa

Abstract

Indonesia is the largest palm oil producer in the world. For decades, Indonesia has been supplying CPO to international markets including the European Union as raw material for the food, cosmetics, medicine, and other industries. However, since 2015, Indonesia's CPO exports has been experiencing nontariff barriers namely deforestation issues, labelling policy "palm oil free", health issues, and others. This study uses a qualitative approach, descriptive methods, and secondary data available on scientific sources such as journals, documents, reports, recent mass media publications, and the release on official websites. The results show that the inhibiting factors of Indonesian CPO diplomacy towards the European market could be divided into two. The internal ones includes the palm oil certification (ISPO) which are not recognized by Europe, the government's failure in lobbying APEC to set oil palm plantations in forest category, and lack of synergy in inter-agency relationship in setting a common understanding for the establishment of the national strategy. Whereas, the external barriers are shown in form of protectionism policies towards infant industries, non-environmental goods labels on food products containing CPO that are circulated in Europe, the recommendation by the Renewable Energy Directive (RED) to all EU countries to immediately implement the policy, the paradox on EU Policy. The latter raises environmental issues, but at the same time does displacement of agricultural lands in order to expand local vegetable oil plantations. This policy does actually decrease the capability to absorb the carbon emission gas, because the effort is to expand local vegetable oil plantations by displacing other agricultural land and not being able to absorb carbon emission gas because only short crop types are not maximally absorbed from oil palm plants, and the last is the joint campaign of CPO producing countries.

Keywords: CPO, diplomacy, nontariff barrier, European Union

PENGANTAR

Minyak sawit merupakan komoditi unggulan dari subsector perkebunan yang kinerja ekspornya dipengaruhi daya saing dan perubahan pangsa pasar yang terjadi di pasar domestic maupun pasar internasional. Sebagai komoditi ekspor, minyak sawit menjadikan Indonesia

sebagai pengeksport minyak sawit terbesar di dunia diikuti Malaysia, Ekuador, Kolombia, dan Thailand, dengan nilai ekspor mencapai 4,2 miliar USD pada tahun 2014.

Sejak tahun 2015 hingga kuartal pertama 2017, Indonesia menghadapi tekanan yang sangat besar, khususnya dari Uni Eropa (UE). Berbagai kebijakan dilakukan untuk menahan laju ekspor *CPO* ke UE. Eropa menilai hutan yang digunakan untuk pengembangan kelapa sawit menggunakan lahan pertanian dan hutan yang subur. Hutan-hutan tempat keanekaragaman hayati dan suaka margasatwa. Hutan dan lahan tropis tersebut dieksploitasi untuk ekspansi lahan sawit yang hanya demi kepentingan ekonomi Indonesia tanpa mempertimbangkan kelangsungan hidup habitat keanekaragaman hayati. Hal inilah yang menurut UE sebagai tindakan deforestasi yang disebabkan oleh perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan data yang diperoleh UE bahwa sebanyak 45% dari sampel perkebunan kelapa sawit di Asia Tenggara berasal dari daerah yang merupakan hutan pada tahun 1989.

Eropa sadar betul bahwa kedudukan sebagai importir terbesar ketiga setelah India dan China menunjukkan UE merasa memiliki *bargaining* yang kuat di pasar *CPO*. Di sisi lain, ada upaya UE untuk mendorong pertumbuhan minyak nabati domestik khususnya *rapeseed*, *sunflower oil*, dan *soybean oil*. Parlemen Eropa juga menghadapi tekanan yang cukup kuat dari petani *Rapeseed Oil (RSO)* dan *Sunflower Oil (SFO)* untuk mengembalikan kedudukan kedua komoditas ini menjadi komoditas yang dominan dalam sumber minyak nabati di Eropa. Hal ini kemudian menjadi *concern* petani Eropa dan menjadi input bagi Parlemen Eropa untuk melindungi kepentingan domestiknya.

Lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia dituduh menjadi penyebab utama kebakaran hutan dan lahan yang ditujukan untuk pembukaan perkebunan kelapa sawit. Pembakaran hutan dan lahan terutama di lahan gambut menyumbang emisi gas karbon yang merusak lingkungan dan keanekaragaman hayati. Emisi gas karbon dapat dikurangi 9 – 10% melalui moratorium pembukaan lahan perkebunan sawit. Dari hasil beberapa kajian sebelumnya dapat diidentifikasi isu-isu yang digunakan dalam menghambat ekspor kelapa Indonesia, antara lain adalah isu deforestasi dan lingkungan hidup, kesehatan, HAM (pekerja anak dan perempuan).

Dalam aktivitas perdagangan internasional ekspor tersebut banyak hambatan yang dialami oleh *CPO* Indonesia baik hambatan tariff dan *nontariff*. Seiring dengan peraturan *WTO* yang menganjurkan pengurangan bahkan penghapusan hambatan perdagangan internasional tentunya hal ini signal positif bagi *CPO* Indonesia untuk masuk ke pasar internasional termasuk Eropa. Namun dalam kenyataannya, pada tahun 2015 *CPO* Indonesia mengalami hambatan

serius untuk masuk pasar Eropa. Hambatan *nontariff* tersebut berupa isu deforestasi, pencantuman label minyak sawit pada produk makanan, isu kesehatan, dan lain-lain. Di tengah berbagai hambatan *nontariff* tersebut Pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan *lobby* dan negosiasi untuk mengurangi berbagai hambatan *CPO* Indonesia memasuki pasar Eropa, apalagi pasar Eropa merupakan pangsa yang cukup besar (peringkat ketiga importir *CPO* Indonesia).

METODE PENELITIAN

Dalam menjalankan penelitian ini, beberapa langkah metodologi yang dilakukan meliputi; pendekatan penelitian, metode penelitian, jenis data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Menurut Creswell, “*Qualitative research is an inquiry process of understanding based on distinct methodological traditions of inquiry that explore a social or human problem. The researcher builds a complex, holistic picture, analyzes words, report detailed views of information, and conducts the study in a natural setting*”. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang sesuai dalam penelitian ini karena peneliti sendiri berperan sebagai instrumen kunci, baik dalam pengumpulan data yaitu data kualitatif, mengolah data, menganalisis data, hingga menarik kesimpulan dari analisis data tersebut. Peneliti mengumpulkan data empiris dari berbagai sumber dalam bentuk data kualitatif yang terkait dengan perdagangan *CPO* Indonesia di Uni Eropa.

Permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti merupakan masalah yang bersifat sosial dan dinamis. Oleh karena itu, peneliti memilih menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. Metode deskriptif adalah suatu penulisan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang diteliti, menurut keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian langsung. Pengertian metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.” Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti berusaha menggambarkan *CPO* Indonesia di pasar Eropa, diplomasi pemerintah untuk melindungi komoditas *CPO* di pasar Eropa, dan faktor-faktor penghambat diplomasi *CPO* tersebut.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang bersumber dari literatur tertulis terkait *CPO* Indonesia di pasar Eropa yang diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah, publikasi media massa, situs resmi, dan lain-lain. Menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu: *reduksi data* adalah

bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil, *penyajian data* merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, dan *penarikan kesimpulan* merupakan hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

Pada tahap reduksi data, peneliti mengumpulkan data-data ilmiah terkait *CPO* Indonesia dan pasar Eropa lalu memilah dan memilih data tersebut berdasarkan kategori atau kelompok yang berkaitan langsung dengan topik penelitian yang merupakan kajian actual dari berbagai sumber. Setelah data dikumpulkan, peneliti memilah dan memilih data yang terkait kerja sama bidang pangan yang dilakukan oleh beberapa negara, data yang tidak perlu dihilangkan agar semakin terarah kepada data yang sudah dipilih dan pilah sebelumnya. Selanjutnya data tersebut disajikan secara sistematis, dan terakhir sajian data tersebut dianalisis berdasarkan teori dan konsep yang digunakan yaitu perdagangan *CPO* Indonesia di Uni Eropa.

HASIL

Diskriminasi yang dilakukan oleh UE atas produk *CPO* Indonesia membuat industry dan pemerintah bersinergi untuk melakukan diplomasi intensif terhadap pemerintahan maupun masyarakat di negara kawasan Eropa. Salah satu yang dilakukan lewat konferensi internasional bertema “*Eradicating Poverty through the Agricultural and Plantation Industry to Empower Peace and Humanity*” di Pontifical Urbana University di Roma, Italia. Konferensi ini merupakan forum yang sangat penting untuk bertukar pikiran secara intelektual dan dialog yang transparan bagi semua pemangku kepentingan. Pemerintah Indonesia sangat transparan dalam mengatasi isu lingkungan yang dikaitkan dengan pengembangan perkebunan kelapa sawit dan industry turunan *CPO*. Bahkan pemerintah juga telah menyiapkan standar minyak sawit berkelanjutan dan patuh pada skema sertifikasi di negara tujuan ekspor.

Perkebunan dan industry minyak sawit memainkan peran penting bagi pengurangan kemiskinan di Indonesia. Dari total luas lahan kelapa sawit 11,26 juta hektar, sebanyak 41 persen dikelola oleh 2,3 juta rakyat kecil. Pemerintah bersama pelaku perkebunan maupun industry minyak sawit Indonesia bahu-membahu meyakinkan masyarakat, pemerintah, dan parlemen di UE bahwa pengelolaan minyak sawit telah memenuhi standar lestari yang mereka terapkan. Sebagai produsen minyak sawit terbesar, Indonesia juga menggandeng Malaysia untuk melawan diskriminasi kebijakan minyak nabati berbasis biji-bijian di Eropa. Tuduhan perkebunan dan industry sawit melakukan banyak deforestasi tidak beralasan karena kontribusinya malah sangat kecil sekitar dua persen dibandingkan minyak nabati lain berbasis biji-bijian.

PEMBAHASAN

A. Faktor Penghambat Diplomasi CPO Indonesia Ke Uni Eropa

Keputusan Parlemen UE melarang penggunaan minyak sawit sebagai bahan baku *biofuel* berpotensi mengganggu perkembangan industri kelapa sawit Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik, nilai ekspor Indonesia Januari-Agustus 2015 mencapai USD 102.5 milyar. Sedangkan nilai impor pada periode yang sama mencapai USD 96.3 milyar sehingga secara keseluruhan neraca perdagangan surplus USD 6.2 milyar. Besarnya surplus tersebut merupakan tertinggi sejak tahun 2012. Dengan demikian industri minyak sawit masih mampu menjadi penyelamat neraca perdagangan Indonesia sekalipun ekonomi dunia lesu seperti saat ini. Ekspor minyak sawit dan turunannya tidak hanya mengecilkan defisit neraca perdagangan, justru membalikkannya menjadi surplus sebesar USD 6.2 milyar. Bukan hanya membalikkan menjadi surplus, tetapi juga membuat surplus tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Nilai ekspor minyak sawit dan turunannya tersebut belum memasukkan ekspor produk jadi berbahan minyak sawit seperti biodiesel, deterjen, sabun, makanan jadi, dan lain-lain.

Atas pencapaian ekspor CPO tersebut maka sangat diperlukan upaya setiap pihak untuk melanggengkan ekspor CPO di pasar global terutama negara *top five* tujuan ekspor salah satunya Uni Eropa. Namun dalam beberapa tahun terakhir mulai muncul hambatan ekspor CPO Indonesia terutama hambatan nontarif oleh UE. Hambatan-hambatan tersebut memerlukan tindak lanjut sesegera mungkin terutama dari pihak Pemerintah Indonesia. Namun dalam menjalankan upaya diplomasi tersebut ternyata tidak berjalan mudah. Berbagai macam hambatan diplomasi CPO tersebut dikategorikan dalam dua kelompok utama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penghambat diplomasi dari dalam negeri sendiri sedangkan faktor eksternal berasal dari luar Indonesia seperti sesama negara produsen dan negara tujuan ekspor.

1. Faktor Internal

Para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit menyebutkan beberapa hambatan dari dalam negeri untuk mengembangkan ekspor komoditas kelapa sawit nasional. Sejauh ini, para pelaku usaha mengungkapkan hambatan ekspor dari dalam negeri datang dari mahal nya biaya perbankan, sertifikasi untuk syarat ekspor, pungutan-pungutan daerah, dan kebijakan yang memberatkan pengusaha sawit.

1.1 Sertifikat *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)*

ISPO sebagai kebijakan tata kelola sawit berkelanjutan di Indonesia perlu dipromosikan dan dijadikan salah satu alat diplomasi perdagangan minyak sawit Indonesia. Satu-satunya komoditas pertanian dunia yang memiliki sistem tata kelola dan sertifikasi berkelanjutan saat ini hanya minyak sawit. Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia, sejak tahun 2011 telah memiliki kebijakan. Sistem tata kelola dan sertifikasi minyak sawit berkelanjutan yang dikenal sebagai *ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil)* sebagai suatu kebijakan pemerintah, *ISPO* bersifat wajib (*mandatory*).

Menurut data Kementerian Pertanian, sampai Agustus 2017 jumlah perkebunan sawit yang telah mengantongi sertifikasi *ISPO* telah berjumlah 306 perusahaan, satu Koperasi petani swadaya, dan satu kelompok petani plasma. Ini setara dengan 16.7 persen luas kebun Sawit nasional (11.9 juta hektar) atau 8.1 juta ton minyak sawit (dari 35 juta ton minyak Sawit nasional). Sedangkan dalam proses sertifikasi *ISPO* sekitar 350 perusahaan yang diharapkan segera memperoleh sertifikasi. Sertifikasi *ISPO* tersebut merupakan salah satu bukti dari implementasi kebijakan tata kelola perkebunan sawit berkelanjutan. Meskipun belum semua perkebunan sawit saat ini memperoleh sertifikasi *ISPO*, perusahaan-perusahaan termasuk petani yang saat ini telah memperoleh sertifikasi *ISPO* mencerminkan implementasi kebijakan tata kelola berkelanjutan perkebunan sawit di Indonesia telah berjalan pada jalur yang benar.

Indonesia merupakan negara terdepan yang memiliki kebijakan *mandatory* dan implementasi tata kelola sawit berkelanjutan. Mungkin saja ada sejumlah komoditas pertanian/perkebunan dunia yang memiliki sertifikasi keberlanjutan sejenis. Namun umumnya adalah bersifat sukarela atas tuntutan konsumen (pasar) dan bukan suatu kebijakan negara produsen komoditas yang bersangkutan. Ini berbeda dengan kebijakan *ISPO* yang secara proaktif dan inisiatifnya dari pemerintah negara produsen minyak sawit. Hal inilah keunggulan *ISPO* dan sekaligus bukti komitmen Indonesia untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Oleh karena itu, *ISPO* sebagai suatu kebijakan tata kelola sawit berkelanjutan perlu dipromosikan pemerintah ke seluruh dunia. Kebijakan *ISPO* tersebut juga perlu dijadikan sebagai bagian dari diplomasi perdagangan minyak sawit Indonesia secara internasional. Pemerintah perlu mayakinkan masyarakat dunia, bahwa minyak sawit Indonesia dihasilkan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola kebun sawit yang berkelanjutan. Tentu untuk mempromosikan *ISPO* sebagai kebijakan tata kelola sawit berkelanjutan secara internasional, memerlukan peran aktif para diplomat Indonesia diberbagai negara.

Untuk saat ini, mengingat strategisnya industri sawit dalam ekonomi Indonesia, diplomasi sawit ini perlu menjadi salah satu tugas penting para diplomat Indonesia di berbagai

negara. Membangun citra minyak sawit Indonesia sebagai minyak nabati yang dihasilkan dengan tata kelola berkelanjutan perlu dijadikan target bagi diplomat-diplomat Indonesia diberbagai negara khususnya pada negara-negara tujuan ekspor Indonesia. Indonesia, sebagai produsen terbesar minyak sawit dunia, gerakan bersama diplomasi sawit yang melibatkan para diplomat tersebut, merupakan bagian dari upaya Indonesia menjadi pemimpin pasar minyak sawit global. Indonesia harus proaktif merebut posisi itu dan jangan biarkan negara lain yang bukan produsen minyak sawit mengambil posisi tersebut.

1.2 Lobby Pemerintah RI terhadap APEC

Kegagalan Pemerintah Indonesia dalam melobi pemimpin negara *APEC* untuk memasukkan kelapa sawit sebagai produk ramah lingkungan. Dengan ditolaknya sawit sebagai produk ramah lingkungan pada KTT *APEC*, menjadi sangat nyata bahwa ini adalah kepentingan persaingan bisnis minyak nabati. dalam kesepahaman mengenai produk ramah lingkungan di forum *Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)* disetujui 54 produk harus memiliki syarat ramah lingkungan. Pemimpin *APEC* menyetujui 54 produk ramah lingkungan dan ini di luar dari kerangka perjanjian *WTO*. Jadi hal tersebut juga masih bisa bertambah dan bahkan berkurang jika Pemerintah Indonesia berhasil *me-lobby* *APEC* untuk memasukkan minyak sawit sebagai produk ramah lingkungan.

1.3 Sinergi Lintas Instansi

Indonesia belum memiliki strategi nasional untuk menghadapi serangan terhadap komoditas sawit di pasar internasional. Gerakan itu masih tersebar pada setiap lembaga atau instansi yang terkait, belum ada sinergi dengan semua pihak. Hal ini mempersulit upaya bersama dalam menyeragamkan tujuan dan target membela minyak sawit di pasar global. Semua lembaga terkait keberlangsungan industry sawit Indonesia belum memiliki satu suara untuk memikirkan langkah serius demi keberlangsungan industry sawit sebagai penghasil devisa terbesar kedua setelah industry migas. Perlu langkah serius menyatukan semua lembaga terkait baik instansi pemerintah berupa kementerian, lembaga pendidikan tinggi, lembaga penelitian, pemilik perkebunan dan industry sawit, serta pihak lainnya yg dinilai bertanggung jawab akan industry sawit nasional.

2. Faktor Eksternal

Selain factor internal yang dinilai banyak menghambat perkembangan industry sawit nasional, banyak juga hambatan yang berasal dari luar Indonesia baik itu hambatan tariff dan

nontariff. Ironisnya kedua jenis hambatan ini justru ingin dihapuskan oleh *WTO* sebagai organisasi perdagangan dunia yang menghendaki globalisasi perdagangan berjalan dengan baik. Berikut jenis-jenis hambatan diplomasi *CPO* yang berasal dari faktor eksternal Indonesia.

2.1 Kebijakan Proteksionisme

Proteksionisme adalah upaya suatu negara untuk merumuskan kebijakan ekonomi sedemikian rupa dalam rangka melindungi perekonomian domestik dari dominasi produk-produk asing sehingga memerlukan kekuatan yang berbeda dari pemerintahan yang mempengaruhi pola perdagangan dan lokasi aktivitas global. Upaya proteksi Uni Eropa untuk mendukung dan melindungi *infant industry*-nya dalam kategori minyak nabati mulai dilakukan sejak dikelurkannya *RED I* pada 2009 oleh Uni Eropa. Para petani *soybean oil*, *rapeseed oil*, dan sejenisnya merupakan industry yang mulai tumbuh di Eropa dan perlahan-lahan mulai menyumbangkan minyak nabati untuk dikonsumsi oleh warganya. Semakin bertumbuhnya industry ini menjadi perhatian Parlemen Eropa untuk memberikan dukungan kepada para petani minyak nabati mereka dengan mulai membatasi impor *CPO* yang berasal dari luar Eropa terutama dari Indonesia.

2.2 Label *Non Environmental Goods* (Produk tidak Ramah Lingkungan)

Pemerintah akan menyelesaikan hambatan ekspor produk minyak sawit mentah atau *Crude Palm Oil (CPO)* dari Indonesia di pasar Eropa dan Amerika Serikat (AS) yang dianggap tidak ramah lingkungan. Perluasan perkebunan kelapa sawit dinilai merusak lingkungan karena melakukan perambahan hutan tropis yang merusak lingkungan dan menghilangkan banyak habitat satwa langka.

2.3 Promosi *Renewable Energy Directive (RED)*

Sebelumnya pihak Uni Eropa akan menerapkan kebijakan energi baru dan terbarukan terhadap biodiesel berbasis minyak sawit akan dihentikan penggunaannya sampai tahun 2021. Namun setelah menerima diplomasi dari pihak Indonesia yang menganggap dasar penerapan kebijakan Parlemen Uni Eropa terhadap minyak sawit asal Indonesia tidak logis, apalagi alasannya lebih pada sisi kerusakan hutan dan lingkungan yang masih perlu dilakukan riset lebih dalam. Merujuk informasi dari komisi Eropa yang telah melakukan pertemuan tiga lembaga tertinggi di Uni Eropa yaitu Komisi Eropa, Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa (yang terdiri dari Negara-negara Anggota Uni Eropa) – pada tanggal 14 Juni 2018 telah mencapai kesepakatan politik yang ambisius untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan di Eropa. Termasuk dalam kerangka peraturan yang baru ini adalah target energi terbarukan yang mengikat untuk Uni Eropa yakni sekurang-kurangnya sebesar 32% pada tahun

2030 dibanding 27% selama ini, dan persentase ini mungkin ditingkatkan lagi setelah tinjauan pada tahun 2023. Hal ini akan memungkinkan Eropa untuk mempertahankan perannya sebagai pemimpin dalam upaya melawan perubahan iklim, dalam melakukan transisi ke energi ramah lingkungan dan dalam memenuhi tujuan yang ditetapkan oleh Kesepakatan Paris, yaitu membatasi pemanasan global hingga 2°C, dan mencapai keseimbangan antara sumber dan rosot (*sink*) gas rumah kaca pada paruh kedua abad ini, atas dasar pemerataan, dan dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan upaya untuk memberantas kemiskinan.

Setelah kesepakatan politik pada 14 Juni 2018 tersebut, teks Arahan (*Directive*) harus secara resmi disetujui oleh Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa. Setelah disahkan oleh kedua badan legislasi ini dalam beberapa bulan mendatang, Arahan Energi Terbarukan yang diperbarui (RED II) akan dipublikasikan dalam Jurnal Resmi Uni Eropa dan akan mulai berlaku 20 hari setelah publikasi. Negara-negara Anggota Uni Eropa harus mengambil elemen-elemen baru dari *RED II* tersebut dan menjadikannya bagian dari undang-undang nasional paling lambat 18 bulan setelah tanggal mulai berlakunya.

Kesepakatan Trilog dan Minyak Sawit berisi tentang: *Pertama*, tidak ada rujukan khusus atau eksplisit untuk minyak sawit dalam perjanjian ini. *Kedua*, hasilnya sama sekali bukan larangan ataupun pembatasan impor minyak sawit atau *biofuel* berbasis minyak sawit. Ketentuan yang relevan dalam *RED II* hanya bertujuan untuk mengatur sejauh mana *biofuel* tertentu dapat dihitung oleh Negara-negara Anggota Uni Eropa untuk mencapai target energi berkelanjutan mereka. *Ketiga*, Pasar Uni Eropa tetap terbuka untuk impor minyak sawit. Bagi Indonesia, Uni Eropa adalah pasar ekspor minyak sawit terbesar kedua, dan impor Uni Eropa telah meningkat secara signifikan pada tahun 2017, sebesar 28%.

2.4 Paradoks Kebijakan UE

Dalam *Renewable Energy Directive (RED)* dan *Fuel Qualitative Directive (FQD)* Uni Eropa (*EU*) ditetapkan bahwa pengembangan *biofuel* di *EU* tidak boleh meningkatkan emisi gas rumah kaca (nitrit, metan, karbon). Oleh karena itu, peningkatan emisi akibat perubahan penggunaan lahan pertanian pangan/hutan/*ranch* menjadi tanaman *biofuel* maupun intensifikasi tanaman *biofuel* berlebihan (*Direct Land Use Change/DLUC*) tidak diharapkan. Selain itu, emisi yang bersumber dari intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian pangan *EU* (*Indirect Land Use Change/ILUC*) juga tidak diperkenankan.

Untuk memenuhi kebutuhan minyak nabati masyarakat Uni Eropa, sebagian besar didatangkan dari impor. Dari sekitar 25 juta ton kebutuhan minyak nabati *EU* setiap tahun kemampuan produksi minyak nabati domestik Eropa hanya mampu memenuhi 13 juta ton atau

52 sekitar persen dari kebutuhannya sehingga sekitar 48 persen harus dipenuhi dari impor baik berupa minyak sawit, minyak kedelai maupun minyak nabati lainnya. *EU* yang *full employment*, tidak banyak pilihan lagi untuk meningkatkan produksi pertaniannya tanpa berakibat pada perubahan tataguna lahan *EU*.

Kegamangan *EU* dalam menerapkan kebijakan menghambat impor minyak sawit dan minyak nabati lainnya, sebetulnya untuk memacu produksi domestik minyak *rapeseed* (*RSO*) maupun minyak biji bunga matahari (*SFO*) agar mengurangi ketergantungan dari impor. Apalagi ada tekanan publik yang menghendaki pencabutan subsidi pertanian *EU*, maka produksi *RSO* dan *SFO* domestik *EU* akan terancam dari minyak nabati impor. Bagi *EU*, menghambat impor minyak sawit akan menciptakan berbagai masalah dan meningkatkan emisi di *EU*. Menghambat impor minyak sawit yang lebih murah dengan minyak *RSO* dan *SFO* produksi *EU*, akan mendorong harga minyak *RSO* dan *SFO* meningkat di dalam negeri sehingga akan memicu peningkatan produksi minyak nabati *EU* tersebut. Hal ini meningkatkan emisi gas rumah kaca *EU* (yang justru hendak dikurangi *EU*) baik bersumber dari emisi *DLUC* maupun dari emisi *ILUC*.

2.5 Kampanye Negatif (*Negative Campaign*)

Kampanye negatif terhadap kelapa sawit Indonesia masih terus digaungkan UE. Parlemen Eropa berpendapat, komoditas sawit menciptakan banyak masalah mulai dari deforestasi, korupsi, pekerja anak, sampai pelanggaran HAM. Lalu mengapa hanya sawit yang dikenakan ketentuan-ketentuan yang diterapkan Uni Eropa sedangkan minyak nabati lain tidak. Isu-isu tersebut membuat Pemerintah Jokowi selalu gencar mengingatkan agar diskriminasi terhadap kelapa sawit dihentikan karena dapat merugikan ekonomi dan negara produsen sawit itu sendiri. Menurut riset dari Universitas Stamford mengatakan bahwa rantai ekonomi kelapa sawit mampu mengurangi kemiskinan hingga 10 juta orang terbukti lebih dari 16 juta orang yang baik langsung atau tidak langsung terikat dengan sawit kehidupan ekonominya membaik.

Selama ini dengan isu-isu yang digencarkan terhadap minyak sawit semata-mata hanya persaingan yang tidak sehat antara minyak nabati tanpa melihat fakta yang ada. Seperti isu deforestasi, berdasarkan hasil dari riset IPB mengatakan bahwa deforestasi bukan disebabkan oleh sawit karena perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia bukan menempati kawasan hutan. Lalu isu LSM tentang mempekerjakan anak pada kebun sawit yang hanya melihat dari foto anak-anak yang sedang berada di kawasan sawit. Kehadiran anak-anak di suatu tempat bukan berarti anak-anak terlibat kegiatan di tempat tersebut. Demikian juga di kebun sawit,

kehadiran anak-anak di kebun sawit bukan berarti anak-anak ikut menjadi pekerja di kebun sawit.

Di perkebunan sawit apalagi perusahaan, mempekerjakan anak-anak selain melanggar hukum juga sangat tidak mungkin karena jenis pekerjaan di kebun sawit di luar kemampuan anak-anak, dan hanya dilakukan oleh orang dewasa. Untuk itu, perlu adanya peran sinergis antara berbagai pihak untuk menghentikan diskriminasi yang terus digencarkan LSM anti sawit dan terus melakukan perbaikan di seluruh aspek agar tidak ada lagi celah untuk mendiskriminasi sawit lagi karena kelapa sawit merupakan industri strategis yang dimiliki oleh Indonesia dan sebagai WNI seharusnya kita bangga dengan manfaat sawit bagi Indonesia terutama dalam pengentasan kemiskinan dan ikut serta dalam memajukan industri minyak sawit Indonesia.

Dalam kampanye hitam tersebut, isu bergulir yang dituduhkan untuk menghambat perkembangan industri sawit Indonesia antara lain menyangkut perluasan lahan yang meningkat signifikan sehingga menyebabkan deforestasi, isu kesehatan serta yang marak saat ini menyangkut isu tenaga kerja. Tuduhan tersebut tidak benar karena perkembangan luas areal perkebunan kelapa sawit di dunia dalam beberapa tahun hanya tumbuh 13,39 persen, sedangkan kedelai tumbuh 85,45 persen, bunga matahari 18,05 persen.

2.6 Upaya *Joint Campaign*

Perlu dilakukan *joint campaign* antara negara produsen sawit besar dunia seperti Indonesia dan Malaysia untuk mengubah persepsi negatif masyarakat Uni Eropa tentang minyak sawit. Berdasarkan data GAPKI, RI masih menjadi negara produsen *CPO* terbesar di dunia dengan total produksi sebesar 42,04 juta ton pada 2017. Dari total produksi tersebut, sekitar 31,05 juta ton diserap pasar ekspor. Adapun, menurut data Dewan Kelapa Sawit Malaysia, produksi *CPO* Malaysia pada 2017 sebesar 19,9 juta ton. Dengan jumlah ekspor yang sangat besar dan didominasi oleh kedua negara tersebut maka perlu kerja sama yang erat dan serius untuk mengadakan sosialisasi dan kampanye bersama terhadap penolakan minyak sawit dan turunannya serta melakukan pendekatan bersama untuk mempengaruhi suara di Parlemen Eropa, APEC, dan WTO agar secara perlahan dapat mengubah pandangannya akan minyak sawit dengan pertimbangan rasional tanpa melepaskan dukungan mereka pada industri minyak nabati dalam negerinya.

Indonesia telah mempersiapkan diri terkait rencana Uni Eropa (UE) untuk *phasing out biofuel* berbasis kelapa sawit. Upaya tersebut antara lain dibentuknya *Council for Palm Oil Producing Countries (CPOPC)* untuk menciptakan posisi bersama negara-negara penghasil

kelapa sawit, pencarian pasar baru, meningkatkan penyerapan pemakaian dalam negeri, serta mengelola pasar yang telah ada. Kelapa sawit merupakan komoditas utama ekspor Indonesia. Pasar terbesar itu adalah India, kemudian Cina, dan juga Pakistan. Saat ini 40% perkebunan kelapa sawit dikelola oleh petani kecil, sehingga kelapa sawit juga memiliki peran penting dalam upaya pemerintah untuk pencapaian pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Indonesia telah menyampaikan hal tersebut kepada UE dan mengharapkan dukungan UE dalam upaya pencapaian *SDGs* tersebut.

KESIMPULAN

Sekian puluh tahun Indonesia menikmati hasil ekspor *CPO* ke beberapa negara tujuan utama seperti Tiongkok, India, dan Eropa hingga pada pertengahan 2015 muncul hambatan-hambatan perdagangan berupa hambatan tariff dan nontarif dari Eropa, Amerika Serikat, Cina, dan India. Hambatan perdagangan yang dilancarkan oleh Eropa berupa isu perusakan lingkungan hidup dan *negative campaign* terhadap minyak sawit dan turunannya. Hingga akhirnya UE mengeluarkan *RED I* pada 2009 dan *RED II* pada 2014 sebagai upaya lanjutan untuk mengurangi impor *CPO* dan pucaknya menghentikan impor *CPO* tersebut pada 2030. Sebagai negara-negara importir terbesar *CPO* Indonesia tentunya Indonesia tidak tinggal diam menyerah pasrah pada keputusan Uni Eropa tersebut. Pemerintah dan pihak-pihak terkait mengupayakan langkah diplomasi kepada Uni Eropa untuk melonggarkan keputusan tersebut dan langkah terbaru adalah kunjungan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan melalui Vatikan untuk mempengaruhi Parlemen Uni Eropa sehingga resolusi sawit tersebut diundur menjadi 2030 yang sebelumnya akan diberlakukan pada 2021.

Upaya diplomasi *CPO* yang dilakukan Indonesia ke pasar Eropa menemui banyak hambatan. Jenis hambatan ini dikelompokkan menjadi hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal berupa kebijakan pemerintah yang mempersulit industry sawit, kewajiban sertifikasi lahan sawit (*ISPO*) yang tidak diakui oleh Eropa, kegagalan pemerintah *me-lobby APEC* untuk memasukkan perkebunan sawit dalam kategori hutan yang malah kalah dari tanaman bambu, dan kurangnya sinergi lintas instansi untuk satu suara melalui strategi nasional. Sedangkan hambatan eksternal berupa penolakan-penolakan dari Uni Eropa seperti kebijakan proteksionisme terhadap *infant industry* minyak nabati mereka yang umumnya diusahakan oleh petani-petani local setempat, label *non environmental goods* (produk tidak ramah lingkungan) yang mengandung *CPO* di setiap produk makanan yang beredar di Eropa, promosi *Renewable Energy Directive (RED)* kepada semua negara Uni Eropa untuk segera memberlakukan kebijakan tersebut, paradoks Kebijakan UE yang mengangkat isu lingkungan

tetapi upayanya memperluas perkebunan minyak nabati local tetaplah dengan menggusur lahan pertanian lainnya dan perkebunan minyak nabati tersebut tidak mampu menyerap gas emisi karbon karena hanya berupa jenis tanaman pendek yang penyerapan tidak lebih maksimal dari tanaman kelapa sawit, dan upaya *Joint Campaign* antara negara produsen minyak sawit dunia yaitu Indonesia dan Malaysia yang baru saja memulai merancang upaya sebagai tindak lanjut merespon penolakan Eropa tersebut dinilai sangat terlambat karena tidak sedari awal sejak isu penolakan tersebut muncul tidak segera direspon sebagai tindakan preventif. Keterlambatan respon tersebut seakan menunjukkan kurang seriusnya pemerintah melindungi produk unggulan yang dijadikan sumber pemasukan devisa negara dari ekspor CPO importir utama.

DAFTAR PUSTAKA

Alatas, Andi. Trend Produksi dan Ekspor Minyak Sawit (CPO) Indonesia. *Jurnal Agraris Vol.1 No.2 Juli 2015*.

Austin KG, Kasibhatia PS, Urban DL, Stolle F, Vincent J. 2015. Reconciling Oil Palm Expansion and Climate Change Mitigation in Kalimantan, Indonesia. *PLoS ONE 10(5): e0127963. Doi: 10.1371/journal. Pone 0127963*.

Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.

<http://hi.fisipol.ugm.ac.id/katalogtesis/penolakan-crude-palm-oil-cpo-indonesia-oleh-uni-eropa/>

<http://www.sawit.or.id/ispo-sebagai-alat-diplomasi-sawit-indonesia/>

<http://www.sawit.or.id/menghambat-cpo-ke-eu-pacu-kenaikan-emisi-pertanian-eu/>

<https://kolom.tempo.co/read/1105674/diplomasi-sawit-indonesia/full&view=ok>

<https://www.antaraneews.com/berita/708081/indonesia-kedepankan-diplomasi-perdagangan-untuk-sektor-sawit>

<https://www.antaraneews.com/berita/710047/ini-cara-diplomasi-indonesia-perjuangkan-minyak-sawit-di-eropa>

<https://www.infosawit.com/news/8102/hasil-trilog--uni-eropa-tanggukhan-kebijakan-minyak-sawit-indonesia>

<https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Diplomasi-Kelapa-Sawit-Indonesia-Perlu-Narasi-Tunggal.aspx>

<https://www.merdeka.com/uang/menko-luhut-bangga-diplomasi-kelapa-sawit-ri-di-uni-eropa-mulai-membuahkan-hasil.html>

Khairunisa, Gisa Rachma dan Tanti Novianti. Daya Saing Minyak Sawit dan Dampak *Renewable Energy Directive (RED)* Uni Eropa terhadap Ekspor Indonesia di Pasar Uni Eropa. *Jurnal Agribisnis Indonesia Vol. 5 No. 2 Desember 2017*.

Nazir. 2003. *Metode Penelitian, Cetakan Kelima*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Vijai V, Pimm SL, Jenkins CN, Smith SJ. 2016. The Impacts of Oil Palm on Recent Deforestation and Biodiversity Loss. *PLoS ONE 11 (7): e0159668*. Doi: [10.1371/journal.pone.0159668](https://doi.org/10.1371/journal.pone.0159668)

Diplomasi Pariwisata Bencana di Indonesia

Harits Dwi W, M.A

Universitas Respati Yogyakarta

h_rits@yahoo.com

Abstract

Indonesia merupakan salah negara yang memiliki tingkat kerawanan dalam bidang bencana alam. Dimana, Indonesia terlatak di kawasan ring of fire di kawasan pasifik serta terdapat pertemuan lempeng Eurasia, IndoAustralia dan Pasifik. Di lain pihak, Indonesia mempunyai potensi wisata yang sangat signifikan dalam menghasilkan devisa negara. Kondisi ini dapat dijadikan sebagai instrument diplomasi Indonesia dalam hal pariwisata bencana sehingga peluang ini mampu mendatangkan pemasukan bagi negara. Sehingga industri pariwisata di Indonesia akan berkembang seiring adanya ancaman bencana. Dilain pihak, situasi ini akan dimungkinkan untuk belajar tentang kebencanaan di Indonesia. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah konsep Two Level Game Theory.

Kata Kunci : *Diplomasi, Industri Pariwisata, Bencana*

Pengantar

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki posisi strategis. Negara ini berada diantara benua Asia dan Australia, disisi lain diapit oleh dua samudera Hindia dan Pasifik. Kondisi tersebut masih ditambah dengan posisi Indonesia yang dikelilingi oleh lempeng Australia, Eurasia dan Pasifik. Oleh karena itu, Indonesia menjadi salah satu negara yang sering mengalami bencana alam, hal ini dikarenakan oleh posisi geografis dan geologis Indonesia. Akan tetapi kedua hal tersebut dapat memberi potensi dan peluang di masa yang akan datang. Melihat skenario kedepannya Indonesia dapat memainkan potensi serta peluang dalam melihat aspek geografis dan geologisnya. Meskipun kedua hal tersebut memberikan sebuah peluang dan ancaman.

Secara geografis Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Secara mayoritas pulau-pulau tersebut memiliki potensi dalam bidang pariwisata. Oleh karena itu, negara ini memiliki daya saing dari aspek pariwisata dengan negara lain. Dilihat dari keindahan alam, kehidupan sosial masyarakat dan budaya lokal yang sangat beragam. Hal ini menunjukkan *soft power* yang dimiliki oleh Indonesia dalam persaingan di era global. Perkembangan dan persaingan diplomasi di dunia saat ini tidak hanya dilihat dari sisi kekuatan yang bersifat materiil saja (*hard diplomacy*). Situasi ini dapat dimanfaatkan bagi negara-negara sedang berkembang khususnya Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir pemerintah mengembangkan wilayah-wilayah ekonomi khusus yang memiliki potensi pariwisata.

Di lain pihak, apabila dilihat dari sisi posisi geologis Indonesia termasuk sebuah negara dengan kategori rawan bencana. Fakta di lapangan menunjukkan dari Pulau Sumatra sampai

dengan Papua memiliki potensi bencana alam maupun sosial. Kondisi ini dapat dilihat dari keberadaan gunung yang masih aktif yang tersebar di seluruh kawasan Indonesia. Dimana Indonesia juga dikenal sebagai cincin api (*ring of fire*). *Ring of fire* diartikan sebagai daerah yang sering terjadi gempa bumi dan bencana letusan gunung berapi yang terletak sepanjang cekungan yang ada di Samudera Pasifik. Daerah tersebut digambarkan seperti tapal kuda dan memiliki panjang 40.000 km. Disisi selatan dan timur Indonesia dikenal sebagai sabuk vulkanik (*Volcanic Arc*) yang terbentang dari Pulau Sumatra, Jawa, Nusa Tenggara dan Sulawesi. Oleh karena itu, Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap bencana alam. Dengan 13 jenis bencana yang ada, seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, baik bencana geologi, hidrometeorologi, biologi, sosial, atau *man made disaster*, perlu dipandang sebagai modal kapital atau produk komoditas yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif (June & Ludiro, 2013). Bencana dapat diartikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (UU 24/2007).

Kedua fenomena diatas memberi keterkaitan terhadap permasalahan yang dikaji dalam hubungan internasional khususnya dalam hal diplomasi. Perkembangan isu-isu tersebut menandakan terciptanya dinamika diplomasi kontemporer yang berhubungan dengan negara, kelompok, organisasi, komunitas ataupun individu. Pembahasan mengenai industri pariwisata yang disandingkan isu-isu kebencanaan memberikan sebuah alternatif dalam menjalin hubungan antar negara. Hal ini dapat dijalankan oleh seluruh komponen lapisan masyarakat yang ada. Diplomasi kontemporer saat ini tidak terlepas oleh adanya dampak globalisasi terhadap negara-negara di dunia. Munculnya kekuatan global yang berwujud teknologi, telekomunikasi dan perdagangan membuka ruang dan peran bagi *stakeholder* dalam hubungan internasional saat ini. Hal tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap kemajuan suatu negara dalam bidang tertentu. Hubungan antar negara yang bersifat *soft diplomacy* dalam upayanya akan menciptakan sebuah suasana damai. Dalam menciptakan situasi ini, Indonesia memiliki kemampuan untuk menciptakan sebuah hubungan yang harmonis dengan beberapa negara. Melalui dua isu tersebut akan membuka sebuah hubungan yang saling pengertian terhadap situasi dan kondisi suatu negara. Adanya saling pengertian satu negara dengan negara lain dengan pendekatan isu pariwisata dan bencana akan mampu menciptakan hubungan yang

saling menguntungkan. Sehingga industri pariwisata bencana dapat dijadikan sebagai edukasi atau bagi kaum *epistemic* yang ada di dunia dimana salah satu tujuannya adalah Indonesia.

Metode

Untuk melihat permasalahan diatas penulis menggunakan pendekatan dalam hubungan internasional dari Robert Putnam yakni “*two level games theory*”. Dengan menggunakan pendekatan ini penulis memiliki pertimbangan diplomasi pariwisata bencana pada era globalisasi memiliki peranan dalam studi hubungan internasional yang agendanya tidak dapat dipisahkan oleh kepentingan nasional. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat dianalisa dari kesuksesan pemerintah di dalam agendanya di dalam negeri yang dibantu oleh berbagai pemangku kepentingan. Disisi lain, mampu membuktikan kepada dunia internasional citra yang positif. Kepentingan nasional dapat diimplementasikan melalui aktifitas pariwisata.

Dimana industri pariwisata dalam beberapa dekade terakhir mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Dalam hal ini mampu memberikan dampak positif dalam memberikan sebuah citra kepada masyarakat internasional. Dalam pendekatan ini ada dua agenda yang harus dijalankan oleh aktor yang terlibat dalam diplomasi pariwisata bencana. Dalam tataran tingkat domestik yang menjadi aktornya dapat dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Di tingkat domestik pemerintah memiliki peran dalam bidang sosial, ekonomi, politik dan keamanan.

“ At the national level, domestic groups pursue their interests by pressuring the government to adopt favorable policies. At the international level, national governments seek to maximize their own ability to satisfy domestic pressure, while minimizing the adverse consequences of foreign development.” (Putnam,1988)

Disisi lain pemerintah dapat berperan untuk menyediakan infrastruktur yang mendukung dalam diplomasi khususnya pariwisata bencana. pariwisata ini merupakan salah satu pariwisata dalam bidang kategori minat khusus. Pariwisata minat khusus ini dapat menjadi salah satu potensi dalam meningkatkan kunjungan wisatawan lokal maupun asing. Pariwisata minat khusus tersebut memberikan daya tarik tersendiri, karena potensi alam Indonesia menyimpan kekayaan serta keindahan yang tidak kalah dengan negara di luar negeri. Beberapa tempat wisata alam di Indonesia asal muasalnya ada yang terjadi karena reaksi fenomena alam. Hal ini menjadi hal yang menarik untuk dipelajari oleh lembaga-lembaga, organisasi atau komunitas untuk dilakukan sebuah riset terkait dengan munculnya sebuah lokasi wisata.

Pemerintah dapat berperan dalam mempersiapkan apa saja yang diperlukan oleh masyarakat lokal dalam mengantisipasi bencana yang akan terjadi. Tindakan ini menjadi hal yang sangat penting dalam penguatan kapasitas masyarakat. Pemerintah dapat mengambil peran dalam mitigasi di wilayah-wilayah lokasi wisata. Dalam pelaksanaannya pemerintah dapat bekerjasama dengan pihak swasta yang tergabung dalam *Humanitarian Forum Indonesia* (HFI) atau lembaga-lembaga yang memiliki kapasitas dalam kebencanaan.

Peranan yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat internasional dapat dilakukan dengan cara mengikuti pertemuan-pertemuan dalam tingkat internasional. Adanya agenda di luar negeri pemerintah perlu untuk mengkampanyekan tentang Indonesia di mancanegara terkait dengan posisi geografis maupun kondisi geologis. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta dapat melalui forum regional seperti ASEAN, forum-forum kawasan ataupun dalam tingkat global yaitu tergabung dengan organisasi di bawah PBB (Persarikatan Bangsa-Bangsa) yang memiliki konsentrasi dalam penanggulangan bencana. di dalam level international (AADMER (ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response), AHA (Asean Humanitarian Association), CERF (Central Emergency Response Fund) dalam United Nations. Beberapa jaringan ini dapat digunakan untuk penguatan kapasitas suatu negara dalam pengurangan resiko bencana dan itu akan berdampak kepada pada saat terjadi bencana.

beberapa tahun terakhir fenomena bencana alam di dunia sangat masif, hal ini dibutuhkan pengelolaan secara profesional dan kerjasama di tingkat internasional. Oleh karena itu, dengan menggunakan teori ini menjelaskan bahwa dalam industri pariwisata dapat memberikan hasil yang optimal dalam penerimaan wisatawan asing. Kedua aspek ini akan memberikan keseimbangan dalam menerapkan suatu kebijakan yang berkaitan dengan industri pariwisata.

Industri Pariwisata Indonesia

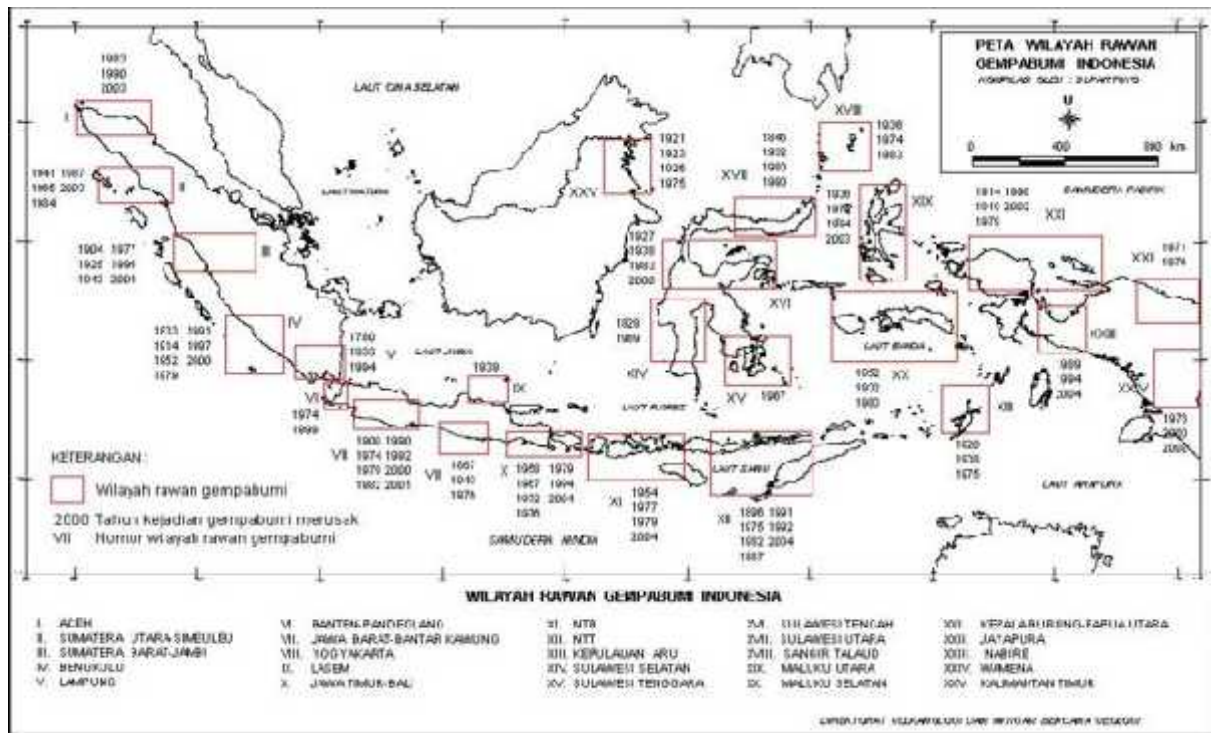
Pariwisata pada beberapa tahun terakhir menjadi sebuah fenomena dalam kajian hubungan internasional. Hal ini bisa dilihat dari data perkembangan mobilisasi masyarakat internasional dalam melakukan perjalanan wisata. Perkembangan dari industri ini di masa yang akan datang sangat potensial. Dalam menjalankan kompetisi ini setiap negara wajib memiliki keunikan serta keunggulan. Kedua hal tersebut meningkatkan daya tarik negara tertentu kepada masyarakat internasional khususnya dalam bidang pariwisata. Industri pariwisata di Indonesia dapat dijadikan sebuah alternatif dalam diplomasi di masa yang akan datang. Pada saat ini

pariwisata menduduki peringkat kedua dalam perolehan devisa. Dalam sejarah pembangunan di banyak negara, sektor kepariwisataan telah terbukti berperan penting dalam menyumbang perkembangan perekonomiannya, khususnya dalam dua dekade terakhir, yang ditunjukkan dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan ekonomi bangsa-bangsa yang menjadikan kepariwisataan sebagai industri hilirnya untuk mengungkit pertumbuhan dari kegiatan-kegiatan usaha dan penyerapan tenaga kerja dari sektor-sektor usaha/kegiatan yang ada didepan dan dibelakangnya (Bambang, 2013).

Meskipun demikian, masih banyak hal yang perlu dieksplorse serta diekspose kekayaan pariwisata Indonesia. Diantaranya berkaitan dengan wisata yang berkaitan dengan alam dari Sabang sampai Merauke. Pada kenyataan di lapangan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara lain. Kondisi ini dapat ditarik kepada pariwisata minat khusus yang berada seluruh wilayah Indonesia. Wisata minat khusus ini merupakan pariwisata yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dan memiliki kekhususan dalam kegiatan kepariwisataannya. Bagi pasar wisatawan, setiap daerah tujuan wisata memiliki sejumlah keunggulan atau daya saing yang dijadikan sebagai basis penentuan untuk memilih atau menjadikannya sebagai target destinasi (Janianton, 2013).

Di kawasan Asia Tenggara dilihat dari parameter daya saing Indonesia memiliki keunggulan dari sisi *natural resources*. Hal ini dapat dikatakan sektor pariwisata yang berkaitan dengan keindahan alam serta fenomena alam, negara ini memiliki peluang untuk meningkatkan target wisatawan mancanegara. Salah satunya dapat diambil dari *geotourism* yang dimiliki oleh Indonesia. *Geotourism* ini dapat dijadikan sebagai wisata minat khusus bagi wisatawan mancanegara yang memiliki ketertarikan terhadap alam. Perjalanan seseorang dari suatu tempat ke tempat yang lain didorong oleh berbagai motivasi (Gelgel, 2006). Beberapa tahun terakhir isu-isu yang berkaitan bencana alam serta kerusakan alam mendapat perhatian besar oleh masyarakat internasional pada umumnya dan khususnya Indonesia. Dalam segmentasi geografi, pasar dibagi berdasarkan tempat atau wilayah yang dapat berupa suatu negara atau kawasan, dimana kebutuhan dan keinginannya bervariasi berdasarkan tempat tinggal mereka (Oka,2001). Kita bisa melihat potensi sebaran bencana yang ada di Indonesia yang ada di bawah ini.

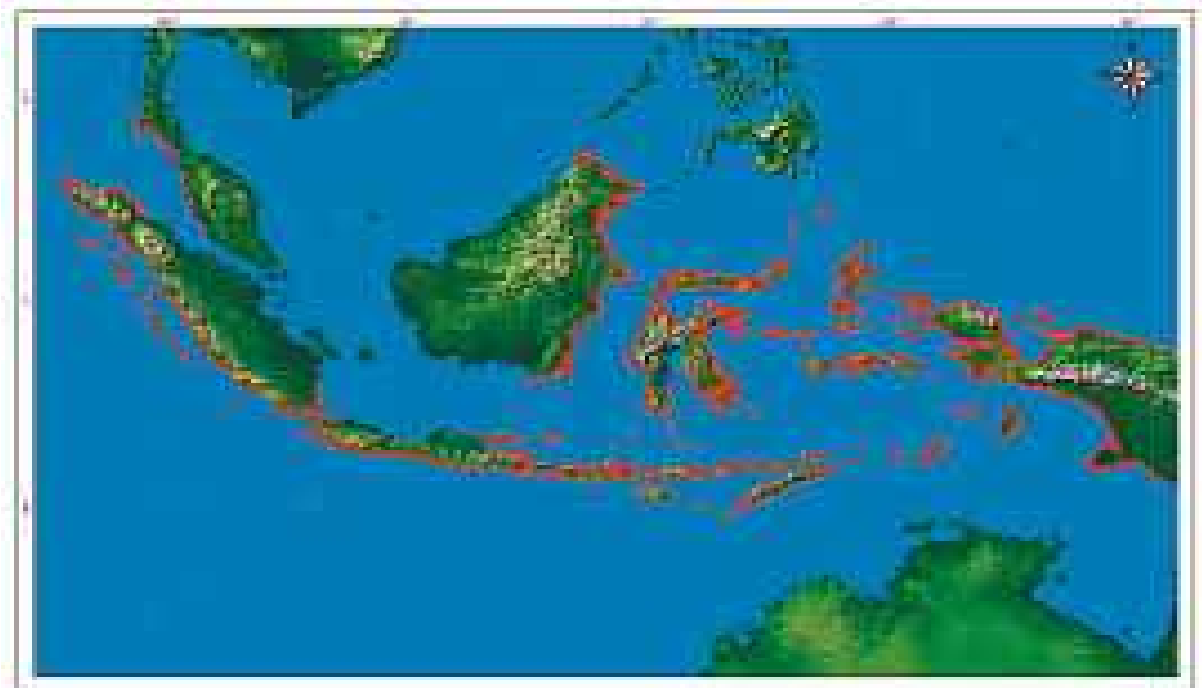
Gambar 1 WILAYAH RAWAN GEMPA BUMI INDONESIA



Source : Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi

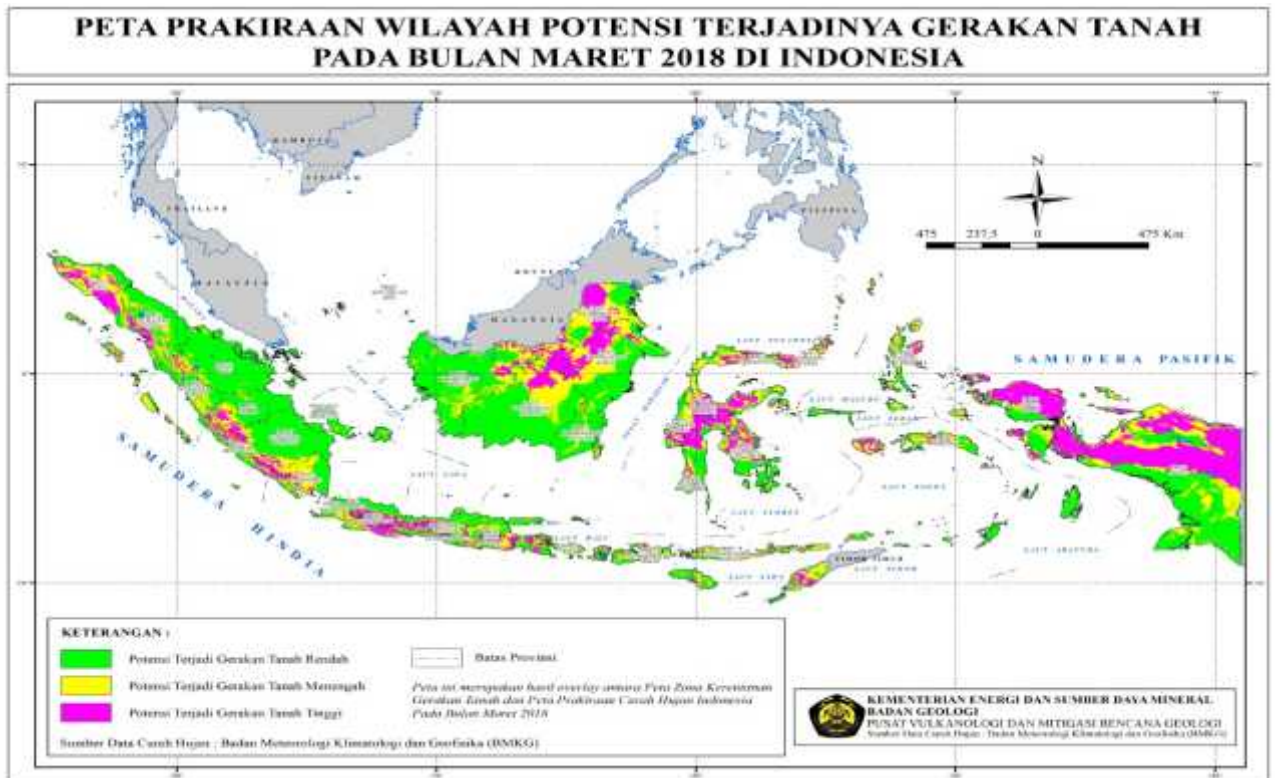
Peta sebaran diatas menunjukkan kerawanan tingkat kegempaan di Indonesia sangat tinggi. Kondisi ini perlu disadari dalam ranah industri pariwisata sangat penting khususnya negara Indonesia. Selain Indonesia sebagai negara pusat pariwisata dunia, banyak hal yang perlu disiapkan salah satu dalam hal mitigasi bencana di wilayah-wilayah wisata. kondisi tersebut akan memberikan sebuah kesadaran dalam pengelolaannya. Selain ancaman dari sisi gempa bumi, Indonesia menghadapi tantangan yang berupa tsunami, pergerakan tanah dan Gunung Berapi.

Gambar 2 Peta Sebaran Tsunami di Indonesia



Source : Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika

Gambar 3 Wilayah Potensi Pergerakan Tanah



Source : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Gambar 4 Major Volcanos of Indonesia



Source : USGS

Dari beberapa sumber diatas menunjukkan bahwa Indonesia ditempatkan sebagai daerah yang perlu mewaspadaai akan datangnya gangguan alam. Apalagi dari sisi pariwisata yang ada di Indonesia yang dipromosikan selain dari sisi budaya yaitu keindahan alamnya. Akan tetapi perlu adanya edukasi bagi wisatawan asing khususnya yang datang ke Indonesia. Edukasi ini penting untuk mengetahui sejarah dan munculnya fenomena alam yang ada di Indonesia dimana dijadikan sebagai objek destinasi tujuan wisatawan (ODTW). Beberapa pendekatan perlu dilakukan di setiap lokasi wisata di Indonesia yang memiliki potensi terjadinya ancaman kepada wisatawan. Oleh karena itu, dapat dilakukan dengan cara mitigasi bencana oleh berbagai pemangku kepentingan yaitu pemerintah, swasta/LSM atau masyarakat. Kondisi ini tidak hanya terpasang tanda-tanda peringatan di setiap titik, akan tetapi diberikan pelatihan singkat untuk mengantisipasi adanya ancaman.

Ancaman dan Peluang *Geotourism* di Indonesia

Dalam era globalisasi saat ini banyak hal yang bisa Indonesia peroleh untuk bersaing dengan negara lain, salah satunya dari sisi industri pariwisata. Industri ini memberikan keuntungan yang berlipat ganda, karena memberikan *multiflier effect* seluruh elemen yang

berkepentingan. Oleh karena itu, situasi industri pariwisata dapat dijadikan model baru yang disesuaikan dengan situasi dan karakter Indonesia. Secara fakta di lapangan potensi alam yang dimiliki tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Potensi alam yang muncul karena fenomena alam salah satunya Danau Toba, Tebing Kraton, Tangkuban Prahur atau Sesar Lembang. Wilayah tersebut hanya contoh dari Sabang sampai Merauke.

Disisi lain, beberapa fenomena alam yang terjadi di Indonesia di masa yang akan datang akan menarik perhatian para wisatawan ataupun wisatawan yang kategori minat khusus. Sehingga Indonesia akan menjadi sebuah laboratorium atau MICE yang terkhusus untuk mempelajari terkait peristiwa alam ataupun non alam. Konsep ini memang telah dicetuskan oleh satu makalah yang ditulis oleh Jane James 1993 di sebuah konferensi bertema “Memasyarakatkan Ilmu Kebumihan” di Southampton, Inggris, misalnya, masih menggunakan istilah pariwisata geologis (*geological tourism*) alih-alih *geotourism* (fitb.itb.ac.id, 2009).

Konsep yang dicetuskan oleh Jane James dapat dijadikan instrument untuk mengenalkan dan dikembangkan. Hal ini akan menjadi menarik apabila dibingkai dalam sebuah informasi praktis bagi para *traveller* atau turis mancanegara yang memiliki minat khusus. Secara umum basis pengembangan wisata minat khusus meliputi :

1. Aspek-aspek alam seperti flora, fauna, fisik geologi, vulkanologi, hidrologi, hutan alam, atau taman nasional maupun laut
2. Objek dandaya tarik wisata budaya yang meliputi budaya peningkatan sejarah (*built heritage*) dan budaya kehidupan masyarakat (*living culture*) (Fandeli & Mukhlison, 2000)

Kemampuan industri pariwisata global memberikan peluang bagi semua negara untuk berkompetisi untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Pada saat ini perekonomian global dilihat dari sektor pariwisata mengalami peningkatan setiap tahunnya. Apabila setiap negara di dunia tidak memiliki keunikan atau spesialisasi dalam hal industri pariwisata, maka akan sulit untuk memenangkan kompetisi ini. Industri ini menjadi salah satu pemasukan devisa negara yang sangat signifikan di masa yang akan datang.

Disisi lain, sebagian besar wisatawan asing melihat Indonesia merupakan salah satu destinasi yang menarik untuk dikunjungi. Kondisi tersebut dapat dibuktikan dengan diapresiasinya pada saat terselenggaranya acara The 7th International Conference on UNESCO Global Geopark 2016 di Torbay, Inggris salah satunya Wilayah Pulau Lombok. Ini menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki *branding* di luar negeri yang cukup potensial. Agenda atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah di luar negeri sangat membantu dalam hal promosi. Adanya promosi melalui eksebis atau pameran internasional di Berlin yang

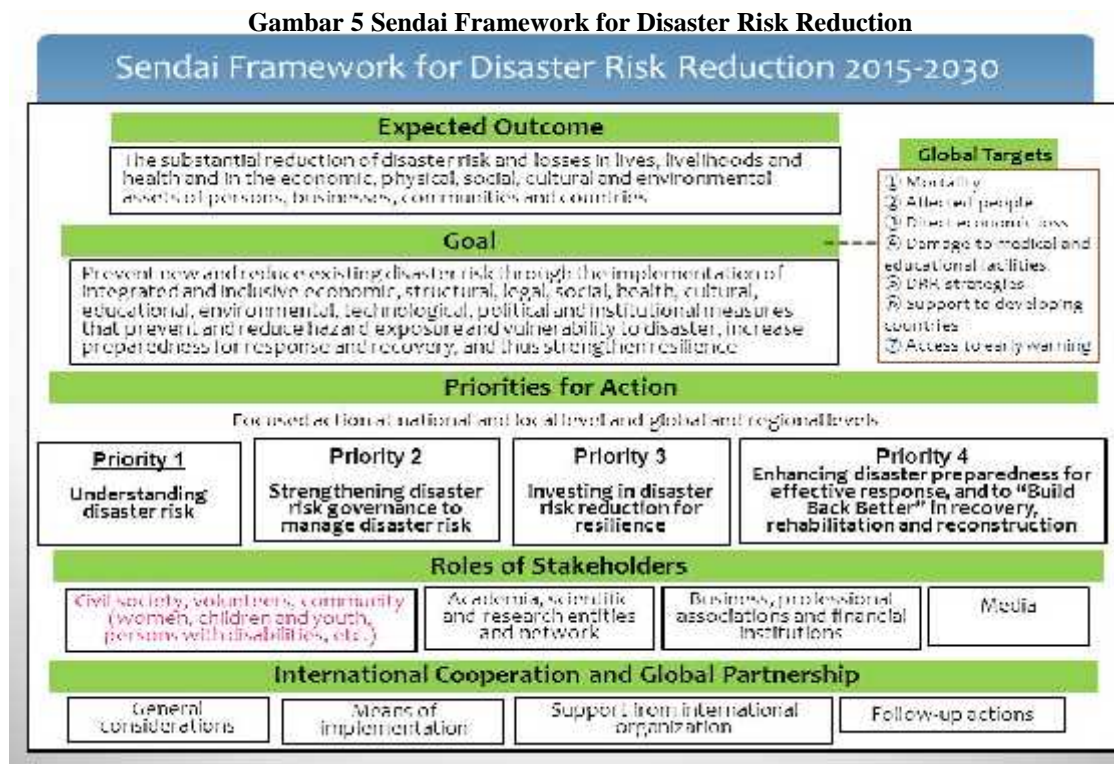
merupakan sebuah pameran pariwisata terbesar di dunia yaitu *Internationale Tourismus Borse* (ITB). Selain daripada itu, Indonesia masih memiliki beberapa destinasi wisata yang berupa kaldera. Artinya, kita perlu mengekspose dan mengexplore kembali terkait kekayaan alam Indonesia. Kondisi tersebut dapat dijadikan sebagai edukasi untuk seluruh masyarakat Indonesia bahkan mancanegara. Disamping memiliki keindahan alam yang sangat mempesona dan menarik setiap wisatawan yang berkunjung ke daerah tersebut, tetapi perlu adanya sebuah penjelasan yang filosofis dan akhirnya berdampak kepada psikologis wisatawan domestik maupun mancanegara. Situasi tersebut memberikan kekuatan bagi setiap daerah apabila berhasil meningkatkan jumlah wisatawannya khususnya mancanegara. Dengan banyaknya wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung ke berbagai lokasi wisata yang dikategorikan *geotourism*. Hal ini perlu adanya infrastruktur yang lengkap terkait dengan jalur evakuasi dan kesiapan petugas apabila terjadi situasi darurat atau terjadi sebuah bencana alam.

Melihat potensi di Indonesia yang masih rawan akan adanya bencana perlu adanya kewaspadaan yang sangat tinggi apalagi di beberapa daerah tempat wisata yang memiliki riwayat kebencanaan. Oleh karena itu, para wisatawan asing maupun lokal perlu adanya edukasi sebelum memasuki area wisata alam atau *geotourism* oleh petugas. Edukasi ini penting dilakukan untuk mencegah serta mengurangi adanya korban. Pendekatan metode simulasi yang dilakukan di lokasi wisata alam memberikan dampak yang positif bagi Indonesia pada umumnya dan daerah wisata pada khususnya. Kegiatan tersebut akan memberikan efek yang besar terhadap negara di tingkat regional maupun global.

Di lain pihak, negara sangat mendukung adanya pertemuan internasional yang diselenggarakan di Jepang pada tahun 2015 dengan pokok pembahasan terkait dengan Kerangka kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015 – 2030. Hal ini dibuktikan dan dituliskan di dalam kerangka kerja Sendai, Mengatasi faktor mendasar risiko bencana dengan cara menginformasikan kepada publik dan swasta tentang risiko bencana merupakan investasi yang secara pembiayaan cukup efektif dibandingkan jika mengandalkan respon pasca bencana dan pemulihan berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan (Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015 – 2030, Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2015). Konsep dari Sendai ini sangat relevan dan signifikan untuk diterapkan di Indonesia khususnya daerah wisata yang rawan bencana. Sebagai contoh kejadian yang baru saja terjadi di lokasi wisata di Gunung Rinjani tepatnya di daerah Sembalun Lombok Timur telah terjadi gempa dengan 6.4 skala richter dan disusul gempa kedua yang sangat besara pada

tanggal 5 Agustus 2018 yang menjadi pusat di Lombok Utara. Ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk seluruh pemangku kebijakan untuk mengantisipasi di masa yang akan datang.

Peristiwa yang ada di Sembalun Lombok Timur dan Lombok Utara memiliki pengaruh secara global bagi Indonesia. Secara ekonomi Lombok merupakan salah satu objek destinasi tujuan wisata yang memiliki potensi menghasilkan devisa negara untuk Indonesia. Di lain pihak daerah ini memiliki potensi bencana yang cukup besar, sehingga perlu adanya sinergi oleh seluruh pihak yang berada di tingkat lokal maupun nasional untuk melakukan *recovery*. Dalam tataran kerjasama dapat dilihat pada gambar dibawah terkit alur atau peta dalam hal pengurangan bencana.



Source

[:https://www.youtube.com/watch?v=zI5yTANyw7E&index=11&list=RDQYpgCJR0OmM](https://www.youtube.com/watch?v=zI5yTANyw7E&index=11&list=RDQYpgCJR0OmM)

Bencana yang terjadi di Lombok dapat menjadi pembelajaran yang penting beberapa daerah di Indonesia yang memiliki potensi alam untuk diperhatika secara serius. Sehingga di masa yang akan datang Indonesia dapat menjadi salah negara tujuan wisata bencana bagi wisatawan mancanegara. Kondisi tersebut dapat dijadikan salah satu instrument diplomasi bagi

Indonesia dengan mengenalkan potensi dalam kerangka ilmu pengetahuan dan disandingkan dengan industri pariwisata. Dimana, dapat diimplementasikan sebagai bagian dari industri pariwisata minat khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Yoeti, Oka.2001.Perencanaan Strategis Pemasaran Daerah Tujuan Wisata.Jakarta.PT Pradnya Paramita
- Bambang, Sunaryo.2013.kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasi di Indonesia. Yogyakarta. Gava Media
- Damanik,Janianton.2013.Pariwisata Indonesia Antara Peluang dan Tantangan.Yogyakarta.Pustaka Pelajar
- Fandeli & Mukhlison.2000.Pengusahaan Ekowisata.Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Gelgel, I Putu.2006. Industri Pariwisata Indonesia Dalam Globalisasi Perdagangan Jasa (GATS-WTO).Bandung.Refika Aditama
- June & Ludiro.2013. Isu Bencana Dalam Hubungan Internasional.Yogyakarta.Pustaka Pelajar
- Putnam,David.1988.Diplomacy and Domestic : The Logic Of Two-Level Games.Massachusets.MIT Press

Laporan :

- Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
USGS
Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015 – 2030, Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2015
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Website :

- <https://fitb.itb.ac.id/2009/10/15/menggali-akar-geowisata-oleh-dr-ir-budi-brahmantyo/>
<https://www.youtube.com/watch?v=zI5yTANyw7E&index=11&list=RDQYpgCJR00>

mM

Border Diplomacy in Handling Disputes on Tanjung Datu (Case Between Indonesia and Malaysia)

Elyta, Ully Nuzulian

Universitas Tanjungpura
elyta79@yahoo.com; ully.nuzulian@untan.ac.id

Abstract.

Indonesia and Malaysia have a direct border with the maritime area. Conflicts arose maritime territorial disputes in the region of Tanjung Datu by reckless actions of Malaysia in building a lighthouse pole in Tanjung Datu. Kalimantan Barat got a firm response from the Indonesian state and successfully stopped. The incident shows the border areas need to be protected with diplomacy. Diplomacy of negotiation consists of three aspects, such as the law, social, economic and institutionalization. A descriptive research, the data collection techniques that are used is more on technique literature review, interviews and documentation. Results of the research revealed that to prevent problems at the border through the legal aspect is to manage the border region based on the law No. 43 of 2008, the social economy includes the formation of a working group Socio-Economic Malaysia-Indonesia, an organization whose conduct cooperation in the field of socio-economic based on political interests, while the institutional form is all of institutions and local governments that help-smooth cooperation between countries and prevent their mutual distrust between the state and the fear of another countries. Beside that, soft power concept is most important to give the power of diplomacy.

Keywords: *disputes, border diplomacy, negotiation*

Introduction

Indonesia and Malaysia have experienced conflict in the border areas related to the development of beheading pole lighthouse in Tanjung Datu waters. Until now, the dispute between Indonesia and Malaysia associated Tanjung Datu 'still do not have a way out and it is still in the status quo due to lack of agreement between the two countries (Detik.com. 2014).

Indonesia firmly rejects the actions taken by Malaysians who are seen to dominate the area while clearly still in dispute. Both countries are claiming for Tanjung Datu in order to become part of the country. Reckless actions of Malaysia in building a lighthouse pole in Tanjung Datu gets a firm response from the Indonesian state through the Headquarters of the Indonesian military of the Republic of Indonesia. The response was marked by the delivery of warships and reconnaissance aircraft in the waters of Tanjung Datu.

The dispute over Tanjung Datu waters between Indonesia and Malaysia still has not found a way out. Each country will insist on control of the region. Indonesia adhering to the statement of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), which says that Indonesia is an archipelagic country, while Malaysia is a country of continental land. While there are ways of determining the limits of its own country, but if it is still in a state of negotiations, a decision can not be taken by way of one-sided. Disputes between Malaysia and

Indonesia states that allegedly occurred the desire of both countries to take control of the territorial waters of Tanjung Datu. The goal is to expand the territory of the country so that the case eventually became the talk in the media and included in international forum.

Alternative resolution of border disputes between Indonesia and Malaysia in Tanjung Datu is to activate diplomacy border that consists of three aspects: legal, social, economic and Institutionalization (Rachmawati, 2010: 91).Based on these conditions, this study used diplomacy as a strategy to resolve the border disputes between Indonesia and Malaysia.

Research Methods

This research is a descriptive study aimed to gain insight in a systematic, factual and accurate about the facts, properties and phenomena which are interrelated. Seeing that, the data collection techniques that we use in this study are a review of the literature, the way research on issues that were analyzed based on the theory of knowledge through literary media, internet media, and so tested as events that exist; b) interviews into collection techniques to carry out a preliminary study to determine the issues to be examined, and interviews are executed when researcher wants to know things from informants in detail; c) documentation technique, a technique to obtain documents relating to Tanjung Datu dispute for example a bilateral agreement between Indonesia and Malaysia.

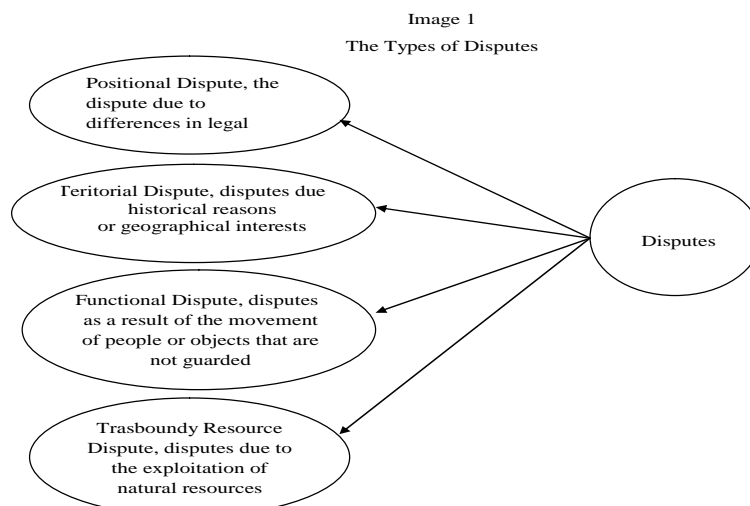
The informants were four community leaders Paloh Indonesia, four community leaders Sarawak Malaysia, two employees of the Regional Planning Board of West Kalimantan Province.

Diplomacy In Negotiation On Border Legal Aspects

Briefly, diplomacy can be define as a subtle and polite way used by each country in order to achieve the objectives and interests in relation with other countries. Diplomatic methods can be used to achieve something (offensive) and to avoid or prevent (defensive). Diplomacy is a theme in international relation that has already gained great attention in international law, and it can be directed to diplomacy and communication techniques. The key element of diplomacy is focused on negotiation. Negotiations were carried out trying to advance National Interests. Diplomatic measures are taken to protect and promote national interests as far as possible be implemented by peaceful means (Jayanto, 2014: 628).

Disputes occur because of differences in the understanding of a situation or object of rejection on the other. The subject of the dispute can vary, ranging from a dispute regarding the policy of a country to the border problem.

According to Prescott (in Rachmawati, 2010: 91) the dispute is divided into four kinds, the explanation is in the image 1 below.



Source: Prescott (in Rachmawati, 2010: 91).

The study found that the disputed area of Tanjung Datu is located on the type of positional dispute because basically since colonization by the Dutch and British who controlled Kalimantan/Borneo, the area limit has been set, as the principle of *Uti Possidetis Juris*, meaning that delimitation of the territory of a country by decree region at the time of colonization. This principle is then used by Indonesia as a benchmark zoning. Most countries in Southeast Asia are also using this principle. Based on the *Uti Possidetis Juris* principle, Indonesian territory covered the whole area of Dutch East Indies colony.

On the other hand, Malaysia and Indonesia made MoU as a benchmark of the measurement area. MoU implemented in 1975 at Kinabalu (Malaysia) and 1978 in Semarang (Indonesia) but the results were temporary and these results did not correspond with the map Netherlands Van Doorn 1906, maps Sambas Borneo and Map of Federated Malay State Survey conducted in 1935 Ships and Mapping van Doorn to the detriment of the Indonesian state area of 1,449 Ha. Under the agreement, the boundary between Indonesia and Malaysia in the Temajuk Village curved like a horseshoe, while in line with MoU agreement, its form was a straight line.

Based on that, to reinforce Indonesian negotiations on border diplomacy is through law. In Indonesian law, there is a legal product to protect and to take care the territory. Legal product

is not only in the form of legislation, but also in the form of legal products that build sovereignty, so that the region is in regulation or the protection of its territory.

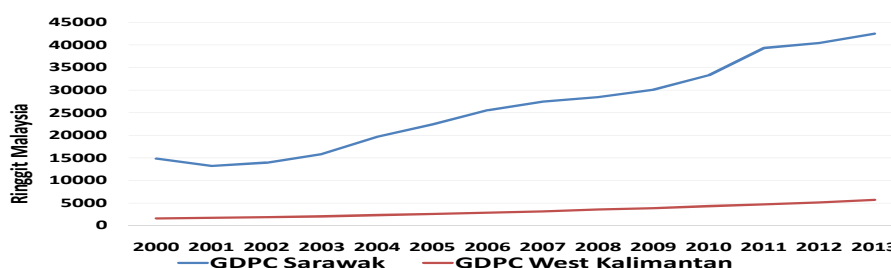
Ideal basic law is the law that consists of a written law in the form of the Constitution and unwritten laws that constitute the basic rules which raised and maintained in the practice of state administration (Budiardjo, 2008: 169). The study found the efforts undertaken by Indonesian law is Law No. 24 of 1992 on Spatial Planning of the legislation subsequently published the Decree No. 44 of 1994 on the Border Area Development Control Board. Law No. 32 of 2004 Article 1 point 19 of the special area is part of the territory in the province and/or district/city that is set by the Government for the administration functions that are specific to the national interest. In Article 1, item 6 of Law No. 43 of 2008 on the Border region is part of the territory of the State which is located on the inner side along the boundary with Indonesia and other countries.

Up to now the formation of law 43 of 2008 still showed minimal results in dealing with the border area. This is evidenced by the gap between The Malaysian and the Indonesian state, especially in border areas. Indonesian border residents lags behind both the population, per capita income and social welfare if compare with the conditions of Malaysian border are.

Border Diplomacy In Negotiations On Socio-Economic Aspects

Tanjung Datu is part of the Niger Gosong sea and land area Camar Bulan. The region is located in the District Paloh, Sambas, West Kalimantan Province. Border economic level in particular Paloh, and in general, border of West Kalimantan and Sarawak depicted in the chart below

Image 2 Growth Domestic Product Comparison (GDPC) of The Border Areas In West Kalimantan With Sarawak In 2000-2013



Source: Sarawak Planning Unit & Central Bureau of Statistics (in Suratman, 2016)

The graph above was a picture of per capita income comparison in West Kalimantan border area with Sarawak years 2000-2013. Where the line located below shows per capita income of West Kalimantan border, and line located above shows per capita income of Sarawak border. It is seen that the level of per capita income in the border of the two countries too far. The lowest per capita income of West Kalimantan Border occurred in 2000, while the lowest per capita income of Sarawak border was in 2001. The per capita income in the border of Sarawak continued to rise sharply to over 40,000 Malaysian ringgit, while the per capita income of West Kalimantan border had a slight increase in the amount of about 5,000 Malaysian ringgit in 2013.

Community life in the border region of Sarawak can be said more prosper that it can be seen from the availability of enough electricity network. Development undertaken by Malaysian government covers the road network that is very smooth, and also features transportation infrastructure that facilitates the movement of community activities that would support the economy and standard of living as well as military movement along the border of Malaysia. The construction of such facilities and infrastructure reaches Asian standards and free education provided to all students, including students from Indonesia. Many Indonesian children who live on the border of Indonesia also seen studying in Malaysia.

In the economic sector, the Malaysian government promote rural banks and daily necessities that are complete and inexpensive. Sarawak merchants ready to accommodate and cultivate the crops of West Kalimantan from "Illegal" to "Not Illegal". Development that happen in Sarawak border is the result of planning that is designed by the Malaysian government to give full authority to Sarawak to establish a decentralized system in Sarawak through Sarawak border region. In contrast to the Indonesian government that seemed indifferent to the condition of Indonesian people who live on the border. It is not only experiencing a gap in the economic sector but also in the social gap.

To overcome socio-economic problems in the border communities of Paloh, Indonesia and Malaysia strengthen the border diplomacy by improving coordination and regional governments (Siddiq, 2012: 23). Border diplomacy become an important instrument in achieving national interests in the form of state sovereignty and territorial integrity. In 2010, Indonesia has conducted seven meetings with relevant border issue that needs to be appreciated. For example, between Indonesia and Malaysia, the two countries agreed in running revitalize the Joint Commission during the implementation the Joint Commission in Kinibalu

and Bali in September 2010. This forum established three working groups that are : economic, socio-cultural and political working groups and border security (Alami, 2012: 52).

Economic diplomacy improved by facilitating the potential of Indonesia (Siddiq, 2012: 23). It reveals that the international economic diplomacy include two main frameworks that are 1) efforts to build, empower and entered into a relationship or economic cooperation to achieve the broader objectives; 2) efforts to develop, empower and entered into a collaboration with the potential of social, cultural and political security in achieving economic goals (Soesastro in Siddiq, 2012: 23).

In the socio-economic approach, it can be seen socio-economic level in the border areas are in dispute. This problem arises because of the people who go out into other country on purpose to improve the welfare of his life. Actually, border management-related conditions and socio-economic situation is different. If the situation is not too different from neighboring countries in the fields of education, economy and welfare, the relationship between neighboring countries will be balanced so that the risk of conflict will be low (Rachmawati, 2010: 96).

In addition, a variety of experiences between Indonesia and Malaysia can be lifted into the Socio-economic cooperation between Malaysia and Indonesia. The first time socio-economic cooperation between Indonesia and Malaysia formed by Dato Musa Hitam, Malaysia's Deputy Prime Minister, Chairman of the General Border Committee Malaysia at Session XII in Kuala Lumpur on November 14, 1983 (Rachmawati and Fauzan, 2012: 99).

The socio-economic working group of the Indonesian state had two positions, namely at the central level and the regional level. The Socio-economic Working Group of Malaysia and Indonesia at the central level, led by TNI Territorial Chief Assistant and his position on the Army's Territorial Staff, and the Socio-Economic Working Group of Malaysia and Indonesia in Ringkat West Kalimantan led by the Head of Planning, Regional Development West Kalimantan province and its position on the Planning Board Area.

Cooperation on socio-economic between Malaysia and Indonesia has the duty and authority. In general covers all planning about social cooperation and economic relations between Malaysian and the Indonesian state; policies and strategies for socio-economic development between Malaysia and Indonesia; to coordinate and establish cooperation with sectoral ministries to maintain the smooth development of border regions; collect, conclude and provide advice regarding the implementation of socio-economic development cooperation in Malaysian and Indonesian border regions; in addition also examine and study the issues that the two countries cooperated.

The socio-economic cooperation at the regional level between Malaysia and Indonesia has the duty and authority. In general include specifying projects of socio-economic development; formulating related to the implementation of socio-economic development in the border areas; implementing the exchange of information with neighboring countries (Malaysia-Sarawak) related to social-economic development in the border area; and providing a report to the Governor of West Kalimantan and the Social-economic Working Group.

Referring to authority possessed by the governments both at national and regional levels, then the authority is only limited to provide information on the socio-economic development needs and provide policy advice if required and supporting socio-economic development of the border region. So if Malaysia Indonesia Socio-economic cooperation can be maximized, a variety of problems that tend to lead to conflict, can be prevented in advance. One important thing that distinguishes them is their authority in Malaysian-Indonesia Social-Economic Centre to coordinate the program and to work with the department to manage the border between sectors.

The Socio-economic Working Group of Malaysia-Indonesia in regional level more active in a meeting compared to the Socio-economic Working Group of Malaysia-Indonesia in central level. The objective of the Socio-economic Working Group of Malaysia-Indonesia is a source of information and expedite socio-economic development programs in order not to be a threat between Indonesia and Malaysia. In the establishment of the Socio-economic Working Group of Malaysia-Indonesia decided by Decree of the Governor of West Kalimantan No. 408 of 1985 dated December 21, 1985, the letter was amended for the first time by Decree of the Governor of West Kalimantan No. 146 of 1988, and revised by Decree of the Governor of West Kalimantan No. 4 of 1999 dated January 11, 1999 (Rachmawati and Fauzan, 2012: 101).

In distinguishing between the Socio-economic Working Group of Malaysia-Indonesia in national and regional level, each has been given the authority to carry out the task. The authority granted include the provision of information about the socio-economic development. However, the Socio-Economic Working Group of Indonesia-Malaysia more focused on the central level and its program include coordination among sectors in collaboration with the department in managing the border.

Through a variety of information such constraints and aspirations will be submitted to the Socio-economic Working Group of Indonesia-Malaysia at a higher level (Zain, 2010: 238).

It required special handling on West Kalimantan border region in the aims to improve the welfare of the per capita revenue through the empowerment of the economic value by the

following ways; 1) build public facilities effectively and efficiently, namely the construction of border that includes the road network to each of the borders in Indonesia and is also equipped with the infrastructure and transportation to facilitate the movement of community activities and thus aims to support the economy and standard of living as well as army movements along borders; 2) to improve health services by improving the quality and equity of health care quality that successful, efficient and affordable by all people, to improve guidance to pharmacy services community and business pharmaceutical industry, the availability of public drug, protection of the public from the dangers of abuse and narcotics, increase guarantees public safety of food and beverage products and food additives that do not meet health requirements; 3) an increase in the capacity of human resources community to develop technical capabilities in stages and continuing to support the creation of effectiveness and productivity in public life; 4) empowering the capacity of government officials and institutions, namely the implementation of the empowerment of civil service created jointly by governments, political institutions, economic institutions and social institutions. So that good governance refers to the process of creating a cooperative relationship between government officials and the four institutions of the country to make policy; 5) increased mobilization of funding. Funding the initial capital to expedite the implementation of development in the border area of Indonesia. In general, the greater the funds allocated, the more smoothly the construction of the border also implemented. Therefore the Government will continue to make various regulations and act as the operator to improve access to finance.

Border Diplomacy in Negotiations on the Institutionalization Aspects

Establishment of an institution intended to support border diplomacy in Indonesia and Malaysia. Institutional bodies to run the process of identifying are following up on various border issues, recommending policies and storing a variety of documents related to border issues. Not only that an institution also runs monitoring the policies that will be selected by the government in order not to harm the country. International institutions help smooth cooperation between the state and helps prevent their mutual distrust between states and nations fear is a classic problem associated in an anarchic international system. So the establishment of institutional can be used as an independent institution to address various issues of borders and is responsible for policies related to the border formed by the central government and the local governments, the agency is helping to resolve the border issue based on the condition and do not rely on the security approach (Rachmawati, 2010: 101).

Indonesia has established institutions that deal with border namely the National Agency for Border Management, but the results of the study found that the National Agency for Border Management is still considered not able to coordinate and integrate policies with the maximum development of border regions. In managing the border region required a local agency dealing with full authority to formulate, execute and monitor the management of the border region. This effort is needed to deal with the border in order to work effectively and efficiently. In addition, there is also the weakness of the handling of the border region caused by inter-sectoral coordination and duplication because they are handled by technical ministries and institutions. Therefore, this body should have representation in the border region as a vertical institution, so that the body found in the area should be dissolved in accordance with the draft law.

One of the problems in the border areas of Indonesia is due to the slow response of the central government. Local Governance is the right solution to the problem. In addition to reducing the burden of the central government, this solution will provide familiarization for people in the border area of participatory. Local government as a process, it can be undertaken by government institutions where the objectives to be created by the institution. Institutions engaged in the government as well as related / concerned with a local.

From this, it can be interpreted that the local authorities have an important effect in handling border affairs of local government / local government is very limited in handling border affairs, as all foreign affairs taken fairly by the central government, not only the concern outside the country, the central government also has the full authority in manages mismanagement of globalization to understand this country. Therefore, it should be noted again that the message of local government in the affairs of border especially important if countries adopt a democratic system. Because most of the problems arise in the area immediately adjacent to the land area and has dealt immediately by the local government.

The central government is very limited if all matters should be imposed upon him especially central government business is not small. Plus the bureaucratic system is rigged will reduce the effectiveness of the central government shall select the problems and ultimately unsatisfying, communities and regions that experienced problems messaging communities could also help the government in finding a solution.

Closing

The emergence of a dispute Tanjung Datu contested by Indonesia and the Malaysian state actually has lasted long because each country consider their ownership over the region.

The case was re-appointed as the Malaysian state built lighthouses in the area of dispute. Indonesia considers the border of Kalimantan / Borneo is actually based on the Dutch and British statutes at the time of colonization. While the Malaysian state based on the MoU which was formed in 1975 in Semarang on land measurement results are temporary. So it requires the efforts to handle cases of disputes between the two countries. This study focuses on diplomatic approaches at the border, in an effort to address the issue of Tanjung Datu dispute. The legal aspect is to manage the border region under the law No. 43 of 2008, while on social and economic aspects through The Socio-economic Working Groups of Malaysia-Indonesia through cooperation in the socio-economic field, while the institutional aspects include the institutions and the role of local governance in the process of serving the community as well as the current government is responsible for playing a role within the community facility

BIBLIOGRAPHY

- Alami, Athiqah Nur. 2012. *Proyeksi Politik Luar Negeri Indonesia: Tantangan Global dan Prioritas Diplomasi Indonesia*. Jurnal Diplomasi, Volume 4, No.1: 35-64.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Detik.com. 2014. Susahnya Menuju Perbatasan RI Malaysia Di Tanjung Datu. (melalui <http://news.detik.com/berita/2657245/susahnya-menuju-perbatasan-ri-malaysia-di-tanjung-datu>, diakses 12 Agustus 2016)
- Jayanto, Satria Dwi. 2014. *Upaya Pemerintah Indonesia Untuk Menyelesaikan Konflik Gosong Niger*. Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 2, Nomor 3.: 625-640
- Rachmawati, 2010. Diplomasi Perbatasan Dalam Rangka Mempertahankan Kedaulatan NKRI. Madu, Ludiro, et. al. (Ed.) *Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rachmawati dan Fauzan. 2012. *Problem Diplomasi Perbatasan dalam Tata Kelola Perbatasan Indonesia-Malaysia*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 16, Nomor 2, Halaman: 95-109
- Siddiq, Mahfuz. 2012. *Indonesia Butuh Politik Luar Negeri Berorientasi Ekonomi*. Jurnal Diplomasi, Volume 4, No. 1, Halaman: 18-34
- Suratman, Edi. 2016. Pentingnya UU Pengelolaan Kawasan Perbatasan Untuk Mempercepat Kemajuan Kawasan Perbatasan. Makalah di Presentasikan Dalam Seminar Nasional Ke-2 PIPT, 16 Mei 2016

Zain, Siti N. 2010. Perbatasan Malaysia-Indonesia di Kalimantan dan Komunikasi Politik.
Madu, Ludiro, et. al. (Ed.) *Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

The Power Of Emak-Emak : Tenaga Penggerak bagi Perempuan Desa Bakalan Sebagai Pelaku Citizen Diplomacy Berbasis Kearifan Lokal

Setyasih Harini
Universitas Slamet Riyadi

Abstrak

Di era milenial, semua komponen masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Demikian juga dengan para ibu yang mulai memperhatikan dunia eksternal meskipun tidak meninggalkan ranah domestik dalam lingkup keluarga. Perempuan desa zaman now berani dan mampu mengeksplorasi potensinya untuk dikembangkan pada ranah publik. Sebagian perempuan dari Desa Bakalan, Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah beberapa tahun terakhir ini mengeksplorasi potensinya dan mempelajari kesenian tradisional yakni kothekan dengan menggunakan lesung dan pembuat sesaji sebagai sarana untuk mempertahankan kearifan lokal. Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan gambaran bahwa perempuan desa mampu menunjukkan kemampuannya dalam berkesenian tradisional dan mendapat sambutan dari masyarakat mancanegara. Data diperoleh melalui survei, wawancara dan dokumentasi secara langsung dari obyek yang diteliti. Dari data tersebut diketahui bahwa para perempuan dari Desa Bakalan memiliki niat, semangat dan motivasi untuk melestarikan kesenian tradisional. Hal tersebut bukan didasarkan pada latar belakang pendidikan atau pekerjaan (profesi) namun justru dengan kesederhanaan serta keuletan para ibu tersebut berusaha untuk memperkenalkan aset daerah melalui kesenian lokal kepada masyarakat asing. Para perempuan tersebut dapat berperan sebagai aktor dalam citizen diplomacy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan tersebut mendapat dukungan dari keluarga hanya saja masih terkendala dengan kurangnya kemampuan dalam menggunakan bahasa asing sehingga masih tergantung pada pelatuhnya.

Kata kunci: *emak (ibu), kearifan lokal, citizen diplomacy*

PENGANTAR

Urusan rumah tangga bagi seorang ibu tidak bisa ditinggalkan. Perempuan yang telah dikodratkan menjadi istri dan ibu bagi anak-anaknya menjadikan ranah domestik menjadi perhatian dan tugas utamanya. Perempuan saat ini justru lebih kental dengan sebutan emak-emak. Pergeseran pengistilahan tersebut cukup viral dalam media sosial dengan mengangkat tokoh unggulan Bu Dendy dan Mpok Alfa yang beredar melalui videonya. Kedua tokoh tersebut dianggap mewakili perempuan era digital atau yang disebut dengan emak-emak zaman now. Pengistilahan ibu menjadi emak untuk menunjukkan keberadaan perempuan dalam era teknologi digital sekarang mampu membangun kultur dan identitas baru terhadap keperempuanannya melalui media sosial. Dengan memakai istilah baru emak, perempuan atau para ibu sekarang sekaligus menunjukkan bahwa kalangan ini bukan hanya berkecimpung dengan dunia rumah tangga yang lekat dengan dapur, anak, dan suami. Dengan sebutan ini, perempuan seakan lebih memiliki kekuatan tersendiri yang tidak hanya pasif menerima apa adanya dari suami namun berdaya guna bagi dirinya, keluarganya, dan masyarakatnya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mite Setiansah dan Nana Sutikna (2018) menunjukkan bahwa emak-emak sekarang telah terbiasa berinteraksi dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informasi sesuai dengan perkembangan zaman. Dari 143,26 juta

pengguna teknologi komunikasi dan informasi, 48,57% atau 69.581.382 diantaranya adalah perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan telah menggeser perannya bukan hanya bergelut dengan urusan rumah tangga namun mencoba untuk mengisi globalisasi. Hal itu menunjukkan bahwa perempuan sekarang menjadikan teknologi komunikasi dan informasi sebagai bagian dari kehidupannya baik untuk kepentingan yang bersifat privasi maupun umum.

Pengalaman baru yang muncul seiring dengan era global memberikan peluang untuk membangun budaya lokal sebagai kearifan masyarakat dengan kekhasan tersendiri. Kearifan lokal perlu mendapat perhatian serius mengingat keberadaannya yang sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kearifan lokal dalam bidang kebudayaan misalnya yang diangkat ke permukaan dengan memperkenalkannya kepada masyarakat menjadi sarana untuk mempertahankan identitas nasional. Kedudukan kearifan lokal sebagai aset masyarakat setempat pada era global akan tergeser seiring dengan masuknya budaya asing dan menjadi penyebab terjadinya homogenitas budaya (Zarzar, 2008; Berry, 2008; Dahliani, 2015). Homogenitas budaya inilah yang perlu diwaspadai mengingat ketidakmampuan masyarakat dalam mempertahankan identitas nasional sebagai wujud ketahanan nasional.

Keberagaman yang dimiliki khasanah budaya Indonesia merupakan anugerah Sang Pencipta yang tiada tara. Setiap daerah memiliki karakteristik tersendiri yang perlu digali dan dikelola dengan baik sebagai warisan leluhur dan aset yang dapat diwariskan kepada generasi penerus. Setiap masyarakat hendaknya memiliki peran yang sangat esensial dalam mengembangkan karakteristik daerahnya untuk menarik wisatawan. Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu pilar dan strategi untuk membangun desa wisata yang tujuan akhirnya adalah kesejahteraan (Cahyaningrum, 2017). Dengan kata lain pengelolaan kearifan lokal adalah oleh dan untuk masyarakat setempat. Pengembangan pariwisata merupakan langkah potensial untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi kemiskinan, memperbaiki kualitas kehidupan, melindungi kekayaan alam dan budaya lokal. Pengelolaan karakteristik daerah dapat menjadi destinasi pariwisata yang sangat dibutuhkan bagi negara berkembang seperti Indonesia.

Desa Bakalan merupakan salah satu wilayah yang menjadi bagian dari Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Desa Bakalan yang dimaksudkan dalam penelitian ini memiliki karakteristik tersendiri terutama dalam kesenian tradisional yakni pembuat sesaji. Sebagian masyarakat terutama perempuan meskipun kehidupannya lebih banyak yang diprioritaskan untuk ranah domestik namun menyempatkan waktunya untuk berkumpul dan berlatih bersama dalam kesenian tradisional. Seperti yang dikatakan oleh

Katarina Tomasevski bahwa dalam pandangan kaum Liberal, perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk berkembang. Seberapa jauh persamaan tersebut dipengaruhi oleh budaya daerahnya termasuk dalam kebebasan secara sosial (Iordache, 2013).

Dengan adanya persamaan antara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan akses sosial dari masyarakat di sekitarnya memberikan peluang untuk mengalami pemberdayaan. Perempuan yang memiliki kepedulian terhadap kearifan lokal khususnya pelestarian kesenian tradisional menjadi fokus dari penelitian ini. Dalam pandangan Maluleke (2012) praktek yang sering muncul dalam budaya yang masih kental dengan nilai-nilai tradisional terkadang merefleksikan nilai dan kepercayaan yang memberikan prioritas terhadap sekelompok masyarakat. Sekelompok masyarakat yang mendapat prioritas umumnya adalah laki-laki dengan berlandaskan pada pemikiran dan prinsip kelompok inilah yang bertanggung jawab terhadap keluarganya.

Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa perempuan berhak untuk mendapatkan akses sosial dalam masyarakat untuk menunjang pembangunan. Salah satu yang bisa dilakukan perempuan guna mendapatkan akses sosial adalah melalui pelestarian kearifan lokal. Kearifan lokal dalam pandangan Kamonthip Kongprasertamorn (2007) merupakan seperangkat pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan akumulasi pemahaman lokal yang muncul dari suatu masyarakat. Kearifan lokal sebagai warisan pengetahuan yang muncul dan berkembang secara lokal dan diteruskan dari satu generasi ke generasi dalam masyarakat sebagai pedoman hidup untuk menjalani aktivitas keseharian. Dengan fungsinya sebagai pedoman bagi kehidupan sehari-hari maka kearifan lokal memberi petunjuk dan etika dalam menjalin relasi dengan anggota keluarga dan masyarakat baik di dalam maupun di luar lingkungan ketetanggaan (Talang, 2001; Mungmachon, 2012).

Sebagai pengetahuan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, kearifan lokal berguna untuk (1) mempertahankan sejarah, nilai, tradisi dan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan; (2) kearifan lokal memberi basis untuk meyakini kepercayaan dan meningkatkan kualitas kesehatan; (3) kearifan lokal juga memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk menikmati hiburan tradisional seperti nyanyian pada saat panen (Mungmachon, 2012). Dari ketiga hal tersebut menunjukkan bahwa dengan mempertahankan kearifan lokal akan tercipta harmoni kehidupan yang lebih seimbang dengan alam dan hubungan sosial dengan anggota masyarakat baik secara abstrak maupun kongkrit.

Konsep kearifan lokal merupakan sekumpulan pengetahuan yang dimiliki oleh suatu masyarakat dalam bentuk cerita, nyanyian, nilai, kepercayaan, ritual, bahasa lokal dan

pemanfaatan sumber-sumber alam. Di sisi lain, Ellen, Parker dan Bicker dalam Dahliani (2015) menjelaskan bahwa kearifan lokal sebagai seperangkat pengetahuan alami yang menyatu dengan lokasi dan pengalaman yang berkembang dan dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri. Proses imitasi dan akulturasi dari berbagai latar belakang masyarakat turut mewarnai proses mempertahankan atau menjalankan kearifan lokal meskipun tidak sepenuhnya meniggalkan ruh yang sudah terlanjur melekat dan mendalam dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.

Tradisi yang sudah tertanam dalam masyarakat lokal yang umumnya masih bernuansa pedesaan secara tidak langsung dapat menjadi ciri khas bagi daerah itu. Kondisi semacam ini perlu didukung dan diapresiasi baik oleh masyarakat itu sendiri maupun pemerintah daerah. Pelestarian kearifan lokal akan semakin bermanfaat jika diperkenalkan kepada masyarakat dari budaya lain. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa di era global, kemungkinan tercampurnya satu kebudayaan dengan kebudayaan lain sangat besar. Peluang ini bisa dimanfaatkan dengan menjadikan kearifan lokal yakni budaya sendiri sebagai identitas nasional sebagai sarana untuk diperkenalkan. Masyarakat atau komunitas yang terdapat di dalamnya sangat didorong untuk berani memperkenalkan kearifan lokal dengan turut mengambil peran sebagai citizen diplomats.

Citizen diplomats merupakan pelaku dari aktivitas yang disebut sebagai *citizen diplomacy*. *Citizen diplomacy*, sebuah peluang yang dilaksanakan oleh komunitas masyarakat sebagai sarana untuk mendukung atau memperkuat diplomasi pemerintah. Dalam sebuah pidato yang disampaikan oleh John W. McDonald di Institut of Multitrack Diplomacy (1992) menjelaskan bahwa warga negara baik secara individu maupun berkelompok memiliki hak dan peluang untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang belum dapat diselesaikan oleh pemerintah. Peran tersebut lebih banyak pada tingkat internasional khususnya pada jalur non-pemerintah. Ujara (2014) menyebut *citizen diplomacy* memberikan kesempatan kepada warga negara sebagai aktor kunci dalam melaksanakan diplomasi di luar negeri. Dengan posisinya sebagai aktor kunci maka warga negara bukan bertindak untuk mendukung aktivitas diplomasi pemerintah dengan mengutamakan kepentingan nasional atau negaranya.

Upaya untuk mengutamakan kepentingan nasional bisa dilakukan dalam berbagai bidang salah satunya adalah budaya. Budaya sebagai identitas nasional menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kharakter bangsa. Ketika sekelompok warga negara yang tergabung dalam komunitas fokus pada pelestarian budaya lokal maka secara tidak langsung upaya ini mengacu pada mempertahankan identitas daerah bahkan nasionalnya. Tujuan dari tulisan ini

untuk menjelaskan aktivitas yang dilakukan oleh warga khususnya perempuan dari Desa Bakalan bersama dengan sanggarnya yang fokus pada pelestarian kearifan lokal dengan membuat sesaji sebagai pelengkap dan pembuka dari kesenian rakyat Kebo Kinul. Perlu diketahui bahwa pementasan kesenian rakyat Kebo Kinul tersebut merupakan tradisi dalam bersih desa yang diselenggarakan ketika masa panen tiba. Aktivitas perempuan (emak) tersebut kemudian diunggah ke media sosial hingga mendapat apresiasi dari masyarakat mancanegara.

METODE

Penelitian yang mengupas mengenai perempuan dan kekuatannya yang mampu mendobrak rutinitas yang diciptakan oleh budaya maskulin dengan melestarikan kearifan lokal ini bersifat deskriptif kualitatif. Deskripsi yang dilakukan oleh peneliti adalah memberikan gambaran tentang aktivitas perempuan dari Desa Bakalan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dalam melestarikan tradisi yang berupa membuat sesaji. Zarqa Azhar dkk (2014) mengutip pendapat dari Sekaran bahwa studi deskriptif memiliki dua karakteristik. Pertama, studi deskriptif kualitatif memiliki peluang akan adanya perubahan terhadap fenomena sosial yang sedang diamati oleh peneliti. Kedua, studi deskriptif kualitatif juga memiliki kemampuan untuk memberikan gambaran dari fenomena sosial yang diamati beserta relevansi aspek-aspek yang terdapat di dalamnya. Aspek-aspek yang dimaksud mengarah pada keberadaan dan aktivitas individu, organisasi atau perspektif lainnya. Perempuan yang tergabung dalam sanggar seni yang fokus pada pelestarian tradisi membuat sesaji dari Desa Bakalan menjadi obyek dari penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan survei ke lokasi untuk mengetahui lebih dekat gambaran kehidupan masyarakat. Sebagai penelitian kualitatif, peneliti mencari data selain dengan melakukan survei dan dokumentasi juga melakukan wawancara. Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan perempuan-perempuan yang aktif dalam membuat sesaji sebagai tradisi untuk pementasan kesenian rakyat pada saat musim panen. Keenam informan tersebut semuanya merupakan penduduk asli Desa Bakalan yang memiliki latar belakang berbeda-beda (buruh tani, pedagang keliling, buruh pabrik, dan ibu rumah tangga). Waktu yang digunakan untuk melakukan wawancara kurang lebih 30-60 menit. Peneliti melakukan wawancara pada waktu sore hari ketika dilaksanakan pembuatan sesaji ketika hendak dilaksanakan upacara bersih desa.

HASIL

Untuk menunjang penulisan penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Bakalan, Sukimin pada tanggal 20 Juli 2018. Berdasarkan pada hasil wawancara tersebut didapatkan informasi bahwa penduduk perempuan masih ada yang tidak tamat sekolah menengah karena harus menikah. Jumlah perempuan yang menjadi ibu rumah tangga pada usia 18 tahun mencapai 57 orang dan yang 100 pada usia 20-56 tahun. Sejumlah 70 orang perempuan pada usia 25-56 tahun yang menjadi janda dan sebagai kepala keluarga. Ada sejumlah 225 orang yang tidak bekerja secara penuh pada usia 20-56 tahun. Dari 225 orang tersebut, perempuan yang bekerja di luar rumah berjumlah kurang lebih 187 orang memiliki mata pencaharian sebagai buruh pabrik, buruh petani bawang merah, dan pedagang keliling.

Perempuan yang bekerja di luar rumah tersebut berusaha untuk membagi waktunya antara bekerja untuk membantu mencari nafkah dan mengurus rumah tangganya. Selama satu minggu ada dua hari yang dimanfaatkan untuk melestarikan tradisi dengan berlatih membuat sesaji. Sesaji menjadi sarana penting dalam pementasan cerita rakyat Kebo Kinul yang diadakan pada saat bersih desa, ketika masa panen. Beberapa tamu dari India, Jepang dan Prancis pernah datang ke Desa Bakalan untuk melihat pementasan kesenian rakyat dan tradisi bersih desa pada saat masa panen padi sebagai budaya asli dari Kabupaten Sukoharjo. Keberhasilan dalam mengundang tamu-tamu asing merupakan imbalan dari perjuangan untuk mengunggah aktivitas yang berbasis kearifan lokal melalui media sosial.

Berdasarkan penuturan dari pemilik sanggar kesenian Sekar Jagad, Ngadimin bahwa perempuan atau emak-emak yang tergabung dalam sanggarnya sudah terbiasa memanfaatkan media sosial. Pemanfaatan yang selama ini kurang bijaksana yakni hanya untuk mengubah status dan foto diarahkan ke hal positif dengan mengunggah aktivitas yang berkaitan dengan pelestarian tradisi. Dengan koneksi yang masih dimilikinya, Ngadimin berusaha untuk memperkenalkan kesenian khas dari daerahnya ke luar negeri. Upaya ini terkadang tanpa bantuan dari pihak pemerintah setempat. Hal senada juga disampaikan oleh Darsini sebagai anggota kelompok pembuat sesaji bahwa sebagai perempuan desa tidak lagi mesti ketinggalan dalam memanfaatkan gadget untuk keperluan pribadi namun juga yang bisa memberi manfaat bagi orang lain. Sementara menurut Maryati, tradisi tidak boleh ditinggalkan karena itu warisan dari para leluhur. Bagi masyarakat desa yang masih kental dengan tradisi dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ada sebagian masyarakat yang masih percaya kalau tidak melaksanakan tradisi akan terjadi sesuatu. Ngadiyem menambahkan bahwa dengan memperkenalkan budaya ke negara lain daerah-daerah selain Bali juga bisa dikenal secara luas.

Seorang anggota pembuat sesaji yang paling muda yakni Sulastri menyampaikan adanya kebanggaan tersendiri atas keikutsertaannya dalam pelaku seni yang memiliki kekhasan tersendiri. Sulastri yang kesehariannya sebagai pedagang keliling masih memiliki minat untuk berlatih pembuat sesaji. Pembuat sesaji baginya bukanlah aktivitas yang bertentangan dengan ajaran agama karena dalam penyebaran agama justru membutuhkan adanya pemahaman terhadap tradisi yang berlaku di masyarakat. Sulastri juga bangga bahwa dengan kemampuannya dalam membuat sesaji menjadikan sebagai sumber pendapatan baru baginya. Sutarni, sebagai pembuat sesaji yang telah berpengalaman menyarankan agar generasi muda tidak malu untuk meneruskan tradisi dan melestarikan kesenian lokal supaya tidak tersaingi oleh orang asing yang banyak belajar tentang budaya Nusantara. Benang merah yang dapat diambil dari jawaban keenam orang tersebut adalah bahwa tradisi sebagai bagian dari kearifan harus dilestarikan. Pelestarian tersebut diwujudkan dengan berlatih dan memperkenalkannya pada orang asing. Upaya memperkenalkan kesenian tradisional ke mancanegara tersebut tidak harus menunggu uluran tangan dari pemerintah namun juga dengan inisiatif sendiri dengan memanfaatkan kemudahan teknologi.

DISKUSI

Sebagai sebuah negara yang dianugerahi keberagaman budaya menjadi sebuah potensi dan peluang untuk maju. Pelestarian budaya daerah menjadi tanggung jawab bagi seluruh warga negara. Pelestarian budaya daerah bukan hanya sebatas belajar atau berlatih dengan masyarakat yang ada di sekitar. Pelestarian budaya daerah akan semakin memiliki nilai lebih dan bermanfaat bagi warga dan negara jika diperkenalkan kepada masyarakat dari negara lain. Upaya melestarikan budaya daerah lebih khusus lagi adalah kesenian tradisional pembuat sesaji yang dilakukan oleh para perempuan dari Desa Bakalan menjadi bagian dari pelaksanaan citizen diplomacy.

Pelaksanaan citizen diplomacy yang dilakukan perempuan desa tersebut bisa dikatakan sebagai dampak positif dari globalisasi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Didigwu, Augustus (2015); Hossain (2010); dan Mrak (2000) menunjukkan adanya benang merah mengenai sisi positif dari globalisasi yang telah memberikan pengaruh yang besar kepada masyarakat dari berbagai belahan dunia dan beragam latar belakang budaya. Pengaruh tersebut lebih dikaitkan dengan peluang atau kesempatan untuk mengekspresikan diri tanpa harus meninggalkan tugas pokoknya dalam keluarga. Kebebasan tersebut dapat lebih bermanfaat

ketika ada nilai-nilai atau norma-norma yang melindunginya dari masyarakat dengan kearifan lokal yang dimilikinya.

Kehadiran sebuah komunitas kesenian tradisional memberikan arti tersendiri bagi masyarakat di sekitarnya terlebih lagi kondisi masyarakatnya yang masih pedesaan. Komunitas ini menjadi sarana bagi perempuan desa untuk keluar dari kungkungan lingkungan budaya patriarki. Lingkungan ini masih dipercaya oleh sebagian besar perempuan Desa Bakalan sulit dilepaskan. Perempuan khususnya yang telah diwawancara oleh peneliti memberikan jawaban yang sama bahwa laki-laki yang berada di Desa Bakalan kebanyakan menginginkan istrinya tidak banyak mengikuti kegiatan di luar rumah. Kegiatan yang biasa atau rutin dilakukan perempuan selama ini selain membantu suami dalam mencari nafkah adalah pertemuan bulanan dalam bentuk arisan. Aktivitas lainnya dapat dipastikan adalah merawat anak, mengurus suami dan berada di dapur.

Sejak berdirinya sanggar kesenian tradisional Sekar Jagad, masyarakat khususnya yang perempuan diajak untuk lebih memahami potensi dan talenta yang dimilikinya. Pemilik sanggar sebelum mengajak para ibu (emak) agar bergabung terlebih dahulu membuat dialog dengan para suami (bapak). Dalam pertemuan desa tersebut dijelaskan apa maksud dan kegiatan dari sanggar kesenian. Masyarakat yang tergabung dalam sanggar ini dikenalkan akan tradisi dan budaya lokal yang kurang dikenal salah satunya adalah bersih desa. Bersih desa merupakan upacara ritual yang dilakukan oleh para leluhur ketika musim panen tiba. Upacara ini sebagai ungkapan syukur atas hasil panen meskipun terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi sebelumnya. Upacara bersih desa tersebut jika dilestarikan akan menjadi obyek yang menarik dan bisa mengundang tamu untuk berkunjung ke Desa Bakalan. Dengan melalui perjuangan yang cukup lama bagi para perempuan untuk bisa tergabung dalam sanggar kesenian.

Di dalam sanggar tersebut, ada beberapa keahlian dalam seni yang diajarkan yakni karawitan, kothekan lesung, menari untuk mengiringi fragmen Kebo Kinul, panembrama (salah satu jenis nyanyian dalam Bahasa Jawa), dan membuat sesaji. Kearifan lokal yang ditekuni oleh para perempuan tersebut melanjutkan tradisi dari leluhur khususnya kegiatan bersih desa. Potensi dan minat perempuan perlu dikembangkan guna meningkatkan kepercayaan dirinya. Tiga informan yang telah diwawancara yakni Sulastri, Maryati dan Sutarni menyatakan bahwa pada awalnya, dua kali dalam seminggu dalam waktu sekitar dua jam, ketiganya belajar membuat sesaji. Dalam proses ini, ketiganya juga berpuasa pada hari Kamis supaya sesaji yang dibuat tidak menimbulkan dampak negatif. Ritual pembuatan sesaji yang menjadi upacara untuk mengawali bersih desa juga didampingi oleh seorang tetua masyarakat.

Kelompok pembuat sesaji untuk kegiatan bersih desa secara tidak langsung melibatkan perempuan dalam kegiatan ekonomi desa. Pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan perekonomian desa dapat juga melalui aktivitas budaya. Rahman (2013) mengutip pendapat Rawland bahwa pemberdayaan perempuan dengan istilah aslinya “empowerment” menekankan pada kata “power”. Kata ini lebih dimaknai sebagai upaya untuk menarik orang agar lebih terlibat pada aktivitas tertentu dan pembuatan keputusan yang ada di dalamnya. Misalnya dalam bidang ekonomi, pemberdayaan dimaksudkan untuk mengajak orang-orang yang diberdayakan agar terlibat dalam proses ekonomi untuk mendapatkan keuntungan. Lebih lanjut Rawland juga menyampaikan adanya tiga dimensi dalam pemberdayaan yakni: secara personal, rasional dan kolektif. Personal mengarah pada upaya membangun individu agar lebih percaya diri sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya. Rasional sebagai upaya membangun individu untuk meningkatkan kemampuannya bernegosiasi dan memperluas jaringan sedangkan kolektif memberi kesempatan kepada individu untuk berani menghadapi pertemanan yang di dalamnya terdapat kompetensi dan kerjasama.

Dari pendapat tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan membutuhkan adanya peningkatan personal, rasional dan kolektif. Perempuan desa yang lebih banyak terikat pada budaya lokal yang cenderung patriarki kurang memberikan kesempatan untuk lebih berkembang dan berdaya. Secara personal perempuan desa khususnya Bakalan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk membantu mencari nafkah dan mengurus rumah tangga. Kemampuan yang dimilikinya belum diasah dan dikembangkan sehingga belum mampu mengembangkan jaringan untuk kehidupannya mendatang. Ketergantungannya pada kemampuan laki-laki (baca: suami) masih sangat tinggi baik secara fisik maupun peran yang diembannya. Kondisi seperti ini cukup menyulitkan bagi perempuan untuk berdaya guna sehingga memerlukan kehadiran pihak ketiga. Dalam hal ini, sanggar seni yang berbasis pada kearifan lokal mampu menjembatani kelesuan yang dihadapi perempuan Bakalan. Di sinilah arti pentingnya kearifan lokal yang bukan hanya sebagai warisan leluhur dapat dapat memberi kontribusi positif bagi perekonomian.

Melalui kearifan lokal yang terpelihara mampu menjadi sarana untuk memperdayakan perempuan dan membangun perekonomian daerah. Para perempuan pembuat sesaji tersebut jika dilihat dari aktivitasnya cukup sederhana namun memiliki nilai tersendiri secara budaya. Sesaji yang di dalamnya terdiri dari sayuran, hasil bumi, dan kepala kerbau memberi kekhasan tersendiri bagi orang yang berjiwa seni. Dengan memanfaatkan media sosial, perempuan-perempuan tersebut dapat mengabadikan dan menyebarkan aktivitas yang dilakukannya.

Media sosial bagi pengguna yang bijaksana dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan virus positif. Media sosial mampu menjadi sarana untuk memperkenalkan kearifan lokal masyarakat yang selama ini belum dikenal. Upacara bersih desa sebagai sebuah tradisi masyarakat petani perlu dilestarikan mengingat kegiatan ini lebih banyak mengandung rasa syukur atas karunia Tuhan. Dengan mengunggah kegiatan bersih desa melalui media sosial menjadi sarana untuk memperkenalkannya pada masyarakat secara luas. Pelaku citizen diplomacy saat ini tidak harus dilakukan secara langsung namun juga bisa melalui teknologi khususnya media sosial. Dengan kegiatan seperti ini diharapkan dapat menginspirasi masyarakat untuk memanfaatkan media sosial dengan lebih bijaksana khususnya mampu membantu aktivitas diplomasi yang dilaksanakan pemerintah.

KESIMPULAN

Pementasan perempuan desa ke negara lain memberikan pengalaman tersendiri. Pertama, kesempatan ini memberikan arti tersendiri bagi perempuan desa untuk mempertahankan tradisi sebagai aset daerah. Kepedulian masyarakat terhadap budaya lokal secara langsung ataupun tidak dapat meningkatkan pendapatan daerah yang bersangkutan. Kedua, perempuan yang merelakan waktunya untuk melestarikan tradisi memberikan penghargaan terkait dengan nasionalisme yang dimilikinya. Ketiga, aktivitas perempuan desa tersebut memberikan keteladanan kepada generasi muda mengingat kearifan lokal sangat penting untuk diwariskan agar tidak punah. Keempat, dari aktivitas untuk memperkenalkannya kepada masyarakat mancanegara secara langsung maupun melalui media sosial telah memacu para perempuan tersebut untuk menjadi pelaku citizen diplomacy. Kelima, aktivitas perempuan melalui pementasan kesenian tradisional ini sekaligus memberikan citra positif baik untuk daerah setempat maupun negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, Zarqa, et.all, (2014). *Impact of Globalization on Youth Culture Identity*, Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol. 5, No. 23.
- Augustus dan Didigwu, (2015). *The Effects of Globalization on Nigerian Youth and The Economy*, International Journal of Environment and Pollution Research, Vol. 3 No. 5.
- Cahyaningrum, Dinis, (2017). *Community Empowerment Based Local Wisdom in Tourism of Bajo Community, Wakatobi*, International Journal of Scientific and Technology Research, Vol. 6, Issue 11, 197-198.

- Dahlioni, (2015). *Local Wisdom in Built Environment in Globalization Era*, International Journal of Education and Research, Vol. 3 No. 6, 158-159.
- Hossain, Anwar, (2010). *Youth Problem Their Development and Empowerment in Bangladesh*, Antrocom, Vol 6, No. 1.
- Iordache, Adriana, (2013). *The Relevance of Women's Right for Contemporary Feminism (s)*, Journal of Gender and Feminist Studies, No. 1 (15) 2-3.
- Kongprasertamorn, Kamonthip, (2007). *Local Wisdom, Environmental Protection, and Community Development: The Clam Farmers in Tambon Bangkhunshai, Phetchaburi Province, Thailand*, Manusya: Journal of Humanities, 10 (1) 2-3.
- Maluleke, (2012). *Culture, Tradition, Custom, Law and Gender Equality*, Vol. 15 No. 1, (1),
- McDonald, John W, (1992), *Citizen Diplomacy*, Modern Science and Verdic Science, Vol 5, No. 1-2, 119.
- Mrak, (2000). *Globalization: Trends, Challenges and Opportunities for Countries in Transaction*, UNIDO, Viena.
- Mungmachon, Roikwanphut, (2012), *Knowledge and Local Wisdom: Community Treasure*, International Journal of Humanities and Social Science, Vol 2 No. 13, 176.
- Rahman, Aminur, (2013). *Women's Empowerment: Concept and Beyond*, Global Journal of Human Social Science, Vol 13 issues: 6, 9-11.
- Santoso, Edi, (2018). *Media dan Dinamika Sosial Politik Indonsia*, Purwokerto: Fisip Universitas Jenderal Soedirman bekerja sama dengan Yayasan Literasi Bangsa.
- Talang, Na, (2001). *Local Wisdom in the Process and Adaptation of Thai People*, 2nd, Bangkok: Amarin.
- Ujara, Ese, (2014). *Citizen Diplomacy and Nigeria's International Image: The Social Constructivist Explanation*, Covenant Journal of Business and Social Sciences, Vol. 6, No. 2, 4-5.

Merawat Korban ‘Susi –Effect’ di Philipina Selatan

Sidik Jatmika

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Dr.sidikjatmika@gmail.com

Abstrak

Pada tahun 2014, Susi Pudjiastuti, begitu dilantik sebagai Menteri Kelautan Republik Indonesia langsung mengimplementasikan kebijakan pembakaran / penenggelaman kapal “ilegal-fishing”. Hanya dalam hitungan satu tahun, sudah ada lebih dari 100 kapal yang ditenggelamkan. Kebijakan tersebut dalam kenyataannya telah menimbulkan masalah baru bagi sekitar 8.000 warga keturunan Indonesia (People of Indonesian Descents, PIDs) di Philipina Selatan. Mereka yang sebagian besar menggantungkan kehidupannya sebagai anak buah kapal milik pengusaha Philipina, tiba-tiba menjadi kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Akibatnya, mereka rawan terjebak pada lingkaran setan kemiskinan : pengangguran, miskin, kriminal atau bahkan terorisme.

Kajian ini mengulas berbagai permasalahan yang terjadi pada warga keturunan Indonesia dan berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui Konsulat Jendral RI di Davao, Philipina Selatan. Pengumpulan data dilakukan dengan kunjungan lapangan, wawancara dan kajian pustaka. Analisa dilakukan dengan kajian teoritik mengenai ‘multi-track diplomacy’. Kajian ini mendapatkan temuan bahwa pemerintah Indonesia perlu melakukan ‘multi-track diplomacy’ dengan pemerintah Philipina dalam bentuk Government to Government, Local Government – Local Government, Bussines to Bussines, People to People. Termasuk di dalamnya peningkatan koordinasi antar- kementerian dan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di Indonesia.

Kata kunci : *Susi-Effect, PIDs, multi track diplomacy*

Abstract

This study focus on human right –issues of PIDs (People of Indonesian Descents) in the Southern Philipina. In 2014, Minister of Ocean and Fishing Affairs of Indonesia, Susi Pudjiastuti implements strickt policy to destroy, burning and sinking ‘illegal-fishing’ boats. Only in one year, she has sank more than 100 boats. Thats policy, actualy, affects seriuous impact to about 8.000 PIDs in the Southern Philipina who majority works at Philipinas boss of those ‘illegal fishing’ boats. They are very fragile to trapped on ‘poverty-cyrcle’, there are : jobless, poverty, criminal or terrorism.

Data gathering use method of visit and grounded- research, interview and literature research. Analize use ‘multi-track diplomacy’ explanation. This research find fact that Indonesian Government conducts ‘multi-track diplomacy’ to Philipina Government, by Government to Government, Local Government – Local Government, Bussines to Bussines, People to People. Also strengtens to coordination of intra-,minister, central and local government.

Keywords: *Susi-Effect, PIDs, multi track diplomacy*

Pengantar

“Susi Effect” adalah sebutan bagi kebijakan dan berbagai dampaknya yang dilakukan oleh Susi Pudjiastuti yang begitu dilantik sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia langsung mengimplementasikan kebijakan pembakaran / penenggelaman kapal “ilegal-fishing”. Karena itu, ia lekat dengan tiga istilah yaitu : tenggelam, penenggelaman dan tenggelamkan. Menteri Susi menyatakan bahwa apa yang ia lakukan adalah sebuah tugas negara. Tugas negara yang dimaksud adalah melaksanakan poin dalam Undang-Undang nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Republik Indonesia. Tujuannya adalah mengamankan

sumber daya laut Indonesia, yaitu sektor perikanan, untuk sebesar-besarnya memakmurkan rakyat Indonesia, terutama para nelayan (*Kompas.com*. 9 Januari 2018).

Penenggelaman kapal tersebut merupakan cermin dari semangat Indonesia merebut kembali kedaulatan di bidang maritim, yaitu kelautan dan perikanan. Kapal tersebut Hingga bulan Agustus 2018, dalam masa empat tahun, Menteri Susi telah menenggelamkan 488 unit kapal pencuri ikan. Kapal tersebut antara lain berasal dari : Vietnam (276 kapal), Philipina (90), Thailand (50), Malaysia (41), Indonesia (26, Papua Nugini (2). dan satu kapal dari RRC, Belize serta tanpa negara. Jika dari kapal-kapal tersebut, ada diantaranya yang menggunakan bendera Indonesia, sesungguhnya hanyalah modus agar lolos dari pantauan KKP (*Tribun News.com*, 21 Agustus 2018).

Kebijakan tersebut dalam kenyataannya telah menimbulkan masalah baru bagi lebih dari 8.000 warga keturunan Indonesia (*People of Indonesian Descents*, PIDs) di Philipina Selatan. Di tahun 2018 ada 8.745 orang PIDs tersebar di 16 perkampungan Di Pulau Mindanao bagian Selatan ada 2 provinsi yaitu General Santos (Gensan, Kota Tuna) dan Glan (Serangani). Mereka yang sebagian besar menggantungkan kehidupannya sebagai anak buah kapal milik pengusaha Philipina, tiba-tiba menjadi kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Akibatnya, mereka rawan terjebak pada lingkaran setan kemiskinan : pengangguran, miskin, kriminal atau bahkan terorisme (Napitupulu, 2018).

Berbagai penjelasan di atas akhirnya menimbulkan pertanyaan utama yaitu, apa saja upaya dilakukan pemerintah Indonesia mengatasi masalah keturunan Indonesia di Philipina Selatan ?

Metode

Upaya pemahaman terhadap fenomena di atas antara lain dapat dilakukan dengan menggunakan penjelasan konseptual mengenai *multi-track diplomacy*, yang bermula dari pertanyaan : *What is diplomacy?*

Diplomacy is the art and practice of conducting negotiations between representatives of groups or states. It usually refers to international diplomacy, the conduct of international relations through the intercession of professional diplomats with regard to issues of peace-making, trade, wars, economics, cultures, environment and human rights.

International treaties are usually negotiated by diplomats prior to endorsement by national politicians. In an informal or social sense, diplomacy is the employment of tact to gain strategic advantage or to find mutually acceptable solutions to a common challenge, one set of tools being the phrasing of statements in a non-confrontational or polite manner.

Pengertian diplomasi, secara konvensional dapat dipahami sebagai aktivitas politik yang memungkinkan para aktor diplomasi untuk mengejar kepentingan serta mempertahankan kepentingan, melalui kegiatan negosiasi, dengan tanpa menggunakan paksaan, propaganda, maupun hukum. Sederhananya, kegiatan diplomasi ini di dalamnya mencakup kegiatan komunikasi yang bertujuan untuk mencapai kepentingan lewat adanya itikad baik (Barston, 2014).

Konsep diplomasi ini terus mengalami perkembangan, sehingga saat ini dikenal pula konsep diplomasi tradisional dan diplomasi modern. Diplomasi tradisional erat kaitannya dengan kegiatan kenegaraan dan aktor berupa aktor negara, yang mencakup perwakilannya. Topik bahasan diplomasi tradisional secara umum hanya berfokus pada perdamaian, keamanan dan penyelesaian konflik. Begitu pula dengan proses diplomasinya, dilakukan dengan berdasarkan pada protokoler kenegaraan yang rigid. Sedangkan pada diplomasi modern, terdapat perkembangan yang membuat cakupan diplomasi ini menjadi semakin luas. Aktor diplomasi tidak lagi hanya aktor negara, melainkan bisa mencakup organisasi, badan usaha, pebisnis, kelompok kepentingan juga individu.

Munculnya aneka aktor baru dalam hubungan internasional dan diplomasi ini memunculkan adanya konsep *multitrack diplomacy*. Hubungan masyarakat internasional yang baik, sekaligus sebagai kontrol terhadap pemerintah dianggap memerlukan campur tangan dari para aktor diplomasi non negara.

Ide dari multi-track diplomacy telah berevolusi selama bertahun-tahun. Pada tahun 1981, Joseph Montville menulis artikel mengenai politik luar negeri yang menciptakan konsep track satu dan track dua. Selanjutnya pada 1985, Duta besar John W. McDonald menulis buku pertama yang berjudul *Conflict Resolution : Track Two Diplomacy* yang dilanjutkan pada 1989 dengan memperluas konsep multitrack diplomasi dua hingga lima. Dan terakhir, pada 1991 disempurnakan dalam buku McDonald dan Dr. Louise Diamond yang berjudul *Multi-Track Diplomacy*, yakni sebuah sistem untuk mencapai perdamaian (McDonald, 2012). Jadi, Multi-Track Diplomacy adalah cara konseptual untuk melihat proses perdamaian internasional sebagai satu *living system* yang dapat dilihat dari berbagai kegiatan individu, lembaga dan

komunitas yang saling terkoneksi dan beroperasi bersama untuk mencapai tujuan bersama yakni perdamaian dunia (imtd.org, 2013).

Konsep *multitrack diplomacy* berbicara mengenai penempatan aktor-aktor non-negara yang dianggap berpengaruh terhadap proses diplomasi. Masing-masing track, memiliki peran dan karakteristik tersendiri. Tingkatan dalam diplomasi ini dibagi dalam 9 track (McDonald, 2012), antara lain :

Track 1, pemerintah tentunya sebagai aktor utama terletak pada track teratas. Meski aktor non-pemerintah terus bertambah dalam hubungan internasional, namun pemerintah tetap mengambil peran vital dalam relasi ini. Jadi, track 1 tetap diduduki oleh pemerintah.

Track 2, terdapat aktor non-pemerintah yang bersifat profesional. Mereka bertindak dengan mengandalkan profesionalitasnya masing-masing. Dengan keahliannya, misal ahli bidang hukum, politik maupun sosial mereka dapat berpartisipasi memberikan masukan bagi perbaikan rezim internasional. Mereka dapat mempromosikan pemikiran mereka melalui tulisan, seminar, juga terjun langsung dalam aksi kemanusiaan dan penyelesaian konflik. Dengan demikian, mereka dapat melengkapi hal-hal yang belum mampu digarap pemerintah.

Track 3, oleh pelaku bisnis. Keberadaan kegiatan bisnis dapat mempengaruhi aktivitas lain dalam manajemen konflik. Perusahaan seringkali harus berurusan dengan pemerintahan lokal, organisasi non-pemerintah, masyarakat sipil, dunia pendidikan, bahkan termasuk rezim internasional.

Track 4, warga negara berperan dalam melaksanakan praktek diplomasi secara tidak resmi. Dalam artian, mereka tidak bekerja untuk atau mewakili negara. Praktek diplomasi dilakukan masyarakat sipil dengan berbagai kegiatan.

Track 5, diplomasi yang dilakukan oleh dunia pendidikan, termasuk di bidang penelitian dan pelatihan. Track 6, oleh aktivis perdamaian di bidang lingkungan hidup, ekonomi, sosial dan politik. Track 7, oleh kelompok agama dan kepercayaan. Track 8, oleh kelompok funding (pendanaan) yang memfasilitasi dan mendanai berbagai kegiatan. Track 9, oleh media massa yang berperan penting menyampaikan isu seputar perdamaian dan resolusi konflik.

Dalam konteks PIDs di Philipina Selatan, pemahaman terhadap fenomena tersebut antara lain dapat dilakukan dengan menggunakan penjelasan konseptual mengenai *multi-track diplomacy* dimana diplomasi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah (Government to Government, G to G) tetapi juga oleh pemerintah daerah (Local Government to Local

Government, LG to LG); Bisnis (Business to Business, B to B) maupun masyarakat (People to People, P to P) .

Metodologi penelitian yang digunakan dalam kajian ini, adalah dengan metode deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan dan mengkomplikasikan sumber-sumber data baik itu dokumen-dokumen atau website (Library research). Pengumpulan data primer dilakukan dengan kunjungan lapangan ke Mindanao, Philipina Selatan. Penulis di sana melakukan wawancara dengan Konsul Jendral Republik Indonesia di Davao City; warga keturunan Indonesia (IDPS) dan mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata Internasional UMY 2018. Sedangkan data sekunder dilakukan dengan kajian pustaka yang berkenaan dengan Diplomasi, Hukum Internasional, Kewajiban Negara Terhadap Warga Negara, Politik Luar Negeri dan Laporan Mhs KKN UMY 2016 serta 2018. Analisa dilakukan dengan kerangka teoritik mengenai '*multi-track diplomacy*' untuk menggambarkan penanganan masalah ini tidak bisa hanya sekedar Government to Government (G to G) tetapi juga Local Government to Local Government (LG to LG), Business to Business (B to B) serta People to People (P to P). Analisa juga dilakukan dengan membandingkan fakta yang didapat kajian ini dengan beberapa kajian lainnya.

Hasil

Para warga keturunan Indonesia di Philipina Selatan (Person of Indonesian Descents, PIDS), menurut penjelasan Konjen RI secara garis besar dapat dikelompokkan dalam tiga gelombang kehadiran (Napitupulu, 2018), yaitu :

1. Migrasi alami sebelum kemerdekaan Indonesia (1945)
2. Lahir di Indonesia sesudah 1945, bermigrasi ke Philipina
3. Lahir dan besar di Philipina

Mereka yang berjumlah sekitar 9.000 orang tersebut pada umumnya tersebar di 16 perkampungan yang ada di Pulau Mindanao bagian Selatan, yaitu provinsi General Santos (Gensan, Kota Tuna) dan Glan (Serangani, produsen kopra, pisang, nanas). Secara keagamaan mereka pada umumnya memeluk agama Islam dan Kristiani. Sebelum diberlakukannya kebijakan penangkapan dan pembakaran kapal-kapal penangkap ikan (illegal-fishing) oleh Menteri Susi Pudjiastuti mulai tahun 2014, sebagian besar kepala keluarganya bekerja di sektor perikanan. Mereka bekerja sebagai anak buah kapal maupun penjaga jermal ikan milik pengusaha Philipina. Pekerjaan ini, dengan pengasilan rata-rata sekitar Rp. 10 juta setiap bulannya, bisa dikatakan relatif untuk mencukupi perekonomian keluarga mereka. Mereka

secara kehidupan jugsan relatif tenteram karena pemerintah dan warga Philipina tidak pernah memperlakukan keberadaan mereka.

Mereka sering disebut sebagai '*alien*', yaitu tidak memiliki dokumen kewarganegaraan (Philipina ataupun Indonesia), namun hanya memegang surat keterangan dari Pemerintah Philipina bahwa mereka adalah kaum pendatang. Pemerintah Philipina selama ini tidak pernah melakukan sweeping dokumen maupun melakukan deportasi kepada mereka. Memang mereka tidak boleh memiliki hak atas tanah, namun diberi toleransi mendirikan bangunan pondok dari kayu. Mereka juga boleh mencari nafkah di Philipina.

Berbagai permasalahan mulai muncul sebagai dampak dari diberlakukannya kebijakan Menteri Susi tersebut. Mereka yang semula bekerja sebagai buruh perikanan menjadi kehilangan pekerjaan. Kemudian mereka beralih ke pekerjaan yang penghasilannya jauh lebih kecil (rata-rata sekitar Rp. 2 juta sebulan), yaitu menjadi buruh perkebunan, tukang ojek maupun penjaja makanan kelilingan. Hal ini pada akhirnya bisa memunculkan fenomena yang oleh Konjen Berlian Napitupulu sebut sebagai lingkaran setan kemiskinan (Napitupulu, 2018), yaitu keterbelakangan, kemiskinan dan kriminalitas.

Konjen RI menyikapi keadaan itu dengan melakukan pendataan permasalahan yang dialami oleh PIDs, antara lain :

1. Kepastian Hukum (Tiada identitas jelas kewarganegaraan, baik Philipina ataupun Indonesia)
2. Kepemilikan Tanah (Sebagai Warga Negara Asing, tidak boleh memiliki sertifikat tanah)
3. Akses Pendidikan (Sebagai warga negara asing, mereka tidak mendapatkan jaminan sosial pendidikan sehingga para orang tua tidak kuat menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan tinggi. Sebagian besar hanya mengenyam pendidikan formal maksimal SLTP)
3. Pekerjaan (Sebagai wargai negara asing tidak dapat menjadi pegawai negeri (ASN), sehingga hanya menjadi buruh rendahan dengan gaji rendah)
4. Pekerjaan Ilegal (kemiskinan bisa mendorong mereka terjebak berbagai pekerjaan ilegal, kriminal, bahkan hingga masuk penjara).

Konjen RI di Davao, setelah melakukan identifikasi permasalahan, kemudian mengambil beberapa langkah kebijakan. Berbagai langkah tersebut secara garis besar dapat dibagi dalam dua kelompok. Pertama adalah tindakan atau koordinasi lebih bersifat "internal Indonesia", baik di tanah air Indonesia maupun di Philipina Selatan. Kedua, adalah lebih

bersifat “eksternal”, yaitu koordinasi pihak Indonesia dengan Pemerintah maupun masyarakat Philipina.

Kebijakan “internal” Indonesia yang dilaksanakan oleh KJRI Davao, yang pertama adalah membangun jaringan komunikasi Konjen dengan para warga keturunan Indonesia (PID’s). Hal itu antara lain dilakukan melalui para tokoh yang ada di masing-masing titik pemukiman PIDs. Tokoh yang sering disebut sebagai ‘pamong’ ini biasanya diambil dari mereka yang relatif bagus bahasa Indonesia dan tingkat pendidikannya. Mereka berfungsi menjadi penghubung antara KJRI dengan segenap warga PIDs yang sebagian besar kurang lancar (lagi) bahasa Indonesianya. Berbagai program yang dilakukan Konjen RI kepada PIDs antara lain : pembinaan nasionalisme; peningkatan ketrampilan PID’s hingga pemberian dokumen (paspor). Sejak tahun 2017, Konjen RI Davao mulai memperkenalkan istilah baru pengganti ‘*alien*’ dan ‘*PIDs*’ menjadi *Registered Indonesian Nationality* (RIN).

Konjen RI juga mengadakan berbagai kegiatan pembinaan nasionalisme Indonesia maupun peningkatan ketrampilan warga keturunan Indonesia. Hal itu antara lain tercermin pada penurutan Konjen Berlian Napitupulu, "Suasannya mengharukan dan membanggakan karena ternyata mayoritas peserta mampu menyanyikan tidak hanya lagu nasional Filipina, tetapi juga lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Soalnya mayoritas mereka sudah 2-3 generasi lahir di Filipina dan tidak pernah pulang ke Indonesia, tetapi masih bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan baik. Nasionalisme mereka tetap terjaga walaupun tinggal di pelosok Filipina dan mayoritas tidak pernah pulang ke Indonesia" (Napitupulu, 2018).

Komunikasi “internal Indonesia”, yang lain yang dilakukan adalah komunikasi Konjen RI Davao dengan Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia. Komunikasi dengan Pemerintah Pusat, salah satu yang menjadi perhatian adalah proses pemberian dokumen kepada para PIDs, karena hal itu harus melibatkan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu juga koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Nasional berkaitan dengan pengelolaan *Community Learning Center* (CLC) sebagai pusat kegiatan / sekolah bagi para warga keturunan Indonesia di Philipina Selatan.

KJRI Davao juga mendorong Kementerian Dalam Negeri Indonesia untuk memfasilitasi para warga keturunan yang ingin kembali menetap di Indonesia. Hal itu, sangat terkait dengan koordinasi Kementerian dalam negeri dengan pemerintah daerah, khususnya Provinsi Sulawesi Utara dan beberapa kabupaten yang berbatasan langsung dengan Philipina. KJRI juga mendorong Kementerian Dalam Negeri Indonesia untuk memfasilitasi berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di kawasan perbatasan Indonesia, supaya para RIN

bersedia kembali ke Indonesia. Misalnya dalam upaya dua daerah di Perbatasan Filipina untuk dimekarkan, sebagaimana dikutip Liputan6.com 30 Maret 2016 dengan Judul “Dua Daerah di Perbatasan Filipina Ini Bakal Dimekarkan (Yoseph Ikanubun, 2016)

Meski pemerintah pusat beberapa waktu lalu telah mengeluarkan moratorium untuk pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB), namun tidak demikian halnya dengan dua wilayah di Sulawesi Utara (Sulut) yang berbatasan langsung dengan **Filipina**.

Kabupaten Talaud Selatan dan Kota Tahuna tetap diperjuangkan pemekarannya dengan alasan kebutuhan penguatan wilayah. “Kami melihatnya dari aspek penguatan wilayah dan ekonomi lokal. Sehingga penguatan wilayah ini harus tetap dilakukan dengan pemekaran Talaud Selatan dan Kota Tahuna,” kata anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Marhany VP Pua di Manado, Rabu (30/03/2016). Dia mengatakan banyaknya persoalan yang dialami warga di daerah-daerah perbatasan Filipina menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam melakukan pemekaran wilayah. Misalnya saja soal status kewarganegaraan ganda atau tidak jelas, pelayanan publik yang jauh dari pusat pemerintahan. Dengan pemekaran wilayah itu diharapkan pelayanan publik lebih dekat.

Sementara itu, Koordinasi dengan Pemerintah Philipina, antara lain dilakukan dalam hal menjamin kepemilikan dokumen, keselamatan dan hak hidup para warga keturunan Indonesia. Misalnya, pada 17 November 2017 Konsulat Jenderal RI Davao City bersama UNHCR, Kementerian Kehakiman, Biro Imigrasi dan Public Attorneys Office Filipina melakukan kunjungan kerja ke Pulau Balut (300 km Selatan Davao City). Selama di Pulau Balut rombongan melakukan dua kegiatan yaitu Pembinaan terhadap WNI dan Pemberian Akte Kelahiran bagi masyarakat keturunan Indonesia yang selama ini tidak memiliki dokumen tersebut. Acara pembinaan WNI diikuti oleh 85 WNI asal Pulau Balut dan Pulau Sarangani bertempat di Ruang Pertemuan Walikota Munisipal Sarangani. Acara pembinaan dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Lagu Nasional Filipina “Lupang Hinirang.”

Konsulat Jendral RI Davao juga memfasilitasi peningkatan kerjasama dalam kerangka Local Government to Local Government (LG to LG) antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia dengan Philipina Selatan (General Santos dan Glan, Serenangi). Siapapun yang menjadi gubernur Sulut 2015-2020, harus menjaga persahabatan dengan Filipina. Dalam pandangan Konjen Berlian Napitupulu, provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan Filipina bak kakak beradik yang selalu bekerja sama dalam bidang perdagangan, politik, keamanan, ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata. Apalagi, dalam kerangka ASEAN Economic Community 31

Desember 2015 kedua negara harus mampu meningkatkan kerjasama di sektor perdagangan dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yang diterapkan sejak awal 2016. Misalnya, di tahun 2015, ekspor Filipina ke Indonesia saat ini mencapai US\$11,7 juta, sedangkan ekspor Indonesia ke Filipina mencapai US\$1,29 juta. Tak hanya itu, ancaman terorisme, harus menjadi perhatian bersama seluruh komponen masyarakat serta upaya pencegahan terhadap masuknya pengaruh ISIS di kedua negara. Dubes RI untuk Philipina Dr Sinyo Harry Sarundajang (SHS, di Manado 9 Desember 2015).

.Dubes RI untuk Philipina juga berharap kerjasama antar pemerintah bisa berkembang hingga antar masyarakat dalam skema *People to People (P to P)* dan *Business to Business (B to B)*. Alasannya Sulawesi Utara merupakan tempat terpusatnya pebisnis, investor, profesional, dan pelaut asal Filipina kedua terbanyak di Indonesia, setelah Jakarta. Karena itu, mereka harus memanfaatkan kedekatan geografis dan sejarah perdagangan antar Mindanao Filipina dan Sulawesi Utara dalam kerangka ASEAN Economic Community.

Berbagai harapan tersebut antara lain ditindaklanjuti Presiden Indonesia Joko Widodo dan Presiden Philipina Rodrigo Duterte yang pada tanggal 30 April 2017 dengan resmi buka jalur pelayaran kapal *Roll-on Roll-off (RoRo)*. Jalur pelayaran itu dapat membuat pengiriman barang lebih cepat dan murah dari Davao City menuju ke Sulawesi Utara. (*Kompas.com*. 30 April 2017)

Kampus adalah salah satu lembaga yang bisa memainkan peran *People to People* dalam upaya penanganan RIN ini. Misalnya, apa yang telah dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta melalui Kuliah Kerja Nyata Internasional ke Mindanao, Philipina pada tahun 2016 dan 2018. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain, (1) Koordinasi dengan Konjen RI Davao; (2) Mengirim mahasiswa KKN. Misalnya pada tahun 2018, mengirim 18 mahasiswa KKN selama 1 bulan di kawasan General Santos dan Glan. Bahkan UMY telah bersepakat dengan Konjen RI untuk tetap mengirim mahasiswa hingga, paling tidak, 5 tahun ke depan (2019 hingga 2023). (3) UMY juga merintis kerjasama dengan kampus di Philipina dalam bentuk kegiatan *Lecture & Student Exchange*; *joint seminar, research, publication; social activities* dan sebagainya.

Diskusi

Berbagai paparan di atas dalam beberapa hal, secara epistemologis, memiliki kesesuaian dengan konsep Diplomasi dan *Multi-track Diplomacy*. Kesesuaian dengan konsep Diplomasi antara lain tercermin pada tindakan pemerintah Indonesia dan Philipina yang

memilih jalur perundingan dalam menyelesaikan permasalahan warga keturunan Indonesia yang tinggal di Philipina. Bahkan bisa dikatakan, hingga kini di antara kedua belah pihak belum pernah terjadi ketegangan politik yang berkaitan dengan isu tersebut. Pemerintah Philipina selama ini tidak pernah melakukan sweeping identitas kewarganegaraan apalagi deportasi terhadap pada warga keturunan Indonesia di sana. Di arena politik dalam negeri Philipina di tingkat pusat maupun daerah Mindanao juga tidak pernah terjadi upaya politisasi atau sekuritisasi terhadap isu ini.

Hal tersebut tentu saja jauh berbeda atau bahkan berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di Malaysia sebagaimana terpapar pada kajian Ramli Dollah & Kamarulnizam Abdullah, 2018, “The Securitization of Migrant Workers in Sabah, Malaysia.” *Journal of International Migration and Integration*, August 2018, Volume 19, Issue 3. pp. 717 – 735

In the past decades, the Malaysia’s economy, particularly in Sabah, faced high dependence on migrant workers, predominantly Indonesian and Filipino workers. This over-reliance on migrant workers made the ruling elites in the country fear that their dominant presence would undermine the government’s policy to move Malaysia from a labor intensive to an automation in order to achieve the status of a developed nation, as well as a policy to prioritize locals over foreigners in all economic sectors. In order to implement this policy and to break the economic sectors from continuing to rely on the foreigners, the ruling elites have continuously associated migrant workers, especially illegal laborers, as a security threat that needs to be flushed out.

This paper utilizes the Copenhagen School framework of securitization to explain why the securitizing actors, namely the politicians and the ruling elites, continue to frame Indonesian and the Filipino workers in Sabah as security issue. Two case studies are presented to examine the securitization of migrant workers in Sabah: first, “All-out war against illegals” and Ops Nyah II, 2002–03 and second, Ops Nasihat, 2004–05.

Kajian ini menemukan fakta bahwa Pemerintah Indonesia melalui Konjen di Davao mempraktekkan *multitrack-diplomacy* dalam bentuk *Government to Government, Local Government – Local Government, Bussines to Bussines, People to People*. Termasuk di dalamnya peningkatan koordinasi antar- kementerian dan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di Indonesia. Fakta ini dalam banyak hal memiliki persamaan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di Malaysia (KJRI Tawau) sebagaimana tertuang dalam kajian Sidik Jatmika dan Ramli Dollah (Jatmika & Dollah, 2017). Namun, harus diakui bahwa keterlibatan pihak swasta (perikanan maupun perkebunan) Philipina dalam pembinaan

warga keturunan Indonesia, belum sebanyak yang dilakukan para pengusaha kelapa sawit di Malaysia. Khususnya dalam pembinaan pendidikan dasar (SD dan SMP) anak-anak keturunan Indonesia.

Fakta bahwa para warga keturunan Indonesia di Philipina memiliki kesadaran tinggi untuk mendapatkan dokumen resmi Indonesia (paspor, bahkan sesungguhnya mereka juga meminta KTP) adalah fakta yang berbanding terbalik dengan fakta di Malaysia sebagaimana laporan mahasiswa KKN UMY di Tawau, Malaysia (Sitta dkk, 2017) dan kajian Sidik Jatmika dan Ramli Dollah (Jatmika & Dollah, 2017). Di Negara Bagian Sabah, Malaysia Timur yang berpenduduk 3,5 juta; terdapat hampir 500 ribu warga negara Indonesia yang tidak memiliki dokumen resmi. Kondisi ini dapat difahami dengan kenyataan bahwa jumlah warga keturunan Indonesia di Philipina, selain jumlahnya relatif kecil (sekitar 8.000 orang) namun juga tinggal di kawasan pantai atau relatif tidak jauh dari perkotaan sehingga lebih mudah diakses oleh pihak Konjen RI. Hal sebaliknya justru terjadi di Sabah, selain jumlahnya sangat besar (hampir 500 ribu) yang mayoritas tinggal di ladang kelapa sawit yang mayoritas di pedalaman jauh dari perkotaan (bandar raya).

Fakta bahwa warga keturunan Indonesia di Philipina memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi (hafal Pancasila, mampu menyanyikan Indonesia Raya dan sebagainya) adalah fakta yang sama terjadi pada para keturunan Indonesia di Malaysia sebagaimana dikaji Ali Maksu (Ma'sum, 2016),

Nasionalisme para TKI masih tinggi meskipun diartikulasikan dalam bentuk beragam. Namun semua dalam kerangka “mencintai” bangsa Indonesia yang sangat mereka banggakan. Mereka sadar bahwa posisi mereka sebagai TKI di luar negeri seringkali diabaikan dan tidak masuk dalam perbincangan nasionalisme bangsa. Tetapi mereka sangat sadar bahwa selama ini mereka telah berkontribusi secara tidak langsung kepada devisa negara meskipun terpinggirkan dalam diskursus kebangsaan.

Kesimpulan

1. Pemerintah Indonesia dalam menangani kasus perlindungan bagi warga keturunan Indonesia, telah mempraktekkan ‘*multi-track diplomacy*’ dengan pemerintah Philipina dalam bentuk *Government to Government, Local Government – Local Government, Bussines to Bussines, People to People*. Termasuk di dalamnya peningkatan koordinasi antar-kementrian dan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di Indonesia.

2. Konjen RI di Davao masih memiliki beberapa sisa permasalahan yang menjadi perhatian dalam menangani RIN, antara lain : pemohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP); Permohonan Bantuan Sosial (Tunjangan Hidup); Lemahnya koordinasi Konjen dengan beberapa kementerian di pemerintah pusat ; lemahnya koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

3. Kampus adalah salah satu lembaga yang bisa memainkan peran *People to People* dalam upaya penanganan warga keturunan Indonesia di luar negeri. Misalnya melalui Kuliah Kerja Nyata Internasional, koordinasi dengan Konjen; maupun kerjasama dengan kampus di luar negeri dalam bentuk kegiatan Lecture & Student Exchange; joint seminar, research, publication; social activities dan sebagainya.

Daftar Pustaka

Barston, RP. 2014. *Modern Diplomacy*. New York : Routledge.

McDonald, John W.. 2012. *The Institute for Multi-Track Diplomacy*. US: JOURNAL OF CONFLICTOLOGY, Volume 3, Issue 2 (2012) ISSN 2013-8857.

Maksum, Ali, 2017. *Analisis Framing Terhadap Nasionalisme Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Di Malaysia*, Hibah Dikti - UMY

Ramli Dollah & Kamarulnizam Abdullah, 2018, “The Securitization of Migrant Workers in Sabah, Malaysia.” *Journal of International Migration and Integration*, August 2018, Volume 19, Issue 3. pp. 717 – 735.

Sidik Jatmika & Ramli Dollah.. 2018. *Merawat Garuda di Sarang Harimau: Kerjasama Indonesia – Malaysia Terhadap Buruh Migran Indonesia di Sabah Malaysia Timur*, joint publication Universitas Muhammadiyah Yogyakarta – Universiti Sabah Malaysia

Sitta Wahyu Qurana dkk, 2017, *Brotherhood Beyond Borders, International Community Service 2017 in Tawau, Sabah, Malaysia*, Documentary Book no.2 Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Imtd.org, 2013. What is MultiTrack Diplomacy ? [online] Terdapat di <http://www.imtd.org/index.php/about/84-about/131-what-is-multi-track-diplomacy> 16 Oktober 2014.

Liputan6.com. 30 Mar 2016, “Dua Daerah di Perbatasan Filipina Ini Bakal Dimekarkan” (Yoseph Ikanubun)

Kompas.com. 30 April 2017, “Jokowi – Duterte Resmikan Jalur Roro Bitung Davao”)

Kompas.com. 9 Januari 2018. “Susi : Menenggelamkan kapal Bukan Hobi Saya, tapi Amanat Undang-Undang

Tribun News.com, 21 Agustus 2018. “Tahun Ini 125 Kapal Asing Sudah Kita Tenggelamkan”

Wawancara dengan Konsul Jendral RI Davao City, Philipina, Berlina Napitupulu, 26 Agustus 2018

Korean Wave : Apa Faktor yang Berkontribusi terhadap Kesuksesannya?

Sofia Trisni, Rika Isnarti, Anita Afriani S, Ferdian

Universitas Andalas
Sofi_hi01@yahoo.com

Abstract

Korean wave achieved its enormous success in all over the world. This success is utilized conscientiously by South Korean government with include Korean wave as an element of its public diplomacy, although almost all supporting actors of Korean wave are non-state actors. This article aims to describe supportive factor(s) contributes to the success of Korean wave in Padang, Indonesia. To reach this aim, we conducted survey to students of 10 universities in Padang with employing Nicholas J. Cull argument of element of public diplomacy ; *listening, advocacy, cultural diplomacy, exchange diplomacy* dan *international broadcasting*. This article finds that *international broadcasting* through youtube, film, tv and social media is the shaping factor of Korean wave success in Padang.

Keywords : Public diplomacy, Korean wave, non-state actor, Success factor

Abstrak

Korean wave mencapai sukses yang luar biasa di banyak negara. Keberhasilan ini dimanfaatkan oleh pemerintah dengan sangat jeli dengan cara memasukkan *Korean wave* sebagai elemen dalam diplomasi publik mereka, walaupun mayoritas aktor pendukungnya adalah aktor non negara. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan faktor yang mendukung keberhasilan diplomasi publik *Korean wave* di kota Padang. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis melakukan survei terhadap mahasiswa-mahasiswi penggemar *Korean wave* di 10 universitas di kota Padang dengan menggunakan argumen Nicholas J. Cull terkait elemen diplomasi publik yaitu *listening, advocacy, cultural diplomacy, exchange diplomacy* dan *international broadcasting*. Penelitian kami menemukan bahwa *international broadcasting* merupakan faktor pembentuk keberhasilan *Korean wave* di kota Padang melalui youtube, film, tv dan sosial media.

Kata Kunci: Diplomasi publik, Korean wave, aktor non-negara, faktor keberhasilan

PENDAHULUAN

Korean wave merupakan istilah yang pertama kali diberikan oleh media Tiongkok terhadap meledaknya popularitas produk-produk budaya Korea Selatan di negara tirai bambu (J Gunjoo dan WK. Paik 2012 : 196). *Korean wave* sendiri meliputi berbagai macam produk seperti drama televisi, film, musik populer (K-Pop), dance (B-boys), video games, makanan, *fashion*, pariwisata dan bahasa. Istilah *Korean wave* kemudian ikut populer seiring meningkatnya ketenaran produk-produk budaya Korea Selatan keseluruh dunia. Tercatat bahwa *booming Korean wave* menjalar mulai dari Tokyo, Taipei, Asia Tenggara, Timur Tengah dan Afrika (Cheng 2008 : 76). Tidak hanya itu saja, mulai tahun 2013 yang lalu, tiga buah drama Korea dibeli oleh produsen dari Eropa untuk ditayangkan di benua biru tersebut (Parc dan Moon, 2013 : 126), fenomena yang dapat saja diartikan sebagai telah terambahnya pasar Eropa oleh *Korean wave*. Indikasi lain dari keberhasilan *Korean wave* juga terlihat dari minat masyarakat dunia dalam menikmati produksi budaya negara ginseng ini. Sebut saja sebagai

contoh video *Gangnam Style* dari Psy yang diunggah ke youtube 6 tahun yang lalu telah ditonton sebanyak 3.1 miliar kali. Angka ini jauh melampaui video Hello dari Beyonce yang diunggah 8 tahun yang lalu, yang hanya mencapai jumlah penonton sebanyak 689 Juta. Contoh sukses ini hanyalah sebuah contoh kecil dari *boomingnya Korean wave*, masih terdapat produk drama, *dance* dan *fashion* yang juga ikut meraup sukses yang besar.

Di Indonesia umumnya dan Padang khususnya, demam *Korean wave* juga terlihat nyata. Dengan mengetikkan kata kunci “drama korea”, “K-pop di Indonesia”, “festival Korea di Indonesia” pada mesin pencari, akan langsung muncul banyak berita mengenai produk-produk budaya negara ini, termasuk rating drama Korea di Indonesia, penggemar *boy band* Korea dan lainnya. Jika dicermati, berita-berita yang keluar pada mesin pencari tersebut merupakan gambaran kesuksesan *Korean wave* di Indonesia. Demam Korea juga melanda masyarakat kota Padang, ibu kota dari provinsi Sumatera Barat. Riset awal yang kami lakukan pada mahasiswa di kota Padang menunjukkan bahwa 64% mahasiswa menggemari *Korean wave*. Selanjutnya, sebanyak 28% responden menyatakan bahwa mereka mengalokasikan waktu sebanyak 1-3 jam sehari untuk menonton produk *Korean wave*, sementara 25% lainnya menyatakan bahwa mereka menghabiskan 3-5 jam sehari.

Indikasi diatas menjadi menarik untuk diteliti, mengingat *Korean wave* dijadikan sebagai elemen diplomasi publik oleh pemerintah Korea Selatan (website Mofa Korea Selatan). Sementara itu, diplomasi publik dikatakan sebagai salah satu instrumen dalam menghasilkan *soft power* oleh Joseph Nye (2009: 94). *Soft power* merupakan cara untuk membuat orang lain untuk mengikuti apa yang kita inginkan tanpa merasa terpaksa (Nye 2009: 95). Artinya disini, *soft power* akan mempermudah negara untuk mencapai kepentingannya, karena pihak target akan dengan sukarela melakukan apa yang diinginkan negara pelaksana diplomasi publik. Dengan *Korean wave* berfungsi sebagai elemen dalam diplomasi publik yang lebih lanjut dapat diartikan sebagai alat dalam menghasilkan *soft power*, menarik untuk diteliti apa yang berkontribusi dalam membentuk kesuksesannya di Padang, Indonesia.

METODOLOGI DAN TINJAUAN PUSTAKA

Responden dan Prosedur

Penelitian ini menggunakan cara survei ke 10 universitas di kota Padang untuk mencapai tujuan dari penelitian. Survei dilaksanakan pada rentang waktu bulan Juni sampai dengan bulan Agustus tahun 2017. Mahasiswa dipilih sebagai responden karena kecenderungan awal yang peneliti temukan bahwa mahasiswa kota Padang merupakan penggemar berat *Korean wave* sehingga mereka merupakan pangsa pasar yang sangat besar bagi produk budaya

dari Korea Selatan. Untuk mencari jumlah responden, peneliti menggunakan rumus Slovin yaitu :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Berdasarkan rumus Slovin, n merupakan jumlah sampel yang diambil, N sebagai jumlah populasi keseluruhan yang dalam hal ini merupakan jumlah total mahasiswa yang ada di Padang, yaitu sebanyak 72.368 (forlap Dikti) dan e merupakan batas toleransi kesalahan (*error tolerance*). Pada penelitian ini toleransi kesalahan ditetapkan sebesar 5%. Dengan menggunakan rumus diatas, maka jumlah responden yang perlu dijangkau oleh peneliti adalah sebanyak :

$$n = \frac{72368}{1 + 72368 \times 0.05^2} = 398 \text{ responden}$$

Untuk meminimalisir kesalahan dalam pengisian kuesioner, peneliti memutuskan untuk menyebarkan 550 buah kuesioner kepada responden mahasiswa dari 10 universitas di kota Padang. Selanjutnya peneliti menggunakan SPSS for windows dalam mengolah data. Jawaban dikatakan sebagai faktor pembentuk kesuksesan jika jawaban yang bersifat positif mencapai persentase 50% keatas.

Adapun untuk membuat kuesioner, peneliti menggunakan argumen yang dikemukakan oleh Nicholas J. Cull (2009) dalam tulisannya pada *CPD Perspective on Public Diplomacy* dengan Judul *Public Diplomacy : Lesson from the Past*. Dalam tulisan tersebut Cull mengemukakan argumennya mengenai elemen-elemen diplomasi publik yang terdiri dari *listening* , *advocacy*, *cultural diplomacy*, *exchange diplomacy*, *international broadcasting* dan *Psychological Warfare*. Untuk yang terakhir, adalah kondisi-kondisi yang perlu diperhatikan jika negara sedang dalam keadaan perang, sehingga elemen yang ke enam ini tidak berlaku di Indonesia.

Elemen pertama yang dikemukakan oleh Cull adalah *Listening*, yang merupakan segala upaya yang dilakukan oleh aktor pelaksana diplomasi publik untuk dapat memahami publik asing mengenai apa yang mereka sukai dan harapan-harapan mereka. Hasil pemahaman terhadap publik asing tersebut dikatakan oleh Cull idealnya menjadi aspek yang diperhitungkan ketika negara membuat kebijakan diplomasi publik yang akan dilaksanakan, termasuk media pendukung terbaik untuk pelaksanaannya. Artinya disini, pendekatan yang dipilih untuk digunakan terhadap publik asing tertentu merupakan hasil riset yang mendalam terhadap mereka, sehingga pelaksanaan diplomasi publik dapat berjalan secara efektif. Kami menggunakan elemen *listening* ini pada kuesioner dengan berfokus kepada tiga hal, yaitu,

target pooling berisikan pertanyaan-pertanyaan mengenai pengalaman responden dalam mengisi survei-survei dari negara ginseng, yang kedua adalah *peer to peer media* yang berisikan pertanyaan mengenai pengalaman responden dalam merespon pemberitaan terkait kebijakan Korea Selatan secara online dan yang terakhir mengenai pengetahuan responden terhadap institusi pelaksana diplomasi publik Korea. Ketiga hal diatas kemudian kami turunkan kepada pertanyaan-pertanyaan yang akan memberikan indikasi apakah upaya *listening* yang dilakukan oleh pemerintah negara ginseng merupakan faktor pembentuk kesuksesannya di kota Padang.

Elemen kedua yang dikemukakan oleh Cull adalah *Advocacy* yang didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan oleh aktor untuk mempromosikan kebijakan, ide atau kepentingan aktor melalui komunikasi internasional. Disini, aktor internasional mencoba untuk memanfaatkan komunikasi internasional untuk melakukan sosialisasi-sosialisasi terkait kebijakannya dan juga kepentingan-kepentingannya dengan tujuan agar publik asing memahami kebijakan yang dilaksanakan, sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan dapat mencapai kepentingan yang ditargetkan. Terdapat tiga tema yang kami turunkan kedalam pertanyaan kuesioner yaitu terkait , *press confrence*, *official campaign* dan *official meme*. Hasil dari pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tema diatas dijadikan sebagai indikator untuk mengetahui apakah *advocacy* merupakan faktor yang membentuk kesuksesan *Korean wave* di kota Padang.

Elemen ketiga dalam tulisan Cull adalah *cultural diplomacy* yaitu sebuah upaya yang dilakukan oleh aktor untuk menarik hati publik asing dengan menggunakan budaya mereka dan juga dengan memfasilitasi transmisi budaya di luar negeri. Cull memberikan contoh kegiatan pada bagian ini seperti pameran foto yang didanai oleh pemerintah, yang merupakan media yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada publik asing melalui media foto. Pada kuesioner, dengan mengacu pada uraian Cull, bagian ini terdiri dari tiga tema yaitu, *state funded art*, *language course* dan *diaspora*. Tema ini kemudian diturunkan kepada pertanyaan-pertanyaan yang akan memberikan indikator mengenai *cultural diplomacy* sebagai faktor pembentuk kesuksesan *korean wave*.

Elemen keempat adalah *exchange diplomacy*, yang seperti artinya, merupakan sebuah kegiatan pertukaran yang ditujukan untuk akulturasi dan meningkatkan rasa saling memahami. Pertukaran ini bersifat dua arah, yang artinya kedua negara saling mengirimkan warga negaranya. Kegiatan ini ditujukan untuk memberikan pemahaman mengenai gaya hidup, budaya dan bahasa yang dimiliki sehingga *mutual understanding* dapat tercipta. Untuk elemen ke empat ini, kami menelitinya melalui pengalaman responden dalam mengikuti pertukaran

pelajar dan pengalaman mereka terkait *game online* karena Cull juga memasukkan hal ini dalam kategori *exchange diplomacy*. pertanyaan-pertanyaan yang kami munculkan didalam kuesioner berusaha untuk mencari tau, apakah elemen ke empat ini merupakan faktor yang berkontribusi terhadap boomingnya *Korean wave* di kota Padang.

Elemen kelima yang dimasukkan kedalam kuesioner adalah *international broadcasting* yang merupakan upaya aktor untuk menjangkau publik asing dengan memanfaatkan teknologi radio, tv dan internet. Dalam hal ini, pertanyaan pada kuesioner kami turunkan dengan tujuan untuk mengetahui apakah responden mengakses segala informasi dan budaya yang mereka suka dari Korea Selatan melalui youtube baik berupa film, drama ataupun musik, melalui TV ataupun sosial media. Kami juga mencari tahu apakah responden mengetahui channel-channel maupun website yang memberikan informasi mengenai produk budaya Korea Selatan. Melalui pertanyaan-pertanyaan tersebut kami berharap mendapatkan jawaban akan kontribusi *international broadcasting* terhadap kesuksesan diplomasi publik.

Untuk mencangkupi semua elemen diatas, kami menyusun limapuluh pertanyaan yang harus diisi oleh responden, yang kemudian diolah dengan menggunakan SPSS for windows untuk kemudian menyimpulkan faktor yang membentuk kesuksesan *Korean wave* di kota Padang.

Tinjauan Pustaka

Jumlah literatur yang secara gamblang menjelaskan faktor yang berkontribusi terhadap kesuksesan *korean wave* cukup terbatas. Beberapa literatur yang berbicara masalah ini diantaranya adalah Joanna Elfving-Hwang (2013) yang menjelaskan bahwa faktor-faktor pendukung kesuksesan *Korean wave* adalah strategi dan fleksibilitas pemerintah Korea Selatan dalam merespon perkembangan teknologi dan juga karena promosi budaya yang mereka lakukan, sebut saja misalnya promosi yang dilakukan melalui *Project K*. Disini, faktor kesuksesan yang dapat diambil adalah faktor pemerintah yang sangat terbuka dan responsif. Agak mirip dengan Elfving-Hwang, Se Jung Park dan Yon Soo Lim (2014) menjelaskan bahwa keberhasilan *Korean wave* didukung oleh pembenahan infrastruktur jaringan digital yang dilakukan oleh pemerintah, artinya disini pemerintah memanfaatkan jaringan digital mereka yang sangat baik untuk mendukung suksesnya diplomasi publik. Dalam hal ini, Korea Selatan berhasil memanfaatkan sosial media untuk merangkul masyarakat asing dengan menggunakan strategi komunikasi dua arah sehingga dapat menstimulasi keterlibatan masyarakat asing. Dua tulisan ini memberikan informasi bahwa pemerintah Korea Selatan memanfaatkan kemajuan teknologi dan fenomena sosial untuk mendukung kesuksesan diplomasi publik mereka.

Tidak jauh berbeda dengan kedua tulisan diatas, Rosaleen Smyth (2010) telah lebih dahulu menyatakan bahwa diplomasi publik saat ini harus mampu merespon kemajuan teknologi, sehingga diplomasi publik seharusnya dilakukan dengan memanfaatkan internet yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Disini secara implisit dapat diartikan bahwa pemanfaatan internet dapat menjadi faktor pendukung berhasilnya diplomasi publik. Tulisan selanjutnya yang menjadi bahan review peneliti adalah tulisan dari William Tuk yang menemukan bahwa keberhasilan *Korean wave* tidak luput dari peran pemerintah dalam pelaksanaan diplomasi publik. Tuk mengklaim bahwa pemerintah berhasil melaksanakan diplomasi publik melalui berbagai lembaga yang dimilikinya. Disini Tuk seakan-akan mengatakan bahwa campur tangan pemerintah merupakan kunci utama untuk mencapai kesuksesan diplomasi publik. Selanjutnya adalah tulisan Yee-Kuang Heng (2010) yang menjelaskan bahwa terdapat tiga hal yang mendukung *soft power* yaitu budaya yang menarik, politik domestik dan nilai-nilai yang diperlihatkan melalui kebijakan luar negerinya. Disini Heng berargumen bahwa ketiga hal diatas perlu untuk diperhatikan dengan baik untuk dapat menghasilkan *soft power*. Secara tersirat diartikan bahwa diperlukan produk budaya yang dapat diterima masyarakat umum dan pengemasan serta distribusi yang baik untuk dapat menjangkau khalayak ramai. Selain itu kondisi domestik serta nilai-nilai yang dianut masyarakat akan turut menjadi faktor pendukung kesuksesan diplomasi publik.

Akan tetapi sejauh ini belum ditemukan literatur yang membahas komponen pembentuk keberhasilan *Korean wave* dengan menggunakan metode survei kepada responden mahasiswa dan khususnya mahasiswa di Padang. Literatur yang peneliti temukan sejauh ini menilik keberhasilan *Korean wave* dengan meriset upaya yang dilakukan oleh pemerintah ataupun aktor swasta dengan menggunakan metode deskriptif melalui studi pustaka ataupun interview, sehingga perbedaan metode ini merupakan faktor yang membedakan penelitian ini dengan penelitian dan tulisan terdahulu terkait topik ini.

Tinjauan Mengenai *Korean Wave*

Bagian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai *Korean wave* dan posisinya bagi negara Korea Selatan. Tujuan lebih lanjut dari bagian ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai aktor-aktor yang terlibat dalam *Korean wave*, sehingga penggunaan konsep Nicholas J. Cull sebagai indikator penelitian menjadi relevan. Untuk mencapai tujuan tersebut, bagian ini akan dimulai dengan penjelasan mengenai *Korean wave* secara definisi, dilanjutkan dengan posisinya bagi negara ginseng, pemaparan mengenai aktor

– aktor yang terlibat dalam produksi *Korean wave* dan terakhir fakta-fakta boomingnya *Korean wave* di Indonesia dan Padang.

Telah dijelaskan dibagian awal bahwa dewasa ini *Korean wave* diartikan sebagai fenomena meledaknya produk-produk budaya yang diproduksi oleh Korea Selatan ke luar negara tersebut. Tercatat bahwa drama Korea merupakan jenis produk budaya Korea yang pertama kali digemari didunia. Keberhasilan ini kemudian ditandai dengan terbentuknya berbagai klub penggemar yang berkaitan dengan *Korean wave*; sampai tahun 2013 yang lalu saja, klub-klub ini telah beranggotakan 9 Juta orang dengan berbagai latar budaya dan etnis (situs kementerian luar negeri Korea Selatan). Fenomena ini secara jeli dimanfaatkan oleh pemerintah negara ginseng dengan menyertakan *Korean wave* sebagai elemen dalam diplomasi publiknya. Tercatat empat presiden Korea Selatan yaitu Roh Moo-hyun, Lee-Myung-Bak, Park Geun-hye dan presiden saat ini Moon Jae-in merupakan pemimpin negara yang sangat menyadari pentingnya pemanfaatan aset budaya untuk mencapai kepentingan negara, walaupun istilah diplomasi publik sendiri baru mulai digunakan pada masa pemerintahan Park Geun-hye (Krasnyak 2017).

Analisis Krasnyak diatas dapat dibuktikan ketika kita mengakses situs kementerian luar negeri Korea Selatan. Dalam website kementerian luar negerinya, Korea Selatan menyatakan bahwa pemerintah telah melebarkan fokus diplomasinya dari bentuk tradisional antar pemerintah menjadi diplomasi publik dengan cara menjangkau publik asing melalui beragam budaya (website kementerian Luar Negeri Korea Selatan). Selanjutnya, di laman yang sama, pemerintah menjelaskan kedudukan *Korean wave* bagi negaranya : “*Hallyu (the Korean wave) serves as an important element of Korea's public diplomacy*”. Maksudnya disini, *Korean wave* bukan hanya dipandang sebagai mesin penghasil ekonomi, tapi lebih dari itu, negara menganggapnya sebagai salah satu media penting dalam pelaksanaan diplomasi publiknya yang lebih lanjut dapat diartikan sebagai alat dalam mencapai kepentingan negara.

Untuk menunjukkan keseriusan terhadap penggunaan *Korean wave* sebagai elemen dalam diplomasi publik, pada laman yang sama pemerintah juga menjelaskan komitmennya untuk menaikkan alokasi budget dalam pelaksanaan diplomasi publik. Bentuk keseriusan lain diperlihatkan melalui upaya pemerintah Korea Selatan yang secara aktif melaksanakan riset mengenai status terkini *Korean wave* di berbagai negara untuk kemudian memberikan

dukungan mereka terhadap klub-klub *Korean wave* yang tengah menjamur diberbagai dunia (website kementerian luar negeri Korea Selatan). Disini terlihat keinginan besar pemerintah untuk mengawal dan memelihara kesuksesan *Korean wave*. Tidak sampai disini saja, kesungguhan pemerintah Korea Selatan dalam mendukung sukses *Korean wave* juga terlihat melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah seperti yang mereka tuliskan dalam Diplomatic White Papernya tahun 2016 yang lalu:

MOFA has contributed to the overseas advancement of hallyu cultural contents and to the continuous expansion of the Korean Wave through its network of Korean missions abroad. MOFA has hosted various events such as the K-Pop and K-Food World Festival, the Quiz on Korea and video contests while working in cooperation with broadcasters such as KBS, MBC and Arirang TV. In addition, it has conducted statistical research on the current status of hallyu in each region and has provided support for hallyu fan clubs' voluntary activities.

Pernyataan diatas tidak hanya menunjukkan perhatian pemerintah dan kegiatan-kegiatan yang diusung oleh pemerintah untuk memastikan kepopuleran *Korean wave* yang tahan lama, tetapi juga memberikan keterangan mengenai aktor lain yang berkontribusi terhadap *Korean wave* yaitu stasiun televisi. Tidak hanya stasiun televisi, terdapat aktor-aktor utama lain yang berkontribusi dalam produksi *Korean wave*, seperti yang tergambar melalui pernyataan Menteri Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata Kim Jongdeok pada tahun 2016 dalam hubungan dengan kesuksesan *Korean wave* seperti yang dikutip penuh oleh Shon (2016) :

We, the Korean government and the culture ministry, support the work they want to make, but we would not take any role or whatsoever as a decision maker or in getting involved in the actual working process at all. It's the working people, I mean, film makers or singers, who take the lead in actually promoting the Korean Wave outside South Korea. The government is just putting a little bit of stepping stones so that they can jump up and move forward. That's all we do.

Kutipan diatas memberikan penjelasan mengenai aktor-aktor utama yang terlibat dalam industri *Korean wave* yaitu para produser film, penyanyi dan mereka-mereka yang terlibat dalam proses produksi produk tersebut. Disini Menteri Kim menyatakan bahwa peran pemerintah tidaklah besar dalam proses produksi dan meledaknya *Korean wave*. Kesimpulan yang dapat diambil dari kutipan-kutipan diatas adalah bahwa aktor-aktor yang terlibat dalam *Korean wave* adalah para aktor non negara yang telah disebutkan diatas dan pemerintah Korea Selatan seperti yang telah dijelaskan pada bagian awal.

Di Indonesia sendiri, fenomena boomingnya *Korean wave* dapat dilihat melalui berbagai indikasi seperti ; penayangan drama Korea oleh stasiun televisi di Indonesia dan jumlah penggemar produksi *Korean Wave* di Indonesia. Tercatat sampai tahun 2011 yang lalu,

stasiun televisi Indonesia telah menayangkan 50 judul drama Korea (Susanthi, 2011), jumlah yang tidak dapat dikatakan sebagai angka yang kecil. Tayangan drama Korea ini pun diisi oleh banyak iklan, indikasi utama dari keberhasilan sebuah tayangan. Selain itu, Indonesia juga tercatat sebagai salah satu negara yang memiliki fan base (penggemar) terbesar produk populer Korea di Asia (Milia, 2015). Contoh kecilnya adalah boy band BTS yang memiliki jumlah penggemar yang sangat tinggi di Indonesia, yang merupakan nomor tiga tertinggi di dunia (Astarina 2017, Permita 2017). Selain itu, hasil survei awal yang telah peneliti jelaskan dibagian pendahuluan juga merupakan bukti boomingnya *Korean wave* hingga saat ini di Indonesia. Fenomena inilah yang kemudian membuat kami tertarik untuk mencari tau faktor yang mendukung kesuksesan dari *Korean wave* ini.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *Korean wave* merupakan sebuah aktifitas yang didukung oleh banyak aktor, mulai dari aktor-aktor non negara yang terlibat dalam proses produksi dan distribusinya dan juga terdapat aktor negara (pemerintah) yang berupaya untuk memberikan dukungan terhadap *Korean wave*. Jika menilik elemen diplomasi publik yang dijelaskan oleh Cull, dapat disimpulkan bahwa elemen yang dijelaskan oleh Cull merupakan elemen yang menggabungkan peran aktor negara dan non negara. Elemen *listening* dan *advocacy* cenderung merupakan elemen pelaksanaan diplomasi publik yang dilakukan oleh aktor negara, sedangkan tiga elemen lainnya seperti *cultural diplomacy*, *exchange diplomacy* dan *international broadcasting* dapat dipahami sebagai elemen yang bisa saja dilaksanakan oleh aktor negara ataupun aktor non negara. Cull secara jelas memberikan pemahaman bahwa aktor yang terlibat dalam diplomasi publik saat ini tidak hanya terbatas pada aktor negara, tetapi juga aktor non negara. *Korean wave* merupakan sebuah industri yang melibatkan banyak aktor, sehingga konsep Cull cukup mewakili kompleksitas aktor yang terlibat dalam *Korean wave*. Sedangkan Padang diambil sebagai wilayah penelitian dikarenakan kota ini juga terpapar demam *Korean wave*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis melalui SPSS for windows dilakukan untuk mempelajari faktor yang membentuk kesuksesan *Korean wave* di kota Padang. Dari pengolahan data ini, kami berharap dapat menemukan faktor-faktor yang mendukung sehingga *Korean wave* dapat mencapai tahap popularitas seperti saat ini. Pengolahan data menunjukkan hasil sebagai berikut ini. Dari tujuh pertanyaan yang diberikan didalam kuesioner terkait kegiatan *listening* yang dilakukan oleh

pemerintah Korea Selatan, hasil pengolahan data menunjukkan bahwa kegiatan ini bukanlah faktor yang membentuk kesuksesan *korean wave*. Mayoritas responden kami menyatakan bahwa mereka tidak pernah mengisi kuesioner dari pemerintah Korea Selatan dan sebagai lanjutannya, mayoritas responden juga tidak mengetahui mengenai kebijakan negara ginseng tersebut karena kebanyakan mereka tidak mengakses berita negara semenanjung Korea tersebut. Artinya upaya *listening* yang dilakukan belum mampu menjangkau masyarakat Padang yang diwakili oleh mahasiswa ini.

Selanjutnya, kami memberikan sebelas pertanyaan berkaitan dengan *advocacy* yang dilakukan oleh pemerintah. Hampir seluruh responden menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui mengenai institusi kebudayaan Korea Selatan yang ada di Indonesia. Tidak hanya itu saja, hampir semua responden juga tidak pernah mengunjungi institusi kebudayaan Korea. Hal ini mengindikasikan bahwa kepedulian responden ini terhadap pemberitaan dari pemerintah sangatlah rendah yang kemudian juga terbukti dengan hanya minoritas dari responden, yaitu sebanyak 3% yang menyatakan bahwa mereka pernah membaca konferensi pers dari pemerintah Korea. Hasil yang negatif juga kami temukan terkait pernah atau tidaknya para responden membaca publikasi dari pemerintah Korea Selatan, termasuk mendengarkan kampanye-kampanye dari pemerintah termasuk iklan-iklan mengenai budaya negara ginseng. Lebih jauh lagi, kami juga menemukan hasil negatif terhadap program-program pemerintah yang dilaksanakan di Indonesia. Pada bagian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa *advocacy* juga bukan merupakan faktor yang mendukung kesuksesan *korean wave* di Padang.

Elemen ketiga yang kami teliti adalah *cultural diplomacy* yang diwujudkan menjadi 10 pertanyaan. Mayoritas jawaban yang diberikan oleh responden adalah jawaban negatif; lebih dari separuh responden tidak mengetahui mengenai festival yang dilakukan oleh negara tersebut dan 93% dari mereka menyatakan bahwa mereka tidak pernah memiliki pengalaman dalam mengikuti *Korean Festival*. Berkaitan dengan pengalaman responden dalam berkenalan dengan diaspora yang memungkinkan terjadinya asimilasi budaya, kembali mayoritas responden menyatakan bahwa mereka tidak pernah berinteraksi dengan diaspora dan bahkan tidak memiliki kenalan dari negara tersebut. Hasil ini kembali memberikan jawaban bahwa *cultural diplomacy* bukanlah faktor yang mendukung keberhasilan *Korean wave*.

Selanjutnya elemen keempat yang menjadi indikator dalam penelitian kami adalah *exchange diplomacy*. Indikator ini kami turunkan kedalam 6 pertanyaan yang disesuaikan dengan penjelasan Cull. Terdapat 2 hal umum yang kami lacak terkait indikator ini, yaitu pengalaman responden dalam kegiatan pertukaran pemuda, keinginan mereka untuk ikut kegiatan pertukaran antar negara yang dikhususkan ke Korea, dan pengetahuan mereka terhadap game online dari negara ginseng. Game online dikategorikan oleh Cull sebagai aktivitas yang berkaitan dengan *exchange diplomacy*, karena games ini memungkinkan pemainnya untuk berinteraksi langsung dengan orang Korea, sehingga menimbulkan interaksi yang bisa digolongkan sebagai *exchange diplomacy*. Jawaban yang kami terima dari responden mayoritas bersifat negatif, sehingga *exchange diplomacy* bukanlah faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan *korean wave* di kota Padang.

Elemen terakhir yang menjadi indikator penelitian ini adalah *international broadcasting* yang berkaitan dengan penggunaan teknologi penyiaran dalam menjangkau publik asing. Dari enam belas pertanyaan yang kami berikan kepada responden, hanya satu pertanyaan terkait apakah para responden ini bergabung dengan klub *Korean wave* yang menghasilkan jawaban negatif dari 83% responden kami. Sementara itu 15 buah pertanyaan lainnya menghasilkan jawaban yang positif, yaitu responden ini mengakses produk-produk budaya dari Korea Selatan melalui youtube dan mereka juga mengakses stasiun TV dari negara tersebut. Lebih lanjut hasil positif ini berdampak terhadap penjiplakan gaya hidup orang Korea, keinginan untuk mengunjungi Korea dan keinginan untuk mengkonsumsi produk-produk fashion, elektronik dan kosmetik yang diimpor dari Korea Selatan. Hasil ini mengindikasikan bahwa *international broadcasting* merupakan faktor yang mendukung keberhasilan *Korean wave* di kota Padang.

Pembahasan

Penelitian yang kami lakukan berupaya untuk mempelajari faktor yang mendukung kesuksesan *Korean wave* di kota Padang. *Korean wave* didaulat pemerintah Korea Selatan sebagai salah satu elemen dalam diplomasi publik negara mereka. Uniknya, *Korean wave* merupakan sebuah aktivitas yang dilaksanakan oleh mayoritas aktor non-negara, walaupun terdapat beberapa indikasi upaya pemerintah dalam mendukung *Korean wave*. Permasalahan aktor ini dapat saja berpengaruh pada tujuan tradisional pelaksanaan diplomasi publik yang dilakukan oleh negara yaitu untuk mencapai kepentingan nasional yang tidak akan mudah untuk

digapai ketika aktor negara yang menjadi pelaksana diplomasi publik tersebut adalah aktor non negara.

Hasil yang kami temukan menyarankan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan melalui *listening* dan *advocacy* bukanlah merupakan faktor yang mendukung kesuksesan dari *Korean wave*. Hal ini terbukti dari awamnya responden terhadap program, aktifitas negara tersebut dan keawaman responden terhadap berbagai insititusi pemerintah Korea Selatan yang ada di Indonesia. Hasil ini mengindikasikan bahwa sesungguhnya kesuksesan *Korean wave* dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah merupakan dua hal yang terpisah. Yang artinya, *Korean wave* telah sukses melalui cara yang dipilih oleh aktor non negara yang melaksanakannya, yaitu dengan pemanfaatan teknologi penyiaran. Bagi responden pun, menggemari *Korean wave* bukan berarti bahwa mereka menggemari pemerintah dan negara Korea Selatan, karena tidak terlihat upaya dari responden untuk mencari tau lebih dalam mengenai hal tersebut.

Pertanyaan lanjutan yang muncul adalah bagaimana menjamin tercapainya kepentingan negara ketika faktor yang mendukung kesuksesannya adalah upaya yang dilakukan oleh aktor swasta yang tentu saja memiliki kepentingan mereka sendiri. Disini terdapat celah yang harus dipikirkan oleh negara, yaitu bagaimana mensinkronkan pencapaian aktor non negara dengan kepentingan negara. Perlu koorinasi yang lebih dalam antara pemerintah dengan aktor non negara agar produksi-produksi yang dihasilkan dapat ikut mendorong tercapainya kepentingan negara. Sejauh ini, *Korean wave* lebih berperan sebagai mesin penggerak perekonomian, yang membantu dalam meningkatkan hasil penjualan negara. Pencapaian ekonomi tentu bukan merupakan hal tunggal yang ingin dicapai oleh negara ketika melaksanakan diplomasi publik.

Kesimpulan

Pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah melalui *listening* dan *advocacy* tidak sepenuhnya memiliki hubungan yang linier dengan keberhasilan *Korean wave*. Kami menemukan bahwa responden kami memisahkan kesukaan terhadap *Korean wave* dengan kesukaan terhadap negara. Terlihat bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah belum berhasil mencapai kepopuleran karena ternyata kesukaan terhadap *Korean wave* tidak membuat responden tertarik kepada program pemerintah. Dengan mengenyampingkan upaya pemerintah pun, *Korean wave* dapat mencapai tingkat konsumsi yang tinggi dengan memanfaatkan *international broadcasting*. Selanjutnya, keberhasilan aktor non negara dalam mempopulerkan produk-produk budaya mereka tidak dapat pula diartikan sebagai kesuksesan pelaksanaan diplomasi publik negara, perlu ditinjau lebih lanjut apakah keberhasilan yang dicapai oleh aktor

non negara tersebut dapat memberikan keuntungan dalam mencapai kepentingan negara mereka.

Daftar Pustaka

Artikel dalam buku kumpulan artikel:

Cheng, Li-Chih, 2008 “The Korea Brand : The Cultural Dimension of South Korea’s Branding Project in 2008”, *The SAIS-U.S-Korea Yearbook 2008*, Johns Hopkins University Press.

Artikel dalam jurnal atau majalah :

Gunjoo, Jang dan Won K. Paik, 2012, “Korean Wave as Tool for Korea’s New Cultural Diplomacy”, *Advances in Applied Sociology*, Vol.2, No.3, 196-202

Heng, Yee-Kuang, 2010, Mirror, Mirror on the Wall, Who Is Softest of Them All? Evaluating Chinese Strategies in the Soft Power Competition Era, *International Relations of the Asia Pacific Vol 10, Issue 2*

Nye, Joseph, 2009, “Public Diplomacy and Soft Power”, *The Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 616, Public Diplomacy in a Changing World*, pp 94—109, Sage Publications, Inc

Parc, Jimmy & Moon, Hwuy-Chang, “Korean Dramas and Films : Key Factors for Their International Competitiveness”, *Asian Journal of Social Science 41 (2013)*, 126-149

Park, Se Jung dan Lim, Yon Soo, 2014, “Information Networks and Social Media Use in Public Diplomacy: A Comparative Analysis of South Korea and Japan” *Asian Journal of Communication*, Vol. 24, No. 1, 79–98, 2014

Rawnsley, Gary, 2012, “Approaches to soft power and public diplomacy in China and Taiwan”, *Journal of International Communication*, 18:2, 121-135

Smyth, Rosaleen, 2010, “Mapping US Public Diplomacy in the 21st Century” *Australian Journal of International Affairs*, 55:3, 421-444

Artikel dalam Koran :

Astarina, Sintia 18 Juli 2017, "Indonesia Masuk Daftar 10 Negara dengan Jumlah Terbanyak Penggemar BTS", Kompas.com, dilihat secara online 19.08.2018 <https://entertainment.kompas.com/read/2017/07/18/171438710/indonesia-masuk-daftar-10-negara-dengan-jumlah-terbanyak-penggemar-bts>.

Milia, Jana, 24 Juni 2015, "Indonesia Dipengaruhi *Korean Wave* juga loh!", Kompasiana, diakses online 19.08.2018 <https://www.kompasiana.com/milimilia/552883046ea83405718b456b/indonesia-juga-dipengaruhi-korean-wave-loh>

Permita, D, Indonesia Tercatat Punya Jumlah Fans BTS Terbanyak, Liputan 6.com, dilihat secara online 19.08.18 <https://www.liputan6.com/showbiz/read/3169056/indonesia-tercatat-punya-jumlah-fans-bts-terbanyak>

Dokumen resmi :

Diplomatic White Paper 2016, Republic of Korea

MOFA Republic of Korea http://www.mofa.go.kr/eng/wpge/m_5474/contents.do

MOFA, Hallyu : Gelombang Korea, http://overseas.mofa.go.kr/id-id/wpge/m_2741/contents.do

Skripsi, Tesis, Disertasi, Laporan Penelitian:

Tuk, *The Korean wave: who are behind the success of Korean popular culture?*

Master thesis, Leiden University, 2012

Internet (karya individual):

Cull, N. J, 2009, *Public Diplomacy: Lessons from the Past*. California: FIGUEROA PRES

Elfing-Hwang, Joanna, 2013, *South Korean Cultural Diplomacy and Brokering 'K-Culture' outside Asia*

Krasnyak, Olga, 2017, *Evolution of Korea's Public Diplomacy*, USC Center on Public Diplomacy, <https://uscpublicdiplomacy.org/blog/evolution-koreas-public-diplomacy>, viewed 1 June 2018, 12:23 WIB

Sohn, Jiae, 2017, "Content producers lead Korean Wave", *Korea.net*
<http://www.korea.net/NewsFocus/Culture/view?articleId=134924> view online 1 June 2018,
14:32

Susanthi, Nyoman Lia, 2015, "'Gurita' Budaya Populer Korea di Indonesia",
<http://www.isi-dps.ac.id/berita/gurita-budaya-populer-korea-di-indonesia/>

Signifikansi Pengaruh Organisasi Non-Pemerintah dalam Diplomasi Lingkungan: Perspektif *English School*

Verdinand Robertua
Universitas Kristen Indonesia
verdinand.robertua@gmail.com

Abstrak

Pengaruh organisasi non-pemerintah (ornop) dalam diplomasi lingkungan menjadi topik perdebatan bagi praktisi Hubungan Internasional. Keberhasilan ornop dalam memunculkan ide-ide baru dalam konservasi lingkungan global dan keberhasilan ini menjadi pertanyaan bagi penggiat teori-teori Hubungan Internasional terkait kerangka konseptual ornop. Penelitian ini menelusuri proses kemunculan ornop dalam diplomasi lingkungan dengan menggunakan pemikiran salah satu penggiat teori English School yaitu Andrew Hurrell. Dengan berbagai tinjauan literatur, peneliti melihat pengaruh ornop dalam diplomasi lingkungan mencerminkan nilai-nilai inti dari pemikiran solidarisme yang merupakan bagian dari teori English School. Selain itu, pengaruh ornop dalam diplomasi lingkungan membutuhkan transformasi persepsi mengenai kepentingan dan keuntungan, nilai dan identitas serta kekuatan dan paksaan.

Kata kunci: organisasi non-pemerintah, English School, solidarisme, Andrew Hurrell

Pengantar

Heart of Borneo (HoB), sebuah kesepakatan internasional oleh tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam untuk menyelamatkan kawasan hutan yang terdapat di Pulau Kalimantan, digagas oleh sebuah organisasi non-pemerintah (ORNOP) yaitu *World Wide Fund (WWF)*. Sebuah fenomena yang menarik ketika sebuah ornop dapat menggalang dukungan dari tiga pemerintahan untuk merealisasikan ide mereka berupa program penyelamatan lingkungan HoB. Menjadi sebuah hal yang umum pula apabila kini dalam berbagai konferensi, perundingan dan negosiasi internasional khususnya mengenai masalah-masalah lingkungan internasional, kita dapat bertemu dengan berbagai ornop yang bergerak dalam bidang lingkungan di forum tersebut.

Melalui contoh di atas dan banyak contoh serupa lainnya, menjadi sebuah tugas bagi peneliti dalam kajian hubungan internasional untuk mempertanyakan bagaimana munculnya ornop sebagai salah satu aktor dalam *transnational civil society* dalam berbagai perundingan internasional. Apabila memang ornop sudah memiliki peran dalam perundingan tersebut, sejauh mana ornop dapat mempengaruhi sebuah kesepakatan atau perjanjian internasional tersebut? Apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh dilakukan oleh ornop untuk memiliki pengaruh yang signifikan dalam kerangka politik lingkungan internasional? Bagaimana menjelaskan signifikansi peran ornop dalam diskursus teori Hubungan Internasional?

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan berusaha dijawab melalui tulisan ini dengan melakukan *literature review* terhadap tiga tulisan utama yaitu Lorainne Elliot dengan tulisannya yang berjudul *Non-Governmental Organisations: Movements to Save the Planet*, Thomas Princen dengan tulisannya yang berjudul *NGOs: Creating a Niche in Environmental Diplomacy*, dan terakhir Michele M. Betsill dan Elisabeth Corell dengan tulisannya yang berjudul *NGO Influence in International Environmental Negotiations: A Framework for Analysis*. Analisis dari beberapa artikel ini menjadi pembanding bagi konstruksi pemikiran Andrew Hurrell dalam buku *On Global Order: Power, Values and Constitution of International Society*.

Dimulai dengan tulisan Lorainne Elliot dalam *Non-Governmental Organisations: Movements to Save the Planet*. Ia menguraikan perjalanan singkat awal mula peran ornop dalam berbagai diplomasi lingkungan. Sebagaimana kita ketahui, kalangan *civil society* berkembang amat pesat di negara barat. Ornop pun lahir dan berkembang pada awalnya di dataran Eropa. Organisasi yang pertama kali sebagai gerakan sipil penyelamatan lingkungan adalah *Open Spaces Preservation Society* yang didirikan pada tahun 1865 di Inggris (Elliot, 2004). Di Benua Amerika, *The Sierra Club* merintis perjuangan yang serupa didirikan pada tahun 1892. Begitu pula di negara-negara lainnya seperti di Australia (*Wildlife Preservation Society* pada tahun 1909), Kanada dan Jepang. Awalnya, organisasi ini hanya memperjuangkan kebebasan warga negara untuk menikmati kekayaan alam. Namun, pada tahun 1960-an dan 1970-an isu-isu yang diperjuangkan pun mulai berkembang mulai dari polusi, sampah nuklir, pengolahan sampah dan penipisan ozon. Mengingat isu-isu yang diamati sangat kompleks maka perlahan organisasi ini masuk ke dunia politik. *Friends of Earth* sebagai bentukan dari *The Sierra Club* menjadi kelompok politik oposisi pertama yang menentang penggunaan tes uji nuklir. Dari titik inilah, mulai berkembang dramatis ornop yang menaruh perhatiannya pada isu-isu lingkungan untuk masuk pada panggung politik yang nantinya sampai pada tataran politik internasional.

Di negara berkembang sendiri, perkembangan ornop berkembang lebih lambat dibandingkan dengan perkembangan di negara-negara Barat. Awalnya, agenda perjuangan isu-isu lingkungan hanya agenda minor dan dicampuradukkan dengan isu pembangunan daerah-daerah tertinggal dan kawasan miskin. Peran negara yang masih sangat kuat dan kesadaran akan instrumen *civil society* yang masih rendah menjadi faktor utama perlambatan aktivitas ornop yang bergerak dalam isu lingkungan. Namun meskipun demikian, lambat laun jumlah ornop di negara-negara berkembang mulai meningkat. Sahabat Alam Malaysia dibentuk pada tahun

1977, *Greenbelt Movement* pada tahun 1977 di Kenya menjadi ornop perintis dalam pergerakan isu-isu lingkungan masuk pada tataran politik praktis.

Pada tahun 1982 diperkirakan jumlah ornop yang sudah terbentuk mencapai 15.000 dan pada tahun 1996 mencapai 100.000. Sebenarnya mengestimasi jumlah ornop cukup sulit apalagi mengidentifikasi NGOs lingkungan. Namun meskipun jumlahnya yang begitu *massive*, Lorainne Elliot memberikan tiga karakteristik utama NGOs lingkungan. Pertama, meskipun bergerak dalam pergerakan penyelamatan lingkungan namun mereka memiliki karakter yang berbeda-beda baik dalam bentuk perjuangan, filosofi, visi dan misi. Kedua, mereka kini berani masuk pada sistem politik domestik sebuah negara dengan berbagai cara. Ketiga, jaringan dan kerjasama di level masyarakat dan antar ornop utara dan selatan kini semakin solid dan kuat.

Jumlahnya yang begitu banyak dan bervariasi mungkin akan menyulitkan untuk mengkategorikan ornop. Namun Lorainne Elliot mencoba untuk mengkategorikan ornop dalam tiga kelompok yaitu pertama, ornop yang menjadi pusat riset dan *think tanks* seperti *International Institute for Environment and Development*, *Foundation for International Environmental Law and Development* (FIELD) yang kedua-duanya bermarkas di London atau *WorldWatch Institute* yang bermarkas di Washington. Kedua, ornop yang memfokuskan dirinya menjadi *pressure groups*. *World Resources Institute* selain menjadi pusat riset juga menjadi agen utama yang membentuk koalisi ornop untuk menghasilkan berbagai program seperti *Tropical Forestry Action Plan*. Ketiga, ornop yang menjadi agen-agen yang bergerak pada tingkat *grass-roots* dan pelaksanaan proyek-proyek lingkungan. Begitu banyak ornop di Afrika dan negara-negara berkembang lainnya yang tergolong dalam kelompok ini.

Sangat sedikit ornop lingkungan yang memiliki karakter trans-nasional dan internasional. Kebanyakan ornop lingkungan bersifat lokal dan internasional. *Greepeace International*, *Friends of Earth International*, *World Wide Fund* merupakan contoh-contoh ornop yang tepat bersifat internasional. Mereka memiliki sekretariat dan afiliasi di berbagai negara dengan masih berpusat di kantor pusat. Biasanya ornop lingkungan yang bersifat internasional ini berkaitan isu-isu yang dampaknya bersifat transnasional seperti energi, polusi udara, dll.

Kini masuk pada pembahasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan signifikansi peran ornop dalam berbagai perundingan diplomasi lingkungan internasional. Dalam tulisan Thomas Princen dengan tulisannya yang berjudul *NGOs: Creating a Niche in Environmental Diplomacy*, ia mengatakan bahwa faktor utama mengapa ornop mampu mengakses diplomasi lingkungan dan memainkan peran yang besar didalamnya adalah karakteristik khas ornop yang

mampu menjembatani elit yang berada di tingkat pengambilan keputusan dengan masyarakat yang memiliki kepentingan terhadapnya (Princen, 1994). Princen lebih jauh mengatakan bahwa pendekatan yang dilakukan ornop lingkungan dapat menggabungkan dua pendekatan sekaligus yaitu *top-down approach* dan *bottom-up approach* yang akan dielaborasi di bawah ini.

Top-down approach bersinonim dengan diplomasi tradisional yang menggunakan kerangka kerjasama bilateral dan multilateral untuk meraih kepentingan nasional. Lebih dalam lagi, pendekatan ini menekankan pada manajemen global. Contohnya, *Antartic Treaty System* akan berlaku apabila negara-negara yang menandatangani meratifikasi di negara masing-masing. Pembuatan kesepakatan ini membutuhkan kerjasama yang berada dibawah *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED) dan ketika kesepakatan ini diratifikasi, pemerintah harus berkoordinasi dan menyusun peta rencana untuk proses implementasi kesepakatan tersebut.

Top-down approach ini juga menekankan pada penggunaan modal dan teknologi. Diperlukan kekuatan finansial untuk merekrut ahli-ahli yang kompeten dalam bidang bersangkutan. Agar implementasi sebuah kesepakatan lingkungan internasional dapat berjalan maka pemerintah harus menjamin bahwa birokrat-birokrat pada level pelaksana memiliki kapasitas untuk melakukannya. Maka dibutuhkan pelatihan, seminar, dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk mendukung hal tersebut. Oleh karena itu, dana menjadi elemen penting dalam mekanisme *top-down approach*.

Princen mengajukan tiga kritik terhadap *top-down approach*. Pertama, apabila menggunakan logika pendekatan *top-down approach* maka negara ditempatkan menjadi aktor utama. Padahal bukti-bukti menunjukkan bahwa negara yang menjadi kekuatan perusak lingkungan paling hebat. Eksplorasi dan eksploitasi yang mengakibatkan menipisnya cadangan kekayaan alam dilakukan oleh negara untuk mengejar kepentingan elit politiknya. Apabila menggunakan pendekatan ini maka sama saja dengan memberikan dua tugas kepada subjek yang sama yang saling bertentangan.

Kritik kedua adalah konsep *power* itu sendiri. Princen mengatakan dengan menggunakan konsep *power* klasik maka *power* tersebut menjadi tidak relevan dengan isu-isu lingkungan. Bagaimana hubungan antara *state power* dengan pemanasan global? Apakah *state power* dapat digunakan untuk memecahkan masalah polusi udara dan kebakaran hutan? Masih banyak keterbatasan untuk menggunakan *state power* untuk mengatasi berbagai masalah lingkungan yang membutuhkan pendekatan yang lebih kompleks dan komprehensif. Ketiga, kompleksitas masalah lingkungan ini membutuhkan sumber daya manusia non-konvensional.

Maksudnya, negara yang dipresentasikan oleh diplomat yang masih mengandalkan pengetahuan konvensional dalam berbagai diplomasi lingkungan. Para diplomat ini dilatih sangat baik untuk menyelesaikan berbagai masalah konvensional seperti konflik militer dan perdagangan namun teknik penyelesaian masalah lingkungan internasional masih sangat terbatas. Dengan ketiga kritik tersebut, Princen menyimpulkan bahwa *top-down approach* ini tidak mampu memenuhi kebutuhan lokal. Dibutuhkan sebuah inovasi institusi untuk mendekatkan antara negara dengan masyarakat.

Lalu bagaimana dengan *bottom-up approaches*? Pendekatan ini menekankan pada kerjasama di dalam komunitas, pergerakan kelas bawah, partisipasi lokal dan proses pengambilan keputusan lokal. Tentu dengan menggunakan pendekatan ini, kebutuhan dan isu-isu lokal akan direspons dengan baik. Namun pertanyaan besarnya adalah bagaimana dengan masalah-masalah lingkungan yang dampaknya sangat luas dan bahkan melewati batas-batas negara. Dengan menggunakan institusi lokal penyelesaian masalah lingkungan akan menjadi sangat lambat karena tidak ada koherensi dan kerjasama antar komunitas yang dapat menjamin kesamaan mekanisme penyelesaian masalah lingkungan tersebut.

Apabila melihat kelebihan dan kelemahan masing-masing pendekatan maka otomatis akan terlintas di otak kita: bagaimana apabila menggabungkan kedua pendekatan di atas? Inilah yang dianalisa Princen dengan hipotesisnya mengatakan bahwa ornop lingkungan mampu menghubungkan kedua pendekatan ini. Princen yakin bahwa *World Wide Fund* dan berbagai ornop lingkungan lainnya dapat menjadi korps diplomat yang dapat bernegosiasi dengan lawan pihak mereka sekaligus membawa aspirasi kalangan masyarakat lokal. Ornop lingkungan dapat menjadi partner negara dan agen masyarakat lokal. Greenpeace akan mengidentifikasi masalah utama, menggalang dukungan masyarakat untuk melakukan protes, menggunakan media massa, berdialog dengan aparat penentu kebijakan dan setelah berhasil, menghilang.

Dalam kesimpulannya, Princen (1994) memberikan lima faktor penyebab ornop dapat dipercaya menjadi agen antara pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi isu-isu lingkungan. Pertama, kekuatan ekonomi yang dimiliki ornop. Begitu banyak ornop yang mampu mendanai berbagai proyek-proyek penyelamatan lingkungan dengan skala besar. WWF-AS memberikan kontribusi 12,9 juta Dollar AS untuk pelaksanaan 407 proyek lingkungan di 33 negara. Dari tahun 1980-an hingga tahun 1990-an WWF mendanai lebih dari 2.000 proyek lingkungan di seluruh dunia dengan total dana 62,5 juta Dollar AS. Masih banyak ornop lainnya yang memiliki kekuatan finansial sangat besar seperti Greenpeace, Great Lakes United (GLU), dll. Tentu bagi institusi negara dan masyarakat, proyek-proyek ini sangat berguna bagi mereka.

Kedua, kemampuan ornop untuk menarik perhatian media massa. Seperti ornop dalam bidang lainnya, media massa menjadi “tulang punggung” bagi aktivitas ornop. Greepeace dengan stasiun televisi lokalnya, WWF dengan keanggotaan internasionalnya akan mampu menjadi media publikasi efektif bagi kegiatan mereka. Ketiga, kemampuan ornop untuk menyediakan informasi dan pengetahuan *scientific* mengenai isu lingkungan yang digelutinya. Negara dan organisasi internasional belum tentu melakukan penelitian dan pengumpulan data secara rutin mengenai masalah-masalah lingkungan. Mereka akan melakukan tindakan diatas dalam kondisi krisis-reaktif.

Keempat, kemampuan ornop untuk memaksa aktor-aktor lingkungan memberikan transparansi data dan informasi. Dengan kemampuan ornop menyajikan informasi yang akurat dan komprehensif maka *information gap* yang biasanya sering menjadi hambatan akan berkurang. Masyarakat yang seringkali tidak mampu mengakses informasi kini dapat menerima informasi secara simetris. Klarifikasi dan respons terhadap pernyataan-pernyataan pejabat-pejabat pemerintah akan mempermudah proses transparansi data. Terakhir, hubungan antar bangsa yang dimiliki ornop. Cabang dan jaringan yang dimiliki ornop dapat menjangkau seluruh negara di dunia ini. Tanpa harus terganggu oleh masalah kedaulatan, ornop dapat terus menerima dan memberikan informasi keadaan kepada ornop lainnya di belahan dunia lainnya. Dari kelima faktor diatas maka bagi Princen menjadi sesuatu yang masuk akal apabila ornop kini memainkan peran dalam proses pengambilan keputusan isu-isu lingkungan.

Selain Princen, Keck dan Sikkink juga memikirkan mengenai kemunculan ornop dalam diplomasi lingkungan dengan menyatakan bahwa ornop memiliki empat kekuatan di dalam pelaksanaan agenda kampanyenya yaitu politik informasi, politik simbol, politik akuntabilitas dan politik daya tawar (Keck & Sikkink, 2002). Politik informasi adalah kemampuan ornop dalam menyebarkan informasi-informasi alternatif dan kritis yang selama ini termarginalisasikan oleh media-media utama. Selain itu, ornop menjadi pelaku dari sebuah fenomena yang menjadi simbol perjuangan dari ornop tersebut. Hal ini menjadi politik simbol. Kemenangan Al Gore dan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) pada tahun 2007 sebagai pemenang nobel perdamaian menjadi politik simbol bagi aktivis lingkungan khususnya perjuangan perlawanan perubahan iklim.

Politik daya tawar (*leverage politics*) berkenaan dengan jaringan ornop global yang disatukan di dalam memperkuat daya tawar ornop terhadap pemerintah. Strategi *boomerang pattern* merupakan turunan dari politik daya tawar ini dimana ornop beraliansi dengan ornop di negara lain untuk bernegosiasi dengan sebuah pemerintahan. Terakhir adalah politik

akuntabilitas. Ornop menggunakan informasi dan data yang diperoleh untuk mempertanyakan kinerja pemerintah dan negara di dalam menjalankan konstitusi dan undang-undang yang menjadi tanggung jawab dari pemerintah dan negara. Kontradiksi antara negara sebagai pelindung konstitusi dan pelanggar konstitusi menjadi “senjata” bagi ornop di dalam memperoleh dukungan dari masyarakat.

Setelah memahami mengapa ornop lingkungan dibutuhkan dalam diplomasi lingkungan, kini kita akan membahas lebih dalam lagi bagaimana ornop mempengaruhi diplomasi lingkungan itu sendiri. Kita akan menganalisa proses dari intervensi peran ornop dalam perundingan lingkungan internasional. Dengan menggunakan tulisan Michele M. Betsill dan Elisabeth Corell dalam *NGO Influence in International Environmental Negotiations: A Framework for Analysis*, kita akan mengnerti terlebih dahulu definisi “pengaruh” dalam konteks peran ornop dalam kesepakatan internasional kemudian menetapkan kerangka analisa dalam keadaan apa dan bagaimana ornop memiliki pengaruh tersebut. Terakhir kita akan menemukan contoh-contoh sesuai dengan cara berpikir di atas.

Apakah ornop memiliki pengaruh dalam diplomasi lingkungan? Untuk menjawab pertanyaan diatas kita perlu menetapkan definisi pengaruh. Betsill dan Corell mengatakan begitu banyak definisi yang dihasilkan oleh para peneliti yang terlalu berlebihan dengan batasan yang tidak jelas sehingga terlihat mencari justifikasi untuk menyatakan pengaruh ornop besar (Betsill & Corell, 2001). Misalnya, mampu mengakses dalam proses negosiasi, bagi beberapa pakar, sudah merupakan bukti pengaruh yang dimiliki ornop atau sebuah ornop memiliki pengaruh apabila teks dalam perjanjian yang digunakan diusulkan oleh ornop tersebut. Kesimpangsiuran inilah yang menyebabkan Betsill dan Corell menganggap penting definisi dari “pengaruh” itu sendiri.

Dalam konteks negosiasi lingkungan internasional, Betsill dan Corell menggunakan definisi pengaruh sebagai berikut: *Influence can be said to have occurred “when one actor intentionally transmits information to another that alters the latter’s actions from what would have occurred without that information”*. Apabila melihat definisi ini maka terdapat dua komponen utama didalamnya. Pertama, adanya transmisi informasi yang secara disengaja dan kedua, adanya perubahan sikap akibat transmisi informasi tersebut. Dengan demikian, untuk mengatakan sebuah ornop memiliki pengaruh dalam diplomasi lingkungan tertentu maka penulis harus mengidentifikasi dua komponen utama diatas.

Betsill dan Corell menambahkan untuk mengidentifikasi dimensi pengaruh yang pertama, ada tidaknya transmisi informasi, kita dapat melihat data mengenai aktivitas yang

dilakukan ornop, aksesnya ke dalam negosiasi dan sumber daya yang dimiliki. Sedangkan perubahan sikap dalam dimensi kedua dapat dilihat pada hasil perjanjian tersebut. Contohnya, dalam *Convention to Combat Desertification* pada artikel 21 paragraf 1(d) direkomendasikan pembentukan *National Desertification Funds*, sebuah badan yang diusulkan oleh NGOs dalam perundingan tersebut. Informasi yang ditransmisikan juga dapat berupa teks yang digunakan dalam perjanjian. Istilah *hot air* dalam Protokol Kyoto merupakan jargon yang dipopulerkan oleh ornop lingkungan. Masih banyak bukti-bukti yang menunjukkan pengaruh ornop lingkungan dalam diplomasi internasional dengan menggunakan definisi Corell dan Betsill.

Untuk semakin menajamkan analisa mengenai pengaruh ornop dalam diplomasi lingkungan, Betsill dan Corell juga menawarkan dua cara untuk menganalisa pengaruh tersebut. Pertama, *process tracing*. Dengan metode ini, peneliti harus menelusuri partisipasi ornop dalam sebuah negosiasi lingkungan internasional. Apakah mereka berusaha menyediakan informasi-informasi mengenai masalah lingkungan kepada para negosiator? Apakah terjadi komunikasi antara negosiator dengan ornop? Pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting karena pengaruh hanya akan terjadi apabila ada komunikasi sehingga menghasilkan transmisi informasi. Contoh yang paling tepat adalah ketika bagaimana Greenpeace meyakinkan *Garber Corporation* bahwa produknya menggunakan rekayasa genetika yang membahayakan kesehatan manusia. Staf Greenpeace terus-menerus mengirim faksimile kepada Direktur perusahaan itu sendiri sehingga menimbulkan kontroversi dalam internal perusahaan itu sendiri sampai akhirnya mereka menstop produksi produk tersebut.

Cara yang kedua untuk menganalisa pengaruh ornop dalam diplomasi lingkungan adalah dengan *counterfactual analysis*. Metode ini menggunakan konstruksi imajinasi dengan membayangkan apa yang akan dihasilkan oleh sebuah diplomasi lingkungan apabila ornop absen. Apakah kira-kira hasilnya akan sama atau berbeda? Apabila kita memprediksi hasil yang berbeda maka pengaruh ornop memang ada tinggal mengukur seberapa signifikan pengaruh tersebut. Bagaimana apabila Greenpeace tidak mengirimkan surat terus-menerus kepada *Garber Corporation* bahwa produk mereka terkontaminasi oleh *Genetic Modified Food*? Rangkuman dari tulisan Betsill dan Corell di atas mengenai analisa pengaruh ornop dalam diplomasi lingkungan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1

Kerangka Analisa Pengaruh Ornop dalam Diplomasi Lingkungan

	Research task: Gather evidence of NGO Influence (2 dimensions)	
by:	1) Intentional transmission of information	2) Behaviour of other actors
Data type	<i>NGO Participation</i>	<i>Goal attainment</i>
	<i>Activities:</i>	<i>Outcome:</i>
	What did NGOs do to transmit information to decision makers?	Does the final agreement contain text drafted by NGOs?
	<i>Access:</i>	Does the final agreement reflect NGO goals and principles?
	What opportunities did NGOs have to transmit information?	<i>Process:</i>
	<i>Resources:</i>	Did negotiators discuss issues proposed by NGOs (or cease to discuss issues opposed by NGOs)?
	What sources of leverage did NGOs use to transmit information?	Did NGOs coin terms that became part of the negotiation jargon?
Data source	<p>Primary texts (e.g. draft decisions, country position statements, the final agreement, NGO lobbying materials)</p> <p>Secondary texts (e.g. BCO, Earth negotiation bulletin, media reports, press release)</p> <p>Interviews (government delegates, observers, NGOs)</p> <p>Researcher observation during negotiations</p>	
Research task: Analyze Evidence of NGO Influence		

Methodology	<i>Process tracing</i>	<i>Counterfactual analysis</i>
	What were the causal mechanism linking NGO participation in international environmental negotiations with their influence?	What would have happened if NGOs had not participated in the negotiations?

Sumber: (Betsill & Corell, 2001)

Keempat tulisan dalam penelitian ini memberikan informasi yang mendalam mengenai aksi ornop dalam negosiasi lingkungan internasional. Lorainne Elliot membuktikan bahwa ornop lingkungan kini sudah menghiasi panggung politik lingkungan internasional dilihat dari segi kuantitas dan kualitas. Thomas Princen menjelaskan mengapa ornop lingkungan kini merambah sangat pesat dalam berbagai kesepakatan lingkungan internasional dengan pendekatan yang dilakukan ornop yang dipercaya mampu menggabungkan *top-down approach* dengan *bottom-up approach*. Terakhir, Betsill dan Corell menawarkan sebuah metode analisa baru bagaimana melihat intervensi dalam perundingan lingkungan internasional.

Di dalam pengembangan teori, konflik pemikiran menjadi titik awal yang menyenangkan bagi para pemikir teori. Perdebatan yang terjadi memberikan spektrum argumentasi yang luas yang dapat dipilih dan diseleksi oleh para pemikir tersebut untuk dijadikan sebagai dasar konstruksi pengembangan teori. Andrew Hurrell sebaliknya mengabaikan perdebatan pemikiran dan fokus ke dalam pengembangan teori menggunakan berbagai studi kasus dan tinjauan kritis. Andrew Hurrell adalah salah seorang pemikir English School yang mengembangkan teori English School secara komprehensif dan multi-disiplin.

Pemikir English School lainnya seperti Barry Buzan, John William dan Matthew Wienert mengembangkan English School dengan fokus kepada perdebatan antara pluralisme dan solidarisme. Pluralisme dan solidarisme dibenturkan dengan harapan terjadinya reformulasi konsep-konsep utama dalam kajian isu-isu lingkungan hidup dalam Hubungan Internasional. Wienert (2011) menggunakan perdebatan terkait *human security* sebagai *theoretical analogue* dari perdebatan pluralisme dan solidarisme. Bagi Wienert, *human security* dapat dilihat sebagai konsep pendukung dari pluralisme yang menekankan kedaulatan negara dan juga solidarisme yang membalikkan peran negara dengan peran masyarakat sipil. Dari hasil dekonstruksi *human*

security tersebut, Wienert menghasilkan tipologi baru yaitu pluralisme kuat dan lemah serta solidarisme kuat dan lemah. Benturan antara pluralisme dan solidarisme menghasilkan tipologi baru.

Berbeda dengan Wienert, John William tidak berusaha menghasilkan tipologi baru. Benturan antara pluralisme dan solidarisme digunakan oleh William untuk menunjukkan sebuah proses perubahan bersifat jangka panjang. William (2005) tidak setuju bahwa saat ini masyarakat internasional sudah mengalami transformasi dari pluralisme ke solidarisme. Perubahan dari pluralisme dan solidarisme membutuhkan jangka waktu yang panjang. Kegagalan negara di dalam mengatasi masalah-masalah global tidak serta merta mendorong transformasi pemikiran. Etika pluralisme masih dibutuhkan dalam tatanan masyarakat internasional. Pertentangan pluralisme dan solidarisme, bagi William, menghasilkan pemikiran-pemikiran baru terkait argumentasi filosofis dan kritis yang selama ini termajinalisasikan dan terpinggirkan dalam konstruksi teori Hubungan Internasional.

Andrew Hurrell menempati posisi unik dalam peta pemikiran English School. Pertentangan solidarisme dan pluralisme tidak menjadi alat untuk menghasilkan tipologi dan pemikiran kritis. Di dalam bukunya bab ketiga, Hurrell begitu fokus mengelaborasi konsep hukum internasional, peran negara, konsep kepentingan, identitas, dan kekuatan tanpa membandingkan antara pluralisme dan solidarisme. Sebagai contoh, ketika Hurrell membahas mengenai konsep kekuatan, Hurrell menunjukkan transformasi definisi kekuatan dari penggunaan kekerasan menjadi kekuatan lunak untuk mendukung program kerja dari organisasi non-pemerintah. Tanpa ada perubahan makna terhadap kekuatan, ornop tidak dapat memiliki ruang yang tidak terbatas di dalam mengimplementasikan ide-ide baru dalam struktur tatanan internasional. Kemudian Hurrell menunjukkan berbagai studi kasus seperti liberalisasi ekonomi pada tahun 1980an dan 1990an untuk mendukung sinkronisasi makna kekuatan terhadap kemunculan ornop lingkungan.

Tidak tampak perdebatan antara pluralis dan solidaris dalam menjelaskan makna kekuatan ini tetapi Hurrell berhasil menjelaskan kembali dan memberikan makna baru terhadap pemikiran solidarisme. Lantas, bagaimana menjelaskan posisi Andrew Hurrell ini? Salah satu perbedaan yang tampak mencolok dari Andrew Hurrell dari pemikir-pemikir English School lainnya adalah penggunaan studi kasus yang beragam baik dari dimensi aktor, waktu, dan tempat. Hurrell tidak segan-segan untuk pindah dari studi kasus yang satu ke studi kasus lainnya untuk mengelaborasi pemikiran kuncinya. Peneliti mencatat terdapat lebih dari 18 studi kasus yang digunakan Hurrell untuk mendukung pemikirannya. Hal ini menjadi strategi Hurrell untuk

mencegah kompleksitas masalah dalam sebuah studi kasus dan mengundang analisis pluralis dan solidaris untuk berdebat.

Buzan, William dan Wienert fokus secara mendalam terhadap sebuah studi sehingga memunculkan sebuah kompleksitas isu. Sebagai contoh, Buzan menggunakan studi kasus Uni Eropa untuk memperlihatkan hegemoni pemikiran solidarisme dan menunjukkan kelemahan pemikiran pluralisme yang tidak mendukung pengembangan organisasi internasional. Dalam hal ini, konstruksi pengembangan English School yang dilakukan oleh Buzan mengundang oposisi baik dari pemikir solidaris dan pluralis. William merespons argumentasi Buzan dengan menulis buku *Ethics, Diversity and World Politics* dan membangun argumentasi pluralisme anti-thesis terhadap pemikiran Buzan.

Inisiatif Hurrell ini dapat dijelaskan dengan menggunakan teori *methodological pluralism*. Teori ini menekankan kepada sejarah yang bersifat komprehensif dan lengkap. Loncatan-loncatan waktu dimungkinkan untuk menangkap keseluruhan ide dan konsep. Little (2009) mengatakan bahwa *methodological pluralism* memberikan kebebasan kepada peneliti untuk mengeksplorasi konsep-konsep yang saling bersaing dan berlawanan di dalam membangun sebuah konstruksi teori. Kebebasan tersebut tertuang dalam diskursus yang terbentuk dan dipublikasikan serta memperoleh respons dari komunitas akademik. *English School* menggunakan *methodological pluralism* yang memungkinkan Hurrell untuk menjelajahi ruang dan waktu di dalam pengembangan pluralisme atau solidarisme.

Sebagai kesimpulan, penelusuran signifikansi pengaruh ornop dalam diplomasi lingkungan memperlihatkan *theoretical analogue* dengan implementasi *methodological pluralism* dalam teori *English School*. Intervensi ornop dalam diplomasi lingkungan tidak serta merta merusak peran negara dalam diplomasi lingkungan. Rivalitas antara ornop dan negara tidak terlihat dalam berbagai kasus perundingan lingkungan internasional. Kemunculan peran ornop di berbagai kasus menunjukkan kekhasan dari ornop yang bersinergi dengan peran negara.

Theoretical analogue muncul ketika Andrew Hurrell mengembangkan pemikiran solidarisme yang mendukung signifikansi pengaruh ornop dalam diplomasi lingkungan. Menariknya, Hurrell tidak membandingkan antara solidarisme dengan anti-thesisnya yaitu pluralisme. Hurrell mengembangkan pemikiran solidarisme dengan penggunaan berbagai kasus yang memiliki perbedaan dimensi aktor, waktu dan tempat.

DAFTAR PUSTAKA

Betsill, M. M., & Corell, E. (2001). NGO Influence in International Environmental Negotiations: A Framework for Analysis. *Global Environmental Politics*, 65-85.

Elliot, L. (2004). *The Global Politics of the Environment*. New York: Palgrave MacMillan.

Hurrell, A. (2007). *On Global Order: Power, Values and the Constitution of International Society*. Oxford: Oxford University Press.

Keck, M. E., & Sikkink, K. (2002). Transnational advocacy networks in international and regional politics. *International Social Science Journal*, 89-101.

Little, R. (2009). History, Theory and Methodological Pluralism in the English School . In C. Navari (Ed.), *Theorising International Society: English School Method* (pp. 78-103). New York: Palgrave Macmillan.

Princen, T. (1994). Creating a Niche in Environmental Diplomacy. In T. Princen, & M. Finger, *Environmental NGOs in World Politics: Linking the Local and the Global* (pp. 29-47). London: Routledge.

Wienert, M. S. (2011). Reframing the Pluralist - Solidarist Debate. *Millenium - Journal of International Studies*, 21-41.

William, J. (2005). Pluralism, Solidarism and the Emergence of World Society in English School Theory. *International Relations*, 19-38.

William, J. (2015). *Ethics, Diversity and World Politics*. Oxford: Oxford University Press.

Collaborative Governance Dalam Kebijakan Investasi Di Kawasan Free Trade Zone Bintan

Ady Muzwardi, Gloria Yolanda Yahya, Oksep Adhayanto

Universitas Maritim Raja Ali Haji

ady.muz16@gmail.com; gloryyolanda@gmail.com

Abstract

Penelitian ini dilakukan dalam rangka melihat bagaimana hubungan antara pemerintah dalam pengelolaan Free Trade Zone Bintan desain organisasi dalam pengelolaan Free Trade Zone sangat dipengaruhi oleh kompleksitas dan besarnya organisasi yang tergambarkan dalam struktur organisasi yang meliputi organisasi formal, hubungan vertikal dan horizontal dan penetapan bagan struktur organisasi, ketiga indikator tersebut akan sesuai dengan dengan aspek-aspek dalam desain organisasi dalam pengembangan investasi. Aspek kebijakan pembagian kerja termasuk dalam aspek organisasi formal. Aspek koordinasi termasuk dalam aspek hubungan vertikal dan horizontal. Sedangkan aspek pelimpahan wewenang tercakup dalam aspek penetapan bagan struktur organisasi.

Data penelitian ini terdiri dari data primer/langsung berupa data hasil observasi dan data wawancara. Hasil analisa dipaparkan dengan teknik deskriptif kualitatif guna menggambarkan kualitas collaborative governance dalam pengelolaan Free Trade Zone Bintan.

Keywords: , *collaborative governance, Free Trade Zone, Bintan.*

Pendahuluan

Perkembangan paradigma baru pemerintah daerah yang menitikberatkan pada pelayanan masyarakat termasuk diantaranya untuk mengidentifikasi kebutuhan investor sebagai langkah dalam meningkatkan pertumbuhan investasi di era kompetisi global dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. pemerintah sebagai lembaga Negara bukan hanya berfungsi sebagai pengatur tetapi juga sebagai penyedia layanan. Denhardt & Denhardt (2003) menyatakan:

“Government shouldn’t be run like a business; it should be run like a democracy. Across this country and around the world, both elected and appointed public servants are acting on this principle and expressing renewed commitment to such ideal as the public interest, the governance process and expanding democratic citizenship. Administrators are realizing that the have much gain by “listening” to the public rather than “telling” and by “serving” rather than “steering”

Melihat persaingan dalam perebutan FDI (Foreign Direct Investment), pemerintah menyesuaikan fungsinya dengan perubahan lingkungan di dunia internasional dengan mengutamakan pelayanan publik. Paradigma pemerintah yang berorientasi pada pengembangan investasi di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Pelayanan bidang investasi merupakan pelayanan strategis yang dilakukan pemerintah. Kedudukan pelayanan bidang invsetasi khususnya perizinan dan non perizinan sangat strategis karena merupakan kunci pengembangan pertumbuhan ekonomi.

kegagalan dalam pengelolaannya dapat berdampak pada kegagalan pengembangan investasi secara keseluruhan.

Secara politis rencana pemerintah dalam pengembangan investasi tertuang dalam dari pasal 33 ayat 4 yang menyatakan perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dan kesatuan. Berdasarkan UUD 1945 tersebut pemerintah mempercepat pembangunan ekonomi nasional dengan peningkatan penanaman modal yang di antara lain dengan adanya peningkatan penanaman modal di wilayah tertentu untuk menarik potensi pasar internasional dan sebagai daya dorong guna meningkatkan daya tarik pertumbuhan suatu kawasan atau wilayah ekonomi khusus yang bersifat strategis bagi pengembangan perekonomian nasional salah satu instrument peningkatan penanaman modal adalah kebijakan free trade zone (FTZ), FTZ adalah pelayanan investasi untuk menarik investor sebanyak-banyaknya melalui insentif free tax untuk impor. Namun faktual realita menunjukkan pengelolaan pengembangan investasi di Indonesia belum optimal. Dikarenakan lemahnya collaborative governance.

LITERATURE REVIEW

a. Collaborative governance

Terdapat Salah satu teori yang bisa digunakan untuk melihat bagaimanakah sebetulnya hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dalam pengelolaan kawasan free trade zone adalah teori collaborative governance atau kerjasama dalam menjalankan tata kelola pemerintahan. Emerson (2011) mendefinisikannya sebagai proses dan struktur dari pengambilan kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan dengan melibatkan masyarakat, swasta, dan NGOs dari berbagai institusi dan level yang ada untuk menentukan tujuan bersama yang sulit untuk bisa dirumuskan sendiri. Sementara Mc Guire (2006) menjelaskan bahwa collaborative governance adalah konsep di dalam manajemen pemerintahan sebagai proses fasilitasi dan pelaksanaan oleh berbagai institusi baik pemerintah, masyarakat, maupun NGOs yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah bersama yang tidak bisa diselesaikan oleh satu institusi pemerintah saja.

Paradigma lain tentang collaborative governance dikemukakan oleh John Wanna (2008), yang mendefinisikan bahwa kerjasama memiliki makna bekerjasama atau bekerja bersama-sama dengan pihak lain, baik sifatnya individu, kelompok, maupun organisasi. Dengan merujuk pada Wildavsky (1973) dan Wanna (2008) mengemukakan bahwa kerjasama

mencakup beberapa dimensi: Pertama, mencakup cooperation untuk membangun kebersamaan, meningkatkan konsistensi, dan meluruskan aktivitas antar aktor. Kedua, kerjasama bisa juga merupakan sebagai proses negosiasi, yang mencakup suatu persiapan untuk berkompromi dan membuat kesepakatan. Ketiga, bisa juga merupakan bentuk antisipasi bersama melalui serangkaian aturan terhadap kemungkinan kekeliruan yang akan terjadi. Keempat, kerjasama juga bisa merupakan kekuasaan dan paksaan, kemampuan untuk mendorong hasil. Kelima, kerjasama mencakup komitmen masa depan dan intensitasnya, perencanaan atau persiapan untuk meluruskan aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan. Dan yang terakhir, kerjasama mencakup keterlibatan, proses pengembangan motivasi internal dan komitmen personal terhadap proyek yang akan dikerjakan.

Perspektif lainnya dikemukakan oleh Chris Ansell dan Alison Gash (2008) yang mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan collaborative governance adalah sebuah tata kelola pemerintahan dimana institusi-institusi pemerintahan secara langsung melibatkan aktor di luar pemerintah (baik masyarakat/komunitas, NGOs, dan private sector) di dalam proses pengambilan keputusan secara formal, yang berorientasi pada kepentingan bersama. Tujuannya adalah untuk melaksanakan kebijakan dan mengelola program dan sumber daya secara bersama. Dari perspektif ini menurut Ansell dan Gash (2008) ada beberapa kata kunci penting yang harus dicatat yaitu: (1) kerjasama diinisiasi oleh institusi pemerintahan, (2) adanya keterlibatan aktor non-pemerintah, (3) seluruh aktor terlibat dalam proses pengambilan kebijakan, (4) forum kerjasama diorganisir dan dirancang secara bersama, (5) tujuan dari forum kerjasama adalah untuk membuat keputusan bersama-sama, dan (6) fokus dari kerjasama adalah dalam pengemabihan kebijakan dan tatakelola pemerintahan.

Dengan menggunakan istilah yang berbeda yaitu cross-sector collaboration, John M Bryson dan Barbara C. Crosby (2006; 2012) mendefinisikan kerjasama sebagai proses sharing informasi, resources, aktivitas dan kapabilitas yang dilakukan oleh berbagai organisasi di dalam satu atau beberapa sektor untuk mendapatkan hasil yang diinginkan yang tidak bisa didapatkan apabila hanya dilakukan oleh organisasi-organisasi yang berada pada satu sektor saja. Bryson dan Corby menegaskan bahwa penggunaan istilah cross-sector collaboration untuk menunjukkan adanya keterlibatan pihak pemerintah, business, nonprofit, lembaga charity, komunitas, dan institusi-institusi publik lainnya secara keseluruhan.

Model lainnya dikembangkan oleh Ansell dan Gash (2008) yang terdiri dari dua tahapan yaitu starting condition, facilitative leadership, institutional design, collaborative process. Di dalam starting condition yaitu tahapan fasilitasi kerjasama di antara stakeholder yang ada. Ada

dua issue penting dalam tahapan ini yaitu ketidakseimbangan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing stakeholders dan insentive supaya berpartisipasi. Apabila sumberdaya dan kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing stakeholder tidak seimbang, maka kerjasama akan dimanipulasi oleh stakeholders yang memiliki sumberdaya dan kekuatan banyak. Oleh karenanya jika hal itu terjadi, maka mesti ada komitmen untuk membantu stakeholders yang lemah. Hal lainnya yang tidak kalah penting adalah keharusan adanya insentive supaya stakeholders yang lemah bisa gigih bergabung untuk bekerjasama. Dan terakhir mesti adanya antisipasi terhadap terjadinya konflik di dalam kerjasama sehingga di awal harus dibangun rasa percaya antar satu dengan yang lain.

Model lainnya adalah model yang cukup terkenal yang dipopulerkan John M Bryson dan Barbara C. Crosby (2006) dengan istilah *cross-sector collaboration*. Dan di dalam buku ini, teori tersebut akan digunakan khususnya di dalam tahapan proses. Dimana *collaborative governance* terdiri dari *initial condition, structure and governance, process, contingencies and constraints, outcomes dan accountabilities*. Fokus dari buku ini akan mengeksplorasi dari sisi prosesnya yang terdiri dari; (1) *forging agreements* yang merupakan kesepakatan bersama seluruh stakeholders untuk melakukan kerjasama, (2) *building leadership* yaitu perlu adanya kepemimpinan baik formal maupun informal sebagai komite atau manajer dari kerjasama tersebut, (3) *building legitimacy* dimana pentingnya membangun legitimasi dengan adanya struktur, proses, dan strategi yang relevan dengan keadaan di sekitarnya, (4) *building trust* yaitu membangun kepercayaan antar stakeholders yang bekerjasama dan ini sifatnya sangat penting sekali di dalam *collaborative governance*, (5) *managing conflict* yaitu mengelola konflik yang ada mengingat besarnya kepentingan yang muncul dari masing-masing stakeholders yang terlibat di dalam kerjasama, dan (6) *planning* tahapan yang sangat penting di dalam menentukan visi, misi, tujuan, tahapan, pelaksanaan, keterlibatan dan peran dari masing-masing stakeholders, sehingga *planning* ini sangat menentukan keberhasilan dari kerjasama..

b. Free Trade Zone

Free Trade Zone merupakan pengembangan konsep *Special Economic Zone (SEZ)*, dimana SEZ (*Kawasan Ekonomi Khusus /KEK*) sebagai sebuah terminologi makro untuk kawasan yang ditetapkan untuk menyediakan lingkungan yang secara internasional kompetitif serta bebas dari berbagai hambatan berusaha dalam rangka memacu peningkatan ekspor nasional. Konsep ini dapat ditemukan di negara India dan Filipina. Di India dikenal tiga jenis umum *Special Economic Zone (SEZ)* meliputi : (a) *SEZ for multiproduct*, yaitu SEZ yang terdiri dari sejumlah perusahaan yang tergolong dalam lebih dari satu sektor, yang didalamnya

juga terdapat kegiatan perdagangan dan pergudangan; (b) SEZ for specific sector, yaitu SEZ bagi satu sektor tertentu saja (bisa lebih dari satu perusahaan) atau SEZ untuk berbagai pelayanan satu sektor, seperti dalam pelabuhan atau bandar udara; dan (c) SEZ for Free Trade and Warehouse yaitu SEZ yang secara khusus menyediakan pelayanan fasilitas kegiatan perdagangan bebas dan pergudangan, fasilitasnya bisa untuk kegiatan yang multi sektor maupun untuk satu sektor tertentu saja. Di Filipina, kawasan-kawasan semacam ini dapat berbentuk Industrial Estates (IES), Export Processing Zones (EPZs), Free Trade Zone, dan Tourist/Recreational Centers (Muzwardi, 2017).

SEZ sebagai sebuah model untuk menyebutkan kawasan dengan kebijakan ekonomi terbuka yang didalamnya mencakup Free Trade Zone (FTZ), Export Processing Zone (EPZ), pelabuhan (Port), High Tech Industrial Estate dan lain sebagainya atau dikenal dengan sebutan zones within zone. Konsepsi ini memberikan otoritas kepada badan pelaksana untuk mengoperasikan SEZ secara penuh atas mandat dari pemerintah pusat.

SEZ merupakan konsep pengembangan kawasan ekonomi ataupun kawasan strategis nasional yang pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan (Pusat Kajian Strategis PU, 2012), pembangunan dan perekonomian wilayah agar terjadi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.”

Penggunaan konsep Free Trade Zone merupakan pengembangan dari SEZ (Kawasan Ekonomi Khusus /KEK) dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi. adalah usaha pengembangan tata kelola pemerintahan dengan memanfaatkan semua potensi yang ada. Pengembangan Free Trade Zone bertujuan untuk mempercepat perkembangan daerah dan sebagai model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain industri, pariwisata, dan perdagangan sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Free trade zone merupakan konsep yang lahir dari tujuan negara-negara untuk mengejar kesuksesan melalui penggunaan kawasan bebas yang bersifat tetap dan terus menerus.

RESEARCH METHOD

Lokasi dan waktu penelitian

Adapun lokasi penelitian adalah di Dewan Kawasan Bintan, Badan Pengusahaan Bintan. Subjek penelitian yang terlibat adalah stakeholders di dua lembaga tersebut. Waktu penelitian April-Oktober 2018.

a. Teknik Analisis Data

Data berupa perangkat wawancara diperoleh melalui dengan instrument lembar wawancara Data tersebut dinilai menggunakan lembar wawancara berisi indikator-indikator kualitas collaborative governance yang lebih akurat dan reliable. Hasil analisis dipaparkan dengan teknik deskriptif kualitatif. Untuk menambah keakuratan peneliti melakukan wawancara. Data hasil wawancara yang bersifat verifikatif dan suplementif dipaparkan untuk melengkapi hasil analisis kualitas perangkat sebelumnya.

b. Penafsiran dan Kesimpulan Penelitian

Hasil olahan dan analisis collaborative governance terhadap data perangkat ditafsirkan oleh kedua peneliti untuk menekan subjektifitas dan di saat yang sama untuk mengkatkan keabsahan penafsiran. Teknik yan sama dilakukan dalam proses penyimpulan penelitian.

RESULTS AND DISCUSSION

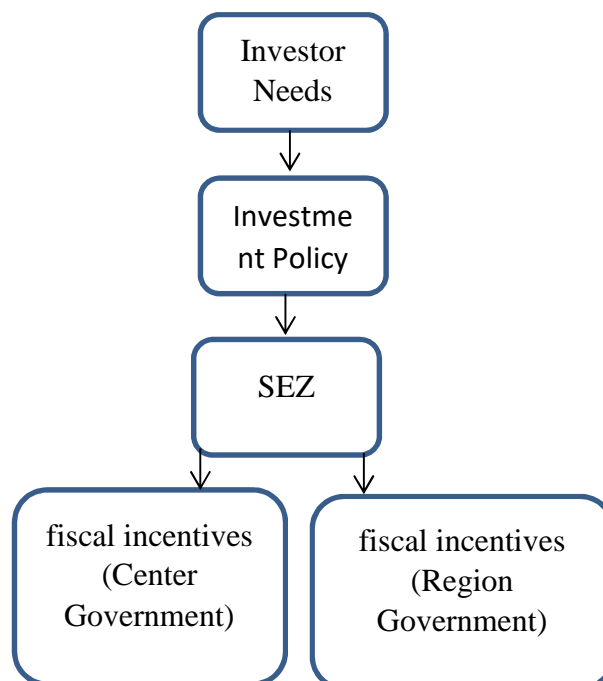
a. Governance Structure

Dalam pengelolaan Free Trade Zone Bintan pemerintah pusat membentuk Dewan Kawasan Bintan, Bintan Karimun dibawah Dewan Kawasan Nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 dengan Struktur Organisasi: diKetuai oleh Gubernur Kepulauan Riau dengan Wakil Ketua I Bupati Bintan dan Wakil Ketua II Walikota Tanjung Pinang serta Anggota dari unsur Pimpinan Dirjen Bea dan Cukai Kepri. Dirjen Pajak Kepri, Kanwil Kemenkumham Kepri, Kanwil BPN Kepri, Polda Kepri, Kejati Kepri, Lantamal IV, Guskamlabar: Korem 033/Wirapratama.

Didalam struktur organisasi ada Walikota Tanjungpinang sebagai anggota, hal inilah yang berbeda dengan Dewan Kawasan Batam dan Dewan Kawasan Karimun. Masuknya Walikota Tanjungpinang kedalam Dewan Kawasan Bintan dikarenakan sebagian wilayah Tanjungpinang Masuk kedalam wilayah Free Trade Zone Bintan. Dalam pengembangan Bintan, Dewan Kawasan Bintan membuat blue print pengembangan dalam Rencana Strategis Kawasan Bintan, melalui pembuatan rencana pengembangan secara efektif dan efisien.

Dalam pembuatan kebijakan umum. Dewan Kawasan Bintan melakukan pembicaraan/konsultasi dengan Badan Pengusahaan Bintan untuk merespon tuntutan stakeholders yakni dengan membuat kebijakan-kebijakan strategis dan mendasar terhadap pembangunan dan pengembangan Bintan. seperti kebijakan tentang perijinan bagi investasi yang ramping. Dewan Kawasan Bintan dibawah Dewan Kawasan Nasional dalam pelaksanaan fungsinya. Kerangka investasi di daerah Free Trade Zone Bintan dibangun oleh Dewan Kawasan Nasional dalam kebijakan investasinya termasuk promosi investasinya.

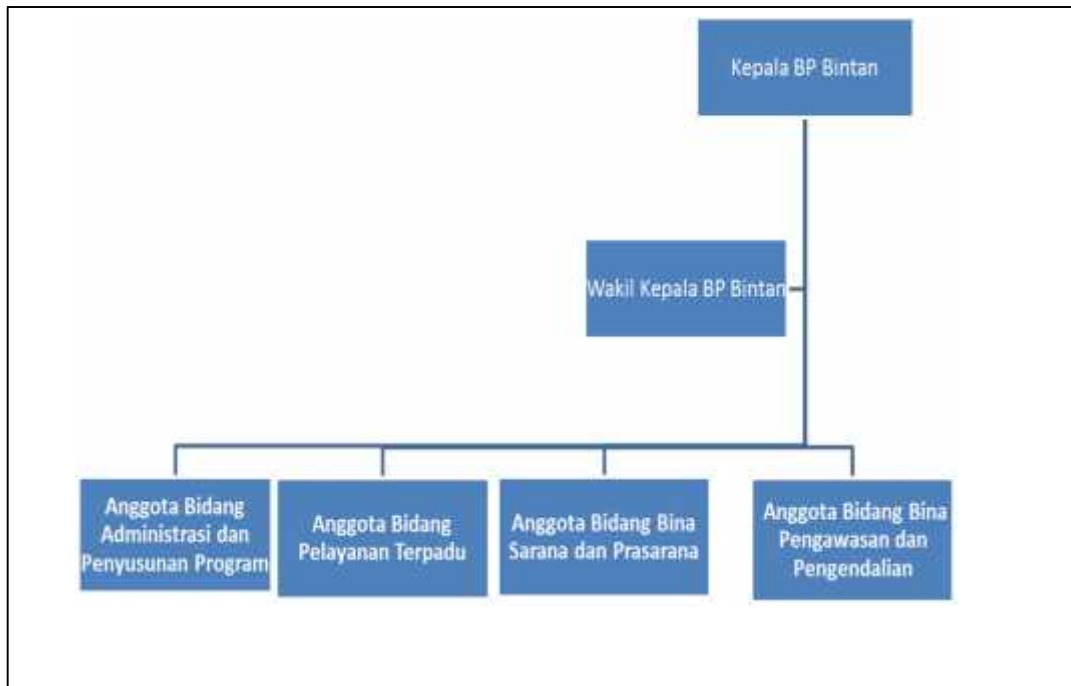
Gambar 1.
Investment Policy Framework



Sumber: diolah dari berbagai data

Untuk melaksanakan kebijakan Dewan Kawasan Bintan maka dibentuklah Badan Pengusahaan Bintan. BP. Bintan merupakan Badan Pengusahaan yang bertugas sebagai Penyelenggaraan pengembangan Kawasan Bintan sebagai kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas sesuai kewenangannya. Sasaran kerja BP Bintan adalah membuat landasan hukum bagi pembangunan dan investasi di Kawasan PBPB Bintan membuat arahan kebijakan dan strategi pembangunan Kawasan PBPB Bintan dengan menyusun program dan membuat pedoman dan skala prioritas pembangunan dan investasi di Kawasan Bintan.

Gambar 2.
Struktur Organisasi Badan Pengusahaan Bintan



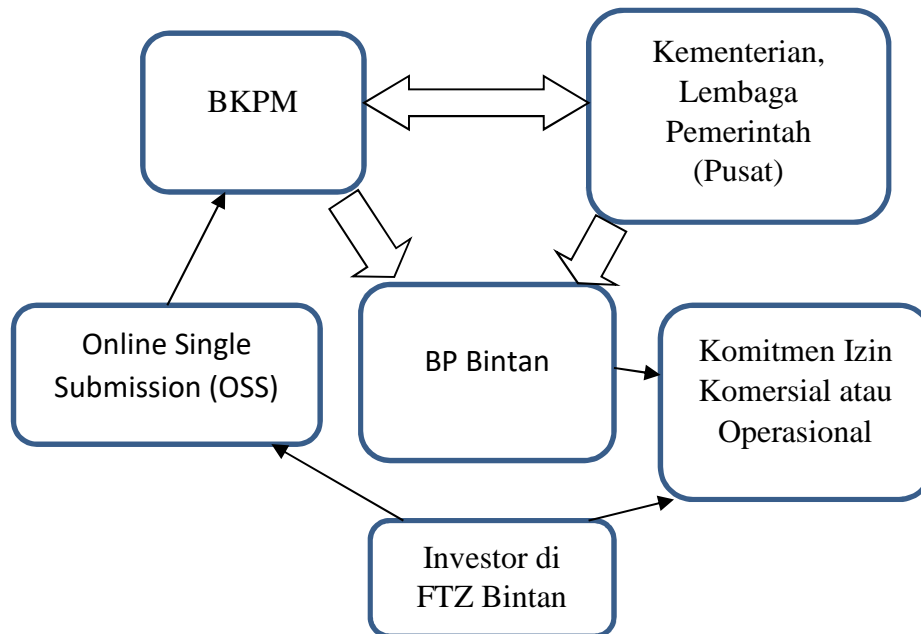
Sumber: bpbintan.go.id

b. Service Delivery Characteristics

Pelayanan investasi terhadap investor dilakukan oleh Badan Pengusahaan Bintang. BP Bintang mendapat pelimpahan wewenanga dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sehingga BP Bintang mendapat Tupoksi besar dalm bidang perizinan.

Gambar 2.

Mekanisme Pelayanan Investasi di FTZ Bintan



Sumber: diolah dari berbagai data

Pelayanan investasi dilakukan dengan koordinasi antara Kementrian/LK Pusat dengan BKPM, kewenangan dalam pelayanan investasi selanjutnya dilimpahkan oleh BKPM dan Kementrian/Lembaga pemerintah pusat ke Badan Pengusaha Bintan. Badan Pengusaha Bintan melayani Komitmen Izin Komersial atau Operasional dari Investor di Kawasan FTZ Bintan. Dalam pelaksanaan Online Single Submission (OSS), BP Bintan memfasilitasi investor dalam bentuk pembimbingan dan koordinasi sehingga sinkronisasi bisa terlaksana secara online.

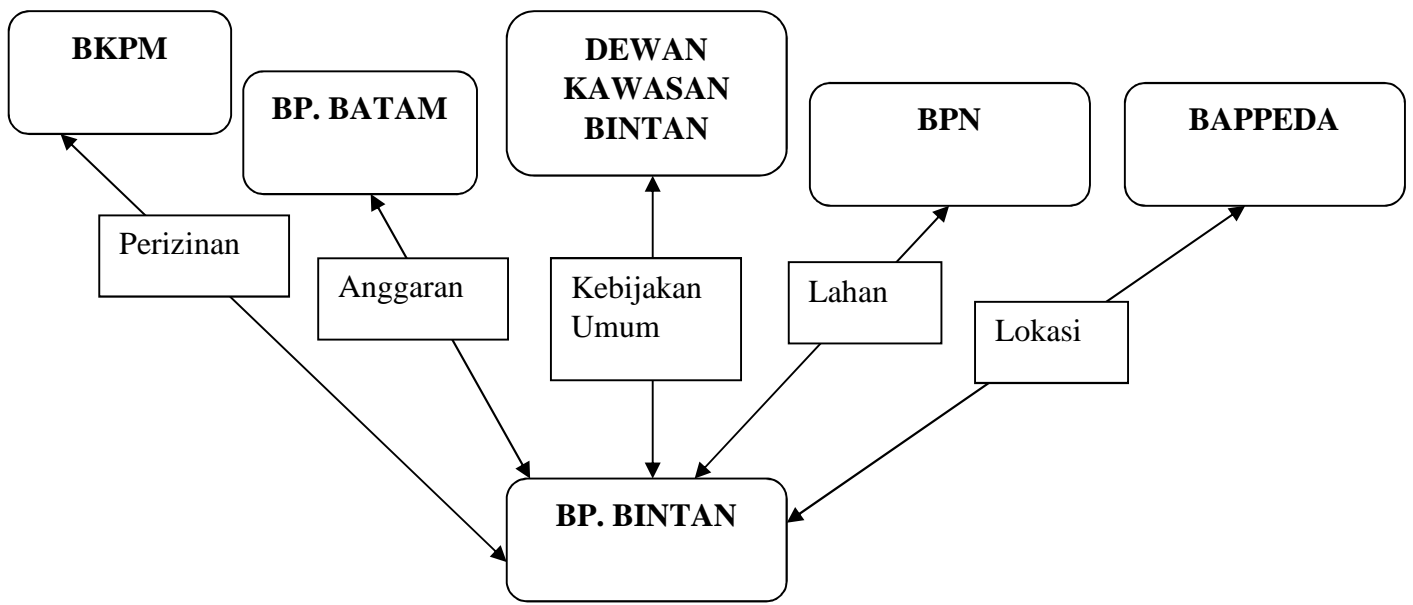
c. Operational Interactions

Dalam operasional Badan Pengusahaan Bintan melakukan interaksi dengan BP. Batam. Interaksi BP. Bintan dengan BP. Batam terjadi karena BP. Bintan merupakan Satker BP. Batam dan dalam bidang anggaran BP. Batam merupakan Kuasa Pengguna Anggaran dari BP. Bintan, anggaran yang dimaksud meliputi anggaran infrastruktur, belanja modal, dan perjalanan dinas. Untuk promosi investasi BP.Bintan menggunakan anggaran APBN. Dalam teknis operasional pelimpahan wewenang perizinan, BP.Bintan berkoordinasi dengan BKPM, dan dalam bidang kebijakan di kawasan FTZ, BP.Bintan berkoordinasi dengan Dewan

Kawasan Bintan. Dalam peruntukan dan perluasan lahan/lokasi BP.Bintan berkoordinasi dengan Bappeda Provinsi Kepulauan Riau dan Bappeda Kabupaten Bintan serta Badan Pertanahan Nasional Provinsi.Kepulauan Riau.

Gambar 4.

Interaksi Operasional dalam FTZ Bintan



Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Kesimpulan.

Kesimpulan dalam analisa Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Kawasan Free Trade Zone Bintan meliputi :

1. Secara koordinasi hubungan antar organisasi harmonis secara vertikal dan harmonis secara horisontal. Rapat koordinasi dijadwalkan rutin secara lintas instansi dan perencanaan dari pemerintah pusat membuat terkoordinasi secara maksimal. BP.Bintan banyak melibatkan Pemerintah Kabupaten Bintan dan koordinasi dengan pimpinan provinsi.
2. Secara pelayanan investasi, BKPM telah melimpahkan wewenangnya ke BP.Bintan, dan dengan adanya OSS, pelayanan investasi lebih cepat, sehingga BP.Bintan hanya bertugas memberikan izin komitmen kepada investor.
3. Interaksi operasional dalam Kawasan FTZ Bintan terjadi berdasarkan kebutuhan dan tupoksi lembaga-lembaga yang terlibat dalam FTZ Bintan.

Daftar Pustaka

- Bryson, J. M., B. C. Crosby, M. M. Stone and E. Saunoi-Sandgren (2012). Dynamics of cross-sector collaboration: Minnesota's urban partnership agreement from start to finish.
- Bryson, J. M., B. C. Crosby and M. M. Stone (2006). "The design and implementation of Cross Sector collaborations: Propositions from the literature." *Public administration review*, 66 (s1): 44-55.
- Emerson, K. Nabatchi, T. Balogh, S. An Integrative Framework for Collaborative Governance. *The Journal of Public Administration Research and Theory* May 2, 2011.
- Mc Guire, M. Collaborative Public Management: Assessing What We Know and How We Know it. *Public Administration Review*, Vol. 66, Special Issue: Collaborative Public Management (Dec., 2006). Pp. 33-34
- O'Flynn, J. & Wanna, J. 2008. *Collaborative Government: Meanings, Dimensions, Drivers, and Outcomes*. ANU Press.
- Sutarto. Ansell, C. & Gash, A. Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory: J-PART*, Vol. 18, No. 4 (Oct., 2008), pp. 543-571
- Ady Muzwardi, (2017) *Free Trade Zone menuju Kawasan Ekonomi Khusus Di Batam, Bintan Dan Karimun*, Yogyakarta: Expert
- Agranoff, Robert. 2012. *Collaborating to Manage: A Primer for the Public Sector*, Georgetown University Press, USA.
- Akmal. 2006. Koordinasi Antar Instansi Terkait Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Daerah, Vol,1, *DEMOKRASI*.
- Graddy. 2009. Elizabeth Cross-Sectoral and Performance in Service Delivery, Vo,13, *International Review of Public Administration*.
- Park & Park. 2009. "Types Of Network Governance And Network Performance: Community Development Project Case", Vol, 13, *International Review of Public Administration*.
- Pusat Kajian Strategis PU. *Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum 2012*

Multinational Corporation's Social Responsibility: Case Study of Danone-Aqua's Corporate Social Responsibility (CSR) in Polanharjo District, Klaten Regency, 2012-2017

Bambang Wahyu Nugroho, Arsyta Dewi Mayasari Sindhutomo
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
bambangwn@umy.ac.id

Abstract

The presence of multinational corporation (MNC) in Indonesia often causes controversy and conflict, mainly related to the impact of its externality, such as social issue, environmental issue, et cetera. A solution offered by the government to guarantee the survival of MNC is by obliging it to apply for a Corporate Social Responsibility (CSR) program. This research tracks protest phenomenon by residents since the initial construction of Danone-Aqua's mineral water factory in Polanharjo district, Klaten regency, Central Java. Residents surround the company kept holding many protests although the factory had already operated and until this researched accomplished, the company remains to operate normally.

This research aims to explain the lesson learned from Aqua-Danone in responding to the residents' demand and the change of residents' perception related to the MNC, which makes Danone-Aqua is able operating normally. The initial hypothesis is that Danone-Aqua applies social empowerment strategy in its CSR program to react to residents' demand and change residents' perception about MNC.

Keywords: *Multinational corporation, externalities, social responsibility, social empowerment*

One of the consequences of the post-Soeharto Indonesian political and economic reform is decentralization of the foreign direct investment (FDI). It means the higher opportunity to the foreign corporations to more widespread to the local areas. In this case, the local authorities allow the multinational corporations (MNCs) to expand its direct investment and play a significant role as a catalyst for economic development.

As a developing country, indeed, Indonesia needs much direct investment, because there is a considerable number of human resources to recruit as well as natural resources to extract. The more opened and liberalized Indonesian economic system attract the MNCs to expand its business to Indonesia.

However, there are proponents of and opponents against the presence of MNCs along with its FDI. The pros and cons of the existence of large corporations in Indonesia sometimes become public attention because of the media exposure. There is an important issues indeed. Once the issues emerge, usually it is triggered by the gap between the MNCs-based factory's physical and economic high-profile and the much lower economic and social condition of the residents inhabited surrounding the factory. In order to solve the gap, Indonesia's government establishes 'Corporate Social Responsibilities' (CSR) program as an obligation for every corporation operated in Indonesia. The government releases the Law No. 25 of 2007 about

Investment (Undang-Undang Penanaman Modal) and Law No. 40 in 2007 about Companies Liability (Undang-Undang Perseroan Terbatas).

Conceptually, CSR means that every company must contribute to solving social issues by increasing economic condition, improving social life, and minimizing the negative impact on the environment. Although such contributions, for sure, mean significant expenses to the company, it will create more profit for the corporation and support social development in long-term (Fajar, 2013). The CSR activities have the significant roles and unseparated activities of a company to maintain the corporation's sustainability itself. To ensuring that the essential nature of the CSR works, the given companies must deliver a report about its CSR activities transparently to both the government and the society.

John Elkington in his book '*Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business*' (1998) stated that CSR has three main focus, called 3P, stands for profit, planet, and people. The short explanation of 3P is that a good corporation should never concern only to get profit, but also cares for environment sustainability (planet) and social welfare (people) (Azheri, Corporate Social Responsibility, dari Voluntary Menjadi Mandatory, 2012)

By the show-up advertisements of CSR, many people think that large corporations or multinational corporations apply the CSR program is an actualization of their social responsibility toward surrounding residents. In reality, most of them operate the CSR program just for the sake of image building for their expansion plan in the regions. It is indeed, difficult to understand that large corporations which mainly concern to profit interest, must design and launch unprofitable CSR activities. Moreover, the corporations in locals should possess a high commitment to assist local government in developing surrounding residents' living.

The case of Danone-Aqua Corp. in Polanharjo district, Klaten regency

Freshwater is one of many abundant natural resources in Indonesia. The sources of natural, healthy, and drinkable water springs are available in many places. One of them is Sigidang water spring in Polanharjo District, Klaten Regency, Central Java. Following the consumers' demand in the recent decades, freshwater might be a promising business opportunity for the corporations operating in 'packed drinking water' or in Bahasa *Indonesia* calls '*Air Minum Dalam Kemasan*' abbreviated to *AMDK*.

Danone, a French-based multinational corporation realizes the business opportunity in the drinking water field. It entered Indonesia's market in 1998 by acquiring Aqua Company which previously owned by Indonesian businessman, Tirta Utomo, and change its product's brand from Aqua to Danone-Aqua. The combination of the Danone's financial and strengths

and its advanced technology and the Aqua's longest experience in the Indonesian market, Danone-Aqua succeed to dominate the markets, not only in Indonesia but also in Southeast Asia. The brand 'Aqua' is a beyond trade-mark. Many people commonly call almost all brands of AMDK with 'Aqua' regardless of its original brand. The success story of the Danone-Aqua encouraged the corporation to keep expanding.

Emerging Issues after the Operational of Danone-Aqua in Polanharjo district, Klaten regency

In October 2002, Danone-Aqua expanded its 13th factory located in Wangen village in the district. The factory was inaugurated in 2003 and remain to operate until this research accomplished. The factory utilizes Sigedang water spring in Ponggok village in the district. Since its inauguration until around 2015 (almost 13 years consecutively), many residents from surrounding area frequently protested the operation of the factory and demanded to Danone-Aqua to stop operation. They rejected the utilization of Sigedang water spring as the primary source of the Danone-Aqua's AMDK.

Between 2002 and 2004, the residents, mainly peasants, rejected the operational of Danone-Aqua factory. The peasants united under so-called 'Klaten People Coalition for Justice' (KRAKED) conducted a mass march from Klaten town square to the Regional House of Representatives (DPRD) building. It is about 4 kilometers long march. They demanded the closure of the factory due to their worries of the decrease in the amount of water debit which disrupts the supply for agricultural and daily needs (Tempo, home: bisnis, 2004).

The peasants from districts of Polanharjo, Ceper, Pedan, Wonosari, Juwiring, Karanganom, and several other districts, protested that Danone-Aqua's tax payment worth IDR 3 million to the local government every year is too small and therefore, unfair. It could not afford the loss of much of freshwater which already taken from the residents by the corporation. They believe this had caused some cases of crop failure in the Regency. In fact, the company processes the freshwater around 30 to 40 m^{eter-cubic} per second which worth around IDR s3 to 4 billion as the corporate's profit per month. The calculations triggered the protesters to reject the further construction of the Danone-Aqua factory (Tempo, home: bisnis, 2004).

In 2012, even though the Danone-Aqua has responded the protests with CSR programme, the protest continued. At the time, the heads of villages in Polanharjo district rallied in front of the Danone-Aqua's factory in Wangen village. They protested the unfair distribution of the CSR program. The protesters claimed that only nearest villages could enjoy the program,

while the rest villages enjoyed nothing, though they had the same risk. The protesters also demanded fair employee recruitment from the residents. They also protested for the environmental impact of pollution spilled by the factory's machines. They called attention to the decrease of water debit for agricultural needs and lack of the factory's attention toward surrounding environment, and lack of transparency related to the retribution fee to the local government that should be allocated more to Polanharjo (Iskandar, 2012).

Between 2012 and 2013, some residents organized by the Alliance of the 'People Protests against Aqua' (Aliansi Masyarakat Gugat Aqua - AMGA) rallied to protest against the road damage caused by trucks belong to Danone-Aqua which passed-by. Following the issue, the Klaten Transportation Agency threatened to prohibit the truck which passed-by the road by conducting a road blockade. The agency's official said that one-year early warning has already passed, but the violation continues by the Danone-Aqua. For example, only trucks with maximum eight ton-loaded are allowed to pass through the '3C' class route, but most of the trucks belong to the Danone-Aqua were loaded up to 27 tons and passed-by the route without a firm control from the authority (Cara, 2014).

Not all protesters were anti-Danone-Aqua, however. The Alliance of People organized another conduct of protest rally for Aqua. They were called Aliansi Masyarakat Pendukung Aqua (AMPAQ). Unlike the AMGA, the AMPAQ believed that the presence of Danone-Aqua brought many benefits for surrounding residents. They also believed that AMGA had several personal interests against the factory's vision. This phenomenon had emerged horizontal conflict between residents of Klaten, especially in the surrounding area. (SoloposTV, 2014).

In 2015, dry-season reached its peak in the Regency. According to the residents, however, the amount of spring water decreased significantly after the operational of Danone-Aqua factory.

Polanharjo located near Delanggu district which is well-known as one of rice barn area. In 2015, when the dry-season reached its peak, the debit of the spring decreased significantly. Previously, the peasants remained able to cultivate their rice field even during the dry season. In the peak of 2015 dry-season, however, they were no longer be able to cultivate their rice fields during dry-season due to lack of water supply. On the downstream, the peasants depended on the only source of water for irrigation purpose. Residents' wells near the factory also dried, and they might buy water to meet their daily freshwater needs. These situation sparked protests from residents. Therefore, once again, their finger pointed to the Danone-Aqua. (Zain,

Collaboration Strategy dalam Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR): Studi Kasus Aqua Danone Klaten, 2015).

Danone's Policy at Regional to Multinational Levels related to CSR

Implementation

Policy formula related to the implementation of Danone-Aqua's CSR program at center level to regional level basically has Dual Commitment: Economic Success and Social Innovations. Implementation of these two commitments formed into CSR program that designed in particular ways purposed to maintain corporation's excellent reputation and to minimize the risk of emerging problems by protecting and maintaining expectations of multi-stakeholders, such as society, press, non-profit organizations, and government. The basic form of CSR owned by Danone-Aqua is social and environmental responsibilities. Environmental responsibility tends to the side of business sustainability, while social responsibility tends to the side of living harmoniously, started with obtaining permits to utilize natural resources in the region. So that no longer occurred protests, demonstrations, and demands from surrounding residents. The critical factor is the corporation's seriousness in handling residents' expectation.

The mandate from Danone-Aqua central management is that every factory has to assist and realize the sustainable development in the form of CSR. It begins with the Green Factory verification for every factory. The regulation stated that only State-Owned Enterprises (BUMN) is obliged to implement CSR. Danone as a private corporation is volunteering to implement CSR. In fact, of totally 22 Danone-Aqua factories in Indonesia, most of it is located in the remote areas. There, residents tend to have a different way of understanding that sometimes rejects the operation of large corporations for various negative reasons. To maintain the expectation of residents in remote areas, Danone-Aqua should design the CSR program not just for volunteering reason but for a mandatory reason, like did by BUMN.

Danone-Aqua's operational in Indonesia divided into three operational regionals and a head office in Jakarta. The regional one includes from Lampung to Aceh/ Sumatera. The regional two includes from Banten to West Java. Meanwhile, the regional 3 includes East Java, Central Java, Bali, and Manado. It means that Klaten includes in regional 3.

Danone-Aqua implements the same regulation and policy for CSR program called Aqua Lestari, in every operational regional in Indonesia. Each factory/ corporation obliges to obey all of the applied regulations and policies. They also authorized for making innovation of CSR

program. Central management should verify the new program before being implemented for residents surrounding the corporation.

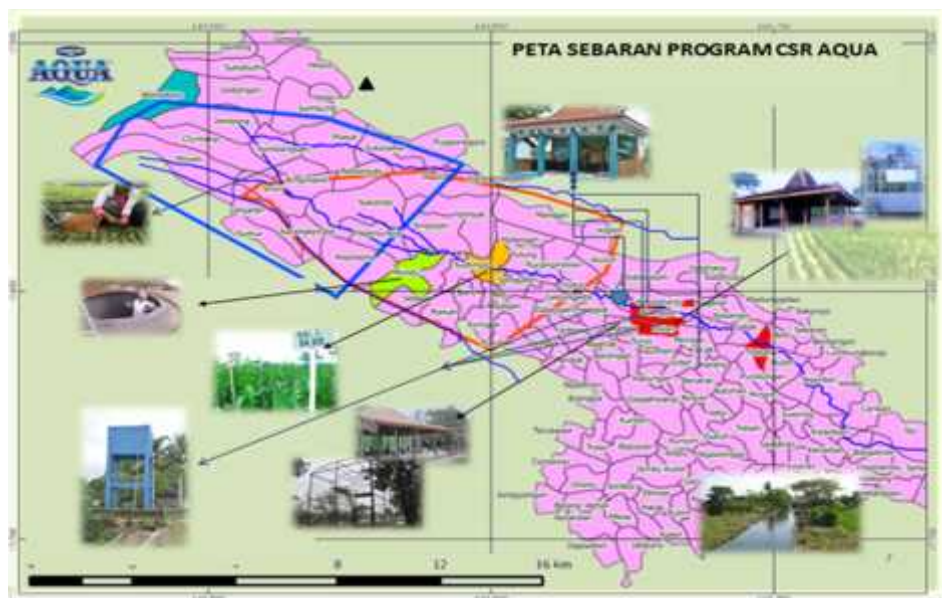
Under Danone-Aqua management, Aqua Lestari realizes that concern related to the limited amount of natural resources, environmental damage, and increasing population; are getting bigger, day by day. Thus, Aqua Lestari formulates a new policy with a new focus and target until 2020.

CSR Implementation by Danone-Aqua in Polanharjo district, Klaten regency

The regulation of CSR distribution by Danone-Aqua in order to be active and efficient is by making Sub Das Pusur concept. The background is factors of location, soil fertility, abundant water resources and the village's spatial. It is decided that the efficient CSR program for Polanharjo district are household waste recycle, handicraft, market construction, field study for farmers, implementation of alternative energy such as biogas and bioenergy, eco-tourism development, particularly water tourism. Residents and farmers in the district will able to be independent if the programs are successful.

Danone-Aqua combines practical and strategic methods of CSR program to prevent any pressure and protest from the outside party.

Picture 1.1 Distribution of CSR program in upstream, middle-stream and downstream



Source: Harmonization in Business, Social, and Environment through Protection, Management and Collaboration (Report of CSR Danone Aqua Klaten 2017).

The upstream programs focus on conservation, including plantation program and campaign for less pesticide. These aim to re-charge qualified hygienic water for residents'

needs and factory needs. The middle-stream programs focus on waste management program and handicraft. These aim to increase social welfare and residents' income. Also training for producing compost, communal septic tank for residents, and education for farmers by providing agricultural field study related to owls breeding. The owl is a natural predator to kill a mouse without pesticide. The downstream programs focus on irrigation sustainability, water volume sustainability, riverside plantation program, fish seeds spreading and clean river program. These aim to protect water quality and quantity on the downstream. Above are the examples of strategic programs.

A Village Development Fund program is a strategic method by providing a fund for every village in the district, every year. Danone-Aqua also assists local government in road construction field. In three years, the corporation has funded for a 1.500 km road construction or 500 km road construction every year, from Cokro village to Delanggu village.

The implementation of One Man One Hole program for the corporation's employee is started in 2017. The number of permanent employees at Danone-Aqua is approximately 900 people. The program obliges every employee to return every drop of water they have already taken from and to the soil by making bio-poly, planting trees and building infiltration wells.

Danone-Aqua's Strategy in Responding Residents' Protest

Several protests were held against Danone-Aqua in Polanharjo district, Klaten regency at the beginning of the factory operation. The protests were related to residents' fear of the negative impact caused by the factory operational. At the time, Danone had already approached the residents by educating the CSR program and convincing that corporation and residents may live harmoniously.

Several years later, rallies were also held to protest against unfair CSR program. In this case, Danone-Aqua identified factors that triggering residents. The factors were: residents' lack of knowledge, that is leading to blame Danone-Aqua for every emerged problem; free riders, are the outsider party such as an illegitimate non-profit organization or uncredible mass media. They often have different vision and trigger corporation's conflict with residents; internal factor is a factor from the corporation's employees itself. The employee of the Sustainable Development department or CSR department who lacks experience in approaching residents may cause a new problem.

After identifying the exact cause of residents' demand, Danone-Aqua can solve the issue effectively.

The corporation relies on education to solve the problem of residents' lack of knowledge. For example, related to the water resources utilized by the corporation, Danone-Aqua informs and gives facts to the residents that the activity is not disturbing water supply for irrigation needs. The farmers utilize surface water for irrigation, while the corporation utilizes groundwater that should be flowed up to the surface.

The residents at the downstream area protest to the lack of water supply, particularly for irrigation needs. They believe that the primary cause of the problem is factory operational. To address the issue, Danone-Aqua conducts several activities such as educating farmer planting pattern, informing that during dry season farmers should plant 'palawija' (non-rice plants) that needs less amount of water. However, factors of customs and location near Delanggu, make the program is difficult to be realized. Farmers choose to plant only rice, even during dry season. Education related to the benefits of planting 'palawija' is also given to the farmers. Another activity is transecting education for farmers representative at the downstream area. Farmers are accompanied to tour from upstream to downstream. They witness that farmers in middle-stream are cheating for water supply by making a small hole through the irrigation route. The water will flow into the hole, and less water will flow down to the downstream. Following this issue, Danone-Aqua assists the residents for irrigation and water amount managements to prevent conflict between farmers at downstream and the corporation.

Meanwhile, the establishment of the Village Head Community becomes a solution for internal factor. The factor is an employee of the Sustainable Development department or CSR department who lacks experience in approaching residents. The corporation decides to form a community for 18 village heads in the district. The community aims to facilitate communication between the corporation and residents. Village head is believed as the best representative of residents' opinion. The community also holds a regular meeting to solve miscommunication. It becomes a realization of living harmoniously between residents and corporation.

The solution for free riders issue is with a trust that has been developed for years between the residents and the corporation. The trust formed into CSR program to increase residents' welfare and income, and that is the best way to solve the issue. Danone-Aqua factory located in Polanharjo district that includes 18 villages. All villages have been given CSR program activities to increase residents' welfare. Yearly innovation has been conducted for years to make sure the activities are useful for residents. In this case, Danone-Aqua in Polanharjo runs "Pagar Mangkok" (bowl shield) which means the residents in the district themselves. It will make residents protect for the corporation from free riders who cause new

conflict or protest. Outsiders reportedly conducted many rallies against the corporation that this becomes the main reason why most CSR programs are implemented in the middle-stream area. The middle-stream is the nearest area to the factory and becomes a shield to protect for the corporation (Zakaria R. , 2017).

Danone-Aqua also collaborates with other parties to implement CSR programs, such as government, academics, a non-profit organization, and mass media. The collaboration, which is conducted to the regional level, aims to protect the excellent relationship between the corporation and related parties for the factory's operational sustainability.

The collaborations, for examples, are when Klaten government ordered Danone-Aqua to speak in educational or training events, conducting open research with academics, collaborating with a non-profit organization in CSR program implementation, maintaining a good relationship with mass media including to invite them to cover the CSR program activities. Mass media is essential to deliver information from Danone-Aqua to the society that the corporation has implemented a good CSR program. This aim to maintain the right image, particularly after rallies by residents. Above are the corporation's policy and strategy in implementing CSR program for residents and also for the survival of its business in Polanharjo district.

Residents' View toward Danone-Aqua

According to Sriyono (Sriyono, 2017), some of the residents in Polanharjo district rejected the operational of Danone-Aqua at the beginning. They believed negative rumors. However, some other residents did not mind with the factory operational. They believed this might bring positive impacts to the residents. Sriyono also suggested the corporation to keep approaching residents to permit it to utilize the water resource in the district.

The open-minded residents believe that the presence of the multi-national company in the district may bring mutualism symbiosis, or win-win solutions for both parties if they trust each other and maintain excellent communication to solve every problem. The residents will be trained to increase their welfare, while the corporation will get permission to utilize the water resource. It is what a win-win solution means.

Residents also believe that the factory operational may bring new employment in the district. Earlier, most residents worked as farmers, while some others decided to work in the cities, such as Semarang, Solo, and Jakarta. Today, they decide to return to Polanharjo and work

in the factory. The factory provides job vacancy every year for nearby residents, not only for the white-collar job but also the blue-collar job (Umi, 2017).

According to Kebonharjo village head Sukamto (Sukamto, 2017), started in 2015, Danone-Aqua provides Rp50 millions of village fund for infrastructure construction. In Kebonharjo, the fund was used to build a water reservoir and public health center for mother and children ('Pos Layanan Terpadu' / 'posyandu'). The corporation also facilitates garbage bin and toilet for every family.

According to Amidi (Amidi, 2017), in Turus village, the fund was used to construct a road for agricultural needs. If the road construction is over, the corporation will allocate the fund for Village-Owned Enterprises (BUMDES) formation. The Bumdes inspired the decision to implement in Ponggok village which has already succeeded. Danone-Aqua, cooperated with Klaten Regional Disaster Mitigation Agency (BPBD), also conduct several training activities related to disaster management for elementary students.

Residents view that the factory brings more positive impact than negative impact, year by year. However, the remaining negative impact is delivery trucks owned by the factory. Many trucks are parked on the side of the road, causing the traffic jam and disturbing other road users, according to the residents.

It is understandable that more CSR programs are implemented in Wangen village and Ponggok village, as the factory was located in Wangen village and the factory utilizes water resources in Ponggok village. The corporation maintains its attention for every village in Polanharjo district. Despite the fact, some residents argue that the CSR programs distribution is unfair. The attitude is habitual among close-minded residents in the remote area. Meanwhile, some other residents are open-minded enough. They believe that it is impossible to design such a perfect CSR program in a short time. From the phenomenon, writers may conclude that there is a bond of trust between residents and Danone-Aqua that the corporation tries it best to listen for every aspiration. It becomes the primary factor for no more rallies against the corporation.

Residents believe that they can gain so much knowledge from CSR program activities. Danone-Aqua has trained residents for independent living, to be open-minded and to increase their welfare, to embrace better living. Residents also gain knowledge for daily living needs, that they previously do not care or do not know. The knowledge brings welfare and profitable activities after being implemented by them. A CSR that focus on community empowerment, according to Harjono (Harjono, 2017).

It is undeniable that not every resident in Polanharjo district has been able to increase welfare due to Danone-Aqua's CSR program. However, the residents believe in a process. The CSR programs are still ongoing in the middle of developing villages. It is one of the factors why residents in Polanharjo district believe that the implementation of CSR program has been adequate to them.

Conclusion

Residents in Polanharjo district, Klaten regency, rallied against Danone-Aqua at the beginning of its factory operation. Although the CSR program had already worked, the rallies continued to occur. Danone-Aqua finally formulates a strategy for the sake of the corporation's survival. The Danone-Aqua Inc. approached the residents through effective CSR program by combining pragmatic-method and strategic one. The corporation also works with other parties such as non-profit organization, local government, academics, and mass media. The purpose is to maintain a good relationship with stakeholders. The success story of the CSR program implementation made the residents enjoy the benefit of Danone-Aqua's presence in the district. As a consequence, the residents quitted protesting against the corporation since 2015, leaving Danone-Aqua to be able to operate normally until this research accomplished.

bibliography

- Azheri, B. (2012). *Corporate Social Responsibility, dari Voluntary menjadi Mandatory*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fajar ND, M. (2013). *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gulo, W. (2002). *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Hamalik, O. (1994). *Media Pendidikan*. Bandung: Cipta Aditya Bakti.
- Marshall, E. M. (1995). *Transforming The Way We Work: The Power of the Collaborative Workplace*. New York: American Management Association.
- Soetomo. (2006). *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Stiglitz, J. E. (2006). The Multinational Corporation. In J. E. Stiglitz, *Making Globalization Work* (pp. 187-210). New York: W. W. Norton & Company, Inc.
- Arrow, K. J. (1969). The Organization of Economic Activity: Issues Pertinent to the Choice of Market versus Non-market Allocation. 1-16.
- Jain, S. C., & Puri, Y. (1981). Role of Multinational Corporations in Developing Countries: Policy Makers Views. *Jstor*, 57-66.
- Sheehy, B. (2014). CSR; Problems and Solutions. *Springer*, 111-20.
- Snyder, A. M. (2007). Holding Multinational Corporations Accountable: Is Non-Financial Disclosure The Answer? *Columbia Business Law Review*, 566-567.
- Stopford, J. (1999). Multinational Corporations. *Jstor*, 12-24.

- Zain, Q. (2015). Collaboration Strategy dalam Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR): Studi Kasus Aqua Danone Klaten. *Journal Hubungan Internasional*, 1-18.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten. (2017). *Kecamatan Polanharjo Dalam Angka*. Klaten: Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten.
- Boediono. (2007). *CSR Tidak Hanya Filantropi: Tidak Mungkin Membangun Negeri Tanpa Melibatkan Pebisnis*. Kompas.
- Cara, C. C. (2014, September 16). *Solopos*. Retrieved December 27, 2017, from Solopos Digital Media: <http://www.solopos.com/2014/09/16/konflik-aqua-klaten-dishub-ancam-tutup-jalan-ke-pabrik-tirta-investama-536484>
- Iskandar. (2012, December 11). *soloraya*. Retrieved December 26, 2017, from Solopos Digital Media: <http://www.solopos.com/2012/12/11/ratusan-warga-polanharjo-geruduk-pabrik-aqua-2-356655>
- Prasetyia, F. (2013). Retrieved October 23, 2017, from <http://ferryfebub.lecture.ub.ac.id/files/2013/01/Bagian-V-Teori-Eksternalitas.pdf>
- SoloposTV. (2014, November 2). *SoloposTV*. Retrieved December 27, 2017, from Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=Lnl6qBHVjEs>
- Tempo. (2004, December 15). *home: bisnis*. Retrieved 26 December, 2017, from TEMPO.CO: <https://bisnis.tempo.co/read/52980/petani-klaten-minta-pabrik-aqua-ditutup>
- Tempo. (2005, April 8). *bisnis*. Retrieved December 26, 2017, from TEMPO.CO: <https://nasional.tempo.co/read/60706/pabrik-aqua-didenda-rp-100-juta>
- Tempo. (2005, May 8). *bisnis*. Retrieved December 26, 2017, from TEMPO.CO: <https://nasional.tempo.co/read/59335/aqua-janji-naikkan-setoran-ke-pemerintah-klaten>
- Tentang Aqua: Komitmen Ganda*. (2011). Retrieved October 17, 2017, from Danone Aqua: http://aqua.com/tentang_aqua/komitmen-ganda

INTERVIEWS

- Amidi. (2017, January 9). Pandangan Masyarakat Tentang Danone Aqua. (A. D. Sindhutomo, Interviewer)
- Danone Aqua Group. (2011-2012). *Komitmen untuk Indonesia Laporan Berkelanjutan*. Jakarta: Danone Aqua.
- Danone Aqua Group. (2013-2014). *Komitmen untuk Indonesia Laporan Berkelanjutan*. Jakarta: Danone Aqua.
- Danone Aqua Group. (2015-2016). *Komitmen untuk Indonesia Laporan Berkelanjutan*. Jakarta: Danone Aqua.
- Harjono. (2017, January 10). Pandangan Masyarakat Tentang Aqua. (A. D. Sindhutomo, Interviewer)
- Sriyono. (2017, January 2). Pandangan Masyarakat Tentang Danone Aqua. (A. D. Sindhutomo, Interviewer)
- Sukamto. (2017, January 2). Pandangan Masyarakat Tentang Danone Aqua. (A. D. Sindhutomo, Interviewer)
- Umi. (2017, January 5). Pandangan Masyarakat Tentang Danone Aqua. (A. D. Sindhutomo, Interviewer)
- Zakaria, R. (2017, January 13). Harmonization in Business , Social and Environment through Protection, Management and Collaboration. (A. D. Sindhutomo, Interviewer)

**Tinjauan EKOSOB pada Kebijakan Perdagangan Internasional pada
Kawasan Perdagangan Bebas
di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau**

Dhani Akbar, S.S., M.A., Indrawan, S.H.I., S.H., M.H.

Universitas Maritim Raja Ali Haji & Universitas Karimun.

rittersarmy@gmail.com

Indrawan.up@gmail.com

Abstrak

Kondisi perkembangan suatu daerah dapat diidentifikasi dari beberapa indikator makro ekonomi dan sosial daerah, diantaranya perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, PDRB, PDRB per kapita, tingkat pengangguran terbuka (TPT), inflansi, perkembangan investasi dan tingkat kemiskinan. Arus masuk modal asing (capital inflows) berperan dalam menutup gap devisa yang ditimbulkan oleh defisit pada transaksi berjalan. Tercatat nilai realisasi investasi asing yang masuk ke Kawasan Free Trade Zone Batam 2017 mengalami penurunan sekitar 20,43 % dibandingkan tahun 2016 dengan 2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu untuk mendapatkan data secara alami. Pemerintah sedang mengupayakan adanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ini adalah untuk meningkatkan perdagangan antara kedua negara, dan sekaligus juga merealisasikan pertumbuhan KEK di Indonesia, khususnya KEK di Batam, Bintan dan Karimun. Indonesia juga semakin gencar membentuk bilateral FTA atau EPA. Pemerintah beragumen bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing Indonesia secara global, diupayakan perwujudan Economic Partnership Agreement (EPA). Lingkungan investasi di Batam yang dianggap kurang sehat menyebabkan para investor asing menarik investasi mereka di Kota Batam sehingga membuat banyak perusahaan di Batam gulung tikar dan membuat perekonomian di Batam mengalami kemerosotan, karena dengan banyaknya perusahaan yang tutup maka akan menambah angka pengangguran di Kota Batam.

Kata Kunci: *Investasi, Batam, ekonomi, KEK*

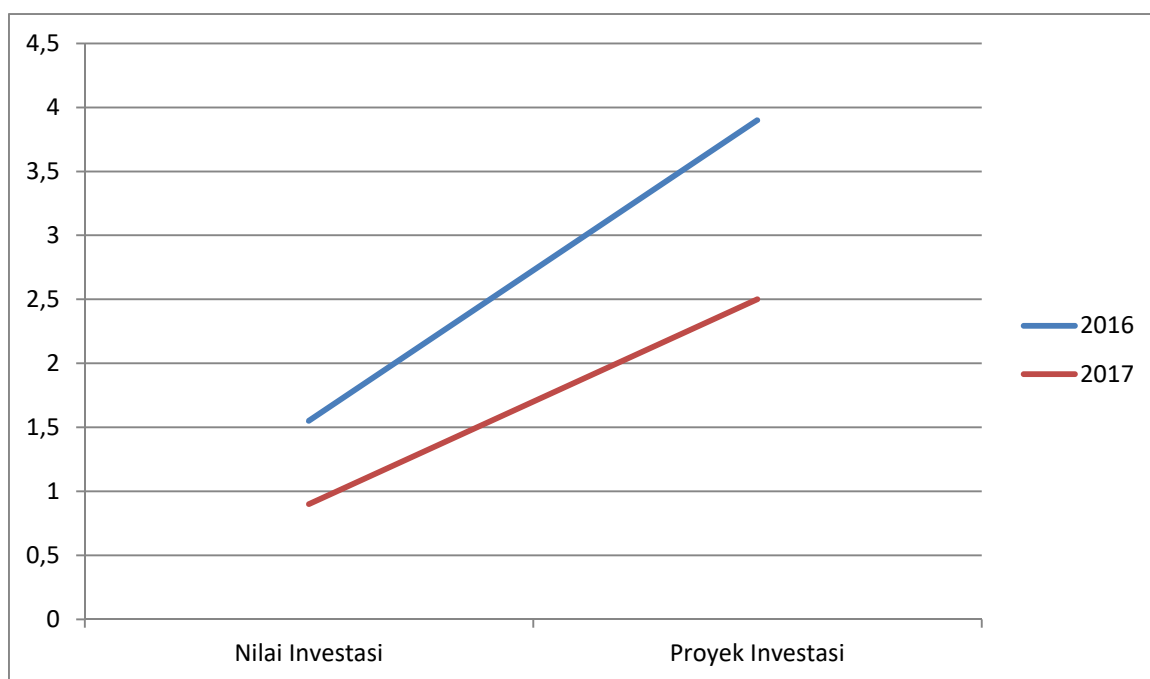
PENDAHULUAN

Kondisi perkembangan hasil pembangunan suatu daerah, dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Hal itu dapat diidentifikasi dari beberapa indikator makro ekonomi dan sosial daerah, diantaranya perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, PDRB, PDRB per kapita, tingkat pengangguran terbuka (TPT), inflansi, perkembangan investasi dan tingkat kemiskinan. Arus masuk modal asing (*capital inflows*) berperan dalam menutup gap devisa yang ditimbulkan oleh defisit pada transaksi berjalan. Selain itu, masuknya modal asing juga mampu menggerakkan kegiatan ekonomi yang lesu akibat kurangnya modal (*saving investment*

gap) bagi pelaksanaan pembangunan ekonomi. Modal asing ini selain sebagai perpindahan modal juga dapat memberikan kontribusi positif melalui aliran industrialisasi dan modernisasi.

Dalam jangka pendek, utang luar negeri sangat membantu pemerintah Indonesia dalam upaya menutup deficit anggaran pendapatan dan belanja negara, akibat pembiayaan pengeluaran pembangunan yang cukup besar. Dengan demikian, laju pertumbuhan ekonomi dapat dipacu sesuai dengan target yang telah diterapkan sebelumnya. Tetapi dalam jangka panjang, ternyata utang luar negeri pemerintah tersebut dapat menimbulkan berbagai persoalan ekonomi di Indonesia. Beberapa negara bahkan aktif dalam hal memberikan bantuan berupa pinjaman kepada Indonesia, baik di Asia, Eropa bahkan Amerika Serikat serta beberapa lembaga keuangan internasional lainnya. Indonesia merupakan negara favorit bagi para kreditor karena dibalik pinjaman luar negeri juga tersebut, tersirat kepentingan-kepentingan politik yang akhirnya mempengaruhi arah kebijakan moneter dan fiscal Indonesia.

Tabel 1. Perkembangan Investasi Batam



Sumber: Badan Pengusahaan Batam, 2018

Berdasarkan informasi publik yang diakses dari pusat informasi publik Badan Pengusahaan (BP) Batam, dalam perbandingannya dua tahun ke belakang, tercatat adanya penurunan investasi baik dari nilai maupun jumlah proyek investasi. Tercatat nilai realisasi investasi asing yang masuk ke Kawasan Free Trade Zone Batam 2017 mengalami penurunan sekitar 20,43 % dibandingkan tahun 2016. Realisasi investasi yang masuk ke Batam semester

pertama 2017, berasal dari 25 proyek investasi, sementara pada 2016 jumlah proyek mencapai 39 proyek investasi. Pada awal 2016 ada satu investor yang sudah berinvestasi di Batam melakukan perluasan hingga USD \$ 155 juta, sementara 2017 tidak mencapai USD \$1 juta. Sehingga menarik untuk dikaji, bagaimana sebenarnya arah kebijakan internasional yang diterapkan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan bagaimana implikasi terhadap perkembangan ekonomi di sana secara utuh, dengan tentu perlu menjabarkan beberapa faktor penting yang memiliki pengaruh besar dalam perubahan itu.

KERANGKA TEORI

A. Kebijakan Perdagangan Internasional

Kebijakan adalah keputusan yang menggambarkan tujuan, menetapkan sesuatu yang dapat dijadikan pedoman/acuan, atau sebagai dasar suatu tindakan, dan tindakan tersebut diambil untuk menerapkan keputusan itu, atau kebijakan dapat diartikan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan satu pekerjaan, hasil dari sebuah kepemimpinan dalam sebuah pemerintahan atau sebuah organisasi.

Kebijakan perdagangan sebagai suatu kebijakan yang dapat menopang percepatan laju pembangunan ekonomi dengan: meningkatkan laju pembentukan modal, meningkatkan industrialisasi, dan menjaga keseimbangan neraca pembayaran. Pendapat yang senada, dikemukakan Ashari, bahwa kebijakan perdagangan dimungkinkan sebagai landasan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan.

Kebijakan perdagangan internasional adalah tindakan peraturan pemerintah yang mempengaruhi struktur dana rah transaksi perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional merupakan bagian dari kebijakan ekonomi makro. Oleh karena itu, kebijakan perdagangan internasional berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan lainnya seperti kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan investasi, kebijakan tenaga kerja dan kebijakan-kebijakan lainnya.

B. Arah dan Tujuan

Kebijakan internasional atau kebijakan perdagangan luar negeri diciptakan dengan tujuan-tujuan tertentu. Tujuan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Melindungi kepentingan ekonomi nasional dari pengaruh buruk luar negeri, seperti inflasi, resesi ekonomi dunia dan lain sebagainya.
2. Melindungi industri nasional dari persaingan barang-barang impor.
3. Menjaga keseimbangan neraca pembayaran sekaligus menjamin persediaan cadangan valuta asing, untuk kebutuhan pembayaran luar negeri.

4. Menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil
5. Melindungi dan meningkatkan lapangan kerja.

C. Manfaat

Kebijakan internasional tentu saja memiliki manfaat untuk suatu negara. Dengan adanya kebijakan perdagangan internasional tentu saja akan memudahkan suatu negara dalam melakukan perdagangan dengan negara lain. berikut adalah manfaat dari adanya kebijakan perdagangan internasional:

1. Bidang Ekonomi

Adanya perdagangan internasional tentu saja sangat bermanfaat dalam bidang ekonomi. Karena dengan adanya perdagangan internasional dapat menambah pendapatan negara, membuat produksi barang meningkat, dapat menciptakan lapangan pekerjaan, pemenuhan kebutuhan negara, menciptakan kemakmuran dan terlebih lagi dapat memberikan devisa untuk negara.

2. Bidang Politik

Dengan adanya perdagangan internasional maka akan memberikan keuntungan atau manfaat yang besar dalam bidang politik, yaitu dapat terciptanya kerjasama antara negara yang satu dengan negara lainnya. Contohnya bila suatu negara membutuhkan kekuatan politik, maka peluang negara lain untuk membantu sangat besar, karena sudah ada kerjasama yang saling menguntungkan sebelumnya.

3. Bidang Sosial

Perdagangan internasional juga sangat bermanfaat dalam bidang sosial. Karena dengan adanya perdagangan internasional tersebut dapat mencegah terjadinya krisis, selain itu dengan adanya perdagangan internasional ini juga dapat menjalin hubungan social yang baik dengan negara lain. hubungan baik dengan negara lain bisa terjalin selama suatu negara masih melakukan perdagangan internasional. Dengan munculnya hubungan sosial tersebut, maka kedamaian dapat tercipta bagi kedua belah pihak.

D. Kebijakan-Kebijakan Perdagangan Internasional

Kebijakan yang diambil suatu pemerintahan yang berkaitan dengan pelaksanaan perdagangan internasional ada beberapa macam. Kebijakan tersebut diambil sesuai dengan tujuan dan keadaan yang mendasari, sehingga diambil kebijakan tersebut. Kebijakan-kebijakan perdagangan internasional adalah sebagai berikut:

1. Tarif dan Bea Masuk

Tarif adalah sejenis pajak yang dikenakan atas barang-barang yang diimpor. Tarif spesifik (Specific Tariffs) dikenakan sebagai beban tetap atas unit barang yang diimpor. Misalnya, \$6 untuk setiap barel minyak. Tarif *Ad Valorem* (Ad Valorem Tariffs) adalah pajak yang dikenakan berdasarkan presentase tertentu dari nilai barang-barang yang diimpor (misalnya, tarif 25 persen atas mobil yang diimpor). Dalam kedua kasus dampak tariff akan meningkatkan biaya pengiriman barang kesuatu negara.

Dengan di terapkannya bea masuk yang besar atas barang-barang dari luar negeri, bertujuan untuk memproteksi industry dalam negeri sehingga menghasilkan pendapatan negara. Dengan adanya pengenaan tarif dan bea masuk barang impor maka, harga barang impor naik, sehingga produksi dalam negeri menjadi lebih bisa bersaing karena memiliki harga yang murah. Kemudian karena produksi dalam negeri mampu bersaing dengan barang impor maka diharapkan impor barang menjadi turun.

Ada tiga macam penentuan tarif dan bea masuk, yaitu:

1) Bea impor (*import duties*)

Bea impor merupakan pajak atau bea yang dikenakan kepada barang-barang yang masuk dalam suatu negara (tom area).

2) Bea ekspor (*export duties*)

Bea ekspor merupakan pajak atau bea yang dikenakan kepada barang-barang yang diangkut menuju negara lain (diluar custom area)

3) Bea transit (*transit duties*)

Bea transit merupakan pajak atau bea yang dikenakan kepada barang-barang yang melalui batas wilayah suatu negara dengan tujuan akhir barang tersebut ke negara lain.

2. Subsidi

Subsidi merupakan kebijakan yang diberikan pemerintah untuk membantu mengurangi sebagian biaya produksi per unit barang produksi dalam negeri. Sehingga produsen dalam negeri bisa memasarkan barangnya lebih murah dan dapat bersaing dengan barang impor. Subsidi yang diberikan berupa keringanan pajak, fasilitas kredit, mesin-mesin, fasilitas kredit, peralatan, tenaga ahli, dll.

Kebijakan subsidi biasanya juga diberikan untuk menurunkan biaya produksi barang yang, menjadi komoditas ekspor, sehingga diharapkan harga jual produk dapat lebih murah dan dapat bersaing di pasar internasional. Dengan adanya subsidi ekspor ini diharapkan dapat mendorong jumlah ekspor, karena eksportir dapat memasarkan produknya dengan harga yang

lebih rendah. Harga jual dapat diturunkan sebesar subsidi tadi. Namun tindakan ini dianggap sebagai persaingan yang tidak jujur dan dapat menjurus ke arah perang subsidi. Hal ini karena semua negara ingin mendorong eksportnya dengan cara memberikan subsidi.

3. Pembatasan Impor / Kuota

Pembatasan impor (*import quota*) merupakan pembatasan langsung atas jumlah barang yang boleh diimpor. Pembatasan ini biasanya diberlakukan dengan memberikan lisensi kepada beberapa kelompok individu atau perusahaan. Contohnya, Amerika Serikat membatasi impor keju. Hanya perusahaan-perusahaan dagang tertentu yang diizinkan mengimpor keju, masing-masing perusahaan diberikan jatah untuk mengimpor keju dengan jumlah tertentu setiap tahun, tidak boleh melebihi jumlah maksimal yang telah ditetapkan. Besarnya kuota untuk setiap perusahaan didasarkan pada jumlah keju yang diimpor tahun-tahun sebelumnya. Namun, dengan adanya pembatasan impor ini dapat mengakibatkan jumlah barang di pasar turun, harga barang naik, produksi dalam negeri meningkat, dan impor barang turun. Adanya pembatasan impor ini bertujuan untuk:

- a) Mengadakan pengawasan produksi serta pengendalian harga guna mencapai stabilitas harga di dalam negeri.
- b) Menjamin tersedianya barang-barang di dalam negeri dalam proporsi yang cukup.
- c) Melindungi produksi dalam negeri dan serbuan produk luar negeri.

4. Pengekangan Ekspor Sukarela

Bentuk lain dari pembatasan impor adalah pengekangan sukarela (*Voluntary Export Restraint*), yang juga dikenal dengan kesepakatan pengendalian sukarela (*Voluntary Restraint Agreement*). VER adalah suatu pembatasan kuota atas perdagangan yang dikenakan oleh pihak negara pengekspor dan bukan pengimpor. VER mempunyai keuntungan-keuntungan politis dan legal yang membuatnya menjadi perangkat kebijakan perdagangan yang lebih disukai dalam beberapa tahun belakangan. Namun dari sudut pandang ekonomi, pengendalian ekspor sukarela persis sama dengan kuota impor dimana lisensi diberikan kepada pemerintah asing dan karena itu sangat mahal bagi negara pengimpor. VER selalu lebih mahal bagi negara pengimpor dibandingkan dengan tarif yang membatasi impor dengan jumlah yang sama. Bedanya apa yang menjadi pendapatan pemerintah dalam tarif menjadi (*rent*) yang diperoleh pihak asing dalam VER, sehingga VER nyata-nyata mengakibatkan kerugian.

5. Persyaratan Kandungan Lokal

Persyaratan kandungan lokal (*local content requirement*) merupakan pengaturan yang mensyaratkan bahwa bagian-bagian tertentu dari unit-unit fisik, seperti kuota impor minyak AS di tahun 1960-an. Dalam kasus lain persyaratan ditetapkan dalam nilai, yang mensyaratkan harga minimum tertentu dalam harga barang berawal dari nilai tambah domestik. Ketentuan kandungan lokal telah digunakan secara luas oleh negara berkembang yang berikhtiar mengalihkan basis manufakturanya dari perakitan kepada pengolahan bahan-bahan antara (*intermediate goods*).

6. Subsidi Kredit Ekspor

Subsidi kredit ekspor ini semacam subsidi ekspor, hanya saja wujudnya dalam pinjaman yang di subsidi kepada pembeli. Seperti kebanyakan negara, Amerika Serikat juga memiliki suatu lembaga pemerintah, *export-import bank* (bank ekspor-impor) yang diarahkan untuk paling tidak memberikan pinjaman-pinjaman yang disubsidi untuk membantu ekspor.

7. Pengendalian Pemerintah (*National Procurement*)

Pembelian-pembelian oleh pemerintah atau perusahaan-perusahaan yang diatur secara ketat dapat diarahkan pada barang-barang yang diproduksi di dalam negeri meskipun barang-barang tersebut lebih mahal daripada yang diimpor. Contoh klasik adalah industri telekomunikasi Eropa. Negara-negara mensyaratkan Eropa pada dasarnya bebas berdagang satu sama lain. Namun pembeli-pembeli utama dari peralatan telekomunikasi adalah perusahaan-perusahaan telepon dan di Eropa perusahaan-perusahaan ini hingga kini dimiliki pemerintah dan pemasok domestik. Meskipun, jika para pemasok tersebut mengenakan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemasok-pemasok lain. Akibatnya adalah hanya sedikit perdagangan peralatan komunikasi di Eropa.

8. Hambatan-Hambatan Birokrasi (Red Tape Barriers)

Terkadang pemerintah ingin membatasi impor tanpa melakukannya secara formal. Sayangnya, begitu mudah untuk membelitkan standar kesehatan, keamanan, dan prosedur pabean sedemikian rupa sehingga menjadikan perintah dalam perdagangan. Contohnya adalah surat keputusan pemerintah Prancis 1982 yang mengharuskan seluruh alat perekam kaset video melalui jawatan pabean yang kecil di Politiers yang secara efektif membatasi realisasi sampai jumlah relative amat sedikit.

9. *Dumping*

Dumping adalah kebijakan menjual produk ekspor di luar negeri dengan harga lebih rendah daripada yang dijual di dalam negeri. Tujuan kebijakan ini adalah untuk menguasai pasar luar negeri. Salah satu yang pernah melakukan kebijakan ini adalah negara Jepang.

Kebijakan dumping sangat menguntungkan negara pengimpor. Karena, kebijakan ini dapat meningkatkan volume perdagangan dan menguntungkan negara pengimpor, terutama bagi konsumen mereka. Namun, negara pengimpor kadang mempunyai industri yang sejenis, sehingga persaingan dari luar negeri dapat mendorong pemerintah negara pengimpor memberlakukan kebijakan anti dumping (dengan tarif impor yang lebih tinggi), atau sering kita kenal dengan *counterveiling duties*. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi industri yang sejenis di negara pengimpor.

Kebijakan *dumping* sendiri biasanya hanya berlaku sementara, harga produk akan dinaikkan sesuai dengan harga pasar setelah berhasil merebut dan menguasai pasar internasional. Biasanya, kebijakan dumping bertujuan untuk mematikan persaingan diluar negeri. Setelah persaingan di luar negeri mati maka harga diluar negeri akan dinaikkan untuk menutup kerugian sewaktu melakukan kebijakan *dumping*. Namun, pelaksanaan politik *dumping* dalam praktik perdagangan internasional dianggap sebagai tindakan yang tidak terpuji karena dapat merugikan negara lain.

Ada tiga tipe kebijakan *dumping*, yaitu:

- a. *Persistent dumping*, adalah kecenderungan monopoli yang berkelanjutan (*continue*) dari suatu perusahaan di dalam pasar domestik untuk mendapatkan laba maksimal dengan cara menerapkan harga yang lebih tinggi di dalam negeri dari pada di luar negeri.
- b. *Sporadic dumping*, merupakan tindakan perusahaan dalam menjual produknya diluar negeri dengan menetapkan harga yang lebih murah secara sporadis dibandingkan dengan harga didalam negeri yang disebabkan adanya kelebihan produksi di dalam negeri.
- c. *Predatory dumping*, adalah tindakan perusahaan yang menjual barangnya di luar negeri dengan menetapkan harga yang lebih murah untuk jangka waktu sementara (*temporary*), hal ini dengan maksud mengalahkan atau mematikan perusahaan lain dari peta persaingan bisnis. Setelah pesaing kalah dan perusahaan dapat memonopoli pasar, barulah harga barang yang ditawarkan akan kembali dinaikkan untuk memperoleh laba maksimum.

10. Pelarangan Impor

Pelarangan impor bertujuan untuk melarang masuknya produk-produk asing kedalam pasar domestik. Kebijakan ini biasanya dilakukan karena alasan politik dan ekonomi. Untuk alasan pelarangan impor biasanya bertujuan untuk melindungi produksi dalam negeri dan meningkatkan produksi dalam negeri. Dengan adanya kebijakan pelarang impor ini tentu saja menguntungkan bagi negara, karena dapat menghindari atau menguraikan deficit neraca pembayaran dan dapat melindungi perusahaan dalam negeri dari kebangkrutan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu untuk mendapatkan data secara alami (apa adanya). Penilaian perubahan ini adalah salah satu alasan bagi penulis untuk menggunakan metode kualitatif. Metode yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, sehingga ada komponen metode kualitatif yang harus diperhatikan oleh peneliti. Sugiyono menyatakan bahwa komponen penelitian yang dikenal dalam metode penelitian kualitatif adalah. metode dan alasan menggunakan metode kualitatif, lokasi penelitian, instrumen penelitian, sampel sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengujian validitas data.

PEMBAHASAN

1. Kebijakan Perdagangan

Dalam era perdagangan global, kebijakan perdagangan luar negeri (PLN) menjadi sangat penting. Didalam menyusun kebijakan PLN, pemerintah Indonesia mempunyai komitmen terhadap sejumlah blok perdagangan, seperti WTO, APEC, ASEAN, EPA, dan KEK. Era perdagangan bebas adalah era persaingan. Oleh sebab itu Indonesia harus meningkatkan efisiensi, produktivitas, kapasitas produksi dan inovasi disetiap sektor untuk secara bersama menunjang peningkatan daya saing produk Indonesia di pasar dunia maupun di pasar domestic dalam menghadapi persaingan dari produk-produk impor. Ini tentu bukan hanya tugas dari Departemen Perdagangan, melainkan juga tanggung jawab dari semua departemen terkait. Oleh karena itu, efektivitas dari kebijakan perdagangan luar negeri, selain ditentukan oleh baik tidaknya kebijakan itu sendiri dan pelaksanaannya, juga ditentukan oleh kebijakan-kebijakan lainnya.

Kebijakan umum dibidang PLN pada dasarnya terdiri dari kebijakan ekspor dan kebijakan impor. Kebijakan tersebut merupakan implementasi dari fungsi pemerintah di sektor PLN seperti fungsi *trade advocacy*, *market penetration*, akses ke pasar dan lain-lain. tujuan utama dari kebijakan ekspor adalah meningkatkan ekspor dengan prasyarat bahwa kebutuhan pasar domestic telah terpenuhi. Sedangkan tujuan utama dari kebijakan impor adalah dua, yakni (1) mengurangi impor dengan prasyarat bahwa produksi dalam negeri bisa memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri dengan tingkat efisiensi yang paling tidak sama dengan produk impor, atau (2) menambah impor jika produksi dalam negeri tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dalam kata lain, kebijakan PLN harus tetap berlandaskan pemikiran bahwa

sebuah negara akan melakukan ekspor jika negara itu memiliki keunggulan komperatif dan kompetitif atas negara lain, dan mengimpor jika sebaliknya.

Dalam beberapa tahun belakangan ini pemerintah Indonesia juga berupaya membentuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan negara-negara yang berbatasan langsung. Yang sudah terbentuk adalah dengan Singapura. Tujuan dari pembentukan KEK ini adalah untuk meningkatkan perdagangan antara kedua negara, dan sekaligus juga merealisasikan pertumbuhan KEK di Indonesia, khususnya KEK di Batam, Bintan dan Karimun. Indonesia juga semakin gencar membentuk bilateral FTA atau EPA. Pemerintah beragumen bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing Indonesia secara global, diupayakan perwujudan *Economic Partnership Agreement* (EPA) dengan banyak negara potensial. Misalnya bilateral FTA dengan Korea Selatan yang telah ditandatangani pada bulan Juni 2006, dan EPA dengan Jepang (IJ-EPA), yang ditandatangani pada tanggal 25 Januari 2006 lalu di Tokyo. Tujuan dari IJ-EPA ini adalah untuk meningkatkan perdagangan antar kedua negara, dan untuk mewujudkannya ada tiga pilar penting, yakni kerja sama peningkatan kapasitas produksi antara kedua pemerintah yang dilakukan melalui pusat pengembangan industri manufaktur yang akan difasilitasi Jepang, fasilitas perdagangan, serta liberalisasi yang menghapus sebagian besar tarif bea masuk ke kedua negara. Memfokuskan pada peningkatan kapasitas di 13 sektor penunjang investasi Jepang di Indonesia, yaitu pengerjaan logam, percetakan alat mesin, promosi ekspor dan investasi, usaha kecil dan menengah (UKM), komponen otomotif, elektronik, baja, tekstil, petrokimia/oleokimia, logam non besi, makanan dan minuman. Ke 13 sektor itu masuk program pengembangan kapasitas industry melalui Manufacturing Industry Devepment Centre (MIDEC). MIDEC adalah bagian dari pilar pengembangan kapasitas untuk meningkatkan daya saing Indonesia.

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa daya saing global Indonesia cenderung melemah, dan oleh karena beberapa hal pokok yang perlu dilakukan dalam upaya meningkatkan daya saing Indonesia, yang dijabarkan dalam empat misi utama. Keempat misi tersebut adalah:

- 1) Meningkatkan kelancaran distribusi, penggunaan produk dalam negeri, perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.
- 2) Memaksimalkan keuntungan daya saing bangsa Indonesia dalam persaingan global.
- 3) Mewujudkan pelayanan public dan *good governance*.
- 4) Meningkatkan peran penelitian dan pengembangan, dan proses konsultasi public dalam pengambilan keputusan di sektor perdagangan.

Guna mencapai misi tersebut, Departemen Perdagangan menggunakan metode *Balance Score Card* sebagai alat untuk menjembatani rencana strategis dengan operasional agar pencapaiannya dapat terwujud dan terukur, secara merata di seluruh penjuru Indonesia. Selain hal-hal diatas, juga menyadari pentingnya arti sinergi antara pusat dan daerah sehingga seluruh kebijakan dan implementasinya dapat terkoordinasikan dan dijalankan dengan baik. Selain itu, pemerintah terus berusaha memperkuat posisinya di dalam WTO, agar Indonesia bisa lebih diuntungkan oleh kesepakatan-kesepakatan WTO.

Untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri, upaya yang dilakukan Departemen Perdagangan antara lain menurunkan ekonomi biaya tinggi, memperlancar arus barang dan jasa, serta meningkatkan daya saing komoditi ekspor. Implementasinya dengan menyederhanakan prosedur perizinan. Mengurangi hambatan distribusi (perda dan retribusi), transparansi kebijakan dan memfasilitasi infrastruktur perdagangan dalam negeri. Agar keempat nilai tersebut dapat dilakukan secara optimal, diperlukan adanya pemahaman bersama dari semua *stakeholders* dalam mendukung peningkatan daya saing produk Indonesia. Untuk itu, Departemen Perdagangan telah menyusun *road map* peningkatan daya saing produk Indonesia dengan target pada tahun 2010 akan tercipta 200 merk yang mempunyai daya saing di pasar domestic dan internasional. Ke-200 merk tersebut akan menjadi produk-produk dengan desain yang bagus buatan Indonesia dengan dukungan 3 kekuatan (*branding, packaging, product design*); yang dilindungi dengan HKI. Sementara itu, peran serta daerah dalam hal ini dapat diwujudkan melalui pemetaan produk unggulan yang bermerk yang siap bersaing di pasar internasional.

Tinjauan Hak EKOSOB terhadap Perdagangan Internasional

Hak EKOSOB adalah Hak Asasi Manusia generasi kedua yang lahir dari tradisi sosialisme yang mengkritik eksploitasi kelas pekerja dan masyarakat jajahan (lihat Pasal 22-27 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia). Pada 30 September 2005, Indonesia telah meratifikasi dua perjanjian internasional tentang hak-hak asasi manusia, yaitu Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights – ICESCR*) dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR*), kemudian pada 28 Oktober 2005, pemerintah Indonesia mengesahkan ICESCR menjadi Undang-Undang Nomor. 11/2005 dan ICCPR menjadi Undang-Undang Nomor. 12/2005.

Ratifikasi ini menimbulkan konsekuensi terhadap pelaksanaan hak-hak manusia dimana negara menjamin hak setiap manusia untuk menentukan nasib sendiri (*self determination*), terbebas dari diskriminasi sekaligus melaksanakan Prinsip Limburg yang menyebutkan bahwa hak-hak yang strategis harus dipenuhi dengan segera. Untuk itu, dikarenakan negara Indonesia telah mengikatkan diri secara hukum, pemerintah berkewajiban untuk mengadopsi perjanjian yang telah diratifikasi ini ke dalam perundang-undangan, baik yang dirancang maupun yang telah diberlakukan sebagai UU. Hak-hak yang Dijamin dan Dilindungi Undang-Undang Nomor. 11/2005 berkaitan dengan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya diantaranya:

Tabel 1. Hak-Hak EKOSOB

1	Pasal	Hak hak atas pekerjaan
6		
2	Pasal	Hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menyenangkan
7		
3	Pasal	Hak untuk membentuk dan ikut serikat buruh
8		
4	Pasal	Hak atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial
9		
5	Pasal	Hak atas perlindungan dan bantuan yang seluas mungkin bagi keluarga, ibu anak, dan orang muda
10		
6	Pasal	Hak atas standar kehidupan yang memadai
11		
7	Pasal	Hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi
12		
8	Pasal	Hak atas pendidikan
13		
9	Pasal	Hak untuk ikut serta dalam kehidupan budaya
14		

Dimana dari kesembilan hak tersebut, digolongkan menjadi empat macam hak, diantaranya: hak atas pendidikan, hak atas tempat tinggal yang layak, hak atas pekerjaan, dan hak untuk ikut serta dalam kehidupan berbudaya.

Sebagai tindakan implementasi atas disahkannya Undang-Undang mengenai Ratifikasi Kovenan EKOSOB, pemerintah secara otomatis memiliki kewajiban mengikat untuk mengambil berbagai langkah dan kebijakan dalam melaksanakan kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfil*) hak-hak manusia. Kewajiban ini juga diikuti dengan kewajiban pemerintah yang lain, yaitu untuk membuat laporan yang bertalian dengan penyesuaian hukum, langkah, kebijakan dan tindakan yang dilakukan. Salah satu contoh kewajiban negara yang paling penting dalam rangka terjaminnya hak ekosob, yakni memastikan adanya “*Legal Security of Tunere*“ berupa kepastian hukum

Pada dasarnya semua pemenuhan hak ekosob memang membutuhkan biaya. Misalnya, jika pemerintah daerah (Pemda) belum mampu untuk memberikan ruang pekerjaan yang layak dalam bentuk apapun, sebagaimana menjadi obligasi negara berdasarkan Pasal 6 Kovenan maka Pemda jangan melakukan penghentian pekerjaan. Hal lain adalah semua pemenuhan hak ekosob mesti menunggu sumber daya yang berlimpah. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 7 Kovenan – Hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menyenangkan. Pada dasarnya hak asasi menciptakan adanya kewajiban korelatif. Demikian pula dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Mengacu pada Pasal 2 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, kewajiban negara memang dirumuskan tidak secara ketat. Sebagai contoh, pasal ini menggunakan istilah (a) ‘melakukan langkah-langkah’.. dengan segala cara yang tepat’, (b) “hingga sumber-sumber daya yang paling maksimal yang ada”, (c) ”mencapainya secara bertahap”. Rumusan ini bisa menimbulkan kekhawatiran bagi pihak korban hak-hak mereka tidak dapat direalisasikan. Seperti telah dijelaskan di muka lingkup tanggungjawab negara telah dijabarkan dalam Komentar Umum No. 3, Maastricht Guideline (Acuan-acuan Maastricht), dan Limburg Principles (Prinsip-prinsip Limburg). Maastrich guideline menggambarkan sejumlah tindakan yang bisa dianggap sebagai bentuk pelanggaran

Panduan itu memang dirumuskan secara umum dan karenanya bisa dicoba diterapkan dalam situasi riil. Daftar yang disusun di bawah ini didasarkan pada kewajiban negara untuk aktif sehingga menjamin pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya secara tepat. Kalau negara (yang harusnya melakukan tapi) tidak melakukan kewajiban itu dianggap sebagai pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya dengan pembiaran, sebagai contoh: seperti juga diungkapkan dalam Prinsip-prinsip Limburg, kegagalan negara untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan (sesuai Pasal 2 ayat 1) merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena pembiaran; kegagalan merubah atau mencabut peraturan yang sungguh-sungguh tidak konsisten dengan kewajiban yang ada dalam kovenan ini. Sebagai contoh, Peraturan Perda

Batam no.... mengenai merupakan aturan yang jelas-jelas melarang hak bekerja masyarakat (miskin) tentu merupakan aturan yang seharusnya dicabut. Tidak dicabutnya peraturan tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia ekonomi, sosial, dan budaya; kegagalan melaksanakan aturan atau memberlakukan kebijakan yang diperuntukan bagi pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Sebagai contoh, strategi wajib sekolah dua belas tahun (untuk memenuhi hak atas pendidikan) tapi tidak dijalankan bisa dianggap sebagai pelanggaran negara atas hak pendidikan dengan pembiaran; kegagalan mengatur pihak ke tiga (termasuk modal) entah individu atau kelompok agar mereka mencegah melakukan pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya; kegagalan negara memperhitungkan aspek ekonomi, sosial, dan budaya dalam membuat perjanjian internasional dengan negara lain, sebuah organisasi internasional, atau dengan perusahaan multinasional. Negara tetap dianggap sebagai pihak yang memiliki kapasitas untuk menjamin pencegahan pelanggaran oleh pihak ketiga.

PENUTUP

Kesimpulan

Menurunnya investasi di Kota Batam disebabkan oleh tidak adanya kepastian hukum di Batam, khususnya masalah kenaikan upah yang tidak bisa diprediksi. Selain itu, sering terjadi *sweeping* serikat buruh yang mengakibatkan perusahaan terganggu. Dan itulah yang membuat para investor asing menarik investasi mereka di Kota Batam sehingga membuat banyak perusahaan di Batam gulung tikar dan membuat perekonomian di Batam mengalami kemerosotan, karena dengan banyaknya perusahaan yang tutup maka akan menambah angka pengangguran di Kota Batam.

Saran

Agar pertumbuhan ekonomi Kota Batam meningkat lebih progresif, sesuai kewenangannya, pemerintah untuk kedepannya diharapkan dapat menyusun dan melaksanakan kebijakan yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan cara malalui peningkatan konsumsi masyarakat dengan cara menjaga daya beli masyarakat tidak turun, misalnya dengan pengendalian inflasi yang ketat dan perluasan lapangan kerja. Dan meningkatkan belanja pemerintah yang lebih produktif dengan cara memperbaiki struktur alokasi belanja APBD dan peningkatan investasi daerah dengan cara menciptakan kebijakan yang ramah terhadap investor sekaligus penguatan sektor informal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryaji, Susanti. (2007) *Kerjasama Perdagangan Internasional: Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Barutu, Christophorus. 2007, *Ketentuan Anti Dumping, Subsidi, dan Tindakan Pengamanan (Safe Guard) Dalam GATT dan WTO*, Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Bello, Walden. 2004. *Deglobalization: Ideas for a New World Economy*. Zed Books: London.
- Bossche, Peter Van den. Daniar Natakusumah, Joseph Wira Koesnaldi. (2010). *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)*, Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia.
- Committee on Trade and Development, 'Participation of Developing Economies in The Global Trading System: Revision,' WT/COMTD/W/ /Rev.1
- Deliarnov. *Ekonomi dan Politik: Mencakup Berbagai Teori dan Konsep yang Komprehensif*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006
- FX, Soedijana, Triyana Yohanes, Untung Setyardi. *Ekonomi Pembangunan Indonesia(Tinjauan Aspek Hukum*, Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.
- Held, Anthony McGrew, David Goldblatt dan Jonathan Perraton, *Global Transformations, Politics, Economics, and Culture*. USA: Stanford University Press, 1999.
- Khor, Marthin. (2005), Implication of Some WTO Rules on The Realisation of The MDGs, Third World Network.
- Polanyi, Karl (1944) *Great Transformations. The Political and Economic Origins for Our Time*, yang telah diterjemahkan kedalam bahasa indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Stiglitz, Joseph. 2006. Making Globalization Work. *Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia Yang Lebih Adil*. Bandung : Mizan.
- Stiglitz, Joseph. *Globalization and its Discontents*, New York: WW Norton&company, 2003.
- Syerazi, M. Kholid. *Dilema Praktis Globalisasi Neoliberal*, dalam jurnal ilmu sosial dan ilmu politik Vol. 7, No.1, Juli 2003
- Winarno, Budi (2011), *Isu-Isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: CAPS.
- www.un.org/ecosoc (diakses pada 26 November 2015)
- Wirasenjaya, Ade Marup (2013), *Negara, Pasar dan Labirin Demokrasi*, Yogyakarta, Phinisi Pers.

Dinamika Perkembangan Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok terhadap Regionalisme Uni Eropa

V.L. Sinta Herindrasti
Universitas Kristen Indonesia
valentina.herindrasti@uki.ac.id,

ABSTRACT

Belt and Road Initiative (BRI) has been last for five years since it was declared by President Xi Jinping in Kazakhstan on September 2013. Basically BRI is strategy to develop connectivity among Eurasian states in the form of infrastructure network development which consists of two component; the Silk Road Economic Belt pass through Southeast Asia, China, Central Asia, Russia, Europe and the 21st Century Maritime Silk Road of Southeast Asia, South Asia, North Africa, Central Asia and Europe. There are 70 countries from 3 continents have been involved in the signed of BRI's projects including states of Central and East Europe Zone and members of EU (Greek, Hungary, Czech Republic). BRI for EU creates dualism, in the one hand it has promised regional economic growth, on the other hand there is possibility to threat EU's unity. How is the position of EU toward the development of BRI from the perspective of One Europe? Whether BRI's bilateralism will threat cohesivity of EU? The purpose of this research is to see the dynamic of BRI to EU's regionalism by using descriptive qualitative method. The result shows that in the one hand from the stand point of geo-economic EU can utilize BRI in the middle of its need of regional economic stimulus; on the other hand BRI model is still not clear yet whether EU's principles like efficiency, transparency and sustainability can be applied. This research contribution is to enrich best practice of regionalism and interregionalism Asia-Europe within International Relations discipline.

Key words: *Belt and Road Initiative (BRI), European Union (EU), Regionalism, European Values.*

ABSTRAK

Belt and Road Initiative (BRI) telah memasuki tahun kelima sejak dinyatakan pertama kali oleh Presiden Xi Jinping di Kazakhstan pada September 2013. BRI pada intinya merupakan strategi pembangunan konektivitas antara negara-negara Eurasia berupa pengembangan jaringan infrastruktur yang terdiri dari dua komponen yaitu The Silk Road Economic Belt melewati jalur Asia Tenggara, Tiongkok, Asia Tengah, Rusia, Eropa dan the 21st Century Maritime Silk Road -- jalur maritim Asia Tenggara, Asia Selatan, Afrika Utara, Asia Tengah, Eropa. Sebanyak 70 negara dari 3 benua terlibat dalam penandatanganan proyek BRI termasuk negara zone Eropa Tengah dan Timur serta anggota UE (Yunani, Hungaria, Republik Ceko, Slovakia). BRI bagi UE menimbulkan dualisme, di satu pihak sangat menjanjikan pertumbuhan ekonomi kawasan, di lain pihak dapat mengancam persatuan UE. Bagaimana sikap UE terhadap perkembangan BRI dari perspektif One Europe? Apakah bilateralisme BRI merupakan ancaman kohesivitas UE? Tujuan penelitian ingin melihat dinamika BRI bagi regionalisme UE dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa di satu pihak dari perspektif geo-ekonomi UE dapat memanfaatkan inisiatif BRI di tengah kebutuhan stimulus ekonomi kawasan; di lain pihak model BRI belum jelas menunjukkan apakah prinsip UE akan efisiensi, transparansi dan sustainability dapat diterapkan. Kontribusi penelitian ini adalah memperkaya praktek terbaik regionalisme dan interregionalisme Asia-Eropa dalam studi Hubungan Internasional.

Kata kunci: *Belt and Road Initiative (BRI), Uni Eropa, Regionalisme, Nilai Eropa*

Pengantar

Belt and Road Initiative (BRI) sebagai bagian dari strategi diplomasi Tiongkok di abad ke-21 telah menarik perhatian berbagai negara baik negara *super*, *middle* maupun *small power*.

BRI nampaknya merupakan kelanjutan dari kebijakan ekonomi Deng Xiaoping, Jiang Zemin maupun Hu Jianto untuk fokus pada pembangunan ekonomi dengan kebijakan luar negeri yang bersifat terbuka, moderat dan mampu meningkatkan ekonomi baik Tiongkok sendiri maupun negara-negara partner. Di bawah pemerintahan Presiden Xi Jinping (15 November 2012-sekarang) strategi regionalisme ekonomi ini dikembangkan secara lebih komprehensif dimana pencanangan BRI tidak hanya bersifat bilateral tetapi juga transregional melibatkan berbagai negara di kawasan Asia Tengah, Asia Selatan, Rusia, dan Eropa. BRI pada intinya adalah pengembangan jalur sutera ekonomi melalui (i) Tiongkok-Asia Tengah-Rusia-Eropa, (ii) Tiongkok-Asia Tengah-Asia Barat-Teluk Persia, (iii) Tiongkok-Asia Selatan-Asia Tenggara-Lautan Hindia serta pengembangan jalur maritim abad 21 meliputi (i) Pantai Tiongkok – Laut Tiongkok Selatan – Lautan Hindia- Eropa dan (ii) Pantai Tiongkok – Laut Tiongkok Selatan – Pasifik Selatan. BRI akan menghubungkan lebih dari 65 negara mencakup sekitar 62% penduduk dunia, 35% perdagangan dunia dan 31% GDP dunia.

Dinamika BRI yang terbukti telah mampu melibatkan negara-negara anggota Uni Eropa zone Tengah dan Timur menjadi menarik untuk dianalisis terutama terkait dengan masa depan “regionalisme” Uni Eropa (UE) serta perkembangan “interregionalisme” sebagai fenomena tren hubungan internasional masa kini. BRI menimbulkan harapan dan antusiasme negara anggota UE di tengah pertumbuhan ekonomi yang stagnan dan berbagai masalah yang membelit UE seperti Brexit (Britain Exit) atau keluarnya Inggris dari UE, menguatnya populisme yang menimbulkan instabilitas UE, krisis pengungsi serta krisis keuangan beberapa anggota. Dengan munculnya faktor baru yaitu BRI maka perlu dianalisis akankah BRI menjadi faktor positif atau negatif bagi regionalisme UE. Tulisan awal ini hendak melihat perkembangan BRI hingga 2018, perkembangan BRI di kawasan Eropa terutama di zone Tengah dan Timur serta kemungkinan dampak bagi kohesivitas UE.

Metode Penelitian

Kajian ini dilaksanakan dengan metode kualitatif. Subyek penelitian adalah perkembangan regionalisme Eurasia melalui BRI Tiongkok dan obyek penelitian adalah dinamika BRI terhadap regionalisme UE. Penelitian juga bersifat analitik karena menjelaskan hubungan kausalitas antara perkembangan dinamika BRI bagi kohesivitas UE. Sementara pendekatan deskriptif digunakan untuk menjelaskan situasi dan kondisi BRI di negara yang terlibat. Terkait pengumpulan data, data diperoleh terutama dari studi pustaka dari berbagai sumber yaitu buku, hasil kajian berbagai lembaga *think tank*, jurnal, media on line serta

masukannya dari peneliti CSIS dan LIPI. Pemahaman mengenai fenomena regionalisme BRI juga diperkaya dengan interpretasi kritis atas praktek regionalisme dibandingkan dengan studi teoritis regionalisme di berbagai konteks terutama di Asia, Asia Tengah dan Eropa.

Hasil Penelitian

Belt and Road Initiative (BRI) diawali dengan pidato Presiden Tiongkok Xi Jinping dalam kunjungannya ke Kazakhstan pada bulan September 2013 dengan judul "Promote People-to-People Friendship and Create a Better Future" di Universitas Nazarbayev. Semenjak itu, ide BRI menggelanding dengan cepat dan menjadi "*trademark*" pemerintahan Tiongkok di kawasan regional dan internasional. Dalam pidato tersebut Presiden Xi menyebutkan mengenai hubungan tradisional yang erat antara Tiongkok dan Kazakhstan dan memberikan penjelasan komprehensif mengenai kebijakan bertetangga baik Tiongkok (*good neighbourly and friendly cooperation*) terhadap negara-negara di kawasan Asia Tengah. Presiden Xi menawarkan kerja sama membangun sabuk ekonomi Jalur Sutera melalui model kerja sama inovatif dan menjadikan sesuatu yang bermanfaat bagi rakyat di kawasan sekitar jalur tersebut (Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 2013). Presiden Xi menekankan pengalaman 200 tahun sejarah hubungan Tiongkok dengan negara-negara Asia Tengah dimulai oleh Dinasti Han (206 SM-220 M) yang menggunakan jalur sutera kuno yang menghubungkan Timur dan Barat Asia dan Eropa – dimana Kazakhstan telah memberikan sumbangan besar dalam pertukaran dan kerja sama antara negara meskipun terdapat perbedaan nasionalitas dan budaya. Setidaknya, Presiden Xi menyebutkan 4 langkah yang dibutuhkan untuk membangun proses kerja sama BRI–Kazakhstan yaitu pertama memperkuat kebijakan komunikasi, kedua memperbaiki konektivitas jalan, ketiga memajukan fasilitasi perdagangan, keempat meluaskan peredaran moneter, dan kelima memperkuat hubungan antar masyarakat.

Di bawah ini adalah gambaran rute BRI yang pada dasarnya adalah jalur sutera ekonomi Tiongkok dan kawasan Asia Tengah, Asia Barat, Rusia hingga Eropa dan jalur maritim abad 21.

**Gambar 1: Peta Sabuk Sutera Dan Jalur Sutera Maritim Tiongkok
(Belt And Road Initiative)**



Sumber: http://www.xinhuanet.com/english/2016-06/24/c_135464233.htm

Dalam setiap kesempatan Presiden Xi mempromosikan dan menawarkan BRI kepada negara-negara yang dilalui BRI termasuk ASEAN (2013), Rusia (2014), 26 negara yang menyetujui bergabung dalam the Asian Infrastructure Bank (AIIB) yang nantinya akan mendanai proyek-proyek BRI (2014-2015), negara-negara Timur Tengah – Arab Saudi, Mesir, Iran (2016). Presiden Xi juga menyatakan bahwa lebih dari 70 negara dan organisasi internasional telah bergabung dalam BRI dengan investasi Tiongkok mencapai 14 triliun US\$ dan menciptakan 60.000 lapangan kerja lokal. Selain itu berbagai forum kerja sama internasional juga dilaksanakan termasuk Belt and Road Forum for International Cooperation di Beijing (2017) dihadiri oleh pemimpin 29 negara, 1600 peserta dari 140 negara dan 80 organisasi internasional (<https://safety4sea.com/timeline-of-belt-and-road-development/>).

Pada dasarnya BRI akan fokus pada lima tujuan utama yaitu (i) Koordinasi Kebijakan (*Policy Coordination*), dimana BRI akan mendorong negara-negara untuk bekerja bersama mencapai tujuan proyek; (ii) Pertukaran Budaya (*Cultural Exchange*), untuk mendorong ikatan hubungan antar masyarakat dan interaksi yang bersahabat antar perusahaan selain pemahaman budaya yang mendalam demi kerja sama internasional lebih jauh, (iii) Integrasi Keuangan (*Financial Integration*), BRI direncanakan untuk meningkatkan kerja sama moneter dan keuangan dengan mengawasi resiko selama interaksi keuangan secara umum. Juga akan memperluas pertukaran mata uang serta cakupannya, (iv) Perdagangan dan Investasi, melalui investasi lintas batas dan perdagangan yang bertujuan untuk memudahkan kerja sama antar

negara BRI dan memajukan integrasi ekonomi, (v) Konektivitas Fasilitas akan fokus membangun fasilitas untuk meningkatkan konektivitas antar negara BRI, misalnya pengembangan pelabuhan, menghapus batas-batas, perbaikan jalan selain menciptakan jaringan yang lebih baik melalui pembangunan jalan tol, jalan kereta api, jalur fiber optic antar negara BRI (LehmanBrown, 2017). Sementara itu 6 koridor internasional juga mulai mulai dibangun yaitu koridor (1) The New Eurasia Land Bridge, (2) ‘The China-Mongolia-Russia economic corridor’, (3) ‘China-Central Asia-West Asia economic corridor’, (4) ‘China-Indochina Peninsular Economic Corridor’, (5) ‘China-Pakistan Economic Corridor’, (6) ‘Bangladesh-China-India-Myanmar Economic Corridor’ (LehmanBrown, 2017). Selain itu BRI juga akan menghubungkan kota-kota pelabuhan di berbagai negara, yaitu (1) Kuantan (Malaysia), (2) Kyaukpyu (Myanmar), (3) Jakarta dan Batam (Indonesia), (4) Colombo dan Hambatonta (Srilanka), (5) Gwadar (Pakistan), (6) Jibouti (dekat L. Merah), (7) Mombasa (Kenya), (8) Piraeus (Yunani).

Gambar 2: BRI dan Enam Koridor Ekonomi Asia, Eropa, Afrika



Sumber: www.lehmanbrown.com/wp-content/uploads/2017/08/The-Belt-and-Road-Initiative.pdf

Perkembangan BRI di Kawasan Eropa

BRI secara tegas memasukkan Eropa dalam strategi utama konektivitasnya. Manifestasi koridor pertama *The Eurasian Land Bridge* adalah dalam bentuk jalur kereta api internasional yang menghubungkan Propinsi Jiangsu-Rotterdam (Belanda) berupa garis

horizontal sepanjang 11.800 km melewati dan melayani 30 negara. Sepanjang koridor ini Tiongkok telah membuka empat jalur angkutan kereta api, yaitu jalur Choqing ke Duisberg (Jerman), jalur langsung dari Wuhan ke Melnik dan Pardubice (Rep Ceko), rute dari Chengdu ke Lodz (Polandia) dan dari Zhengzhou ke Hamburg (Jerman). Selain itu Tiongkok telah mengeluarkan kebijakan “*one declaration, one inspection, one cargo release*” untuk memperbaiki efisiensi, kemudahan serta pembangunan proyek konstruksi jalur transmisi listrik, jalan raya dan pelabuhan (LehmanBrown, 2017).

Gambar 3: Koridor Pertama The New Eurasia Land Bridge



Sumber:

https://www.google.com/search?q=%E2%80%98The+New+Eurasia+Land+Bridge%E2%80%99+map&safe=strict&client=firefox-b-ab&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=DnFqpyb7mYHKM%253A%252C8QtJjMOFoCjaKM%252C_&usg=AI4_-kQplTyA1-PbU_QI5TkqhrFGluQiA&sa=X&ved=2ahUKEwiK1t6dkeTeAhVD6Y8KHf0AA8wQ9QEwAHoECAUQBA#imgrc=lsfM2f5JgaQk8M:

Negara-negara zone Eropa Tengah dan Timur tidak ketinggalan berhasil ditarik menjadi partner penting BRI. CEECs (Central and Eastern European Countries) secara timbal balik juga memanfaatkan kesempatan dalam pengembangan mega proyek antar pemerintah maupun pemanfaatan dana *start up* untuk revitalisasi ekonomi dan industri mereka. Pada 2011 Tiongkok memulai kerja sama dengan 16 negara Eropa Tengah dan Timur melalui pertemuan para kepala negara di Warsawa (2012) dengan membentuk format kerja sama EU 16+1 (Estonia, Latvia, Lithuania, Polandia, Republik Ceko, Slovakia, Hungaria, Slovenia, Kroatia, Rumania dan Bulgaria) dan Non EU 16+1 (Bosnia, Serbia, Macedonia, Albania, Montenegro dan Kosovo).

Gambar 2: Peta CEE (Format 16+1)



Sumber: <https://geopolitica.eu/more/in-english/2724-china-poland-and-the-belt-and-road-initiative-the-future-of-chinese-engagement-in-central-and-eastern-europe>

Meskipun dalam konteks Uni Eropa negara-negara EU 16 merupakan negara relatif kecil dan sedang berkembang kecuali Polandia, Hongaria dan Rep. Ceko; namun jika digabungkan EU 16 mempunyai potensi daya beli dan ukuran pasar (*market*) yang tidak dapat diabaikan. Tabel 2 menunjukkan gambaran potensi market (jumlah penduduk) dan daya beli per kapita tahun 2015.

Tabel 2: Ukuran Pasar dan Daya Beli per Kapita CEECs (2015)

Negara	Ukuran Pasar (penduduk/juta)	Daya Beli (GDP per Kapita, US\$)
Hungaria	9,9	12,240
Polandia	38,0	12.495
Rep Ceko	10,5	17,257
Romania	19,9	8.906
Slovakia	5,4	15,992
Serbia	7,1	5,120
Estonia	1,3	17,288
Slovenia	2,1	20,732
Bulgaria	7,2	6,832

Lithuania	2,9	14,210
Latvia	2,0	13,619
Kroasia	4,2	11,573
Bosnia dan Herzegovina	3,9	4,088
Macedonia	2,1	4,787
Albania	2,9	3,995
Montenegro	0,6	6,489

Sumber: <http://www.chinagoabroad.com/en/article/21526>

Pada dasarnya CEECs sangat terbuka terhadap BRI sebagai jalan keluar mendapatkan dana dengan mengesampingkan ketentuan Uni Eropa mengenai batas pinjaman yang dimungkinkan. CEECs mempunyai posisi strategis sebagai penghubung (*hub*) Asia dan Eropa Barat. Dengan strategi yang bersifat *outward* ini memungkinkan peningkatan besar-besaran investor Tiongkok dalam proyek-proyek CEECs. Tidak mengherankan jika investasi langsung Tiongkok (*ODI-Outbond Direct Investment*) berkembang pesat disertai dengan peningkatan perdagangan bilateral. Dalam periode lima tahun hingga 2014, ODI Tiongkok ke CEECs meningkat hampir 100% dari \$ 53 milyar menjadi \$ 1.7 trilyun. Tiga negara yaitu Hungaria, Polandia dan Republik Ceko (warna kuning) mencapai lebih dari dua pertiga total diikuti oleh Romania, Bulgaria dan Slovakia yang mencapai 30% (<http://www.chinagoabroad.com/en/article/21526>).

Tabel 3: Stok ODI Tiongkok di 16 Negara CEECs

US\$ Juta	2010	2011	2012	2013	2014
Hungaria	465,70	475.35	507.41	532.35	556.35
Polandia	140,31	201.26	208.11	257.04	329.35
Rep Ceko	52.33	66.83	202.45	204.68	242.69
Romania	124.95	125.83	161.09	145.13	191.37
Bulgaria	18.60	72.56	126.74	149.85	170.27
Slovakia	9.82	25.78	86.01	82.77	127.79
Serbia	4.84	5.05	6.47	18.54	29.71
Lithuania	3.93	3.93	6.97	12.48	12.48
Kroasia	8.13	8.18	8.63	8.31	11.87
Albania	4.43	4.43	4.43	7.03	7.03
Bosnia & Herzegovina	5.98	6.01	6.07	6.13	6.13
Slovenia	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Estonia	7.50	7.50	3.50	3.50	3.50
Macedonia	0.20	0.20	0.26	2.09	2.11
Latvia	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54

Montenegro	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
------------	------	------	------	------	------

Sumber: 2014 Statistical Bulletin of China Outward Foreign Direct Investment dalam

<http://www.chinagoabroad.com/en/article/21526>

Hubungan dagang antara Tiongkok dan CEECs telah berlangsung lama, namun memang masih timpang (tidak berimbang). Pada tahun 2015, ekspor Tiongkok tercatat hampir dua kali impor dari 16 negara CEECs, sesuatu yang sebenarnya tidak diharapkan mengingat harapan akan berbuahnya konektivitas melalui proyek dan investasi BRI dalam bidang infrastruktur seperti jalan raya, tol, terowongan, jembatan, tenaga listrik, area industri dan logistik, pelabuhan laut dan lapangan terbang (<http://www.chinagoabroad.com/en/article/21526>). Dalam kenyataan terdapat kecenderungan perdagangan yang semakin berimbang terutama dengan meningkatnya permintaan produk semacam metal, mineral, kimia, makanan dan minuman dari negara CEECs. Antara tahun 2011 dan 2015 tercatat perdagangan Tiongkok-CEECs meningkat 6,4% dari US\$ 52.9 milyar menjadi US\$ 56,3 milyar. Sementara ekspor Tiongkok ke CEECs pada periode yang sama hanya meningkat 5,0% sedangkan impor dari CEECs menunjukkan peningkatan sebesar 10,5% ([chinagoabroad](http://www.chinagoabroad.com/en/article/21526)). Sama dengan pola ODI, perdagangan Tiongkok dengan 3 partner utama CEECs Polandia, Rep Ceko dan Hungaria mencapai 64% dari seluruh perdagangan Tiongkok-CEECs.

Meskipun kebanyakan CEECs mendukung dan berlomba mendapatkan investasi BRI, namun tingkat partisipasi negara anggota CEECs tidaklah sama. Polandia merupakan salah satu negara yang melihat kemitraan dengan Tiongkok sebagai sesuatu yang strategis. Polandia dianggap sebagai pintu masuk dan penghubungan antara pasar Asia dengan Eropa. Sebagai negara yang telah berkembang secara industrial dan logistik perusahaan Polandia memegang operasional 25% transportasi jalan di Eropa dan juga sebagai anggota pendiri AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank). Pada 2013 jalur kereta Api Chengdu (ibukota propinsi Sichuan, barat Daya Tiongkok) – Lodz (Polandia) berhasil dioperasikan untuk mengangkut barang-barang (*container*) dari Tiongkok ke Polandia untuk kemudian didistribusikan ke London, Paris, Berlin, Roma melalui jaringan kereta api Eropa yang sudah ada. Waktu yang dibutuhkan adalah 10-12 hari, dua kali lebih cepat dari transportasi laut. Sejauh ini jalur KA untuk pengiriman barang telah dibuka di 16 kota di Tiongkok (antara lain Chengdu, Chongking, Xian, Chenzou, Wuhan) menuju 12 kota Eropa terutama CEECs yaitu di Lodz- Polandia, Pardubice- Rep. Ceko dan Kosice- Slovakia dengan peningkatan per tahun mencapai 165% (kompas, 2014). Dengan kata lain BRI telah berdampak positif dalam

pengembangan sektor TSL (Transport-Expedition-Logistics) Polandia dan di masa depan kerja sama yang lebih detail akan dilaksanakan dalam kerangka BRI (http://www.xinhuanet.com/english/2018-08/30/c_137431027.htm). Sementara itu, Hungaria yang merupakan negara Eropa pertama yang menandatangani MOU kerja sama BRI dengan Tiongkok juga melaksanakan kesepakatan pembangunan jalur KA Cepat antara Budapest dan Belgrade ibu kota Serbia dengan 85% investasi Tiongkok yang diharapkan akan memperpendek waktu perjalanan antara dua ibu kota tersebut.

Serbia menjadi mitra strategis Tiongkok mulai 2009 dengan fokus pada kerja sama ekonomi dibawah BRI melalui proyek pembangunan jembatan “Mihailo Pupin” di S. Danube, pembangunan bagian jalan raya Koridor 11 dan perluasan tambang batu bara (<http://www.chinagoabroad.com/en/article/21526>). Sementara itu rencana perluasan jalur cepat Budapest-Belgrade ke Skopje (ibukota Macedonia) dan ke Athena (ibu kota Yunani) akan memberikan alternatif bagi Tiongkok untuk mendapatkan akses ke Laut Aegea dan Mediterania. Untuk mendapatkan sinergi yang lebih baik, perusahaan angkutan Tiongkok Cosco telah mendapatkan saham mayoritas dalam Piraeus Port Authority dan dilengkapi dengan perolehan 35 tahun konsensi untuk mengoperasikan Piers II dan III di pelabuhan Piraeus yang telah diperoleh pada tahun 2009. Sebagai pelabuhan terdekat dengan Terusan Suez, Piraeus tidak hanya pelabuhan terbesar di Mediterania, tetapi juga hub strategis yang menghubungkan ekspor Asia-Eropa. Selain itu Tiongkok juga merencanakan untuk memperbaiki fasilitas pelabuhan di Laut Baltik, Adriatik dan Hitam dengan fokus pada kerja sama peningkatan kapasitas produksi antar pelabuhan dan area industri dan logistik sepanjang daerah pantai.

Diskusi

Sejak pertumbuhannya, BRI telah membuktikan daya tarik “luar biasa” baik bagi negara sedang berkembang maupun negara besar. Bahkan lembaga internasional seperti PBB, IMF, Bank Dunia telah menunjukkan respons positif bahkan berkomitmen menyalurkan dana bagi pembiayaan proyek-proyek BRI. Negara-negara anggota Uni Eropa pun terutama di zone yang “lemah” sudah masuk dan terlibat langsung dengan proyek BRI. Hal ini pasti menimbulkan implikasi bagi perkembangan regionalisme UE.

Dari kacamata Eropa, BRI dianggap sebagai jawaban terhadap kebutuhan yang beragam dan kompleks yang dihadapi Tiongkok dalam konteks kebangkitan sebagai kekuatan global. Terdapat motivasi internal dan eksternal dalam pengembangan BRI (Llandrich, 2017).

Motivasi Internal adalah setelah mengalami perkembangan ekonomi yang pesat sejak 1990-an termasuk pelaksanaan strategi “Going-out” dan bergabung dengan WTO pada 2001, Tiongkok mulai masuk tahap baru (*slow down, new normal*) akibat transisi dari pertumbuhan yang didorong ekspor dan investasi asing menuju ekonomi yang didorong konsumsi domestik, industri dan servis inovatif. Dalam konteks ini BRI menawarkan pembukaan pasar baru dengan berbagai produk dan merupakan jalan keluar bagi masalah “over capacity” produksi yang dihadapi, antara lain dalam produk besi baja. Selain akses terhadap produk ekspor yang lebih murah dan cepat, BRI juga akan menyediakan akses terhadap sumber energi dan bahan mentah. Misalnya infrastruktur yang menghubungkan Asia Tengah dan Rusia dapat digunakan untuk proyek pembangunan pipa gas Siberia dengan kapasitas pengiriman 38 juta kubik meter/th dari Rusia ke Tiongkok. BRI juga merupakan solusi bagi isu instabilitas dan kredibilitas Partai Komunis Tiongkok akibat pertumbuhan ekonomi yang menurun. BRI juga diharapkan mengurangi gap pertumbuhan Tiongkok bagian barat dan tengah jika dibandingkan dengan bagian timur dengan *Special Economic Zone* nya yang lebih makmur. Dengan adanya koridor baru diharapkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan meluas ke barat dan tengah.

Adapun motivasi eksternal dalam konteks munculnya Tiongkok sebagai super power ekonomi dan politik, BRI dapat menjadi alat untuk mengubah regulasi global ekonomi dan mengatur tatanan *global value chain*, termasuk membentuk dinamika regional di kawasan sekitar bahkan kawasan lain (Eropa, Eurasia). BRI menyediakan alternatif bagi kemunduran kerja sama TPP (Trans-Pacific Partnership) dan TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) – sebagai suatu inisiatif internasional dengan horizon global. Dengan kata lain BRI adalah alternatif Tiongkok akan pembentukan sistem global baru. Selain sebagai alternatif mengurangi tekanan ekonomi barat dengan membangun *leverage* terhadap negara-negara kecil di sekitarnya.

Bagaimanapun, perkembangan BRI di kawasan Eropa sangat menonjol dan setidaknya terdapat 2 kecenderungan dalam melihat dinamika BRI terhadap Uni Eropa. Yang pertama melihat kehadiran Tiongkok di Eropa sebagai sesuatu yang positif karena akan meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan, peningkatan pasar, tenaga kerja dan konektivitas. Yang kedua melihat kehadiran BRI sebagai ancaman mengingat strategi BRI tidak begitu jelas sehingga akan menimbulkan ketidakpastian. BRI merupakan platform untuk kepentingan Tiongkok dan bagi negara-negara yang lemah vis a vis Tiongkok akan menimbulkan ketergantungan bahkan potensi hegemoni. Keberhasilan Tiongkok dalam EU 16+1 misalnya dapat dilihat sebagai potensi lobi politik Tiongkok melalui EU 16 terhadap Uni Eropa.

Di tengah agresivitas BRI, UE melaksanakan pendekatan proaktif (*proactive approach*), yaitu dengan tetap menjalin kerja sama dengan Tiongkok melalui EU-China 2020 Strategic Cooperation, dimana kedua pihak sepakat untuk menerapkan kerja sama dalam 4 area utama yaitu (i) Peace and Security, (ii) Prosperity, (iii) Sustainable Development, dan (iv) People to People Exchanges, (<https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20131123.pdf>). Dalam konteks BRI, kerja sama konektivitas disepakati melalui EU-China Summit ke-19 pada Juni 2017 khususnya kerja sama transportasi dan “green transportation” dengan penandatanganan MOU dana bersama antara The European Investment Fund dan Silk Road Fund. Melalui *proactive approach* UE meminta Tiongkok menghormati kesatuan UE dan menuntut penerapan kriteria UE akan nilai keterbukaan (*transparency*), kesinambungan (*sustainability*) dan resiprositas ekonomi dimana BRI merupakan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan pemajuan model demokrasi dan pasar bebas.

Proactive approach juga memerlukan counter strategy yang lebih konkrit khususnya untuk melawan pengaruh Tiongkok di CEECs mengingat bagi UE, BRI secara lingkungan, sosial dan ekonomi dianggap tidak *sustainable* karena masih adanya diskriminasi terhadap pebisnis Eropa, tidak transparan dalam proses *bidding* dan terbatasnya akses pasar ke Tiongkok. Regionalisme ekonomi yang dicanangkan Tiongkok melalui BRI pada akhirnya adalah regionalisme politik – sesuatu yang menjadi tantangan sangat konkrit keutuhan regionalisme Uni Eropa (*European Unity*).

DAFTAR PUSTAKA

- Cipto, Bambang. 2018. *Strategi China Merebut Status Super Power*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghiasy, Richard dan Jaizy Zhou. 2017. *The Silk Road Economic Belt Considering Security Implications and EU-China Cooperation Prospects*. Stockholm International Peace Research Institute dan Friedrich Ebert Stiftung
- Ibrahim, Erlangga dan Syahrizal Budi Putranto. 2017. *Jalur Sutera Bagian 1: China Perjalanan dari Xi'an ke Kashgar*. Jakarta: PT Gramedia.
- Llandrich, Oriol Nierga. 2017. *China's New Silk Road and Its Implication for European Integration*. Aalborg University, Denmark.

Bond, Ian. 2017. The EU, The Eurasian Economic Union and One Belt One Road: Can They Work Together? Center for European Reform. [ef/2017/eu-urasian-economic-union-and-one-belt-one-road-can-they](http://www.cepr.org/2017/eu-urasian-economic-union-and-one-belt-one-road-can-they)

LehmanBrown. International Accountant. The Belt and Road Initiative. <https://www.lehmanbrown.com/wp-content/uploads/2017/08/The-Belt-and-RoadInitiative.pdf>

Fardella, Enrico dan Giorgio Prodi. (2017). “The Belt and Road Initiative: Impact on Europe: An Italian Perspective”. *China & World Economy* 25(5), 125–138

Tenggara Strategics. (2018). Belt and Road Initiative (BRI) What’s in it for Indonesia?

Tenggara Strategic Briefing Paper.

Wang, Xieshu, Joel Ruet dan Xavier Richet. 2017. One Belt One Road and The Reconfiguration of China-EU Relations. HAL archives-ouvertes.fr.<https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01499020/document>

Yuniarto, Paulus Rudolf. 2016. Tunjauan Buku China Belt and Road Initiative: Pembangunan Infrastruktur dan Perluasan Hegemoni Ekonomi Tiongkok di Dunia dari buku Wang Yiwei, *The Belt and Road Initiative: What Will China Offer the World In Its Rise*. New World Press: Beijing. 214 halaman. Bahasa Inggris. 2016. jkw.psdr.lipi.go.id/index.php/jkw/article/download/781/pdf.

http://www.xinhuanet.com/english/2016-06/24/c_135464233.htm

http://www.xinhuanet.com/english/2015-03/28/c_134105435.htm.

http://www.china.org.cn/world/2016-11/29/content_39810427.htm

http://www.china.org.cn/china/2017-01/05/content_40044651.htm

http://www.xinhuanet.com/english/2016-06/24/c_135464233.htm.

<https://safety4sea.com/timeline-of-belt-and-road-development/>

<http://www.chinagoabroad.com/en/article/21526>

<https://properti.kompas.com/read/2014/07/06/011754621/Ke.Eropa>

http://www.xinhuanet.com/english/2018-08/30/c_137431027.htm

<http://www.chinagoabroad.com/en/article/21526>

Membangun Kedaulatan Negara dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (Studi Komparasi Perspektif Islam dan Liberal)

Siti Muslikhati

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

sitimusikhati@umy.ac.id

Abstract

This paper will describe the Islamic view on the strategy of building sovereignty in the management of natural resources, including the management of the sea. Although Developing Countries, most of which are Muslim, have succeeded in gaining independence from the invaders in the mid-20th century, but to this day the Advanced Industrial State, which has a liberal ideology, has not abandoned its occupation of developing countries. Evidence of the ongoing of colonialism is that the State is not independent in the management of natural resources. This paper uses a political economy approach to analyze the causes of the State not having sovereignty in managing the natural resources and their implications, as well as offering a view of Islam related to strategies to realize the essential sovereignty in managing natural resources so that they can realize "rahmatan lil 'alamin.

keywords: *sovereignty, natural resources, political economy approach*

Pendahuluan

Berbicara tentang Kedaulatan Negara-Bangsa (*the Nation-State Sovereignty*) dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam adalah berbicara tentang korelasi antara politik dan ekonomi. Konsep *Nation-State Sovereignty* dimunculkan dalam Perjanjian Westphalia tahun 1648 sebagai kounter terhadap dominasi kekuasaan politik gereja (*Papal State*). (Papp, 1988, pp. 17-18) Negara adalah pemilik otoritas tertinggi, sehingga bersamaan dengan konsep kedaulatan negara muncullah konsep "*the equality of nations*". Dalam konsep klasik Westphalia, kedaulatan negara dimaknai sebagai hak negara untuk memonopoli penggunaan power atas teritorial dan penduduknya. Kewenangan untuk mengelola dan mengendalikan sumber-sumber ekonomi berupa sumber daya alam (teritorial) dan sumber daya manusia (penduduk) ada pada negara. Pola relasi ini disebut dengan pendekatan politik ekonomi (*the primacy of politics*). (Staniland, 1985, p. 70)

Konsep klasik kedaulatan negara ini kemudian mendapat tantangan dari aktor baru non-state yang menjadi penggerak Revolusi industri abad ke-18. Mereka adalah kelompok Kelas Menengah, yang memiliki kekuatan dalam mengelola sumber daya alam (ekonomi negara). (JACKSON, 2008) Munculnya aktor negara, kemudian ditantang oleh aktor non-negara (aktor ekonomi) dalam hubungan internasional, merupakan awal perdebatan panjang terkait relasi antara politik (negara) dan ekonomi (perusahaan). Pada pertengahan abad ke-18 itulah Studi Ekonomi Politik mulai mendapatkan bentuk. (Deliarnov, 2006, pp. 1-2) Kebutuhan untuk

menggunakan pendekatan ekonomi politik makin meningkat setelah berakhirnya Perang Dunia II, di mana terjadi gelombang proliferasi Negara Bangsa Jilid 2. (Papp, 1988, pp. 24-28) Pada umumnya, Negara-negara Sedang Berkembang, yang sebagian besarnya adalah Negeri Muslim, berhasil mendapatkan kemerdekaan dari penjajah pada tahun-tahun sesudah berakhirnya Perang Dunia II. Daniel S. Papp menyebutkan dua karakteristik penting dari Negara-Negara Sedang Berkembang, yaitu pertama, mereka mempunyai pengalaman sebagai jajahan dan kedua, mereka terbelakang dan miskin. (Papp, 1988, p. 326)

Permasalahannya adalah betulkah Negara Industri Maju sudah melepaskan penjajahannya atas Negara-negara Berkembang ? Tulisan ini berupaya untuk melakukan analisa terhadap masalah kemerdekaan dan kedaulatan, dan sekaligus memberikan masukan bagi terwujudnya kemerdekaan hakiki di tengah-tengah kehidupan dunia.

Globalisasi, Penjajahan Gaya Baru dan Eksploitasi Sumber Daya Alam

Gelombang imperialisme Klasik Eropa ke Negara-negara Asia – Afrika terjadi seiring dengan berkembangnya kapitalisme industrial abad ke-18. Lenin melakukan analisa bahwa kapitalisme hanya akan bisa bertahan dan selamat dengan mencapai tahap imperialisme. Dalam rangka mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya (*the highest rate of return*), mau tidak mau kapitalisme harus melakukan ekspansi di seluruh dunia. Ekspansi ini dalam rangka untuk mendapatkan kesempatan menanamkan modal, mencari pasar, menguasai bahan mentah dan mendapatkan buruh yang murah. (Jones, 1991, pp. 10-11) Pada abad-abad ini, imperialisme dilakukan oleh kekuatan-kekuatan ekonomi Eropa (Korporasi), dengan cara langsung mendatangi wilayah-wilayah jajahannya dan sepenuhnya ditopang secara politik dan militer oleh pemerintah negaranya. Untuk mempertahankan imperialisme dan kolonialismenya, negara-negara Barat memerlukan komponen penopang yang berupa perbankan, dukungan kaum intelektual, media massa dan dukungan elit nasional bangsa yang dijajah. (Rais, 2008, pp. 5-9) Dari sini kita bisa memahami bahwa Ideologi Kapitalisme menggunakan pendekatan ekonomi politik dalam melihat korelasi antara ekonomi dan politik. Artinya Kapitalisme menjadikan kekuatan korporasi sebagai panglima, yang memimpin sekaligus mengendalikan kekuatan politik yang ada di tengah-tengah masyarakat. (Deliarnov, 2006, pp. 11-16)

Berakhirnya Perang Dunia II membawa sedikit perubahan pada konstelasi politik dunia. Satu sisi, Negara-negara jajahan di Asia Afrika satu persatu mendapatkan kemerdekaannya dari Para Penjajahnya, yaitu negara-negara Eropa. Di sisi lain, ketergantungan terhadap mantan penjajahnya tetap dipertahankan, dengan misalnya pengadopsian sistem politik, ekonomi dan

hukum milik Negara Penjajah. Amerika Serikat, sebagai negara pemenang perang, segera menggantikan posisi Eropa dalam menjaga berlangsungnya ideologi kapitalisme sekaligus memimpin dunia berdasarkan ideologi tersebut. Amerika membentuk 3 institusi yang menopang menduniannya ide kapitalisme, yaitu IMF, World Bank dan GATT (sekarang berubah menjadi WTO). (Mas'ood, 2003, pp. 1-12)

Di era modern, ketika dunia menikmati kemajuan teknologi komunikasi, transportasi dan informasi, maka kemudahan di dalam terjadinya berbagai transaksi internasional pun tidak bisa dielakkan. Lalu lintas bebas manusia (tenaga kerja), modal, barang, jasa dan pengetahuan tidak bisa terbendung. Kekuatan-kekuatan pasar dan pusat-pusat keuangan meledak menerobos batas-batas nasional. Dunia pun menjadi terglobalkan. Amerika Serikat lewat tiga tangannya, yaitu IMF, Bank Dunia dan WTO, menjual keyakinan ke seluruh dunia bahwa ekonomi pasar bebas akan menjamin efisiensi lewat kompetisi / persaingan dan pembagian kerja. Dunia akan dikuasai oleh kekuatan ekonomi, bukan politik dan militer. Kekuasaan Negara Bangsa akan semakin meredup. Globalisasi ekonomi memang memiliki tujuan pokok yaitu menggusur peran negara dan menggantikannya dengan lembaga-lembaga swasta dan melepaskan kekuatan-kekuatan ekonomi dari belenggu regulasi negara.

Bagaimana nasib Negara-negara Sedang Berkembang, yang sebagian besarnya adalah Negeri Musim, di tengah gelombang globalisasi kapitalisme modern ? Lima Puluh tahun yang lalu, Bung Karno sudah menyebut sepak terjang Amerika dan sekutunya, dengan berbagai lembaga dunia yang dibentuknya, sebagai neo-kolonialisme. (Dr. dr. Siti Fadilah Supari, 2008) Kemudian Mahatir Muhammad mengingatkan kita bahwa globalisasi ekonomi dewasa ini hakikatnya adalah imperialisme ekonomi atau neokolonialisme. Sebagaimana kita ketahui, imperialisme jaman dulu bercirikan 3 hal, yaitu adanya kesenjangan kemakmuran antara negara penjajah dan terjajah, hubungan yang eksploitatif dan hilangnya kedaulatan negara terjajah. (Rais, 2008, pp. 20-21)

Kapitalisme modern sepertinya tidak beda dengan kapitalisme lama. Yang dihasilkan dari kapitalisme modern adalah kesenjangan kemakmuran yang makin menganga antara negara kaya dengan negara miskin. Di tahun 1960, sebanyak 20% penduduk paling atas berpenghasilan 30 kali lebih besar daripada 20% penduduk paling bawah. Di tahun 1970 menjadi 32 kali, kemudian menjadi 45 kali di tahun 1980 dan 60 kali pada tahun 1990. Di akhir abad ke-20 semakin membesar menjadi 75 kali. Di bidang kesehatan, 90% perdagangan vaksin di dunia hanya dikuasai oleh 10% penduduk di negara kaya. Padahal sebageian besar kasus penyakit terjadi di Negara Sedang Berkembang. Ketidakadilan menjadi ciri dominan globalisasi

ekonomi. (Dr. dr. Siti Fadilah Supari, 2008, pp. 169-172) Begitu juga kekuatan korporasi multinasional, sebagai body konkrit kapitalisme, banyak melakukan kejahatan berupa pelanggaran HAM, pengrusakan lingkungan dan menguras kekayaan alam negara-negara Berkembang tanpa bisa dijangkau oleh hukum dan politik di negara yang menjadi korban. Dalam bidang kesehatan, penderitaan umat manusia diperdagangkan oleh manusia lainnya tanpa tatakrama. Bahkan organisasi global seperti WHO, yang mestinya bertugas mensejahterakan umat manusia di dunia, ikut terlibat dalam jual beli penderitaan manusia. (Dr. dr. Siti Fadilah Supari, 2008, pp. 11-12)

Sejarah kembali berulang. Meskipun sudah lebih dari setengah abad Indonesia memproklamkan kemerdekaannya, sesungguhnya, kemerdekaan dan kedaulatan itu masih semu. Belum ada perubahan yang mendasar antara yang kita alami sekarang ini dengan yang terjadi pada saat Indonesia dijajah Belanda. Perbedaan antara tempo doeloe dengan masa sekarang hanyalah dalam bentuk dan format belaka. Dulu pendudukan fisik dan militer Belanda menyebabkan Bangsa Indonesia kehilangan kemerdekaan, kemandirian dan kedaulatan secara politik, ekonomi, sosial, hukum dan pertahanan. Sedangkan sekarang, pendudukan fisik dan militer asing itu secara resmi sudah tidak ada dan tidak kelihatan. Namun dalam banyak hal kita masih tetap tergantung dan menggantungkan diri pada kekuatan asing. Apa yang kita saksikan dewasa ini pada hakikatnya dalam banyak hal merupakan pengulangan dari sejarah kolonial. (Rais, 2008, p. 1)

Kekuatan Menghadapi Kapitalisme

Strategi menghadapi Kapitalisme harus didasarkan pada analisis tentang kemampuan Kapitalisme menguasai dunia.. Sebagaimana sudah dipaparkan di bagian awal, bahwa kapitalisme bisa mengglobal karena adanya negara pengemban ideologi tersebut, yaitu Amerika Serikat dan juga Negara-negara Uni Eropa. Yang harus kita sadari adalah bahwa Amerika Serikat sebagai sebuah negara bangsa tidaklah cukup kuat untuk bisa mendukung berlakunya ideologi Kapitalisme di seluruh dunia. Integrasi ekonomi secara menyeluruh, membutuhkan kekuatan di atas negara bangsa, yaitu lembaga-lembaga internasional (organisasi internasional). Lembaga-lembaga inilah yang akan mengoperasionalkan secara praktis seperangkat ideologi yang diemban oleh pendiri lembaga tadi ke seluruh penjuru dunia. (Strange, 1988, pp. 43-44) Dalam hal ini, bisa dikatakan bahwa PBB, IMF, World Bank dan WTO memang sengaja dibentuk oleh negara-negara pengemban ideologi kapitalisme untuk menjadi penopang penting bagi berlangsungnya kapitalisme.

Tentang keberadaan organisasi internasional, keseluruhan institusi ini sebenarnya dimaksudkan untuk tujuan yang relatif sama, yaitu mencegah masyarakat agar tidak menjadi anarkhi, sekaligus menciptakan perdamaian, keadilan dan harmoni. (Wolfe, 1999, pp. 283-287) Secara teoritik dan praktis, kemampuan mengembangkan kerjasama di antara unit-unit politik atau negara-negara yang selama berabad-abad bermusuhan sangat menarik untuk dipelajari. Meskipun organisasi global yang besar merupakan fenomena abad ke-20, namun kita bisa menelusuri cikal bakalnya pada awal catatan sejarah. Dengan melihat ke masa lalu, kita akan menemukan contoh-contoh institusi global yang jumlahnya lebih sedikit dibanding peringatan dan nasihat-nasihat para filsof yang mendesak dibentuknya “satu dunia”. Dalam sejarah, gerakan menuju terciptanya tata dunia berulang kali telah dilaksanakan oleh berbagai kelompok pecinta damai, baik para filsuf, pemikir agama, kaum imperialis maupun tokoh nasionalis fanatik. Negara kota Yunani Kuno tercatat telah membentuk model pertama organisasi internasional yang bertujuan umum dan universal dengan menyusun Liga *Amphictyonic*. Selanjutnya pola-pola organisasi global seperti yang ditunjukkan oleh Kerajaan Persia, Makedonia, Romawi, Byzantium, Arab, Ottoman dan Inggris bisa menjadi contoh adanya berbagai bentuk institusi politik global.

Pada awalnya, keinginan untuk membentuk organisasi global itu merupakan reaksi terhadap konflik dan perang. Meskipun keinginan keras manusia untuk mencapai perdamaian, keadilan dan harmoni sering juga menjadi kekuatan konflik dan pertumpahan darah. Si “kembar siam” perang dan damai saling berdampingan pada masa gencatan senjata. Individu-individu yang bijaksana secara tegas mendesak agar dilakukan pemecahan masalah konflik dan perang, yang tampaknya sulit dipecahkan secara global. Para pemikir seperti pujangga Italia Dante (abad ke-13), William Penn (abad ke-17), Abbe St. Pierre, Jean Jacques Rousseau, Immanuel Kant dan Jeremy Bentham (abad ke-18), dan Saint Simon, William Ladd, William Jey, Gustave de Molinary, Johan Caspar Bluntschli dan James Lorimer (abad ke-19) telah menganjurkan berbagai pendekatan yang bisa digunakan untuk mencapai pemerintahan (negara) global dan perdamaian abadi. (Hinsley, 1963) Meskipun secara politik nama sebutan yang diberikan kepada individu-individu tadi bersifat meremehkan – seperti “idealis” atau “utopia” – namun semuanya menganjurkan pengalihan kedaulatan nasional kepada suatu otoritas dunia yang terpusat secara moderat. Kebanyakan di antara saran-saran kaum “utopia” ini secara bertahap dihubungkan dengan eksperimen besar dalam organisasi internasional abad ke-20.

Di pertengahan abad ke-20, gagasan tentang tata dunia menjadi populer akibat terjadinya perang dunia dan perlombaan senjata nuklir.. Sampai saat ini gerakan tersebut identik dengan upaya pembentukan pemerintahan dunia. Pada umumnya upaya perwujudan dan popularitas gagasan tersebut memuncak menjelang atau pada saat perang-perang besar berakhir. Tampaknya kecenderungan ini bertolak dari sebuah kaidah ilmu politik dunia yang sederhana : Bila negara-bangsa berhasil melaksanakan tugasnya dengan memuaskan dan gangguan eksternal tidak banyak terjadi, maka gagasan pemerintahan dunia akan sepi peminat. Tetapi sebaliknya bila sistem negara bangsa gagal, gagasan itu akan mendapat sambutan yang hangat. (Jones, 1991, p. 654)

Kapitalisme di satu sisi memang diakui membawa pada perkembangan spektakuler dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memberi andil di dalam kemajuan dunia, namun di sisi lain ternyata menyisakan bahaya yang potensial untuk mengancam kelangsungan kehidupan dunia. (Budiman, 1995, p. 8) Kerusakan lingkungan alam, masalah-masalah sosial, seperti kemiskinan, ketimpangan, kerusakan, eksploitasi manusia atas manusia lain, dan lain-lain, bisa diambil sebagai contoh bahaya potensial bagi keberlangsungan dunia tersebut. Yang menarik adalah bahwa kemampuan negara-bangsa untuk secara otonom dan individual menyelesaikan masalah-masalah tersebut ternyata sering dipertanyakan. Hal ini disebabkan karena berbagai problem yang dihadapi dunia, yang merupakan masalah-masalah humanitas, secara pasti memiliki pengaruh lokal dan regional, akan tetapi permasalahan tersebut tidak bisa dipahami sebatas konteks lokal dan regional. Dengan kata lain problem tersebut menuntut efektifitas pendekatan pada level global. (Papp, 1988, p. 465) Gagasan tentang Tata Dunia Baru kembali mencuat bukan semata-mata karena ketakutan manusia akan bahaya perang namun juga bahaya dari perkembangan-perkembangan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dari paparan di atas bisa disimpulkan, bahwa kesuksesan kapitalisme dalam mengendalikan dunia ditopang sangat kuat oleh keberadaan lembaga-lembaga internasional yang beroperasi di atas kekuatan negara bangsa. Ketika kapitalisme meninggalkan masalah yang juga tidak bisa dibendung pada batas teritorial tertentu, mau tidak mau dibutuhkan kekuatan yang juga lintas batas negara bangsa untuk menyelesaikan berbagai masalah tersebut. Tetapi karena berbagai organisasi global, yang diklaim sebagai bertugas menangani berbagai masalah yang dihasilkan oleh kapitalisme, itu dibentuk juga oleh negara-negara pendukung kapitalisme, sehingga tetap saja organisasi internasional itu tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai pencipta perdamaian, kesejahteraan, keadilan dan harmoni antar umat manusia.

Setelah ambruknya Uni Soviet, secara ideologis-politis, terjadi perubahan yang menarik. Isu Tata Dunia Baru kembali menjadi populer setelah dilontarkan oleh mantan Presiden AS, George Bush. Secara ideologis-politis, isu tersebut diangkat untuk kepentingan AS dalam mempertahankan hegemoninya atas dunia, yaitu sebagai satu-satunya *superpower*, pengusung ideologi kapitalisme, sekaligus bertindak sebagai ‘polisi dunia’, mengiringi runtuhnya Uni Soviet. Namun tidak dipungkiri bahwa ada usaha-usaha dari pihak lain untuk berperan di panggung politik internasional, baik yang berasal dari sekutu-sekutu dekatnya di dunia Barat seperti Eropa Barat. (Haas, 1958) maupun dari rival barunya dari Dunia Timur seperti Islam.

Kecenderungan membandingkan konsepsi dan pemikiran politik Barat dan non Barat (termasuk Islam), sebenarnya sudah merupakan fenomena sesudah PD II. Hal ini ditandai dengan adanya ketidakpuasan terhadap pendekatan tradisional dalam perbandingan politik yang dianggap lebih mengkhhususkan diri pada bentuk kebudayaan tertentu, yaitu Dunia Barat, di mana fokus kajiannya adalah pada lembaga-lembaga formal pemerintah dalam sistem di Negara Barat sehingga kurang sensitif terhadap faktor-faktor dan proses-proses informal yang beroperasi di luar lembaga-lembaga formal pemerintah. (Brown R. C., 1992, pp. 3-5) Kajian tentang perbandingan politik yang menurut Harry Eckstein berlangsung cepat sekali, khususnya melalui studi intensif terhadap sistem negara non-Barat, telah menyebabkan perhatian diletakkan pada peran politik kelompok-kelompok sosial yang memainkan peran penting dalam membentuk nilai-nilai beserta kesadaran politik, loyalitas, dan identifikasi. (Harry Eckstein and David Apter, 1963, p. 23)

Kemerdekaan dan Kedaulatan dalam Pandangan Islam

Merdeka atau berdaulat adalah kondisi di mana seseorang mampu untuk mengendalikan diri, mengatur diri tanpa terikat dengan belenggu-belenggu di luar dirinya. Kondisi sebaliknya adalah kondisi terjajah atau tergantung. Antony Anghie mengatakan bahwa konsep kedaulatan selalu muncul sebagai kounter terhadap diskriminasi rasial, subordinasi kultural dan eksploitasi ekonomi oleh pihak lain. Konfrontasi terhadap penjajahan adalah sentral bagi pembentukan hukum dan kedaulatan internasional. (Anghie, 2004, p. 3)

Kemerdekaan sesungguhnya tidak akan melekat pada sesuatu yang memiliki keterbatasan. Karena keterbatasan akan menyebabkan sesuatu tergantung pada yang lain. Dunia beserta seluruh isinya, termasuk manusia, adalah makhluk semata. Ciri makhluk adalah dia diciptakan oleh sesuatu di luar dirinya, sehingga dia terbatas dalam keberadaannya. Dalam

kondisi seperti ini, manusia memang tidak mungkin menggantungkan kedaulatan pada akal manusia. Karena kita paham, meskipun nilai keadilan, keharmonisan, kesejahteraan, keselamatan adalah nilai yang diimpikan oleh semua umat manusia, namun terealisasinya nilai-nilai tersebut secara adil untuk semua manusia pasti membutuhkan ukuran-ukuran / standar-standar yang berasal dari kekuatan yang memiliki kesempurnaan pengetahuan tentang hakikat alam semesta ini. Tentunya manusia, sebagai makhluk, sangatlah terbatas kemampuannya untuk membuat ukuran bagi nilai-nilai tadi. Ukuran yang dibuat manusia selalu akan terbatas oleh kemampuan akalnya, dan terbatas juga oleh lingkup ruang dan waktu.

Di sinilah kita menyaksikan bahwa Ideologi Kapitalisme tidak mampu merealisasikan seperangkat nilai-nilai kehidupan berupa keadilan, keharmonisan, kesejahteraan dan keselamatan untuk seluruh manusia, karena memang ideologi itu dibangun di atas kedaulatan akal manusia. Sehingga diberlakukannya ideologi ini, baik oleh individu, kelompok individu, negara bangsa, maupun organisasi internasional, hanya akan memberi keuntungan pada segelintir orang dan mengorbankan sebagian besar yang lain. Keuntungan itu pun sesungguhnya sebatas keuntungan materi yang difatnya sangat temporer / sesaat. Karena di akhirat, manusia tidak akan dimintai pertanggungjawaban berdasar seberapa banyak materi yang didapat. Kemerdekaan dan kedaulatan yang dibangun oleh Ideologi Kapitalisme hanyalah semu belaka.

Lantas bagaimana kita bisa mendapatkan kemerdekaan dan kedaulatan yang hakiki ? Sesungguhnya manusia adalah makhluk dari Al Kholiqnya, yaitu Allah SWT. Allah menciptakan manusia dan membekali kehidupan manusia dengan potensi kehidupan berupa serangkaian kebutuhan hidup. Problem kehidupan manusia adalah bagaimana memenuhi keseluruhan kebutuhan hidup dengan efisien (mudah) dan efektif (benar). Untuk bisa memenuhi serangkaian kebutuhan hidup manusia dengan lengkap dan benar, Allah menciptakan alam semesta (ayat-ayat kauniyah) dan sekaligus wahyu, yaitu Al Quran (ayat-ayat qauliyah) untuk manusia. Kemudian Allah melengkapi kesempurnaan pengelolaan kehidupan dengan mengutus Nabi dan Rosulnya.

Manusia dibedakan dengan makhluk lainnya dengan adanya akal. Sekaligus dengan kekuatan akal itulah manusia dijadikan sebagai "*Khalifatullah fil Ardh*". Akal punya kekuatan untuk mengelola alam semesta. Hanya saja karena akal pun tetap terbatas, di mana akal hanya bisa memikirkan sesuatu yang terindra, sementara yang terindra oleh manusia selalu dibatasi oleh ruang dan waktu, maka pastilah akal tidak akan mampu membuat standar-standar kualitas kehidupan sekaligus aturan main kehidupan bersama yang manusiawi dan adil dan bisa berlaku

universal. Tindakan rasional yang bisa ditempuh manusia untuk mendapatkan keadilan dan kebahagiaan sejati adalah dengan tunduk dan patuh kepada kekuatan di atas dirinya, yaitu Allah SWT. Di sinilah kita bisa memahami, bahwa sesungguhnya Islam diturunkan di muka bumi ini untuk mengarahkan penghambaan makhluk (manusia) kepada Al Kholiqnya dan menggantikan berbagai penghambaan makhluk (manusia) kepada sesama makhluk. Yang hendak diganti tidak sekedar penghambaan manusia kepada makhluk selain manusia, semisal matahari, gunung, patung, pohon beringin, dll, tetapi juga penghambaan manusia kepada sesama manusia. (Hawari, 2011, pp. 3-12)

Menempatkan kedaulatan di tangan Hukum Syara' artinya manusia menjadikan Allah dan Rosul-Nya sebagai sumber hukum dan pengaturan di dalam kehidupan mereka. Allah mengamanahkan pengaturan kehidupan di tangan para Nabi dan Rosul-Nya. Ketika era kenabian berakhir (Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir), maka estafet pengaturan kehidupan diserahkan kepada para pengganti Nabi, yaitu para Khalifah. Era Kepemimpinan sesudah Nabi disebut dengan istilah Khalafaur Rasyidin. Allah melalui Rosul-Nya menyampaikan bahwa "*Al Imaamu Ro'in, fahuwa mas'ulun 'an ro'iyatihi*" (Seorang Imam / Penguasa adalah pengatur, pengelola kehidupan, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terkait pengelolaannya). (Abdurrahman, 2014, pp. 44-63)

Menggantungkan diri (tunduk dan patuh) kepada sesama makhluk adalah kesia-siaan. Kapitalisme esensinya adalah penghambaan manusia kepada sesama manusia. Sehingga Islam menawarkan mekanisme untuk menciptakan keadilan, keharmonisan, kesejahteraan, keselamatan bagi seluruh manusia, bahkan pada seluruh alam, dengan menjadikan tauhid sebagai dasar pandangannya terhadap dunia. (Al-Faruqi, 2001, pp. 109-111) Kemerdekaan hakiki tidak akan tercipta pada kehidupan manusia, kecuali manusia mau menghambakan dirinya kepada Penciptanya, yaitu Allah SWT. Kemerdekaan hakiki perlu dimaknai sebagai menjadikan Allah sumber kedaulatan, rujukan dalam pembuatan aturan main yang akan diberlakukan di muka bumi ini. Tentunya keberadaan kedaulatan Allah ini tidak hanya berlaku dalam skala individu, tetapi lebih-lebih dalam skala negara dan juga organisasi dunia. Kekuatan Kapitalisme, yang sudah diimplementasikan dalam skala individu, negara dan sistem dunia, juga hanya bisa dihadapi oleh kekuatan ideologi lain yaitu Islam, yang juga harus diimplementasikan dalam skala individu, negara dan sistem dunia. Inilah perubahan kehidupan yang sesungguhnya.

Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Pandangan Islam

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia membutuhkan manusia yang lain (jasa) dan sumber daya alam (barang). Allah memberikan kepada semua bangsa 4 jenis sumber ekonomi primer, yaitu tanah (barang), daya kreasi manusia dan tenaga manusia (jasa) serta pertukaran barang dan jasa antara manusia (Perdagangan). (Maliki, 2009, pp. 48-51) Kehidupan sebuah Bangsa hakikatnya adalah pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam, berdasar pemikiran politik tertentu. Konsekuensi kedaulatan di tangan Hukum Syara' dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam adalah menjadikan Hukum Syara' sebagai rujukan sekaligus panduan di dalam menata kehidupan ekonomi masyarakat. Islam menjadikan kewenangan untuk mengelola dan menata kehidupan di tangan Imam (Kepala Negara), termasuk otoritas untuk mengatur kehidupan ekonomi adalah di tangan Imam. Islam menempatkan korelasi antara politik dan ekonomi, dengan pendekatan politik ekonomi, yaitu Imam, sebagai representasi negara (politik) lah yang memimpin dan memandu proses distribusi sumber-sumber ekonomi secara baik di tengah-tengah masyarakat. Tentu saja seorang Imam, dalam pandangan Islam, akan menerapkan Hukum Islam dalam mengelola ekonomi, karena seorang imam dibaiat (diangkat) oleh umat untuk menjalankan Kitabullah dan Sunnah Rosul. (Abdurrahman, 2014, pp. 202-208)

Politik Ekonomi Islam dibangun atas 4 prinsip, (Maliki, 2009, pp. 44-47) yaitu pertama, pandangan bahwa tiap individu adalah manusia dan semua manusia punya kebutuhan hidup yang perlu dipenuhi. Kedua, bahwa kebutuhan hidup yang primer (*basic needs*) setiap orang harus dipenuhi secara keseluruhan. Ketiga, bekerja sebagai upaya mendapatkan kekayaan dan mengembangkan kekayaan adalah hukumnya mubah (halal), demi meraih kemakmuran hidup. Keempat, nilai-nilai luhur (halal haram) harus mendominasi seluruh interaksi antar individu di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian politik ekonomi Islam tidak menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai asasnya, tetapi politik ekonomi Islam adalah solusi atas berbagai masalah individu dalam kapasitasnya sebagai manusia. Politik ekonomi Islam bukan semata-mata menjamin tersedianya barang dan jasa lewat proses pertumbuhan ekonomi, namun politik ekonomi Islam diarahkan untuk 2 tujuan, yaitu pertama, menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok seluruh individu masyarakat, orang per orang, sekaligus yang kedua, menjamin terpenuhinya kebutuhan sekunder dan tersier sesuai dengan kemampuan tiap individu. Sehingga dasar politik ekonomi Islam adalah pendistribusian kekayaan, bukan pertumbuhan ekonomi.

Terkait dengan harta kekayaan yang ada di alam semesta ini, Islam memandang bahwa seluruh harta kekayaan yang secara alamiah ada di alam semesta, adalah milik Allah dan boleh dikuasai, dieksplorasi dan dimanfaatkan oleh manusia (QS 2:29, 45:12,80:24-32, 21:80, 57:25. (Nabhani, 2004, pp. 57-58) Penguasaan (*istikhlaf*) berlaku secara umum bagi semua manusia, asalkan telah mendapatkan ijin dari-Nya. Seluruh ijin itu tertuang dalam wahyu yang diturunkan ke muka bumi, berupa Al Quran dan As Sunnah. Allah menurunkan Hukum-hukum Syariat yang menyangkut ekonomi dalam kerangka untuk memecahkan masalah bagaimana kekayaan yang ada bisa dimanfaatkan secara adil dan manusiawi. Islam mengatur bagaimana cara memperoleh kekayaan, mengelola kekayaan dan mendistribusikan kekayaan di tengah-tengah masyarakat. Atas dasar ini, Sistem Ekonomi Islam dibangun atas 3 pilar, yaitu kepemilikan (property/ownership), pengelolaan kepemilikan dan distribusi kekayaan. (Nabhani, 2004, p. 66)

Islam membagi kepemilikan akan harta ke dalam 3 jenis kepemilikan, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara. (Dwi Condro Triono, 2011, p. 312) Pertama, Kepemilikan individu adalah ijin Asy Syari' kepada individu untuk memanfaatkan zat tertentu, baik mengkonsumsi maupun mengembangkan harta tersebut. Allah memberikannya kepada seseorang melalui mekanisme sebab-sebab kepemilikan (*al kaifiyah at tamalluk*), kemudian setelah menjadi kepemilikannya secara sah, Allah juga mengatur mekanisme pengelolaan kepemilikan. (Nabhani, 2004, pp. 69-73)

Kedua, kepemilikan umum adalah ijin Asy Syari' kepada suatu komunitas masyarakat untuk bersama-sama memanfaatkan benda/barang. Ada 3 jenis benda yang termasuk ke dalam kepemilikan umum, yaitu 1) barang yang merupakan fasilitas umum, yang menjadikan kehidupan suatu komunitas masyarakat tidak akan bisa dilepaskan dari barang-barang tersebut, seperti sumber air, hutan (sumber oksigen) dan api (sumber energi), 2) barang tambang yang tidak terbatas, dan 3) sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki secara individual, seperti sungai, laut, danau, tanah-tanah umum, gunung, teluk dan lain-lain. Pada ketiga barang ini, Rosul melarang untuk dimiliki secara individual, karena ketika dimiliki oleh individu, maka akan menghalangi terpenuhinya kebutuhan komunitas masyarakat akan barang tersebut. Negara pun tidak boleh memberikan kepemilikan ketiga jenis barang tersebut kepada individu

Ketiga, kepemilikan negara adalah harta yang tidak terkategori ke dalam kepemilikan umum, tetapi terkait dengan hak kaum muslimin secara umum. Pengelolaan harta ini sepenuhnya menjadi wewenang kepala negara (Imam). Hanya saja berbeda dengan harta

kepemilikan umum, pada harta kepemilikan negara ini, negara boleh memberikannya kepada individu. Yang termasuk ke dalam kepemilikan negara adalah 1) jizyah yaitu hak yang diberikan Allah kepada kaum muslimin dari orang-orang Kafir yang tunduk pada pemerintahan Islam. Harta ini harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan seluruh rakyat, 2) ghanimah yaitu hak yang diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin dari kaum kafir dengan jalan perang (jihad), 3) Fa'i yaitu hak yang diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin dari kaum kafir tanpa melalui peperangan (musuh melarikan diri), 4) Kharaj adalah hak yang dikenakan atas lahan tanah yang telah ditakhlukkan oleh Kaum Muslimin, 5) 'Usyur adalah hak yang dikenakan atas hasil pertanian dari tanah yang penduduknya memeluk Islam tanpa peperangan, 6) Khumus (seperlima) dari Rikaz yaitu harta yang diperoleh dari aktifitas menggali kandungan bumi.

Kesimpulan

Negeri-negeri yang ada di Dunia Islam, yang memiliki sumber daya alam melimpah, hari ini menghadapi problem ekonomi yang serius, berupa kemiskinan, pengangguran dan keterbelakangan karena negeri-negeri ini masih terus dijajah oleh Barat. Mereka tidak memiliki kedaulatan dalam mengelola sumber daya alam yang ada di wilayahnya. Pengelolaannya merujuk kepada pendekatan ekonomi politik yang diadopsi oleh Ideologi Liberal, yang menjadikan Kaum Kapitalis (kekuatan ekonomi) sebagai pemandu kehidupan bersama (kehidupan politik). Hasilnya adalah bahwa pendekatan tersebut tidak mampu merealisasikan nilai kemanusiaan mendasar berupa terpenuhinya kebutuhan pokok tiap individu sebagai manusia. Ideologi ini hanya memfasilitasi sekelompok kecil orang kaya dalam pemenuhan kebutuhan pokok nya, sekaligus mengabaikan pemenuhan kebutuhan pokok manusia yang lain.

Islam menawarkan mekanisme pengaturan sumber daya alam yang bisa menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok tiap individu, sekaligus menjamin terpenuhinya kebutuhan pelengkap sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing orang. Dalam hal ini, Islam memberikan amanah pengaturan itu kepada negara (Imam). Dalam pandangan Islam, negara tidak boleh tunduk dan dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Negara hanya tunduk dan dikendalikan oleh Hukum Syariat Islam. Inilah makna kedaulatan yang hakiki, di mana sumber kendali kehidupan adalah Al Kholiq (pencipta) yaitu Allah SWT. Kedaulatan di tangan Syara' inilah yang akan menjamin terjadinya proses pengelolaan sumber daya alam yang adil sekaligus manusiawi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, H. (2014). *Diskursus Islam Politik & Spiritual*. Bogor: Al Azhar Press.
- Al-Faruqi, I. R. (2001). *Atlas Budaya Islam, Menjelajah Khazanah Peradaban Gemilang*. Bandung: Mizan.
- Anghie, A. (2004). *Imperialism, Sovereignty and The Making of International Law*. New York: Cambridge University Press.
- Brown, R. C. (1992). *Comparative Politics : Notes and Readings, terj. Henry Sitanggang*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Budiman, A. (1995). *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Deliarnov. (2006). *Ekonomi Politik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Dr. dr. Siti Fadilah Supari, S. J. (2008). *Saatnya Dunia Berubah : Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung*. Jakarta: Sulaksana Watinsa Indonesia (SWI).
- Dwi Condro Triono, P. (2011). *Ekonomi Islam Madzhab Hamfara*. Yogyakarta: Irtikaz.
- Haas, E. B. (1958). *The Uniting of Europe : Political, Social and Economic Forces 1950-57*. Standford: Stanford Univ. Press.
- Harry Eckstein and David Apter, e. (1963). *Comparative Politics : A Reader*. New York: Free Press.
- Hawari, M. (2011). *ReIdeologi Islam*. Bogor: Al Azhar Press.
- Hinsley, F. W. (1963). *Power and the Pursuit of Peace : Theory and Practice in the History of Relations between States*. Cambridge: Cambridge University Press.
- JACKSON, J. H. (2008). Sovereignty: Outdated Concept . In P. S. Wenhua Shan, *Studies in International Trade Law, Volume 7 Redefining Sovereignty in International Economic Law* (p. 4). OXFORD AND PORTLAND, OREGON: Hart Publishing.
- Jones, W. S. (1991). *The Logic of International Relations*. New York: HarperCollins Publishers Inc.
- Maliki, A. A. (2009). *Politik Ekonomi Islam*. Bogor: Al Azhar Press.
- Mas'oeed, D. M. (2003). *Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nabhani, T. A. (2004). *Nidzoomul Iqtishodiy Fil Islam*. Beirut: Daarul Ummah.
- Papp, D. S. (1988). *Contemporary International Relations : Framework for Understanding*. New York: Macmillan Publishing Company.

- Rais, M. A. (2008). *Agenda Mendesak Bangsa : Selamatkan Indonesia*. Yogyakarta: PPSK Press.
- Staniland, M. (1985). *What Is Political Economy? A Study of Social Theory and Underdevelopment*. London: Yale University Press.
- Strange, S. (1988). *States and Markets*. London: Printer Publishers.
- Wolfe, T. A. (1999). *Introduction to Internationaal Relations : Power and Justice*, terj. Mercedes Marbun. Bandung: Putra A. Bardin.

Bagaimana Negara-Negara Pos-Kolonial Memandang Keamanan Manusia? (Studi Kasus: Dilema State-Building dan Pembangunan Manusia di Asia Tenggara)

Azhari Setiawan, Andree
Universitas Abdurrah
azhari.setiawan@univrab.ac.id

Abstrak

*Penelitian ini mengulas keamanan di kawasan ASEAN dari sudut pandang pos-kolonialisme dan keamanan manusia. Pertama, penulis menjelaskan pos-kolonialisme sebagai sebuah sudut pandang atau perspektif dalam melihat isu-isu keamanan; dan bagaimana pos-kolonialisme memandang keamanan manusia. Kedua, penulis membahas tentang konsep emansipasi dan subaltern realist sebagai konsep utama dalam studi Pos-Kolonialisme. Ketiga, penulis membahas ASEAN sebagai institusi atau integrasi regional yang [mayoritas] terdiri dari negara-negara pos-kolonial dan bagaimana negara-negara tersebut memandang isu-isu non-tradisional, khususnya, keamanan manusia. Setelah itu, penelitian ini akan mengulas bagaimana ASEAN memandang keamanan manusia. Penulis menganalisis posisi keamanan manusia dari sudut pandang pos-kolonialisme dan apa saja yang telah dilakukan oleh ASEAN dalam menanggulangi masalah-masalah keamanan manusia. Secara metode, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif terutama dalam melihat posisi variabel keamanan manusia yang diterjemahkan dengan indeks pembangunan dan indeks keamanan manusia vis a vis variabel keamanan dan pembangunan negara (state-building dan state-making) yang diterjemahkan dengan pembangunan kekuatan ekonomi, keamanan, dan stabilitas politik. Secara kualitatif, penelitian ini memetakan wacana perluasan dan pendalaman makna keamanan di negara-negara Kawasan Asia Tenggara dalam Komunitas Politik-Keamanan ASEAN (ASEAN Political-Security Community; APSC) dari sudut pandang pos-kolonialisme, khususnya pandangan-pandangan dari Mohammad Ayoob dalam *Thirld World Security Predicaments*.*

Kata Kunci: Keamanan Manusia, *State-Building*, ASEAN, Pos-Kolonialisme

Abstract

*This study reviews ASEAN regional security from the point of view of post-colonialism and human security. First, the author explains post-colonialism as a perspective in looking at security issues and how does post-colonialism human security. Second, author discusses the concept of emancipation and the realist subaltern as the main concept in the Post-Colonialism literature studies. Third, author discusses ASEAN as a regional institution or integration which [the majority] consists of post-colonial countries and how these countries view non-traditional issues, in particular, human security. After that, this research will examine how ASEAN views human security. The author analyzes the position of human security from the point of view of post-colonialism and what has been done by ASEAN in tackling human security problems. By method, this study uses quantitative methods, especially in looking at the variable position of human security which is translated by the development index and human security index vis a vis the state security and development variables (state-building and state-making) which are translated by the development of economic power, security, and political stability. Qualitatively, this research maps the discourse of the expansion and deepening of the meaning of security in Southeast Asian countries in the ASEAN Political-Security Community (APSC) from a post-colonialism perspective, especially the views of Mohammad Ayoob in *Thirld World Security Predicaments*.*

KeyWords: Human Security, Human Development, *State-Building*, ASEAN, Pos-Colonialism

Pendahuluan

Untuk mencapai tujuannya yang termaktub dalam *Treaty of Amity and Cooperation* 1976 dan Piagam ASEAN 2007, ASEAN membentuk *ASEAN Community* dengan tiga pilar utama, 1) *ASEAN Political-Security Community*; 2) *ASEAN Economic Community*; dan 3) *ASEAN Socio-Culture Community*. *ASEAN Political Security Community* (APSC) adalah pilar khusus yang membahas tentang keamanan.

APSC disepakati berlaku pertama kali pada tahun 2008 bersamaan dengan dua pilar lainnya. Tujuan utama dibentuknya APSC adalah perdamaian dan stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara. Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN adalah Masyarakat yang terbuka, berpijak pada pendekatan keamanan komprehensif, dan tidak ditujukan untuk membentuk suatu pakta pertahanan/aliansi militer ataupun kebijakan luar negeri bersama (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2015). Hal ini sesuai dengan apa yang terkandung pada cetak biru APSC, terdapat tiga karakteristik dan/atau elemen APSC antara lain: 1) Masyarakat yang berbasis aturan, dengan nilai dan norma bersama; 2) kawasan yang kohesif, damai, dan berdaya tahan tinggi dengan tanggung jawab bersama menciptakan keamanan komprehensif; dan 3) Kawasan yang dinamis dan *outward looking* (ASEAN, 2009: 2, Poin 10).

Menarik, bahwa ASEAN menganut keamanan komprehensif yang notabene merupakan Pendekatan Asia dalam melihat Keamanan Manusia. Tiga elemen dari APSC sangat mencerminkan keamanan manusia baik di tingkat individu dan tingkat masyarakat.

11 poin pada cetak biru ASEAN banyak didominasi oleh kata-kata manusia (*human*) dan HAM (*human rights*). Nuansa keamanan manusia (keamanan komprehensif) sangat kental terlihat di cetak biru ASEAN. Pada cetak biru APSC 2015, sebanyak 16 halaman isi diisi dengan 23 kata “manusia” dan “kemanusiaan”. Kemudian pada cetak biru APSC 2025, tertulis 33 kata “manusia” dan “kemanusiaan” dari 37 halaman isi cetak biru.

Sepanjang tahun 2016, terdapat dua isu utama yang berkembang dinamis di kawasan ASEAN yang menarik perhatian para pengamat hubungan internasional, elit pembuat kebijakan, diplomat, praktisi hukum, aktifis maupun jurnalis. Isu pertama adalah keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional (*Permanent Court of Arbitration/PCA*) tentang sengketa maritim dan kepemilikan pulau di Laut Tiongkok Selatan antara Filipina dan Tiongkok. Keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional yang resmi dirilis pada bulan Juli 2016 tersebut memenangkan gugatan Filipina atas Tiongkok, serta menyatakan bahwa sembilan garis putus-

putus (*nine-dash line*) dan hak historis (*historical rights*) yang menjadi dasar klaim Tiongkok di perairan ini tidak memiliki keabsahan dalam hukum internasional (Ankit Panda, 2016)

Isu kedua, adalah pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Rohingnya di negara bagian Rakhine, Myanmar. Rohingnya menjadi objek kekerasan yang dilakukan oleh ekstrimis, intervensi pemerintah tidak efektif, bahkan pasukan keamanan cenderung bias dalam menangani isu ini (Strategic Comment, 2014). Berdasarkan undang-undang kewarganegaraan 1982, terdapat tiga kategori penduduk di Myanmar yaitu *citizens*, *associate citizens*, dan *naturalized citizens*.⁶ Etnis Rohingnya tidak termasuk 135 etnis grup yang diakui oleh pemerintah berdasarkan tiga kategori tersebut.

Beberapa akademisi berpendapat bahwa Rohingnya telah bermukim di Myanmar selama beberapa abad dan merupakan keturunan Muslim Arab, Persia, Turki, Mughal dan Bengali yang datang sebagai pedagang, prajurit dan ulama melalui jalur darat dan laut (Mohammed Ali Chowdhury, 1982). Jacques Leider, mencatat bahwa komunitas muslim yang bermukim di area ini pada abad ke 15 kemungkinan besar percampuran antara keturunan Persia dan India (Ardeth Maung Thwawng, 2016: 5). Persepsi lain yang berkembang luas di masyarakat Myanmar menganggap Rohingnya sebagai muslim Bengal yang berasal dari Bangladesh dan bermukim di Rakhine sejak *Anglo-Burmese War* pada 1824-1826. Perlu juga dicatat bahwa Rohingnya bukan satu-satunya komunitas muslim di Myanmar, terdapat juga komunitas muslim lainnya di negara bagian lain.

Konflik komunal yang menempatkan etnis Rohingnya sebagai pihak paling dirugikan (*disadvantage party*) sejak reformasi politik pada 2011 semakin meningkat. Pada Juni 2012, kerusuhan antara pengikut Budha Rakhine dan muslim Rohingnya mengakibatkan 200 orang tewas, dan menurut perkiraan dari PBB (*United Nations*) sebanyak 115.000 orang Rohingnya kehilangan tempat tinggal. Konflik terjadi kembali pada bulan Oktober ditahun yang sama, dimana 32.000 orang harus mengungsi karena kehilangan tempat tinggal dan sebanyak 94 orang tewas, mayoritas dari pihak Rohingnya. Pada tahun ini juga, grup nasionalis Budha yang lebih dikenal dengan 969 muncul sebagai gerakan ekstrimis dengan retorika anti muslim dan turut mensponsori serangan terhadap rumah, usaha, dan masjid komunitas muslim.

⁶*Citizen* merupakan penduduk asli (pribumi) yang bermukim di Myanmar sebelum 1823. *Associate Citizens* adalah penduduk yang mendapat status kewarganegaraan resmi melalui *1948 Union Citizen Act*. *Naturalized Citizens* merujuk pada penduduk yang di Myanmar sebelum Januari 1948 dan mendaftar ke pemerintah untuk mendapat status kewarganegaraan setelah 1982. 'Burma Citizenship Law' *Refworld*, 15 October 1982 dikutip oleh Nehingpao Kipgen, Conflict in Rakhine State in Myanmar: Rohingnya's Muslim Conundrum, *Journal of Minority Muslim Affairs*, Vol. 33 No.2, hal. 300.

Meskipun legitimasi politik dan pembangunan institusi pemerintahan negara-negara kawasan Asia Tenggara terlihat semakin kuat, ASEAN tidak luput dari masalah. Perlindungan Hak Asasi Manusia adalah catatan terburuk bagi ASEAN. Prinsip *non-interference* menjadi penghalang bagi ASEAN untuk mewujudkan keamanan bagi individu-individu yang secara hak asasi, tertindas atau termarjinalkan di negaranya masing-masing. Kasus pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya, Myanmar adalah salah satu kasus pelanggaran HAM yang terbesar di ASEAN. Hal ini menunjukkan bahwa Negara-negara Asia Tenggara masih memiliki sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan keamanan manusia untuk didapat diselesaikan dengan efektif.

Penelitian ini disusun mengulas tentang bagaimana posisi dan eksistensi keamanan manusia dari sudut pandang pos-kolonialisme yang direpresentasikan oleh tumbuh-kembangnya negara-negara kawasan Asia Tenggara. Pertama, penulis akan menjelaskan pos-kolonialisme sebagai sebuah sudut pandang atau perspektif dalam melihat isu-isu keamanan; dan bagaimana pos-kolonialisme memandang keamanan manusia. Kedua, penulis akan membahas tentang konsep emansipasi dan *subaltern realist* sebagai konsep utama dalam studi Pos-Kolonialisme. Ketiga, penulis akan membahas ASEAN sebagai institusi atau integrasi regional yang [mayoritas] terdiri dari negara-negara pos-kolonial dan bagaimana negara-negara tersebut memandang isu-isu non-tradisional, khususnya, keamanan manusia.

Berdasarkan pemaparan penulis di awal, maka pertanyaan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Negara-negara Pos-Kolonial (Asia Tenggara) memandang Keamanan Manusia?

Ulasan Literatur

Penelitian ini mengambil pelajaran dari sejumlah akademisi pos-kolonialis, seperti Tarak Barkawi dan Mark Laffey dalam "*The Postcolonial Moment in Security Studies*". Laffey dan Barkawi mengkritik karakter Politik Eurosentris yang tidak bisa diterapkan pada negara-negara berkembang (*Non-European Worlds*). Gagal paham tentang keamanan di negara-negara dunia "Non-Eropa" yang dimaksud Barkawi dan Laffey menyebabkan terjadinya kontradiksi antara *Old Security Logics* dan *New Security Problematics* (Tarak Barkawi dan Mark Laffey, 2006). Pemahaman keamanan yang lama terlalu banyak fokus pada negara-negara besar. Pasca Perang Dingin, fokus keamanan internasional berubah ke arah yang sifatnya lebih transnasional. Negara-negara besar mulai berhadapan dengan ancaman-ancaman yang tidak terduga dan "asimetris (Tarak Barkawi dan Mark Laffey, 2006: 330).

Barkawi menegaskan bahwa pemahaman-pemahaman Barat tentang keamanan tidak boleh diterima begitu saja karena masalah-masalah keamanan di negara-negara berkembang jauh berbeda dan penyebabnya sedikit banyak datang dari negara-negara Barat sendiri yang kolonial. Oleh karena itu Barkawi dan Laffey mengajukan sebuah “*Reframing Security Analysis*” (Tarak Barkawi dan Mark Laffey, 2006: 330) sebagai solusi dalam melihat isu-isu keamanan di era pos-kolonial.

Pos-kolonialisme adalah kritik terhadap pemikiran-pemikiran keamanan *Eurocentric*. Pemikiran Eurosentris merupakan pemikiran-pemikiran berdasarkan pada pemahaman-pemahaman tentang relasi *great power*, termasuk perang dan damai, yang kemudian menjadi fondasi bagi studi/praktik keamanan. Pengalaman sejarah mengenai pihak yang lemah tidak mendapat tempat padahal mereka mayoritas penduduk dunia, Pengalaman sejarah orang lemah pun akhirnya dipahami lewat kaca mata negara besar, dikategorikan dengan nama-nama yang diderivasikan dari politik negara-negara Utara: perjuangan bersenjata dikategorikan sebagai terorisme. Respon terhadap mereka terbatas dalam kerangka "ketegasan negara" yang justru menghalangi kapasitas untuk memahami pemberontakan itu. Barkawi dan Laffey hadir untuk mengkritisi negara-negara Eropa, Barat, atau *Great Power* untuk mengubah cara pandanganya terhadap negara-negara Non-Eropa/Barat.

Jika Barkawi dan Laffey menggunakan sudut pandang negara besar dalam melihat negara lemah, Mohammad Ayoob berdiri di posisi yang berseberangan. Ayoob dan Barkawi-Laffey sama-sama melihat keprihatinan dan kerumitan negara-negara dunia ketiga namun dari posisi yang berbeda. Ayoob berdiri satu barisan bersama negara-negara pos-kolonial melakukan kontemplasi terhadap masa depan keamanan negara-negara dunia ketiga. Ayoob menggunakan term “Negara Dunia Ketiga” untuk merujuk pada negara-negara non-Eropa atau negara-negara non-Barat.

Pemikiran keamanan poskolonial adalah tuntutan kepada negara-negara dunia ketiga untuk bisa melepaskan diri dari jeratan kolonialisme dan kolonialisme baru. Kontemplasi Ayoob tentang keamanan negara-negara dunia ketiga ditulis dalam “*The Third World Security Predicament: State Making, Regional Conflict and the International System*”. Bagi Ayoob, keamanan negara-negara dunia ketiga adalah keamanan yang *state-centered* (Mohammed Ayoob, 1995: 8-9) karena di era kolonial, negara-negara ini kehilangan legitimasi dan kedaulatan sehingga negara-negara pos-kolonial harus melepaskan dirinya dari pengaruh kolonialisme (dan kolonialisme baru). Oleh karena itu, era pos-kolonial adalah era “*State Building*” yang dibarengi dengan agenda “*Self Determination*” pasca Perang Dunia Kedua dan

lahirnya PBB. Ayooob menekankan tesis utamanya, bahwa memahami kesulitan-kesulitan negara-negara dunia ketiga adalah memahami proses *State Building* dan *State Making*. Penulis mengafirmasi bahwa gagasan Ayooob ditujukan agar negara-negara dunia ketiga tidak lagi terjerat oleh kolonialisme ataupun kolonialisme baru sehingga membangun negara dan pemerintahan adalah hal yang utama dan pertama.

State-Building didefinisikan oleh Ayooob dengan mengutip definisi Jagers sebagai kemampuan negara untuk mengakumulasi kekuatan. Kekuatan yang dimaksud tidak hanya produktivitas ekonomi dan ketegasan pemerintah, namun juga kekuatan institusi dan politik. Kekuatan (*power*) dapat dilihat dari tiga sudut pandang yaitu: 1) kekuatan sebagai kapabilitas nasional; 2) kekuatan sebagai kapasitas politik; dan 3) kekuatan sebagai koherensi institusional (Keith Jagger dalam Mohammed Ayooob, 1995: 21).

Berangkat dari definisi ini, Ayooob mengenalkan dan menggunakan term *State-Making* sebagai cara dan solusi negara-negara dunia ketiga menghadapi kesulitan-kesulitannya dengan tiga cara yaitu: 1) ekspansi dan konsolidasi wilayah teritorial dan demografi di bawah suatu otoritas politik [yang kuat] (Militer; Perang); 2) pengelolaan tatanan-tatanan dalam bentuk pranata-pranata tertentu terhadap populasi yang ada di teritori tersebut (Kebijakan; Administrasi dan Birokrasi); dan 3) Ekstraksi sumber daya dari wilayah dan populasi yang ada di bawah kontrol negara, digunakan untuk menjalankan pemerintahan (Perpajakan; Ekonomi).

Tiga poin ini adalah determinan dari proses *State-Making* menurut Ayooob. Penguatan tiga mata agenda tersebut akan menciptakan kondisi dimana negara tidak lagi bergantung pada kekuatan-kekuatan kolonial, negara tidak terdistorsi oleh kolonialisme dan negara mampu menghadapi *popular demand* di masyarakat sehingga proses *state-making* tidak mengalami kesulitan-kesulitan (Mohammed Ayooob, 1995: 39).

Pandangan Ayooob tentang *State-Making* juga dituangkan dalam "*Inequality and Theorizing in International Relations: The Case for Subaltern Realism*" secara teoritis menerangkan bahwa teori-teori keamanan juga harus lepas dari pengaruh kolonialisme [teoritik]. Ayooob menekankan pada *global society* yang asli dan kesetaraan diantara negara-negara. Untuk mewujudkan ini, Ayooob berpandangan bahwa harus ada "sentralitas negara" (*statism*) yang diwujudkan dengan proses *State Building* dan/atau *State Making*.

Pandangan ini kemudian dikritik oleh Michael Barnett dalam "*Radical Chic? Subaltern Realism: A Rejoinder*". Barnett mengkritik bahwa pandangan Ayooob cenderung "aksidental" dan tidak melihat secara keseluruhan paradigma yang dominan (Michael. Barnett, 2002: 50). Pertama, Ayooob mengatakan bahwa dunia telah didominasi oleh perspektif neoliberal dan

neorealis, namun ia tidak menyadari bahwa teori-teori ini dibangun berdasarkan pada pluralisme teoritis. Perkembangan teori HI adalah perkembangan pluralisme teoritis yang telah menghasilkan teori-teori baru termasuk teori Ayoob sendiri. Kedua, Ayoob menekankan pada *global society* yang asli dan kesetaraan diantara negara-negara. Untuk mewujudkan ini, Ayoob berpandangan bahwa harus ada “sentralitas negara” (*statism*) sebagai determinan utama dalam hubungan internasional. Hal ini dipandang oleh Barnett sebagai kesalahan Ayoob yang justru mengantarkannya pada asumsi-asumsi pendekatan *mainstream* (red: asumsi Realis tentang negara sebagai aktor utama, rasional, dan kesatuan). Di saat perspektif lain berusaha memisahkan diri dari “legitimasi negara”, Ayoob justru terlihat radikal untuk mengembalikan legitimasi negara.

Pandangan ini juga mendapat banyak dukungan seperti Keith Krause dalam “*Theorizing Security, State Formation and the Third World in the Post-Cold War World*” yang mengatakan bahwa teori-teori keamanan pos-kolonial Ayoob memiliki tiga kekuatan yaitu: 1) Ayoob menempatkan konsepsi ortodoks tentang keamanan dalam sebuah konteks historis yang sangat berkaitan dengan evolusi negara-negara modern; 2) konsepsi Ayoob menekankan pentingnya kekuatan militer bagi negara-negara dunia ketiga di saat negara-negara besar mempromosikan *disarmaments* dan pengurangan intensi untuk berperang; dan 3) Ayoob menegaskan penguatan legitimasi dan kedaulatan negara (Keith Krause, 1998: 128).

Pada intinya, paham pos-kolonial tidak ingin relasi kuat-lemah mempengaruhi pembangunan negara-negara dunia ketiga. Secara praktis dan teori, kaum pos-kolonial ingin lepas dari pengaruh-pengaruh kolonial. Niatan-niatan ini tentu disadari betul baik dari akademisi dari pihak negara-negara dunia ketiga maupun dari pihak negara-negara besar. Negara-negara besar dihadapkan pada masalah-masalah baru seperti terorisme, separatisme, *human trafficking*, *drugs trafficking*, *people smuggling*, dan lain-lain. Di sisi lain, negara-negara pos-kolonial dihadapkan pada masalah-masalah pos-kolonial seperti pembangunan negara dan pemerintahan, legitimasi dan kedaulatan negara, ketimpangan ekonomi dan sosial, dan lain-lain. Dalam kondisi ini, terjadi mis-perspepsi dan mis-representasi dari negara-negara besar dalam memahami kesulitan-kesulitan negara-negara dunia ketiga.

Siapakah yang termasuk Negara-negara pos-kolonial? Ayoob mendefinisikan negara-negara pos-kolonial (baca: negara dunia ketiga) adalah negara-negara yang tergolong sedang dalam proses dari yang awalnya *underdeveloped* menjadi *developing state* (ex: Asia, Afrika, dan Amerika Latin). Istilah dunia ketiga mulai populer sejak tahun 60-an. Istilah tersebut diperkenalkan kepada publik oleh Peter Worsley tahun 1964 dan Irving Louis Horowitz tahun

1966 dalam bukunya *Third World Development*. Pengelompokan dan pelabelan kepada negara dibuat berdasarkan pada pola kemajuan dan perkembangan negara-negara tersebut baik secara ekonomi, sosial dan stabilitas politik. Dunia pertama yang disebut juga sebagai “dunia bebas” atau Blok Atlantik meliputi Eropa Non-Komunis dan Amerika Utara. Dunia kedua meliputi negara-negara Eropa Timur atau Blok Uni Soviet, dan dunia ketiga meliputi Asia, Afrika, dan Amerika Latin.

Pada umumnya Negara Dunia Ketiga adalah negara-negara yang terletak di sekitar dan diselatan khatulistiwa, sedangkan dunia pertama dan kedua di sebelah utara (Clark P. Robert, 1989: 3). Dunia pertama dan kedua sama-sama berpenduduk 30% dari jumlah penduduk seluruh dunia dan menghuni 40% daratan dari seluruhnya. Selebihnya adalah sejumlah negara-negara merdeka yang baru saja melepaskan diri dari penjajahan. Sehingga didalam Negara Dunia Ketiga terdapat negara-negara yang tergolong miskin dan secara teknologi sangat terbelakang. namun negara-negara tersebut mempunyai sumber-sumber alam yang kaya raya dan berpotensi untuk mencapai kemajuan negaranya (Clark P. Robert, 1989: 3). Hubungan yang terjalin antara negara maju dengan negara dunia ketiga bersifat hubungan ketergantungan. Hubungan ketergantungan terjadi karena negara dunia ketiga bergantung kepada negara maju yang memiliki modal dalam sistem perekonomian dunia yang kapitalis. Ketergantungan negara dunia ketiga terhadap dunia maju disebabkan oleh B. C. Smith dalam bukunya yang berjudul *Understanding Third World Politics: Theories of Political Change and Development* menyatakan bahwa Negara Dunia Ketiga adalah sebuah istilah yang ditujukan kepada kelompok atau kumpulan negara yang memiliki latar belakang sejarah colonial (bekas jajahan) dan sedang berada dalam fase perkembangan diri baik secara ekonomi, politik, maupun sosial (B. C. Smith, 1996: 1). Perkembangan secara ekonomi, sosial, dan politik ini dilihat dari beberapa kriteria diantaranya (B. C. Smith, 1996: 2-3):

1. Pendapatan ekonomi yang rendah
2. Ketergantungan terhadap sektor pertanian dibanding industri
3. Kelemahan dalam sektor hubungan perdagangan
4. Kehilangan jumlah masyarakat yang cukup besar (yang dikirim atau digunakan sebagai budak/pekerja paksa oleh negara kolonial)
5. Keterbatasan kebebasan secara politik maupun kemasyarakatan.

Berdasarkan pernyataan Smith ini, dapat penulis pahami bahwa pada hakikatnya, Negara Dunia Ketiga lahir sebagai negara yang utuh pada masa kolonialisme dan imperialisme klasik mulai berakhir yaitu di sekitaran awal tahun 1940an. Negara-negara Dunia Ketiga

tersebar luas di daratan Afrika, Asia, Timur Tengah, Amerika Latin dan Karibia dengan jumlah sekitar 100 negara. Populasi dari Negara-negara ini berkisar antara empat miliar populasi atau setara dengan 77 persen dari total populasi masyarakat dunia dan khusus untuk di daerah daratan, Negara Dunia Ketiga meliputi 58 persen dari daratan dunia (B. C. Smith, 1996: 3).

Keamanan Manusia dan Pembangunan Manusia

Keamanan Manusia adalah salah satu isu keamanan non-tradisional di era pos-kolonial. Munculnya isu keamanan manusia merupakan rangkaian dari agenda perluasan dan pendalaman makna keamanan oleh para akademisi keamanan internasional. Keamanan Manusia adalah keamanan yang “*human-oriented*”, tidak seperti kajian keamanan tradisional yang “*state-centric*”. Roland Paris menyatakan bahwa keamanan manusia merepresentasikan sebuah paradigma baru bagi akademisi dan praktisi keamanan (Roland Paris, 2001: 88). Bary Buzan, Richard Wyn Jones, dll juga menyatakan hal yang serupa terkenal dengan istilah “pendalaman dan perluasan” konsep keamanan. Perluasan berarti bahwa keamanan tidak lagi berbicara soal militer saja, sedangkan pendalaman berarti bahwa keamanan tidak lagi menempatkan negara sebagai aktor utama, keamanan juga melibatkan aktor lain selain negara.

Namun konsep keamanan manusia masih memiliki sejumlah kritik. Roland Paris berpendapat ada dua kritik mengapa konsep keamanan manusia sulit untuk digunakan sebagai panduan praktikal bagi riset akademik atau perumusan kebijakan yaitu: 1) definisi yang tidak terlalu seksama (*precise*); dan 2) ambiguitas tanggung jawab keamanan yang terlalu banyak aktornya. Konsep keamanan manusia memang telah membuat banyak negara dan aktor lain berkoalisi membentuk wajah baru politik internasional sejak berakhirnya Perang Dingin, namun mengatakan Keamanan Manusia memberikan fungsi-fungsi advokasi tentang keamanan itu berbeda dengan mengklaim bahwa konsep Keamanan Manusia menawarkan kerangka analisis yang berguna dan mutakhir (Roland Paris, 2001: 89).

Keamanan Manusia juga dapat dimaknai dengan istilah Pembangunan Manusia. Definisi baku secara praksis tentang Keamanan Manusia pertama kali muncul pada tahun 1994 dalam *Human Development Report*, sebuah dokumen tahunan dari UNDP. Keamanan Manusia menurut UNDP memiliki dua aspek definisi yaitu: 1) keselamatan dari ancaman kronis seperti kelaparan, penyakit, dan represi; dan 2) proteksi dari gangguan yang sifatnya tiba-tiba dan dapat melukai saat melakukan aktivitas sehari-hari baik di rumah, pekerjaan, komunitas, dll (UNDP, 1994). Dua pengertian ini dalam kajian keamanan manusia dikenal dengan pendekatan “*Broad*” dan “*Narrow*”. Definisi ini sangat luas oleh karena itu disebutkan beberapa kategori yang termasuk dalam wilayah Keamanan Manusia yaitu (UNDP, 1994: 90):

1. Keamanan Ekonomi
2. Keamanan Pangan
3. Kesehatan
4. Keamanan Lingkungan
5. Keamanan Personal
6. Keamanan Komunitas
7. Keamanan Politik.

Pengategorian ini juga mendapat banyak kritik dan revisi dari berbagai akademisi. Ada sejumlah pendekatan selain UNDP mengenai kategori keamanan manusia seperti: 1) Pendekatan Kanada yang lebih kuat di aspek HAM dan 2) Pendekatan Jepang dan Asia yang dikenal dengan tipologi “*freedom of wants*” dan “*freedom of fear*”. Pendekatan Jepang juga dikenal dengan nama pendekatan Keamanan Komprehensif yang memasukkan kerusakan lingkungan, pengungsi, obat-obatan terlarang, dan penyebaran penyakit menular.

Keamanan Manusia atau Keamanan Manusia telah dideskripsikan dengan banyak tafsiran dari banyak akademisi baik sebagai “seruan”, advokasi, kampanye politik, seperangkat keyakinan tentang sumber konflik, konseptualisasi baru keamanan, dan panduan untuk perumus kebijakan dan peneliti akademik. Keamanan manusia adalah instrumen analisis yang baik namun perlu pengembangan akademik yang lebih jauh untuk menjadikannya sebagai kategori dalam sebuah riset keamanan yang menjadikan manusia dan HAM sebagai fokus utama.

Perkembangan selanjutnya mengenai keamanan manusia ialah diterbitkannya Indeks Keamanan Manusia (HIS, *Human Security Index*) oleh *humansecurityindex.org*. HSI adalah pengayaan dari HDI (*Human Development Index*) dengan ditambahkan tiga variabel: (1) *social fabric*, (2) *economic fabric*, dan (3) *enviromental fabric index* untuk melihat kondisi keamanan manusia suatu negara. Negara yang ramah dengan manusia adalah negara yang dapat menyediakan keamanan bagi individu-individunya. Keamanan individu tersebut dapat dilihat dari kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan.⁷ HSI merupakan hasil dari olahan dua puluh lima tahun indikator-indikator pembangunan negara-negara. Pertama kali ia dipublikasikan di Konferensi GIS IDEAS 2008 lalu kemudian dipublikasikan oleh United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pasific pada tahun 2009. Kemudian pada tahun 2010, HSI merilis penyempurnaan datanya melalui HSI Version 2 (*Human Security Index*, 2018).

⁷ Lebih lanjut tentang komponen-komponen HSI dapat lihat http://www.humansecurityindex.org/?page_id=2.

Andi Widjajanto dalam “Kuadran Perdamaian Demokratik: Integrasi Instalasi Demokrasi dan Trajektori Perdamaian” menyatakan bahwa Keamanan Manusia muncul sebagai pemahasan yang ideal ketika negara berada pada kondisi damai dan sistem pemerintahan tergolong demokratis (Andi Widjajanto, 2005: 11). Pengelolaan Keamanan Manusia diharapkan dapat mengarah pada perwujudan perdamaian demokratis. Pendefinisian Keamanan Manusia sangat identik dengan Hak Asasi Manusia. Herbert Kelman dan Ted Robert Gurr menyatakan bahwa demokrasi adalah harmonisasi sosial sehingga pelanggaran HAM harus ditindak tegas (Ted Robert Gurr, 1996: 63).

Penekanan terhadap Hak Asasi Manusia sebagai komponen dasar dari Keamanan Manusia sebetulnya sudah ada sejak perjanjian Westphalia tahun 1648, termaktub dalam Traktat Osnabruck dan Munster (Stephen Krasner, 1999). Traktat ini memprakarsai adanya pengakuan terhadap hak-hak kelompok minoritas yang kemudian mengilhami Woodrow Wilson menggabungkan hak minoritas dengan hak penentuan nasib sendiri (*Self Determination*). *Self Determination* kemudian menjadi semangat bagi negara-negara pos-kolonial setelah Perang Dunia berakhir. Nuansa-nuansa ingin menentukan nasib sendiri, membangun legitimasi dan kedaulatan sendiri kemudian muncul dan menghiasi perpolitikan interansional masa itu. Oleh karena itu, Keamanan Manusia dan Pos-Kolonialisme memiliki keterikatan dan keterkaitan yang erat karena sama-sama menempatkan Hak Asasi Manusia sebagai fondasi berpikir.

Metode Penelitian

Secara kuantitatif, penelitian ini menaklik relasi antara variabel keamanan manusia yang diterjemahkan dengan indeks pembangunan dan indeks keamanan manusia vis a vis variabel keamanan dan pembangunan negara (*state-building* dan *state-making*) yang diterjemahkan dengan pembangunan kekuatan ekonomi, keamanan, dan stabilitas politik. Untuk mendefinisikan *State-Building* di negara-negara pos-kolonial, penulis menggunakan beberapa indikator yaitu: 1) GDP untuk merepresentasikan ekonomi; 2) Budget Pertahanan untuk merepresentasikan politik-keamanan; dan 3) Stabilitas Politik. Untuk melihat keadaan Pembangunan dan Keamanan Manusia, penulis menggunakan tiga indikator yaitu: 1) GDP percapita PPP untuk melihat kesejahteraan; 2) *Health Index* untuk melihat kesehatan; 3) dan *Education Index* untuk melihat Pendidikan yang bersumber dari *Human Development Index* (diprakarsai oleh UNDP). Kemudian penulis menggunakan indikator: 1) Economic Fabric Index; 2) Environmental Fabric Index; dan 3) Social Fabric Index yang bersumber dari *Human*

Security Index oleh humansecurityindex.org. Pada penelitian ini keamanan manusia dan pembangunan manusia berada pada ranah variabel yang sama karena indikator-indikatornya yang beririsan dan dinilai dapat mewakili baik pembangunan manusia juga keamanan manusia sehingga untuk melihat kondisi keamanan manusia, variabel pembangunan manusia juga dapat menjadi rujukan begitu juga dengan sebaliknya.

Secara kualitatif, penelitian ini memetakan wacana perluasan dan pendalaman makna keamanan di negara-negara Kawasan Asia Tenggara dalam Komunitas Politik-Keamanan ASEAN (*ASEAN Political-Security Community*; APSC) dari sudut pandang pos-kolonialisme, khususnya pandangan-pandangan dari Mohammad Ayoob dalam *Thirld World Security Predicaments* dengan teorinya yang dikenal dengan '*Subaltern Realism*' dan kritik-kritik terhadapnya. Terkait dengan pemetaan wacana tersebut, ada beberapa pertanyaan yang dijawab dalam penelitian ini berdasarkan pada literatur-literatur yang penulis gunakan mengenai wacana keamanan di Negara-negara Dunia Ketiga menurut kelompok Pos-Kolonial. Pertanyaan tersebut antara lain:

1. Mengapa pengusung perspektif pos-kolonial seperti Muhammad Ayoob menolak 'emansipasi' sebagai salah satu konsep dalam studi keamanan?
2. Apa kekuatan dan kelemahan utama dari pendekatan '*Subaltern Realist*' terhadap keamanan sebagai teori yang dikemukakan oleh Ayoob?
3. Apa yang menjadi kontribusi dari momentum pos-kolonial bagi studi keamanan?
- 4.

Emansipasi dan Keamanan Negara-Negara Dunia Ketiga

Ken Booth dalam *Security and Emancipation* memperkenalkan konsep 'emansipasi' sebagai isu sentral dalam perkembangan studi keamanan. Ken Booth menjelaskan bahwa emansipasi harus menjadi basis kerangka berpikir dalam melihat keamanan. Emansipasi adalah membebaskan manusia (individu maupun kelompok) dari *physical and human constraints* yang menghentikan mereka bebas dalam menjalankan apa yang menjadi kebebasan bagi mereka. Jika keamanan dianggap sebagai terbebasnya dari ancaman maka, emansipasi adalah cara untuk membebaskan manusia dari ancaman tersebut. Studi kritis Ken Booth dalam keamanan berusaha melihat keamanan dari praktik-praktik politik keseharian sehingga melihat lebih dalam lagi ke aspek manusia. Bahwa keamanan (kritis) berbicara tentang emansipasi manusia yang terpinggirkan, tertindas, atau terancam karena kebijakan (politik-keamanan) tertentu.

Muhammad Ayoob menolak emansipasi (Ken Booth, 1991: 313-326) sebagai bentuk dan cara negara-negara dunia ketiga mengaransemen keamanannya dan menawarkan konsep *State-Building*⁸. Ayoob menolak emansipasi karena bagi Ayoob, emansipasi adalah paham—yang terlalu—*western-centric*. Ayoob justru berpikiran bahwa keamanan negara-negara dunia ketiga harus menjadikan *State-Building* sebagai preseden dalam menciptakan keamanan dan stabilitas. Karena masalah keamanan bagi negara dunia ketiga adalah masalah: 1) legitimasi politik; 2) penguatan struktur pemerintahan; 3) keamanan institusi negara dan teritori; dan 4) rezim.

Argumen ini juga dikemukakan oleh Keith Krause, ia menyatakan:

“Against an expanded conception of security, he [Ayoob] argues that it [western-centrism] is analytically unfocussed, that it understates the persistence of security dilemmas (both internal and external), and in some cases (such as Ken Booth’s linking of security to emancipation) that it remains fatally Western-centric. He proposes instead that ‘security–insecurity is defined in relation to vulnerabilities—both internal and external—that threaten or have the potential to bring down or weaken state structures, both territorial and institutional, and governing regimes” (Mohammed Ayoob, 1995: 9) (Keith Krause, 1998: 128)

Mohammad Ayoob mendefinisikan interaksi ke(tidak)amanan sebagai bentuk relasi kerawanan internal dan eksternal yang mengancam atau berpotensi melumpuhkan dan/atau melemahkan institusi negara. Oleh karena itu, masalah keamanan negara-negara dunia ketiga sebetulnya bukanlah emansipasi karena dibutuhkannya emansipasi adalah implikasi dari kegagalan institusi negara (Barat) dalam menyediakan keamanan, sedangkan di negara-negara dunia ketiga, institusi yang dimaksud itu belum hadir (atau mapan) secara struktur dan fungsi. Di Barat, kehadiran institusi yang terkadang menyebabkan ketidakamanan. Lain hal di negara dunia ketiga, ketidakamanan muncul karena institusi (negara dan pemerintahan) belum sepenuhnya hadir atau berdiri layak karena efek dari kolonialisme sehingga perlu penguatan. Penguatan ini disebut Ayoob sebagai *State-Building*.

⁸ Ken Booth menjelaskan bahwa Emansipasi harus menjadi preseden berpikir dalam melihat keamanan. Emansipasi adalah membebaskan manusia (individu maupun kelompok) dari *physical and human constraints* yang menghentikan mereka bebas dalam menjalankan apa yang menjadi kebebasan bagi mereka. Jika keamanan dianggap sebagai terbebasnya dari ancaman maka, emansipasi adalah cara untuk membebaskan manusia dari ancaman tersebut. Studi kritis Ken Booth dalam keamanan berusaha melihat keamanan dari praktik-praktik politik keseharian sehingga melihat lebih dalam lagi ke aspek manusia. Bahwa keamanan (kritis) berbicara tentang emansipasi manusia yang terpinggirkan, tertindas, atau terancam karena kebijakan (politik-keamanan) tertentu.

Subaltern Realism dan Keamanan Negara-negara Dunia Ketiga

Ayoob pertama kali mengajukan teorinya tentang '*subaltern realism*' (realisme bawahan) pada tahun 1980-an dan mengembangkannya lebih lanjut pada 1990-an (Mohammed Ayoob, 2002: 27-48). Teori ini merupakan jawaban kritis terhadap neorealisme Kenneth Waltz dan lainnya, termasuk analogi domestik yang diterapkan neorealisme. Hal ini bertujuan untuk menyediakan instrumen analisis untuk memahami faktor penentu utama perilaku negara Dunia Ketiga, kekhawatiran dominan para elit negara Dunia Ketiga, dan akar penyebab konflik di Dunia Ketiga. Teori ini menekankan divergensi kondisi Dunia Ketiga dari negara-negara inti industri, dan Ayoob terus mengkritik teori Hubungan Internasional arus utama karena dinilai telah 'mengecualikan' Dunia Ketiga. Ayoob mengusulkan konseptualisasi alternatif keamanan dan menekankan ketidaksetaraan dalam teori hubungan internasional.

Subaltern Realism mendukung bahwa negara-negara dunia ketiga umumnya lemah, dan sering secara ekonomi dan militer tergantung pada kekuatan eksternal, yang sebagian besar merupakan negara-negara besar. Selain itu, Ayoob menjelaskan interaksi negara dunia ketiga terbatas pada lingkungan terdekatnya, terutama di ranah keamanan, dan karena itu mereka akan memilih untuk berinteraksi dengan negara lain yang memiliki karakteristik serupa. Karena itu mereka kurang peduli dengan masalah keamanan tingkat internasional dan cenderung kepada arsitektur keamanan regional (Mohammed Ayoob, 2002: 30).

Apa kekuatan dan kelemahan utama dari pendekatan *Subaltern Realism*? Penulis mengemukakan bahwa kekuatan dari pendekatan *Subaltern Realism* ialah ia mendorong dan menuntut dibentuknya otoritas dan legitimasi negara yang independen dan berdaulat. Hal ini merupakan dasar dari hubungan antar negara, adanya otoritas dan legitimasi yang berdaulat. *Sub-altern Realism* juga mendorong negara-negara dunia ketiga untuk membentuk aransemen keamanan versinya sendiri lewat proses *State-Building*. Ia menanamkan semangat '*self-determination*' pasca era kolonial bagi negara-negara dunia ketiga.

Kelemahan utama dari pendekatan ini ialah *State-Building* sebetulnya bukanlah hal yang baru. Secara tidak langsung, Ayoob memindahkan paham realisme negara-negara besar ke negara-negara pos-kolonial. Kelemahan utama dari pendekatan *Subaltern Realism* banyak dikaji oleh Michael Barnett. Barnett mengkritik bahwa pandangan Ayoob cenderung 'aksidental' dan tidak melihat secara keseluruhan paradigma yang dominan (M. Barnett, 2002: 49-62.). Pertama, Ayoob mengatakan bahwa dunia telah didominasi oleh perspektif neoliberal dan neorealis, namun ia tidak menyadari bahwa teori-teori ini dibangun berdasarkan pada pluralisme teoritis. Perkembangan teori HI adalah perkembangan pluralisme teoritis yang telah

menghasilkan teori-teori baru termasuk teori Ayoob sendiri. Kedua, Ayoob menekankan pada *global society* yang asli dan kesetaraan diantara negara-negara. Untuk mewujudkan ini, Ayoob berpandangan bahwa harus ada ‘sentralitas negara’ (*statism*) sebagai determinan utama dalam hubungan internasional. Hal ini dipandang oleh Barnett sebagai kesalahan Ayoob yang justru mengantarkannya pada asumsi-asumsi pendekatan *mainstream* (red: asumsi Realis tentang negara sebagai aktor utama, rasional, dan kesatuan). Di saat perspektif lain berusaha memisahkan diri dari ‘legitimasi negara’, Ayoob justru terlihat radikal untuk mengembalikan legitimasi negara.

Momentum Pos-Kolonial bagi Studi Keamanan

Pertanyaan yang Ketiga, apa yang menjadi kontribusi dari momentum post-kolonial bagi studi keamanan? Penulis memandang, aransemen arsitektur keamanan regional negara-negara pos-kolonial adalah momentum pos-kolonial bagi studi dan praksis keamanan internasional. Negara-negara pos-kolonial seperti negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan Afrika kemudian dengan semangat ingin terbebas dari kolonialisme dan kolonialisme baru yang direfleksikan dalam paham kedaulatan [regional] dan ketahanan [regional] membentuk ASEAN dan Uni Afrika.

Kasus ASEAN, sebagai contoh, berakhirnya Perang Dunia ke-2 dan merdekanya negara-negara kawasan Asia Tenggara diikuti dengan tumbuhnya rasa kebersamaan dan solidaritas antar bangsa Asia Tenggara. Muncul keinginan negara-negara ini untuk mendistribusikan kekuatannya pada sebuah integrasi regional yang padu. Nuechterlein melihat ada titik terang bagi negara-negara Asia Tenggara yang ingin mendistribusikan kekuatannya secara mandiri. Dekolonialisasi di kawasan Asia Tenggara ditandai dengan mulainya pasukan militer negara-negara Barat menarik diri dari negara-negara bekas jajahan. Penarikan diri ini juga didasari perasaan ingin bebas dari kolonialisme eksploitasi pasukan militer dari luar (kawasan) dan kesadaran untuk membentuk pasukan militer antar negara kawasan sebagai bentuk komitmen terhadap perwujudan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Nuecherlein menyatakan bahwa Asia Tenggara era pos-koloniali perlu memikirkan tentang konsep pertahanan diri dalam ruang lingkup regional ketimbang memikirkan perimbangan kekuatan antar negara kawasan (Donald E. Nuechterlein, 1968: 806-816).

Bagaimana pengaturan konsep pertahanan dan keamanan pos-kolonial kawasan Asia Tenggara? Yusuf Winandi dalam “*Security Arrangement in Southeast Asia*” mengemukakan bahwa Pengaturan/aransemen keamanan di Asia Tenggara tidak bisa hanya dilihat dari satu

aspek militer saja karena *realm of security* di Asia Tenggara terdiri atas spektrum-spektrum yang luas (Yusuf Wanandi, 1981: 57). Keamanan di Asia Tenggara berbicara tentang seluruh aspek kehidupan, sosial, politik, ekonomi, dan bahkan budaya serta ideologi. Oleh karena itu, pengaturan/aransemen keamanan di Asia Tenggara tidak memerlukan sebuah mekanisme yang ketat dan formal secara struktur. Namun tetap, hubungan keamanan ini sangat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan eksternal yang tidak bisa diabaikan (Yusuf Wanandi, 1981: 58).

Sejumlah pandangan ini sejalan dengan berdirinya ASEAN sebagai bentuk sikap negara-negara Asia Tenggara yang ingin berdiri sendiri lewat penguatan institusi ASEAN dengan kemudian membentuk Komunitas ASEAN bersama tiga pilar Politik-Keamanan, Ekonomi, dan Sosio-Kultur. Dengan ini, penulis menyatakan bahwa berdirinya integrasi regional negara-negara pos-kolonial (ASEAN dan Uni Afrika) adalah salah satu kontribusi besar dari momentum pos-kolonialisme bagi studi keamanan.

ASEAN, *State-Building*, dan Keamanan Manusia

Di awal, penulis telah menjabarkan bahwa keamanan manusia dan *state-building* memiliki keterkaitan. *State-building* dan keamanan manusia sama-sama mengandung paham emansipatoris. Meskipun Ayoob menolak emansipasi, namun sebetulnya apa yang dijelaskan oleh Ayoob dalam karyanya merupakan emansipasi di tingkat negara. Ingin terbebas dari penjajah, atau kolonialisme pada dasarnya merupakan paham emansipatoris. Namun penulis menduga bahwa emansipasi yang ditolak yang dimaksud oleh Ayoob adalah emansipasi manusia.

Studi kasus ini akan melihat bagaimana negara-negara ASEAN membangun institusi dan otoritas pemerintahannya disandingkan dengan agenda internasional yang mendorong negara-negara di dunia untuk juga memperhatikan keamanan manusia. Meskipun Ayoob menolak emansipasi, bukan berarti negara-negara dunia ketiga tidak memperhatikan masalah itu. Apalagi, jika negara-negara pos-kolonial berada dalam keadaan [relatif] damai dan demokratis yang mana ini merupakan kondisi ideal bagi negara untuk meningkatkan keamanan manusia (Andi Widjajanto, 2005: 11). Tentunya, ASEAN memiliki cara pandang sendiri tentang *State-Building* dan Keamanan Manusia yang tidak harus sama dan sesuai dengan pemahaman Mohammad Ayoob.

ASEAN dan Agenda *State-Building*

Salah satu yang paling mencolok dalam agenda *State-Building* di ASEAN adalah meningkatnya proliferasi persenjataan dan anggaran pertahanan di kawasan. Sejak tahun 2008 hingga 2017, setiap negara-negara anggota ASEAN menunjukkan kenaikan kuantitas pada akuisisi militer (alutsista). Andi Widjajanto, Edy Prasetyono, dan Makmur Keliat dalam “Dinamika Persenjataan dan Revitalisasi Industri Pertahanan” menyebut fenomena ini sebagai “Paradoks Transformasi Pertahanan” (Andi Widjajanto; Edy Prasetyono; Makmur Keliat, 2012: 11). Kematangan ASEAN [APSC] dilihat dari dideklarasikannya dokumen Cetak Biru dan Langkah Aksi APSC 2015, tidak memperkecil motivasi negara-negara anggota ASEAN untuk memperkuat kapabilitas pertahanannya bahkan mendorong negara-negara kawasan untuk meningkatkan transformasi pertahanannya.

Seiring dengan institusionalisasi APSC, belanja militer negara-negara ASEAN justru meningkat. Peningkatan yang paling signifikan sebagian besar merupakan senjata kategori ofensif. Kecenderungan peningkatan belanja militer negara-negara ASEAN menandakan bahwa ada peningkatan kekuatan militer dari masing-masing negara ASEAN. Perhatikan tabel di bawah ini:

Tabel 4.1. Ekonomi Pertahanan Negara-negara di Kawasan Asia Tenggara

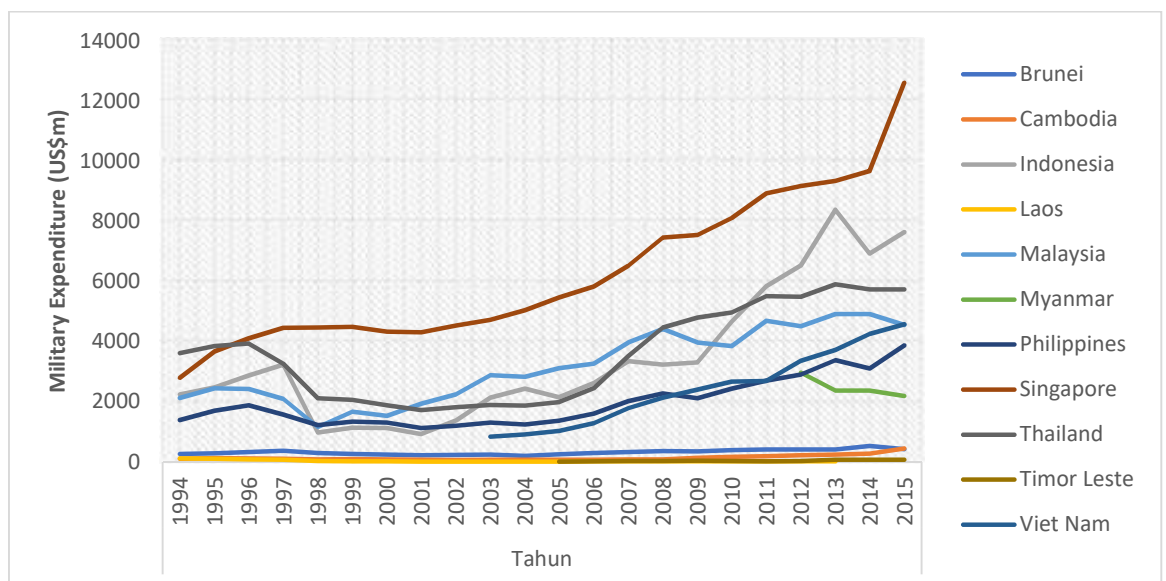
No	Negara	<i>Defense Budget</i>		Belanja Militer (US\$m)	
		2008	2017	2008	2017
1	Brunei	2.5 %	3.7 %	362	573
2	Kamboja	0.8 %	1.7 %	82.6	446
3	Indonesia	0.6 %	0.9 %	3232	8071
4	Laos	0.3 %	0.2 %	16.3	24
5	Malaysia	1.9 %	1.5 %	4412	5030
6	Myanmar	1.6 %	3.9 %	623	2360

7	Filipina	1.3	1.3	2271	3870
		%	%		
8	Singapura	3.9	3.2	7454	12600
		%	%		
9	Thailand	1.6	1.6	4466	5737
		%	%		
1	Timor	0.5	1.1	23.7	72.0
0	Leste	%	%		
1	Vietnam	2.2	2.3	2138	4571
1		%	%		

Sumber: Disarikan dari IISS Military Balance 2007, 2018 dan SIPRI Military Expenditure Database 2007, 2018

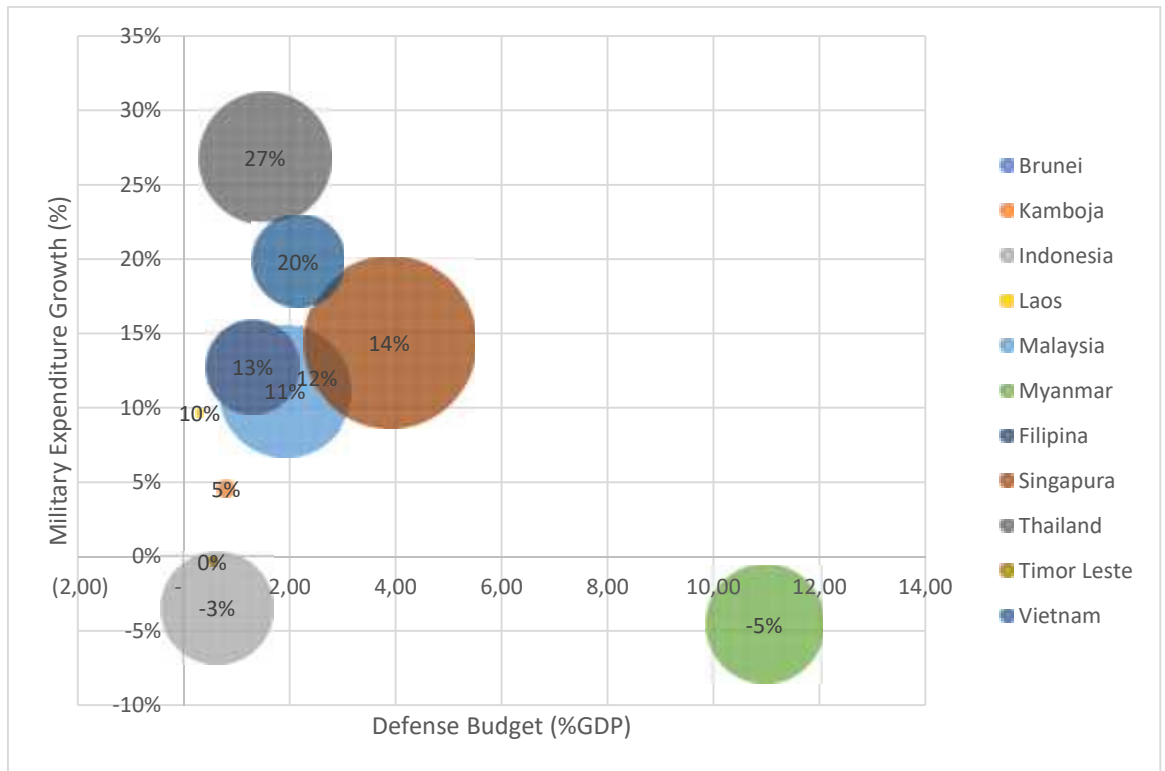
Singapura, Indonesia, dan Thailand menempati posisi tiga teratas peningkatan anggaran pertahanan di kawasan Asia Tenggara. Seperti yang tertera di grafik di bawah ini:

Grafik 4.1 Ekonomi Pertahanan Negara-negara Kawasan Asia Tenggara Tahun 2008 dan 2017



Sumber: Disarikan dari World Bank Open Data 2018, dan SIPRI Military Expenditure Database dan IISS Military Balance tahun 1994-2015.

Grafik 4.2 Anggaran Pertahanan, Pertumbuhan Belanja Militer, dan Belanja Militer Negara-negara Kawasan ASEAN Tahun 2008



Sumber: Disarikan dari IISS Military Balance 2018 dan SIPRI Military Expenditure Database

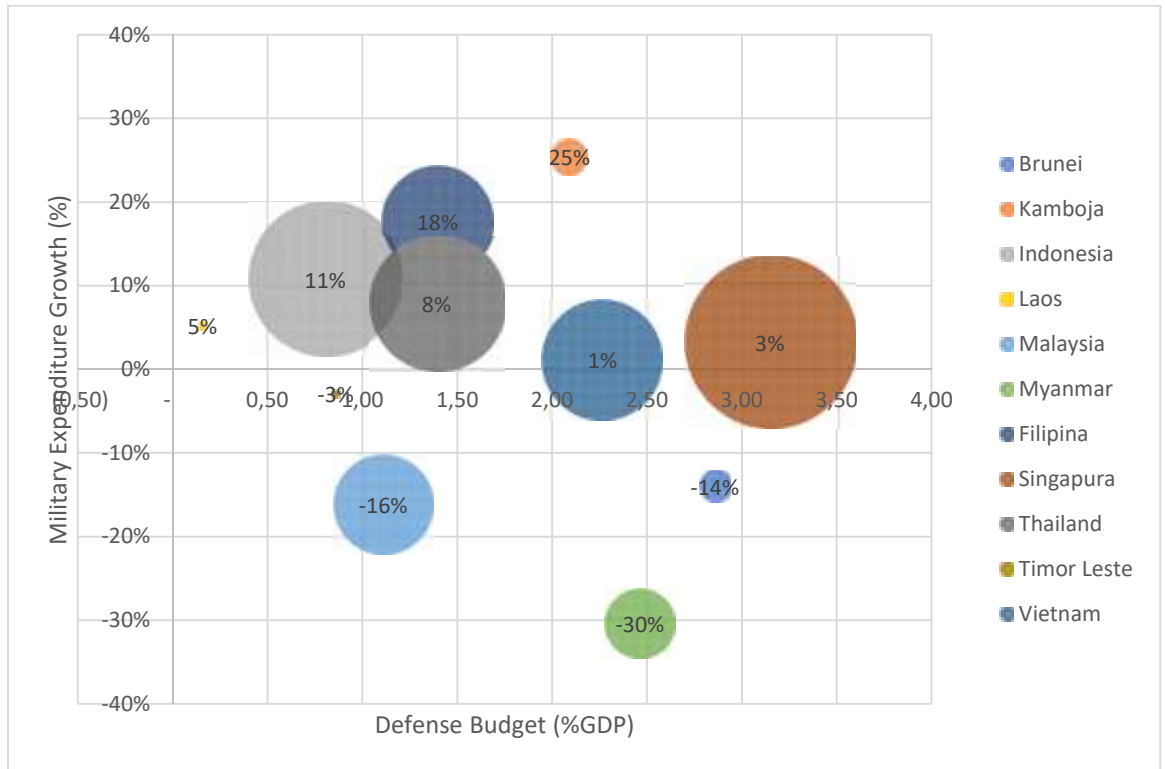
Berdasarkan grafik 4.2 dan 4.3, pertumbuhan belanja militer merepresentasikan tingkat perimbangan kekuatan di kawasan. Anggaran pertahanan merepresentasikan prioritas pertahanan sebuah negara. Sedangkan besaran belanja militer sebuah negara menunjukkan postur pertahanan sebuah negara.

Grafik 4.2 menunjukkan struktur kekuatan militer negara-negara kawasan ASEAN pada tahun 2008, bertepatan ketika ASEAN menandatangani cetak biru Komunitas Politik-Keamanan ASEAN. Sumbu x menunjukkan persentase anggaran pertahanan. Sumbu y menunjukkan tingkat pertumbuhan belanja militer/pertahanan. Ukuran lingkaran pada grafik menunjukkan besarnya belanja militer negara dalam US\$. Pada tahun 2008, Indonesia mengalami penurunan belanja militer sebesar 3% dan Myanmar juga mengalami penurunan sebesar 5%. Namun secara anggaran, Myanmar menempati posisi negara yang paling besar porsi anggaran pertahanannya sebesar 10.96% dari GDP. Pertumbuhan belanja militer terbesar dialami oleh Thailand dengan jumlah 27%. Posisi paling ideal pada tahun ini berada pada Singapura yang tingkat pertumbuhan belanja militernya sebesar 14% dengan anggaran pertahanan sebesar 3.88% dari GDP.

Pada tahun 2017, struktur kekuatan militer negara-negara kawasan ASEAN mengalami perubahan. Pada grafik 4.3 dapat dilihat bahwa tingkat pertumbuhan belanja militer ada pada Kamboja dengan besaran 25%. Anggaran pertahanan terbesar dimiliki oleh Singapura dengan

besaran 3.15% dari GDP. Myanmar jauh mengalami penurunan belanja pertahanan hingga sampai ada angka 30% turun meski anggaran pertahanannya masih cukup besar 2.46% dari GDP, terhitung terbesar ketiga.

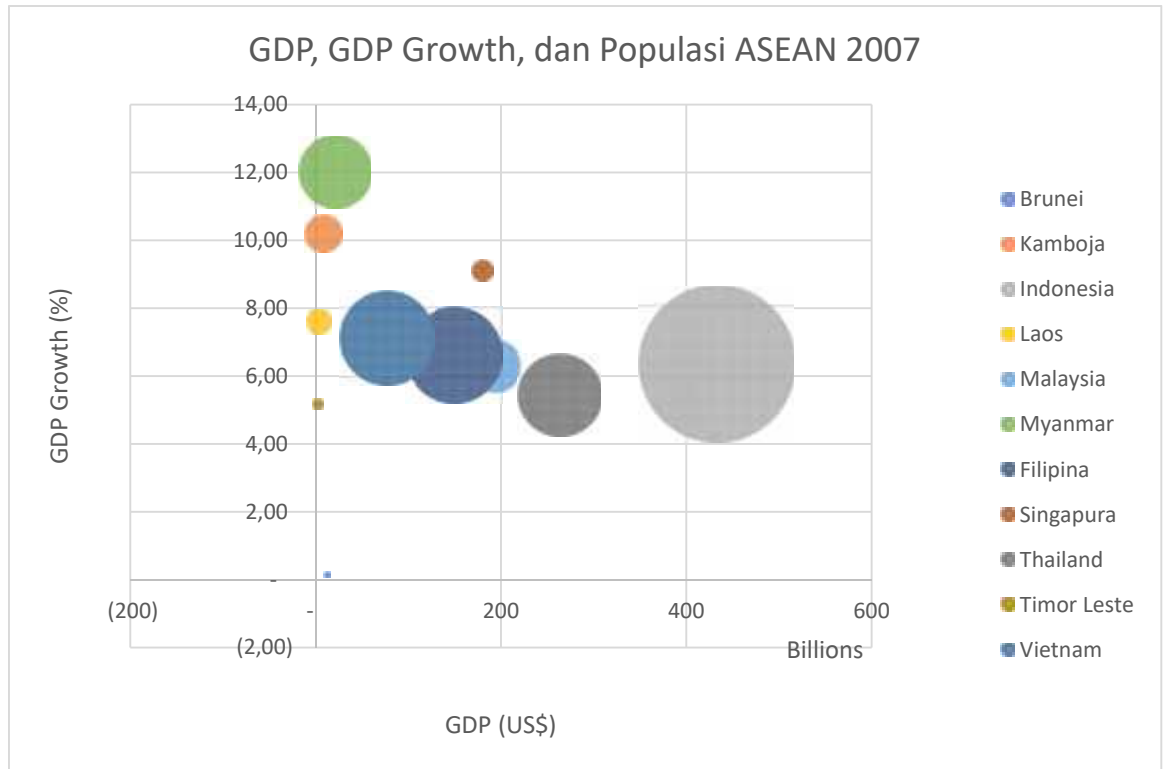
Grafik 4.3 Anggaran Pertahanan, Pertumbuhan Belanja Militer, dan Belanja Militer Negara-negara Kawasan ASEAN Tahun 2017



Sumber: Disarikan dari IISS Military Balance 2018 dan SIPRI Military Expenditure Database

Secara keseluruhan, negara-negara kawasan ASEAN tidak mengalami peningkatan yang signifikan secara pertumbuhan belanja militer atau relatif stabil tiap tahunnya. Tren pada grafik menunjukkan bahwa anggaran pertahanan rata-rata negara-negara kawasan ASEAN mengalami penurunan. Prioritas pertahanannya berkurang namun belanja militer tetap berjalan stabil tiap tahunnya. Ini menunjukkan ciri-ciri kawasan yang relatif damai dan jauh dari ancaman dan potensi terjadinya perang terbuka. Namun meskipun begitu, angka belanja militer di Asia Pasifik berdasarkan data dari *SIPRI Military Expenditure* dan *IISS The Military Balance* menunjukkan bahwa total belanja militer di Asia Pasifik (US\$ 436.5 Milyar) bahkan lebih besar dibandingkan dengan total belanja militer di kawasan konflik, Timur Tengah (US\$ 162.5 Milyar) (*SIPRI Military Expenditure Database*, 2016). Peningkatan biaya pertahanan ini diiringi dengan sedikit melemahnya fundamen ekonomi negara-negara kawasan, seperti grafik 4.4 dan 4.5 yang tertera di bawah ini.

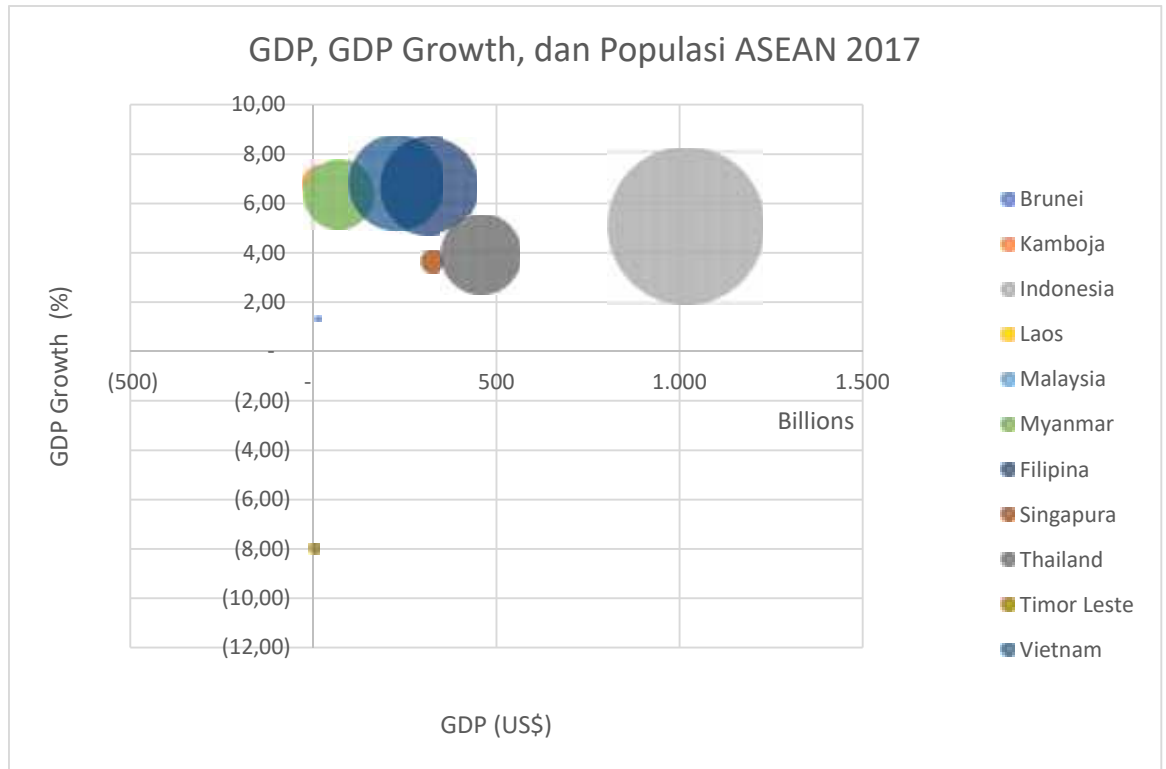
Grafik 4.4 Pertumbuhan Ekonomi Negara-negara Kawasan Asia Tenggara Tahun 2007



Sumber: Disarikan dari World Bank. 2018. *GDP Annual Growth Rate*. Diakses dari <http://data.worldbank.org>

Pertumbuhan ekonomi (*GDP Growth*), pada sumbu y menunjukkan kualitas fundamen ekonomi sebuah negara. Sedangkan GDP pada sumbu x menunjukkan besaran kekayaan sebuah negara. Kemudian, populasi yang ditunjukkan sebagai luas lingkaran pada grafik merepresentasikan besarnya ukuran sebuah negara.

Grafik 4.5 Pertumbuhan Ekonomi Negara-negara Kawasan Asia Tenggara Tahun 2017



Sumber: Disarikan dari World Bank. 2018. *GDP Annual Growth Rate*. Diakses dari <http://data.worldbank.org>

Berdasarkan data pada grafik 4.4 dan 4.5, secara keseluruhan negara-negara ASEAN mengalami penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi namun GDP negara-negara tersebut mengalami kenaikan. Meski laju pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN rata-rata hampir di angka 7% dengan rata-rata GDP sebesar 1.3 triliun dollar pada tahun 2007, ia mengalami penurunan di tahun 2017 sebesar 4.13% dengan rata-rata GDP sebesar 2.7 triliun dollar. Performa ekonomi negara-negara ASEAN yang tidak begitu memuaskan membuat agenda Komunitas ASEAN yang lebih banyak berkaitan dengan isu ekonomi dan perdagangan menjadi rasional dan tepat untuk dijadikan sebagai agenda prioritas kawasan.

Dari segi stabilitas politik, tren ekonomi dan militer kawasan menjadikan negara-negara kawasan Asia Tenggara relatif damai. Prinsip *mutual respect* dan *non-interference* telah menjadi variabel bebas bagi ketahanan ASEAN dalam mengelola persoalan-persoalan yang dihadapinya. Meskipun banyak mendapat kritik karena informalitas dan fleksibilitasnya, *ASEAN Way* perlu mendapat apresiasi sebagai faktor *endogenous* dalam menjaga stabilitas kawasan. Semenjak berdirinya, ASEAN telah memberikan stabilitas dan iklim damai bagi setiap negara anggota ASEAN dan menciptakan stabilitas keamanan di kawasan Asia Timur. Stabilitas ini telah menjadi jaminan bagi negara-negara anggota ASEAN dalam meningkatkan

perekonomian, keamanan bersama, dan taraf hidup rakyat negara-negara anggota. Tidak ada ketegangan dan potensi konflik terbuka yang merusak iklim damai dan stabilitas politik tersebut.

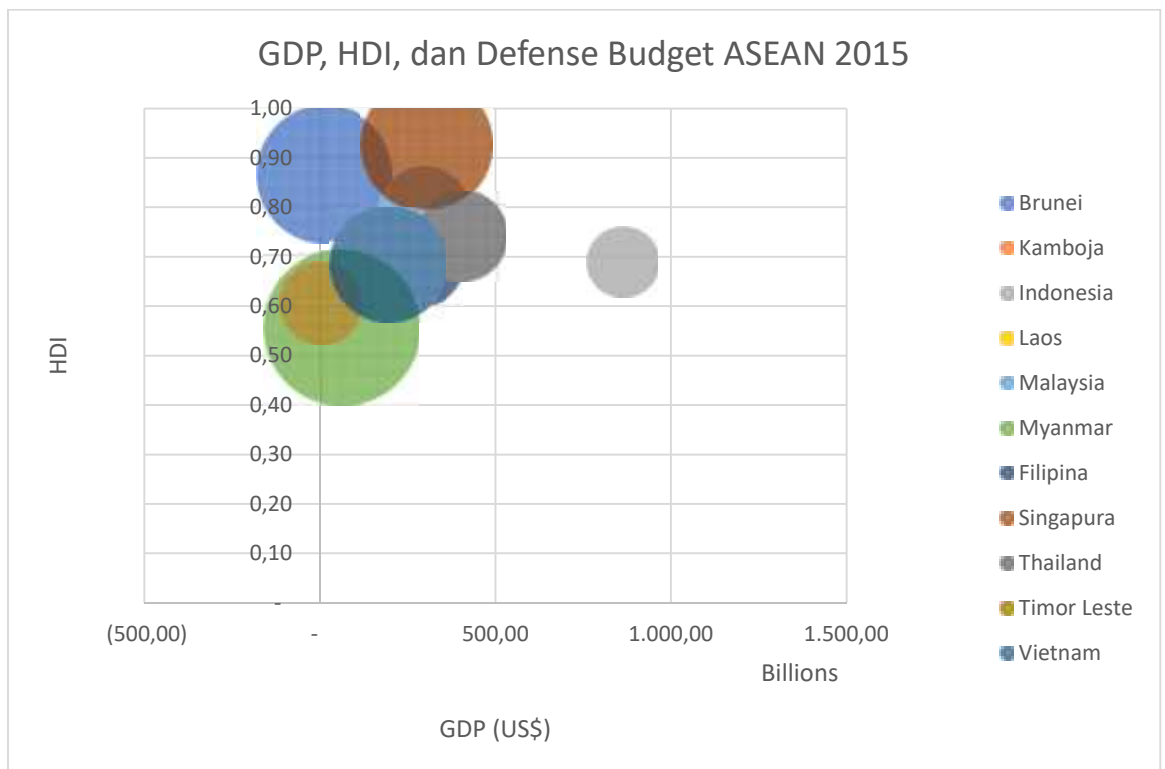
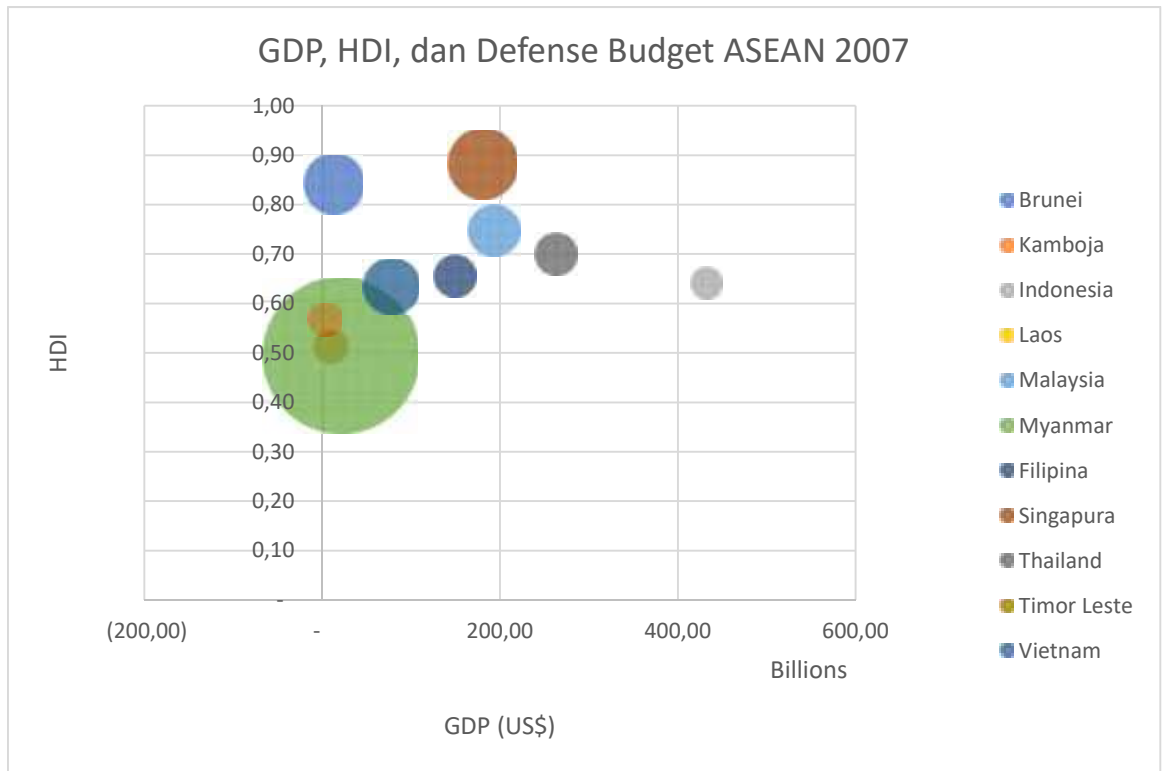
ASEAN dan Keamanan Manusia

Meskipun legitimasi politik dan pembangunan institusi pemerintahan negara-negara kawasan Asia Tenggara semakin kuat, ASEAN tidak luput dari masalah. Perlindungan Hak Asasi Manusia adalah catatan terburuk bagi ASEAN. Prinsip *non-interference* menjadi penghalang bagi ASEAN untuk mewujudkan keamanan bagi individu-individu yang secara hak asasi, tertindas atau termarjinalkan di negaranya masing-masing. Kasus pelanggaran HAM teradap etnis Rohingya, Myanmar adalah salah satu kasus pelanggaran HAM yang terbesar di ASEAN.

Harison Citrawan dari Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Kementerian Hukum dan HAM, menyatakan bahwa dari sudut pandang regionalisme HAM di kawasan Asia Tenggara, agenda penegakan hukum dan HAM di ASEAN berpotensi sia-sia karena tidak diikuti dengan kepatuhan hukum (*legal compliance*) negara-negara anggota ASEAN terhadap norma dan prinsip HAM di tingkat domestic (Harison Citrawan, 2014: 237). ASEAN sendiri terbagi atas tiga kelompok: 1) Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Thailand yang punya institusi penegakan HAM; 2) Kamboja, Laos, Myanmar, dan Viet Nam yang ‘tidak antusias’ terhadap HAM; dan 3) Brunei dan Singapura yang tidak juga terlalu tertarik namun mencoba menjembatani jarak antar dua kategori ini (S. Petcharamesree, 2009: 240). Terbaginya kelompok ini membuat penegakan HAM sulit sekali berjalan efektif khusus bagi negara kelompok kedua.

Bagaimana kondisi pembangunan manusia di kawasan Asia Tenggara? Perhatikan grafik di bawah ini.

Grafik 4.6 Orientasi Pembangunan Manusia dan Pembangunan Negara-negara di Kawasan Asia Tenggara Tahun 2007 dan 2015



Sumber: Disarikan dari UNDP Human Development Report. New York: UNDP. Lebih lanjut lihat Oscar A. Gomez and Des Gasper. 2013. *A Thematic Guidance Note for Regional and National Human Development Report Teams*. New York: UNDP Human Development Report Office. Diakses dari <http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi> 30 Juli 2018.

Dua diagram pada grafik menampilkan Indeks Pembangunan Manusia pada sumbu y, besarnya postur ekonomi yang direpresentasikan oleh GDP pada sumbu X dan besarnya anggaran pertahanan yang direpresentasikan oleh luas lingkaran pada grafik. Grafik 4.5 menunjukkan bahwa besarnya anggaran pertahanan relatif tidak korelatif dengan Indeks Pembangunan Manusia. Terbukti bahwa Myanmar yang memiliki anggaran pertahanan yang paling tinggi di tahun 2017 justru berada di peringkat terbawah ASEAN pada konteks pembangunan manusia. Sehubungan dengan situasi pelanggaran HAM di Myanmar, Myanmar menempati posisi paling rendah dari segi Indeks Pembangunan Manusia. Memiliki angka harapan hidup terendah; pendapatan perkapita dan anggaran kesehatan terendah kedua; dan paling rendah di aspek pendidikan menunjukkan Myanmar belum mapan dalam menyediakan keamanan bagi manusianya.

Singapura, Brunei, dan Malaysia menempati posisi tiga teratas dalam membangun kualitas manusianya. Indonesia ada di posisi kelima setelah Thailand. Berdasarkan data di atas, dapat dipahami bahwa pada kasus ASEAN, agenda *State-Building* dan *Human Development* pada beberapa negara ASEAN menunjukkan relasi yang positif. Pembangunan negara dapat menjadi preseden dalam membangun kualitas manusia bagi negara-negara seperti Indonesia, Thailand, dan Singapura. Jika dibandingkan data tahun 2007 dan 2017, terlihat pada grafik 4.5 bahwa negara-negara ASEAN bergerak menuju pada tren peningkatan pembangunan manusia.

Kemudian indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat Keamanan Manusia adalah *Human Security Index* yang secara spesifik mengindeksasi keamanan manusia. Lebih jelas dan spesifik tentang keamanan manusia, dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut.

Tabel 4.2 Indeks Keamanan Manusia Kawasan Asia Tenggara versi UNDP

Negara	HSI	Populasi	Tingkat	Tingkat
		Penjara	Pembunuhan	Bunuh Diri/100k
		/100k Orang	/100k Orang	Laki-laki
Singapore	0.726	230	0.2	5.3
Brunei	0.671	122	2.0	5.2
Malaysia	0.660	132	2.3	1.5
Thailand	0.648	398	5.0	4.5
Viet Nam	0.586	145	3.3	2.4
Indonesia	0.584	59	0.6	4.9
Laos	0.562	69	5.9	6.6
Timor Leste	0.545	25	3.6	5.8
Philippines	0.535	111	8.8	1.2
Myanmar	0.512	120	15.2	10.3
Cambodia	0.488	106	6.5	6.5

Sumber: Disarikan dari UNDP Human Development Report. New York: UNDP. Lebih lanjut lihat Oscar A. Gomez and Des Gasper. 2013. *A Thematic Guidance Note for Regional and National Human Development Report Teams*. New York: UNDP Human Development Report Office. Diakses dari <http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi> 30 Juli 2018.

Berdasarkan paparan pada table 4.2 di atas, negara Kawasan Asia Tenggara yang paling tidak aman bagi perempuan adalah Thailand, Timor Leste, dan Vietnam. Hampir setengah dari korban kasus kekerasan di Thailand adalah perempuan. Filipina dan Kamboja relatif cukup tinggi yaitu di angka 20-an%. Indonesia bahkan lebih baik ketimbang Singapura yang notabene adalah negara dengan indeks keamanan manusia paling tinggi di Asia Tenggara.

Kemudian di bawah ini, adalah bagaimana keamanan manusia yang dielaborasi lagi berdasarkan tiga aspek: 1) Fabric Ekonomi, 2) Fabric Lingkungan, dan 3) Fabric Sosial. Tiga variabel ini ditentukan berdasarkan sejumlah sub-variabel yang terdiri dari: emisi karbon, keamanan/ketahanan pangan, terror politik, tingkat kelaparan, kerawanan lingkungan, populasi, kompetisi, gap gender, dan lain-lain yang kemudian diklasifikasikan dan diindeksasi⁹.

⁹ Lebih lanjut dapat mengunjungi http://www.humansecurityindex.org/?page_id=224 – Data and Resources. Diakses pada 30 Juli 2018 pukul 17.17 WIB

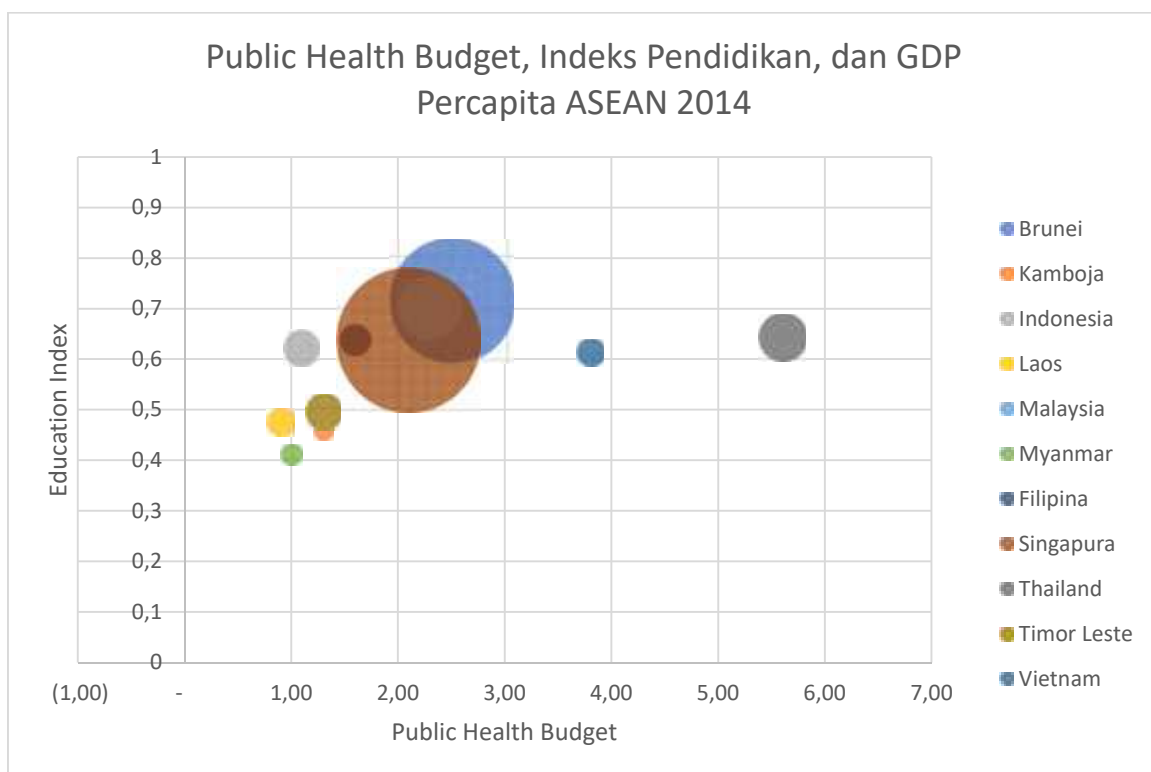
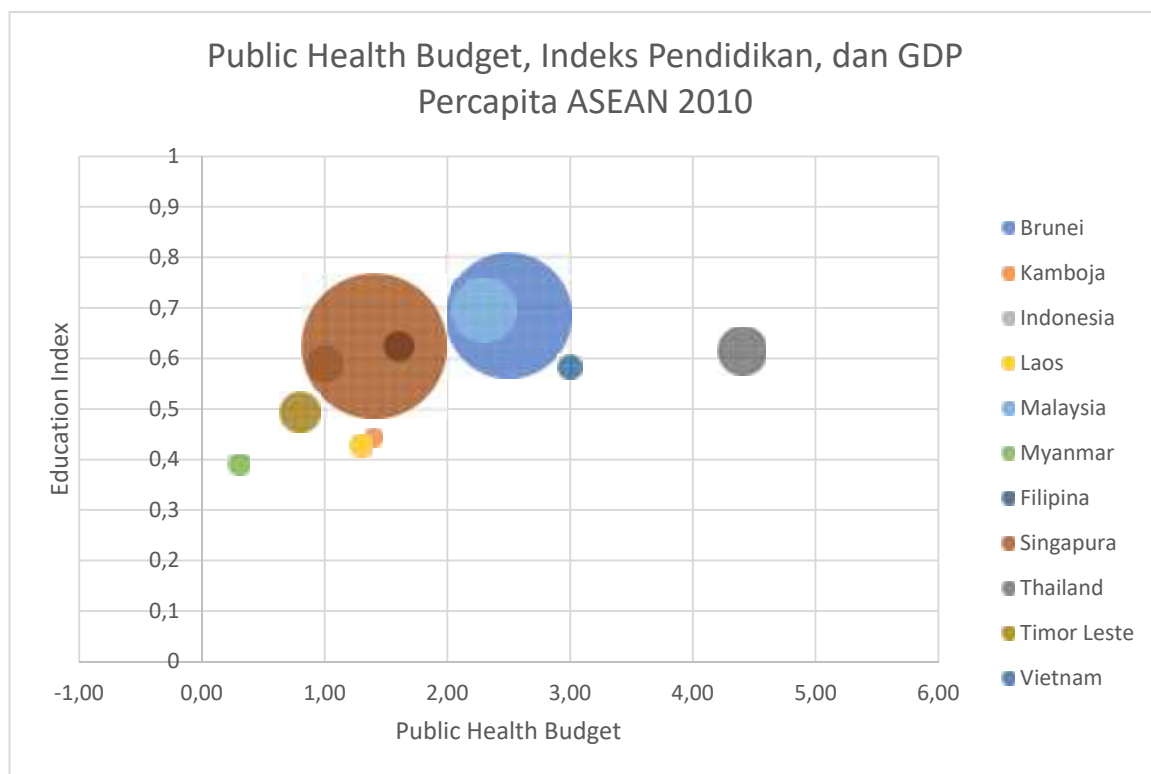
Tabel 3. Indeks Keamanan Manusia

Negara	HSInd ex	humansecurity.org		
		EconFab ric	EnvFab ric	SocFab ric
Singapor	0.726	0.844	0.583	0.750
Brunei	0.671	0.925	0.400	0.689
Malaysia	0.660	0.740	0.552	0.688
Thailand	0.648	0.688	0.680	0.576
Viet Nam	0.586	0.536	0.614	0.608
Indonesia	0.584	0.638	0.540	0.573
Laos	0.562	0.534	0.647	0.506
Timor	0.545	0.552	0.506	0.576
Leste				
Philippin	0.535	0.563	0.514	0.530
Myanma	0.512	0.512	0.622	0.401
Cambodi	0.488	0.439	0.532	0.494

Sumber: Disarikan dari humansecurityindex.org

Berdasarkan data di atas, Myanmar dan Kamboja adalah dua negara yang paling rendah indeks keamanan manusianya. Singapura, Brunei, Malaysia, dan Thailand menempati posisi teratas layaknya di indeks pembangunan manusia. Lebih lanjut lagi, penulis menganalisis sejauh mana perhatian negara-negara kawasan Asia Tenggara terhadap agenda pembangunan manusia dihadapkan pada agenda pembangunan negara (*State-Building*) dari sudut pandang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan pada grafik di bawah ini.

Grafik 4.7 Pembangunan Manusia Negara-negara di Kawasan Asia Tenggara pada Aspek Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan



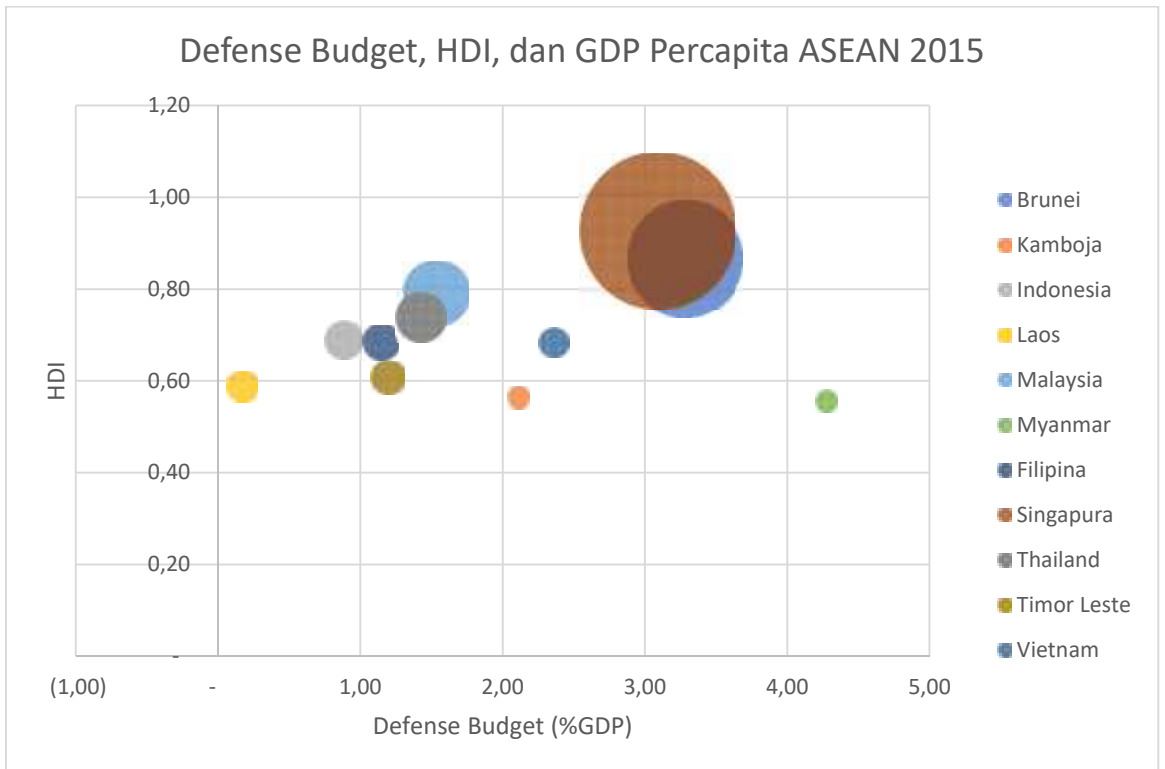
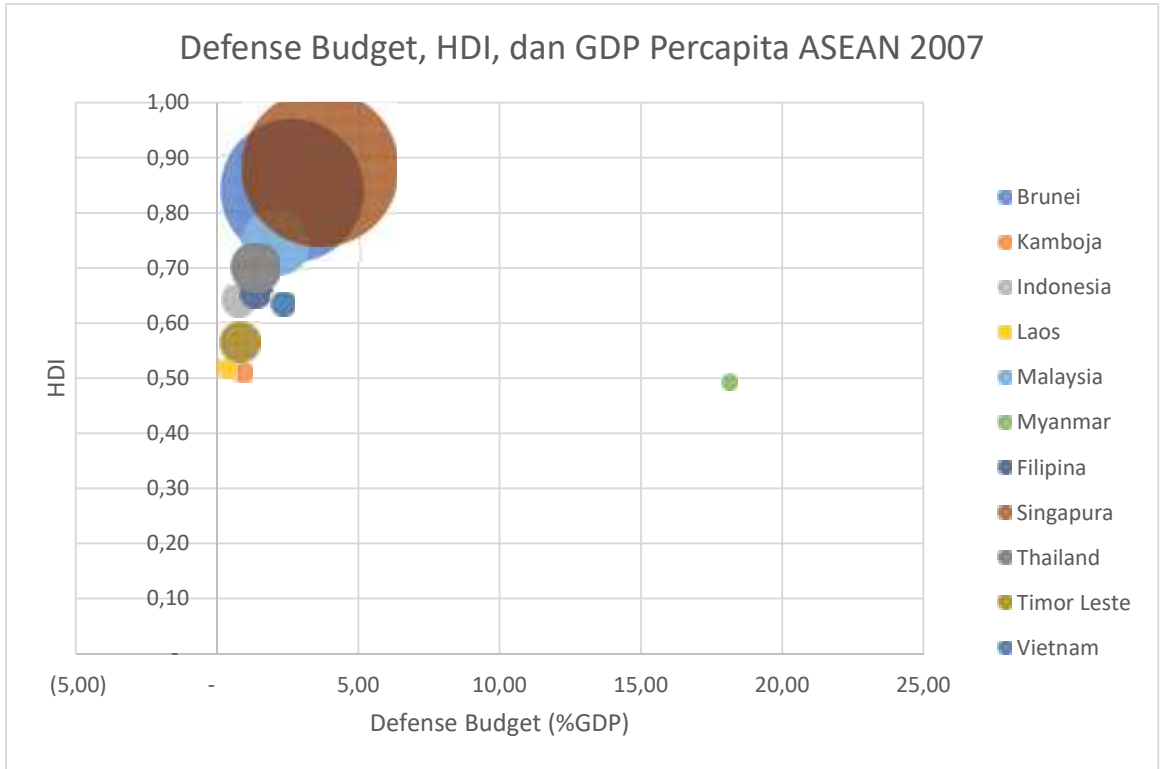
Sumber: Disarikan dari humansecurityindex.org dan World Bank Open Data 2018

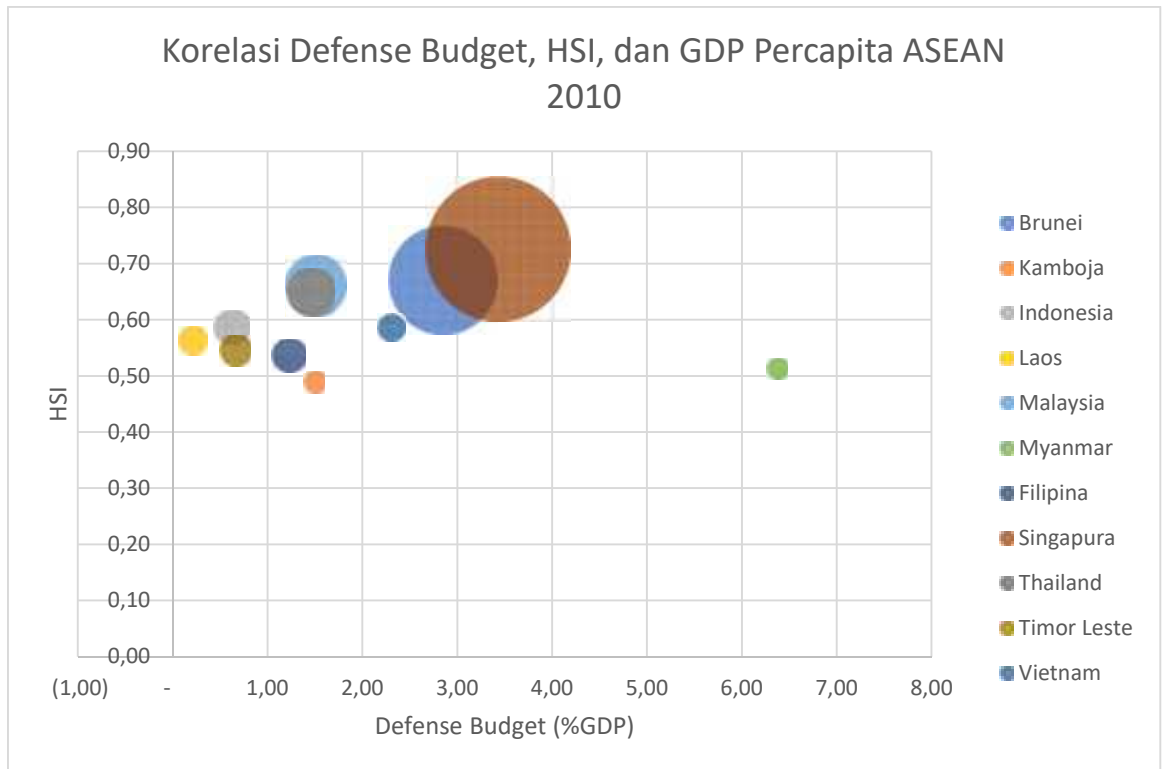
Grafik 4.7 menunjukkan bahwa Singapura dan Brunei adalah negara-negara dengan tingkat kesejahteraan yang paling tinggi. Sedangkan Vietnam dan Thailand adalah negara-

negara yang memiliki anggaran kesehatan paling tinggi. Dari aspek pendidikan, Singapura dan Brunei masih menempati posisi tertinggi selama tahun 2010 s.d. 2014. Jika dilihat secara garis besar, tren anggaran kesehatan publik di ASEAN mengalami peningkatan meski tidak terlalu signifikan.

Selanjutnya berikut adalah grafik 4.8 yang menunjukkan bagaimana hubungan antara pembangunan negara vis a vis pembangunan manusia dan keamanan manusia di ASEAN. Pembangunan negara pada konteks ini diindikasikan dengan anggaran pertahanan pada sumbu x dan pembangunan manusia direpresentasikan oleh Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Keamanan Manusia (khusus pada grafik ketiga) pada sumbu y dan kesejahteraan (GDP perkapita) pada ukuran lingkaran grafik.

Grafik 4.8 *State Building* vis a vis Pembangunan Manusia Negara-negara di Kawasan Asia Tenggara





Sumber: Disarikan dari humansecurityindex.org, IISS Military Balance 2018, SIPRI Military Expenditure Database, dan World Bank Open Data 2018

Secara keseluruhan, rata-rata negara-negara ASEAN mengalami penurunan anggaran pertahanan di saat Indeks Pembangunan Manusia rata-rata keseluruhan negara-negara ASEAN mengalami kenaikan. Perubahan yang paling signifikan ada pada Myanmar yang mengalami penurunan anggaran pertahanan dari 18.13% dari GDP pada tahun 2007 menjadi 4.28% dari GDP pada tahun 2017. Secara keseluruhan rata-rata GDP perkapita negara-negara ASEAN mengalami kenaikan.

Korelasi Pembangunan Negara dan Pembangunan Manusia Negara-negara Asia Tenggara

Terdapat sepuluh variabel yang digunakan dalam penelitian ini yang merepresentasikan ‘pembangunan negara’ dan ‘pembangunan manusia’. Untuk melihat bagaimana korelasi antara pembangunan negara dan pembangunan manusia, penulis melakukan uji korelasi Kendall’s Tau-b dengan perangkat lunak IBM SPSS. Berikut ini adalah hasil uji korelasi yang telah penulis lakukan.

Tabel 4.3 Hasil Uji Korelasi Kendall's Tau-b Pembangunan Negara dan Pembangunan/Keamanan Manusia

			GD P (U S\$)	HD I	Mil Exp (US \$)	GD P Gro wth (%)	DefBu dget (%GD P)	Educa tion Index	Publi c Healt h Budg et (%G DP)	Educati on Expend iture (%GDP)	GD P Per Cap ita	Ang ka Hara pan Hidu p
Kend all's tau_b	GDP (US\$)	Correla tion Coeffic ient	1.0 00	.37 4**	.714 **	- .115	-.023	.325**	.313* *	-.132	.29 5**	.279* *
		Sig. (2- tailed)	.	.00 0	.000	.062	.707	.000	.001	.267	.00 0	.000
		N	121	99	121	121	121	66	55	35	121	99
	HDI	Correla tion Coeffic ient	.37 4**	1.0 00	.481 **	- .405 **	.282**	.804**	.415* *	.007	.81 1**	.786* *
		Sig. (2- tailed)	.00 0	.	.000	.000	.000	.000	.000	.955	.00 0	.000
		N	99	99	99	99	99	66	55	35	99	99
	MilExp (US\$)	Correla tion Coeffic ient	.71 4**	.48 1**	1.00 0	- .148 *	.263**	.323**	.309* *	-.190	.36 9**	.424* *
		Sig. (2- tailed)	.00 0	.00 0	.	.016	.000	.000	.001	.111	.00 0	.000
		N	121	99	121	121	121	66	55	35	121	99

GDP Growth (%)	Correlation Coefficient	- .115	- .405**	- .148*	1.000	-.086	-.427**	-.286*	-.268*	-.404**	-.377*
	Sig. (2-tailed)	.062	.000	.016	.	.161	.000	.002	.025	.000	.000
	N	121	99	121	121	121	66	55	35	121	99
DefBudget (%GDP)	Correlation Coefficient	-.023	.282**	.263**	-.086	1.000	.133	.202*	-.268*	.142*	.419*
	Sig. (2-tailed)	.707	.000	.000	.161	.	.117	.032	.025	.021	.000
	N	121	99	121	121	121	66	55	35	121	99
Education Index	Correlation Coefficient	.325**	.804**	.323**	-.427**	.133	1.000	.527*	.137	.643**	.615*
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.117	.	.000	.254	.000	.000
	N	66	66	66	66	66	66	55	35	66	66
Public Health Budget (%GDP)	Correlation Coefficient	.313**	.415**	.309**	-.286**	.202*	.527**	1.000	.097	.247**	.499*
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.001	.002	.032	.000	.	.425	.009	.000
	N	55	55	55	55	55	55	55	35	55	55
Education Expenditure	Correlation Coefficient	-.132	.007	-.190	-.268*	-.268*	.137	.097	1.000	.092	.056

	(%GDP)	Sig. (2-tailed)	.267	.955	.111	.025	.025	.254	.425	.	.443	.639
	N		35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
GDP Per Capita	Correlation Coefficient		.295**	.811**	.369**	-.404**	.142*	.643**	.247*	.092	1.000	.646*
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.021	.000	.009	.443	.	.000
	N		121	99	121	121	121	66	55	35	121	99
Angka Harapan Hidup	Correlation Coefficient		.279**	.786**	.424**	-.377**	.419**	.615**	.499*	.056	.646**	1.000
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.639	.000	.
	N		99	99	99	99	99	66	55	35	99	99
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).												
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).												

Berdasarkan hasil uji korelasi Kendall's Tau-b pada tabel 4.3, variabel Indeks Pembangunan Manusia (HDI) memiliki korelasi paling kuat dengan pendapatan perkapita. Pembangunan manusia di ASEAN berkorelasi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya, pertumbuhan ekonomi tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap pembangunan manusia di ASEAN. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini.

Tabel 4.4 Korelasi Pembangunan Manusia dengan Variabel Terkait

	DP	MilExp (US\$)	DP Growth	DefBudget (%GDP)	Educational Index	Public Health Budget	Educational Expenditure (%GDP)	DP Per Capita	angka Harapan Hidup
DI	.374	.481	.405	.282	.804	.415	.007	.811	.786

Selanjutnya, berikut ini adalah korelasi antara pembangunan negara dengan variabel pembangunan/keamanan manusia tertera pada tabel 4.5 di bawah ini.

Tabel 4.5 Korelasi Variabel Pembangunan Negara dengan Variabel Penunjang Pembangunan dan Keamanan Manusia

	Educational Index	Public Health Budget	Educational Expenditure (%GDP)	GD Per Capita	Angka Harapan Hidup
GDP	0.325	0.313	-.132	0.295	0.279
MilExp (US\$)	0.323	0.309	-.190	0.369	0.424
GDP Growth	-.427	-.286	-.286	-.404	-.377
DefBudget (%GDP)	0.133	0.202	-.268	0.142	0.419

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi negatif dengan seluruh variabel pembangunan manusia. Pengeluaran untuk pendidikan memiliki korelasi negatif dengan seluruh variabel yang merepresentasikan pembangunan negara. Korelasi terbesar ada pada belanja militer dan angka harapan hidup. Sedangkan yang memiliki korelasi terkecil adalah pertumbuhan ekonomi dan indeks pendidikan.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah mengeksplorasi bagaimana posisi dan eksistensi keamanan manusia dari sudut pandang pos-kolonial yang direpresentasikan oleh tumbuh-kembangnya negara-negara kawasan Asia Tenggara. Agenda ini termaktub dalam cetak biru Komunitas ASEAN. Pada tahun 2008, ASEAN menyepakati cetak biru tiga pilar politik-keamanan, ekonomi, dan sosio-kultur, Komunitas ASEAN. Dari kacamata pos-kolonial, pembentukan Komunitas ASEAN merupakan salah satu perwujudan dari pembangunan negara-negara kawasan ASEAN. Di sisi lain, ASEAN menganut keamanan komprehensif yang menempatkan keamanan manusia sebagai isu sentral. Cetak biru Komunitas Politik-Keamanan ASEAN (APSC) sangat mencerminkan keamanan manusia.

Secara kuantitatif, Indeks Pembangunan Manusia (HDI) memiliki korelasi paling kuat dengan pendapatan perkapita. Pembangunan manusia di ASEAN berkorelasi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya, pertumbuhan ekonomi tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap pembangunan manusia di ASEAN. Pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi negatif dengan seluruh variabel pembangunan manusia. Pengeluaran untuk pendidikan memiliki korelasi negatif dengan seluruh variabel yang merepresentasikan pembangunan negara. Korelasi terbesar ada pada belanja militer dan angka harapan hidup. Sedangkan yang memiliki korelasi terkecil adalah pertumbuhan ekonomi dan indeks pendidikan.

Negara-negara dari sudut pandang pos-kolonial menurut Moh. Ayoob tengah dan harus memfokuskan diri pada agenda *State-Building*, didorong untuk juga memperhatikan aspek keamanan manusia pasca dipublikasikannya UNDP *Human Development Report* pada tahun 1994. Meskipun Moh. Ayoob dan pendekatan keamanan pos-kolonialisme tidak menyetujui Emansipasi sebagai agenda wajib, perkembangan di negara-negara ASEAN menunjukkan bahwa untuk kasus ASEAN, antara *State-Building* dan Keamanan Manusia memiliki relasi yang cukup beragam. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, agenda *State-Building* di satu sisi dapat menjadi faktor pendukung peningkatan dan penguatan keamanan manusia, namun di sisi lain masih ada sejumlah agenda yang tidak berbading lurus atau berkorelasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlu adanya koreksi terhadap gagasan pos-kolonial khususnya yang datang dari Moh. Ayoob. Bahwa, Emansipasi dan *State-Building* dapat berjalan secara bersama. Meskipun sulit untuk mengkalim bahwa Keamanan Manusia disebabkan atau ditentukan oleh kuatnya Negara dan Pemerintahan, hasil penelitian ini relatif setidaknya menunjukkan bahwa dua variabel besar ini memiliki relasi yang positif.

Untuk meningkatkan pembangunan dan keamanan manusia, negara harus memperhatikan kesejahteraan (pendapatan perkapita) karena peningkatan pendapatan perkapita memiliki hubungan yang kuat terhadap peningkatan pembangunan manusia, angka harapan hidup, dan kualitas pendidikan. Tantangan yang cukup besar bagi ASEAN adalah bagaimana mengkonversi peningkatan GDP untuk dapat sejalan dengan peningkatan pendapatan percapita karena hasil analisis menunjukkan korelasi antara GDP dan pendapatan percapita di negara-negara ASEAN kecil. Pembangunan negara yang direpresentasikan dengan pembangunan ekonomi akan berdampak besar pada peningkatan pembangunan dan keamanan manusia ketika pendapatan negara mampu berdampak pada peningkatan pendapatan perkapita. Peningkatan pendapatan perkapita inilah yang kemudian dapat menjadi faktor pendorong peningkatan variabel-variabel pembangunan dan keamanan manusia yang lain seperti kualitas pendidikan, kualitas pelayanan kesehatan, anggaran untuk pendidikan dan kesehatan, serta angka harapan hidup.

Terakhir, berkaca pada kompleksnya perilaku negara-negara ASEAN yang secara pembangunan manusia dan pembangunan negara cukup beragam membuat kerja sama regional menjadi relevan untuk ditingkatkan. Negara yang memiliki komponen fundamen ekonomi yang kuat namun lemah secara populasi dapat meningkatkan kerja sama dengan negara yang memiliki populasi tinggi dan sedang berusaha meningkatkan fundamen ekonominya. Negara-negara ASEAN dapat menjadikan mekanisme dan arsitektur keamanan yang ada saat ini sebagai instrument untuk menjamin kerja sama antar aktor dan multi-sektor tersebut dapat berjalan dengan aman. Oleh karena itu juga menjadi hal yang masuk akal jika kajian-kajian keamanan non-tradisional cukup banyak berkembang di ASEAN.

Daftar Pustaka

Andi Widjajanto; Edy Prasetyono; Makmur Keliat. 2012. *Dinamika Persenjataan dan Revitalisasi Industri Pertahanan*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

ASEAN. 2009. *ASEAN Political-Security Community Blueprint 2015*. Jakarta: ASEAN Secretariat.

- ASEAN. 2015. *ASEAN Political-Security Community Blueprint 2025*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- Ayoob, Mohammed. 1995. *The Third World Security Predicament: State Making, Regional Conflict and the International System*, Boulder, CO, Lynne Rienner.
- Keith Krause. 1998. "Theorizing Security, State Formation and the Third World in the Post-Cold War World," *Review of International Studies* 24, 125-136.
- Barkawi, Tarak dan Laffey, Mark. 2006. *The Postcolonial Moment in Security Studies*. *Review of International Studies*. 32: 329-352. British International Study Association.
- Barnett, Michael. 2002. *Radical Chic? Subaltern Realism: a Rejoinder*. *International Studies Review*, Vol. 4, No. 3 (Autumn, 2002), pp. 49-62. (published by Wiley on behalf of The International Studies Association).
- Booth, Ken. 1991. *Security and Emancipation*. *Review of International Studies*, Vol. 17, No. 4. October. Hlm. 313-326.
- Citrawan, Harison. 2014. *Menuju ASEAN Political and Security Community: Kritik dan Tantangan Politik Hukum HAM Indonesia dalam Regionalisme HAM ASEAN*. *Jurnal Rechts Vinding*. Vol 3, No 2, Agustus 2014.
- Clark, P Robert. 1989. *Menguak Kekuasaan dan Politik Di Dunia Ke Tiga*. Jakarta: Erlangga.
- Gurr, Ted Robert. *Minorities, Nationalists, and Ethnopolitical Conflict*. Dalam Chester A. Crocker, Fen Osler Hampson dan Pamela Aall (eds). 1996. *Managing Global Chaos: Sources and Responses to International Conflict*. Washington DC: United States Institute of Peace
- IISS. *The Military Balance 2018*, (London: The International Institute for Strategic Studies, 2018) diakses dari <https://www.iiss.org/publications/the-military-balance/the-military-balance-2018>.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2015. *Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN*. Diakses dari <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/asean/Pages/Masyarakat-Politik-Keamanan-ASEAN.aspx> pada 8 Juni 2016, pukul 10:30 WIB.
- Krasner, Stephen. 1999. *Sovereignty: Organized Hypocrisy*. New Jersey: Princeton University Press.
- Krause, Keith. 1998. "Theorizing Security, State Formation and the Third World in the Post-Cold War World," *Review of International Studies* 24, 125-136.

Nuechterlein, Donald E.. 1968. *Prospects for Regional Security in Southeast Asia*. Asian Survey, Vol. 8, No. 9 (Sep., 1968), pp. 806-816. University of California Press.

Paris, Roland. 2001. *Human Security: Paradigm Shift or Hot Air*. International Security, Vol 26, No. 2, pp. 87-102.

S. Petchamesree. 2009. *The Human Rights Body: a Test for Democracy Building in ASEAN*. Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance.

SIPRI. 2016. *Military Expenditure Database 1998-2015-16*. Diakses dari http://www.sipri.org/research/armaments/milex/milex_database dan IISS. 2015. *The Military Balance*. Diakses dari <https://www.iiss.org/en/publications/military-s-balance>.

Smith, B. C. 1996. *Understanding Third World Politics: Theories of Political Change and Development*. New York: Palgrave Macmillan.

UNDP Human Development Report. 1994. *New Dimension of Human Security*. New York: UNDP. Lebih lanjut lihat Oscar A. Gomez and Des Gasper. 2013. *A Thematic Guidance Note for Regional and National Human Development Report Teams*. New York: UNDP Human Development Report Office.

UNDP Human Development Report. New York: UNDP. Lebih lanjut lihat Oscar A. Gomez and Des Gasper. 2013. *A Thematic Guidance Note for Regional and National Human Development Report Teams*. New York: UNDP Human Development Report Office. Diakses dari <http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi> 30 November 2016.

Wanandi, Yusuf. 1981. *Security Arrangement in Southeast Asia*. Asian Perspective, Vol. 5, No. 1, SPECIAL ISSUE: KOREA AND INDONESIA: Toward Inter-regional Cooperation (Spring-Summer 1981), pp. 57-67. Lynne Rienner Publishers.

Widjanto, Andi. 2005. *Kuadran Perdamaian Demokratik*. Global Vol. 7 No. 2 Mei 2005.

World Bank. 2016. *GDP Annual Growth Rate*. Diakses dari <http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG>

Tata Kelola Lingkungan Regional: ASEAN Menuju Komitmen Kesepakatan Paris

Masitoh Nur Rohma
Universitas Islam Indonesia
masitoh.rohma@uii.ac.id

Abstrak

ASEAN sebagai organisasi regional di Asia Tenggara diharapkan dapat mengambil peran dalam mengawal komitmen negara anggotanya terhadap Kesepakatan Paris. Sementara itu, ASEAN dihadapkan pada kapabilitas negara anggota yang berbeda untuk mengimplementasikannya. Nilai-nilai ASEAN (*ASEAN Way*) seperti nonintervensi dan konsensus juga dapat menjadi hambatan maupun kekuatan yang dapat menunjang jalannya komitmen terhadap isu tersebut. Tulisan ini membahas peluang dan tantangan ASEAN dalam membangun tata kelola lingkungan regional. Menurut Acharya dan Johnston sebuah tata kelola lingkungan dapat secara efektif mencapai tujuannya jika tercipta situasi yang kondusif untuk melakukan kerja sama (*cooperative environment*), adanya pembangunan kapasitas nasional (*capacity building*), dan upaya membangun kesadaran publik (*national concern*) terhadap isu lingkungan. Peluang yang muncul antara lain anggota dan prosedur pengambilan keputusan konsensus, adanya pertemuan rutin yang dilaksanakan para aktor tingkat tinggi, dan mekanisme pengawasan, transfer dana, teknologi, dan pengetahuan, edukasi publik dan pembentukan norma. Sedangkan tantangan yang ada berupa *enforcement* dan norma konsensus. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tinjauan bagi pembangunan tata kelola lingkungan regional di ASEAN.

Kata-kata kunci: *Kesepakatan Paris, tata kelola lingkungan, cooperative environment, capacity building, building national concern*

Abstract

ASEAN as a regional organization in Southeast Asia is expected to take a role in guarding the commitment of its member countries to the Paris Agreement. Meanwhile, ASEAN is faced with the capabilities of different member countries to implement it. ASEAN Way values such as non-intervention and consensus can also be obstacles and strengths which can support the commitment to the issue. This paper discusses the opportunities and challenges of ASEAN in building regional environmental governance. According to Acharya and Johnston, environmental governance can effectively achieve its objectives if a cooperative environment is created, the existence of national capacity building, and efforts to build public awareness on environmental issues. Opportunities that arise include number of actors and decision-making procedures, regular meetings held by high-level actors and monitoring mechanisms, transfer of funds, technology, and knowledge, public education and norm formation. While the challenges are in the problem of enforcement and consensus norms. This research is expected to be a review of the development of regional environmental governance in ASEAN.

Key words: *Paris Agreement, environmental governance, cooperative environment, capacity building, building national concern*

Pengantar

Kesepakatan Paris yang dihelat pada tahun 2015 berhasil mendapatkan persetujuan dari 195 negara. Kesepakatan Paris memiliki bentuk komitmen yang berbeda dari pada Protokol Kyoto meskipun sama-sama memiliki tujuan untuk merespon, mereduksi dampak, dan memperlambat proses perubahan iklim. Protokol Kyoto yang memasang target berupa penurunan emisi bagi setiap negara setiap tahunnya dianggap tidak efektif dan merugikan pendapatan negara. Amerika Serikat yang hengkang pada tahun 2012 merupakan salah satu

contoh negara yang menanggalkan komitmennya. Meskipun demikian, Amerika Serikat memiliki mekanisme domestik yang dipegang oleh kalangan privat untuk membantu sektor industri mengurangi jumlah emisinya.

Lain halnya dengan Protokol Kyoto, Kesepakatan Paris tidak memasang target penurunan emisi tetapi menetapkan komitmen negara untuk menjaga kenaikan suhu bumi tidak lebih dari 2 derajat Celcius. Hal tersebut dinilai tidak bersifat mengikat dan menuntut sehingga banyak negara yang secara sukarela bergabung. Sementara itu, mekanisme di dalam Protokol Kyoto seperti Clean Development Mechanism (CDM) dianggap membebani negara Annex I karena harus memberikan dana dan transfer teknologi serta ilmu pengetahuan untuk negara Annex II.

Negara-negara di Asia Tenggara merupakan wilayah yang paling rentan terdampak perubahan iklim karena panjangnya garis pantai mencapai 173.000 km (sekitar 14% dari keseluruhan di dunia) dengan 590 juta penduduk (ASEAN, 2012). Perekonomian di daerah pesisir pantai bergantung pada sektor agrikultur, perikanan, kehutanan, dan sumber daya alam lainnya yang rentan terhadap perubahan lingkungan.

ASEAN sebagai salah satu bentuk tata kelola regional telah memiliki perhatian khusus terhadap isu lingkungan sejak tahun 1977 meskipun tidak langsung diimplementasikan menjadi kebijakan. Dengan peningkatan kesadaran negara-negara anggota ASEAN terhadap isu lingkungan, maka ASEAN mulai membentuk tata kelola lingkungan regional. Dimulai dari kesadaran, komitmen, institusionalisasi, hingga implementasi, ASEAN dihadapkan pada sebuah pertanyaan apakah tata kelola lingkungan yang dibangun dapat berfungsi secara efektif dalam memberikan kontribusi merespon perubahan iklim global. Tantangan yang muncul di antaranya adalah kecenderungan negara-negara di Asia, khususnya Asia Tenggara yang kebutuhan dan sumber energinya bervariasi sehingga sulit mencapai konsensus untuk menjalankan strategi mengatasi perubahan iklim dan lemah dalam hal institusionalisasi kebijakan dan implementasi (Putra & Han, 2014). Sedangkan peluang salah satunya dapat dilihat dari semakin banyaknya aktor yang dapat berperan dan berpartisipasi dalam mengatasi perubahan iklim hingga level paling rendah (*grassroot*). Tulisan ini berupaya mengulas tantangan dan peluang tata kelola lingkungan regional yang ada di dalam ASEAN yang diproyeksikan pada komitmen negara terhadap Kesepakatan Paris dengan terlebih dahulu meninjau efektivitas tata kelola tersebut.

Tinjauan Pustaka dan Metode

Sebuah desain institusi internasional dipengaruhi variabel-variabel yang menentukan latar belakang dari karakter sebuah organisasi regional dan bagaimana karakter tersebut memberi dampak terhadap kerja sama yang dilakukan (Acharya & Johnston, 2007). Pertama, model kerja sama yang dilakukan apakah dapat mereduksi *prisoner dilemma* atau tidak. Dengan distribusi informasi yang merata mengenai preferensi dan aksi dari setiap aktor akan membuat kerja sama lebih stabil. Transparansi dari anggota organisasi merupakan salah satu jalan yang efektif untuk mendistribusikan informasi secara merata kepada anggota yang lain. Sementara itu, diseminasi informasi dapat dilakukan oleh otoritas organisasi karena adanya sentralisasi kekuasaan sehingga mereduksi biaya negara untuk mengumpulkan informasi mengenai negara lain (Koremenos et al., 2018). Hal tersebut juga berkaitan dengan isu apa yang dibahas dalam organisasi regional. Negara dengan pemerintahan yang otoriter memiliki kecenderungan untuk tidak terbuka dan menghindari pembahasan mengenai isu kemanusiaan (HAM). *Enforcement* atau metode yang dapat memonitor perilaku dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran digunakan sebagai cara untuk mengantisipasi keberlangsungan kerja sama meskipun terjadi *prisoner dilemma* (Acharya & Johnston, 2007; Koremenos et al., 2018).

Kedua, jumlah aktor yang terlibat di dalam organisasi regional berpengaruh terhadap efektivitas pencapaian keputusan dan implementasi kebijakan. Semakin banyak jumlah anggota, maka akan semakin sulit untuk mencapai keputusan yang bulat. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Acharya dan Johnston menjadi salah satu faktor penyebab regionalisme menjadi preferensi negara-negara di dalam suatu wilayah yang sama untuk menyelesaikan masalahnya dari pada universalisme atau menyelesaikan melalui organisasi yang bersifat lebih universal, misalnya PBB. Sementara Koremenos et al. memandang keanggotaan dalam arti apakah sebuah organisasi memiliki batasan atau kriteria tertentu untuk sebuah negara dapat tergabung (Koremenos et al., 2018).

Ketiga, kesamaan ideologi dan identitas mendorong tercapainya tujuan regionalisme dengan lebih mudah. Keempat, distribusi kekuasaan, yaitu adanya aktor yang memiliki kekuatan dominan dapat membuat sebuah institusi internasional berjalan efektif. Di dalam terminologi Koremenos et al., distribusi kekuasaan juga bisa disebut sebagai bentuk kontrol dan sentralisasi. Jika distribusi kekuasaan cenderung mengarah pada model relasi kekuasaan secara horizontal, maka sentralisasi bersifat horizontal. Sebuah organisasi regional memiliki badan/struktur khusus yang memiliki wewenang atas anggotanya, misalkan melakukan monitoring serta mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi.

Kelima, politik domestik mempengaruhi negara di dalam sebuah organisasi apakah akan menjalankan komitmen yang disepakati atau tidak. Keenam, adanya *extra-regional institutions* dan aktor nonnegara yang dapat memengaruhi atau menginspirasi sebuah organisasi regional. Ketujuh, latar belakang sejarah yang sama menimbulkan kedekatan dan membentuk karakter yang menyatu dan pandangan yang cenderung sama terhadap sesuatu.

Tabel 1. Perbandingan desain institusi internasional oleh Acharya dan Johnston dengan Koremenos et al.

Koremenos et al.	Acharya & Johnston
Scope	Type of cooperation problem
Centralization	Systemic & subsystemic power distribution
Control	
Flexibility	Extra-regional institutions and non-state actors
Distribution problems	Type of cooperation problem
Enforcement problems	Domestic politics
Number of actors	N of actors
Uncertainty	Type of cooperation problem
	Ideology & identity
	History

Sementara itu, Speth dan Haas memberikan pandangan yang lebih spesifik mengenai regionalisme, yaitu berfokus pada tata kelola lingkungan. Sebuah rezim atau tata kelola lingkungan yang efektif didasari oleh pembentukan lingkungan yang kondusif untuk melakukan kerja sama, pembentukan kapasitas nasional, dan menciptakan perhatian dan atau kesadaran publik (*national concern*) (Speth & Haas, 2006). Lingkungan yang kondusif untuk melakukan kerjasama (*cooperative environment*) meliputi jumlah partisipan, prosedur dalam mengambil keputusan, frekuensi dalam melakukan negosiasi, *perceived fairness*, *high profile*, *formal enforcement*, *verifikasi*, *monitoring*, *horizontal linkages*, dan *vertical linkages*. Sama halnya dengan Acharya dan Johnston, Speth dan Haas berpendapat bahwa jumlah aktor yang terlibat di dalam sebuah organisasi dapat memengaruhi bagaimana jalannya negosiasi dan implementasi dari keputusan. Semakin kecil jumlah aktor yang terlibat maka akan semakin mudah dalam memetakan kebijakan yang signifikan dan menyelesaikan permasalahan. Semakin banyak anggota juga semakin sulit untuk mencapai model keputusan konsensus. Frekuensi yang lebih banyak dalam melakukan negosiasi atau kontinyu juga dianggap lebih

efektif dari pada negosiasi yang bersifat *one-shot sessions*. Semakin banyak interaksi yang terjadi maka setiap negara semakin mengerti posisi dan preferensi satu sama lain sehingga memiliki keinginan untuk mencapai konsesi.

Sebuah pertemuan yang dilakukan di tingkat elit atau tingkat tinggi penting dilakukan untuk merumuskan kebijakan yang tidak mampu dilaksanakan oleh otoritas yang lebih rendah. Ada tidaknya *enforcement* berupa sanksi untuk pelanggaran dan prosedur arbitrase juga merupakan faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi. Verifikasi berkaitan dengan pelaporan yang dilakukan anggota mengenai perkembangan dalam menjalankan regulasi atau transparansi. *Monitoring* menjadi pendorong bagi negara untuk patuh karena memberi informasi sejauh mana aksi yang dilakukan menimbulkan dampak. Sedangkan *horizontal linkages* berkaitan dengan kecenderungan negara anggota untuk menjaga hubungan baik dan *image* terhadap anggota lain karena memiliki hubungan lain di luar organisasi. Sementara itu, *vertical linkages* berkaitan dengan norma internasional yang dianut bersama.

Peningkatan kapasitas nasional dapat meningkatkan kepatuhan dan kemampuan implementasi sehingga efektivitas sebuah tata kelola lingkungan regional juga meningkat. Peningkatan kapasitas dapat dilakukan dengan melakukan transfer finansial, teknologi, dan pengetahuan. Menurut Speth dan Haas, transfer finansial sangat penting bagi negara berkembang atau negara miskin yang membutuhkan upaya ekstra untuk mengimplementasikan kebijakan yang membutuhkan dana besar. Transfer teknologi meliputi bantuan berupa peralatan dan teknologi untuk melakukan monitoring. Sedangkan transfer pengetahuan meliputi pelatihan program untuk staf pemerintah dalam manajemen lingkungan, *monitoring*, dan aktivitas yang memerlukan pelaporan sebagai bentuk transparansi dan perkembangan jalannya program. Pelatihan juga melibatkan LSM, kelompok epistemik, dan masyarakat sipil.

Meningkatkan perhatian publik terhadap isu lingkungan juga dapat meningkatkan efektivitas tata kelola lingkungan regional. Membangun kesadaran publik secara regional maupun internasional akan lebih efektif jika didahului dengan upaya domestik. Program yang dibuat pemerintah untuk meningkatkan perhatian dan kesadaran publik dapat berupa edukasi, penanaman norma baru, mobilisasi informasi dan jaringan, serta penyediaan informasi/data tentang lingkungan yang akurat melalui media massa, televisi, radio, kampanye, dan sebagainya.

Tabel 2. Indikator efektivitas tata kelola lingkungan (Speth & Haas, 2006).

Indikator	Dampak
-----------	--------

Lingkungan yang kooperatif	Jumlah aktor yang terlibat/berpartisipasi Prosedur pengambilan keputusan Frekuensi negosiasi/pertemuan Keadilan (<i>percieved fairness</i>) Verifikasi Pengawasan (<i>monitoring</i>) <i>Horizontal linkages</i> <i>Vertical linkages</i>	Meningkatkan kemungkinan mencapai komromi pada rezim lingkungan
Pembentukan kapasitas nasional (<i>capacity building</i>)	Transfer dana Transfer teknologi Transfer pengetahuan	Meningkatkan kemampuan untuk patuh terhadap kewajiban dan peraturan serta meningkatkan kemungkinan rezim yang dinegosiasikan lebih kuat karena negara memiliki keyakinan upaya/aksi yang dilakukan bersifat timbal-balik
Pembangunan/ pembentukan kesadaran nasional (<i>national concern</i>)	Pendidikan publik Pembentukan norma Mobilisasi jaringan ilmiah/akademisi Penyediaan data lingkungan yang akurat melalui <i>monitoring</i>	Meningkatkan kemauan (<i>willingness</i>) negara untuk berpartisipasi dalam negosiasi dan membuka kemungkinan untuk memberikan edukasi kepada elit politik dan staf pemerintahan mengenai

Simpulan yang diungkapkan Speth dan Haas berdasarkan indikator penentu efektivitas sebuah tata kelola lingkungan regional adalah sebagai berikut. Pertama, situasi yang kondusif untuk melakukan kerja sama akan meningkatkan kemungkinan untuk mencapai kompromi di dalam rezim lingkungan. Kedua, pembangunan kapasitas nasional (*capacity building*) akan mengembangkan kemampuan negara untuk menjalankan komitmennya dan meningkatkan kualitas negosiasi karena terjadi peningkatan kepercayaan negara terhadap anggota yang lain bahwa akan timbul aksi yang bersifat resiprokal atau timbal-balik. Ketiga, membangun kesadaran publik dapat meningkatkan kemauan negara-negara (demokratis) untuk berpartisipasi dalam proses negosiasi sehingga meningkatkan kemungkinan untuk mengedukasi elit dan staf pemerintahan mengenai kepentingan nasional yang baru.

Hasil

Tata Kelola Lingkungan di ASEAN

Menurut Koh dan Robinson, tata kelola lingkungan di dalam ASEAN setidaknya harus memuat beberapa hal berikut (Lian & Robinson, 2002). Pertama, kapasitas adaptasi dalam berbagai aspek. Kedua, formulasi kebijakan regional yang efektif dalam hal ini ASEAN memiliki prinsip untuk menghormati prosedur internal setiap negara yang dalam kerangka kerja sama difasilitasi oleh ASEAN. Ketiga, hubungan yang stabil antaranggota secara politik maupun interaksi sosial yang lain. Pendekatan nonintervensi dalam merespon masalah yang melibatkan negara anggota ASEAN menurut Koh dan Robinson menjadi salah satu alasan mengapa hubungan di antara negara anggota cenderung stabil. Keempat, landasan yang kuat untuk implementasi, yakni penggunaan konsensus dalam mengambil keputusan. Dengan adanya kesepakatan yang disetujui bersama, maka akan meminimalisir perselisihan.

Sementara itu, Elliot memetakan perkembangan tata kelola lingkungan di ASEAN ke dalam tiga fase (Elliott, 2011). Fase pertama dimulai tahun 1977 hingga pertengahan sampai akhir dekade 1980-an yang menitikberatkan pada isu lingkungan dan ketahanan nasional. ASEAN Subregional Environment Program (ASEP) diadopsi untuk menyelenggarakan ketersediaan sumber daya alam secara kontinyu untuk dapat mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kualitas kehidupan. Di sini ASEAN menekankan pada pentingnya menjaga komitmen terhadap prinsip nonintervensi dan menjaga kedaulatan nasional untuk mengelola

sumber daya dan kebijakan pembangunan dengan menganjurkan regulasi dan prosedur domestik untuk menyelenggarakan kerja sama regional (Elliott, 2012). *Procedural voluntarism* dipilih untuk menghindari komitmen yang mengikat atau disebut *ASEAN's informalism*. AMME declarations on environmental cooperation memuat kesepakatan berupa prinsip-prinsip dan panduan secara umum dalam menjaga ketersediaan sumber daya alam secara kontinyu (Elliott, 2012). Pendekatan ini kemudian mulai berubah pada tahun 1984 ketika enam anggota ASEAN sepakat untuk membentuk jaringan regional ASEAN national heritage parks and nature reserves yang mulai efektif di tahun berikutnya dan bersifat mengikat dalam Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources (Elliott, 2012). Di dalam Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources mulai terdapat peraturan yang memuat mengenai hal-hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan oleh negara anggota.

Fase kedua dimulai tahun 1980-an hingga 1990-an yang ditandai dengan munculnya perhatian dan kesadaran terhadap tantangan dan tanggung jawab yang bersifat lintas batas (transnasional), yaitu permasalahan lingkungan seperti polusi. Di dalam Jakarta Resolution on Sustainable Development tahun 1987 sudah dinyatakan bahwa untuk mencapai tujuan bersama dibutuhkan pembuatan sebuah badan regional yang berfokus ke isu lingkungan (Elliott, 2012). Dari sini ASEAN kemudian membuka diri untuk melakukan upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan dengan membuat resolusi dan kesepakatan yang menggagas tentang *eco-efficiency* dan *environmental stewardship* (ASEAN Ministerial Meeting, 1992; ASEAN Ministerial Meeting, 1997 dalam Elliott, 2011) meskipun belum terdapat badan khusus yang menjalankan fungsi tersebut. Di tahun 1995 muncul rekomendasi kebijakan untuk memberikan perhatian terhadap isu lingkungan yang diintegrasikan dengan perekonomian (Elliott, 2012). Pada tahun 1997 ASEAN dirilis State of the Environment Report yang menandakan agenda ASEAN terhadap isu lingkungan terus meluas.

Fase ketiga ditandai dengan adanya transisi yang dialami ASEAN menuju model yang lebih formal dalam *community-building* mulai tahun 2000-an. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai pernyataan resmi Sekretariat ASEAN untuk melakukan mekanisme pembangunan berkelanjutan (ASEAN Secretariat, 2002 dalam Elliott, 2011) seperti ASEAN Vision 2020, Bali Concord II 2003, ASEAN Charter November 2007, dan cetak biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2009-2015 (Elliott, 2012). Menurut Elliot, di dalam fase ini ASEAN mulai membuat jaringan transgovernmental, jaringan pengetahuan, forum konsultasi dan koordinasi, dan jaringan kepatuhan. Fase ketiga melibatkan lebih banyak aktor dalam rangka penyusunan dan

implementasi kebijakan. Namun, Elliot memandang bahwa ASEAN mengalami kegagalan dalam membentuk jaringan yang efektif untuk melakukan komunikasi di antara stakeholder sehingga membutuhkan improvisasi struktur institusionalnya. Aktor-aktor nonnegara seperti masyarakat sipil, LSM, dan sektor privat seharusnya lebih banyak dilibatkan dalam mendukung dan mengimplementasikan komitmen negara di tingkat domestik maupun lokal.

Fase ketiga yang memiliki karakter berupa institusionalisasi terhadap tujuan dan sasaran pelestarian lingkungan dari pada *normative development*, menjadi pijakan peneliti dalam melakukan riset. Di dalam fase ini peneliti akan melihat bagaimana proses institusionalisasi dilakukan dan berpengaruh terhadap efektivitas tata kelola lingkungan di ASEAN. Setelah melakukan analisis berdasarkan indikator-indikator yang diungkapkan Speth dan Haas, penulis akan melihat indikator apa saja yang masih jauh dari ekspektasi sehingga menjadi tantangan bagi tata kelola lingkungan di ASEAN untuk berkomitmen terhadap Kesepakatan Paris. Sedangkan peluang akan dilihat dari indikator yang berhasil dicapai negara anggota ASEAN dan ASEAN dalam konteks tata kelola lingkungan regional.

Terbentuknya sebuah tata kelola lingkungan diawali dari kesadaran anggota terhadap isu tersebut. Kapabilitas menjadi salah satu faktor penentu bagaimana negara akan merespon isu lingkungan. Baik Koh dan Robinson maupun Eliot sependapat bahwa sebuah tata kelola lingkungan selain membutuhkan kerangka politik berupa institusionalisasi secara legal formal, juga membutuhkan komitmen negara untuk membuat kebijakan di tingkat domestik. Dengan demikian penelitian ini tidak hanya melihat perkembangan tata kelola lingkungan di tingkat regional tetapi juga bagaimana negara-negara anggota memberikan respon dan timbal balik terhadap sesama anggota dan ASEAN sebagai wadah yang menaunginya.

Cooperative Environment

Upaya ASEAN dalam merespon perubahan iklim global termuat di dalam deklarasi tingkat kepala negara pada tahun 2007, 2009, 2010, 2011 dan 2014 melalui mekanisme regional maupun nasional (ASEAN, 2018b). Dalam pernyataan tahun 2014, negara anggota ASEAN bersepakat untuk mengadopsi dan melaksanakan program per akhir 2015, mengambil tindakan terhadap untuk meneruskan komitmen dari Amandemen Doha ke putaran kedua Protokol Kyoto, dan akan berpartisipasi secara kooperatif pada COP 21 pada Desember 2015 di Paris. Respon terhadap perubahan iklim dalam tata kelola lingkungan di dalam ASEAN dilakukan dengan berfokus pada implementasi yang relevan di cetak biru ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) 2009-2015.

Situasi yang kondusif untuk melakukan kerja sama dalam bidang lingkungan di ASEAN didahului melalui kerangka formal berupa pembangunan tata kelola sejak tahun 2000-an. Salah satu di antaranya adalah ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) yang disepakati pada tanggal 10 Juni 2002 di Kuala Lumpur. Kesepakatan ini bertujuan untuk mencegah, mengawasi, dan memitigasi lahan dan hutan dalam rangka mengontrol polusi berupa asap pembakaran lintas batas per 2003. Situasi yang kondusif untuk membangun tata kelola lingkungan regional dilihat dari indikator-indikator berupa jumlah anggota, prosedur pengambilan keputusan, frekuensi pertemuan, aktor, pengawasan, keadilan, *formal enforcement*, verifikasi, dan *horizontal and vertical linkage*.

Jumlah Anggota dan Prosedur Pengambilan Keputusan

Prosedur pengambilan keputusan di dalam ASEAN adalah konsensus yang sering kali dianggap kurang efektif dalam mencapai kesepakatan. Dalam hal ini, semakin banyak jumlah aktor yang terlibat di dalam proses negosiasi, maka akan semakin sulit untuk mencapai konsensus. Di dalam ASEAN, pertemuan-pertemuan atau negosiasi tata kelola lingkungan diinisiasi oleh jajaran elit politik setingkat menteri atau kepala negara. Kelompok-kelompok lain seperti LSM dan korporasi dilibatkan tetapi pada pertemuan yang lebih tidak formal seperti di dalam konferensi dan implementasi. Dengan demikian, divergensi kepentingan juga semakin minimal.

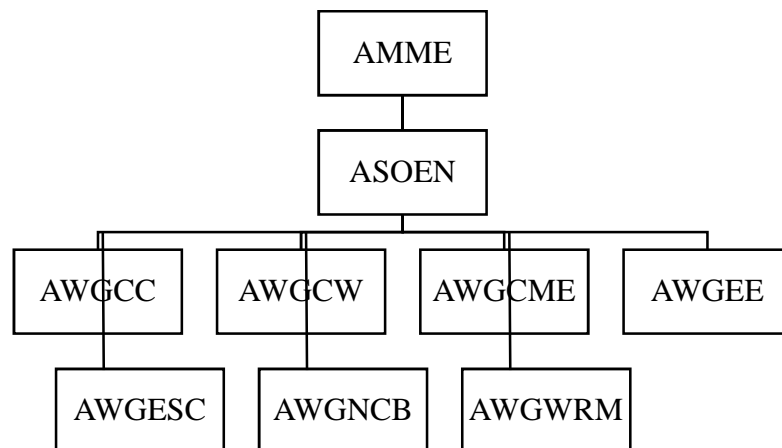
Dalam hal tata kelola lingkungan, prinsip konsensus di dalam ASEAN memiliki karakter yang unik, yakni bersifat tidak mengikat atau komitmen yang disepakati di tingkat regional akan diterapkan sesuai dengan kemampuan masing-masing negara. Oleh karena itu, keanggotaan ASEAN yang berjumlah 10 negara dengan kondisi domestik yang berbeda-beda bukan merupakan hambatan untuk berkomitmen pada tata kelola lingkungan. Justru dengan memberikan wewenang dalam implementasi domestik, ASEAN memiliki peran dalam memberikan dukungan peningkatan kapabilitas negara dalam melakukan adaptasi dan mitigasi.

Frekuensi Pertemuan, Aktor, dan Pengawasan

Tata kelola lingkungan di dalam ASEAN berada dalam panduan cetak biru Komunitas Sosial-Budaya ASEAN atau ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) 2025 yang sebelumnya berada dalam panduan ASCC 2015 (ASEAN, 2018a). Berdasarkan panduan tersebut perencanaan strategis yang menjadi prioritas antara lain konservasi alam dan biodiversitas, pesisir dan kelautan, manajemen sumber air, kota ramah lingkungan, perubahan iklim, bahan kimia dan limbah, serta edukasi lingkungan dan konsumsi dan produksi berkelanjutan.

Secara institusional kerangka kerjasama lingkungan ASEAN terdiri atas ASEAN Ministerial Meeting on the Environment (AMME), ASEAN Senior Officials on the Environment (ASOEN), dan 7 badan/kelompok kerja seperti ASEAN Working Group on Climate Change (AWGCC), ASEAN Working Group on Chemicals and Waste (AWGCW), ASEAN Working Group on Coastal and Marine Environment (AWGCME), ASEAN Working Group on Environmental Education (AWGEE), ASEAN Working Group on Environmentally Sustainable Cities (AWGESC), ASEAN Working Group on Natural Resources and Biodiversity (AWGNCB), dan ASEAN Working Group on Water Resources Management (AWGWRM). AMME memiliki pertemuan rutin yang digelar setiap dua tahun sekali, sementara ASOEN dan badan di bawahnya bertemu sekali dalam setahun. Pertemuan ASOEN ditujukan untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap implementasi ASOEN dan cetak biru ASCC 2025.

Tabel 3. Struktur ASEAN Ministerial Meeting on the Environment (ASEAN, 2018a).



Pertemuan rutin yang dilakukan di bawah koordinasi AMME dapat meningkatkan pertukaran informasi dan bertambahnya pengetahuan negara akan perspektif anggota yang lain. Di dalam pertemuan-pertemuan tersebut, selain memberikan laporan-laporan mengenai situasi domestik, juga melaporkan bagaimana implementasi tata kelola lingkungan di masing-masing

negara sehingga dapat dilakukan evaluasi. Pertemuan-pertemuan tersebut berlangsung secara kontinyu sehingga hubungan keterikatan (*engagement*) antaranggota dan pengetahuan akan masing-masing posisi negara semakin bertambah. Semakin banyaknya interaksi antaranggota ASEAN, maka negara-negara semakin bersifat kompromi untuk mencari titik temu dari usaha-usaha mengelola lingkungan bersama-sama.

Pertemuan setingkat menteri ASSM bersifat formal dan mandatnya terlegitimasi secara nasional sehingga mengikat bagi seluruh entitas di dalamnya. Hal tersebut akan berbeda jika pertemuan dilaksanakan oleh aktor nonnegara. Aktor nonnegara tidak memiliki wewenang untuk memberikan perintah terhadap komitmen yang disepakati di tingkat domestik karena tidak memiliki otoritas. Meskipun negara bersifat rigid dan prosedural, hal tersebut justru menguatkan secara struktural untuk proses implementasi di tingkat domestik hingga lokal.

Keadilan (Perceived Fairness) dan Formal Enforcement

Perjanjian maupun kesepakatan yang bagus mengandung ketentuan yang bersifat eksplisit yang mendorong kerja sama dan kepatuhan dari anggota (Speth & Haas, 2006). Ketentuan tersebut memuat *formal enforcement*, *verification measures*, dan pengawasan. *Formal enforcement* dapat berupa sanksi ekonomi atau prosedur penyelesaian sengketa. Sanksi diberikan kepada pelanggar dengan tujuan memberikan rasa keadilan bagi setiap anggota atas dampak negatif yang dilakukan pelanggar. Dalam hal ini, tata kelola lingkungan di ASEAN masih lemah. AATHP misalnya, tidak memiliki mekanisme pemberian sanksi bagi anggota yang melanggar komitmen. Indonesia termasuk salah satu negara yang sering kali mendapatkan protes dan kecaman karena kabut asap yang timbul dari pembakaran hutan tetapi tidak pernah mendapatkan sanksi secara legal formal dari ASEAN.

Verifikasi berkaitan dengan *monitoring*, yaitu memastikan bahwa negara menjalankan komitmennya. Verifikasi berbeda dengan pelaporan individu karena memiliki mekanisme tersendiri di dalam struktur untuk melakukan pemeriksaan terhadap para anggota untuk menghindari kecurangan. Sedangkan *monitoring* dilakukan dalam rangka melakukan pengukuran terhadap dampak dari implementasi komitmen di tingkat nasional.

Capacity Building: Transfer Dana, Teknologi, dan Pengetahuan

USD 15 juta dana dihabiskan untuk proyek regional bernama Rehabilitation and Sustainable Use of Peatland Forests in Southeast Asia (2009-2013) untuk pencegahan munculnya titik api (ASEAN, 2018b). Sementara itu, bantuan finansial dari pemerintah Jerman

sebesar 2,5 juta Euro diberikan untuk mengimplementasikan strategi dan instrumen menjaga biodiversitas dan perubahan iklim selama tahun 2010-2015.

Transfer pengetahuan dilakukan diantaranya dengan melakukan pelatihan dan workshop. Pada tanggal 18-19 Januari 2010 digelar workshop dengan tajuk *Workshop and Exchange on Climate Resilient Cities: Identifying Best Practices* di Jakarta. Di dalam pelatihan ini representatif masing-masing kota di Asia Tenggara dan pemerintah di tingkat nasional bertukar pengalaman dan pengetahuan dalam merespon perubahan iklim saat ini hingga proyeksi di masa depan. *Workshops on Risks and Impacts from Extreme Events of (i) Floods and (ii) Droughts in ASEAN Countries* diselenggarakan pada tanggal 9-10 Juni 2010 di Indonesia dan 22-23 September 2010 di Taiwan. Workshop ini bertujuan untuk mengukur kapasitas negara dalam manajemen bencana banjir dan kekeringan, meninjau ulang kesiapan individu dan kolektif dalam hal risiko mitigasi dan rencana adaptasi, dan pertukaran pengalaman mengenai manajemen bencana banjir dan kekeringan (ASEAN, 2018b).

Building National Concern: Pendidikan Publik dan Pembentukan Norma

Edukasi secara formal diterapkan di masing-masing wilayah domestik dalam berbagai cara, misalnya melalui kurikulum pendidikan. Di Indonesia, pemerintah menerapkan konsep Sekolah Adiwiyata yang bertujuan untuk membangun program atau wadah dalam mendapatkan ilmu pengetahuan dan mengembangkan norma-norma menuju kesejahteraan melalui pembangunan berkelanjutan (Kemdikbud, 2016). Program Adiwiyata dikoordinasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai salah satu agenda Sustainable Development Goals (SDGs).

Edukasi kepada khalayak umum selain dilakukan melalui sarana formal juga dilakukan secara informal seperti forum-forum pelatihan. *ASEAN Plus Three Youth Environment Forum: Creating a Climate for Change* digelar pada tanggal 22-25 April 2010 di Brunei Darussalam sebagai bagian dari implementasi ASEAN Environmental Education Plan (AEEAP) 2008-2012 (ASEAN, 2018b). Forum ini melibatkan resolusi bagi para pemuda ASEAN untuk mengambil bagian dalam melestarikan lingkungan. Masih dalam kerangka implementasi AEEAP, pertemuan rutin ASEAN Plus Three Leadership Programme on Sustainable Production and Consumption dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan, keahlian, dan alat untuk mengembangkan strategi pembangunan berkelanjutan kepada kalangan bisnis dan pemilik industri.

Beberapa pelatihan lain yang diselenggarakan dalam rangka mengedukasi masyarakat antara lain ASEAN Environmentally Sustainable Development Film Festival: Change the Climate Change (2011), ASEAN-India Expert Meeting on Regional Programme of Climate Change (2012), The Yogyakarta City Greenhouse Gases (GHG) Emissions and HEAT+ – Launch and Training: In collaboration with International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI) – Local Governments for Sustainability, the ASEAN-US technical Assistance and Training Facility (ASEAN-US TATF) (2012), ASEAN Action Plan on Joint Response to Climate Change (2012), dan Climate Leadership Academy (CLA) on Urban Climate Adaptation for Cities in Southeast Asia (2013). Berbagai macam rangkaian kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya untuk membentuk norma-norma mengenai pelestarian lingkungan yang seragam di tingkat regional.

Mobilisasi jaringan ilmiah/akademisi terjadi ketika terjadi pertukaran informasi dan terbangun koneksi di antara kalangan akademisi melalui forum-forum diskusi ilmiah maupun komunikasi diskursus melalui tulisan. Penyediaan data lingkungan yang akurat melalui *monitoring* selain dilakukan pemerintah juga dilakukan oleh lembaga independen dan juga LSM.

Diskusi

Berdasar uraian tentang indikator efektivitas tata kelola lingkungan regional di dalam ASEAN di atas dapat dipetakan peluang dan tantangan yang dihadapi ASEAN dalam partisipasi merespon perubahan iklim global. Modal dasar atau peluang bagi ASEAN untuk berkomitmen pada Kesepakatan Paris dapat dilihat dari pencapaian lingkungan yang kondusif berupa jumlah anggota dan prosedur pengambilan keputusan konsensus yang bersifat unik, adanya pertemuan rutin yang dilaksanakan para aktor tingkat tinggi, dan mekanisme pengawasan. Sementara itu dari segi *capacity building*, transfer dana, teknologi, dan pengetahuan dilakukan tidak hanya dengan sesama negara anggota ASEAN tetapi juga dengan negara sahabat lain seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Tiongkok. Pembentukan *public concern* dilakukan dengan menyelenggarakan pendidikan secara formal dan informal untuk membangun kesadaran di tingkat masyarakat sipil dan pembuatan norma-norma mengenai kelestarian lingkungan. Keberhasilan dalam indikator-indikator tersebut menjadi indikator daya dukung tata kelola lingkungan regional di Asia Tenggara untuk berkomitmen dan menjalankan komitmen dalam Kesepakatan Paris.

Namun di sisi lain, ASEAN masih lemah dalam hal *enforcement*, yakni kerangka hukum penyelesaian sengketa dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran komitmen. ASEAN lebih mengutamakan mekanisme domestik dan penyelesaian secara bilateral atau multilateral ketika menghadapi permasalahan lingkungan seperti halnya dalam isu lain. Kelemahan ini kemudian menjadi bagian dari tantangan tata kelola lingkungan di dalam ASEAN untuk berkomitmen dalam Kesepakatan Paris. Jika dihubungkan dengan bentuk komitmen Kesepakatan Paris yang juga bersifat lebih lentur atau *non-legally binding*, Kesepakatan Paris juga memiliki permasalahan dalam hal *enforcement*. Hal tersebut kemudian dapat menjadi sebuah evaluasi bagi perkembangan tata kelola lingkungan di ASEAN.

Prosedur pengambilan keputusan secara konsensus atau ASEAN Way dapat menjadi peluang yang bagus sekaligus tantangan. Peluang yang hadir adalah bahwa implementasi komitmen yang dihasilkan dalam rangka merespon perubahan iklim global di tingkat regional disesuaikan dengan kapasitas nasional. Negara-negara diberi kesempatan untuk melakukan adaptasi dan mendapatkan bantuan berupa dana, teknologi, dan ilmu pengetahuan dari sesama anggota maupun negara lain di luar ASEAN. Namun, di sisi lain, mode konsensus yang tidak disertai *enforcement* dapat menghambat efektivitas tata kelola lingkungan di ASEAN.

Daftar Pustaka

Acharya, A., & Johnston, A. I. (2007). Comparing regional institutions: an introduction. In A. Acharya & A. I. Johnston (Eds.), *Crafting Cooperation: Regional International Institutions in Comparative Perspective*. New York: Cambridge University Press.

ASEAN. ASEAN Action Plan on Joint Response to Climate Change (2012). Thailand. Retrieved from <http://environment.asean.org/wp-content/uploads/2015/06/ANNEX-8-Lead-Countries-for-ASEAN-Action-Plan-on-Joint-Response-to-Climate-Change-27-March-2013.pdf>

ASEAN. (2018a). About ASEAN Cooperation on Environment. Retrieved December 1, 2018, from <https://environment.asean.org/about-asean-cooperation-on-environment/>

ASEAN. (2018b). ASEAN Cooperation on Climate Change. Retrieved December 1, 2018, from <https://environment.asean.org/asean-working-group-on-climate-change/>

Elliott, L. (2011). ASEAN and environmental governance: rethinking networked regionalism in Southeast Asia. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 14, 61–64. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.03.23>

Elliott, L. (2012). ASEAN and Environmental Governance: Strategies of Regionalism

in Southeast Asia. *Global Environmental Politics*, 12(3), 38–57.

Kemdikbud. (2016). Mendikbud: Sukseskan Program Adiwiyata Melalui Pendidikan Karakter. Retrieved December 1, 2018, from <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/12/mendikbud-sukseskan-program-adiwiyata-melalui-pendidikan-karakter>

Koremenos, B., Lipson, C., Snidal, D., Koremenos, B., Lipson, C., & Snidal, D. (2018). The Rational Design of International Institutions Published by : The MIT Press The Rational Design of International, 55(4), 761–799. <https://doi.org/10.1162/002081801317193592>

Lian, K. K., & Robinson, N. A. (2002). Regional Environmental Governance: Examining the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Model. In D. C. Esty & M. H. Ivanova (Eds.), *Global Environmental Governance: Options & Opportunities* (pp. 101–120). California: Yale Reprographics and Imaging Services.

Putra, N. A., & Han, E. (2014). Introduction: Governments' Response to Climate Change: Issues, Challenges and Opportunities. In N. A. Putra & E. Han (Eds.), *Governments' Responses to Climate Change: Selected Examples From Asia Pacific*. Singapore: Springer.

Speth, J. G., & Haas, P. M. (2006). *Global environmental governance reconsidered*. Washington DC: Island Press.

Islam dalam Dinamika Politik Singapura

Sugeng Riyanto

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
riyanto_sugeng@yahoo.com

Abstrack

The Malay Moslem community is actually a minority group in Singapore which is they consist 14.3% of whole citizen. The previous studies on minority in Souteast Asia such as Thailand, Philipine and Myanmar showed that mostly the Moslem minority was threated as marginal community. The Malay Moslem in Singapore is an exception, when there are some policies released by Government under Lee Kuan Yew administration those are very accommodative toward Islam, such as recognition of Bahasa Melayu as a national language and Malay (which is identical as Moslem) as indigenus people of Singapore. In the other side, government also launched Administration of Muslim Law Act (AMLA) that guarantees Moslem to hold Islamic Law. One of the implementation of this act was the establishment of Majelis Ugama Islam Singapore (MUIS) for facilitating Moslem to organize zakat, haji (pilgrim), build mosque and manage madrasah (Islamic school). This paper is going to show the role and position of Malay Moslem in Singaporean politics, as well as economic and social roles.

Keywords: *Minority, Moslem Identity, Nation Building*

Latar Belakang

Diskursus tentang Islam dalam hubungan internasional dewasa ini lebih sering menempatkan Islam dalam stigma yang negatif, semisal ketika Islam diasosiasikan dengan gerakan radikal, terorisme, anti modernisasi dan lain sebagainya. Seperti halnya yang terjadi di Asia Tenggara Islam begitu melekat dengan persoalan konfliktual seperti Islam di Thailand Selatan, Islam di Mindanao atau bahkan di Indonesia yang beberapa di antaranya di duga dekat dengan gerakan radikal.

Jika kita melihat pada kasus di negara negara Asia Tenggara yang lain, Islam menjadi salah satu faktor dalam dinamika politik. Terdapat beberapa persoalan dengan Islam misalnya di Indonesia, Thailand, Filipina maupun Myanmar. Kasus yang paling hangat adalah minoritas Rohingya di Myanmar. Rohingya adalah sebuah suku minoritas yang identik dengan Islam di Myanmar (Singh, 2013). Mereka berasal dari Bangladesh dan telah lama bermukim di Myanmar. Oleh Junta militer Rohingnya, keberadaan mereka tidak diakui sebagai bagian dari Myanmar sehingga terjadi pengusiran dan pembunuhan.

Selain di Myanmar, dinamika Islam dalam dalam politik juga terjadi di Thailand dengan masalah utama yakni disharmoni hubungan antara pemerintah dengan masyarakat di Thailand Selatan. Salah satu puncak dari konflik tersebut misalnya adalah konflik bersenjata antara tentara pemerintah melawan pemberontak Pattani yang menewaskan 3.500 orang. (Mullins, 2009)

Di Filipina, Islam menjadi isu politik yang panjang dan seolah tiada akhir. Bangsa Moro yang berada di Mindanao (bagian Selatan dari Filipina) merasa menjadi bangsa yang berbeda secara etnis dengan bangsa pada umumnya di Filipina Tengah dan Utara. Upaya pemisahan diri Bangsa Moro menjadi problem integrasi negara itu. Berbagai upaya damai maupun militer telah dilakukan, meskipun tanda-tanda akhir dari konflik itu masih belum terlihat jelas.

Salah satu komunitas Muslim di Asia Tenggara yang signifikan berada di Singapura. Singapura adalah Negara kota, yang didominasi oleh Etnis Cina. Islam di Singapura identik dengan Etnis Melayu, karena 99,6% Melayu beragama Islam (Eng: 2008). Islam/Melayu merupakan kelompok minoritas di sebuah negara yang sekuler dan multikultural. Kelompok mayoritas adalah Etnis Cina dengan 74,1%, Melayu 13,4%, India 9,2%, sementara etnis lain 3,3% (Helmiati, 2013). Apabila dilihat dari komposisi agama, maka Budha adalah yang terbesar disusul Kristen, Hindu, dan Islam.

Namun, berbeda dengan posisi minoritas Singapura dalam berhadapan dengan negara. Kelompok Islam Melayu memang menjadi kelompok marjinal, (Zooehri: 1987), namun dalam berhadapan dengan negara tidak dalam posisi konfrontatif melainkan pada posisi sub ordinasi negara. Pada sisi yang lain, Islam Di Singapura justru mendapatkan berbagai privilege atau hak hak istimewa. Lebih dari itu, Muslim Melayu justru mendapatkan semacam jaminan dari pemerintah Singapura. Terdapat berbagai kebijakan pemerintah Singapura yang akomodatif terhadap kepentingan kelompok Islam. Misalnya saja adalah penggunaan atribut identitas Melayu (Islam) menjadi simbol dari Singapura seperti Konstitusi, bahasa nasional maupun lagu kebangsaan. Pasal 152 Konstitusi Singapura menegaskan posisi minoritas dan Bahasa Melayu sebagai bahasa nasional sekaligus menegaskan kewajiban negara untuk memberikan jaminan perlindungan atas kelestariannya. Selain itu, terdapat beberapa kebijakan yang sangat ramah terhadap posisi Islam. Pada tahun 1966, pemerintah mengeluarkan undang-undang Administration of Muslim Law Act (AMLA), yang mengatur tentang pemberlakuan hukum Islam bagi pemeluknya. Salah satu realisasi dari kebijakan tersebut adalah didirikannya lembaga Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS), yang memberikan fasilitas kepada Muslim tentang pelaksanaan zakat, haji, peribadatam dan wakaf.

Pendirian MUIS ini juga merupakan sarana menjamin eksistensi Islam di Singapura dengan kewajiban negara untuk mendirikan Masjid dan segenap fasilitasnya, serta memperbolehkan sekolah sekolah Islam sebagai berkembang di Singapura. Sebagai catatan, di Singapura masih terdapat beberapa Madrasah seperti Madrasah Wak Tanjung, Al Irsyad, Al

Junied, Al Iqbal dan Al Ma'arif yang menggunakan metode dan konten pengajaran Islam seperti pembelajaran tentang Al Qur'an dan AL Hadits.

Dalam ranah sosial, pemerintah Singapura juga masih memperbolehkan berkembangnya organisasi sosial keagamaan seperti MENDAKI, PERGAS, PERTAPIS, Muhammadiyah, yang mampu menghimpun kekuatan sosial dan mampu menyuarakan kepentingan kelompok mereka, misalnya dalam isu istruktur seperti homoseksualitas, ataupun isu tudung (Eng: 2008) Paper ini berusaha untuk mengungkap bagaimana hubungan minoritas vis a vis negara serta alasan pemberian perlakuan akomodatif terhadap Muslim Melayu di Singapura.

A. Identitas Muslim Singapura

Masuknya Islam di Singapura tidak diketahui secara pasti, namun berdasarkan catatan sejarah pada abad ke-8 M telah terdapat para pedagang Muslim yang sering singgah di pulau-pulau yang berpenduduk di sepanjang semenanjung Tanah Melayu, termasuk *Termasek*. Beberapa dari mereka menetap selama waktu tertentu dan beberapa lainnya menetap dengan mengadakan hubungan perkawinan dengan penduduk setempat. Selain berdagang, mereka juga menjadi Imam dan guru agama di tempat tinggal mereka. Hal tersebut kemudian membentuk masyarakat Muslim dan pelestarian dakwah Islam di sepanjang Semenanjung Malaka, Sumatera, dan Jawa. Pendapat lainnya mengatakan bahwa Islam datang ke Nusantara sekitar abad ke-13 yang ditandai dengan adanya lembaga politik yang merepresentasikan kekuasaan politik Islam yaitu kerajaan Islam-Pasai.

Kedatangan Islam di Singapura diyakini beriringan dengan kedatangan Islam di Melayu. Terdapat berbagai teori terkait kedatangan Islam di Melayu. Teori pertama adalah Teori Gujarat. Teori ini diusung oleh para peneliti Belanda yakni Pijnappel, Snouck Hurgronje dan Moquette. Menurut mereka, Islam datang ke Nusantara, termasuk Melayu, di antaranya dibawa oleh para pedagang dari Gujarat India. Argumen dari teori ini adalah adanya persamaan Mazhab dan Batu Nisan. Pada umumnya, dua komunitas Muslim (Gujarat dan Nusantara) menganut Mazhab Syafi'iyah. Teori ini dikuatkan oleh adanya persamaan batu nisan yang ditemukan di kedua area tersebut. Misalnya yaitu bentuk-bentuk nisan di Pasai, semenanjung Malaya, maupun di Gresik. (Sudrajat: 2015)

Teori kedua adalah teori Bengal. Teori ini menolak teori Gujarat. Dengan berdasarkan pada peninggalan batu nisan, diyakini bahwa batu nisan di Nusantara berbeda dengan batu nisan di Gujarat, namun yang lebih mirip adalah batu nisan di Bengal. Teori yang dikembangkan oleh

Fatimmi ini berasumsi bahwa, model dan bentuk nisan Malik al-Shalih, raja Pasai, berbeda sepenuhnya dengan batu nisan yang terdapat di Gujarat. Bentuk dan model batu nisan tersebut justru mirip dengan batu nisan yang ada di Bengal. Teori ketiga adalah teori Coromandel dan Malabar. Marrison berpendapat bahwa Islam yang berkembang di Nusantara berasal dari Coromandel dan Malabar. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa mazhab yang dianut di Coromandel dan Malabar sama dengan di Nusantara. Namun yang menjadi catatan Marrison adalah bahwa pada masa itu, Gujarat masih merupakan kerajaan Hindu sehingga mustahil Islam datang dari Gujarat. (Sudrajat: 2015)

Teori keempat adalah teori Arabia yang dikemukakan oleh Thomas W. Arnold. Menurutnya, Coromandel dan Malabar bukan satu-satunya tempat asal Islam dibawa. Menurut Arnold, pada abad 7 dan 8 Hijriyah atau masa awal keemasan Islam (sekitar abad ke 12–13 Masehi), para pedagang Arab juga menyebarkan Islam ketika mereka dominan dalam perdagangan Barat-Timur. Argumennya adalah ditemukannya bukti bahwa pada masa tersebut terdapat seorang Arab yang menjadi pemimpin dalam pemukiman Arab Muslim di Pesisir Barat Sumatra.

Teori kelima, merupakan kelanjutan dari teori keempat, yakni teori Persia. Masih menurut Arnold, terdapat persamaan mazhab antara Persia dan Sumatra, yakni Mazhab Syi'ah. Hal ini dikuatkan oleh para sejarawan Iran bahwa penyebaran Islam dilakukan oleh orang-orang Persia (Syi'ah) yang menumpang pada kapal-kapal dagang Gujarat. Beberapa bukti lainnya yaitu terdapat tradisi peringatan terbunuhnya Husen di Karbala. Di Bengkulu, terdapat juga kampung Karbala dengan tradisi Syi'ah yang sangat kuat. Arnold menambahkan bahwa salah satu ulama yang datang ke tempat tersebut berasal dari Isfahan, Iran. Terakhir, adalah teori Mesir, yang mendasarkan pada persamaan Mazhab antara Mesir dengan Nusantara, yaitu Mazhab Syafi'iyah. Niemann dan de Hollander menguatkan teori tersebut dengan penekanan bahwa Islam bukan datang dari Mesir tetapi dari Hadramaut. (Sudrajat: 2015)

Pada sisi lainnya, telah menjadi pengetahuan umum bahwa penduduk asli Singapura adalah etnis Melayu. Menurut Aljunied, kaum Melayu adalah:

- a. *Malays who have lived in the Colony for several generations or have moved there from the Peninsula, and,*
- b. *Immigrants from Indonesia (mainly Java and Bawean) who settled in the Island for one, two or three generations* (Aljunied: 2006, 372)

Namun ada juga yang menengarai bahwa sebenarnya penduduk asli Singapura adalah Orang Laut. Keberadaan mereka yang sedikit kini mulai terpinggirkan. Namun mereka semakin terpinggirkan.

The Malays of course were the original inhabitants of Singapore Island (excepting a small number of orang laut), although their numbers were very small in the early days. For some time after the founding of the colony the Malays predominated numerically, but they rapidly lost this position as the influx of Chinese settlers began and accelerated (Clammer, 1981: 20).

Orang Laut adalah mereka yang tinggal di Singapura namun menghabiskan waktu lebih banyak di Laut terkait dengan pekerjaannya sebagai perompak atau pengawas tidak resmi dari lalu lintas laut di sekitar Singapura dan Selat Malaka. Sebagai pengontrol lalu lintas laut maka mereka dapat melakukan pungutan pajak terhadap kapal-kapal yang melintas.

Etnis Melayu juga tidak monolit, melainkan juga terdiri dari berbagai suku, baik yang berasal dari Malaysia maupun Indonesia. *The "Malay" category contains its own numerous minorities — including Orang Laut and Orang Seletar (originally boat- or shore-dwelling semi nomads), groups of Indonesian origin such as the Minangkabau, Batak, Javanese, Bugis, Boyanese, Peninsular Malays, peoples of Borneo origin and others when classified by ethnicity* (Clammer, 1981). Awalnya mereka adalah penghuni utama di Singapura sebelum kedatangan bangsa lain.

Imigrasi besar-besaran terjadi pada masa kolonialisme sebagaimana pemerintah Inggris membutuhkan banyak sekali tenaga kerja. Pada awal era kekuasaan Sir Stamford Raffles jumlah etnis Melayu masih sekitar 50%, disusul oleh etnis Cina, India dan Arab. Tahun 1830, beberapa tahun setelah pendirian Singapura 1819, Etnis Cina telah menjadi yang terbesar mencapai 53%. Haikal dan Yahaya menggambarkan situasi imigran yang tak terkontrol pada masa itu hingga melampaui batas kuota yang ditentukan. Dan ketika kaum imigran tersebut bukanlah etnis Melayu, dengan sendirinya memperkecil prosentase Melayu di Singapura (Haikal, 1996: 437).

Etnis Melayu merupakan populasi terbesar di Asia Tenggara. Mereka tersebar di Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina dan di Singapura meskipun secara jumlah hanya pada kisaran 15%. Etnis Melayu di manapun pada umumnya menganut agama Islam, dan sebagian kecil menganut agama Kristen Katolik, Kristen Protestan dll. Meskipun terdapat 3 etnis utama di Singapura, Cina, India dan Melayu, tetapi terdapat banyak agama di sana. Antara lain, Budha,

Konghucu, Kristen, Hindu, Sikh dan Islam. Etnis Cina umumnya beragama Budha, Kong Hucu dan Kristen, Sementara India beragama Hindu dan Sikh.

Sama seperti di daerah yang lain, etnis Melayu yang berada di Singapura mayoritas adalah Muslim. Sedikit sekali orang Melayu di Singapura yang beragama selain Islam. Meskipun etnis Melayu berasal dari berbagai sub grup dari penduduk asli Singapura, para pendatang, termasuk para pendatang dari Indonesia seperti Minangkabau, Batak, Jawa, Sunda, Bali Bugis dll. Clammer mempertegas *is it always assumed that all Malays must be Muslims* (Clammer, 1981: 20).

Haikal dan Yahaya mempertegas bahwa Melayu identik dengan Muslim. *It is made up of Malays, Indians, Arabs, Chinese, and other ethnic group. According to 1990 census, part of the 0.3 percent (categorized as other religions) of the Chinese community , 99.6% of the Malay community , 27%.0 percent of the Indian community, and 24.7 percent of Other Ethnic Group were recorded as Muslims* (Haikal & Yahaya, 1996: 435).

Pendapat lain yang mempertegas bahwa Islam identik dengan Melayu dan sebaliknya, Melayu adalah Islam dikemukakan oleh Aljuneid. Menurutnya, *Annual reports of the colonial administration of Singapore for the years 1947 through 1957 claimed that an 'enumeration of religions has not been made and is indeed scarcely possible'. Out of an estimated figure of more than 100,000 persons, the Malays 'are almost without exception Muslim* (Aljunied, 2009: 9). Artinya, Islam identik dengan Melayu, begitu pula Melayu identik dengan Islam. Oleh karenanya penyebutan Melayu merepresentasikan Islam.

Islam Melayu dalam Pembangunan Bangsa

Meski pada posisi minoritas, kekuatan Muslim Melayu mendapat perlakuan istimewa dan mempunyai *previledge* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Singapura. Salah satu wujud dari pemberian status istimewa tersebut, dapat dilihat pada tataran konstitusional maupun pada kebijakan politik praktis. Dari sisi kebijakan politik praktis yang sangat menonjol ialah pengangkatan representasi Melayu Islam untuk menduduki jabatan Presiden, simbol negara Singapura. Kebijakan ini terasa mengejutkan banyak pihak oleh karena pemenang pemilu di Singapura adalah Partai Tindakan Rakyat yang didominasi oleh etnis Cina. Ini adalah kontribusi penting Muslim Melayu dalam pembangunan bangsa (nation building).

Sebagai pemenang dalam pemilu-pemilu sebelumnya, Lee Kuan Yew sebenarnya mempunyai keleluasaan untuk menempatkan orang orang terdekatnya dalam posisi strategis di pemerintahan. Artinya, ia bisa saja menempatkan orang orang terdekatnya yang umumnya

adalah etnis Cina dan India, mengingat ia tak begitu dekat dengan Melayu yang sejauh ini cenderung menampilkan sikap konfrontatif terhadap etnis Cina, dilihat dari beberapa kerusuhan rasial yang muncul sebelumnya.

Untuk mengisi jabatan Presiden, Lee mengangkat Yusof Ishak seorang Melayu Muslim. Pengangkatan ini dapat dimaknai sebagai suatu perlakuan istimewa mengingat presiden adalah sebagai symbol negara dan Lee Kuan Yew dapat menunjuk siapapun yang mendudukinya. Piliha Lee Kuan Yew kepada Yusof Ishak tersebut terkesan mengejutkan, sebab sebagai pemenang pemilu yang mutlak, Lee Kuan Yew dapat menunjuk siapapun yang ia kehendaki dari etnis Cina, India atau Melayu.

Meskipun demikian, menarik juga untuk mengetahui, mengapa Yusof Ishak yang di angkat, bukan tokoh lain. Terdapat beberapa alasan tentang hal ini. Pertama, Yusof Ishak adalah orang yang telah ditunjuk sebagai Yang Dipertuan Agung oleh Pemerintah Malaysia pada 1963. Kedua, Yusof Ishak adalah seorang direktur dari sebuah media masa paling populer saat itu yakni Utusan Melayu. (Istana: 2013).

Promosi terhadap eksistensi Muslim melayu juga terjadi pada ranah kelembagaan perundangan. Dengan tegas, penyebutan melayu masuk dalam konstitusi untuk dua hal : pengakuan Melayu sebagai “indigenous people” atau penduduk asli serta pengakuan Melayu sebagai bahasa nasional. Terdapat beberapa bahasa resmi yang diakui di Singapura misalnya Bahasa Mandarin, Bahasa Inggris, dan Bahasa India. Namun yang dingkat sebagai bahasa nasional adalah Bahasa Melayu.

Konstitusi mempunyai dua fungsi utama. Pertama adalah *being the source of the government's power*. Ia adalah sumber dari kekuasaan Pemerintah. Pemerintah mengambil semua tindakan dan kebijakan berdasarkan pada mandat dari konstitusi. Konstitusi juga menyusun struktur kelembagaan tentang siapa yang mempunyai kewenangan atas suatu kebijakan negara, di antaranya adalah struktur lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kedua *Limiting the government's power*. Selain memberikan kekuasaan pada lembaga lembaga negara, maka konstitusi sekaligus membatasi kekuasaan lembaga negara tersebut.

Sebagaimana telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, Singapura adalah sebuah negara yang didominasi oleh etnis Cina (76%), sedang etnis Melayu sekitar 14.3%, India 7% dan sisanya adalah berbagai etnis yang lain. Oleh karenanya, Singapura menetapkan dirinya sebagai sebuah negara multikultur dan multi etnis. Artinya, meskipun mayoritas etnis adalah Cina, namun eksistensi semua etnis pada dasarnya sama di depan hukum atau undang undang.

Dalam konstitusi, persamaan di depan hukum tersebut tercantum dalam pasal 12 ayat 1 dan 2 Konstitusi 1965.

(1) All persons are equal before the law and entitled to the equal protection of the law.

(2) Except as expressly authorized by this Constitution, there shall be no discrimination against citizens Singapore on the ground only of religion, race, descent or place of birth in any law or in the appointment any office or employment under a public authority or in the administration of any law relating to the acquisition, holding, or disposition of property or the establishing or carrying on of any trade, business, profession, vocation or employment (Singapore's Constitution 1965).

Demikian juga dengan persoalan agama, Singapura tidak memberika privilede untuk agama tertentu, melainkan semua diperlakukan sama. Pasal 15 mengatur masalah tersebut. *“Every person has the right to profess and practice his religion and to propagate it.”* (Singapore's Constitution 1965). Meskipun demikian, terdapat posisi yang sangat istimewa bagi etnis Melayu yang hanya berjumlah 14.3%. Terdapat pasal yang memberikan privilede atau kedudukan istimewa bagi etnis Melayu sebagaimana yang dimuat dalam pasal 152. Pasal yang mengatur posisi minoritas tersebut, menyatakan:

Article 152 Minorities and Special Position of Malays

(1) It shall be the responsibility of the Government constantly to care for the interests of the racial and religious minorities in Singapore.

(2) The Government shall exercise its functions in such manner as to recognize the special position Malays, who are the indigenous people of Singapore, and accordingly it shall be the responsibility of Government to protect, safeguard, support, foster and promote their political, educational, religious, economic, social and cultural interests and the Malay language (Singapore's Constitution 1965).

Setidaknya, pasal ini memberikan hak istimewa sebagai berikut:

1. Pemerintah bertanggung jawab dan berkewajiban memberikan perlindungan secara terus menerus kepada kelompok minoritas.

2. Termasuk di dalam klausul pertama tersebut adalah perlindungan terhadap kelompok Melayu

3. Etnis Melayu diakui sebagai penduduk Asli Singapura, dengan demikian etnis yang lain seperti Cina dan India adalah pendatang.

4. Pemerintah Singapura akan menjamin keselamatan etnis Melayu, hak-hak politiknya, hak-hak ekonomi, hak pendidikan, hak beragama, serta perlindungan akan kepentingan sosial budaya etnis Melayu.

5. Perlindungan terhadap penggunaan Bahasa Melayu.

Tentu saja, pemberian hak hak khusus kepada etnis Melayu ini menimbulkan sejumlah pertanyaan. Mengingat Etnis lain seperti India dan Cina tidak pernah disebut dalam konstitusi. Ketika kita memahami bahwa konstitusi adalah hal mendasar dalam sebuah negara, maka sangat mungkin terdapat alasan yang mendasar punya mengapa terdapat penyebutan dan pemberian hak khusus terhadap etnis tertentu. Pada sisi yang lain, pemberian hak istimewa ini sebenarnya bertentangan dengan klausul pada pasal sebelumnya terkait persamaan di depan hukum bagi semua warga negara Singapura. Oleh karenanya, menarik untuk mengetahui alasan pemberian hak khusus kepada etnis Melayu ini.

Dalam suatu analisisnya, Eugene Tan menilai, bahwa pemberian status khusus ini bukan merupakan persoalan hukum, tetapi lebih karena persoalan politik. Menurutnya, *therefore, the constitutional safeguards as provided for in the article should be construed as political rather than legal* (Tan: 2009). Artinya, pemberian status khusus tersebut lebih karena persoalan politik semata. Dengan demikian perlulah dikaji lebih mendalam pada konteks sejarah pada masa itu.

Konstitusi Singapura disahkan ketika Singapura berpisah dari Malaysia tahun 1965. Era yang paling krusial yang melatarbelakangi konstitusi ini terjadi antara tahun 1957 hingga 1965. Pada tahun 1957, Malaysia mendapatkan kemerdekaan dari Inggris, demikian juga Singapura mendapatkan hak *full government* di bawah kepemimpinan Lim Yew Hock. Tahun 1959, pemilihan umum digelar dengan kemenangan Partai Tindakan Rakyat yang mendapatkan 53 dari 51 kursi yang ada. Kemenangan ini menempatkan Lee Kuan Yew sebagai Perdana Menteri dan Yusof Ishak sebagai Presiden.

Kebijakan Pemerintah Yang *Islamic Friendly*

Di samping garansi dalam bentuk konstitusi, terdapat pula jaminan dalam pelaksanaan kehidupan beragama bagi komunitas Muslim Melayu. Konstitusi 1965 yang menjamin perlindungan atas etnis Melayu diimplementasikan dalam bentuk perundangan yaitu *Administration of Muslim Law Act* (AMLA). Undang undang ini memberikan jaminan bagi pelaksanaan syariat atau hukum hukum Islam bagi para pemeluknya terutama kaum minoritas Melayu dalam kehidupan mereka sehari hari. Undang Undang ini diterbitkan pada 1966.

Keluarnya undang-undang ini menurut Musa, menunjukkan bahwa sekularisme yang dianut Singapura tidak menunjukkan bahwa Singapura adalah anti agama. Sebaliknya, sekularisme yang dianut Singapura ramah terhadap agama (*religious friendly*). Dengan kata lain, Musa menengarai bahwa Singapura adalah negara yang sekuler tetapi mempunyai jiwa (*secular with soul*) (Musa: 2016).

Adapun tujuan dari diterbitkannya AMLA ini adalah sebagai berikut:

1. (MUIS) The Islamic Religious Council of Singapore - The Islamic Religious Council of Singapore is a statutory body to advise the President of Singapore on all matters relating to Islam in Singapore. It also has the role to see that the many and varied interests of Singapore's Muslim community are looked after in accordance with the principles and traditions of Islam as enshrined in the Holy Quran and Sunnah.
2. The Syariah Court - The Syariah Court administers Muslim personal law in legal matters governing marriages, divorces, the nullity of marriages and inheritance. The Registry of Muslim Marriages (ROMM) - The ROMM spells out the rules and regulations pertaining to the Muslim marriage registration and divorces where both parties are Muslim. (AMLA: 1966)

AMLA berlaku efektif sejak 1968, dan sebagai implementasi dari diberlakukannya AMLA adalah pembentukan Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS). Pendirian Majelis sebagai badan organisasi ini adalah implementasi dari Bagian ke dua teks AMLA. Terlepas dari motif politik atau kritik yang menyertainya, lahirnya undang-undang ini memang terasa unik. Singapura adalah negara yang didominasi kelompok non Muslim, namun justru mengeluarkan undang undang berkait dengan pelaksanaan hukum-hukum atau syari'at Islam. Sudah barang tentu, Syariat ini ditujukan terhadap umat Islam yang identik dengan Melayu.

Fungsi utama dari MUIS adalah membentuk Presiden dalam penanganan yang terkait dengan Islam. Berikut adalah fungsi dari MUIS sebagaimana termaktub dalam undang-undang AMLA.

- a. to advise the President of Singapore in matters relating to the Muslim religion in Singapore;
- b. to administer matters relating to the Muslim religion and Muslims in Singapore including any matter relating to the Haj or halal certification;
- c. to administer all Muslim endowments and funds vested in it under any written law or trust;
- d. to administer the collection of zakat and fitrah and other charitable contributions for the support and promotion of the Muslim religion or for the benefit of Muslims in accordance with this Act;

- e. to administer all mosques and Muslim religious schools in Singapore; and
- f. to carry out such other functions and duties as are conferred upon the Majlis by or under this Act or any other written law (AMLA: 1966).

Fungsi utama dari Majelis Ulama Islam ini adalah untuk memberikan masukan dan saran kepada Presiden mengenai hubungan pemerintah dengan komunitas Muslim serta penyelenggaraan proses sosial terkait dengan agama Islam. Majelis ini di ketuai oleh seorang Presiden yang dibantu oleh wakil Presiden. Terdapat pula *board* yang lain seperti Sekretaris dan Mufti. Mereka yang berada pada kepengurusan ini mempunyai kapasitas intelektual yang tinggi dilihat dari pendidikannya.

Selain itu, MUIS juga berfungsi membantu penyelenggaraan ritual keislaman. Di antaranya adalah penyelenggaraan dan pengoordinasian khutbah Jum'at, koordinasi sholat iedul fitri termasuk di antaranya adalah pengaturan masalah penyelenggaraan haji. MUIS juga mengatur tentang pelaksanaan Waqaf dan zakat.

Fungsi lain yang tidak kalah penting adalah pembangunan masjid sebagai tempat ibadah. Pemerintah Singapura melalui MUIS telah membangun sejumlah Masjid serta melakukan renovasi terhadap masjid yang memerlukan perbaikan. Saat ini terdapat hampir seratus masjid yang ada di Singapura, baik yang didirikan oleh pemerintah, maupun yang didirikan oleh masyarakat setempat.

Dalam dunia pendidikan, eksistensi dari AMLA memberikan jaminan keberlangsungan pendidikan bagi masyarakat Melayu. Pertama, masyarakat Melayu diberikan subsidi pendidikan dan kedua adalah Pemerintah Singapura mengizinkan sekolah sekolah yang berbasis Islam tetap dapat menyelenggarakan pendidikan dengan aturan masing-masing. Meskipun demikian, bagi pelajar Muslim di sekolah dasar dan sekolah menengah milik pemerintah, tetap harus mengikuti peraturan dari pemerintah, misalnya adalah larangan mengenakan atribut Islam di lingkungan sekolah seperti tudung. Saat ini masih terdapat beberapa sekolah berbasis Islam yang cukup populer di Singapura. Di antaranya adalah al Assegaf, aL Maarif, al Junied, al Irsyad dan Wak Tanjung. MUIS akan terus mensupport keberadaan dan keberlangsungan sekolah sekolah Muslim ini.

Posisi Sosial Ekonomi

Dalam dunia pendidikan, data menunjukkan bahwa Muslim Melayu juga mempunyai derajat yang lebih rendah dari etnis Cina dan India. Hal ini dapat dilihat dari data yang

mencerminkan persentase penduduk yang memasuki pendidikan tinggi/universitas. Dilihat dari segi tingkat pendidikannya adalah: Pendidikan Non-Formal 15.1%; Pendidikan dasar 32.7%; Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 47.3%; Pendidikan Sekolah Menengah Atas 3.5% dan Pendidikan Tinggi 1.4% (Sudrajat: 2015, 12).

Meskipun demikian, dari tahun 1970 sampai tahun 1990, menurut Sharon Siddique, telah terjadi peningkatan pada Muslim-Melayu Singapura dalam bidang pendidikan: untuk pendidikan tingkat menengah pertama dari 36.4% menjadi 47.3%; pada tingkat menengah atas dari 1.0% menjadi 3.5% dan pada pendidikan tinggi dari 0.2% menjadi 1.4% (Sudrajat: 2015). Namun dalam statistik pada tahun 2000 menunjukkan bahwa lulusan Melayu hanyalah mencapai 2% sementara masyarakat India telah mencapai 17% dan masyarakat Cina mencapai 13% (Nasir: 2007, 35).

Sedangkan dilihat dari komposisi pekerjaannya adalah: Bidang Teknik dan Professional 9.7%; Bidang Administrasi dan Managerial 1.1%; Ulama dan Guru Agama/Profesi Keagamaan 15.4%; Sales dan Servis 14.0%; Pertanian dan Nelayan 0.3%; Produksi dan Relasi 57%; dan lain-lain 2.5%. Mengenai partisipasi kerja antara laki-laki dan perempuan adalah: laki-laki pekerja 78.3% dan wanita pekerja 47.3%. Dalam bidang pekerjaan, justru terjadi penurunan presentase dalam bidang pertanian (dari 5.3% menjadi 0.3%); sales dan pelayan (dari 27% menjadi 14%), dan menaik secara tajam pada bidang produksi (43% menjadi 57%).

Keahlian etnis Melayu untuk mampu mengikuti perkembangan teknologi tinggi mengakibatkan adanya pergeseran yang mana dengan dengan tingkat keahlian dan produktivitas yang tinggi akan berpengaruh untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi. Rata-rata pendapatan keluarga per bulan adalah S\$2,246 % (Sudrajat: 2015, 12-13), dan keluarga Melayu hanya memperoleh pendapatan sebanyak 64% dari rata-rata keluarga masyarakat Singapura dan pendapatan mereka relatif menurun meskipun telah memiliki peningkatan kualitas pendidikan (Appold & Hong: 2006, 11). Namun menurut Goh Chok Tong, proporsi masyarakat Melayu yang mempunyai pekerjaan profesional meningkat dari 2% pada tahun 1990 menjadi 4% pada tahun 2000, serta yang memiliki pekerjaan teknik meningkat dari 8.6% menjadi 16.4% (Nasir: 2007, 40).

Meskipun kesuksesan dan usaha yang dilakukan oleh Muslim Melayu untuk meningkatkan tingkat pendidikan dan pekerjaan mereka ditunjukkan dalam media, namun marginalisasi terhadap Muslim Melayu masih terjadi dan semakin meningkat. Marginalisasi tersebut dirasakan khususnya oleh Muslim Melayu profesional dan berpendidikan tinggi di mana mereka memperoleh kesulitan dalam mencapai jabatan yang lebih tinggi ataupun

kesulitan dalam mencari pekerjaan di perusahaan orang Cina yang menyebabkan Muslim Melayu lebih banyak berkecimpung dalam bidang jasa dan perusahaan multinasional Barat. Hal ini semakin menekankan ketidakhadirannya keadilan sosial dan persamaan hak bagi Muslim Melayu di Singapura (Ling, 28-29).

Selain itu, adanya pembagian tenaga kerja yang tidak proporsional dan tingkat pendidikan yang kurang memadai membuat Muslim Melayu cenderung bekerja di pekerjaan kasar sekaligus menempatkan Muslim Melayu di kelas rendah dalam strata sosial. Adanya tuntutan perkembangan intelektual dan materiil dalam pembagian tenaga kerja yang lebih berkembang dan kompleks, memunculkan dampak negatif bagi Muslim Melayu di mana setiap pekerjaan membutuhkan kecerdasan tertentu dan pengetahuan khusus yang mana ide, gagasan, dan cara mereka melakukan sesuatu sesuai dengan yang dibutuhkan sehingga kemudian mayoritas Muslim Melayu ditempatkan dalam tingkat rendah pada strata ekonomi yang secara tidak langsung memarginalkan mereka dari lingkungan masyarakat yang lebih luas (Nasir: 2007, 26).

Salah satu problem minoritas di Singapura adalah stigmatisasi negatif terhadap kaum minoritas Islam. Stigmatisasi ini memang tidak sekedar merupakan sentimen ketidaksukaan, namun sedikit banyak ia adalah refleksi dari suatu fenomena di tengah masyarakat Melayu. Kaum minoritas Melayu memang menjadi sasaran empuk bagi stigma ini. Kaum Melayu diberikan stigma sebagai kaum yang malas, miskin, berpendidikan rendah dan julukan-julukan sejenis.

Stigma ini tidak dipungkiri oleh Githu Muigai dari UN *Special Rapporteur and Racial Discrimination* sembari membela kaum minoritas Melayu di Singapura. Menurutnya,

Malay students were not moving in tandem with the rest of the student population; Malays encountered “difficulties and stereotypes” in the employment sector and were under-represented in senior positions in the military, police, intelligence services and the judiciary; because of “historical inequalities . . . special measures within clearly defined timelines” should be pursued to assist Malays to improve their educational plight within the meritocratic system (Mutalib: 2011).

Dalam karya monumentalnya yang berjudul *The Singapore Dilemma*, Lily Zubaidah Rahim (1998) menjelaskan tentang keterbelakangan Kaum Melayu di Singapura terutama sekali dalam bidang sosial ekonomi, politik dan pendidikan. Marginalitas kaum Melayu ini berdampak pada mobilitas sosial, ketidakmampuan bersaing dalam dunia yang sangat kompetitif di Singapura.

Posisi minoritas Melayu tidak terbatas pada sisi demografi saja, namun juga terjadi pada sektor pendidikan, ekonomi dan Politik. Melayu di Singapura mengalami ketertinggalan dibandingkan dengan etnis yang lain dalam berbagai bidang. Bidang yang paling kentara terlihat sejak awal adalah dalam bidang pendidikan di mana sedikit sekali dari orang Melayu yang mampu mencapai derajat pendidikan tinggi. Tambahan pula sedikit kebanyakan sekolah Melayu berada pada level sekolah rendah. Sejak tahun 1959 misalnya, hanya terdapat 26 sekolah rendah Melayu (Abdulah: 2000, 29-41).

Tingkat pendidikan yang rendah dari kaum Melayu juga terlihat dari prosentasi yang masuk ke perguruan tinggi. Pada tahun 1980 terdapat 1.5% dari warga etnis Cina yang mengenyam pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi, dan jumlah itu terus melonjak tajam hingga mencapai angka 4.4% pada satu decade berikutnya. Peringkat kedua adalah etnis India di mana pada tahun 1980 hanya sekitar 1.4%, melonjak hingga 3.1% pada tahun 1990. Sementara etnis Melayu menempati posisi terendah dengan prosentasi sangat kecil yakni 0.2% dan naik hanya mencapai 1.0% pada tahun 1990. Data tersebut menunjukkan betapa tingkat pendidikan etnis Melayu jauh lebih rendah dibandingkan dengan etnis Cina maupun etnis India. (Ling: 1992).

Implikasinya adalah, pekerjaan yang diperoleh oleh Melayu hanyalah pekerjaan tingkat rendah dengan gaji yang rendah pula. Misalnya saja, anak seorang petani umumnya juga menjadi petani yang hanya sedikit lebih pintar, anak nelayan ya boleh hanya jadi nelayan, atau pekerjaan rendahan lain seperti tukang pos, askar, peon, atau mata-mata (Abdulah: 2000, 30)

The Malays are conspicuously lacking in professional, administrative, and managerial occupations. In 1980, the Malays constituted only 8 per cent of the total professional and technical work force, 2 per cent of all administrative personnel including managers, and 4 per cent of the total number of sales workers in Singapore..... In the business sector, the Malays are engaged in primarily small businesses and small-scale manufacturing industries. involvement in export-import activities, printing catering, and travel agency work. In 1983, for Malay companies involved in this area (Zoohri: 1987, 179).

Studi yang dilakukan oleh Suriani Suratman menunjukkan pergeseran atas stigma Kaum Melayu di Singapura pada setiap dekadenya. Ia mencoba menggambarkan kemajuan yang telah dicapai kaum Melayu, tetapi kemajuan tersebut nampaknya terlalu pelan. Dari dekade 1960-an hingga tahun 2000 Kaum Melayu telah berusaha memperbaiki dirinya, namun masih belum mampu mengejar kesuksesan etnis Cina.

Pada tahun 1960, potret Kaum Melayu adalah “*Malay are slow in adapting to changes*”. Stigma yang disematkan kepada kaum Melayu ini tentulah sangat negative karena menggambarkan keterbelakangan intelektual dan tingkat pendidikan serta ketidakmampuan mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan dan perubahan. Lee Kuan Yew menengarai tiga ranah di mana mereka amat tertinggal yakni, pendidikan, pekerjaan dan perumahan. Dan oleh karenanya Lee Kuan Yew menyerukan peningkatan atas kualitas pendidikan agar mereka bisa bekerja di Industri maju dan menerima konsekuensi untuk tinggal di rumah susun (flats) sebagai ciri dari kota yang modern.

Pada dekade 1970, stigma kaum Melayu adalah “*Malay are old fashioned and traditional*”. Pada saat tersebut, industrialisasi dan urbanisasi di Singapura berjalan sangat cepat. Pemerintah sangat menekankan pada pentingnya pendidikan untuk menciptakan Singapura yang baru, dengan tata nilai yang baru dan layak untuk mencapai masyarakat yang baru. Dalam sistem pendidikan di Singapura terdapat perubahan yang signifikan dengan penekanan pada kemampuan bahasa Inggris dan penguasaan teknologi serta pembangunan ekonomi. Konsekuensinya adalah keterpinggiran Bahasa Melayu kendati Bahasa Melayu ditetapkan sebagai bahasa Nasional tahun 1960-an.

Pada tahun 1970an ini pula diselenggarakan konferensi oleh Majelis Melayu Pusat Singapura dengan Community Study Center yang membicarakan tema tentang perang Melayu dalam pembangunan nasional. Pada momen tersebut sebenarnya terdapat pengakuan ketertinggalan Melayu adalah tiga ranah, pendidikan, ekonomi dan sosial (Suratman: 2004).

Pada konteks inilah berulang kali ditegaskan tentang keharusan kaum Melayu untuk mengubah sikap, perilaku dan kinerjanya. *Minister of State* pada masa itu, Haji Yacob, menegaskan bahwa *if we want to progress together with the other groups in the republic, we have to work hard* (Suratman: 2004). Hal ini menyiratkan bahwa memang sejauh ini bangsa Melayu dikenal cenderung menjadi pemalas.

Gaya hidup dan pola pikir Bangsa Melayu dinilai telah tua (*old*) dan lapuk (*stale*), dan mereka memerlukan adaptasi pada era dan situasi yang baru. Gaya hidup di perkampungan tradisional sangatlah tidak efisien, sementara bagi masyarakat yang telah mau pindah ke rumah susun (*flat*), telah mampu memperbaiki standar hidupnya. Gaya hidup baru untuk tinggal di rumah susun sangat diperlukan karena akan memudahkan pemerintah untuk membantu memberikan fasilitas kehidupan yang lebih tertata dan adil. *Housing Development Board* yang dikembangkan di Singapura juga lebih mampu menjamin terjadinya asimilasi dan akulturasi budaya menuju kesatuan Singapura.

Pada era 80-an, stigma Melayu adalah *Malays are still lagging behind and not integrating*. Tahun 1980 tercatat sebagai pertumbuhan ekonomi dan pendidikan yang sangat cepat di Singapura. Sementara itu, gap antara Melayu dan etnis lain dalam beberapa sektor bukannya mendekat, tetapi kian menjauh. Itulah mengapa sebuah organisasi sosial MENDAKI (*Council on Education of Muslim Children*) didirikan terutama sekali untuk mengangkat derajat pendidikan kaum Melayu. MENDAKI adalah sebuah tawaran solusi mengatasi perkembangan kemajuan Kaum Melayu yang dinilai sangat lamban (*low progress*).

Dr. Ahmad Matar, Menteri Lingkungan sekaligus presiden dari MENDAKI menengarai bahwa kemajuan Kaum Melayu masih lamban dan masih jauh dari target target capaian Kaum Melayu. *We are still a long, long way from our target...we must intensify our efforts to achieve greater results*. Di samping itu, meskipun Kaum Melayu mulai menghuni rumah susun, namun mereka masih sulit untuk melebur dengan etnis yang lain. Mr. Yusof Yatiman, Sekretaris Parlemen, menengarai kecenderungan Kaum Melayu yang masih ingin memisahkan diri dari komunal yang lain. *Singapore Malays are showing a tendency to segregate themselves despite Government's efforts to integrate the various race in housing program* (Suratman: 2004).

Era 90-an karakteristik kaum Melayu digambarkan sebagai *Malays are progressing but can not satisfied yet*. Kaum Melayu mulai menunjukkan perkembangan kemajuan, namun masih belum memuaskan. Singapura mencapai perkembangan pesat dalam hal ekonomi, khususnya karena terjadi peningkatan kemampuan para pekerja (*labour skill*). Pada periode ini ada sedikit ketegangan antara Pemerintah dan Kaum Melayu ketika kaum Melayu mulai meninggalkan Partai Tindakan Rakyat, serta penolakan atas *free tertiary education for Malays*. Sebagai alternatifnya, Kaum Melayu mendirikan *Association of Malay/Muslim Profesional* (AMP). Perkembangan positif yang ditunjukkan oleh kaum Melayu menandakan bahwa mereka mulai mampu memangkas gap dengan etnis yang lain, serta keberhasilan Melayu dalam memperbaiki standar hidupnya.

Peran Politik Islam

Meskipun secara simbolik Muslim Melayu mempunyai berbagai privilege, namun secara politik mereka tetap merupakan kaum pinggiran dengan peran yang kecil. Dinamika politik Singapura senantiasa didominasi oleh etnis Cina melalui kendaraannya Partai Tindakan Rakat (PAP). Sejak pemilu pertama berlangsung di Singapura, Partai Tindakan Rakat telah menguasai dan mengendalikan pemerinthanan dengan menempatkan pendirinya Lee Kuan Yew sebagai perdana Menteri. Pada pemilu yang digelar sejak 1959 tersebut, 92 kursi di

parlemen telah dikuasai oleh PAP yang mayoritas adalah etnis Cina. Tahun 1990, Singapura memberlakukan system GRC (*Group Representation Constituencies*) dengan tujuan untuk menjamin partisipasi kelompok minoritas di parlemen yang didasarkan bukan pada afiliasi agama melainkan berdasarkan ras, baik dari Melayu, India dan kelompok minoritas lainnya. Di dalam GRC, satu dari enam kandidat haruslah berasal dari kelompok minoritas, termasuk Melayu. Hasil ini pemberlakuan GRC ini tetaplah menempatkan komunitas Cina sebagai kelompok yang dominan dalam politik.

Secara kasar, 12 dari 87 anggota parlemen atau 14% anggota parlemen merupakan Muslim Melayu yang persentase tersebut menyamai persentase proporsi Muslim di Singapura. Walaupun Muslim Melayu terlihat terwakilkan secara baik dalam politik, namun masih terdapat kekurangan di dalamnya yakni aspirasi Muslim Melayu yang tidak terartikulasikan oleh anggota parlemen Muslim Melayu PAP secara baik dan kurangnya representasi Muslim Melayu dalam area pembuatan kebijakan.

Dalam hal ini, hanya terdapat 4 Menteri Muslim dan 1 Menteri Muslim di setiap kabinet sejak Singapura merdeka. 4 Menteri tersebut mengisi posisi Menteri yang kurang penting dan tidak pernah memegang peranan penting seperti Menteri Keuangan, Pertahanan, Pendidikan, Luar Negeri, dan Dalam Negeri (Abdullah, : 2012). Artinya, posisi dan jabatan yang diegang oleh kelompok Muslim Melayu sebatas pada posisi dan peran simbolis. Kebijakan yang menyangkut pada pengelolaan tata keuangan dan tata politik kenegaraan masih merupakan dominasi dari komunitas etni Cina.

Meskipun telah terdapat usaha untuk menyampaikan aspirasi komunitas Muslim melalui partai independen seperti Partai Kebangsaan Melayu Singapura – *Singapore Malay National Organization* (PKMS) dan *Singapore National Front* - Barisan Nasional Singapura (SNF), pada akhirnya kepentingan komunitas Muslim hanya dapat diwakilkan oleh PAP karena usaha partai independen komunitas Muslim memiliki kesuksesan yang terbatas disebabkan tidak adanya anggota dari partai tersebut yang menduduki kursi di parlemen (Steiner, 2011).

Kesimpulan

Kaum Muslim Melayu di Singapura merupakan kelompok minoritas, sedangkan kelompok mayoritasnya adalah etnis Cina. Tidak seperti kelompok minoritas Muslim di negara Asia Tenggara lainnya yang cenderung menunjukkan hubungan yang tidak harmonis terhadap pemerintah, hubungan kelompok Muslim Melayu di Singapura dengan pemerintah tampaknya cukup harmonis. Sejumlah kebijakan yang pro Melayu Islam telah dikeluarkan oleh

pemerintah, diantaranya adalah dengan pengakuan Bahasa Melayu sebagai Bahasa nasional meupun pengakuan Melayu sebagai penduduk asli Singapura. Pemerintah juga menjamin pelaksanaan kehidupan beragama bagi warga Muslim Melayu dengan pelebagaan kegiatan keagamaan melalui Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS), pembangunan dan pemeliharaan masjid, serta jaminan keberlangsungann sekolah sekolah Islam (Madrasah).

Meskipun demikian, terdapat stigma negatif terhadap kelompok Muslim Melayu yang dinilai sebagai kelompok yang malas dan terbelakang baik dalam bidang pendidikan maupun dalam bidang ekonomi. Di samping itu, peran politik kelompok minoritas tersebut juga relatif kecil dengan indikasi sedikitnya jumlah perwakilan Muslim Melayu dalam parlemen, maupun dalam jabatan-jabatan politik yang strategis.

Daftar Pustaka

Abdulah, Kamsiah. 2000. Sekolah Menengah Melayu di Singapura, dalam *Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society*, Vol. 73, No. 1 (278).

Aljunied, Syed Mohd Khaerudin. 2006. Making Sense of an Evolving Identity: A Survey of studies on Identity and Identity Formation among Malay-Muslim in Singapore, dalam, *Journal of Muslim Minority Affairs*, Vol. 26, No. 3. December.

Clammer, John. 1981. Malay Society in Singapore : A preliminary Analisis, *Southeast Asian Journal of Social Science*, Vol. 9, No.1

Eng, Lai Ah (ed). 2008. *Religious Diversity in Singapore*, (Singapore : Institute of Southeast Asian Studies).

Haikal, Husain and Atiku Garba Yahaya. 1996. Muslim Organization in Singapore : An Historical Overview, dalam *Islamic Studies* Vol. 35. No. 4. Winter.

Helmiati. 2013. “Dinamika Islam Singapura : Menelisik Pengalaman Minoritas di Negara Singapura yang Sekular dan Multikultural”, dalam *Jurnal Toleransi*, Volume 5. No.2. Juli-Desember.

Istana. 2013. “Yusof Ishak”, dalam <https://www.istana.gov.sg/the-president/former-presidents/encik-yusof-ishak>

Ling, Michele Lau, 1992, *Post September-11 Singapore, Evolving Malay-Muslim Citizenship*, Department of Political Science and International Relations, The University of Western Australia.

Mullin , May Tan. 2009. “Armed Conflict and Resolutions in Southern Thailand, dalam *Annals of the Association of American Geographers*, Vol. 99, No. 5, Geographies of Peace and Armed Conflict, Dec., pp. 922-931

Muthalib, Hussin, 2011. “The Singapore Minority Dilemma”, dalam *Asian Survey*, Vol. 51. No. 6. Nopember/December.

Nasir, Kamaludeen Bin Mohamed. 2007. *The Muslim Power Elites in Singapore: The Burden of A Community*, (Singapore:National University of Singapore.)

Singh, Bilveer, 2013. *Myanmar’s Rohingyas: Challenges Confronting a Persecuted Minority and Implications for National and regional Security*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press).

Steiner. Kerstin, 2011. “Religion and Politics in Singapore : Matters of National Identity and Security? A Case Study of the Muslim Minority in a Secular State”, dalam , *OSAKA UNIVERSITY LAW REVIEW*, No. 58. February.

Sudrajat, Ajat, 2015. “Perkembangan Islam di Singapura”, *Kertas Kerja Prodi Ilmu Sejarah FISE UNY, Yogyakarta*. Diunduh dari <http://staffnew.uny.ac.id/upload/131862252/penelitian/Perkembangan+Islam+di+Singapura.pdf>. Diunduh pada 13 Pebruari

Suratman, Suriani, 2004. “Problematic Singapore Malays: The Making of portrayal”, paper presented at *International Symposium on Thinking Malayness*, organized by ILCAA, Tokyo University of Foreign Studies, June, 21.

Tan, Andrew. T.H. 1999. "Singapore Defense: Capabilities, Trends and Implications", dalam *Contemporary Southeast Asia*, Vol 21. No 3. December.

Zoohri, Wan Hussin, 1987. "Socio-Economic problem of The Malays in Singapore, dalam *Journal of Social Issues in Southeast Asia*, Vol. 2. No. 2. August.

Kontinuitas Gerakan Politik Aceh Pasca Perdamaian 2005

Takdir Ali Mukti

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
takdirmukti1@gmail.com

Abstract

This article focuses on Aceh political movement after Helsinki Agreement 2005. There are differences in character between the Aceh movement before and after the peace agreement, ie, before the peace agreement, the political movement is politically-armed and outside the government. After peace agreement, Aceh movement is in legal-formal efforts and resides within the body of the Aceh government. There is a fact that the Government of the Republic of Indonesia, according to INGO, GAM activists, and local parties in Aceh, has committed many violations of the 2005 Helsinki peace agreement, while GAM has fulfilled all the agreed obligations in the peace. Violations perpetrated by the central government undoubtedly resulted in disappointment and political distrust for the Aceh government, especially GAM activists, on the other hand, the Aceh government dominated by former GAM fighters trying to maintain the enactment of a peace agreement in Aceh in accordance with the Helsinki Agreement. From this fact, this article raises two main questions: first, why is the Aceh government dominated by GAM activists retaining the Helsinki MOU when the Government of Indonesia has committed many violations? Secondly, how did GAM activists make political struggles after entering and controlling the Aceh government for the Helsinki MOU deal to continue in force? This research is a qualitative research that empirically explores the facts related to both issues. The research finds that GAM exponents are trying to defend the Helsinki MOU because they believe it is a path that can lead Aceh to reach the Self Government with its main components namely local parties, guardian Nanggroe institutions (Lembaga Wali Nanggroe) and special allocation funds from the center. To achieve this goal, the Aceh government made their political struggle by producing local regulation in accordance with the agreement in the Helsinki MoU, even though it was not approved by the Indonesian government.

Keywords: *peace agreement, political distrust, Aceh movement*

Pendahuluan

Konflik bersenjata Aceh dengan Pemerintah Republik Indonesia bergolak sejak diproklamasikannya Aceh Sumatra Liberation Front atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 26 Desember 1976 oleh Tengku Hasan Tiro. Gerakan politik bersenjata yang menelan korban ribuan jiwa ini menemukan jalan damai dengan ditandatanganinya peace agreement di Helsinki, Finlandia, antara Pemerintah RI dengan Perwakilan dari GAM pada tanggal 15 Agustus 2005, pasca tsunami besar melanda wilayah Aceh. Dalam peace agreement atau yang lebih dikenal dengan ‘Memorandum of Understanding’ Helsinki (MOU Helsinki), kedua pihak yang bersengketa bersepakat untuk

menempuh jalan damai demi segera mewujudkan cita-cita Bangsa Aceh yang makmur dan beradap. Terdapat banyak poin kesepakatan yang disetujui untuk menjamin terlaksananya perdamaian dan pembangunan bagi Aceh.

Pasca penandatanganan MOU Helsinki tersebut, dan dalam perjalanan pelaksanaannya, terdapat fakta yang tercermin dari sikap resmi partai-partai lokal, LSM-LSM, dan juga para pengamat dalam negeri dan luar negeri yang menyatakan bahwa banyak poin-poin kesepakatan di dalam MOU Helsinki yang belum atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah pusat, baik dengan cara tidak melaksanakan sama sekali, maupun justru merubah kesepakatan yang ada dalam MOU itu di dalam undang-undang nasional tanpa melibatkan pihak GAM. Menurut Gubernur Aceh Zaini Abdullah, setidaknya ada 3 butir MOU yang diabaikan oleh Pusat, yakni pembentukan Pengadilan HAM, Pembentukan Komisi Penyelesaian Klaim dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) serta beberapa turunan Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam bentuk Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah. Zaini Abdullah mengatakan bahwa, jika turunan UUPA ini tidak turun, maka dikhawatirkan rakyat Aceh akan bangkit untuk melawan ketidakadilan Pemerintah Pusat. Sebab, bukti sejarah mencatat, bahwa setiap ketidakadilan bagi Aceh, rakyatnya akan melawan untuk menjaga harkat dan marwah ke-Acehannya, tegas Zaini yang mantan Menlu GAM ini (Serambi, 16/8/2014).

Pemerintah Pusat juga dianggap mengingkari MOU Helsinki ketika menolak mengesahkan Qonun Aceh (Regional Law) Nomor 9 Tahun 2013 sebagai perubahan Qonun Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nangroe. Dalam Qonun ini, disebutkan dalam pasal 29, antara lain, bahwa Wali Nangroe memiliki kewenangan untuk menguasai asset/khazanah di dalam dan di luar Aceh (luar negeri), melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri untuk kemajuan peradaban Aceh, dan menjaga perdamaian Aceh dan ikut berpartisipasi dalam proses penyelesaian perdamaian dunia. Pemerintah pusat sangat keberatan dengan klausul-klausul tersebut dan mengirimkan 21 poin yang harus direvisi oleh DPRA terhadap qonun itu. Namun, sampai dengan akhir 16 Desember 2013 ketika pelantikan Malik Abdullah sebagai Wali Nangroe dilakukan secara sepihak oleh DPRA bersama Gubernur Aceh, DPRA tidak merevisinya dan Pemerintah pusat pun belum mengesahkannya.

Selain penolakan pemerintah pusat terhadap qonun tersebut, pemerintah RI juga menolak untuk mengesahkan Qonun nomor 3 tahun 2013 tentang Lambang dan Bendera Aceh. Menteri dalam negeri beralasan bahwa lambang dan bendera itu sangat mirip dengan bendera

GAM di masa pergolakan bersenjata sehingga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 77 Tahun 2007 dan UUPA Tahun 2006. Yentu saja penolakan kedua qonun Aceh ini membuat kekecewaan yang meluas di kalangan para mantan aktifis GAM baik yang ada dalam tubuh pemerintahan Aceh maupun yang berada di masyarakat umum sehingga menimbulkan ketegangan antara pusat dengan pemerintahan Aceh.

Dalam kondisi ini, menurut Aspinall, Helsinki Agreement telah terserap dalam sistem nasional Indonesia yang lebih kokoh dengan menyimpangi apa yang telah disepakati dalam MOU. Aspinall menyatakan bahwa, *'However, ... the good intentions embodied in the Helsinki MoU have tended to become absorbed and blunted by the dominant national system'* (Aspinall, 2008).

Sementara itu, ketaatan atas kesepakatan damai dalam MOU Helsinki ditunjukkan oleh GAM sejak awal penandatanganan sampai dengan saat ini. Semua klausul yang disepakati dalam peace agreement dipatuhi oleh GAM, yakni perlucutan senjata secara menyeluruh bagi GAM, pembubaran kesatuan-kesatuan perlawanan atau tentara GAM, tidak mengibarkan bendera GAM di tengah masyarakat, melarang kegiatan propaganda GAM, termasuk pendirian partai-partai politik lokal Aceh yang dimotori oleh para mantan aktifis GAM sebagai instrumen demokrasi untuk menjalankan pemerintahan di Aceh (Kingbury, 2015). Para mantan aktifis GAM juga berusaha untuk beradaptasi dan melebur bersama masyarakat setelah mereka beberapa tahun lamanya berada di medan pertempuran di tengah hutan Aceh. Dari wawancara dengan mereka ini, tampak banyak kendala dalam proses adaptasi dengan kehidupan normal masyarakat, terutama terkait dengan pekerjaan dan keahlian teknis mereka.

Dari fakta-fakta yang ditemui di atas, memunculkan pertanyaan mendasar yakni mengapa pihak GAM terus berusaha mempertahankan berlakunya MOU Helsinki meskipun pihak pemerintah RI telah banyak mengingkarinya. Selanjutnya, bagaimana para mantan aktifis GAM melakukan usaha-usaha political movement ketika mereka telah menguasai pemerintahan Aceh agar hasil-hasil MOU Helsinki dapat terus dilaksanakan di Aceh. Artikel ini akan menganalisis alasan-alasan GAM untuk mempertahankan MOU Helsinki melalui pendekatan riset kualitatif untuk memverifikasi fakta-fakta di lapangan.

Review Literatur

Dalam melihat potensi konflik pasca peace agreement di Aceh, Damien Kingsbury menyatakan bahwa sumber konflik pasca MOU Helsinki di Aceh adalah kekecewaan

(*grievance*), yang memainkan peran cukup besar dalam konflik intra-negara, terutama di mana etnis minoritas atau identitas diri lainnya menjadi kelompok yang merasa terpinggirkan, terasing, atau menjadi korban. Penghancuran kesepakatan atau '*a hurting stalemate*', yakni melukai kesepakatan ketika para pihak merasa bahwa biaya untuk mempertahankan perdamaian lebih mahal daripada keuntungan yang akan dicapai, misalnya Pemerintah RI tidak segera melaksanakan hasil-hasil kesepakatan secara penuh, maka ini akan menimbulkan kekecewaan pada pihak GAM (Kingsbury, 2015). Sederetan kesepakatan dalam MOU Helsinki yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Pusat antara lain; pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi (TRC), pembentukan komisi yang menangani pelanggaran hak Asasi Manusia (HAM) di Aceh selama konflik, kewenangan Aceh untuk mengontrol pelabuhan laut dan udara, pemberian kompensasi kepada para korban dan terdampak selama masa konflik secara merata dan adil.

Kekuatan analisa Kingsbury selaku advisor para juru runding GAM ini terletak pada adanya '*warning*' atau '*alert*' bahwa MOU Helsinki apabila tidak dilaksanakan dengan penuh komitmen oleh pemerintah pusat akan potensial menimbulkan konflik baru setelahnya di Aceh. Namun, kelemahannya adalah bahwa penjelasan riset Kingsbury ini bersifat umum, tidak memberikan solusi yang bersifat spesifik atas realitas konflik kewenangan yang sedang dihadapi antara Pemerintah Aceh dengan RI, khususnya di bidang paradiplomasi, meskipun beberapa klausul dalam MOU Helsinki memuat beberapa kewenangan paradiplomasi bagi Pemerintahan Aceh.

Lebih jauh, Edward Aspinall berupaya menggali akar penyebab konflik antara Aceh dengan Pemerintah RI melalui penelusuran sejarah Aceh, baik masa kolonial maupun pasca kemerdekaan RI 1945. Dalam analisisnya Aspinall menyatakan bahwa identitas kultural Aceh yang berbeda dengan masyarakat Indonesia pada umumnya dengan latar belakang sejarah dan ikatan ke-Islamannya, memunculkan ekspresi tuntutan daerah untuk memperoleh pengakuan akan eksistensinya. Pasca kesepakatan MOU Helsinki, identitas kultural ini akan tetap ada kontinuitas untuk dipertahankan, dan jika ada upaya dari Pemerintah RI untuk melemahkannya, justru akan menimbulkan konflik baru (Aspinall, 2009).

Kekuatan analisis Aspinall adalah pada eksplorasi identitas masyarakat Aceh yang menjadi energi abadi untuk terus menyatakan dirinya ke permukaan sejak jaman kolonial sampai saat ini. Jika dikomparasikan dengan pemikiran Wendt tentang identitas, maka pernyataan Aspinall tersebut tampak linieritasnya, di mana keduanya sama-sama memberi bobot yang besar pada aspek identitas masyarakat. Kelemahan analisa Aspinall ini terdapat

pada cara memposisikan identitas menjadi faktor determinan penyebab konflik dengan mengesampingkan aspek-aspek yang lainnya. Aspek kepentingan dan kondisi ekonomi, aspek dinamika politik internal pemerintahan Aceh yang didominasi para mantan kombatan GAM dan aspek internasional tentang eksistensi struktur organisasi GAM beserta aset-asetnya di luar negeri, tentu sangat penting untuk diteliti karena dapat mempengaruhi situasi hubungan yang harmonis-damai, atau pun konfliktual dengan pemerintah pusat.

Dalam studi yang dilakukan oleh Suh, Jiwon (2015), penyebab lain munculnya konflik Aceh dengan pemerintah pusat setelah MoU Helsinki adalah adanya isu-isu lain yang dilihat sebagai kebijakan preemptif atau *'preemptive policies'*, antara lain komisi kebenaran dan rekonsiliasi (TRC) dan pengadilan hak asasi manusia untuk Aceh. Hingga saat ini, tidak ada institusi yang didirikan. Suh Jiwon mengatakan bahwa;

"Preemptive policies mean policies adopted by reluctant transitional leaders in the face of worse alternatives without the intention to fully implement the adopted policies. When leaders believe that the costs of external pressure, such as international courts or threats of aid cut, are higher than the cost of introducing transitional justice mechanisms, they are likely to adopt some mechanism, such as truth commissions, trials, or a combination of the two" (Jiwon, 2015)

Kebijakan preemptif dapat diartikan sebagai kebijakan yang rumit dari Pemerintah Indonesia kepada masyarakat Aceh. Kimura Ehito menunjukkan bahwa, elit Indonesia secara sistematis menghambat norma global tentang hak asasi manusia untuk dijalankan di negara ini (Kimura Ehito 2015). Tidak menutup kemungkinan bahwa, isu kewenangan paradiplomasi yang terdapat dalam MoU Helsinki itu pun termasuk di dalam kategori kebijakan *'preemptive'* ini sehingga tidak akan diberikan secara leluasa oleh pemerintah pusat.

Kelemahan analisis Suh Jiwon maupun Ehito tersebut terdapat pada adanya *'pre asumsi'* tentang perilaku pemerintah pusat yang *'dengan sengaja'* akan mengingkari kesepakatan MOU Helsinki atau kebijakan-kebijakan lainnya yang diperuntukkan bagi Aceh. Secara empiris membuktikan *'pre asumsi'* semacam ini sangat sulit dalam penelitian ilmiah, maka kesimpulan Suh Jiwon dan Ehito di atas menyisakan dugaan yang harus diverifikasi lebih lanjut. Kelemahan berikutnya dari penelitian Jiwon ini adalah meletakkan sumber konflik itu yakni ketidak-sungguhan dalam melaksanakan Mou helsinki atau pun kebijakan-kebijakan yang lainnya itu hanya pada satu pihak saja yakni Pemerintah RI, dengan mengabaikan kemungkinan yang sama dari pihak Pemerintahan Aceh yang didukung oleh GAM.

Dari telaah kajian pustaka di atas, terdapat ruang kosong yang belum banyak dibahas oleh para peneliti lain yakni bagaimana kelompok revolusioner yang telah menandatangani kesepakatan damai dan loyal terhadap hasil-hasil kesepakatan dengan pemerintah pusat itu melakukan mekanisme mempertahankan diri (*self defense mecanism*) terhadap perilaku pemerintah pusat yang dipandang telah melanggar banyak poin dalam kesepakatan damai dalam MOU Helsinki sekaligus bagaimana menerapkan MOU dalam pemerintahan Aceh yang mereka kuasai. Penelitian ini dapat dipandang sebagai kelanjutan dari penelitian Kingsbury mengenai adanya potensi '*grievances*' atau kekecewaan yang dapat merusak keseluruhan hasil kesepakatan damai antara GAM dengan Pemerintah RI, namun penelitian ini melihat dari sudut pandang yang berbeda yakni pihak GAM yang saat ini telah mendominasi pemerintahan Aceh, yang cenderung bersikap loyal kepada hasil MOU Helsinki, berusaha melakukan gerakan-gerakan politik. Riset ini berupaya menemukan alasan-alasan GAM untuk mempertahankan hasil-hasil kesepakatan ketika pemerintah pusat telah melakukan banyak pelanggaran komitmen sebagaimana disepakati dalam MOU itu. Tentu saja upaya-upaya mempertahankan diri di dalam bingkai MOU Helsinki ini dilakukan dengan menggerakkan seluruh elemen GAM yang berada di semua sektor, baik legislatif, pemerintahan Aceh (eksekutif), LSM maupun Partai-partai lokal yang langsung berafiliasi dengan GAM, mengingat secara de facto GAM saat ini masih eksis, sebab memang MOU Helsinki tidak ada klausul yang memuat keharusan tentang pembubaran GAM.

Poin-Poin Krusial dalam MOU Helsinki

Dalam perundingan menuju kesepakatan damai yakni MOU Helsinki, sejak tahun 2002 sampai dengan ditandatangani pada tahun 2005, memang terdapat masalah-masalah krusial yang sensitif antara kedua belah pihak dan berpotensi menggagalkan jalannya perundingan. Beberapa isu krusial itu dikemukakan oleh para tokoh perunding baik dari pihak GAM maupun pihak Pemerintah Indonesia, antara lain Malik Mahmud selaku Ketua Perunding GAM, Nurdin Abdurrahman (anggota perunding GAM), dan Hamid Awaludin (Ketua Tim perunding RI).

Dalam surat tulisan tangannya sebagai kata pengantar buku *Damai Di Aceh : Catatan Perdamaian RI-GAM di Helsinki*, karya Hamid Awaludin, Malik Mahmud menyebut ada 3 isu krusial dalam perundingan, yakni (1) pendirian partai lokal di Aceh; (2) kewenangan Aceh melakukan hubungan dagang secara langsung dengan luar negeri serta penguasaan sepenuhnya atas administrasi pelabuhan laut dan udara oleh Aceh; dan (3) pembentukan institusi Wali Negara untuk Aceh (Hamid Awaludin, 2008). Anggota GAM Nurdin Abdurrahman bersama

penasehat GAM Damien Kingsbury mengajukan 3 masalah utama perundingan yang mereka sebut sebagai Three Point program (TPU), yakni (1) Program End of Hostilities atau penciptaan Aceh sebagai zona damai yang melibatkan kekuatan-kekuatan internasional sebagai penjaminnya; (2) Political Parties and Elections atau pendirian partai-partai politik lokal dan pemilu bebas; dan (3) Formal Acceptance atau parlemen RI membuat undang-undang tentang Aceh berperintahan sendiri atau self government (Fachry Ali et.al, 2008). Dari delegasi RI, ada beberapa catatan isu krusial yang dibuat oleh Hamid Awaludin, yakni (1) isu otonomi khusus-self government; (2) pendirian partai-partai politik lokal di Aceh; (3) lambang, himne dan bendera Aceh; (4) masalah Amnesti dan pembebasan tahanan/perunding GAM sebelumnya (Hamid Awaludin, 2008). Isu-isu tersebut menjadi bahan perdebatan selama jalannya perundingan selama sekitar 6 bulan sejak Januari 2005-Juli 2005 dalam 5 putaran perundingan. Jika isu-isu krusial itu ditabulasikan dengan 2 kategori yakni isu krusial menurut delegasi GAM dan delegasi RI, maka akan tampak isu mana yang sulit diputuskan dalam perundingan, seperti di bawah ini:

**Tabel Isu-Isu Yang Dinyatakan sebagai Isu Krusial Oleh Delegasi GAM dan RI
Dalam Perundingan Helsinki 2005**

No	Isu Krusial	Delegasi GAM	Delegasi RI	Keterangan
1	Otonomi Khusus- <i>Self Government</i>	V	V	Pembahasan hampir deathlock, dengan kesepakatan jalan tengah, “ <i>Governing Aceh</i> ”
2	Pembentukan Zona Damai Internasional di Aceh	V	-	Ditolak
3	Amnesti dan Pembebasan Tahanan Juru	V	V	Disetujui dengan perdebatan panjang

	Runding GAM sebelumnya			
4	Pembentukan Institusi Wali Nangroe Aceh	V	-	Disetujui
5	Perdagangan Langsung Aceh dengan luar negeri	V	-	Disetujui dalam kontrol RI
6	Pendirian Partai-Partai Politik Lokal di Aceh	V	V	Pembahasan hampir deathlock dan menjadi agenda terakhir
7	Lambang, Himne dan Bendera Aceh	V	V	Disetujui

Sumber : Dikompilasikan dan diolah oleh penulis dari berbagai sumber

Isu perdagangan langsung antara Aceh dengan pihak luar negeri, isu pembentukan lembaga Wali Nangroe serta lambang dan bendera Aceh, disambut baik oleh delegasi pemerintah RI dengan disetujui tanpa perdebatan yang mengganggu jalannya perundingan. Sementara itu, isu tentang pembentukan zona perdamaian internasional ditolak oleh delegasi RI karena dianggap sebagai upaya internasionalisasi masalah Aceh (Hamid Awaludin, 2008). Pembahasan 3 isu lainnya yakni otonomi khusus-self government, amnesti, dan partai lokal di Aceh sangat menguras energi berbagai pihak yang terkait, bahkan hampir saja menemui jalan buntu, dengan kesepakatan terakhir terjadi untuk isu partai lokal pada putaran terakhir pula, Juli 2005.

Berpijak pada Kesepakatan Helsinki itu, Pemerintah RI kemudian merevisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Nangroe Aceh Darusalam (NAD), menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Dalam pertimbangan hukumnya, Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa diberlakukannya UU tentang Pemerintahan Aceh adalah, (1) bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang; (2) bahwa

berdasarkan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi; (3) bahwa ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syariat Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat sehingga Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (4) bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Aceh belum dapat sepenuhnya mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan serta pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia sehingga Pemerintahan Aceh perlu dikembangkan dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik; dan (5) bahwa bencana alam gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Aceh telah menumbuhkan solidaritas seluruh potensi bangsa Indonesia untuk membangun kembali masyarakat dan wilayah Aceh serta menyelesaikan konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 11 Tahun 2006).

Untuk menerapkan UUPA tersebut, dibutuhkan minimal 4 peraturan pemerintah, dan 6 peraturan presiden serta aturan lainnya yang harus disiapkan oleh pemerintah pusat (Tri Ratnawati dalam Ikrar Nusa Bhakti, 2008). Dari sisi Pemerintah Aceh, untuk melaksanakan UUPA diperlukan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Qonun atau peraturan daerah Aceh minimal 59 qonun (Zaini Abdullah, 2016). Pembentukan qonun itu secara terus-menerus dilakukan sampai saat ini, meskipun masih belum dapat memenuhi semuanya. Hal itu, kata Gubernur Zaini Abdullah, karena pemerintah pusat juga belum menyelesaikan penyusunan peraturan pemerintah yang sangat pokok, yakni tentang pengaturan pengelolaan minyak dan gas bumi, dan peraturan tentang pengelolaan dan administrasi pertanahan di Aceh, serta pengaturan tentang pengelolaan pelabuhan laun dan udara di Aceh sebagaimana diamanatkan dalam MOU Helsinki 2005.

Perspektif GAM terhadap MOU Helsinki

Dari hasil wawancara yang mendalam terhadap para stake holders, dan mantan aktifis GAM yang berada di Aceh maupun di luar negeri, dan wawancara dengan para mantan kombatan di tingkat grassroot, terdapat beberapa kategori persepsi mereka terhadap perdamaian Helsinki 2005.

Pertama, dari kalangan elite GAM dan mantan aktifis GAM, MOU Helsinki merupakan pencapaian optimal yang maknanya tidak lain adalah ‘Aceh berpemerintahan sendiri’ dalam

artian 'self government' sebagai penurunan gradasi dari tuntutan awal GAM yakni 'Aceh Merdeka'. Istilah yang mereka gunakan untuk menjelaskan konsep 'self government' ini kepada para pendukung GAM adalah 'Bangsa Aceh merdeka di dalam Negera Indonesia'. Frasa itu biasa digunakan di dalam rapat-rapat partai lokal dan dalam kampanye-kampanye pilihan gubernur Aceh pada tahun 2017. Instrumen yang mereka yakini dapat mendukung prinsip 'self government' ini adalah adanya partai lokal, lembaga wali nanggroe, lambang dan bendera Aceh, serta kompensasi secara ekonomi khususnya penerimaan pajak dan hasil bumi di Aceh yang mencapai 70%.

Kedua, kategori ini muncul dari kalangan grassroot yang menanyakan dengan bernuansa menagih kepada elit GAM tentang bagaimana nasib Aceh Merdeka pasca perdamaian. Secara psikologis, elit GAM yang selama hampir 30 tahun mengindoktrinasi Bangsa Aceh dengan cita-cita Aceh Merdeka, sangat tidak mudah untuk tiba-tiba mengatakan bahwa Aceh tidak jadi merdeka karena sudah berdamai, maka mereka mengatakan 'MOU Helsinki adalah langkah awal menuju Aceh Merdeka', artinya Aceh setelah perdamaian Helsinki adalah memasuki masa-masa transisi menuju kemerdekaan. Dengan pernyataan ini, maka elite GAM dapat mengajak masyarakat pendukungnya untuk menjaga perdamaian Aceh. Bisa di mengerti bahwa, jika elit GAM tiba-tiba menyatakan Aceh tidak jadi merdeka pasca perdamaian Helsinki, maka warga pendukung GAM yang mayoritas berpendidikan rendah, justru akan menganggap elit mereka telah berkhianat kepada Bangsa Aceh, dan itu sangat berbahaya.

Ketiga, kategori yang muncul dari kelompok pendukung dan aktifis Aceh merdeka di luar negeri, yang menyatakan bahwa MOU Helsinki telah merugikan Bangsa Aceh karena para elit yang berunding telah menjual cita-cita Aceh Merdeka dengan konsep 'otonomi luas atau otonomi khusus', bahkan 'self government pun tidak'. Mereka menentang keras hasil kesepakatan Helsinki, terlebih lagi setelah lahirnya UUPA Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang dinilai oleh banyak kalangan telah mereduksi banyak klausul dalam MOU secara sepihak tanpa persetujuan dengan Bangsa Aceh. Kelompok ini bahkan menuding bahwa para juru runding GAM telah mengkhianati Hasan Tiro sebagai Wali Nanggroe. Mereka mengklaim bahwa Hasan Tiro saat pulang ke Aceh itu pemahamannya adalah Aceh telah merdeka, sehingga meledak kemarahannya ketika tahu bahwa Aceh hanya berstatus otonomi khusus.

Beragamnya perspektif dalam melihat perdamaian Aceh tersebut tentu dipahami dengan baik oleh para elit di Aceh sehingga setiap langkah yang diambil selalu mempertimbangkan untuk meminimalisir resiko-resiko yang dapat memecah belah Bangsa Aceh. Partai-partai lokal

yang merupakan elit-elit GAM sangat berhati-hati dalam mengemas isu-isu krusial dalam MOU untuk meraih dukungan dari masyarakat Aceh yang dahulu menjadi simpatisan GAM, dengan tetap menega komitmen perdamaian dengan RI.

Di sisi lain, perspektif Pemerintah RI terhadap MOU Helsinki yang direpresentasikan melalui sikap Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan RI, serta Lemhanas, adalah tidak lain sebagai perjanjian perdamaian antara RI dengan GAM dengan pemberian otonomi khusus kepada Aceh. Kekhususan itu tercermin melalui instrumen pengelolaan pemerintahan Aceh seluas-luasnya, pendirian partai-partai lokal, kelembagaan Wali Nanggroe dan kompensasi ekonomi, serta berlakunya syariat Islam di Aceh. Khusus tentang berlakunya syariat Islam di Aceh ini, pihak GAM menyatakan itu adalah agenda Jakarta dan bukan inisiatif perunding GAM. Dari sikap dasar pemerintah RI ini, terlihat jelas masih berlakunya konsep NKRI yang belum memberikan ruang bagi terselenggaranya 'self government' di Aceh.

Partai-partai lokal dalam sikap resminya secara terang-terangan mengkritik sikap pemerintah pusat itu dalam komitmennya untuk menerapkan dan mentaati MOU, baik itu dalam turunannya dalam UUPA Tahun 2006 maupun aturan-aturan turunan lainnya seperti peraturan pemerintah dan peraturan presiden yang mereka nilai sebagai pelanggaran terhadap MOU Helsinki. Yang menjadi sikap khas partai-partai lokal adalah, mereka berbeda dalam beberapa isu di dalam pemerintahan internal Aceh, namun secara solid memiliki sikap yang sama terhadap pemerintah pusat dalam kaitannya dengan MOU Helsinki. Partai-partai lokal dan mantan elit dan aktifis GAM melihat bahwa MOU Helsinki adalah sebuah pencapaian yang dapat mengantarkan Aceh menuju 'self government' secara damai dan demokratis.

Cara Aceh Menerapkan MOU Helsinki

Berdasarkan MOU Helsinki dan UUPA Tahun 2006, pemerintahan Aceh yang secara politik dikuasai oleh partai-partai lokal yang didukung oleh pendukung GAM, memiliki kewenangan yang luas untuk menyusun Qanun tentang berbagai urusan terkait keistimewaan Aceh sesuai dengan aspirasi lokal. Pembentukan qonun oleh DPRA dan Pemerintah Aceh tidak sepenuhnya sesuai yang diharapkan, namun sering berbenturan dengan pemerintah pusat yang memiliki kewenangan untuk mengesahkan peraturan lokal itu. Kasus persengketaan qonun tentang Lembaga Wali Nanggroe dan Bendera/Lambang Aceh menjadi contoh tidak berkesudahannya perbedaan kepentingan dan penafsiran itu.

DPRA berpendirian bahwa apa yang telah disepakati di dalam MOU Helsinki adalah sesuatu yang operasional dapat dilakukan selama itu menjadi kewenangan Pemerintahan

Aceh dan telah diundangkan di dalam qonun. Pengesahan dan pengawasan dari pemerintah pusat atas suatu qonun yang materinya telah disepakati dalam MOU, bukanlah berarti dapat membatalkan suatu qonun. Contoh, qonun tentang lembaga wali nanggroe (LWN), meskipun pemerintah pusat keberatan dan tidak menyetujui 21 poin materi yang ada di dalam qonun tersebut, DPRA tetap mengesahkannya, dan bersama-sama Pemerintah Aceh tetap memberlakukan terselenggaranya LWN, mulai dari memilih seorang Wali Nanggroe, melantiknya, dan membuatkan istana sebagai pusat aktifitasnya, berikut dengan lembaga-lembaga yang bernaung di bawah seorang WN. Anggaran belanja LWN juga dianggarkan di dalam APBD Aceh. Semuanya berjalan, tanpa gangguan dari pemerintah pusat.

Hal serupa juga terjadi dengan qonun bendera Aceh yang sampai hari ini belum selesai diskusinya dengan pemerintah pusat, namun, qonun nomor 3 Tahun 2013 itu masih banyak yang melaksanakannya di Aceh Besar, Pidie, Bireun, dan Sabang. Memang di Banda Aceh tidak ada bendera Aceh yang berkibar, sekalipun di Kantor DPRA, namun di pelosok-pelosok wilayah Aceh masih bertebaran. Gejala ini sama persis dengan strategi bersihnya baliho partai lokal, terutama Partai Aceh yang nuansa warnanya mirip sekali dengan Bendera GAM, di Kota Banda Aceh, namun akan banyak dijumpai bendera, baliho dan warna cat bangunannya yang mirip bendera Aceh di wilayah-wilayah Aceh yang lain.

Dari interview dengan para aktifis partai lokal, terutama PA, dapat diungkapkan bahwa bendera Aceh yang mirip bendera GAM dan PA, boleh bersih dari wilayah Banda Aceh, namun bendera Aceh akan 'berkibar tinggi-tinggi di dalam hati Bangsa Aceh'. Frasa terakhir ini merupakan ungkapan yang mendalam tentang kecintaan rakyat Aceh akan Bendera lambang bangsanya, dan akan dikibarkan dengan caranya sendiri, misalnya dengan mengecat rumah atau toko, atau pos ronda dengan warna benderanya Aceh itu. Dan, itu ada dimana-mana di wilayah Aceh dari Sabang sampai wilayah Aceh Timur.

Dari temuan ini dapat dimaknai bahwa beberapa qonun yang terkait dengan kekhasan Aceh memiliki dukungan kuat di tengah masyarakat, dan qonun merupakan upaya institusionalisasi lambang dan norma sosiologis historis itu menjadi formal dan terlembaga. Dengan kewenangan untuk membentuk qonun, DPRA memiliki alasan yang kuat untuk meng-institusionalisasikan norma dan lambang sosiologis Aceh ke dalam qonun pada bidang-bidang yang lebih luas, sebagaimana hukum syarah, jinayah dan muamalah.

Kesimpulan

Gerakan politik Aceh akan terus berlanjut pasca perjanjian damai sebab para pemimpin Aceh yang *note bene* adalah para mantan pemimpin GAM percaya bahwa MOU dapat membawa Aceh kepada sistem pemerintahan yang ‘self government’ melalui proses yang damai dan demokratis.

Untuk mencapai ‘self government’ melalui MOU, maka pemerintah Aceh menyusun, menetapkan dan memberlakukan berbagai qonun terutama yang berkaitan dengan kekhususan Aceh karena hal ini mendapat dukungan yang kuat dari hampir seluruh wilayah Aceh, dengan atau tanpa persetujuan dari pemerintah pusat.

Daftar Pustaka

Ali, Fachri Monoarfa, S, Effendy, Bahtiar, (2008), *Kalla Perdamaian Aceh, Lspeu, Indonesia*

Awaludin, Hamid, (2008), *Damai di Aceh: Catatan Perdamaian RI-GAM di Helsinki, CSIS, Jakarta, Indonesia*

Aspinall, Edward, (2005), ‘*The Helsinki Agreement: A More Promising Basis for Peace in Aceh?*’, Policy Studies nomor 20.

Bhakti, Ikrar Nusa, (2008), *Beranda Perdamain: Tiga Tahun Pasca MOU Helsinki*, Pustaka Pelajar Yogyakarta

Barron, P. and Clark, S. (2006), ‘*Decentralizing Inequality? Center-Periphery Relations, Local Governance, and Conflict in Aceh*’, Social Development Paper no. 39, Conflict Prevention and Reconstruction Unit, World Bank.

Basri, Hasan, (2014), ‘*Konflik Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat Pasca MOU Helsinki; Self Government*’, Jurnal Politika, Vol. 5, Nomor 1, 2014

Darmansjah, Djumala (2013), ‘*Soft Power untuk Aceh: Resolusi Konflik dan Politik Desentralisasi*’, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Effendy, Fenty, (2015), *Ombak Perdamaian: inisiatif dan Peran JK Mendamaikan Aceh*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta

Kimura, Ehito (2015). The Struggle for Justice and Reconciliation in Post-Suharto Indonesia. Southeast Asian Studies, Vol. 4, No. 1, April 2015, pp. 73-93. <http://englishkyoto-seas.org/2015/04/vol-4-no-1-kimura>

Kingsbury, Damien, (2015), '*Timing and Sequencing Peace in Aceh*', Center for Research on Peace and Development (CRPD), KU, Leuven, Belgium.

Nurhasim, Moch. Dkk, (2008), '*Transformasi Politik Gerakan Aceh Merdeka*', Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta

Paul Jackson and Zoe Scott (2007), '*Local Government in Post Conflict Environment*', UNDP, Oslo Development Centre. UN Report- Commissioned Paper

Suh, Jiwon. 2015. *Preemptive Transitional Justice Policies in Aceh, Indonesia*. Southeast Asian Studies, Vol. 4, No. 1, April 2015, pp. 95-124. <http://englishkyoto-seas.org/2015/04/vol-4-no-1-suh/>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, SETNEG, 2001

Khatib, Hakim, (2015), *The Political Instrumentalization of Islam in the Middle East*, <https://www.fragilestates.org/2015/05/13/the-political-instrumentalization-of-islam-in-the-middle-east-by-hakim-khatib/>

Taufik Al Mubarak, (2015), (http://www.acehtrend.co/kenapa-aceh-tak-jadi-merdeka/?subscribe=success#blog_subscription-2)

Pemetaan Partai Politik di Timur Tengah; Partai Politik Zuama dan Non-Zuama di Libanon

Mohammad Riza Widyarsa
Universitas Maritim Raja Ali Haji
(tedungok@yahoo.com)

Abstract

This paper explained the differences between political parties in Lebanon. There are two kinds of political parties, one which are led by zuama (the traditional leaders of Lebanon). While the other are the ones that are led by non-zuama political leaders.

The methodolgy used in this paper is qualitative methods based on documents and library research. While structurism theory used to analyze the role of the non-zuama political leaders, in Lebanese politics.

This paper argued that the political parties that led by the non-zuama political leaders have the same power and leverage with those led by the zuama. The non-zuama political parties became worthy contestans in Lebanese politics, as long as the leaders plays within the structures as effective agents.

Key words: *zuama, non-zuama, political parties, Lebanon.*

Latar Belakang

Libanon adalah sebuah negara yang terletak di Timur Tengah. Sebagai sebuah negara, Libanon mempunyai sejarah politik yang panjang dan kompleks, terutama dengan adanya perang saudara yang berkecamuk terutama di era 1980an. Sejarah negara tersebut bisa ditarik dari masa Babylonia sampai ke masa pemerintahan imperium Ummayah, Abbasiyah, Turki Usmani, masa kolonial Eropa, masa pasca kemerdekaan, serta masa Perang Saudara pada dekade 1980an dan awal 1990an. Wilayah Libanon terletak di Timur Tengah, berbatasan dengan Suriah dan Israel dengan luas 4,015 meter persegi. Mempunyai populasi sekitar 6 juta penduduk (World Bank, 2016), yang terdiri dari berbagai macam agama dengan berbagai macam sekte. Kelompok agama yang ada di Libanon adalah umat Muslim yang terdiri dari Sunni dan Syiah, Druze, Kristen Maronite, Ortodoks Yunani dan Armenia, Kristen Protestant serta Katolik, yang terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu.

Dengan penduduk yang heterogen ini, Libanon mempunyai sistem pemerintahan yang cukup unik. Masyarakat Libanon yang terdiri dari berbagai macam agama ini terkonsentrasi pada wilayah tertentu, seperti warga Druze yang berada di Pegunungan Shuf, Muslim Sunni di Tripoli (Libanon Utara), warga Syiah yang berada di selatan Libanon, serta warga Maronite yang berada di Pegunungan Libanon dan Beirut Timur. Tidak adanya kelompok yang jauh mendominasi dari yang lain (dalam jumlah populasi), maka sistem pemerintahan Libanon dibagi dengan sistem konfesionalisme yang dibagi menurut kelompok agama yang ada.

Masalah yang melatar belakangi terjadinya sistem ini akan dijelaskan lebih lanjut. Sistem pemerintahan Libanon adalah republik dengan seorang presiden yang dibantu dengan seorang perdana menteri. Sistem konfesional diterapkan pada pembagian kekuasaan yang ditetapkan dengan Pakta Nasional 1943 (*Al-Mithaq al-Wathani*) setelah negara itu merdeka dari penjajahan Prancis. Dalam Pakta Nasional tersebut ditetapkan bahwa warga Kristen Maronite mendapat jatah menjadi presiden, porsi perdana menteri diberikan kepada warga Muslim Sunni. Sedangkan warga Syiah mendapatkan jatah sebagai ketua parlemen dan warga dari agama lainnya mendapatkan jatah di parlemen, dan anggota kabinet (Cleveland, 2004: 229-230).

Tentu dengan diterapkannya sistem republik, Libanon mempunyai partai politik yang kemudian bertarung pada pemilihan parlemen. Seperti halnya di negara lain, para anggota partai ini yang kemudian akan menduduki jabatan sebagai anggota parlemen dan anggota kabinet, termasuk mereka yang akan menjadi presiden dan perdana menteri. Hal yang unik dari partai politik di Libanon adalah adanya partai yang dibentuk dan dipimpin oleh patron politik yang terdiri dari keluarga tertentu yang sudah menerapkan kekuasaan politik mereka, bahkan dari masa pemerintahan Turki Usmani. Di lain pihak, ada partai politik yang dibentuk dan dipimpin oleh para politikus yang bukan berasal dari keluarga berpengaruh. Para keluarga yang berpengaruh ini disebut dengan *zaim* (singular) atau *zuama* (jamak), yang berarti tokoh masyarakat. Para *zuama* ini terdiri dari berbagai keluarga yang mendirikan basis kekuatannya menurut komunitas agama mereka masing-masing. Seperti keluarga Hamadeh yang memimpin komunitas Syiah, keluarga Karami yang memimpin warga Sunni, sedangkan warga Druze yang dipimpin oleh keluarga Jumblatt, dan keluarga Gemayel serta Chamoun yang berkompetisi untuk menjadi pemimpin warga Kristen Maronite. Kepemimpinan para keluarga ini sudah terjadi sejak lama sebelum Libanon merdeka dari Prancis, bahkan sejak masa pemerintahan Turki Usmani para *zuama* sudah diberikan kekuasaan atas pemerintahan lokal dan penarikan pajak, seperti keluarga Shihab yang menjadi *zaim* Kristen Maronite dan menjadi kepanjangan tangan pemerintahan Turki Usmani di Pegunungan Libanon (Traboulsi, 2007). Para *zuama* ini tetap mempertahankan kekuasaan mereka dari masa ke masa, dengan menjadi patron bagi warga mereka. Baik itu sebagai tuan tanah yang memperkerjakan banyak warga atau sebagai tokoh masyarakat yang mengayomi urusan warga sekitar (bahkan sampai dengan urusan keluarga dan mencari pekerjaan). Akan tetapi sebagai gantinya, para *zuama* ini mendapatkan loyalitas dari para warga yang mengikuti mereka. Hal ini dimanfaatkan untuk mendapatkan suara di parlemen dan aksi-aksi politis lainnya, bahkan sampai pada pembentukan milisi saat perang saudara terjadi (Winslow, 1996: 86-87). Praktek ini yang kemudian membuat para

zuama tetap mendapatkan kekuatan politik di Libanon, baik itu pada masa perang maupun pada masa damai. Namun demikian bukan berarti politikus yang bukan berasal dari keluarga zaim tidak mempunyai tempat dalam politik Libanon. Politikus seperti Nabih Berri, Hassan Nasrallah dan mendiang Rafiq Hariri bukan berasal dari keluarga zaim, namun mereka mempunyai pengaruh yang besar di negara tersebut. Untuk menjawab fenomena tersebut, makalah ini akan menjelaskan mengapa masih ada partai politik yang dipimpin oleh para zuama dan mengapa ada warga yang memilih untuk mendukung partai politik non-zuama.

Metodologi

Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan penulisan narasi deskriptif. Dengan paradigma strukturalis, menurut teori strukturasi Anthony Giddens. Makalah ini akan menjelaskan para politikus non-zuama yang menjadi agen dalam perubahan struktur politik di Libanon yang sebelumnya sangat didominasi oleh para zuama. Bagaimana peran mereka sehingga dapat menjadi politikus yang berpengaruh, bahkan dalam beberapa hal dapat mengalahkan pengaruh para zuama itu sendiri.

Partai Politik Zuama

Seperti yang telah diterangkan di atas, peran zuama dalam politik sudah tercatat sejak masa pendudukan Turki Usmani di Libanon. Konsekuensi dari peran zuama ini adalah, mereka menempati posisi-posisi penting di dalam pemerintahan (birokrasi), bahkan karena mereka berada dalam strata sosial yang tinggi, mereka juga menjadi kaum intelektual (Eisenstadt & Roniger, 1984: 92). Hal ini membuat posisi zuama dalam masyarakat Libanon menjadi kuat, sehingga pada masa pendudukan Prancis dan pada awal kemerdekaan, peran mereka sebagai kaum intelektual dan politikus menjadi dominan.

Pada masa kemerdekaan, peran zuama masih sangat besar dengan banyaknya presiden dan perdana menteri yang berasal dari kalangan zuama, terutama sejak kemerdekaan sampai pada akhir 1980an, semua presiden berasal dari kalangan zuama. Tidak hanya itu, bahkan para zuama juga menduduki kursi di parlemen sejak kemerdekaan sampai dengan pemilu 2018. Para politikus zuama ini berasal dari komunitas Kristen (terutama Maronite), Muslim Sunni, dan Druze. Dari sekian banyak keluarga zuama di Libanon, salah satu keluarga yang berpengaruh adalah keluarga Gemayel yang memimpin komunitas Kristen Maronite. Pada masa sebelum kemerdekaan, sampai pada masa awal kemerdekaan dari Prancis (pada tahun 1943), Pierre Gemayel menjadi salah satu aktivis kemerdekaan dan pada akhirnya menjadi anggota parlemen.

Pierre sendiri juga membentuk sebuah partai yaitu Partai Kataeb yang masih mengikuti pemilu pada tahun 2018. Kedua anaknya Bashir dan Amin Gemayel, bahkan sempat menjadi presiden Libanon, dan kedua cucunya Nadim dan Sammy Gemayel terpilih menjadi anggota parlemen pada pemilu 2018.

Peran zuama pada komunitas Kristen Maronite masih sangat kental di Libanon. Bahkan pada masa pasca kemerdekaan pola patron-client ini masih berjalan. Seperti yang dikatakan oleh Eisenstadt dan Roniger, bahwa pola ini tidak hilang dan bahkan masih bisa beradaptasi bahkan pada bentuk pemerintahan yang demokratis (Eisenstadt & Roniger, 1984: 46). Ini kemudian yang menyebabkan mengapa para zuama masih bisa menjalankan kekuasaan mereka di Libanon yang sudah menerapkan sistem demokrasi melalui pemilu sejak meraih kemerdekaan dari Prancis pada tahun 1943. Para zuama masuk menjadi calon anggota legislatif, bahkan membuat partai politik untuk dapat menjadi bagian dari sistem demokrasi. Selain itu para zuama juga masih dapat mempertahankan kekuasaan mereka dengan menjaga solidaritas di antara komunitas yang mereka pimpin. Solidaritas menjadi elemen yang sangat penting untuk menjaga keutuhan komunitas, bahkan menjadi sebuah simbol identitas (Eisenstadt & Roniger, 1984: 50). Dalam hal ini keluarga Gemayel berusaha untuk menjaga solidaritas komunitas yang mereka pimpin dengan menjaga keutuhan dan identitas warga Maronite. Agama sebagai sebuah identitas, ternyata memang bisa menjadi sebuah resep yang ampuh untuk menjaga soliditas, apalagi agama di Libanon memang menjadi sebuah identitas dari seseorang bahkan ditingkat keluarga. Di Libanon agama menjadi sebuah hal yang turun temurun, sangat jarang sekali bagi seseorang untuk pindah agama. Umumnya warga Libanon memeluk agama tertentu, karena itu adalah agama yang diyakini oleh keluarganya selama ratusan tahun. Oleh karenanya, banyak pemuka agama yang menekankan pentingnya agama dan keluarga, sehingga seseorang akan sangat susah untuk berpindah agama dari agama yang dianut oleh keluarganya. Bahkan kadang pemuka agama mengatakan bahwa seseorang terlahir dari keluarga dengan agama tertentu karena itu adalah takdir (Joseph, 2011: 158). Ketika hal ini dikonstruksikan kepada seseorang, maka identitas agama dan keluarga bisa menjadi sebuah identitas politik. Konstruksi sosial seperti inilah yang seringkali dicamkan oleh para zuama untuk menjaga komunitasnya.

Warga Kristen Maronite mempunyai sejarah yang panjang di Libanon. Mereka datang ke Libanon pada sekitar abad ke 8 untuk mengungsi dari persekusi Paus yang menganggap para penganut Maronite sebagai bid'ah. Barabad-abad lamanya mereka berada di Libanon dan hidup secara komunal dengan membentuk desa, sampai pada kota-kota kecil. Pada masa pendudukan Turki Usmani kehidupan warga Maronite berubah menjadi sebuah komunitas yang mempunyai

kekuatan politik yang disegani. Hal ini terjadi karena Bashir II dari keluarga Shihab berhasil menjadi pemimpin dan berhasil menyatukan komunitas Maronite di bawah pengaruhnya. Tidak hanya itu, tetapi dia juga berhasil menggeser pengaruh keluarga zuama Druze di Pegunungan Libanon (Aulas, 1985). Sampai pada akhirnya Bashir II kemudian menjadi pemimpin lokal Libanon yang ditunjuk oleh Turki Usmani untuk mengatur kestabilan dan penarikan pajak. Sejak saat itu posisi warga Maronite di Libanon menjadi kuat secara politis. Mereka masuk ke dalam birokrasi dan menjadi kaum intelektual, belum lagi pengaruh dari para pendeta mereka. Posisi ini terus berjalan sampai dengan masa pendudukan Prancis, yang cenderung menggunakan warga Maronite untuk menjalankan roda birokrasi di Libanon.

Demi menjaga keutuhan warga Maronite, beberapa tokoh Maronite kemudian membentuk Partai Kataeb (Kata'ib) pada tahun 1936, di mana Pierre Gemayel menjadi salah satu pendiri. Partai ini sejak awal didirikan untuk menyalurkan aspirasi warga Kristen, terutama Maronite, yang ingin agar Libanon menjadi sebuah negara dengan identitas sendiri, dan bukan bagian dari identitas Arab (Entelis, 1974: 21). Pembentukan partai ini sudah menandakan pentingnya simbol agama, dalam hal ini Kristen Maronite, sebagai sebuah identitas politik. Bahkan untuk memastikan keutuhan identitas tersebut, Partai Kataeb dibentuk menjadi sebuah partai yang sentralistik, dan semua keputusan dilakukan melalui sistem dari atas ke bawah. Indoktrinasi dan kepatuhan terhadap partai menjadi syarat bagi kader partai (Entelis, 1974). Ini menyebabkan Partai Kataeb masih menjadi bagian penting di dalam peta politik Libanon, bahkan partai ini berhasil melewati beberapa perang saudara, dengan membentuk milisi Phalangist sebagai sayap militer partai.

Dengan berjalannya waktu, keluarga Gemayel mendominasi Partai Kataeb, terutama ketika Pierre menunjuk kedua anaknya Amin dan Bashir untuk memimpin milisi Phalangist pada saat Perang Saudara di era 1970an dan 1980an. Sebagai salah satu tokoh pendiri negara Libanon, Pierre Gemayel memainkan peran yang penting dalam politik di negara tersebut pasca kemerdekaan. Dia secara reguler terpilih di parlemen, dan partai Kataeb selalu mendapatkan kursi yang cukup signifikan. Pierre Gemayel sendiri bahkan sempat menjadi menteri, seperti pada tahun 1970an. Pada masa Perang Saudara (1975-1990) peran keluarga Gemayel dengan partai Kataeb mereka sangat vital dalam kubu Maronite. Milisi Phalangist dari Partai Kataeb menjadi milisi Maronite terkuat, terutama ketika Bashir Gemayel (putra kedua Pierre) menjadi pemimpin milisi tersebut. Bashir berhasil mengalahkan milisi Maronite lainnya yang dipimpin oleh keluarga Chamoun, Edde dan Frangieh, dalam kontestasi untuk menjadi pemimpin di dalam kubu warga Maronite. Tentu dengan mempunyai milisi yang kuat, keluarga Gemayel

menjadi salah satu keluarga yang mempengaruhi jalannya Perang Saudara. Bahkan Beirut Timur yang dikuasai oleh warga Kristen, mayoritas diduduki oleh milisi Phalangist. Tidak hanya itu, opini publik dari warga Kristen, terutama warga Maronite, selama Perang Saudara juga didominasi oleh narasi dari Milisi Phalangist (Aulas, 1985: 22). Pada akhirnya di bulan Agustus 1982, Bashir Gemayel diangkat menjadi presiden dan terus berusaha untuk menyingkirkan musuh-musuh politiknya, yaitu kelompok Muslim, Druze dan Kristen yang menentang dominasi keluarga Gemayel. Akan tetapi kurang dari sebulan menjabat sebagai presiden, Bashir meninggal akibat dibunuh dengan sebuah bom, sejak saat itu kakaknya Amin diangkat menjadi presiden. Amin berusaha untuk tetap mempertahankan posisi sebagai presiden di tengah Perang Saudara, tetapi dengan segala tantangan yang ada, Amin dapat mempertahankan posisinya sampai pada tahun 1988.

Pada masa Pasca Perang Saudara, Amin Gemayel memimpin Partai Kataeb untuk menjadi salah satu partai yang tergabung dalam Aliansi 14 Maret. Aliansi ini didirikan pasca pembunuhan Perdana Menteri Rafik Hariri oleh kelompok yang kemungkinan didukung oleh Suriah. Sejak saat itu putra Rafik yaitu Saad Hariri melalui Partai Gerakan Masa Depan yang didirikan oleh ayahnya, membentuk aliansi dari beberapa partai politik yang anti terhadap peran Suriah di dalam politik dalam negeri Libanon (Salloukh, Bassel F. et. al., 2015: 28). Amin Gemayel yang selama Perang Saudara selalu melawan keterlibatan Suriah, kemudian bergabung dengan aliansi tersebut, yang kemudian dinamakan Aliansi 14 Maret. Pada bulan April 2014, Amin bahkan sempat untuk mencalonkan diri untuk menjadi presiden. Akan tetapi usahanya tidak membuahkan hasil, bahkan dia hanya mendapatkan satu suara di parlemen (<https://www.bbc.com/news/world-middle-east-27124574>). Kemudian pada pemilu tahun 2018 Partai Kataeb, meskipun hanya memperoleh 3 suara di parlemen, berhasil mendapatkan kursi untuk Nadim Gemayel (putra dari Bashir) dan Sammy Gemayel (putra dari Amin). Hal ini bisa menjadi tolok ukur bahwa keluarga Gemayel masih mempunyai peran yang besar di dalam politik Libanon di masa yang akan datang.

Jika warga Maronite mempunyai keluarga Gemayel yang sempat mendominasi politik Libanon di antara warga Maronite, bagi warga Druze keluarga Jumblatt adalah keluarga Druze yang paling dominan di dalam politik warga Druze di Libanon. Naiknya keluarga Jumblatt dimulai oleh Kamal Jumblatt, meskipun keluarga ini sudah menjadi keluarga bangsawan Druze sejak masa Turki Usmani, namun pamor dari keluarga ini naik sejak Kamal Jumblatt mendirikan Partai Sosialis Progresif (PSP). Kamal Jumblatt adalah seorang aktifis politik yang berasal dari keluarga bangsawan Druze di Pegunungan Shuf. Selama karirnya dia berusaha

untuk membuat sebuah narasi bahwa Libanon bukanlah sebuah negara yang didominasi oleh dan untuk warga Kristen saja. Kamal berusaha untuk memberikan narasi sejarah bahwa warga Druze mempunyai peran yang penting dalam membentuk Libanon, bahkan sejak masa Turki Usmani. Sejarah tentang pentingnya peran pemimpin Druze, Fakhir al-Din yang berkuasa pada tahun 1591-1635, selalu didengungkan oleh Kamal. Bagaimana Fakhir al-Din menjadi seorang pemimpin yang berhasil mengalahkan dominasi bangsawan Maronite untuk kemudian menjadi penguasa di Pegunungan Libanon. Dalam masa berkuasanya, dia dinyatakan sebagai seorang pemimpin Arab yang berhasil menegosiasikan kekuasaannya dengan Turki Usmani. Al-Din berhasil berkuasa sebagai pemimpin lokal di Libanon dengan persetujuan gubernur Usmani di Damaskus, paling tidak untuk sementara waktu. Perjuangannya dalam melawan Turki Usmani ketika perjanjian tidak lagi disepakati, menjadikan Fakhir al-Din, paling tidak di mata warga Druze, sebagai pahlawan Arab Libanon yang berjuang untuk kemerdekaan wilayah Libanon dari pendudukan Turki Usmani (Hazran, 2009). Fakhir al-Din sendiri pada akhirnya ditangkap dan dieksekusi oleh pemerintah Usmani pada tahun 1635. Hal ini lah yang menjadi narasi sejarah Libanon dari Kamal Jumblatt. Oleh sebab itu ketika Kamal membentuk PSP pada tahun 1949 tujuan dari PSP adalah menjalankan sosialisme moderat, sekularisme (untuk menghilangkan dominasi warga dari agama tertentu di Libanon) dan desentralisasi (Hazran, 2009: 466). Tidak hanya itu, Kamal dan PSP nya membentuk milisi Druze pada saat Perang Saudara. Milisi ini menjadi salah satu milisi yang mempunyai kekuatan yang signifikan di kubu Pro-Arabisme. Seringkali milisi PSP warga Druze dapat menangkal serangan milisi Phalangist dan kadangkala berhasil menguasai wilayah yang dikuasai oleh milisi Phalangist (Winslow, 1996). Karena perannya yang signifikan pada saat Perang Saudara, akhirnya pada tahun 1977, Kamal Jumblatt tewas dibunuh oleh lawan-lawan politiknya. Sejak saat itu anaknya, Walid mengambil alih tampuk pimpinan PSP dan milisi Druze.

Walid Jumblatt tidak hanya mengikuti jejak ayahnya untuk menjadi pemimpin Druze, PSP dan milisi Druze, namun dia juga mengikuti ideologi ayahnya. Walid berusaha konsisten untuk memperjuangkan Libanon yang sekuler dan sosialis. Pasca meninggalnya sang ayah, Walid dan milisi Druzenya tetap berada dalam kelompok yang mendukung Nasionalisme Arab. Hanya saja Walid lebih dianggap sebagai pemimpin Druze, berbeda dengan ayahnya yang dianggap sebagai pemimpin Druze sekaligus dianggap sebagai pemimpin kubu Muslim di Libanon (Abu Khalil, 1985: 31). Walid seringkali dianggap lebih mementingkan kepentingan warga Druze, meskipun benar bahwa faktanya PSP didominasi oleh warga Druze, dalam manuver politiknya. Tetapi dengan manuver politiknya itu, warga Druze menjadi sangat

kompak dan bersatu di bawah kepemimpinan Walid Jumblatt (Abu Khalil, 1985: 32). Keunikan dari ideologi politik Walid adalah, dia menyerukan sekularisme (Abu Khalil, 1985: 32-35). Dengan menyerukan sekularisme, Walid Jumblatt secara langsung atau tidak berusaha untuk menghancurkan peran zuama, di mana agama menjadi fondasi bagi para zuama untuk menjaga dan berkuasa di komunitas mereka. Akan tetapi Walid tetap menjaga tradisi sebagai zuama Druze, dengan menerima warisan kekuasaan dari sang ayah, Kamal, dan Walid sendiri terlihat sudah mempersiapkan anaknya Taymour, untuk menjadi penggantinya. Taymour Jumblatt sendiri terpilih menjadi anggota parlemen dari PSP pada pemilu 2018. Meskipun sudah mempersiapkan Taymour, Walid tetap berperan penting dalam politik Libanon. Dengan menggunakan jumlah kursi PSP di parlemen, hasil dari pemilu 2009, Walid menyadari bahwa PSP dapat menjadi penyeimbang antara Aliansi 14 Maret dan Aliansi 8 Maret. Ketika terjadi *deadlock* dalam pemilihan presiden antara tahun 2014-2016 (menurut konstitusi Libanon, presiden dipilih oleh parlemen), Walid memainkan peran sebagai *kingmaker* dengan mengalihkan dukungannya dari Henri Hilou ke Michel Aoun, yang pada akhirnya menyebabkan Aoun terpilih menjadi presiden Libanon pada Oktober 2016 (<https://gulfnews.com/news/mena/lebanon/lebanon-s-kingmaker-jumblatt-secures-8-votes-for-aoun-1.1920298>). Bagi warga Druze jelas bahwa keluarga Jumblatt masih mempunyai peran penting secara politik, terutama sejak Taymour, cucu dari Kamal meneruskan jejak kakek dan ayahnya di dunia politik.

Partai Politik Non-Zuama

Berbeda dengan warga Maronite, warga Syiah Libanon mempunyai kondisi yang berbeda. Jika warga Maronite masih mengandalkan para zuama, warga Syiah sebaliknya. Ada dua hal yang membuat warga Syiah tidak lagi mengandalkan para zuama mereka. Pada masa Turki Usmani, sampai pada dekade 1970an, para zuama Syiah, seperti keluarga al-As'ad dan keluarga Hamadeh memainkan peran penting di dalam politik Libanon. Namun pada akhirnya situasi tersebut berubah oleh dua hal. Warga Syiah selama bertahun-tahun sejak masa kemerdekaan, selalu menjadi warga kelas dua di Libanon. Percaturan politik hanya berputar pada warga Maronite, Muslim Sunni dan Druze, sedangkan warga Syiah merasa termarginalkan. Meskipun warga Syiah mendapatkan tempat sebagai Ketua Parlemen, akan tetapi secara politis mereka berada di bawah warga Sunni, dan para zuama Syiah terlihat puas akan hal itu (Faksh, 1991: 37). Namun bagi warga Syiah pada umumnya hal tersebut tidak merubah nasib mereka.

Sejak sebelum masa kemerdekaan ditahun 1943, banyak warga Syiah, bahkan yang berpendidikan sekalipun, harus bermigrasi ke luar negeri untuk mendapatkan kehidupan yang

lebih layak. Ketika sebagian dari mereka yang bekerja di luar negeri ini sudah mendapatkan uang yang cukup, banyak di antara mereka kembali dan memulai bisnis di Libanon, terutama di Beirut pada dekade 1960an. Banyak dari mereka yang kembali ini merasa bahwa mereka mempunyai peran cukup untuk membuat warga Syiah menjadi lebih baik, dengan modal uang dan keahlian mereka. Akan tetapi aspirasi mereka tidak diakomodir oleh para zuama, sehingga para masyarakat *middle class* Syiah ini mulai mencari alternatif lain untuk menyalurkan aspirasi mereka (Shanahan, 2005: 74). Faktor kedua adalah bagi warga Syiah yang tidak mempunyai cukup uang untuk bermigrasi ke luar negeri, banyak yang kemudian pindah dari desa-desa mereka ke Beirut Selatan. Hal ini disebabkan karena rasa tidak aman karena Perang Saudara, dan keinginan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Konsekuensi dari ini adalah para zuama tidak lagi mempunyai pengaruh pada warga dari desa mereka yang pindah ke Beirut (Faksh, 1991: 39). Pertama, dengan berpindahnya warga Syiah dari desa atau kota mereka ini berarti para zuama tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan mereka, sehingga warga Syiah harus mencari jalan keluar sendiri untuk kehidupan yang lebih layak, entah itu ke luar negeri atau pindah ke Beirut. Kedua, warga Syiah terutama mereka yang sudah lahir atau semasa kecilnya berada di Beirut, tidak lagi mempunyai ikatan emosi dengan desa asal orang tua mereka, sehingga mereka tidak lagi mempunyai ikatan dengan para zuama. Faktor inilah yang menyebabkan pengaruh zuama Syiah menjadi menurun. Hal ini ditambah dengan munculnya warga Syiah yang kemudian dapat menggantikan peran zuama sebagai aktor yang dapat menyalurkan aspirasi warganya. Seperti Musa al-Sadr, ulama Syiah yang mendirikan *Harakat al-Mahrumin* (Gerakan Mereka yang Terlupakan) pada tahun 1974, Nabih Berri yang menjadi pemimpin Partai AMAL pada tahun 1980, dan Hassan Nasrallah, ulama Syiah yang menjadi pimpinan Hizbullah. Tidak ayal lagi, para warga Syiah yang tidak lagi mengikuti para zuama mereka, bergabung ke dalam gerakan dan partai-partai Syiah ini, dan meninggalkan para zuama mereka.

Partai AMAL (Gerakan Resimen Perlawanan Lebanon) mulanya adalah sayu militer dari Harakat al-Mahrumin dan yang pada akhirnya menjelma menjadi partai politik. Partai ini adalah salah satu partai yang signifikan di Libanon dan mayoritas kader dan pendukungnya adalah warga Syiah. Meskipun partai ini berasal dari gerakan yang didirikan oleh Musa al-Sadr, namun pasca hilangnya al-Sadr pada tahun 1978, membuat AMAL menjadi sebuah partai yang terlihat menggusung sistem sekularisme, meskipun tidak dapat dikatakan sepenuhnya sekuler. Partai ini masih menyatakan bahwa Al-Qur'an adalah panduan dari partai ini, namun kesatuan Libanon sebagai sebuah republik yang berdaulat dan usaha untuk menghapuskan sistem feodal

dari Libanon serta anti kapitalisme, menjadi visi misi dari partai ini. Bahkan bagi warga Syiah Partai AMAL ditafsirkan sebagai partai Syiah yang menggusung sekulerisme (Shanahan, 2005: 108-109). Partai ini juga menjadi semakin maju ketika diketuai oleh Nabih Berri seorang pengacara warga Syiah yang semula aktif di Partai Ba'ath (sebuah partai sosialis di dunia Arab). Sejak saat Berri menjadi ketua partai di tahun 1980, Partai AMAL memainkan peran vital di dalam perpolitikan Libanon, Berri sendiri sejak tahun 1992, sampai pada pasca pemilu 2018, selalu terpilih menjadi ketua parlemen dan sempat menjabat sebagai menteri pada tahun 1984-1992.

Peran AMAL dan Berri juga sangat signifikan pada masa Perang Saudara. Milisi AMAL sempat menjadi “pelindung” warga Syiah terutama pada dekade 1980an, bahkan milisi AMAL menjadi salah satu tulang punggung aliansi kelompok pendukung Pan-Arabisme. Berri sendiri tidak pernah absen dalam berbagai perundingan di masa Perang Saudara. Berri menghadiri perundingan di Jenewa tahun 1983, Laussane 1984 dan Damaskus 1985. Bahkan dalam perundingan tersebut Berri mempunyai peran penting sebagai wakil dari kelompok pendukung Pan-Arabisme. Bahkan aksi militer yang dilakukan oleh milisi Amal selama Perang saudara, seringkali membuat posisi tawar aliansi Pan-Arabisme menjadi tinggi. Seperti keinginan mereka untuk membuat parlemen Libanon menjadi lebih representatif, dengan memberikan kursi yang lebih banyak kepada warga non-Kristen. Pasca Perang Saudara, AMAL menjadi anggota aliansi 8 Maret, bersama Hizbullah. Partai ini di bawah kepemimpinan Berri, bersama dengan partai anggota aliansi 8 Maret berhasil meloloskan Michel Aoun sebagai presiden pada tahun 2016. Namun yang pasti Berri berhasil mempertahankan posisinya sebagai ketua parlemen di tahun 2018.

Selain partai AMAL, partai Syiah yang populer di Libanon adalah Hizbullah. Partai ini berbeda dengan AMAL yang cenderung sekuler, Hizbullah memiliki platform Politik Islam yang mengacu pada Iran. Hizbullah didirikan pada tahun 1982, namun mulai aktif dalam merekrut anggota pada tahun 1983. Sejak tahun 1992 Hizbullah dipimpin oleh Hassan Nasrallah, seorang ulama Syiah Libanon yang dahulu adalah mantan aktifis AMAL. Hizbullah pada mulanya dipimpin oleh Ayatollah Fadlallah, yang secara ideologi mengacu pada Iran, namun secara politik luar negeri mengacu pada Suriah. Ini dikarenakan menurut Hizbullah Suriah bisa menjadi sekutu yang kuat dalam menghadapi Israel dan Amerika Serikat, terutama karena faktor geografis yang dekat dan kepentingan Suriah di Libanon bisa sejalan dengan garis politik Hizbullah (Rabil, 2011: 63). Bagi Hizbullah Israel menjadi salah satu musuh yang harus diperangi, tidak hanya karena masalah ideologi, namun aksi militer Israel (terutama invasi

Israel tahun 1982) seringkali menyasar wilayah Libanon Selatan yang menjadi tempat tinggal mayoritas warga Syiah.

Seperti yang dikatakan di atas, ideologi Hizbullah adalah Politik Islam. Dalam hal ini adalah politik Islam Syiah dengan memakai *wilayat al-faqih* (ajaran politik Ayatollah Khomeini) sebagai acuan (Shanahan, 2005: 114). Tidak hanya sampai disitu, Hizbullah juga merasa bahwa sebagai organisasi, harus dapat melindungi dan membawa aspirasi warga Muslim Syiah di Libanon. Karena belajar dari Perang Saudara di era 1980an dan invasi Israel tahun 1982, warga Syiah harus berjuang sendiri (Norton, 2007: 37-38). Sehingga menurut Hizbullah jalan perjuangan senjata adalah hal yang lumrah, ini yang kemudian membuat Hizbullah mempunyai milisi sendiri, bahkan menjelma menjadi salah satu milisi yang terkuat di Libanon. Pendudukan Israel di Libanon Selatan antara tahun 1982-2000 sendiri membuat Hizbullah menjadi populer dikalangan warga Syiah. Sejak melakukan invasi pada tahun 1982, Israel menduduki Libanon Selatan dan membuat *buffer zone* di wilayah tersebut untuk mencegah serangan dari kelompok perjuangan Palestina. Namun warga Libanon melihat ini adalah aksi pendudukan oleh Israel. Namun tentara Libanon terlihat seperi tidak dapat berbuat apa-apa terhadap pendudukan Israel ini. Bahkan Israel membentuk milisi yang terdiri dai warga Libanon yaitu SLA (*South Lebanese Army*) pimpinan Mayor Haddad, untuk menjaga kepentingan Israel di Libanon Selatan. Satu-satunya entitas yang secara konsisten melakukan aksi pellawanan militer/gerilya terhadap pendudukan Israel ini adalah Hizbullah. Aksi militer terhadap Israel terus mereka lakukan sejak 1982 sampai pasca hengkangnya Israel dari Libanon Selatan pada tahun 2000. Karena aksi militer yang terus menerus dilakukan oleh Hizbullah memakan korban dari pihak Israel, bahkan serangan Hizbullah sampai masuk ke wilayah Israel sendiri, pada tahun 2000 pemerintah Israel memutuskan untuk meninggalkan Libanon Selatan. Pada bulan Mei tahun 2000, tentara Israel pergi dari Libanon Selatan, dan Hizbullah menghancurkan milisi SLA yang tersisa (Norton, 2007: 90-91). Popularitas Hizbullah dan Hassan Nasrallah terus menanjak ketika Israel melakukan invasi pada tahun 2006. Invasi Israel ini didasari oleh kasi penculikan tentara Israel oleh Hizbullah. Ketika invasi, milisi Hizbullah terbukti efektif dalam menangkal gerakan pasukan Angkatan Darat Israel. Bahkan Emile Lahoud, presiden Libanon pada masa itu, membela Nasrallah dan Hizbullah, yang dianggap berjasa dalam menjaga kedaulatan Libanon (Rabil, 2011: 100). Sejak saat itu, Nasrallah dan partainya, Hizbullah menjadi populer. Pada masa pemilu 2009 dan 2018, Hizbullah menjadi anggota Aliansi 8 Maret. Seperti halnya AMAL, Hizbullah juga memainkan peran penting dalam menyatukan suara warga Syiah untuk meloloskan Michel Aoun menjadi

presiden di tahun 2016. Pada pemilu 2018 Hizbullah meraih 11 kursi di parlemen, ini menunjukkan bahwa partai ini masih mempunyai kekuatan politik yang signifikan.

Kesimpulan

Peran partai politik non-zuama jelas memberikan warna baru dalam politik Libanon. Para zuama tidak lagi mendominasi politik, namun mereka harus mengakui dan bahkan bekerjasama dengan para politikus non-zuama yang mempunyai kekuatan dan daya tawar yang tidak kalah besar dari mereka. Apabila kita melihat secara struktur, para politikus non-zuama, dalam hal ini Nabih Berri dan Hassan Nasrallah, menjadi agen dalam politik Libanon. Anthony Giddens menyatakan bahwa agen adalah mereka yang dapat melakukan perubahan di dalam struktur dan bahkan dapat menerapkan kuasa mereka terhadap masyarakat. Hal ini berbeda dengan agensi yang mana mereka juga agen perubahan, namun hal yang mereka lakukan dapat merubah masyarakat tanpa mereka sadari (Giddens, 2010: 14-23). Berri dan Nasrallah secara sadar betul mereka melakukan perubahan dalam peta politik Libanon, dengan menyingkirkan kekuasaan para zuama Syiah. Bahkan apa yang mereka lakukan tertuang dalam visi misi dari partai yang mereka pimpin. Ini membuat apa yang mereka lakukan memang dilakukan secara sadar untuk menggantikan peran zuama dalam politik warga Syiah. Namun seperti yang dikatakan oleh Giddens, bahwa agen harus melakukan perubahan dalam struktur itu sendiri (Giddens, 2010). Hal ini yang dilakukan oleh Berri dan Nasrallah dengan mendirikan partai politik yang lengkap dengan milisi bersenjata. Ini disebabkan karena dalam politik Libanon, sebuah partai politik bisa dianggap kuat jika memiliki kekuatan bersenjata (milisi), seperti Partai PSP dan Kataeb. Berri dan Nasrallah melakukan hal yang sama dengan AMAL dan Hizbullah, sehingga kedua partai ini dianggap sebagai partai kuat warga Syiah dan bahkan terbukti dalam pertempuran saat Perang Saudara di era 1980an dan invasi Israel pada tahun 2006. Juga masih dalam struktur yang ada, Berri dan Nasrallah membawa partai mereka ke dalam parlemen dan melakukan koalisi dengan partai lain. Hal ini membuat Berri dan Nasrallah dapat membuat AMAL dan Hizbullah menjadi partai yang kuat di dalam percaturan politik di parlemen Libanon.

Daftar Pustaka

Abu Khalil, As'ad. (1985) "Druze, Sunni and Shiite Political Leadership in Present-Day Lebanon", *Arab Studies Quarterly* 7 (4): 28-58.

Aulas, M. C. (1985) "The Socio-Ideological Development of the Maronite Community.

The

- Emergence of the Phalages and the Lebanese Forces”, *Arab Studies Quarterly* 7 (4): 1-27.
- Eisenstadt, S. N. & Louis Roniger. (1980) “Patron-Client Relations as a Model of Structuring Social Exchange”, *Comparative Studies in Society and History* 22 (1): 42-77.
- Entelis, J. P. (1973) “Structural Change and Organizational Development in the Lebanese Kata’ib Party”, *Middle East Journal* 27 (1): 21-35.
- Faksh, Mahmud A. (1991) “ The Shi’a Community of Lebanon: A New Assertive Political Force”, *Journal of South Asian and Middle Eastern Studies* XIV (3): 33-56.
- Hazran, Yusri. (2009) “Between Authenticity and Alienation: The Druzes and Lebanon’s History”, *Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London* 72 (3): 459-487.
- Joseph S. (2011) “Political Familism in Lebanon”, *The Annals of the American Academy of Political and Social Science* (636): 150-163.
- Cleveland, William L. (2004). *A History of the Modern Middle East*. 3rd ed. Colorado: Westview Press.
- Eisenstadt S. N. & Roniger L. (1984) *Patrons, Clients and Friends; Interpersonal Relations and the Structure of Trust in Society*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Giddens, Anthony. (2010). Terj. *Teori Strukturasi: Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Norton, Augustus R. (2007). *Hezbollah: a Short History*. New Jersey: Princeton University Press.
- Rabil, Robert G. (2011). *Religion, National Identity, and Confessional Politics in Lebanon*.

New York: Pelgrave MacMillan.

Sallaoukh, Bassel F. et. al. (2015). *The Politics of Sectarianism in Postwar Lebanon*.
London:

Pluto Press.

Shanahan, Rodger. (2005). *The Shi'a of Lebanon; Clans, Parties and Clerics*. London:
Tauris

Academic Studies.

Traboulsi, Fawwaz. (2007). *A History of Modern Lebanon*. London: Pluto Press.

Winslow, Charles. (1996). *Lebanon; War & Politics in a Fragmented Society*. London:
Routledge.

<https://www.bbc.com/news/world-middle-east-27124574>

[https://gulfnews.com/news/mena/lebanon/lebanon-s-kingmaker-jumblatt-secures-8-
votes-for-aoun-1.1920298](https://gulfnews.com/news/mena/lebanon/lebanon-s-kingmaker-jumblatt-secures-8-votes-for-aoun-1.1920298)

[https://www.upi.com/Archives/1984/03/13/The-leaders-of-Lebanons-warring-
factions-reached-agreement-today/5602448002000/](https://www.upi.com/Archives/1984/03/13/The-leaders-of-Lebanons-warring-factions-reached-agreement-today/5602448002000/)

[https://www.the961.com/news/winning-candidates-2018-lebanese-parliamentary-
elections](https://www.the961.com/news/winning-candidates-2018-lebanese-parliamentary-elections)

Konflik Yaman: Houthi Menyerang, Arab Saudi Merespon

Ahmad Fuadi
Universitas Riau
ahmad.fuadi@lecturer.unri.ac.id

Abstract

This paper aims to identify and analyze the response of Saudi Arabia in facing the impact of Yemen internal conflict. Yemen is one of the countries in the Middle East region which has strategic meaning especially geographically. Houthi conquered Yemen capital, Sana'a in 2014. This incident invited various responses from Middle East countries, especially Saudi Arabia which very condemned Houthi's action.

The approach used in this paper is qualitative approach. To make this paper understandable, descriptive method is used by collecting secondary data and then, describing and analyzing it, then illustrates it to be more clearly based on the facts that seem as such before making conclusion.

The conclusion of this paper concludes that Saudi Arabia responds the Houthi's movement in Yemen by launching some military operations like Decisive Storm, Renewal of Hope, and Golden Victory. Saudi Arabia also formed The Arab Coalition which most of its members are the Gulf States. The series of the Saudi military operations in Yemen aimed to stop Houthi's goal in conquering Yemen which can be a serious threat for Saudi Arabia.

Keywords: *Decisive Storm, Golden Victory, Houthi, Renewal of Hope, Saudi Arabia*

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis respon Arab Saudi dalam menghadapi dampak konflik internal Yaman terhadap stabilitas kawasan Timur Tengah. Yaman merupakan salah satu negara di kawasan Timur Tengah yang memiliki arti strategis terutama dari aspek geografis. Namun, pada tahun 2014, kelompok pemberontak Houthi berhasil menguasai ibukota Yaman, Sana'a. Peristiwa ini kemudian mendapat respon dari berbagai negara di kawasan Timur Tengah, terkhususnya Arab Saudi yang sangat menentang peristiwa ini.

Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Metode ini bermaksud mencari data, kemudian menguraikan dan menganalisa data tersebut, menulisnya serta menggambarkan secara lebih jelas berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya sehingga pada akhirnya dapat diambil kesimpulan.

Hasil tulisan ini menyimpulkan bahwa Arab Saudi merespon konflik di Yaman dengan melakukan serangkaian operasi militer bersama dengan Koalisi Arab seperti operasi Decisive Storm, Renewal of Hope, dan Golden Victory. Berbagai operasi tersebut dilakukan dalam rangka menghentikan pergerakan Houthi menguasai Yaman yang dapat menjadi ancaman serius bagi Arab Saudi.

Kata Kunci : *Arab Saudi, Decisive Storm, Golden Victory, Houthi, Renewal of Hope*

PENDAHULUAN

Yaman merupakan sebuah wilayah yang terletak di kawasan Timur Tengah. Dalam diskursus-diskursus mengenai Timur Tengah, Yaman yang merupakan negara yang telah lama dikenal sebagai salah satu negara miskin di dunia ini sangat jarang mendapat perhatian dari para akademisi hubungan internasional. Menurut *Laporan Human Development Index* tahun

2015, Yaman menempati peringkat 168 dari 188 dalam daftar negara miskin di dunia. Laporan ini didasarkan pada pengukuran tingkat harapan hidup, pendidikan, dan standar kehidupan. Sebelum perang pecah, populasi masyarakat Yaman melebihi 20 juta jiwa dan diprediksi akan terus tumbuh menjadi dua kali lipat di tahun 2035.

Sebuah studi yang dilakukan oleh *Pew Research Center* tahun 2014 menjelaskan bahwa Yaman merupakan negara yang memiliki intensitas konflik yang sangat tinggi yang penyebab konflik yang dominan adalah faktor agama. Yaman berada di posisi ke-8 dalam ranking negara gagal menurut *The Failed States Index* tahun 2012. Penilaian tersebut didasari oleh 12 faktor. Faktor-faktor tersebut adalah tekanan demografi, jumlah warga yang mengungsi, jumlah kelompok perlawanan, jumlah masyarakat yang keluar dari negara, tingkat krisis ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat legitimasi pemerintah, tingkat kepuasan publik, tingkat keamanan, tingkat pelanggaran hukum dan HAM, kemunculan kelompok-kelompok kepentingan, dan terakhir tingkat intervensi dari negara lain. Berdasarkan penilaian atas faktor-faktor diatas, Yaman berada dalam status sangat mengkhawatirkan.

Yaman merupakan salah satu negara yang terkena dampak *Arab Spring* yang mulai mengemuka tahun 2011. Sebelum peristiwa Arab Spring terjadi, skala konflik yang terjadi tidak sampai mengganggu stabilitas nasional Yaman. Rangkaian awal eskalasi konflik Yaman dimulai pada awal tahun 2011 dimana sekelompok rakyat Yaman yang pro-demokrasi melakukan aksi turun ke jalan untuk memprotes agar mantan Presiden Yaman, Ali Abdullah Saleh untuk mundur dari jabatan. Saleh telah berkuasa di Yaman selama lebih kurang 33 tahun. Pada saat itu, Saleh menolak mundur dari jabatannya sebagai presiden.

Aksi protes yang hingga menelan korban tersebut terus berlanjut selama lebih kurang 9 bulan. Akibat desakan dari dunia internasional terkhususnya negara anggota *Gulf Cooperation Council* (GCC), Saleh akhirnya mundur sebagai presiden pada bulan November tahun 2011. (The Guardian, 2011).

Mundurinya Saleh sebagai presiden Yaman, justru semakin membuat Yaman menjadi tidak stabil. Berbagai kelompok radikal muncul dengan membawa agendanya masing-masing. Salah satu kelompok tersebut adalah Houthi. Konflik di Yaman semakin menjadi perhatian dunia ketika Houthi berhasil menguasai ibukota Yaman, Sana'a, pada bulan September tahun 2014. Peristiwa ini kemudian direspon oleh berbagai negara di dunia, salah satunya Arab Saudi. Arab Saudi yang merupakan salah satu anggota kelompok GCC merespon tindakan Houthi dengan berbagai bentuk untuk membendung semakin kuatnya kekuatan dan pengaruh Houthi di Yaman.

METODE

Ilmu sosial merupakan ilmu yang dinamis. Kondisi ini disebabkan banyak variabel-variabel yang mempengaruhinya. Keadaan sosial dapat dilihat dari banyak sudut pandang. Oleh karena itu untuk menarik suatu kesimpulan, dibutuhkan berbagai sumber sebagai bahan pertimbangan. Pada artikel ini, penulis menggunakan metode riset kualitatif (*qualitative research*). Data-data yang digunakan merupakan data sekunder yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Riset-riset sosial merupakan riset yang cukup kompleks karena melibatkan banyak sekali sudut pandang sehingga kemampuan analisis ilmu sosial dalam menganalisa suatu fenomena yang terjadi sangat penting. Riset-riset sosial tidak jarang melibatkan dua lingkungan yang berbeda. Dalam setiap lingkungan, tentunya dipengaruhi oleh berbagai variabel dan aktor yang berbeda pula. Di lingkungan yang berbeda tersebut tentunya juga. Riset dengan pendekatan kualitatif bertujuan mengembangkan kepekaan konsep dan penggambaran realitas yang tidak tunggal atau jamak. (Idrus, 2009)

Jika ditinjau secara teoritis, penelitian kualitatif dimulai dengan cara mendefinisikan konsep yang sangat umum, yang mengalami perubahan karena hasil penelitian sehingga variabel dapat merupakan produk atau hasil. Penelitian yang bersifat kualitatif dilakukan dengan cara menganalisis data-data yang telah dikumpulkan, disusun, dan dianalisis dengan meneliti keterkaitan antara faktor-faktor yang berhubungan dengan fenomena yang sedang diteliti agar fenomena tersebut tersebut menjadi mudah dipahami baik dari segi penyebab terjadinya fenomena tersebut hingga cara penyelesaiannya.

Menurut penulis, pendekatan kualitatif dengan metode *library research* sangat cocok digunakan untuk meneliti permasalahan yang sedang dibahas ini. Peperangan di Yaman disebabkan oleh berbagai variabel yang sangat sulit untuk dikuantitatifkan, terkhususnya perang ideologi. Untuk menganalisis tentang respon dari Arab Saudi dalam konflik internal Yaman dibutuhkan berbagai macam sumber yang valid. Metode ini dilaksanakan dengan pengoperasian konsep-konsep dan teori sehingga dapat mendekati kebenaran. Metode penelitian kualitatif yang digunakan diharapkan dapat membantu penelitian dalam menjawab dan menjelaskan permasalahan yang sedang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Kemunculan Houthi

Gerakan pemberontak Houthi merujuk pada gerakan kesukuan dan keagamaan yang berasal wilayah pegunungan Marran di provinsi Sa'adah. Kelompok Houthi pada awalnya merupakan kelompok keagamaan yang digerakkan oleh salah satu tokoh yang sangat terkenal di wilayah Sa'adah yaitu Badaruddin al-Houthi. Ia merupakan penceramah yang berpengaruh hingga akhir hayatnya pada tahun 2010. Kelompok Houthi berkaitan erat dengan salah satu kelompok Islam Zaidi. Ditinjau dari doktrin keagamaannya, kelompok Zaidi ini lebih dekat kepada ajaran Syi'ah 5 Imam (Bertentangan dengan paham Syiah 12 Imam yang banyak dianut di Iran, Iraq, dan Lebanon). Houthi muncul setelah peristiwa runtuhnya Keimaman Zaidiyah yang telah berkuasa di utara Yaman sejak tahun 897 M hingga 1962 M.

Pada tahun 1980, Badrudin al-Houthi mulai melakukan propaganda "Kebangkitan Zaidi" dengan dasar revolusi sosial dengan mengangkat isu penolakan terhadap pemerintah Yaman yang mengacuhkan keberadaan masyarakat di utara Yaman dan pembatasan berkembangnya Gerakan Salafisme.

Gerakan pemberontak Houthi semakin aktif terlibat dalam isu perbatasan dan isu kekuatan asing di Yaman mulai tahun 2000. Beberapa negara yang sering dikritik oleh kelompok Houthi adalah Arab Saudi dan Amerika Serikat. Kelompok Houthi mengangkat isu nilai-nilai tradisional dan fobia dominasi asing di wilayah utara Yaman, terkhususnya cara Arab Saudi dalam menanggapi konflik perbatasan di utara Yaman. Kelompok Houthi mengangkat slogan "Mati Amerika Serikat, Mati Israel, Terkutuklah Yahudi, Kemenangan Untuk Islam"

Pada awalnya Houthi berkonflik dengan pemerintah Yaman dengan menggunakan strategi perang gerilya. Pada awalnya di tahun 2004, pejuang Houthi merupakan mereka yang punya keterikatan dengan Badrudin al-Houthi seperti keluarga dan para muridnya. Namun, pada tahun 2005, simpatisan mereka bertambah pasca pengumuman kematian Badrudin akibat serangan dari pemerintah Yaman di Saa'dah. Peristiwa tersebut mengundang kemarahan orang-orang Zaidi dan suku-suku di utara Yaman. Pemerintah Yaman kemudian menjadi musuh bersama yang harus dilawan oleh mereka.

Houthi dan pemerintah tercatat telah berperang sebanyak enam kali. Perang terakhir terjadi pada 11 Agustus 2009 hingga 11 Februari 2010. Pada perang ini, pemberontak Houthi memiliki kekuatan yang cukup kuat untuk memukul mundur seluruh tentara Yaman yang berada di Sa'adah. Houthi melancarkan serangan besar-besaran dengan menggunakan kendaraan lapis baja yang perbandingan kekuatannya setara 3:2 dibanding kekuatan tentara Yaman di Sa'adah. Kelompok Houthi juga berupaya melancarkan serangan ke wilayah Arab Saudi bagian selatan namun berhasil dicegah dengan serangan udara oleh Arab Saudi. (Knights, 2018)

B. Penguasaan Sana'a

Mundurnya Saleh pada November tahun 2011, memberikan kesempatan bagi Houthi untuk mengambil keuntungan kekosongan kekuasaan dengan memperluas pengaruh dan merekrut pasukan militer dari wilayah utara Yaman. Wilayah utara Yaman terkhususnya Provinsi Saa'dah merupakan wilayah yang telah lama dikenal sebagai basis kekuatan kelompok Houthi. Pada bulan Maret tahun 2011, militer Yaman berhasil diusir keluar dari wilayah Saa'dah dan suku-suku yang menentang Houthi juga berhasil ditekan. Selanjutnya, Houthi secara resmi mengubah namanya menjadi *Ansar Allah* (Partisan of God) dan mengembangkan stasiun televisi *Al-Masirah (The Journey)* yang berbasis di Beirut, Lebanon, dengan dukungan dari Hizbullah.

Pada tahun 2012, Houthi mengontrol hampir seluruh wilayah provinsi Sa'ada dan sebagian besar wilayah di provinsi Amran, al-Jawf, Hajjah. Keberhasilan Houthi dalam memperluas wilayah kekuasaannya tidak terlepas dari kepandaiannya dalam mengkonsolidasikan kekuatan suku-suku yang ada di Yaman. Konflik kekuasaan di tingkat pemerintah pusat Yaman menyebabkan kebijakan-kebijakan pemerintah terutama terkait dengan kesejahteraan rakyat semakin tidak efektif sehingga menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Isu-isu ini kemudian digunakan Houthi untuk mempengaruhi rakyat Yaman terkhususnya yang berada di wilayah utara Yaman.

Houthi terus melancarkan serangan-serangan terhadap markas-markas militer Yaman dan menyita persenjataan mulai dari persenjataan ringan maupun persenjataan berat. Selain itu, Iran dan Hizbullah dari Lebanon terindikasi turut membantu pergerakan kelompok Houthi. Pasca turunnya Saleh sebagai presiden Yaman, ia justru berbalik arah dengan menjalin aliansi bersama Houthi melawan pemerintah transisi Yaman yang dipimpin oleh Mansour Hadi. Saleh yang dikenal sebagai seorang jenderal militer memiliki loyalis beserta dengan peralatan

militernya. Aliansi yang dijalin oleh Saleh dan Houthi membuahkan hasil dengan dikuasainya Sana'a melalui kudeta militer pada 21 September 2014 (VoA Islam, 2014).

Setelah menguasai Sana'a, Houthi bergerak menguasai kota-kota lainnya di Yaman. Pada 14 Oktober 2014, Houthi menguasai daerah strategis di selatan Pelabuhan Hodeidah tanpa mendapatkan perlawanan dari petugas keamanan setempat saat memasuki provinsi Dhamar dan Ibb. Di kota Ibb, Houthi juga tidak mendapatkan perlawanan saat puluhan mobil pengangkut para pemberontak Houthi memasuki kota yang terletak 150 kilometer dari Sana'a tersebut. Tidak hanya sampai disitu saja, Houthi terus bergerak ke kota Taiz yang terletak 50 kilometer dari kota Ibb dan berhasil menguasainya (Tempo.co, 2014). Dikuasainya Sana'a juga berarti dikuasainya persenjataan penting Yaman seperti keseluruhan brigade tank, meriam, persenjataan anti-pesawat, persenjataan laut, dan biro-biro intelijen nasional. Houthi segera melakukan reformasi pemerintahan di Sana'a pada bulan Januari 2015.

Respon Arab Saudi

Ekspansi yang dilakukan oleh Houthi di Yaman menimbulkan kekhawatiran Arab Saudi sebagai salah satu tetangga Yaman. Tidak lama setelah Houthi mendeklarasikan pemerintahannya di Sana'a, Hadi sebagai Presiden Yaman mendeklarasikan Aden, sebuah kota pelabuhan di Selatan Yaman sebagai ibukota sementara Yaman. Hadi berhasil melarikan diri dari Sana'a dan pergi menuju Aden. Selain itu, Hadi menyatakan perang terhadap Houthi dan mengirimkan permintaan secara resmi kepada negara GCC untuk memberikan bantuan militer bagi Hadi untuk membendung dan menghentikan ekspansi Houthi di Yaman. Hadi juga mengklaim perkembangan Houthi di Yaman tidak terlepas dari campur tangan Iran.

Permintaan Hadi kemudian disambut oleh Arab Saudi. Arab Saudi memandang bahwa Houthi merupakan gerakan pemberontak yang berafiliasi dengan Iran. Sebagaimana yang diketahui, Arab Saudi dan Iran merupakan dua negara yang sedang saling menunjukkan supremasi kekuatannya di kawasan Timur Tengah. Arab Saudi mengajak anggota negara GCC untuk ikut terlibat dalam menghentikan ekspansi Houthi di Yaman. Seiring berjalannya konflik, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab tercatat sebagai negara teluk yang terlibat aktif dalam menghadang pergerakan Houthi di Yaman.

Arab Saudi memulai intervensi militernya di tahun 2015. Intervensi militer Arab Saudi di Yaman dimulai dengan operasi militer *Decisive Storm*. Operasi militer ini dimulai pada 26 Maret 2015 dengan bantuan mayoritas negara anggota GCC seperti Qatar, Uni Emirat Arab, Maroko, dan negara-negara lainnya. Tujuan dari operasi *Decisive Storm* adalah untuk

membendung laju pergerakan Houthi dan memastikan bantuan kemanusiaan mengalir untuk masyarakat Yaman.

Stabilitas Yaman sangat berarti bagi negara-negara anggota GCC. Jika dilihat dari sudut pandang yang lebih luas, apabila Yaman sepenuhnya dikuasai Houthi, maka hal tersebut akan menguntungkan bagi Iran. Houthi dikenal sebagai *proxy* Iran di Yaman. Tidak ada laporan pasti mengenai seberapa banyak Iran telah membantu Houthi dalam mencapai misinya menguasai Yaman. Namun beberapa laporan mengindikasikan kebenaran hal tersebut. Pada 23 Januari tahun 2013, kapal perang milik Amerika Serikat, USS Farragut, menghentikan sebuah kapal yang bernama Jihan-1 milik Iran. Jihan-1 didapati mengangkut peledak C4 sebanyak 16.716 unit, Roket Katyusha 122-milimeter, peluru dan baterai sistem pertahanan udara portabel Misagh-2, serta 2,6 ton peledak RDX. Keseluruhan persenjataan ini serupa dengan persenjataan yang digunakan Iran dalam konflik Irak dan Lebanon. (Knights, 2018)

Sebagaimana yang diketahui, Iran tengah menerima sanksi larangan ekspor senjata oleh Dewan Keamanan PBB melalui resolusi 1747 tahun 2007 yang salah satu pasalnya menyatakan “*Iran shall not supply, sell, or transfer directly or indirectly from its territory or by nationals or using its flag vessel or aircraft any arms or related material*”. Resolusi Dewan Keamanan PBB diperluas dengan Resolusi 2266 pada bulan Februari tahun 2016 yang salah satu poin utamanya adalah menghimbau negara-negara anggota untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk tidak melakukan perdagangan senjata dengan Iran.

Grup riset *Conflict Armament Research* (CAR) mengungkapkan melalui laporannya bahwa kapal perang Australia, *HMAS Darwin*, menyita peluncur roket RPG-7 buatan Iran sebanyak 100 unit pada 27 Februari 2016 di sekitar perairan Arab. Tidak lama berselang setelah itu, kapal perang Perancis, *FS Provence*, juga menyita 64 unit senapan runduk Hoshdar-M dan 2.000 unit senapan serbu AKM. Semua senjata tersebut ditemukan dalam keadaan baru dan diyakini berasal dari gudang persenjataan nasional Iran yang terindikasi dengan nomor seri yang berurutan. (The Washington Institute, 2016)

Operasi *Decisive Storm* didasari dengan operasi udara dan laut. *Decisive Storm* yang pada awalnya ditujukan untuk menguasai wilayah udara Yaman membuahkan hasil. Arab Saudi dan koalisi negara GCC berhasil menguasai wilayah udara Yaman.

Melihat pengaruh Iran yang semakin berkembang, dominasi Houthi di Yaman akan menimbulkan ancaman bagi stabilitas pengaruh Arab Saudi di Yaman. Yaman memiliki arti strategis bagi negara-negara teluk. Instabilitas Yaman akan memberikan dampak lanjutan terkhususnya terhadap kehidupan perekonomian negara-negara kawasan terutama Arab Saudi,

Mesir, dan Sudan yang berbatasan langsung dengan Laut Merah. Membiarkan Yaman dikuasai oleh aktor non-negara yang tidak bertanggungjawab dapat mengganggu perdamaian global. Arab merespon dengan doktrin dari Raja Salman untuk terus memantau dan melindungi Yaman dari para pemberontak. (Shabaneh, 2015)

Operasi *Decisive Storm* ditandai dengan serangan udara Arab Saudi terhadap pos-pos militer yang dirampas oleh Houthi di sekitar Sana'a. Sistem rudal balistik Yaman menjadi target utama dari operasi ini. Selama rentang bulan Maret dan April tahun 2015, Arab Saudi mengebom wilayah Faj Attan yang diyakini menjadi gudang bawah tanah tempat penyimpanan rudal-rudal Houthi. Gudang tersebut dilindungi dengan dinding batu yang tebal sehingga membutuhkan senjata berat untuk dapat menghancurkan gudang tersebut. Koalisi GCC juga menargetkan sistem rudal *mobile* milik Houthi.

Aksi pengeboman dalam rangka operasi *Decisive Storm* berakhir pada 21 April 2015. Arab Saudi mengklaim kesuksesan dari operasi ini. Pemimpin militer negara GCC meyakini sebesar 80% persenjataan militer milik Houthi atau setara dengan 300 rudal balistik berhasil dihancurkan. Keberhasilan serangan udara koalisi negara GCC terhadap gudang persenjataan militer Houthi mengindikasikan lemahnya sistem rudal balistik anti-pesawat milik Houthi. Arab Saudi tidak berjuang sendiri dalam menyukseskan misi ini. Terdapat beberapa negara koalisi yang turut terlibat seperti Uni Emirat Arab yang mengirimkan 30 jet tempur, Bahrain sebanyak 15 unit, Kuwait 15 unit, Qatar 10 unit, Maroko 6 unit, Sudan 3 unit, dan negara-negara koalisi GCC lainnya. (Bender, 2015)

Houthi pertama kali meluncurkan rudal balistik jenis Scud ke wilayah Arab Saudi pada 6 Juni 2015. Selama rentang 18 bulan sejak Juni tahun 2015, sistem pertahanan udara Arab Saudi telah menangkal sebanyak 24 rudal dari 33 rudal yang menargetkan wilayah Arab Saudi. (CSIS, 2016)

Operasi Renewal of Hope

Setelah sebulan lebih melancarkan serangan dalam operasi *Decisive Storm*, Arab Saudi memulai serangkaian operasi militer lanjutan yang bersama operasi *Renewal of Hope*. Operasi ini berfokus pada perlindungan rakyat Yaman dan membatasi pergerakan pasukan militer Houthi dan sekutunya. Selain itu, operasi militer ini juga bertujuan untuk membangun situasi politik yang stabil untuk membangun masa depan Yaman.

Operasi *Renewal of Hope* menandai dimulainya proses rekonsiliasi antara koalisi negara GCC dan Houthi. hal ini dengan dengan apa yang tercantum dalam Resolusi Dewan

Keamanan PBB Nomor 2216 yang menghimbau agar dimulainya proses penciptaan perdamaian dan kepastian perlindungan terhadap rakyat Yaman serta memastikan pasokan bantuan makanan dan obat-obatan disalurkan secara maksimal di Yaman.

Mantan Presiden Yaman, Saleh, secara resmi mendeklarasikan dijalinnya aliansi dengan pemberontak Houthi pada 11 Mei tahun 2015, setelah sebelumnya ia terpaksa mundur dari kursi kepresidenan Yaman akibat demonstrasi berdarah di Sana'a pada tahun 2012 pasca 3 dekade kekuasaannya di Yaman. Namun, tidak lama berselang Saleh kembali berganti sisi mendukung koalisi negara GCC pada 2 Desember tahun 2017 yang berujung pada kematian dirinya akibat serangan dari Houthi. Houthi menganggap ia sebagai pengkhianat. Saleh diserang oleh pemberontak Houthi yang mengendarai 20 kendaraan lapis baja ketika ia bersama beberapa pimpinan Partai *General People's Congress* (GPC) sedang dalam perjalanan mengunjungi kampung halamannya, Sanhan di Yaman. (The Guardian, 2017)

Gencatan senjata dalam rangkaian operasi *Renewal of Hope* terjadi pada 12 Mei 2015. Gencatan senjata ini berlangsung selama 5 hari. Momen ini kemudian digunakan oleh PBB untuk memberikan bantuan pangan dan kemanusiaan kepada rakyat Yaman. Pangan Yaman mayoritas berasal dari impor yang hingga mencapai 90% dari total kebutuhan pangan nasional Yaman dimana impor tersebut mayoritas berasal dari jalur laut. PBB menyatakan bahwa sebanyak 1.500 rakyat Yaman telah terbunuh sejak dimulainya serangan udara pada Maret tahun 2015. (Global Security, 2016)

Proses gencatan senjata tersebut tidak memberikan hasil yang mengarah kepada perdamaian kedua belah pihak. Tidak lama berselang setelah gencatan senjata selama lima hari tersebut, kedua belah pihak kembali saling serang. Organisasi Internasional Untuk Migrasi (IOM) menyatakan bahwa sebanyak 1.037 rakyat Yaman terbunuh sejak 26 Maret ketika Arab Saudi memulai serangan udaranya hingga 20 Mei 2015. Selain dari korban jiwa, IOM memprediksi terdapat lebih dari 7.500 korban luka dan lebih dari 250.000 pengungsi dan 1 juta migran yang mayoritas berasal dari Somalia dan Ethiopia. Mereka pada awalnya tinggal di wilayah pengunungan dan pedesaan terpencil di sepanjang wilayah Yaman.

Pada 3 Agustus tahun 2015, Mansour Hadi, Presiden Yaman yang diakui oleh PBB, melancarkan serangan yang terkoordinasi dengan koalisi Arab Saudi untuk merebut wilayah Taiz dan Marib di selatan Yaman yang sebelumnya dikuasai oleh Houthi. Pasukan tersebut terdiri dari 2.800 tentara yang ditemani oleh tank-tank dan pengangkut tentara lapis baja. Salah satu target serangan ini adalah markas militer al-Anad. Al-Anad terletak di utara kota Aden

yang merupakan markas utama Houthi di wilayah selatan Yaman. Serangan ini dimulai dengan serangan udara dari koalisi negara GCC pimpinan Arab Saudi.

Hingga 15 Agustus 2015, militer Yaman dan koalisi negara GCC berhasil merebut provinsi Shabwa yang memiliki cadangan minyak yang cukup signifikan dari Houthi. Tekanan dari koalisi pro-Hadi terhadap Houthi terus berlangsung. Pada 1 Oktober 2015, mereka berhasil merebut Selat Bab el-Mandeb yang menghubungkan Teluk Aden dengan Laut Merah. Koalisi pro-Hadi semakin kuat dengan datangnya satu batalion tentara Sudan atau setara dengan 300 tentara bergabung dengan kontingen Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Bahrain. Pasca secara berangsur dikuasainya kembali wilayah selatan Yaman dari pemberontak Houthi, Presiden Hadi kembali ke Aden pada 17 November tahun 2015 dari pengasingannya di Arab Saudi.

Arab Saudi menghentikan operasi militer besarnya pada 17 Maret 2016, setahun setelah koalisi Arab Saudi memulai serangan udaranya terhadap Houthi. pada 10 Juni 2016, Kantor Hak Asasi Manusia PBB mengeluarkan laporan terkait dengan jumlah korban akibat konflik Yaman. Mereka mencatat sebanyak 3.500 orang meninggal dunia dan hampir 6.300 terluka. Berbagai macam protes dilayangkan oleh berbagai organisasi kemanusiaan dunia terhadap aksi militer Arab Saudi di Yaman.

Situasi Terkini di Yaman

Posisi Houthi di Yaman semakin kokoh akibat bantuan beberapa pihak seperti seperti Iran dan Hizbullah. Beberapa laporan mengindikasikan persenjataan yang dimiliki oleh Houthi dipasok oleh Iran. Salah satu contoh nyata adalah rudal jarak menengah Burkan-2 yang digunakan oleh Houthi untuk menyerang wilayah Riyadh dan Yanbu. Kedua wilayah ini terletak 600 mil dari pusat peluncuran di wilayah utara Yaman.

Pada Januari tahun 2018, Panel Pakar Yaman Di PBB menyimpulkan Iran merupakan pihak yang memproduksi rudal Burkan-2. Burkan-2 merupakan versi lebih ringan dari rudal Qiam-1 yang secara khusus didesain untuk dapat menjangkau jarak tembak ke Riyadh. Kesimpulan ini diambil dari penelitian terhadap 10 puing rudal Burkan. Puing tersebut mengindikasikan rudal tersebut diselundupkan ke Yaman dalam bentuk terpisah dan dirakit kembali oleh sebuah tim khusus yang ditandai dengan pola perakitan yang tidak serupa dengan pola perakitan pabrik persenjataan pada umumnya.

Houthi tidak hanya berhasil menggunakan rudal jarak menengah, tetapi juga berhasil mengembangkan teknologi perkapalan. Perkembangan teknologi yang paling signifikan Houthi adalah keberhasilannya memodifikasi *speedboat* menjadi kapal tanpa awak yang memuat

peledak Shark-33. Kapal tersebut dapat dioperasikan dengan menggunakan kendali jarak jauh. Alat militer ini berhasil menyerang sebuah kapal tempur Arab Saudi jenis *Frigate* pada 30 Januari 2017. (Knights, 2018)

Pada 12 Juni tahun 2018, Koalisi Arab Saudi mengumumkan secara resmi operasi penguasaan kembali Hodeidah yang dikenal dengan operasi *Golden Victory*. Hodeidah dikenal sebagai wilayah di wilayah barat Yaman yang terkenal dengan pelabuhan internasionalnya. Houthi menguasai Hodeidah sejak tahun 2014. Operasi militer di Hodeidah melibatkan berbagai pihak, beberapa yang sangat berpengaruh adalah Brigade Amaliqa dan Kelompok Perlawanan Tihama. Kedua kelompok ini bersatu dibawah pimpinan Tareq Mohammed Saleh yang merupakan keponakan dari Ali Abdullah Saleh. Pasukan dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan anggota aliansi lainnya seperti Sudan bergabung dengan Brigade Amalia dan Tihama menekan pengaruh pemberontak Houthi di kawasan Hodeidah.

Koalisi Arab dilaporkan berhasil menguasai desa al-Manzar yang terletak di sebelah barat bandara Hodeidah dan sebagian besar wilayah bandara Hodeidah. Segera setelah dikuasainya wilayah bandara Hodeidah, Pasukan Koalisi Arab memulai operasi militer untuk membersihkan keberadaan Houthi di wilayah pelabuhan Hodeidah. Pelabuhan Hodeidah merupakan pelabuhan strategis di kawasan Laut Merah yang mengontrol tiga perempat impor Yaman. (Tempo, 2018)

Hingga mendekati akhir Juli tahun 2018, pasukan pemerintah Yaman dan Koalisi Arab berhasil menguasai banyak wilayah di Hodeidah. Operasi *Golden Victory* bertujuan untuk mengusir Houthi dari Hodeidah. Pertempuran di Hodeidah merupakan pertempuran yang paling mematikan sejak konflik dimulai tiga tahun yang lalu. Keberhasilan pemerintah Yaman dan Koalisi Arab menguasai Hodeidah akan memberikan tambahan semangat karena Hodeidah merupakan akses masuk dari berbagai pasokan kebutuhan perang. Hingga kini, konflik di Hodeidah masih terus berlangsung meskipun banyak organisasi internasional yang mengecam korban jiwa akibat dari pertempuran antara pasukan pro-pemerintah dan Houthi.

SIMPULAN

Pemberontakan yang dilakukan Houthi mengejutkan dunia internasional. Tidak ada satupun pihak yang mampu memprediksi bahwa mereka yang pada awalnya merupakan gerakan masyarakat di pedesaan Sa'adah ternyata dapat menguasai Sana'a. Propaganda tentang kemiskinan dan problematika sosial lainnya di masa kepemimpinan mantan presiden Yaman Ali Abdullah Saleh yang telah berkuasa lebih kurang selama 33 tahun ternyata mampu

mendorong rakyat di utara Yaman yang mayoritas merupakan kelompok Zaidi untuk melawan pemerintahan.

Mansour Hadi yang ditunjuk sebagai pengganti Saleh yang mengundurkan diri berupaya untuk memperkuat legitimasinya namun kelompok pemberontak Houthi terus melawan pemerintah Yaman. Pada akhirnya, akibat ketidakmampuan pemerintah Yaman menghentikan laju pergerakan Houthi, Hadi meminta bantuan negara-negara GCC. Arab Saudi kemudian merespon dengan memberi bantuan militer dan logistik kepada Hadi. Penulis menganalisis banyak faktor yang mendorong respon yang diambil oleh Arab Saudi. Perkembangan Houthi di Yaman dapat menjadi ancaman berarti bagi Arab Saudi. Arab Saudi tidak hanya terancam karena Yaman berdekatan dengannya, tetapi juga karena Houthi dianggap sebagai bagian dari *proxy* Iran di kawasan Timur Tengah.

Kekhawatiran Arab Saudi ini ditandai dengan bentuk respon Arab Saudi kepada pemerintah Yaman. Tidak tanggung-tanggung, Arab Saudi melakukan serangkaian operasi militer Yaman seperti Operasi Decisive Storm, Renewal of Hope, dan Golden Victory. Arab Saudi juga didukung oleh negara-negara Koalisi Arab seperti Uni Emirat Arab, Mesir, Bahrain, Yordania, Maroko, dan bahkan Sudan. Operasi militer ini dilakukan untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Houthi di Yaman, terkhususnya Sana'a.

Daftar Pustaka

Idrus Muhammad, (2009), *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: Erlangga.

Knights, Michael. (2018). "The Houthi War Machine: From Guerrilla War to State Capture", *CTC Sentinel* 15.

International Crisis Group. (2014) "The Huthis: From Saada to Sanaa", *Middle East Report* 154.

Salisbury, Peter. (2015), "Yemen: Stemming the Rise of a Chaos State", *Chatham House*

Shabaneh, Ghassan. (2015). "Operation Decisive Storm: Objectives and Hurdles", *Aljazeera Center for Studies Report*.

Aljazeera. (2017). "Yemen's Houthi: Ali Abdullah Saleh killed for 'treason'". Dapat diakses pada <https://www.aljazeera.com/news/2017/12/yemen-houthi-ali-abdulla-saleh-killed-treason-171204165531953.html>

Bender, Jeremy. (2015). "These maps show what could happen next in Yemen and how it could impact global politics". Dapat diakses pada <https://www.businessinsider.com.au/these-maps-show-where-yemens-conflict-could-be-heading-2015-3>

Global Security. (2017). "Operation Restoring Hope / Operation Renewal of Hope". Dapat diakses pada <https://www.globalsecurity.org/military/world/war/yemen4renewal-of-hope.htm>

Knights, Michael. (2016). "Responding to Iran's Arms Smuggling in Yemen", dapat diakses pada <https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/responding-to-irans-arms-smuggling-in-yemen>

Perdana, Agni Vidya. (2018). "Tentara Yaman Berhasil Merebut Kendali Bandara Hodeidah". Dapat diakses pada <https://internasional.kompas.com/read/2018/06/19/22193391/tentara-yaman-berhasil-merebut-kendali-bandara-hodeidah>

Saputra, Eka Yudha. (2018). "Koalisi Arab Kuasai Bandara Hodeidah dari Milisi Houthi". Dapat diakses pada <https://dunia.tempo.co/read/1099117/koalisi-arab-kuasai-bandara-hodeidah-dari-milisi-houthi>

Tempo.co. (2014) "Pejuang Houthi Kuasai Kota di Yaman". Dapat diakses pada <http://dunia.tempo.co/read/news/2014/10/16/115614809/pejuang-houthi-kuasai-kota-di-yaman>,

The Guardian. (2017). "Yemen Houthi rebels kill former president Ali Abdullah Saleh". Dapat diakses pada <https://www.theguardian.com/world/2017/dec/04/former-yemen-president-saleh-killed-in-fresh-fighting>

VoA Islam. (2014). "Ibukota Yaman Sana'a Jatuh Ke Tangan Syi'ah Houthi". Dapat diakses pada <http://www.voa-islam.com/read/world-analysis/2014/09/23/33018/ibukota-yaman-sanaa-jatuh-ke-tangan-syiah-houthi/#sthash.av4M8fw8.dpbs>

Tantangan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terkait Isu Perlindungan TKI Di Arab Saudi

Anna Yulia Hartati, S.IP, MA
Universitas Wahid Hasyim Semarang
annayuliahartati@gmail.com

Abstrak

Artikel ini menjelaskan tentang tantangan kebijakan luar negeri Indonesia terkait isu perlindungan TKI di Arab Saudi. Globalisasi telah menimbulkan dampak yang sangat besar bagi perekonomian. Kemiskinan dan ketidakmerataan distribusi pendapatan yang terjadi diakibatkan oleh ketidakmerataan distribusi kesempatan dan lapangan pekerjaan antara wilayah pedesaan dan perkotaan. Ketimpangan ini tampak jelas dalam perkembangan angkatan kerja yang berlangsung jauh lebih pesat dibanding kemampuan penyerapan tenaga kerja. Sebagian besar lapangan kerja di perusahaan pada tingkat organisasi yang rendah yang tidak membutuhkan keterampilan yang khusus, lebih banyak memberi peluang bagi tenaga kerja wanita. Bahkan banyak perempuan Indonesia yang menguatkan diri untuk bekerja ke luar negeri dengan tawaran gaji yang relatif lebih besar, khususnya menjadi TKI di Arab Saudi. Fenomena ini menimbulkan keuntungan dan masalah tersendiri bagi pemerintah. TKI ilegal, menjadi masalah utama. Pemahaman para TKI mengenai hukum, aturan, dan sistem yang berlaku di negara tempat mereka bekerja menjadi tuntutan mendesak yang harus dipenuhi. Kebijakan luar negeri saja tentu tidak cukup, sehingga dukungan dari pihak terkait dan pemerintah daerah perlu perhatian khusus. Penelitian ini menggunakan Instrumen penelitian dokumentasi, dengan menggunakan teknik library reseach (penelitian pustaka), yaitu dengan mengambil data dari buku-buku, artikel, dan internet. Desain dalam Penelitian ini menggunakan desain deskriptif, sedangkan analisisnya menggunakan Komparasi Konstan (Grounded Theory Research).

Kata Kunci: Kebijakan Luar Negeri Indonesia, Globalisasi, Perlindungan TKI

Abstract

This article describes the challenges of Indonesian foreign policy regarding the issue of protection of Indonesian migrant workers in Saudi Arabia. Globalization has had a huge impact on the economy. Poverty and inequality of income distribution that occurs due to inequality in the distribution of opportunities and employment between rural and urban areas. This inequality is evident in the development of the workforce which lasts far more rapidly than the ability to absorb labor. The majority of employment opportunities in companies at a low organizational level that do not require special skills provide more opportunities for women workers. Even many Indonesian women who strengthen themselves to work abroad with a relatively larger salary offer, especially being a migrant worker in Saudi Arabia. This phenomenon has its own advantages and problems for the government. Illegal migrant worker are a major problem. The understanding of Indonesian labor migrants regarding the laws, rules and systems that apply in the country where they work becomes an urgent demand that must be met. Foreign policy alone is certainly not enough, so that support from related parties and local governments needs special attention. This study uses documentation research instruments, using research library techniques (library research), namely by taking data from books, articles, and the internet. The design in this study uses descriptive design, while the analysis uses Constant Comparison (Grounded Theory Research).

Keywords: Indonesian Foreign Policy, Globalization, Protection of Indonesian Migrant Workers

PENDAHULUAN

Organisasi Perburuhan Internasional (*International Labour Organisation/ILO*) mendefinisikan seorang “pekerja migran”, sebagai seseorang yang bermigrasi, atau telah bermigrasi dari satu negara ke negara lain, dengan sebuah gambaran bahwa orang tersebut akan dipekerjakan oleh seseorang yang bukan dirinya sendiri, termasuk siapapun yang biasanya

diakui sebagai seorang migran, untuk bekerja. Karena dalam prakteknya buruh migran tersebut menyangkut 2 negara, maka pemerintah wajib ikut campur tangan dalam mengurus masalah penempatan para calon buruh migran tersebut, oleh karena itulah dibuatnya beberapa regulasi yang mengatur masalah TKI.

Secara umum payung perlindungan hukum tersebar dalam berbagai instrumen hukum termasuk hukum nasional, konvensi internasional, dan persetujuan diplomatik. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri (UUTKI/UU Buruh Migran). UUTKI tersebut menegaskan kewajiban melindungi, namun tidak ada hukum atau regulasi yang secara khusus mengatur dan mengakui keberadaan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan di ranah domestik sebagai pekerjaan formal, yang berimplikasi melindungi pekerjaannya.

Ada banyak traktat internasional yang mengatur hak buruh migran, yang terakhir adalah *The International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*, (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya) yang dikeluarkan oleh PBB tahun 2003 sebagai hukum internasional. Konvensi ini telah diratifikasi oleh 43 negara, dan Indonesia pada tahun 2012 lalu telah meratifikasinya dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012. Meski Indonesia telah meratifikasi, namun belum terlihat langkah-langkah nyata untuk memperbarui berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan buruh migran untuk diselaraskan dengan konten konvensi.

Selain itu, negara Indonesia juga telah meratifikasi beberapa instrumen internasional yang terkait dengan diskriminasi, misalnya Konvensi untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan / *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) serta berbagai konvensi *International Labour Organization* (ILO) lainnya. Namun, implementasi kebijakan masih mengandung diskriminasi, bahkan kebijakan penempatan buruh migran sudah mengarah pada perdagangan manusia, karena memosisikan buruh migran seolah-olah komoditas perdagangan.

Maraknya kasus-kasus hukum yang menimpa buruh di luar negeri menunjukkan minimnya perlindungan yang diberikan pemerintah. Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Heru Susetyo mengatakan, perlindungan hukum menjadi penting dalam proses legislasi bidang ketenagakerjaan. Ia meminta agar DPR dan pemerintah memasukkan sebanyak mungkin materi perlindungan pekerja migran ke dalam peraturan perundang-undangan. Sebab,

masih ada ruang yang belum tersentuh hukum. Ia memberi contoh tempat bekerja buruh migran masuk ranah privat sehingga sulit tersentuh hukum.

Negara memang telah mengeluarkan berbagai peraturan dan regulasi yang berhubungan dengan keberadaan buruh migran, namun semuanya lebih menekankan pada aspek penempatan dan pembinaan di luar negeri. Solusi dalam bingkai normatif yang dibangun dirasakan kurang mencerminkan kebijakan yang menyentuh perlindungan bagi buruh migran. Paradigma perlindungan belum dikedepankan.

Peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya UUTKI, tidak cukup memadai dalam memberikan perlindungan dan akses keadilan. Oleh banyak pihak, substansi hukumnya dipandang tidak jelas, yang menimbulkan masalah dalam penerapannya. Di antara ketidakjelasan itu adalah ketiadaan sanksi bagi para pihak yang melanggar. Meskipun UUTKI menjadi satu-satunya undang-undang khusus yang mengatur tentang buruh migran, namun di dalamnya tidak meliputi pengaturan tentang buruh migran domestik. Dua tahun sejak UUTKI disahkan, kemudian diterbitkan Instruksi Presiden tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Sejumlah aktivis dari gerakan advokasi buruh migran berpendapat UUTKI dinilai lebih mengusung semangat bisnis, yaitu kepentingan perusahaan pengerah jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI). Kepentingan bisnis tersebut berkaitan dengan lalu lintas uang yang sangat besar dalam migrasi tenaga kerja dan tidak berpihak kepada buruh migran. Selain itu, pada level kebijakan maupun implementasi, UUTKI telah menempatkan buruh migran sebagai komoditas dalam bentuk pengadaan tenaga murah bagi kepentingan pengusaha PJTKI.

Globalisasi telah menimbulkan dampak yang sangat besar bagi perekonomian. Meskipun demikian, globalisasi juga menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Kemiskinan dan ketidakmerataan distribusi pendapatan yang terjadi diakibatkan oleh ketidakmerataan distribusi kesempatan dan lapangan pekerjaan antara wilayah pedesaan dan perkotaan. Ketimpangan ini tampak jelas dalam perkembangan angkatan kerja yang berlangsung jauh lebih pesat dibanding kemampuan penyerapan tenaga kerja. Sebagian besar lapangan kerja di perusahaan pada tingkat organisasi yang rendah yang tidak membutuhkan keterampilan yang khusus, lebih banyak memberi peluang bagi tenaga kerja wanita. Kemiskinan, tuntutan ekonomi yang mendesak, dan berkurangnya peluang serta penghasilan di bidang pertanian yang tidak memberikan suatu hasil yang tepat dan rutin, dan adanya kesempatan untuk bekerja di bidang industri telah memberikan daya tarik yang kuat bagi tenaga

kerja. Bahkan banyak perempuan Indonesia yang menguatkan diri untuk bekerja ke luar negeri dengan tawaran gaji yang relatif lebih besar.

Fenomena ini tentu menimbulkan keuntungan dan masalah tersendiri bagi pemerintah. Dengan adanya tenaga kerja yang bekerja di luar negeri tentu dapat menghasilkan devisa bagi negara. Namun tidak sedikit kasus kekerasan yang menimpa tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Permasalahan-permasalahan yang terjadi menyangkut pengiriman TKI ke luar negeri terutama tentang ketidaksesuaian antara yang diperjanjikan dengan kenyataan, serta adanya kesewenangan pihak majikan dalam memperkerjakan TKI. Selain itu sering terjadi penangkapan dan penghukuman TKI yang dikarenakan ketidaklengkapan dokumen kerja (TKI ilegal). Hal-hal ini menimbulkan ketegangan antara pihak pemerintah dengan negara-negara tujuan TKI tersebut dan apabila didiamkan akan menimbulkan terganggunya hubungan bilateral kedua negara. Bukan hanya masalah yang disebabkan karena faktor dari Negara penerima saja yang banyak melanggar hak dari para TKI, akan tetapi masalahmasalah

TKI juga dikarenakan faktor dari para calon TKI itu sendiri. Salah satu contoh Seperti kurangnya kesadaran bahwa menjadi TKI ilegal tidak memiliki perlindungan hukum. Permasalahan ini menyebabkan banyaknya tindak kejahatan terhadap TKI seperti pelanggaran HAM, pemerkosaan, dan pemotongan gaji oleh majikan. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban melindungi para TKI dari permasalahan-permasalahan tersebut seperti yang telah tercantum dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI yang dimana pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada TKI sebelum keberangkatan sampai pulang kembali ke Indonesia.

Direktur Perlindungan Warga Negara, dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kementerian Luar Negeri Indonesia Muhammad Iqbal menjelaskan bahwa saat ini ada sebanyak 800 ribu Warga Negara Indonesia (WNI) di Arab Saudi. Sebanyak 500 ribu tersebar di Jeddah dan 300 ribu di Riyadh. Dari kedua kota tersebut, Jeddah merupakan kota yang mendominasi banyaknya konflik atau kasus. Pada tahun 2018, ada 18 WNI yang masih terancam hukuman mati di Arab Saudi, 9 di wilayah kerja Jeddah dan 9 di wilayah kerja KBRI Riyadh (Rakyat Merdeka Online 2018)

Persoalan pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri rupanya tak luput dari carut-marutnya pengelolaan sejumlah perusahaan pengerah tenaga kerja. Perekonomian Indonesia mengalami surplus tenaga kerja. Jumlah penawaran tenaga kerja melampaui permintaannya. Pemerintah memperkirakan angka pengangguran turun dari 7,9 persen di tahun 2009 menjadi

7,6% pada 2010. Tetapi sebenarnya masih banyak orang dengan status bekerja, namun melakukan pekerjaan yang tidak layak. Sebelum krisis ekonomi 1997, angka elastisitas penyerapan tenaga kerja cukup tinggi.

Sulitnya memperoleh pekerjaan di dalam negeri mendorong sebagian pekerja mengadu nasib di luar negeri. Tekanan penduduk (population pressure) dalam beberapa tahun mendatang akan semakin besar. Sekitar 56% pekerja Indonesia hanya lulusan SD ke bawah. Semakin sedikit kesempatan kerja untuk para lulusan SD. Hal ini diperburuk tidak adanya sistem jaminan sosial. Setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Tidak ada pilihan lain, sehingga harus bekerja termasuk ke luar negeri. Aliran pekerja ke luar negeri menjadi salah satu solusi untuk mengatasi surplus tenaga kerja dalam negeri. Tetapi, jika tidak dikelola dengan baik, maka akan terus menimbulkan masalah. Data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) menunjukkan adanya tren kenaikan TKI bermasalah dari sekitar 14% pada 2008 menjadi lebih dari 20% pada 2009.

Pemerintah mensyaratkan bahwa TKI harus legal, dikirim melalui agen resmi yang membantunya untuk membuat paspor dan visa, memperoleh surat keterangan kesehatan, membayar asuransi dan kewajiban lainnya, memiliki keterampilan dan kemampuan bahasa. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) memperkirakan pada 2010 terdapat sekitar 2,7 juta TKI bekerja di luar negeri. Namun jumlahnya dapat lebih besar mengingat banyak TKI ilegal tidak tercatat. Sekitar 45% TKI memilih bekerja di Malaysia karena kemudahan komunikasi. Sementara 35% TKI bekerja di Arab Saudi. TKI berperan besar bagi perekonomian Indonesia. Nilai remitansi TKI tahun 2008 mencapai sekitar Rp 60 triliun per tahun (15% PDB Indonesia).

Masalah TKI muncul sejak proses awal di Indonesia. Umumnya penyaluran TKI melalui agen tenaga kerja, baik yang legal maupun ilegal. Agen TKI mengontrol hampir seluruh proses awal, mulai dari rekrutmen, paspor dan aplikasi visa, pelatihan, transit, dan penempatan TKI. Banyak TKI baru pertama kali ke luar negeri, direkrut makelar yang datang ke desanya, dengan janji upah tertentu, pilihan pekerjaan yang banyak, dan menawarkan bantuan kemudahan proses (Rahman 2011).

Rendahnya pendidikan calon TKI mengakibatkan mereka menghadapi risiko mudah ditipu pihak lain. Mereka tidak memahami aturan dan persyaratan untuk bekerja di luar negeri. Rendahnya laporan TKI yang mengalami kasus tertentu ke pihak berwenang juga didasarkan kekhawatiran mereka karena memiliki identitas palsu. Banyak TKI usianya masih terlalu muda, namun demi kelancaran proses, usia di dokumen dipalsukan. Pemalsuan tidak hanya usia, tetapi

juga nama dan alamat. Oleh karena itu, tidak mudah melacak para TKI bermasalah di luar negeri.

Dari kasus-kasus pelanggaran hak-hak dasar yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Timur Tengah terutama di Arab Saudi, menjadi keprihatinan tersendiri bagi pemerintah Indonesia. Kebijakan dan peraturan perundangan yang telah dirumuskan oleh pemerintah Indonesia menjadi prinsip yang menggarisbawahi proses penempatan TKI di luar negeri. Sesuai dengan tujuan untuk memberikan kontribusi perlindungan bagi keselamatan dan kesejahteraan TKI, walaupun diakui sangat sulit untuk menyusun dan membuat suatu peraturan yang dapat memuaskan semua pihak akan tetapi tetap saja pemerintah sedapat mungkin dapat mengupayakan untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan semua pihak yang terkait. Sedangkan upaya hukum yang dapat dilakukan apabila ada hak TKI yang dilanggar saat masa penempatan adalah tunduk pada negara setempat mengikuti kedaulatan territorial suatu negara. Program penempatan TKI ke Arab Saudi memang merupakan prospek yang cukup baik bagi pemerintah Indonesia terlebih semakin banyak permintaan akan tenaga kerja. Disatu sisi program ini menjadi salah satu alternative atau solusi dari permasalahan pengganguran dan keterbatasan lapangan pekerjaan di dalam negeri, disisi lain program ini memunculkan masalah baru dengan kasus kekerasan yang menimpa TKI akibat pengguna jasa yang kurang menghargai dan menghormati hak-hak pekerja. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas TKI, kualitas penyelenggaraan program penempatan TKI serta kualitas perlindungan hukum bagi TKI baik pada proses pemberangkatan, selama bekerja di luar negeri maupun setelah kembali ke tanah air. Meskipun demikian baik pemerintah Indonesia ataupun Arab Saudi senantiasa mengupayakan berbagai tindakan dalam memberikan perlindungan bagi TKI dan penanganan berbagai permasalahan yang menimpa TKI. Mediasi melalui jalan diplomasi bilateral digunakan sebagai solusi, tapi perannya masih lemah, terbukti dengan ketiadaan MoU dan masih enggannya pihak Arab Saudi untuk mau menandatangani MoU ketenagakerjaan dengan pemerintah Indonesia. Pemerintah memang menghadapi tantangan yang besar dalam realisasi perlindungan TKI di Arab Saudi dengan adanya perbedaan landasan hukum yang dianut, termasuk tata cara beracara yang berlaku antara di Indonesia dan Arab Saudi. Dasar negara yang di gunakan Arab Saudi sendiri mengindikasikan bahwa sistem politik yang diakui tidak mengadopsi hukum internasional, seperti dalam penerapan isu HAM dan gender karena Arab Saudi tidak ikut meratifikasi semua konvensi yang menyangkut dua isu tersebut. Akibatnya banyak kasus TKI di Arab Saudi diselesaikan menurut wewenang pemerintah setempat dan posisi pemerintah Indonesia tidak bisa mengintervensi keputusan

yang mereka ambil. Masalah ini menjadi sangat menarik melihat nota kesepakatan yang sampai sekarang belum terumuskan dalam sebuah perjanjian dengan Arab Saudi memunculkan masalah baru bagi pemerintah Indonesia untuk mengambil kebijakan dalam penanganan TKI. Bagaimanakah tantangan kebijakan Luar Negeri Indonesia terkait isu perlindungan TKI di Arab Saudi?

A. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu prosedur yang menghasilkan data yang deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran maupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Natsir 1988).

Dalam pendekatan teori *grounded* ini, peneliti mengkosentrasikan dirinya pada deskripsi yang rinci tentang sifat/ ciri dari data yang dikumpulkan, sebelum berusaha menghasilkan pernyataan-pernyataan teoritis yang lebih umum. Di saat telah memadainya rekaman cadangan deskripsi yang akurat tentang fenomena sosial yang relevan, barulah peneliti dapat mulai menghipotesiskan jalinan hubungan di antara fenomena-fenomena yang ada, dan kemudian mengujinya dengan menggunakan porsi data yang lain. Tiga aspek kegiatan yang penting untuk dilakukan, yaitu:

- a. Menulis catatan atau *note writing*.
- b. Mengidentifikasi konsep-konsep atau *discovery or identification of concepts*.
- c. Mengembangkan batasan konsep dan teori atau *development of concept definition and the elaboration of theory*.

Analisis Data Kualitatif adalah suatu proses yang meliputi:

- a) Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri,
- b) Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar dan membuat indeksnya,
- c) Berpikir dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola, hubungan-hubungan dan temuan-temuan umum (Bungin 2011).

Dalam metode ini penulis berusaha memaparkan tentang tantangan kebijakan luar negeri Indonesia terkait isu perlindungan TKI di Arab Saudi. Peneliti mengumpulkan data dari perpustakaan yang relevan dengan penelitian ini.

HASIL

Pelaksanaan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI pada dasarnya mempunyai dua sisi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dalam segala bentuknya yaitu komitmen nasional atas dasar keutuhan persepsi bersama untuk menggalang dan melaksanakan koordinasi lintas regional dan sektoral, baik vertikal maupun horizontal, ternasuk perlunya ada kejelasan proporsi peran dan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, PPTKIS dan sarana pendukung utama dalam penyiapan TKI yang berkualitas dan bermartabat. Kejelasan proporsi dan tanggung jawab tersebut perlu dijalin dalam rangka menggalang kemitraan (*Spirit Indonesia incorporate*) karena ketika TKI berangkat dan bekerja di luar negeri akan menyangkut permasalahan harkat dan martabat manusia Indonesia, Bangsa, Negara dan Pemerintahan dipercaturan Dunia Internasional (Kemenlu 2018).

Kegiatan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI pada dasarnya bertumpu pada jasa manusia yang melekat pada diri manusia yang memiliki hak asasi, harkat dan martabat yang terkait langsung dengan kegiatan ekonomi dan sosial, sehingga berbagai pihak berminat dan mudah melibatkan diri untuk dapat dimanfaatkan dan dipolitisir untuk kepentingan kelompok atau golongan masyarakat tertentu.

Untuk meminimalisir dampak negatif dari pelayanan penempatan dan perlindungan TKI, campur tangan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah secara integral sangat dibutuhkan, guna mencegah TKI menerima pekerjaan-pekerjaan yang non-remuneratif, eksploitatif, penyalahgunaan, penyelewengan serta menimalisir biaya sosial yang ditimbulkannya. Pemerintah sangat menyadari bahwa untuk melarang atau mempengaruhi keputusan masyarakat untuk tidak bekerja di luar negeri memang sulit, karena di samping menyangkut hak asasi manusia yang dilindungi Undang-undang dan juga menyangkut otoritas dan kedaulatan suatu Negara. Walaupun begitu Undang-undang juga mewajibkan Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah Kebijakan yang tepat guna meminimalisir permasalahan dan memberikan perlindungan kepada TKI (Peraturan Perundang Undangan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia)

Meskipun banyak TKI yang bekerja di Arab Saudi mengalami penganiayaan hingga dijatuhi hukuman mati, tapi tidak menyurutkan minat pencari kerja Indonesia mengadu nasib

di negara tersebut. Berdasarkan data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Arab Saudi masuk dalam 10 besar negara tujuan para TKI mencari kerja. Arab Saudi berada di urutan keenam dengan jumlah penempatan 6.471 TKI sepanjang 2017. Sementara Malaysia masih menjadi negara dengan penempatan TKI terbesar, yakni mencapai 88.991 TKI, diikuti Hong Kong (68 ribu), dan Taiwan (63 ribu). Jumlah penempatan pekerja di luar negeri sepanjang tahun lalu mencapai 261.820 TKI naik 11,7% dari tahun sebelumnya 234.451. Adapun provinsi penyumbang TKI terbesar adalah Jawa Timur, yakni hampir mencapai seperempat dari TKI yang dikirim ke luar negeri.

Solusi Serta Peran Pemerintah Dalam Menanggapi Masalah Ketenagakerjaan Indonesia (TKI)

Pemerintah perlu menertibkan para agen TKI ilegal untuk menghindari permasalahan sejak proses awal. Kita semua perlu menyadari bahwa permasalahan TKI berawal dari dalam negeri, meskipun akar masalah di luar negeri juga tidak bisa diabaikan. Rendahnya kesempatan kerja dan tingginya pertumbuhan penduduk sebagai akibat mengendurnya berbagai kebijakan kependudukan berdampak pada meningkatnya aliran pekerja dengan pendidikan rendah ke luar negeri. Sehingga peran serta solusi dari pemerintah sangat diperlukan dalam menangani masalah ketenagakerjaan TKI, hal tersebut agar masalah TKI bisa teratasi dan para TKI bisa sejahtera.

Selain itu, perlu koordinasi yang lebih baik antara Perlindungan TKI (BNP2TKI) dan Kemenakertrans. Pemerintah harus lebih fokus untuk mengungkapkan solusi dan bukan sekadar mengungkapkan masalah. Semua pihak harus segera duduk bersama. Instrumen kebijakan untuk mengatasi masalah TKI tidak harus terkait langsung dengan urusan TKI itu sendiri. Karena pada dasarnya, Indonesia saat ini membutuhkan komitmen kebijakan kependudukan yang kuat dan secara tidak langsung akan mengatasi masalah TKI pada jangka panjang.

Perjanjian RI- Arab Saudi Terkait TKI

Para calon TKI yang ingin secara legal bekerja di Arab Saudi mulai bersenang hati karena pemerintah kedua negara sepakat melakukan pembenahan. Faktor-faktor yang merugikan TKI disingkirkan hingga diharapkan tak ada lagi keluhan. Kesepakatan itu berbentuk proyek percontohan Sistem Satu Kanal Penempatan Terbatas TKI atau pekerja Migran Indonesia (PMI). Kerjasama ini lebih menjamin keselamatan dan kepastian hukum serta

meningkatkan kesejahteraan. Sejalan dengan itu dibentuk satu komite bersama untuk menjamin pelaksanaan kesepakatan.

Penandatanganan kerjasama dan rancangan teknis kerja sama itu dilakukan Menteri Ketenagakerjaan RI M.Hanif Dhakiri dan Menteri Tenaga Kerja dan Pembangunan Sosial Kerajaan Arab Saudi Ahmed bin Suleiman bin Abdulaziz al Rajhi di Kementerian Ketenagakerjaan RI, Kamis, 11 Oktober 2018. Penandatanganan kedua menteri dilanjutkan dengan penandatanganan rancangan teknis oleh Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI, Marulli A. Hasoloan dan Wakil Menteri Bidang Hubungan Internasional Kementerian Tenaga Kerja dan Pembangunan Sosial Saudi Arabia, Abdulaziz al Amr.

Sistem baru itu meliputi mekanisme satu pintu penerbitan visa kerja, penetapan tujuh jabatan tertentu bagi WNI yang bekerja di sektor domestik, penghapusan Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT), mekanisme perlindungan 24 jam dan lainnya.

Di samping itu, juga disepakati bahwa fungsi ketenagakerjaan pada perwakilan RI di Saudi memiliki kewenangan untuk melakukan penanganan langsung terhadap ekspatriat RI yang mengalami masalah di Saudi. Menaker mengungkapkan, dalam kesempatan itu dicapai juga komitmen kedua negara untuk menyelesaikan berbagai permasalahan ekspatriat RI yang selama ini telah bekerja di Saudi Arabia sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan sistem baru tersebut. Sedangkan mengenai moratorium, kedua negara sepakat untuk tidak melakukan evaluasi yang bertujuan mencabutnya. (Republika 2018).

DISKUSI

Eksekusi mati Muhammad Zaini Misrin oleh pemerintah Arab Saudi seakan menyingkap buruknya penanganan buruh migran oleh pemerintah Indonesia. Aktivis Human Rights Working Group (HRWG) Wike Devi Erianti mengatakan, dibandingkan dengan Filipina, pemerintah Indonesia memang belum mempunyai sistem perlindungan buruh migran yang berhadapan dengan hukum di negeri orang, salah satunya di Arab Saudi.(Kompas 2018). Aktivis Human Rights Working Group (HRWG) Wike Devi Erianti mengatakan, dibandingkan dengan Filipina, pemerintah Indonesia memang belum mempunyai sistem perlindungan buruh migran yang berhadapan dengan hukum di negeri orang, salah satunya di Arab Saudi. Sebelum tenaga kerja Filipina diberangkatkan ke Saudi, mereka harus benar benar paham. Misalnya bahasa Inggris sudah bagus, pendidikan dan pelatihannya juga sudah dipersiapkan sehingga

saat mereka disana mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Para buruh migran asal Filipina tersebut juga paham dengan hukum negara setempat. (Kompas, 2018)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Pasal 17 menjelaskan bahwa Perlindungan TKI di luar negeri meliputi:

- a. pembinaan dan pengawasan
- b. bantuan dan perlindungan kekonsuleran
- c. pemberian bantuan hukum
- d. pembelaan atas pemenuhan hak-hak TKI
- e. perlindungan dan bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan internasional, dan
- f. upaya diplomatik.

Akan tetapi faktanya, perlindungan terhadap TKI di luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia masih sangat lemah. Masih banyak TKI yang tidak mendapatkan gaji selama bekerja, banyak TKI yang melarikan diri dari rumah majikannya karena sering mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi, banyak TKI yang pada akhirnya harus tinggal di tempat yang tidak seharusnya karena melarikan diri dari rumah majikan dan tidak bisa pulang ke Indonesia karena tidak punya ongkos pulang, banyak TKI yang harus membayar pungutan liar yang sangat besar ketika mereka pulang ke Indonesia, banyak TKI yang harus dipidana mati oleh negara lain, dan sebagainya. Ini dapat disebabkan karena kurangnya informasi yang diperoleh calon TKI atau TKI yang bekerja di luar negeri dalam hubungannya dengan pelayanan dan penempatan TKI. Minimnya akses informasi calon TKI dan TKI cenderung menimbulkan sikap pasif dan menerima perlakuan perusahaan jasa tenaga kerja swasta dan majikannya karena mereka tidak tahu apa yang dilakukannya.

Banyaknya masalah yang terjadi terhadap TKI muncul karena ketidakadilan dalam perlakuan pengiriman tenaga kerja oleh Perusahaan Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PPJTKI). Banyak PPJTKI yang menyalahi prosedur seperti menerima pendaftar calon TKI di bawah umur, tidak memberikan pelatihan-pelatihan yang cukup, memberangkatkan calon TKI yang masih dalam masa pelatihan, dan sebagainya. Selain itu, masalah TKI juga muncul karena penempatan yang tidak sesuai standar gaji yang rendah dan tidak sesuai kontrak kerja yang disepakati, kekerasan oleh pengguna tenaga kerja, pelecehan seksual, tenaga kerja yang illegal (*illegal worker*), dan sebagainya. PPJTKI yang ada kebanyakan juga tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar. Hukum yang berlaku di daerah tujuan penempatan TKI juga

kurang memberikan perlindungan. Hal ini sudah jelas terlihat dengan maraknya kasus penganiayaan yang terjadi terutama pada PRT. Ketika terjadi masalah para TKI harus mengadu terlebih dulu kepada duta besar negara Indonesia atau ketika sudah disorot oleh media baru ada respon untuk melindungi hak mereka.

Melihat masalah-masalah tersebut, membuktikan bahwa peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan kepada TKI di luar negeri masih belum dilaksanakan dengan baik. Bahkan perjanjian (G to G) yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dengan negara tujuan belum mampu melindungi hak-hak TKI di luar negeri. Kedutaan besar di negara tujuan TKI juga belum memberikan perhatian penuh terhadap kesejahteraan TKI. Ketika terjadi suatu masalah berkaitan dengan TKI kedutaan besar cenderung lamban dan tidak serius dalam membantu TKI menyelesaikan masalahnya.

Untuk melindungi warganya yang bekerja di negara lain, tahun 1982 pemerintah Filipina membuat suatu lembaga khusus. Lembaga tersebut bernama *Philippine Employment Overseas Agency* (PEOA). PEOA merupakan lembaga yang berada di bawah Dewan Pengawas yang diketuai *Secretary of Labor Employment*. Tugas lembaga ini adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja Filipina agar tidak dieksploitasi oleh majikan atau perusahaan Pengerah Jasa Tenaga Kerja (PJTK) di negara mana pun mereka berada, mendorong ketenaga-kerjaan di negara-negara yang melakukan praktik terbaik, mengatur agen-agen penyalur jasa tenaga kerja, menyelenggarakan pendidikan bagi calon tenaga kerja luar negeri dan memelihara sebuah sistem informasi pasar pekerja yang selalu diperbarui, mengeluarkan sertifikasi PJTK yang memenuhi persyaratan. Termasuk mengeluarkan pelarangan terhadap PJTK yang melakukan pelanggaran atau penipuan terhadap tenaga kerja. Sertifikasi ini dilaksanakan untuk memenuhi kewajiban pengesahan terhadap setiap kontrak kerja yang akan ditanda-tangani oleh para calon tenaga kerja. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa isi kontrak tidak akan merugikan para tenaga kerja, terutama dalam hal upah dan fasilitas yang dijanjikan. Tanpa adanya stempel dari PEOA, PJTK atau calon tenaga kerja tidak dapat keluar dari negaranya.

Guna melindungi warganya yang bekerja di negara lain, pemerintah Filipina juga dikenal tegas terhadap PJTK yang diketahui melakukan upaya pemerasan terhadap calon tenaga kerja yang ingin bekerja di negeri orang. Menurut laporan tahunan PEOA, tidak kurang dari 497 kasus yang dilakukan PJTK dibawa ke pengadilan. Bahkan beberapa di antara PJTK tersebut ada yang sampai dihukum seumur hidup. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, PEOA juga sering berkampanye dan memberikan himbauan kepada warganya,

terutama bagi mereka yang ingin bekerja di negara lain agar bersikap hati-hati dan selektif terhadap perusahaan pengerah jasa tenaga kerja.

Sebelum warga Filipina diberangkatkan ke negara lain untuk bekerja, mereka terlebih dulu diwajibkan membayar *fee* kepada POEA. Besaran *fee* sekitar 100 dolar AS atau setara dengan Rp 900.000 per orang. Uang ini dapat diambil kembali bila kelak mereka gagal berangkat dengan alasan apapun. Biaya ini belum termasuk pengurusan dokumen seperti paspor, visa, asuransi kecelakaan, kesehatan, dan surat keterangan dari kepolisian (Kompasiana 2018)

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, UU NO 18 tahun 2017. Selanjutnya masih dalam UUTKI, pasal mengenai perlindungan ini selain tidak jelas, juga sangat tidak memadai untuk memproteksi hak dan kepentingan buruh migran Indonesia. Meskipun dalam pasal 77 ayat (2) disebutkan, “Perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan”. Namun dalam pasal-pasal berikutnya (pasal 78 sampai pasal 84) semuanya hanya bermakna perlindungan selama masa penempatan di negara tujuan. Sangat Jelas UUTKI ini tidak mampu menjangkau buruh migran perempuan di rumah majikannya di luar negeri (LBH Yogyakarta 2016)

Dari kondisi yang ada, sejumlah tantangan yang dapat diidentifikasi adalah:

Satu, belum adanya cetak biru diplomasi perlindungan tenaga kerja Indonesia sebagai bagian yang tak terpisahkan dari politik luar negeri Indonesia. Kementerian Luar Negeri RI sejak 2013 sudah menyiapkan prosedur tetap penanganan dan perlindungan warga negara Indonesia WNI yang terkena kasus hukum di luar negeri. Tetapi perlindungan secara menyeluruh belum tersentuh, perlindungan akan bekerja ketika ada kasus (KBR Id, 2013)

Dua, masih lemahnya koordinasi antara kementerian dan lembaga negara yang memiliki portofolio mengenai penempatan dan perlindungan buruh migran Indonesia. Tiga, , belum terakomodasinya peran serta masyarakat sipil dalam diplomasi perlindungan buruh migran Indonesia. Empat, tantangan pelayanan dan pemberian bantuan hukum melalui *citizen services*. Lima, adanya keterbatasan penyediaan basis data terpilah, dinamis dan sebaran tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Enam, adanya kesulitan akses ke konsuleran di negara-negara tertentu yang tidak mengikuti praktek internasional dimana setiap WNA yang bermasalah harus diinformasikan kepada kantor perwakilan dan pemerintahnya. Tujuh, masih lemahnya money terkait dengan upaya perlindungan TKI.

Tantangan utama Kemenlu dalam memberikan perlindungan kepada TKI adalah tidak adanya data yang kredibel tentang keberadaan WNI di Arab Saudi. Dalam UU ada kewajiban bagi para pengarah tenaga kerja untuk memberitahukan

formulir AM05 ke perwakilan RI seluruh data WNI yang akan ditempatkan. Kapan dia datang, kapan dia selesai kontraknya, siapa majikannya. Dan itu tidak pernah dijalankan. Data seperti itu tidak pernah diisi.

Terkait dengan tantangan ini, seperti yang telah ditekankan oleh Presiden RI pada pidato 19 Oktober 2011 lalu, perlindungan TKI menjadi salah satu dari 7 isu besar yang perlu direspon. Bantuan hukum yang cepat, tepat, dan efektif adalah langkah yang perlu dikedepankan. Disamping itu, peningkatan pemahaman para TKI mengenai hukum, aturan, dan sistem yang berlaku di negara tempat mereka bekerja juga menjadi tuntutan mendesak yang harus dipenuhi. Dalam hal ini, kebijakan luar negeri saja tentu tidak akan mencukupi, sehingga dukungan dari pihak terkait dan pemerintah daerah perlu mendapatkan perhatian khusus.

KESIMPULAN

Hal yang tidak dapat dihindari, salah satu implikasi dari pengutamaan pada penempatan dari pada perlindungan adalah tidak terakomodasinya perlindungan bagi pekerja migran yang tidak berdokumen, yang sering dianggap sebagai buruh migran *undocumented*. Mereka dianggap tidak perlu memperoleh proteksi karena berada di luar kerangka penempatan. Hal tersebut juga berlaku pula bagi buruh migran yang berangkat secara mandiri. Sedangkan di dalam Konvensi Perlindungan Buruh Migran dan Anggota Keluarganya, di dalamnya juga mengakomodasi perlindungan bagi buruh migran yang tidak berdokumen, termasuk mereka yang berangkat secara mandiri. Persoalan lain yang harus dihadapi oleh buruh migran adalah soal rekrutmen dan penempatan buruh migran Indonesia di luar negeri yang dilakukan oleh perusahaan swasta. Peran pemerintah hanyalah mengawasi melalui skema perizinan.

Pengetahuan dan pemahaman hukum juga menjadi unsur penting bagi jaminan akses keadilan buruh migran. Para buruh migran seharusnya mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pemenuhan hak-hak dasarnya. Kesempatan yang paling terbuka untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman hukum sebenarnya terletak pada tahap pra pemberangkatan, ketika mereka mendapatkan sejumlah latihan dan pendidikan. Namun pada prakteknya seringkali kualitas pendidikan dan pelatihan kerja calon buruh migran bisa dikalahkan oleh orientasi memberangkatkan sebanyak mungkin buruh migran demi mendapatkan keuntungan. Masalah lain yang terkait dengan penjaminan akses keadilan bagi buruh migran adalah identitas hukum. Dalam kenyataannya, banyak buruh migran yang tidak memiliki akses untuk memperoleh dengan cara yang tepat, dan menyimpan dokumen identitas

dirinya. Pemalsuan dokumen, pemalsuan data dokumen, dan penahanan paspor oleh majikan atau jasa pengerah tenaga kerja adalah peristiwa yang sering dijumpai.

Elemen penting berikutnya adalah tersedianya bantuan hukum, terutama selama berada di luar negeri. Ketiadaan hukum khusus yang mengatur soal pekerjaan domestik, maka akses buruh migran domestik kepada bantuan hukum yang mereka hadapi sangat banyak, termasuk banyaknya kasus buruh migran yang mengalami kekerasan. Di negara-negara Teluk, seperti Uni Emirat Arab, konsep mengenai *illegal worker*, dikaitkan dengan keberadaan pekerja yang lari dari rumah karena berbagai sebab, termasuk tidak tahan terhadap perlakuan majikan. Berdasarkan kontrak kerja, begitu keluar dari rumah, mereka dianggap illegal dan polisi bisa menangkapnya sebagai kriminal. Dalam hal seperti ini bantuan hukum sangat dibutuhkan.

Persoalan buruh migran adalah persoalan yang sangat serius, banyaknya persoalan yang dihadapi oleh buruh migran Indonesia disebabkan ketidakseriusan dan ketidakmampuan negara memberikan proteksi kepada buruh migran. Buruh migran dibiarkan begitu saja bekerja dan mengabdikan di negeri orang tanpa adanya jaminan perlindungan dari negara yang siap berada di garda depan mengatasi setiap persoalan yang dihadapi buruh migran. Jika kita ingat kasus beberapa buruh migran Indonesia yang terancam hukuman mati dan negara tidak mengambil peranannya melindungi warga negaranya, juga kasus buruh migran yang disiksa oleh majikannya dan negara hanya diam saja hingga kasus buruh migran yang menjadi korban dari perdagangan manusia itu pun negara masih tidak berbuat apa-apa.

Begitu banyak buruh migran yang hidup tanpa perlindungan hukum. Tidak adanya hukum yang mengatur pekerjaan domestik menimbulkan pertanyaan besar “Bagaimana pekerjaan tersebut dilihat oleh Negara?”. Devisa negara dari Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di berbagai negara Asia dan Eropa mencapai Rp 100 triliun per tahun. Kontribusi yang cukup besar tersebut diperoleh dari empat juta TKI yang bekerja di berbagai sektor di negara di Asia, seperti Jepang, Korea, Thailand, China dan termasuk beberapa negara di Eropa. Sudah saatnya para pemangku kepentingan mulai menerapkan kebijakan yang lebih berpihak pada buruh migran. Diakui atau tidak, negara mendapatkan sumber pemasukan yang sangat besar dari migrasi buruh ke luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, H. M. Burhan *Penelitian Kualitatif*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011
- Natsir Moh. , *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988
- Rahman, Fathor , *Menghakimi TKI Mengurai Benang Kusut Perlindungan TKI*, Pencil 324, Jakarta, 2011
- Himpunan Peraturan Perundang Undangan, *Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia*, Pustaka Media, Jakarta, 2011
- perlindungan.kemlu.go.id/portal/shortcut/galeri_hukum, diakses tanggal 28 September 2018
- <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/10/17/oxyi61-indonesiaarab-saudi-sepakati-sistem-baru-tki>, diakses tanggal 22 September 2018
- <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/19/23433751/membandingkan-penanganan-buruh-migran-indonesia-dengan-filipina>, diakses tanggal 01 Oktober 2018
- <http://www.lbhyogyakarta.org/2016/05/perlindungan-negara-terhadap-buruh-migran/>, diakses tanggal 20 September 2018 pukul 12.00 Wib
- https://kbr.id/berita/01-2013/kemenlu_siapkan_cetak_biru_protap_perlindungan_wni_di_luar_negeri/18838.html, diakses tanggal 20 September 2018
- <https://politik.rmol.co/read/2018/07/06/346720/Kemenlu:-Banyak-Perusahaan-Tidak-Isi-Data-Penempatan-TKI->, diakses tanggal 22 September 2018
- <https://www.kompasiana.com/rrnoor/5a62c9dbcaf7db05be59bb32/belajar-melindungi-tenaga-kerja-dari-phillipina?page=all>, diakses tanggal 24 September 2018

Prospek Pengaruh Iran atas Pemerintahan Irak Pasca Kemenangan Melawan ISIS

Ariski Aznor

Universitas Maritim Raja Ali Haji

arisky.aznor@gmail.com

ABSTRAK

Pada tanggal 9 Desember 2017, Irak mengumumkan kemenangan dalam perang melawan pemberontakan yang dilakukan organisasi teroris Islamic States of Iraq and Syria (ISIS) di Irak. Selain menggunakan militer Irak, muncul pula pasukan paramiliter yang dikenal dengan Popular Mobilition Force (PMF). Pasukan tersebut ditenggarai merupakan proxy Iran di Irak dalam perang melawan ISIS. Namun Iran diduga juga tetap menggunakan PMF sebagai proxy untuk mempengaruhi pemerintah Irak pasca kekalahan ISIS. Sehingga terdapat kekhawatiran bahwa pengaruh Iran di Irak akan meluas. Menggunakan metode penelitian riset pustaka, Penulis menganalisis pengaruh Iran dengan menggunakan proxy nya yaitu PMF Irak. Temuan penulis adalah bahwa Iran akan kesulitan dalam memperluas pengaruhnya di PMF karena dinamika organisasi PMF sendiri terdapat faksi anti Iran. Selain itu, refleksi dari hasil pemilu Irak dari koalisi Muqtada al Sadr yang memiliki sikap anti Iran juga mengindikasikan bahwa Iran belum berhasil memperluas pengaruhnya di kalangan masyarakat Irak.

Kata Kunci : Irak, Iran, PMF, Ali Khamenei, Proxy

ABSTRACT

On December 9, 2017, Iraq announced their victory in a war against a rebellion by the Islamic States of Iraq and Syria (ISIS) terrorist organization in Iraq. Besides using the Iraqi military, paramilitary forces which are known as the Popular Mobilition Force (PMF) emerged. The force is believed to be Iran's proxy in Iraq in the war against ISIS. However, Iran also allegedly continued to use the PMF as a proxy to influence the Iraqi government after ISIS's defeat. So there is concern that Iran's influence in Iraq will expand. Using the method of library research, the author analyzes Iran's influence by using its proxy namely the Iraqi PMF. The author's finding is that Iran will find difficulty to expand its influence at the PMF because the dynamics of the PMF organization itself which have anti-Iranian factions. Furthermore, a reflection of the Iraqi election results from the Muqtada Sadr coalition which has an anti-Iran attitude also indicates that Iran has not succeeded in expanding its influence among Iraqi people.

Keyword : Iraq, Iran, PMF, Ali Khamenei, Proxy.

Pendahuluan

Pada tanggal 9 Desember 2017, Pemerintah Irak secara resmi mengumumkan kemenangannya dalam perang melawan ISIS setelah berhasil merebut kota Mosul dari tangan ISIS. Kemenangan Irak pada perang melawan ISIS berkat kontribusi dari berbagai aktor dari pasukan dari negara-negara barat terutama Amerika Serikat, pasukan dari tentara Kurdistan Irak atau yang biasa dikenal dengan Peshmerga dan milisi Syiah Irak yang biasa dikenal dengan Popular Mobilition Force (PMF) yang mendapat dukungan dari Iran (Chmaytelli & Aboulenein, 2017).

Kemenangan dalam perang melawan ISIS berdampak pada dinamika politik di Irak juga persoalan baru untuk kestabilan pemerintah Irak. Persoalan Pertama yang dihadapi pemerintah Irak adalah menguatnya pengaruh Kurdistan Irak atau yang biasa dikenal Kurdistan Regional

Government (KRG). Peshmerga adalah wilayah semi independen Irak yang mayoritas penduduknya adalah etnis Kurdi. Etnis Kurdi sejak dulu mengalami oppresif dan diskriminasi oleh pemerintah Irak sebelumnya terutama di masa pemerintahan Saddam Husein. Sejak kejatuhan Irak pemerintah Saddam Husein oleh pasukan koalisi yang dipimpin oleh Amerika Serikat, Pemerintah KRG didirikan dan mendapat pengakuan termasuk memiliki tentara sendiri yang dikenal dengan Peshmerga, terpisah dari militer Irak pada tahun 2005 (BBC,2018). Posisi Kurdistan Irak semakin menguat pada politik internal Irak juga dunia internasional sejak peran Peshmerga pada perang melawan ISIS. Peshmerga mendapat simpati dari seluruh dunia setelah peran mereka dalam perang melawan ISIS. Simpati ini dimanfaatkan Pemimpin Kurdistan Mahsoud Barzani percaya diri untuk mengadakan referendum di wilayah Kurdistan Irak untuk memutuskan apakah Kurdistan berpisah dari Irak apa tidak Meski dibawah bayang-bayang ancaman dari pihak Irak. Hasil referendum adalah 97% rakyat Kurdistan setuju Kurdistan keluar dari Irak (Chulov, 2017) Namun hasil tersebut tidak diakui oleh satu negara pun selain Israel. Sedangkan pasukan Irak bersiap mengadakan invansi di wilayah Kurdistan jika Kurdistan berpisah dari Irak. Referendum tersebut dianggap blunder Massoud Barzani. Akibat ketegangan antara Irak dan Kurdistan Irak tersebut, Massoud Barzani mengundurkan diri dan militer Irak merebut kota Kirkuk kembali yang sebelumnya dikuasai pasukan Peshmerga (Morris, 2017).

Persoalan berikutnya adalah mengenai isu kehadiran pasukan milisi yang didominasi milisi Syiah (meski terdapat sebagian kecil milisi Sunni) yang dikenal dengan *Popular Mobilition Force* (PMF). PMF yang dibentuk bulan Juni tahun 2014 yang diprakarsai oleh bekas Perdana Menteri Irak Nuri Al Maliki. PMF kerap dianggap *proxy* Iran karena dilatih oleh pasukan Garda Revolusi Iran Al Quds. PMF dibentuk merupakan respon atas kegagalan militer Irak dalam melawan ISIS terutama sejak jatuhnya kota Mosul di tangan kelompok ISIS (Mansour& Jabar, 2017). Keberadaan PMF saat melawan ISIS bukan tanpa cela. PMF dituduh telah melakukan kejahatan perang bahkan pembantaian warga sipil Sunni di Irak sehingga keberadaannya dikhawatirkan akan menimbulkan ketegangan sektarian baru di Irak (Doanvo, 2016). Amerika Serikat keberatan dengan pasukan PMF terutama setelah alutsista hibah dari Amerika Serikat untuk militer Irak dipakai oleh PMF karena menganggap PMF merupakan kepanjangan tangan Iran (Aldroubi, 2017). PMF diproyeksikan akan menjadi kekuatan politik yang diperhitungkan pada politik domestik Irak pasca kemenangan dalam perang melawan ISIS. Permasalahannya adalah mengingat PMF kerap identik dengan *proxy* Iran ditambah naiknya peran politisi Syiah yang berlangsung sejak jatuhnya Saddam Husein, apakah Iran akan memperluas pengaruhnya di Irak sehingga Iran mampu mempengaruhi keputusan pemerintah

Irak? Melalui tulisan ini, penulis akan menganalisis bagaimana prospek pengaruh Iran pasca kemenangan PMF dalam perang melawan ISIS.

Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode *library research*. Penulis mengambil data sekunder dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, berita dan sumber referensi lainnya. Tulisan ini memfokus mengenai pengaruh Iran pada Irak melalui pasukan paramiliter yang dikenal dengan Popular Mobilization Forces (PMF). Pasukan paramiliter tersebut mendapat reputasi baik dan diperhitungkan pada politik dalam negeri Irak setelah ISIS dianggap berhasil dikalahkan (meski ISIS hingga detik ini masih melakukan perlawanan secara sporadis). Penulis menggunakan konsep Proxy Warfare.

Tidak ada definisi yang disepakati oleh para ahli mengenai definisi Proxy Warfare. Loveman mendefinisikan proxy warfare sebagai upaya mendukung pihak ketiga dalam suatu konflik untuk melawan musuh yang sama seiring dengan sistem internasional dan teknologi yang maju. Tujuan dari penggunaan “pihak ketiga” tersebut menghindari konfrontasi langsung dengan pihak musuh. (loveman,2002). Andrew Munford mendefinisikan Proxy Warfare sebagai konflik yang melibatkan pihak ketiga untuk mempengaruhi hasil akhir dari suatu peperangan. (Munford, 2013). Penggunaan proxy atau pihak ketiga lebih disukai dikarenakan selain karena penggunaan ongkos baik ekonomi maupun politik relatif kecil, konsekuensi dari penggunaan proxy juga lebih kecil dampaknya daripada harus terlibat secara langsung. Baik Munford dan Loveman menyepakati definisi proxy warfare sebagai bentuk keterlibatan pihak ketiga dalam menghindari konfrontasi langsung serta konsekuensi andai berhadapan langsung dengan pihak musuh. Alasan lainnya adalah umumnya suatu perang kerap kali tidak populer bagi publik dalam negeri tersebut. Meski ada tujuan yang ingin dicapai, penggunaan tentara reguler dalam peperangan hanya akan mendapat reaksi keras dari dalam negeri. Fenomena ini dikenal dengan “Vietnam Syndrome” (Munford 2013). Belajar dari kasus perang Vietnam dimana meski vital untuk kepentingan Amerika Serikat pada perang dingin, perang tersebut tidak populer bagi kalangan publik Amerika sehingga Amerika Serikat terpaksa harus menarik tentaranya. Meski demikian Amerika Serikat tetap melanjutkan program melawan komunis Vietnam dengan menjadikan tentara Vietnam Selatan sebagai “proxy” Amerika Serikat.

Negara Iran adalah negara yang paling kenal dalam mendukung proxy di berbagai konflik terutama di Timur Tengah. Pada kasus perang saudara Lebanon (1975-1990) misalnya, Iran mendukung Hizbullah dan kelompok Islamic Union Movement (IUM). Pada kasus dukungan Iran atas kedua kelompok tersebut, tampaknya ideologi dan sektarian tidak memiliki

peran penting seperti terlihat pada organisasi IUM yang merupakan Islam Sunni, dan Hizbullah meski menganut Islam Syiah juga berperang dengan kelompok Syiah lainnya seperti Amal yang didukung Syria (Soze,2016). Pada kasus Perang saudara Yaman (2015-sekarang) Iran mengakui membantu pasukan kelompok Houthi berupa pelatihan, pengiriman penasehat hingga pemberian senjata dalam melawan pasukan koalisi yang merupakan proxy bagi negara-negara teluk terutama Arab Saudi. (Saul, Hafezi,Georgy,2017). Pada perang saudara di Suriah, Iran turut membantu rezim Bashar Al Assad baik mengirim pasukan garda revolusi hingga meminta Hizbullah membantu dalam perang melawan pemberontak dari berbagai organisasi atau kelompok dan juga ISIS di Suriah (Deghan,2018). Pada perang melawan ISIS di Irak, Iran juga turut membantu berbagai kelompok organisasi yang nantinya merupakan bagian dari Popular Mobilization Forces (PMF) dalam perang melawan ISIS. Apa yang dilakukan Iran dalam mendukung berbagai kelompok dan negara seperti Suriah dalam perang di timur tengah merupakan bagian ambisi Iran untuk menjadi kekuatan regional di Timur Tengah. Di sisi lain, mengirim pasukan reguler Iran apalagi wajib militer tidak dilakukan Iran karena khawatir mendapat reaksi negatif dari publik Iran. Bahkan sempat terjadi protes di kalangan rakyat Iran yang mempertanyakan urgensi untuk terlibat berbagai konflik di Timur Tengah yang membuat Iran terus menggelotorkan uang untuk militernya dan proxy-nya sementara ekonomi Iran kian memburuk (Mouchantaf, 2018). Iran juga mempertimbangkan suara kecaman dunia internasional seandainya terlibat pada berbagai perang. Keterlibatan Iran dalam perang Suriah dan Yaman menjadi dasar Amerika Serikat memberi sanksi atas Iran. Sanksi yang lebih berat bahkan kecaman seluruh elemen dunia Internasional seandainya Iran justru mengirim pasukan regulernya ke berbagai konflik di Timur Tengah. Iran berniat untuk memperkecil biaya politik dan ekonomi Iran dalam mencapai ambisi sebagai kekuatan regional di Timur Tengah dengan menggunakan proxy, Meski tetap mendapat protes dari publik Iran, setidaknya opsi menggunakan proxy masih lebih baik dibandingkan jika Iran justru mengirim pasukan regulernya ke berbagai konflik di Timur Tengah. Munford menyebut bahwa pertimbangan untuk menggunakan proxy selain karena faktor resiko adalah ideologi dan kepentingan (munford,2018) Pada faktor ideologi dan kepentingan misalnya, menyebarkan ide-ide revolusi Islam merupakan salah satu pillar dari kebijakan luar negeri Iran. Iran berupaya menampilkan diri sebagai role model pemerintahan Islam dengan konsep ideologi velayat al-faqih. Iran memiliki kepentingan untuk mempengaruhi pemerintahan Irak yang saat ini didominasi oleh Syiah dan memanfaatkan kesamaan sektarian sebagai sesama Syiah.

PMF disebut-sebut sebagai proxy Iran di Iraq. Namun pada kasus ini, penulis membahas bagaimana pengaruh Iran dengan keberadaan PMF yang mulai diperhitungkan pada politik domestik Irak. Pengaruh disini tidak melalui peperangan dan PMF dengan jumlah senjata jumlah anggota serta dukungan memiliki potensi menekan pemerintahan Irak. Sehingga kemungkinan besar Iran berupaya mempengaruhi pemerintahan Irak dengan melalui proxy nya yaitu PMF.

PEMBAHASAN

A. Dominasi Pengaruh Iran di Irak Pasca Saddam Husein.

Di Masa Saddam Husein, Pemerintahan Irak didominasi oleh politisi Sunni yang merupakan loyalis Saddam Husein sedangkan penganut Syiah kerap dianggap termarginalkan dalam politik Irak meski penganut Syiah merupakan mayoritas dari Irak. Kebijakan tersebut dilakukan Saddam Husein agar bawahannya loyal dengan dirinya sehingga kekuasaannya akan tetap langgeng. Pertimbangan lainnya yaitu kekhawatiran pengaruh Iran di Irak terutama pengaruh Iran dikalangan Syiah di Irak. Pasca perang Iran-Irak Saddam Husein mempromosikan berbagai suku penganut Sunni di tubuh militer termasuk pasukan elit Irak yang dikenal dengan Garda Republik. Marginalisasi wilayah yang didominasi penganut Syiah seperti di Irak Selatan, kurangnya representatif Syiah di rezim Saddam Hussein dan provokasi dari Iran penyebab terjadinya pemberontakan / *intifada* Syiah (bersama etnis Kurdi) pada tahun 1991 yang nyaris menggoyang rezim Saddam Husein. *Intifada* Syiah yang berakhir pada tahun 1994 berhasil dipadamkan oleh Saddam Hussein. Jutaan warga terutama Syiah Irak, termasuk diantaranya adalah para ulama dan intelektual melarikan diri ke negara Iran untuk menghindari persekusi dari pemerintahan Saddam Husein. (Barram, 1997) Para pelarian dan diaspora Irak di Iran mendapat pendidikan serta pengaruh dari nilai-nilai konservatif dan politik islam versi Iran. Nantinya para diaspora Irak tersebut mendominasi pemerintahan Irak pasca jatuhnya Saddam Husein.

Pada tahun 2003, Amerika Serikat melancarkan invansi ke Irak dan berhasil menjatuhkan Saddam Husein dari pemerintahan Irak. Amerika Serikat sendiri ingin meletakkan dasar dan ide demokrasi di pemerintahan Irak pasca Saddam Hussein dan memanggil para pelarian yang sebelumnya merupakan oposisi Saddam Hussein baik yang Syiah, Sunni maupun etnis Kurdi agar kembali ke Irak untuk menjalankan roda pemerintahan Irak pasca Saddam Husein Niat Amerika Serikat adalah membangun sistem demokrasi dengan berasaskan pluralisme agar terdapat harmonisasi Syiah-Sunni dan juga Arab-Kurdi. Pemimpin partai Iraqi National Congress (INC), Ahmed Chalabi seorang Syiah Sekuler menyebut bahwa perbedaan

sektarian dan keyakinan tidak akan menjadi penghalang untuk menciptakan Irak yang demokrasi. Namun kenyataannya yang menguat adalah populisme Islam terutama di kalangan penganut Syiah di Irak. Para politisi Irak mengkampanyekan menerapkan syariah Islam di Irak dan menggunakan kitab suci Alquran sebagai konstitusi alternatif Irak pasca Saddam Hussein. Di kalangan Irak masyarakat Irak sendiri, islamisasi juga mulai bangkit ditandai dengan aturan syariah pemerintah daerah di berbagai wilayah Irak seperti Basra dan Sadr City, menjamurnya sekolah-sekolah agama dan penggunaan pakaian muslim yang semakin banyak jika dibandingkan dengan era Saddam Hussein (Edward, 2006).

Para politisi, ulama dan intelektual Syiah sebagian besar sempat menggunakan Iran sebagai tempat pelarian pada masa pemerintahan Saddam Hussein. Hal ini membuat banyak diantara mereka kerap dianggap punya pandangan pro Iran atau dibawah pengaruh Iran dan nantinya akan mengisi jabatan pemerintahan dan mendominasi politik dalam negeri Irak. Partai besar menganut ideologi islam Syiah diantaranya Supreme Council for the Islamic Revolution in Iraq (dikenal SCIRI) dan partai Islamic Dawa Party. (Guardian, 2005)

SCIRI awalnya merupakan organisasi perlawanan Saddam Hussein yang dibentuk di Iran pada tahun 1982. Organisasi ini dibentuk karena terinspirasi ide revolusi islam Iran. Selain menggunakan Iran sebagai basis gerakan, SCIRI memiliki sayap milisi yang dikenal dengan Badr organization dan organisasi tersebut mendapat pelatihan militer dari Iran sendiri. Pada perang Irak-Iran, SCIRI membela Iran dan terlibat dalam gerilya melawan pasukan Irak. Meski perang Irak-Iran berakhir pada tahun 1988, SCIRI melanjutkan perjuangannya dalam melawan Saddam Hussein dan membunuh beberapa pejabat partai berkuasa di era Saddam Hussein, yaitu Partai Baath (Katzman, 2005). Pada tahun 2007, SCIRI mengubah namanya dengan menghilangkan kata “revolution” menjadi Islamic Supreme Council of Iraq (ISCI). Pejabat partai SCIRI mengatakan menghilang kata “revolution” karena sebelumnya SCIRI merupakan organisasi anti rezim Saddam Hussein dan setelah Saddam Hussein ditumbangkan, maka tidak lagi sesuai dengan kondisi Irak pasca Saddam Hussein (Karouny, 2007). Namun ada yang menduga mengubah nama dari Supreme Council for the Islamic Revolution in Iraq (ISCI) menjadi Islamic Supreme Council of Iraq (ISCI) untuk memperbaiki reputasi organisasi tersebut yang kerap identik dengan kepanjangan tangan Iran. Sejak kepemimpinan, Ammar al-Hakim pada tahun 2009, ISCI juga mulai mengkritisi pengaruh Iran dan ide *Velayat al-Faqih* yang sebelumnya dianut (Smyth, 2016). Meskipun demikian sikap ISCI yang meninggalkan ide *Velayat al-Faqih* ditentang oleh Badr Organization, faksi paramiliter di tubuh ISCI (Wing,

2015). Badr organization nantinya akan menjadi bergabung PMF yang dipimpin oleh Haider al Ameri.

Sama halnya SCIRI/ISCI, Islamic Dawa Party merupakan partai yang mengusung ideologi Islam Syiah. Dawa' Party juga awalnya organisasi perlawanan terhadap rezim Saddam Hussein. Dawa' Party juga menggunakan metode kekerasan seperti percobaan pembunuhan terhadap Tariq Aziz, seorang ajudan Saddam Hussein, Uday Hussein, anak dari Saddam Hussein hingga Saddam Hussein sendiri (Shanahan, 2004). Islamic Dawa Party juga ikut dalam *intifada* Syiah pada tahun 1991 di wilayah selatan Irak hingga perbatasan Iran dengan memanfaatkan kegagalan evakuasi tentara Irak dari Kuwait (Dai, 2008). Meski Iran menjadi tempat pengasingan anggota seperti Nouri al Maliki (Perdana Menteri Irak 2006-2014) dan basis partai, beberapa anggotanya seperti Ibrahim al Jafri (sekarang menjabat Menteri Luar Negeri) dan Haider al Abadi (sekarang menjabat Perdana Menteri Irak) memutuskan meninggalkan Iran ke negara Inggris untuk menghindari pengaruh Iran serta ketidaksetujuan atas ideologi yang diusung Iran. Dengan kata lain terdapat friksi antar faksi di dalam tubuh partai Islamic Dawa Party antara faksi pro Iran dan anti Iran.

Pengaruh *Proxy* Iran tidak hanya di kalangan intelektual Syiah saja namun juga ada di kalangan elit etnis Kurdi di Irak terutama yang sebelumnya anti dengan Saddam Hussein. Sejak perang Irak-Iran, Iran menjalin hubungan dengan dua organisasi Kurdi Irak yaitu Kurdish Democratic Party of Iraq (KDP) yang dipimpin oleh Massoud Barzani, dan Patriotic Union of Kurdistan (PUK) yang dipimpin oleh Jalal Talabani (Middle East Institute, 2009). Kerja sama Iran kedua tokoh Kurdi tersebut awalnya karena memiliki musuh yang sama yaitu Saddam Hussein. Pasca jatuhnya Saddam Hussein, Jalal Talabani dan Massoud Barzani menjadi tokoh penting di Kurdistan bahkan Jalal Talabani sempat memegang Presiden Irak pada periode 2004-2015 dan Massoud Barzani menjadi presiden Kurdistan Irak pada tahun 2005-2017.

Dari pemaparan berikut, terdapat tiga elemen dari proxy Iran di Irak yaitu meliputi Islamic Dawa' Party, ISCI dan Kurdistan baik KDP maupun PUK. Ketika pemberontakan ISIS terjadi, ketiga organisasi tersebut membentuk pasukan paramiliter yang nantinya akan bergabung dengan PMF yang akan mendominasi dalam operasi militer melawan ISIS daripada militer Irak sendiri.

B. Popular Mobilization Forces (PMF)

Popular Mobilization Forces (PMF) atau dalam bahasa Arab dikenal dengan nama *al-Hashd al-Shaabi* merupakan organisasi milisi yang dibentuk sebagai respon atas ancaman ISIS tahun 2014. Saat itu, ISIS berhasil menguasai sebagian besar wilayah Irak bagian utara dan

timur bahkan kota terbesar kedua Mosul. Dibentuknya PMF berkat fatwa dari Ulama Kharismatik Syiah Ayatollah Ali al-Sistani yang mewajibkan semua muslim Irak untuk angkat senjata melawan ISIS saat mengisi ceramah sholat Jumat di Karbala, Irak pada tahun 2014. (Khateb, 2017). Fatwa tersebut membuat banyak warga sipil Irak terutama di kalangan Syiah bergabung ke berbagai organisasi milisi yang merupakan bagian dari PMF. PMF pun mulai menjadi garis terdepan dalam perang melawan ISIS. Hal ini juga membuat PMF menjadi organisasi yang didominasi Syiah. Dengan keanggotaan Islam Syiah tersebut, terdapat kekhawatiran akan potensi konflik sektarian di Irak pasca kekalahan ISIS.

Keanggotaan PMF berkisar di angka 60.000 hingga 100.000 anggota yang terdiri dari berbagai organisasi. Pada pertempuran Mosul misalnya, pasukan PMF yang diterjukan berkisar dari 35.000 anggota hingga 90.000 anggota (Strategic Comment, 2017). Jumlah tersebut tentu sangat besar untuk ukuran organisasi bersenjata non negara. Sebagai perbandingan, jumlah tentara Irak hingga 168.000 personel aktif (Global Fire Power, 2017). Berbagai Organisasi-organisasi tersebut kerap kali memiliki perbedaan kepentingan, ideologi, prioritas dan perbedaan lainnya yang membuat tiap organisasi ini juga bentrok satu sama lain meski sama-sama memprioritaskan untuk mengalahkan ISIS di Irak. Secara ideologi, faksi-faksi PMF terbagi 3 yaitu pro Ayatulloh Khomeini, Pro Ayatulloh Al Sistani, dan Pro Sadr (Mansour & Jabar 2017).

C. Pengaruh Iran Pada Organisasi PMF

Faksi utama sekaligus dominan dalam tubuh PMF adalah faksi pro Ayatulloh Khomeini atau pro Iran. Ayatulloh Khomeini merupakan ulama kharismatik sekaligus pemimpin spritual (memegang kepala negara) di negara Republik Islam Iran. Faksi ini tentu saja mendapat dukungan Iran, baik senjata, pelatihan bahkan dana. Selain itu organisasi atau faksi pro Iran juga disebut mendapat nasihat langsung dari Mayor Jenderal Qasem Sulaimi beserta pasukannya, Iranian Islamic Revolutions Guard Corps (IRGC). Praktis organisasi yang pro Khomeini memiliki kekuatan yang lebih kuat daripada organisasi dari faksi lainnya di tubuh PMF. Iran ditenggarai menggunakan organisasi ini untuk melawan ISIS yang dianggap ancaman bagi Iran dan situs-situs suci Islam Syiah di Irak. Setelah ISIS dianggap kalah sejak pertempuran Mosul, bukan berarti organisasi ini berhenti menerima bantuan dari Iran. Iran diduga menggunakan faksi-faksi PMF pro Khomeini untuk mempengaruhi pemerintahan Irak pasca kekalahan ISIS. Organisasi pro Iran atau pro khomeini seperti Badr Organization, Saraya Khurasani, Kata'ib Hezbollah, Kata'ib Abu Fadhl al-Abbas dan lain-lain (Mansour & Jabar 2017). Beberapa organisasi ini bahkan dianggap sebagai teroris oleh Amerika Serikat karena kedekatan dengan

Iran. Faksi yang didukung Iran adalah terbesar sekaligus terkuat. Hal ini dikarenakan faksi ini lebih banyak mendapat dukungan dari Iran.

Kemunculan dari PMF pro Iran berkat jasa Nouri Al Maliki, bekas perdana menteri Irak. Nouri al Maliki. Pada masa pemerintahan Al maliki terutama sejak berakhirnya pendudukan Amerika Serikat pada tahun 2011, Nouri Al Maliki mulai menunjukkan gestur untuk mendekati Iran. Diantaranya ialah Al Maliki mendukung rezim Bashar Al Assad, sekutu Iran dengan mengirim pasukan paramiliter ke Suriah untuk mendukung Rezim Al Assad. Sikap al Maliki yang mendukung pasukan paramiliter sebenarnya berseberangan dengan sikap partainya, *Dawa Islamic Party* yang menolak keberadaan pasukan paramiliter. Namun dukungan atas paramiliter dan Iran merupakan langkah pragmatis yang ia lakukan untuk berkuasa kembali di Irak (Mansour&Jabar, 2017)

Faksi ini beberapa kali melakukan manuver yang membuat terjadi pertentangan antara PMF pro Iran dan pemerintah Irak sendiri. PMF pro Iran menolak usulan pemerintahan Albadi untuk terintegrasi dengan militer Irak dan tunduk pada pemerintah Irak (Majidyar, 2018). Nouri Al Maliki, bekas perdana menteri Irak mengkritik pemerintahan Albadi lemah (Ghobashy & Salim 2017) Hadi Almeri, tokoh PMF pro Iran protes terhadap pemerintahan Albadi karena tidak menunjuk ia sebagai menteri dalam negeri. Ia juga protes karena PMF dipinggirkan pada front pertempuran seperti kota Fallujah dan Mosul. Sementara itu Abu Mehdi al-Muhandis, administrator PMF pro Iran mengirim surat protes terhadap pemerintahan Albadi karena kurangnya dukungan Albadi terhadap PMF sehingga melemahkan kemampuan mereka dalam perang melawan ISIS. (Mansour & Jabbar 2018). Meskipun akhirnya PMF pro Iran setuju atas perintah Albadi untuk bergabung ke militer Irak (Reuters, 2018). Kelompok PMF pro Iran berkoalisi dikenal dengan koalisi Fattah yang dipimpin oleh Hadi al Ameri, tokoh PMF pro Iran. Koalisi ini dibentuk untuk menghadapi pemilu di Bulan mei 2018. (Tomaj & Shaker, 2018).

Faksi pro Iran juga tercatat terlibat pada perang saudara di Suriah untuk membela rezim al Assad. PMF pro Iran terlibat pada pertempuran Aleppo di pihak rezim Al Assad. Di Aleppo, PMF dituduh melaksanakan pembantaian atas warga sipil Aleppo. (Middle East Insititue ,2018). Atas koordinasi Iran, PMF ikut membantu misi Iran mengamankan jalur Baghdad-Damascus serta perbatasan Irak-Suriah. Misi tersebut dilaksanakan untuk mengamankan jalur logistik dari Teheran menuju Suriah melalui Baghdad untuk dukungan militer rezim Al Assad. Karena misi tersebut, PMF terlibat baku tembak dengan oposisi anti Al Assad. (Chulov,2018) Haidi Almeri, tokoh Irak pro Iran dituduh Amerika Serikat terlibat dalam penyeludupan senjata-

senjata dari Iran ke pasukan pro rezim Bashar Al Assad (Filkins, 2018). Kelompok pro Iran juga mengepung pangkalan militer Amerika Serikat di Baghdad, karena adanya tuduhan bahwa pangkalan militer tersebut digunakan Amerika Serikat untuk mengebomb posisi pasukan rezim Bashar Al Assad. (Majidyar, 2018).

D. Tantangan terhadap Pengaruh Iran di Tubuh Organisasi PMF.

Faksi pro Iran di dalam tubuh PMF sebenarnya mendapat tantangan dari faksi PMF anti Iran. Salah satunya adalah faksi dari kelompok pro dengan Ayatullah Ali Al Sistani. Ayatullah Ali Al Sistani juga merupakan Ulama Islam Syiah kharismatik dari Irak. Ayatullah Al Sistani adalah orang yang sangat berpengaruh bagi kalangan umat Islam Syiah terutama di Irak. Setelah fatwa wajib untuk memerangi ISIS, banyak warga sipil Irak umumnya Islam Syiah bergerak karena fatwa Sistani dan bergabung ke berbagai organisasi milisi di dalam PMF. Organisasi atau faksi PMF yang pro dengan Ali Al Sistani adalah diantaranya Saraya al-Ataba al-Abbasiya, Saraya al-Ataba al-Hussainiya, Saraya al-Ataba al-Alawiya, dan Liwa 'Ali al-Akbar. Keempat organisasi mewakili dari 3 kota Suci bagi umat Islam Syiah yaitu meliputi Najaf, Khadimiya dan Karbala (Mansour& Jabar 2017).

Ayatullah Ali Al Sistani dikenal sebagai Ulama Syiah yang anti dengan Iran. Sikapnya yang anti Iran karena faktor ideologi. Ia menolak konsep *Velayat al Faqih*, konsep pemerintahan Islam dimana ulama memegang kursi pemerintahan dan jabatan politik lainnya. Konsep ini menjadi dasar ideologi yang dianut Republik Islam Iran. Bagi Ali Al Sistani, adalah sebaiknya ulama tidak boleh memegang jabatan keduniawian. Al Sistani yang berpusat di kota Najaf, Irak dan Khameini yang berpusat di kota Qoms,Irak menjadi dua kutub spritual bagi penganut Islam Syiah (Chulov, 2016). Pada umumnya PMF yang pro dengan Al Sistani selalu bersebrangan dengan PMF pro Iran. Jika PMF pro Iran menolak untuk bergabung ke militer Irak, PMF pro Ali Al Sistani mendukung usulan tersebut, ia juga meminta agar PMF sebaiknya dibubarkan jika ISIS sudah dikalahkan. Ia juga menentang opsi agar milisi PMF untuk terlibat perang di Suriah demi melindungi situs suci Islam Syiah di Suriah. Menurut Ali Al Sistani, PMF hanya berfokus pada perlindungan situs suci Islam Syiah di Irak saja. Bahkan Ia terang-terangan mengecam Hassan Nasrallah, pemimpin Hizbullah atas keterlibatannya pada perang Suriah membela rezim Al Assad (Mansour & Al Jabbar 2017). Ali Al Sistani bahkan menolak bertemu dengan utusan langsung dari khameini untuk (hameed. 2014).

Faksi anti Iran berikutnya yaitu dari kelompok pro Muqtada Al Sadr. Muqtada al Sadr adalah seorang ulama Syiah yang juga cukup berpengaruh di Irak. Kepopulernya diperoleh karena ia dikenal dekat dengan masyarakat kelas bawah Irak. Selain itu berbeda dengane elit

Irak pada umumnya yang banyak melarikan diri ke Iran di masa pemerintahan Saddam Hussein, Ia memilih tetap tinggal di Irak. Faktor tersebut membuat Sadr menjadi populer di kalangan rakyat Irak. Gerakan yang pro dengan Muqtada Al Sadr dikenal dengan Sadr Movement (Mansour & Jabar 2018). Ia sebelumnya dikenal sebagai tokoh anti Amerika Serikat dan sekutunya selama pendudukan Amerika Serikat pasca jatuhnya Saddam Hussein. Al Sadr beserta pasukannya Saraya As Salam memerangi pasukan Amerika Serikat dan sekutunya sebelum akhirnya dikalahkan dan Ia melarikan diri ke Iran. (Jerusalem Post, 2007). Ia membangun kembali milisinya dalam rangka untuk memerangi ISIS. Al Sadr dikenal dengan membawa ideologi nasionalisme dan kerap menolak segala campur tangan asing di Irak termasuk Iran. Ia secara terang-terangan menentang dominasi Iran di PMF. Namun karena sikapnya tersebut, pasukannya tidak memiliki fasilitas dan perlengkapan memadai seperti PMF lainnya karena Iran enggan mensponsori pasukan Al Sadr (Mansour& Jabar 2018).

Pada tahun 2016, Muqtada al Sadr memimpin gerakan protes hingga menembus *greenzone* di kompleks Istana, menuntut reformasi di tubuh pemerintahan Irak serta penggantian beberapa menteri agar bisa diisi oleh ahli atau teknokrat (BBC,2016). Gerakan ini mendapat kritikan dari kelompok PMF pro Iran. Bahkan Hadi al Ameri, berkunjung Hakim Agung Irak Medhat al-Mahmood sebagai bentuk kritik dari gerakan protes yang dilakukan Muqtada al Sadr (Mansour & Jabar 2018).

Tampaknya, upaya pengaruh Iran terhadap Irak melalui *proxy* PMF tampaknya akan mengalami hambatan. Hambatan tersebut justru datang dari tokoh Syiah yaitu Ali al-Sistani dan Muqtada al Sadr. Keduanya memiliki sikap anti pengaruh Iran dan kedua tokoh tersebut berpengaruh bagi kalangan umat Islam Syiah. Faksi PMF pro Ali al Sistani dan Muqtada al Sadr mendukung pemerintah Albadi mengenai integrasi PMF sementara PMF pro Iran menolak. Ali al Sistani dan Muqtada al Sadr menjadi hambatan terbesar bagi Iran untuk mempengaruhi pemerintahan Irak melalui *proxy* PMF.

Kebijakan Haider Al Abadi terhadap PMF Pasca Kemenangan Melawan ISIS

Perdana Menteri Irak Haider Al Abadi harus menghadapi persoalan baru setelah kekalahan ISIS yaitu mengenai apa langkah yang harus diambil oleh Albadi terhadap keberadaan PMF yang memiliki jumlah anggota besar dan bersenjata. Sejak awal masa kepemimpinannya, Albadi secara terang terangan mengecam keberadaan pasukan paramiliter tersebut. Keberadaan paramiliter tersebut berkat dukungan Nouri Al Maliki, bekas perdana menteri Irak dan sebenarnya merupakan rekan satu partai Albadi yaitu Islamic Dawa Party. Maliki tampaknya memiliki kepentingan karena keberadaan paramiliter seperti PMF akan

membantunya untuk berkuasa lagi di Irak (Mansour& Jabar 2018). Keberadaan PMF juga akan berpotensi menjadi masalah jika dibiarkan terus eksis. Sementara PMF juga tidak populer di kalangan penganut islam Sunni karena kekerasan sektarian PMF dimana PMF dituduh terlibat terhadap pembunuhan bahkan pembantaian warga sipil Sunni di Irak (Human Right, 2016). Sehingga kekhawatirannya adalah keberadaan PMF juga akan berpotensi membuat Irak memasuki perang sektarian. Jika Alabadi mengambil langkah pembubaran secara paksa justru dikhawatirkan akan menjadi perang saudara baru jika langkah tersebut diambil. Selain itu karena PMF populer bagi masyarakat Irak karena jasanya melawan ISIS sehingga kebijakan yang merugikan PMF akan menjadi kebijakan yang tidak populer.

Agar PMF tersebut tidak bergerak liar, Alabadi meminta agar semua pasukan PMF terintegrasi ke dalam tubuh militer Irak sehingga dapat dikoordinasi oleh pemerintah Irak. Berikutnya adalah senjata-senjata berat seperti kendaraan lapis baja juga diwajibkan untuk diserahkan ke militer Irak (Reuters, 2018). Keputusan tersebut ditolak oleh PMF pro Iran namun didukung oleh PMF pro Ali al Sistani dan Muqtada Al Sadr (Mansour & Jabar 2017). Karena isu pembantaian terhadap penganut Sunni di Irak oleh PMF pro Iran di wilayah mayoritas Sunni karena tuduhan simpatisan ISIS. Alabadi sempat meminta agar PMF yang berada di wilayah tersebut ditarik mundur, namun pada bulan Agustus 2018, Alabadi menganulir perintah tersebut dan berdalih bahwa hanya komandan PMF sendiri yang bisa menarik mundur pasukan tersebut (Nawzad, 2018). Tampaknya pemerintahan Alabadi masih enggan mendesak kelompok PMF pro Iran karena pertimbangan resiko meski kelompok ini merupakan lawan politik Alabadi dan berpotensi menjadi ancaman bagi Irak.

E. Melihat pengaruh Iran di Irak Dari Hasil pemilu Irak 2018.

Pada bulan Mei 2018, Irak mengadakan pemilu legislatif. Hasilnya cukup mengejutkan. Koalisi Muqtada al Sadr justru memenangi pemilu tersebut dengan memperoleh 54 kursi legislatif. Sementara Koalisi Fattah pimpinan Hadi al Ameri memperoleh 47 kursi dan Koalisi Nasr pimpinan *incumbent* al Abadi 43 kursi. (Aljazeera, 2018) Yang menarik dari koalisi Sadr adalah terdapat dari kalangan komunis, progresif, yang umumnya menolak pemerintahan corak sektarian (Macdonald, 2018). Sikap al Sadr yang anti elit, didukung oleh kelas bawah, minoritas Sunni, Kurdi menjadi faktor kemenangan koalisi Sadr. Lantas apa hubungannya dengan pemilu Irak 2018 dan pengaruh Iran ?. Kemenangan Sadr disusul pawai dari kalangan pendukungnya meneriakkan anti Iran (Majidyar, 2018). Kemungkinan sikap Sadr yang dikenal sebagai nasionalis anti intervensi asing termasuk Iran menjadi faktor penting atas kemenangan koalisi Sadr. Dengan kata lain rakyat Irak sendiri meski mayoritas Syiah umumnya

memiliki persepsi negatif atas Iran. Pihak Iran sendiri melalui Imam Khamenei memperingatkan bahaya koalisi “komunis,liberal” bagi Irak sebagai bentuk ketidaksetujuan atas hasil pemilu Irak (Tisdall, 2018). Dugaan atas sikap masyarakat Irak yang cenderung anti Iran juga terlihat pada gerakan protes di kota Basra, Irak yang didominasi muslim Syiah. Tuntutan protes ini adalah pemberantasan korupsi dan penanggulangan kemiskinan meski Basra salah satu pertambangan minyak Irak. Dalam protest tersebut, para demonstran membakar bendera Iran bahkan membakar gedung konsulat Iran di Basra (Williams, 2018). Hal ini memperkuat bahwa terlepas Irak mayoritas Islam Syiah seperti halnya Iran, Umumnya masyarakat Irak cenderung memiliki persepsi anti Iran.

Kesimpulan

Iran mengambil kesempatan untuk melebarkan pengaruhnya di Irak sejak kejatuhan Saddam Hussein. Beberapa tokoh pelarian Irak di masa Saddam Hussein yang sempat mengungsi di Iran menjadi berkuasa di pemerintahan pasca kejatuhan Saddam Hussein dan Iran mencoba mempengaruhi politik Iran melalui tokoh-tokoh. Meskipun demikian terdapat pula tokoh-tokoh politik Irak yang menolak pengaruh Iran di Irak. Kebijakan Haider al Abadi yang mencoba menangkal pengaruh Iran di PMF merupakan refleksi perpecahan di tubuh *Islamic Dawa Party* antara pro Iran dan anti Iran yang sudah berlangsung sejak pelarian partai tersebut di era rezim Saddam Hussein

Upaya Iran untuk mempengaruhi politik domestik di Irak melalui PMF harus menghadapi berbagai hambatan. Hambatan pertama yaitu berasal dari Ayatullah Ali al Sistani ulama Syiah terkemuka di Irak. Meski pembentukan PMF berkat fatwa al Sistani, Ia mengkritisi PMF pro Iran dan tokoh seperti Nouri al Maliki yang mencoba merongrong pemerintahan Haidi al Albadi dengan menolak usulan bergabung dengan militer Irak. Selain itu, seorang tokoh Ulama Syiah Iraq Muqtada al Sadr yang populer terutama di kalangan kelas bawah Irak yang mengkritis pengaruh Iran. Hasil Pemilu Irak pada bulan Mei 2018 dengan kemenangan koalisi Sadr daripada koalisi Fatah yang didukung Iran dan gerakan protes di Basra diikuti pembakaran gedung konsulat Iran mengindikasikan bahwa pengaruh Iran belum mampu untuk menguasai pemerintahan Irak.

Daftar Pustaka

Mumford, Andrew. *Proxy Warfare*. Cambridge : Polity Press
....(2017) Shia militias in Iraq, *Strategic Comments*, 23:3, i-ii,
DOI:10.1080/13567888.2017.1316086

Baram, Amatzia. (1997). Neo-Tribalism in Iraq: Saddam Hussein's Tribal Policies 1991-96. *International Journal of Middle East Studies*, 29 (1), 1-31 diakses di <https://www.jstor.org/stable/163849>

Dai, Yamao. (2008). Transformation of the Islamic Da'wa Party in Iraq: From the Revolutionary Period to the Diaspora Era. *Asian and African Area Studies*, 7(2). 238-267. Diakses di <https://www.asafas.kyoto-u.ac.jp/dl/.../no.../238-267.pdf>

Edward, Beverley Milton. (2006). Faith in democracy: Islamization of the Iraqi polity after Saddam Hussein. *Democratization*, 13(3), 472-48. DOI: 10.1080/13510340600579409

Shanahan, Rodger. (2004). Shia political development in Iraq: the case of the Islamic Dawa Party. *Third World Quarterly*, 25(5), 943-958. DOI:10.1080/0143659042000232045

Sozer, Brendan (2016) Development of proxy relationships: a case study of the Lebanese Civil War, *Small Wars & Insurgencies*, 27:4, 636-658, DOI: 10.1080/09592318.2016.1189495

Morris, Loveday . *How the Kurdish independence referendum backfired spectacularly*. 20 Oktober 2017. (https://www.washingtonpost.com/world/how-the-kurdish-independence-referendum-backfired-/2017/10/20/3010c820-b371-11e7-9b93-b97043e57a22_story.html?noredirect=on&utm_term=.7df4966e4830)

Mansour, Renad Faleh A. Jabar. 28 April 2017. *The Popular Mobilization Forces and Iraq's Future*. (<http://carnegie-mec.org/2017/04/28/popular-mobilization-forces-and-iraq-s-future-pub-68810>)

Doanvo, Anhvinh . 20 Juli 2016. *Murder and Militias—Iraq's Sunni-Shiite Plan After ISIS*. (https://www.huffingtonpost.com/anhvinh-doanvo/murder-and-militiasiraqs-_b_10994240.html)

Aldroubi, Mina. 9 November 2017. *US congress seeks to impose sanctions on Shiite militias in Iraq*. (<https://www.thenational.ae/world/mena/us-congress-seeks-to-impose-sanctions-on-shiite-militias-in-iraq-1.674501>)

Chmaytelli, Maher & Ahmed Aboulenein. *Iraq declares final victory over Islamic State*. 9 desember 2017. (<https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-islamicstate/iraq-declares-final-victory-over-islamic-state-idUSKBN1E30B9>)

BBC. *Iraqi Kurdistan profile*. 25 april 2018. (<https://www.bbc.com/news/world-middle-east-28147263>)

Chulov, Martin. *More than 92% of voters in Iraqi Kurdistan back independence*. 28 September 2017. (<https://www.theguardian.com/world/2017/sep/27/over-92-of-iraqs-kurds-vote-for-independence>)

Katzman, Kenneth 30 November 2005. *Iran's Influence in Iraq*. (<http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a472394.pdf>)

Karouny, Mariam. 11 mei 2007. *Iraq's SCIRI party to change platform: officials*. (<https://www.reuters.com/article/us-iraq-party/iraqs-sciri-party-to-change-platform-officials-idUSYAT15330920070511>)

Smyth, Phillip. 17 Agustus 2016. *Should Iraq's ISCI Forces Really Be Considered 'Good Militias'?* (<https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/should-iraqs-isci-forces-really-be-considered-good-militias>)

Al Khatteeb, Luay. 6 Desember 2017. *Sistani's Jihad Fatwa One Year On: The Man Who Pulled Iraq From the Brink With a Single Statement*. (https://www.huffingtonpost.com/luay-al-khatteeb/sistanis-jihad-fatwa-one_b_7579322.html)

Saul, Jonathan, Parisa Hafezi & Michael Georgy 21 Maret 2017. *Exclusive: Iran steps up support for Houthis in Yemen's war – sources*. (<https://www.reuters.com/article/us-yemen-iran-houthis/exclusive-iran-steps-up-support-for-houthis-in-yemens-war-sources-idUSKBN16S22R>)

Kamali Dehghan, Saeed. 12 April 2018. *Iran reiterates support for Syria in face of 'foreign aggression'*. (<https://www.theguardian.com/world/2018/apr/12/iran-reiterates-support-for-syria-in-face-of-foreign-aggression>)

Mouchantaf, Chrinie. 5 Januari 2018. *Iranian protest: 'Military adventurism' at the core of citizens outcry* (<https://www.defensenews.com/global/mideast-africa/2018/01/05/iranian-protest-military-adventurism-at-the-core-of-citizens-outcry/>)

Global Fire Power. *Iraq Military Strength* (https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=iraq)

Majidyar, Ahmad. 12 Maret 2018. *Iran-backed group says Hashd al-Shaabi will not merge into Iraq's security institutions*. (<https://www.mei.edu/publications/iran-backed-group-says-hashd-al-shaabi-will-not-merge-iraqs-security-institutions>)

El-Ghobashy, Tamer & Mustafa Salim. 25 Oktober 2017. *Iraq's prime minister was tough on ISIS. But it was his approach to the Kurds that really made him popular*. (https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/iraqs-prime-minister-was-tough-on-isis-but-it-was-his-approach-to-the-kurds-that-really-made-him-

popular/2017/10/25/f06311ae-b41c-11e7-9b93-b97043e57a22_story.html?utm_term=.7fa8e45ca922)

Toumaj, Amir & Romany Shaker. 25 Januari 2018. *Iranian-backed Iraqi militias form coalition ahead of parliamentary elections.*

(<https://www.longwarjournal.org/archives/2018/01/iranian-backed-iraqi-militias-form-coalition-ahead-of-parliamentary-elections.php>)

Middle East Institute. 15 Desember 2016. *Civilians Massacred in Aleppo by Iranian Backed Militia.* (<https://www.mei.edu/publications/civilians-massacred-aleppo-iranian-backed-militia-0>)

Chulov, Martin. 16 Juni 2017. *From Tehran to Beirut: Shia militias aim to firm up Iran's arc of influence.* (<https://www.theguardian.com/world/2017/jun/16/from-tehran-to-beirut-shia-militias-aim-to-firm-up-irans-arc-of-influence>)

Filkins, Dexter. 30 September 2017. *The Shadow Commander.* (<https://www.newyorker.com/magazine/2013/09/30/the-shadow-commander>)

Majidiyar, Ahmad. 16 April 2018. *Iran-backed Iraqi militia reportedly laid siege to US base in response to Syria strikes.* (<https://www.mei.edu/publications/iran-backed-iraqi-militia-reportedly-laid-siege-us-base-response-syria-strikes>)

Chulov, Martin. 15 April 2016. *Shia leaders in two countries struggle for control over Iraqi state.* (<https://www.theguardian.com/world/2016/apr/15/shia-leaders-iraq-iran-ayatollah-ali-sistani>)

Hameed, Saleh. 4 September 2017. *Sistani refuses to meet Khamenei's envoy.* (<http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2017/09/04/-Sistani-refuses-to-meet-Khamenei-s-envoy.html>)

Jerusalem Post. 15 Februari 2007. *US says Muqtada al-Sadr hiding in Iran.* (<https://www.jpost.com/Middle-East/US-says-Muqtada-al-Sadr-hiding-in-Iran>)

BBC. 26 April 2016. *Iraq: Sadr supporters in mass protest for political reform.* (<https://www.bbc.com/news/world-middle-east-36138283>)

Human Right. 31 Januari 2016. *Iraq: Possible War Crimes by Shia Militia.* (<https://www.hrw.org/news/2016/01/31/iraq-possible-war-crimes-shia-militia>)

Reuters. 9 Maret 2018. *Iraq's Shi'ite militias formally inducted into security forces.* (<https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-militias/iraqs-shiite-militias-formally-inducted-into-security-forces-idUSKCN1GK354>)

Nawzad, Kowsar. 24 Agustus 2018. *Abadi reverses PMF withdrawal, says decision can only come from Commander-in-Chief*. (<http://www.kurdistan24.net/en/news/44608dfe-6c3b-4657-857d-1ee51a6a6877>)

Aljazeera. 20 Mei 2018. *Iraq elections final results: Sadr's bloc wins parliamentary poll*. (<https://www.aljazeera.com/news/2018/05/iraq-election-final-results-sadr-bloc-wins-parliamentary-polls-180519071930804.html>)

Macdonald, Alex. 14 Mei 2018. *Sadrism-Communist alliance set for victory as PM Abadi calls for cooperation* (<https://www.middleeasteye.net/news/iran-out-iraq-free-jubilation-sadr-communist-alliance-wins-big-592381343>)

Majidiyar, Ahmad. 21 Mei 2018. *Muqtada al-Sadr's victory in Iraqi elections raises alarm in Tehran*. (<https://www.mei.edu/publications/muqtada-al-sadrs-victory-iraqi-elections-raises-alarm-tehran>)

Tisdall, Simon. 15 Mei 2018. *Iraq's shock election result may be turning point for Iran*. (<https://www.theguardian.com/world/2018/may/15/iraq-shock-election-result-may-be-turning-point-for-iran>)

William, Jennifer. 8 September 2018. *The violent protests in Iraq, explained*. (<https://www.vox.com/world/2018/9/7/17831526/iraq-protests-basra-burning-government-buildings-iran-consulate-water>)

Analisis Persepsi Masyarakat Skouw - Wutung Terhadap Pembangunan Perbatasan Republik Indonesia – Papua New Guinea

Melpayanty Sinaga, Barisen Rumabar
Universitas Cenderawasih
melpayanty@gmail.com ; rumabarbarisen@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis tentang pandangan masyarakat Skouw, warga negara Indonesia yang bermukim di sekitar perbatasan RI-PNG dan juga masyarakat Wutung sebagai warga negara PNG yang bermukim di Vanimo provinsi Sandaun. Perbatasan provinsi Papua (Indonesia) dengan Papua New Guinea menjadi sangat menarik untuk dikaji mengingat isu politik yang marak terjadi seperti wilayah perbatasan menjadi tempat pelarian OPM (Organisasi Papua Merdeka), kejahatan transnasional yang marak terjadi serta kesamaan ras Melanesia yang masih menguat diantara kedua negara ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode naratif kritis melalui wawancara mendalam secara random kepada warga negara PNG (Wutung) dan juga WNI yang dilakukan pada waktu hari pasar di perbatasan, serta berbagai stakeholder yang terkait. Hasil assestment dilapangan menunjukkan adanya manfaat positif dibangunnya perbatasan bagi kedua negara, walaupun disisi lain masih maraknya penyelundupan barang illegal di wilayah perbatasan.

Kata Kunci: Perbatasan, Persepsi, Pembangunan

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki batas wilayah perbatasan dengan beberapa negara baik darat maupun laut. Setiap wilayah perbatasan ini memiliki karakteristik dan permasalahan yang berbeda-beda. Untuk itu diperlukan penyelesaian yang berbeda-beda dalam penanganan isu perbatasan. Pengelolaan kawasan perbatasan dari zaman pemerintahan Soekarno sampai pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono belum sepenuhnya diperhatikan sebagai garda yang terdepan. Perbatasan diidentikkan sebagai halaman belakang dan menjadi terisolasi sehingga cenderung menjadi wilayah yang bukan prioritas utama dalam pembangunan Indonesia. Berbeda dengan masa pemerintahan Jokowi yang mana kebijakannya pada saat ini bertumpu pada pengelolaan kawasan perbatasan yang dikenal dengan kebijakan Nawacita. Salah satu yang menjadi agenda prioritas utama untuk Indonesia dari Sembilan agenda tersebut menyangkut pada masalah perbatasan. Sebagaimana yang dimuat dalam poin ketiga dari agenda Nawacita yaitu "*Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa – desa dalam kerangka negara kesatuan*". Hal ini menandakan bahwa pembangunan tidak lagi terpusat (sentralisasi) di perkotaan melainkan harus dilakukan menyebar di seluruh pelosok (desentralisasi) dan salah satunya adalah kawasan perbatasan.

Papua merupakan provinsi paling timur Indonesia yang berbatasan langsung dengan Papua New Guinea. Berdasarkan sejarah, Papua dan Papua New Guinea merupakan satu daratan yang dikenal dengan sebutan "*Nueva Guine*" yang kemudian dikenal sebagai *New Guinea Land* dan pulau yang terbesar setelah pulau *Greenland*. Berdasarkan kondisi sosial budaya menunjukkan bahwa Papua dan Papua New Guinea memiliki ras dan budaya yang sama yaitu ras Melanesia. Akan tetapi Papua dan Papua New Guinea dijajah oleh dua negara yang berbeda dimana Papua dijajah oleh Belanda yang kemudian berintegrasi menjadi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), sedangkan Papua New Guinea dijajah oleh Inggris dan menjadi negara independent pada tanggal 16 september 1975. Untuk menunjukkan eksistensi suatu negara maupun kedaulatan di kedua negara maka diperlukan garis pembatas diantara kedua negara atau batas negara. Oleh sebab itu batas negara sudah ditentukan pada tanggal 16 Mei tahun 1895 yang didasarkan pada perjanjian antara Belanda dan Inggris di kota Haque/Den Haag Belanda yaitu *Convention Great Britain and Netherland Defining Boundaries in New Guinea* pada koordinat 141⁰ BT. Untuk menentukan batas-batas wilayah antara Papua New Guinea dengan Papua maka dibangun suatu tanda yang berbentuk pilar batas atau tugu perbatasan yang disebut dengan *Meridian Monument* (MM) yang dibangun atas kesepakatan antara dua negara tersebut. Berikut terlampir tabel tugu pilar batas antara RI dan PNG

Tabel 1. Tugu Pilar Batas antara RI dan PNG

No	Batas Pilar Mediterian markers	Lokasi	Posisi Lintang Bujur
1	MM 1	Wutung	2°35' 39"
2	MM 2	New Moso	2°40' 42"
3	MM 2.1	Niau	2°46' 30"
4	MM 2.2	(Sei) Sangke	2°53' 44"
5	MM 2.3	Sawan/Samma	2°57' 13"
6	MM 3.A	Skotiau	3°01' 11"

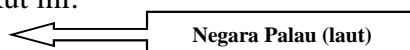
7	MM 4.A	Waris Keandega	3°14' 06''
8	MM 4.1	Senck	3°17' 57''
9	MM 4.2	Juwela	3°28' 30''
10	MM 4.3	ro Camberatoro/Amgot	3°34' 26''
11	MM 4.4	Pananggan Track	3°39' 17''
12	MM 4.5	Cambriap	3°39' 26''
13	MM 5	Sei Hausel/wusme	3°55' 16''
14	MM 5.1	Bicksi	4°03' 38''
15	MM 6.A	Sei Sepik	4°08' 39''
16	MM 6.1	Batom	4°23' 58''
17	MM 6.2	Sei Sepik	4°33' 50''
18	MM 6.3	Tomolbil	4°45' 00''
19	MM 7	Start Mountion	4°54' 54''
20	MM 7.1	Kawen Tikin	5°08' 41''
21	MM 7.2	Kiwirop	5°11' 59''
22	MM 7.3	Hugo	5°17' 56''

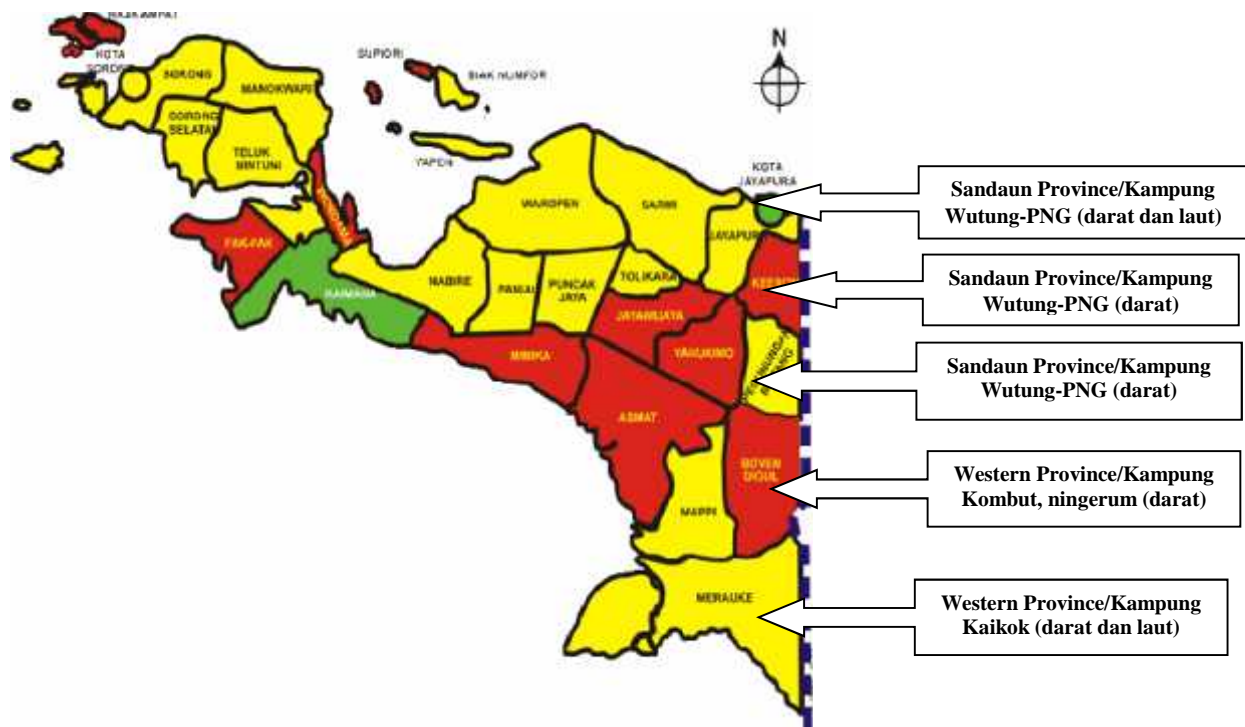
23	MM 7.4	Longoromngo	30''	5°27'
24	MM 7.5	Irimkwi	34''	5°29'
25	MM 7.6	Bankin	55''	5°33'
26	MM 7.7	Kurumkin	40''	5°36'
27	MM 8	Ingembit	33''	5°38'
28	MM 8.1	Ninati/Opka	04''	5°42'
29	MM 8.2	Honombitan	23''	5°47'
30	MM 9	Jat	39''	5°52'
31	MM 9.1	Hatkamban	32''	5°59'
32	MM 9.2	Hankeh	58''	6°04'
33	MM 10	Angamarut	32''	6°13'
34	MM 11.A	Domongi	26''	6°53'
35	MM 11.1	Nake Track	05''	7°06'
36	MM 11.2	Koropa Track	10''	7°17'
37	MM 11.3	Maroa Track	16''	7°27'
38	MM 11.4	Obo Track	38''	7° 31'

39	MM 11.5	Track	7°37' 01"
40	MM11.6	Track	7°40' 59"
41	MM 12	Seiwawai	7°4' 19"
42	MM 12.1	Erambu	8°0' 48"
43	MM 12.2	Kamdeg	8°12' 36"
44	MM 12.3	Jalan Trans Irian	8°04' 08"
45	MM 12.4	Jalan Trans Irian	8°07' 45"
46	MM 12.5	Jalan Trans Irian	8°11' 58"
47	MM 12.6	Jalan Trans Irian	8°13' 33"
48	MM 13	Sota/Botar	8°25' 45"
49	MM 13.1	Yanggandur Track	8°36' 19"
50	MM 13.2	Yanggandur Track	8°38' 47"
51	MM 13.3	Sakiramke	8°52' 29"
52	MM 14.A	Muara Bensbach	9°07' 34"

Sumber: BPKD Provinsi Papua 2008

Adapun peta perbatasan antara Papua dan Papua New Guinea akan diuraikan pada gambar berikut ini:





Gambar 1. Peta Perbatasan Papua- Papua New Guinea

Lingkup administrasi Jayapura yang berbatasan dengan Papua New Guinea mencakup pada satu kota yaitu Kota Jayapura dengan lima kabupaten yaitu kabupaten Keerom, Pegunungan Bintang, Boven Digoel, Merauke dan Supiori. Penelitian ini akan dikhususkan kepada perbatasan Kota Jayapura yaitu Skouw dengan kampung Wutung yang di Papua New Guinea. Hal ini disebabkan karena kedua wilayah tersebut saat ini merupakan salah satu perbatasan internasional dimana pembangunan perbatasan ini mengalami perubahan yang signifikan sejak kepemimpinan Jokowi. Sedangkan kawasan perbatasan lainnya di kabupaten hanya masih menggunakan pos-pos perbatasan baik darat maupun laut yang dijaga oleh Angkatan Darat.

Pertanyaan Penelitian

Bagaimana persepsi masyarakat Skouw – Wutung terhadap pembangunan perbatasan Republik Indonesia – Papua New Guinea?

Tujuan Penelitian

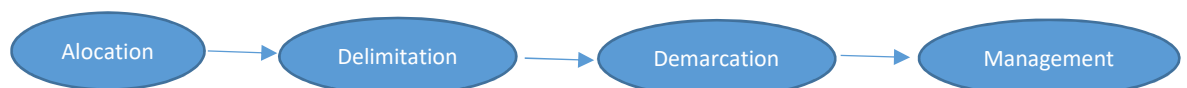
- Untuk mengetahui persepsi masyarakat Skouw – Wutung terhadap pembangunan perbatasan RI – PNG

- Untuk menjadi bahan referensi bagi *stakeholder* yang terkait dalam manajemen perbatasan
- Untuk memberikan informasi terkait kinerja dari pemerintahan Jokowi dalam membangun perbatasan dan peran dari instansi terkait khususnya pengelolaan perbatasan RI – PNG

Metode Penelitian

Jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif yang berarti ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, akibat, faktor penyebab, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran seseorang secara individual atau kelompok. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan atau informan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum dan menafsirkan makna data. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode naratif kritis dimana peneliti hanya menyediakan angket dan pertanyaan – pertanyaan utama untuk memandu proses narasi dan pokok-pokok masalah diangkat oleh peserta sendiri. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan survey dan observasi lapangan serta wawancara mendalam (*depth interview*) dengan sampel yang random dari lima orang masyarakat Wutung (PNG) dan lima orang dari masyarakat Skouw (Indonesia) yang dilakukan pada hari pasar tradisional di perbatasan yaitu hari selasa. Selain itu wawancara juga dilakukan terhadap instansi terkait misalnya BPKLN (Badan Perbatasan, Kerjasama Luar Negeri), PLBN (Pos Lintas Batas Negara), dan pihak keamanan seperti TNI yang ada di sekitar perbatasan.

Teori Pengelolaan Perbatasan



Implikasi dari teori ini menurut Stephen B Jones (1945) menjelaskan bahwa alokasi ini merujuk pada wilayah suatu negara termasuk didalamnya wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga dan pada dasarnya alokasi ini adalah warisan kolonial dari penjajah. Sedangkan delimitasi ini mengacu pada penetapan batas-batas negara dan mengidentifikasi area-area yang menjadi wilayah perbatasan baik perbatasan darat maupun laut. Demarkasi ini menyangkut pada penegasan batas – batas wilayah dengan membuat tanda – tanda sebagai pembatas antara kedua negara di wilayah perbatasan sebagai contoh tanda batas di laut, penentuan titik-titik koordinat maupun tugu pilar batas. Penegasan ini umumnya dimuat dalam konvensi maupun perjanjian-perjanjian bilateral antar kedua negara. Sedangkan management

perbatasan bertujuan untuk mengembangkan/mengelola perbatasan menjadi kawasan yang mempunyai nilai baik dari sisi ekonomi maupun sosial.

Hasil Penelitian

Managemen perbatasan di Skouw – Wutung dilandasi pada hubungan bilateral RI - PNG. Kerjasama ini dilaksanakan pada tahun 1973 untuk membahas masalah-masalah perbatasan negara. Pada akhir juli 1979 negoiasai ulang antar kedua negara tentang perbatasan kembali diadakan termasuk didalamnya pembentukan *Joint Border Committee* dan diratifikasi pada bulan desember 1979. Pada awal bulan Februari tahun 1981 pemerintah PNG dan Indonesia bertemu pertama kalinya dalam pertemuan *Joint Border Committee* di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemerintah baik PNG maupun Indonesia membahas tentang agenda-agenda yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, komunikasi, perdagangan dan pertukaran budaya. Pada bulan agustus 1982 pertemuan ketiga berlangsung dan kedua negara sepakat untuk menandatangani MoU (*Memorandum of Understanding*) tentang pembentukan *Joint Border Committee*, peraturan-peraturan tentang demarkasi perbatasan, pemetaan dan survei tentang pelintas tradisional.

Pertemuan kedua pada tahun 1984 kedua negara kembali membahas hal-hal yang berkaitan dengan perbatasan provinsi antara kedua negara. Kemudian pada pertemuan tanggal 11 April 1990 di Port Moresby kedua negara melakukan peninjauan kembali Persetujuan Dasar (*Basic Aggreement*) tahun 1984 khususnya pada pasal 2. Dalam pasal tersebut disebutkan tentang pembentukan *Joint Border Committee* (JBC) sebagai wadah untuk penyelesaian masalah-masalah perbatasan yang diratifikasi pada tanggal 15 November 1993 di Rabaul, Papua New Guinea. JBC ini atau Komite Bersama Perbatasan merupakan forum antar pemerintah untuk menampung dan menyelesaikan seluruh masalah yang belum terselesaikan dalam forum sub komite yang terdiri dari:

1. *Border Liasion Meeting* (BLM) atau Penghubung Perbatasan diketuai oleh wakil Gubernur dan mengadakan pertemuan dua tahun sekali dengan tempat secara bergantian. Pertemuan BLM berfungsi untuk menyelesaikan masalah –masalah yang dihadapi dan diperkirakan akan timbul di wilayah perbatasan terutama mengenai pelintas batas dan gejala sosial lainnya

2. *Joint Technical Sub Committee on Survey Demarcation and Mapping*. Sub ini yang diketuai oleh Kepala Survei dan Pemetaan, Mabes TNI dimana melakukan pertemuan

setiap tahun sekali di tempat kedua negara secara berganti. Fungsi dari sub komite ini adalah untuk menyelesaikan masalah penetapan batas wilayah fisik kedua negara.

3. *Joint Technical Sub Committee on Security Matters along the Common Border Area (JSCS)* atau Sub Komite Teknis tentang keamanan di sepanjang perbatasan. Sub komite ini diketuai oleh Wakil Asisten Operasi Kasum TNI dan mengadakan pertemuan setahun sekali secara bergantian di kedua negara. Fungsi sub ini adalah menyelesaikan masalah-masalah di wilayah perbatasan kedua negara.

Pengelolaan perbatasan lainnya di wilayah perbatasan Skouw - Wutung mengacu kepada kebijakan Nawacita yang dituliskan dalam Perpers 32/2005 tentang RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2015 yang memuat tentang Kawasan Perbatasan Negara (KPN). Kawasan ini adalah kawasan strategis nasional yang berada di bagian wilayah negara yang terletak di batas wilayah Indonesia di Provinsi Papua dengan negara Papua New Guinea di darat seperti kawasan perbatasan yang berada di kecamatan. Salah satu peran dari KPN di Provinsi Papua ini sebagai alat operasionalisasi rencana tata ruang wilayah nasional dan sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan. Pembangunan ini mencakup pada infrastruktur yang mencakup pada sarana dan prasarana seperti dibangunnya pos pelaporan dan pemeriksaan lintas batas negara (PPLBN) Skouw (RI) – Wutung (PNG). Infrastruktur lainnya yaitu dibangunnya PLBN (Pos Lintas Batas Negara) di sepanjang perbatasan RI – PNG yang merupakan tempat pemeriksaan dokumen pelintas batas dengan fungsinya sebagai keimigrasian, kepabean, karantina, keamanan dan fungsi lainnya seperti perhubungan, asuransi. Pos Lintas Batas ini dibangun oleh BPKLN (Badan Perbatasan Kerjasama Luar Negeri) Provinsi Papua. Badan ini dibentuk atas peraturan gubernur Papua Nomor 32 Tahun 2016 yang mempunyai tugas pokok yaitu untuk membantu gubernur dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengelolaan batas negara di provinsi Papua serta mempunyai fungsi koordinatif, fasilitatif dan konsultatif

PLBN yang terletak di Skouw distrik Muaratahi, Kota Jayapura diresmikan pada Mei 2017 yang berjarak sekitar 60 km dari kota Jayapura dengan waktu tempuh sekitar 90 menit. Pos ini digagas sebagai kawasan terpadu yang artinya kawasan area komersil untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu di areal PLBN ini juga dibangun 400 kios pasar yang akan dijadikan sebagai tempat transaksi atau pasar tradisional yang konsumennya berasal dari negara tetangga. Desain PLBN Terpadu Skouw mengusung budaya lokal Papua yang memiliki bentuk bangunan khas rumah tamfa dengan ornament lokal pada sisi luar bangunan. Rumah Tamfa ini merupakan rumah pesisir di daerah Skouw yang memiliki atap

dan bentukan perisai dan dua ruang panjang tempat masyarakat berkumpul. Berikut terlampir Pos Lintas Batas Negara dan pembangunan pasar tradisional Skouw



Gambar 2 Pos Lintas Batas Negara dan pembangunan pasar tradisional Skouw

Pada umumnya masyarakat Wutung (warga negara PNG) memilih berbelanja ke pasar tradisional di wilayah perbatasan dibandingkan dengan di wilayahnya sendiri. Berbagai faktor yang mengakibatkan yang bukan hanya karena letak geografis yang bisa dijangkau hanya 2-3 jam menuju perbatasan. Selain itu juga karena faktor kurs mata uang Kina yang tinggi dimana 1 Kina senilai Rp. 5000 yang mengakibatkan nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan rupiah dan pasar tradisional ini juga dapat dikategorikan harga yang lebih murah dibandingkan di Vanimo (PNG). Tujuan pariwisata atau destinasi wisata menjadi salah satu daya tarik dari masyarakat Wutung untuk datang ke wilayah perbatasan RI – PNG. Berikut terlampir jumlah total pelintas batas RI – PNG dari bulan Januari sampai dengan September 2018

Tabel 2. Data Pelintas Batas RI – PNG

No	Bulan	Kedatangan WNI		Keberangkatan WNI		Kedatangan WNA		Keberangkatan WNA	
		PLB	Passpor	PLB	Passpor	PLB	Passpor	PLB	Passpor
1	Januari	144	211	337	153	556	319	561	376
2	Februari	112	118	116	300	179	330	195	297
3	Maret	118	242	120	246	172	381	180	360
4	April	112	214	114	221	117	293	121	315
5	Mei	196	190	196	227	127	408	128	305
6	Juni	210	184	217	358	112	296	109	282
7	Juli	222	330	424	335	132	247	129	342
8	Agustus	265	295	271	273	120	315	115	275

Sumber: Pos Lintas Batas Negara (2018)

Data ini menunjukkan bahwa kedatangan warga negara asing (PNG) yang lebih banyak berkunjung ke Indonesia dibandingkan dengan warga negara Indonesia. Warga negara asing ini lebih banyak menggunakan pass lintas batas di Januari. Pass lintas batas ini merupakan kartu yang digunakan oleh penduduk yang berdomisili di wilayah perbatasan dan memiliki masa waktu tiga tahun. Kartu ini dikeluarkan oleh petugas yang berwenang kepada penduduk perbatasan yang berpergian ke luar daerah perbatasan untuk kunjungan tradisional dan kebiasaan serta berlaku hanya dalam kawasan perbatasan sebagai pengganti paspor.

Persepsi Masyarakat Skouw dan Wutung tentang Pembangunan Perbatasan RI – PNG

Adapun persoalan yang sering terjadi dalam perbatasan sebagaimana yang dituturkan oleh Desmon

Mi save kam raun long boda em bilong bayim ol prodak bilong Indonesia bikos em I chip na isi long mipela long bayim. Mi save kam everi dei long batas em bilong shopping baim ol fut na samting bilong haus na tu bilong lik-lik stoa bilong mi. Sampela ol trabel i save kamap long batas em olsem long sait bilong sekurity. Em long 2015, i gat pait kamap namel long ol Indonesia Polis, Army na ol OPM tasol nau em kamap orait gen. Mi pilim seif taim mi kam long Indonesia bikos ol soldia, Polis wantaim ol pipel em frendly na ol I welkam long mipela ol PNG. Mi ting olsem developmen long boda em I givim mipela gutpela ases long kam na bayim ol kaikai na ol sampela samting we mipela i nidim long boda. Na tu mipela i nap long bungim ol family bilong mipela husait i stap long Jayapura.

Nau mi lukim olsem ol bilding long boda ya em I kamap gutpela na i no olsem bipo. I gat sekurity, polis na army we ol i ken kontrolim ol visita bilong tupela kantri. Sampela ol problem we i save kamap lo boda area em ol drug trefiking na ol OPM isu we ol i bin pait wantaim ol soldia na polis bilong Indonesia. Boda em i kamap gutpela nau na planti lain i save kam raun lo boda area.

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia.

Saya berkunjung ke perbatasan hanya untuk berbelanja karena harga barang di perbatasan (Indonesia) itu sangat murah dan mudah untuk kita beli. Saya biasanya menyeberang batas setiap hari hanya untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga dan kios. Masalah yang sering terjadi di daerah perbatasan adalah menyangkut masalah keamanan, yaitu pada tahun 2015, terjadi penembakan antara petugas keamanan Indonesia dengan kelompok (OPM) Organisasi Papua Merdeka. Tetapi sekarang sudah aman.

Saya merasa aman-aman saja ketika saya berkunjung ke Indonesia karena petugas keamanan seperti TNI, POLRI dan juga masyarakat Indonesia sangat ramah dan menerima kita orang PNG untuk berkunjung ke sana. Saya berpendapat bahwa pembangunan di wilayah perbatasan sangat bermanfaat bagi kami, karena memberikan kemudahan untuk berbelanja kebutuhan-kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan lain yang kita butuhkan. Selain itu kita juga dapat mengunjungi keluarga yang tinggal di Jayapura.

Pada saat ini saya melihat bahwa pembangunan di perbatasan Skouw-Wutung sudah maju dan lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Ada pos penjagaan security, polisi dan tentara yang dapat mengontrol keluar-masuknya masyarakat dari kedua negara. Beberapa persoalan yang sering terjadi di daerah perbatasan adalah penyelundupan Narkotika jenis ganja dan isu Organisasi Papua Merdeka dimana OPM pernah melakukan penembakan terhadap petugas keamanan di perbatasan. Pembangunan di perbatasan sudah sangat bagus sehingga banyak orang biasanya berkunjung kesana.

Desmond (PNG Citizen)

Selain itu juga dituturkan oleh Damien dengan adanya pembangunan perbatasan ia merasakan adanya keamanan.

Mi kam long batas em bilong shopping bikos prais bilong ol samting long Vanimo em ekspensif. Mi kam wanpela taim long wanpela wik. Sampela ol stori we mi save harim em ol drag trefiking na ilegal gan trefiking. Mi save pret long kam long Indonesia bikos mi harim olsem i gat planti teroris long Indonesia husait i save putim ol bom long pablik ples. Long sait bilong ol bilding ol wokim long boda em I kamap gut tru na givim mipela isi ases long visitim Jayapura. Na tu ol developmen long boda ya em I givim mipela gupela atreksen . I gat sampela senis long boda bikos long bipo, security sistem em i no gutpela olsem nau. Nau em I kamap gupela stret. Mi obsevim olsem batas ya em I chens stret na isi long ol PNG long kam baim Asian prodak. At the same time em olsem ol PNG tu i ken salim prodak bilong ol olsem buai go long Jayapura, Indonesia. Ol problem we sampela taim i save bagarapim rilesensip bilong Indonesia na Papua New Guinea em ol drags na gan trefiking. Bipo, security sistem lo batas ya i no gutpela tasol nau em I kamap orait stret. Sampela gutpela samting we mi lukim long batas em olsem isi long mipela baim Indonesian prodak na isi tu long trevel. Laspela samting em olsem batas ya em i kamap biutiful stret na gutpela long visitim.

Terjemahan Bahasa Indonesia.

Saya ke perbatasan hanya untuk berbelanja karena harga barang di toko-toko yang ada di Vanimo sangat mahal. Saya biasanya ke perbatasan se minggu sekali. Saya sering dengar

cerita tentang masalah penyelundupan ganja dan penyelundupan senjata. Saya juga kadang merasa takut untuk berkunjung ke Indonesia karena saya dengar banyak teroris di Indonesia yang kadang membom tempat-tempat publik.

Disisi lain, pembangunan di perbatasan Skouw ini sudah sangat maju dan memberikan kita akses untuk berkunjung ke Jayapura, Indonesia. Pembangunan di perbatasan juga menarik perhatian para pengunjung karena dulu keamanan di perbatasan belum terlalu baik tetapi sekarang sudah sangat baik.

Saya melihat bahwa ada perubahan besar di perbatasan dan mudah bagi kami warga PNG untuk berkunjung dan membeli produk-produk dari Asia dan sebaliknya kami warga PNG juga dapat menjual produk-produk seperti pinang ke Jayapura, Indonesia. Permasalahan yang kadang merusak hubungan diplomatik Indonesia dan PNG adalah Narkoba dan penyelundupan senjata. Sebelum perbatasan di bangun seperti saat ini, sistem keamanannya kurang baik tetapi sekarang sudah maju. Ada beberapa hal yang menarik yang saya lihat di perbatasan yaitu sangat mudah untuk kita berbelanja produk-produk Indonesia dan bepergian. Terakhir itu saya dapat katakan bahwa perbatasan sudah sangat indah dan baik untuk di kunjungi bagi siapa saja.

Damien (PNG citizen).

Mi save visitim batas (border) everi mun em bilong bayim Indonesian prodak bikos em i chip na tu isi long mipela bayim wantaim PNG kina. Ol stori we mi bin harim long batas em long sait bilong ol sekurity. Bikipela pait i bin kamap namel long ol pipel bilong PNG na Indonesia tasol nau mipela kamap orait. Mi pilim orait tasol taim mi kam long Indonesia bikos olgeta lain long hia ol welkamim mipela ol PNG. Mi ting olsem ol developmen long boda ya em I kamap gutpela pinis bikos em i givim mipela gutpela ases long bayim ol prodak bilong Indonesia. Nau boda em I chens na ol sekurity sistem tu I chens. Sekurity sistem long boda nau em I kamap gutpela stret na i no olsem bilong bipo. So i gat bikipela senis i kamap long boda bikos bipo ol haus bilding em i no gutpela tasol nau em I kamap orait stret, na tu bipo i no gat planti ol bildings long boda tasol nau em I kamap krauded insait na hat long mipela muf. Tasol wanpela gutpela samting mi laik tok em olsem boda ya em kamap chens stret bikos nau i gat developmen.

Terjemahan Bahasa Indonesia.

Saya sering berkunjung ke perbatasan setiap bulan untuk berbelanja produk-produk dari Indonesia karena harganya sangat murah dan muda untuk di beli dengan uang kina(PNG). Ada isu-isu yang pernah saya dengar terjadi di perbatasan yaitu itu menyangkut keamanan.

Pernah terjadi perkelahian antara warga PNG dengan masyarakat Papua (Indonesia) tetapi sekarang sudah aman dan aktifitas masyarakat sudah berjalan seperti biasanya. Saya merasa aman saja ketika saya berkunjung ke Indonesia karena masyarakat disini menerima kita dengan baik. Saya berpikir bahwa pembangunan di perbatasan ini sudah sangat baik karena memberikan kita akses untuk berbelanja produk Indonesia. Sekarang sudah ada perubahan besar di perbatasan. Sistem keamanan pun juga sudah sangat baik dan tidak seperti di tahun-tahun sebelumnya. Jadi ada perubahan besar yang terjadi di perbatasan karena dulu perumahan tidak terlalu bagus tetapi sekarang sudah baik dan padat jadi susah untuk kita bergerak. Tetapi pada intinya saya ingin katakan bahwa ada perubahan yang terjadi di perbatasan.

Bru (PNG Citizen).

Mi kam raun long boda just to visitim relatives bilong mi husait i stap long Jayapura. Mi save kam everi mun. Taim mi kam raun long batas ya, mi bin harim sampela ol yangpela manggi tok-tok long drag na ilegal gan trefiking. Ol tok olsem bipo i gat drag trefiking problem long batas. But taim mi raun-raun go long boda, mi hamamas stret bikos ol Indonesian pipel ol welkamim mepela. Long ting-ting blong mi, mi ting olsem developmet long boda ya em i givim mipela ol isi ases long go long Indonesia. Nau boda i change gut tru na isi long mipela ol PNG long go bayim Indonesian prodak.

Terjemahan Bahasa Indonesia

Saya jalan-jalan ke perbatasan Skouw-Wutung hanya untuk mengunjungi keluarga saya yang tinggal di Jayapura. Saya biasanya ke batas setiap bulan. Waktu saya berkunjung ke perbatasan, saya pernah dengar anak-anak mudah berbicara tentang penyelundupan ganja dan senjata. Mereka menceritakan bahwa pernah ada kasus penyelundupan narkoba di perbatasan. Tetapi waktu saya berkunjung ke batas, saya bahagia karena masyarakat Indonesia sangat ramah dan mereka menerima kami. Yang ada di pikiran saya, pembangunan di perbatasan memberikan kita orang PNG akses untuk ke Indonesia. Sekarang perbatasan sudah berubah dan mudah untuk kita orang PNG membeli produk Indonesia.

Niko Merauje (PNG Citizen).

Ol problem we mi lukim kamap long boda em drag abuses, vanilla dan sekurity. Ol dispela problem sampela taim i save bagarapim nem bilong mipela ol PNG sitisen bikos dispela problem tu i wokim na bipo i gat pait we i mekim na relesensip bilong mipela ol PNG wantaim Indonesia i no gutpela. Tasol nau relesensip bilong Indonesia wantaim PNG i kamap gutpela ken.

Developmen long boda ya i mekim na planti bilong mipela ol PNG i save kam na shopping long boda. Boda ya em i kamap gutpela stret we i mekim na planti lain save kam raun i no bilong shopping tasol sampela i kam raun long kisim piksa.

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia

Masalah yang sering muncul di wilayah perbatasan Skouw-Wutung adalah masalah penyelundupan narkoba, vanilla dan masalah keamanan. Masalah tersebut kadang merusak nama baik kita orang PNG karena masalah tersebut menyebabkan sampai dulu pernah ada perkelahian antara warga PNG-RI yang kemudian merusak hubungan kedua belah pihak. Tetapi sekarang hubungan kedua masyarakat dari PNG dan Indonesia sudah berjalan seperti biasanya. Pembangunan di perbatasan ini menarik perhatian banyak masyarakat dari kedua negara sehingga kadang mereka berkunjung ke perbatasan bukan hanya untuk berbelanja saja tetapi untuk mengambil gambar atau berfoto-foto.

Alfred Apunda (PNG Citizen)

Selain itu berikut terlampir persepsi dari masyarakat Skouw terkait pembangunan perbatasan

I usually visited the border Post of Skouw-Wutung once a week. I came here just for shopping PNG products in Wutung or sometimes I went to Vanimo. In my opinion, I think the border post is developing now and much better than before. The main issue that sometimes I heard when I visited the border was the currency of the country. Sometimes it is high and ofcourse lower.

One of the possitive impact in the border area is there are quiet alot of people travelling in and out of the border now. The important change I found is that the border now is begining to develop into a better shopping place for the people of PNG and Indonesia.

Terjemahan Bahasa Indonesia

Saya biasanya mengunjungi perbatasan Skouw-Wutung sekali dalam seminggu. Saya pergi ke perbatasan hanya untuk berbelanja produk-produk dari PNG di Wutung atau kadang saya ke Vanimo. Menurut saya, perbatasan sudah berkembang dan lebih bagus lagi dari sebelumnya. Isu-isu yang sering saya dengar ketika mengunjungi perbatasan adalah tentang mata uang. Kadang naik dan turun (tidak tetap). Salah satu sisi positif di wilayah perbatasan adalah banyak sekali masyarakat bepergian keluar-masuk perbatasan. Salah satu perubahan penting yang saya jumpai di perbatasan adalah perbatasan sedang di bangun untuk menjadi tempat perbelanjaan bagi masyarakat PNG dan juga Indonesia.

Julian Horota (Warga Negara Indonesia)

Masalah yang sering muncul di wilayah perbatasan Skouw-Wutung adalah masalah penyelundupan narkoba, vanilla dan masalah keamanan. Masalah tersebut kadang merusak nama baik kita orang PNG karena masalah tersebut menyebabkan sampai dulu pernah ada perkelahian antara warga PNG-RI yang kemudian merusak hubungan kedua belah pihak. Tetapi sekarang hubungan kedua masyarakat dari PNG dan Indonesia sudah berjalan seperti biasanya. Pembangunan di perbatasan ini menarik perhatian banyak masyarakat dari kedua negara sehingga kadang mereka berkunjung ke perbatasan bukan hanya untuk berbelanja saja tetapi untuk mengambil gambar atau berfoto-foto.

Maric Nusi (Warga Negara Indonesia)

Pembangunan Perbatasan ini sangat berdampak bagi kami satu keluarga karena sudah lama kami berjualan disini dan ini sebagai mata pencaharian yang sudah lama apalagi dengan adanya pembangunan pasar ini menunjukkan dampak positif bagi kami. Selain itu juga perubahan yang besar itu terjadi yaitu ekonomi masyarakat yang bertambah dan orang PNG yang belanja merasakan puas karena harga yang murah. Disamping itu warga disini mengenal mata uang asing Kina.

Fredrik Sayori (Warga Negara Indonesia)

Masalah yang sering muncul di perbatasan yaitu adanya keluar masuk warga negara PNG dan Indonesia tanpa beraturan. Masih kurangnya kesadaran untuk mematuhi aturan-aturan dari petugas perbatasan. Sikap kita sebagai petugas yaitu mengadakan pengecekan warga yang keluar masuk dari Indonesia maupun dari PNG. Untuk menertibkan warga yang keluar masuk yang melewati PLBN (Pos Lintas Batas Negara) dan meningkatkan keamanan perbatasan. Dengan adanya pembangunan, terlihat adanya kemajuan dari segi fasilitas di perbatasan Papua dan pola pikir masyarakat. Menurut saya sangat bagus karena dengan adanya pembangunan tersebut petugas-petugas yang Dinas di batas dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih mudah dan maksimal.

Made (Warga Negara Indonesia)

Dampak ekonomi yang dirasakan oleh penjual kios di perbatasan sebagaimana dituturkan oleh Sri

Pada intinya kami senang dengan adanya pembangunan perbatasan yang membantu kios kami laku dijual dan mendapatkan keuntungan 500 ribu – satu juta rupiah per hari. Pelanggan biasanya menggunakan uang Kina dengan menggunakan Bahasa pidgin dan kami bisa berkomunikasi dalam Bahasa tersebut walaupun tidak semuanya dimengerti.

Sri (Warga Negara Indonesia)

Kesimpulan

Isu perbatasan yang masih menjadi masalah adalah isu keamanan yang bukan hanya keamanan tradisional, tetapi juga masalah non tradisional seperti penyelundupan obat-obat terlarang, BBM, vanili dan yang lainnya. Selain itu isu politik yang masih menguat yaitu daerah perbatasan dijadikan sebagai tempat pelarian OPM yang ditempuh melalui jalur laut. Pembangunan perbatasan sejak era Jokowi ini dengan memfasilitasi pos lintas batas negara Skouw – Wutung dan sarana lainnya memiliki dampak yang positif bagi masyarakat di perbatasan. Warga masyarakat Skouw yang sudah lama tinggal di daerah perbatasan dan berdagang menjadi sumber mata pencahariannya merasakan dampak ekonomi yang sangat tinggi. Hal ini didukung juga yang bukan karena masyarakat Wutung yang datang, tetapi juga areal perbatasan sudah menjadi salah satu destinasi wisata. Demikian pula halnya, masyarakat Wutung dapat menikmati akses yang semakin terbuka melalui pembangunan ini dan mendapatkan produk-produk tradisional (sembako dan fasilitas rumah tangga) dengan biaya yang relative murah dibandingkan di negaranya.

Daftar Pustaka

- Erniaty J, Yogaswara Herry. *Hubungan Sosial Budaya Penduduk Perbatasan RI dan PNG: Kekerabatan, Ekonomi dan Mobilitas*. Bogor: LIPI
- Haryadi. (2008) "Pengaturan Perbatasan RI – PNG", *Perspektif Implementasi Kebijakan*, Volume 13 Nomor 4
- Humpherey, Wangke. (2008) "Pengelolaan Perbatasan RI – PNG", *Perspektif Keamanan Ekonomi, Kajian* Volume 13 Nomor 3
- Madu, Ludiro, Nugraha, Aryanta, Loy, Nikolaus, Fauzan. *Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Noveria, Mita. *Kedaulatan Indonesia di Wilayah Perbatasan: Perspektif Multidimensi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Rumengan, Jemmy. (2009) "Perspektif Hukum dan Ekonomi atas Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah", *Hukum Internasional* Volume 6 Nomor 2
- Wanggai, Suzana. *Perkembangan Pengelolaan Perbatasan RI – PNG*, 11 September
- Yohanis Reinol R, Ma'arif Samsul. (2008) "Kajian Faktor Pengembangan Kawasan Perbatasan Jayapura – RI – Vanimo Papua New Guinea", *Pembangunan Wilayah Kota*, Volume 4.

Border Governance, Konstruksi Politik Identitas Perbatasan, Nasionalisme atau melawan?

Saiman Pakpahan

Universitas Riau

saiman.pakpahan@lecturer.unri.ac.id

Pendahuluan

Perbatasan adalah entitas politik ruang yang menjadi garis peneguh dari kedaulatan sebuah negara-bangsa. Ia menjadi lokus (dis) koneksitas antar negara-bangsa sekaligus penanda dari mata rantai legitimasi negara bangsa. Posisi fisik-strategis Indonesia yang dalam bentangan geopolitik memiliki wilayah yang tidak kurang dari 8,1 juta km², sebaran pulau kurang lebih 17.499 pulau dan panjang garis pantai yang lebih dari 80.000 kilometer serta perlintasan garis perbatasan darat sekitar 29.141 km. Posisi ini meletakkan Indonesia secara langsung berbatasan dengan sepuluh negara (10) tetangga; Singapore, Malaysia, Philippines, Australia, Papua New Guinea, Vietnam, India, Thailand, Timor Leste and the Republic of Palau. Sebagian besar dari ragam Negara tersebut telah berafiliasi secara regional dan membentuk upaya bersama untuk proses regionalisasi.

Kendati posisi Indonesia yang strategis, operasionalisasi serius terhadap tata kelola lintas batas belum diletakkan sebagai prioritas. Padahal kemampuan (*governability*) negara salah satunya dapat dilihat dari bagaimana kawasan perbatasannya dikelola. Di kawasan perbatasan ini perhatian pemerintah tidak memadai. Kawasan perbatasan menjadi *concern* nasional hanya ketika ada sengketa perbatasan antar negara terjadi. Dengan sejumlah pengecualian, penanganan masalah perbatasan dilakukan secara reaktif. Karenanya, kawasan perbatasan Indonesia dengan negara lain pada umumnya merupakan wilayah yang bisa dikategorikan sebagai wilayah tertinggal atau terisolasi atau malah keduanya. Dalam kebanyakan kasus, wilayah perbatasan bukan hanya kurang mendapatkan perhatian pemerintah pusat, tapi juga ditandai oleh ketidak-hadiran negara secara efektif. Kalaupun negara hadir, ia cenderung menunjukkan wajahnya yang tidak ramah melalui gelar pasukan.

Kapasitas ini terlihat dari cara negara-bangsa dalam memproduksi dan mendistribusikan pemberdayaan kawasan perbatasan, sehingga kuat atau lemahnya basis legitimasi negara dimata warga yang hidup keseharian dalam lintas-batas ini akan diujikan. Eksistensi kedaulatan dan kontrol teritorial dan penduduk (*control over the territory, control over the people*) telah membawa perbatasan sebagai entitas konflik antar dua negara, bahkan tidak jarang menjadi indikator di era globalisasi sekarang, garis batas menjadi entitas yang

memudar. Tatanan global menghendaki pergerakan internisif dari manusia, barang dan jasa yang melintasi kawasan perbatasan. Tatanan politik ekonomi global juga menghendaki agar setiap negara semakin membuka diri terhadap hal itu melalui berbagai bentuk kebijakan yang bernafaskan liberalisasi. Kesiapan Indonesia mengikuti aturan internasional yang semakin liberal tentunya meningkatkan beban dan tanggung jawab untuk mengelola kawasan perbatasan secara lebih seksama.

Akhirnya, kawasan perbatasan semakin bermakna justru dalam denyut globalisasi yang meniadakan sekat batas negara. ia telah tumbuh sendiri sebagai arena pertarungan baru dari kepentingan nasional, bahkan survivalitas sebuah bangsa. Lebih lanjut, dalam dinamika dan konteks ini, tata kelola lintas-batas (*cross-border governance*) menjadi instrument untuk mengukur pola dan derajat kontestasi sekaligus koneksitas antar negara. Dalam studi kasus Indonesia – Malaysia di lintas-batas Provinsi Riau, identifikasi medium interaksi perbatasan dalam wujud pluralitas institusi (lembaga, norms, ide, value, dll) yang bekerja di kawasan ini menjadi lokus penelitian yang strategis untuk memetakan dinamika rezim yang bekerja dan menjadi modal dasar pencarian *cross-border governance* model yang relevan dimasa mendatang. Sehingga, Indonesia, Malaysia maupun skema regional harus mulai mengidentifikasi “pluralitas medium interaksi perbatasan” untuk memahami *framework* yang bekerja dan re-formulasi model tata kelola lintas-batas (*cross-border governance* model) yang bisa diandalkan. Dengannya, dinamika domestik maupun internasional yang berlangsung di kawasan lintas-perbatasan dapat terkelola dengan baik.

Literature Review

Konsep tentang *border* dalam pendekatan teoritis telah mengalami evolusi dan mutasi, bermula dari persoalan substantif tentang teritorial yang diajukan oleh Friedrich Ratzel's, *Politische Geographie* in 1897 yang mengungkap perbedaan yang jelas tentang *boundaries*, *frontiers*, dan *border* merujuk pada typology definisi yang telah diterima luas. *Frontiers and Boundaries* adalah dua konsep yang saling berposisi. Lebih lanjut, istilah ‘*frontier*’ mulai dipakai untuk mempertegas ruang batas dalam ekspansi kolonialisasi. Konsep ini dipakai juga untuk menterjemahkan manifestasi dari pola kekuasaan yang bersifat sentrifugal dan *outer-oriented*. Sedangkan konsep tentang *boundaries* adalah konsep yang menegaskan tentang orientasi melihat kedalam, *inner oriented*. Konsep ini merupakan manifestasi pola kekuasaan yang sentripetal. Walau sebagai sebuah konsep yang abstrak, *boundary* merupakan konsep yang mengidentifikasi dengan jelas garis batas luar, kekuasaan

dalam dan kekuasaan luar yang dikelola dalam negara. Oleh karenanya, boundary merupakan garis batas yang diatur dan di tegaskan dengan hukum.

Dikotomi konsep ini dapat di nilai dengan melihat pada perkembangan *Treaty of Westphalia*, yang mengakhiri perang 30 tahun di Eropa, merubah domain konsep *frontier* menjadi *boundary*. Konsep tentang negara dan garis batas menjadi zona yang dikelola dalam makna kedaulatan negara. Ditataran lain, border adalah garis batas yang diakui melalui perjanjian dan di terapkan untuk membedakan antar kawasan. *Lapradelle* membedakan antara tiga bagian yang dibangun dalam basis hukum. Bagian pertama adalah central area yang didefinisikan sebagai; “*The central area immediately adjacent to the boundary was called le territoire limitrophe, which is the zone where international law may apply.*” Dan bagian dua dan tiga yang diterangkan sebagai daerah yang bersisi/berbatasan dalam bentuk zona dan bersifat pembatas seperti dalam istilah *borderline, border landscape, borderland, border area, border inhabitant, borderer, maupun border war.*

Kompleksitas kajian tentang border dan perubahannya merujuk pada *Liam O’ Dowd And Cathal Mccall*, pada dasarnya berupaya untuk menterjemahkan konsep yang saling berhubungan erat antara teritorial atau wilayah dan fungsinya. Mengakses pada persoalan tapal batas dalam karakter globalisasi, dorongan mobilitas capital, teknologi, reduksi makna kedaulatan, sampai dengan perubahan sifat ancaman, maka kajian tentang *border* khususnya domain keamanan daerah perbatasan mengalami proses yang dialektis. Kemudian, konsep keamanan perbatasan tidak sekedar menjadi garis pembatas antara dua negara dan bersifat kompetitif melainkan mengerucut pada pola yang bersifat kooperatif dan bernuansa kawasan/zona.

Dalam sebuah proses yang dialektis, kajian border dan kebutuhan keamanan muncul dalam pelacakan *Kolossov* yang menerangkan bahwa kajian border memiliki perjalanan waktu yang bersifat evolutif dan memunculkan konsentrasi-konsentrasi kajian yang unik. Dua konsep yang relevan untuk dikaji dengan mengakses pada persoalan-persoalan yang telah diurai adalah, pendekatan geo-politik dalam keamanan garis batas. Pendekatan geo-politik menitik beratkan pada kehadiran proses de-territorialisasi dan re-territorialisasi yang didorong oleh dampak dari globalisasi dan gerakan re-integrasi politik perbatasan. Evolusi teritorial ini meletakkan fokus perhatian pada redistribusi fungsi dari *border* dan evolusi system politik dan administrasinya. Kemudian, dalam pendekatan keamanan baik *narrow prespective* maupun *wider prespective, border security* meletakkan kerangka kajian yang menilai peran tapal batas dalam *securitization* kawasan dan negara. Peran ini secara

tradisionalis di maknai sekedar representasi kekuatan militer atau kepolisian yang menjadi petanda aktor-aktor penjaga tapal batas. Gugatan ini muncul dengan mempertanyakan ” *who is responsible for security (to secure the border) and what is its subject– a macro-region, the state or one or more of its parts?*

Fungsi dari *border* kemudian ditafsirkan meng-interkoneksi antara tanggungjawab keamanan dan kerangka hulu-hilir ” *life support system*” dari sektor dan aktor yang berkontribusi dalam meniadakan ancaman. Praktisnya kemudian, kajian garis batas mulai meletakkan konsentrasi untuk melihat garis menjadi zona, zona perbatasan. Dalam membaca tentang pola ancaman yang muncul dalam pasca perang dingin dan transformasi sistem politik negara yang semakin mengadopsi perluasan aktor-aktor termasuk dalam penyediaan keamanan.

Mengikuti *Kolosov*, ada (6) hal yang menjadi titik tekan dengan mengacu pada pendekatan *postmodernisme*, (1) adalah munculnya dampak yang bisa berubah menjadi ancaman, dampak ini yang tidak bisa dibendung meskipun oleh penggunaan paramiliter, polisi dan militer yang kuat, yakni. *illegal migration, international terrorism, the traffic in drugs and weapons, the risk of epidemics, transboundary pollution, or global environmental disaster*. (2) adalah meletakkan hambatan atau pola klasik terhadap pergerakan trans-nasional dalam daerah perbatasan justru berakibat merusak bagi masyarakat dan dinamika ekonomi. Hanya dengan kerjasama dengan negara tetangga berbasis pada trust, demilitarisasi area tapal batas dan de-securitisasi dengan membuka daerah perbatasan maka dampak positif akan didapat. (3) pembangunan kerjasama lintas batas pada level lokal. Petanggungjawaban keamanan akan semakin di indahkan oleh pusat. Kerjasama antar level lokal kemudian memiliki dampak yang berdimensi regional. (4) adalah memperkuat garis batas dengan representasi kekuatan militer justru akan membawa kelemahan. Bertolak dari bentuk ancaman non tradisional, hanya 5-10 % penyelundupan obat terlarang dapat dihandle. Dibutuhkan pola pengamanan border space, yang mengakses tidak hanya di daerah perbatasan tetapi merambah sampai internal kawasan/zona. (5) adalah *governance*. Keamanan zona merupakan kebutuhan lokal dan internasional dengan variasi aktor yang beragam. Oleh karenanya dibutuhkan pelibatan semua stake-holders, state and non-state actors. Dan (6) tantangan dalam keamanan perbatasan tidak sekedar kecanggihan dalam memprediksi tetapi juga kesiapan, *readiness*, untuk bereaksi secara fleksible dan cepat bagi stake- holders.

Daerah atau kawasan perbatasan sebagai lingkup yang multi dimensi dan berdampak kompleks. Dalam lingkup yang multidimensional tersebut, pendekatan keamanan perbatasan

dapat dipilah menurut level skalanya. Merujuk pada gagasan yang diutamakan oleh Paasi, Annssi, skala pengelolaan keamanan perbatasan akan berdampak pada dimensi **politik, ekonomi, culture** dan regional dan membangun persepsi keamanan dalam teritorial yang jelas. Ekspresi ini muncul dalam bentuk **kesatuan identitas simbolik**, tradisi sejarah, image dan discourse kotemporer yang dapat di lacak dari integrasi wilayah dan penduduk secara utuh.

Kajian perbatasan telah mengalami sebuah revolusi cara pandang yang menempatkan perbatasan sebagai entitas yang mengalami pergeseran baik dalam unit, scope maupun operasionalisasinya. Jaily dkk, Mostov (2008) dan Eillenberg (2012) menilai bahwa watak perbatasan sering berubah-ubah tergantung pada dinamika masyarakat perbatasan yang mempengaruhi regime politik perbatasan. Mostov (2008) menilai bahwa regime ini bergeser dari *hard-border* regime ke *soft border* regime. Pemikiran tentang *softening the border* atau pelunakan perbatasan ini pada dasarnya menawarkan sebuah paradigma lain melihat perbatasan. Di sini, berbeda dengan perspektif konvensional, fakta tentang watak *porousness* dari perbatasan disikapi secara afirmatif. Sikap afirmasi inilah yang memunculkan konsekuensi kebutuhan akan model *CROSS-BORDER governance*, mengingat model yang sejauh ini ada didominasi paradigma *hard-border*. Dalam sejumlah kajian tentang *borders* atau *cross-borders governance* di negara-negara post-kolonial, wacana ini didukung oleh fakta (1) bahwa apa yang selama ini disebut sebagai *national borders* di negara-negara tersebut, pada dasarnya adalah batas-batas kolonialisme. Hampir seluruh batas-batas tersebut merupakan hasil kesepakatan antara para penguasa kolonial untuk membagi tanah jajahan di antara mereka. (2) Pembagian ini lebih didasarkan oleh pertimbangan kepentingan ekonomi-politik penguasa, dan relatif abai terhadap keberadaan sebuah komunitas sosio-kultural yang terbelah oleh pembilahan teritorial-administratif yang mereka buat. Hal ini memunculkan fenomena sebuah entitas sosio-kultural yang terpisah oleh batas negara. (3) Belakangan, aktifitas *cross borders* dan tata pemerintahannya muncul dalam kajian-kajian yang dikerangkai oleh kesamaan isu yang bersifat *cross-borders*, baik di tingkat negara maupun masyarakat, seperti isu lingkungan, migrasi, termasuk refugees dan *human trafficking*, ekonomi dan perdagangan-termasuk integrasi perdagangan di sekala regional, dan epidemik dan penyakit menular. Di sini *cross-borders issues* didefinisikan sebagai isu-isu yang tidak bisa diselesaikan secara tuntas oleh aksi kebijakan yang terisolasi hanya pada level nasional atau sub-nasional. Fakta tentang semakin banyak dan beragamnya isu *cross-borders* menunjukkan bahwa dalam banyak segi setiap *polity* harus membuka dan keluar

dari batas-batas teritorialitas berbasis negara-bangsa dan merespon isu-isu *cross-borders* tersebut melalui kolaborasi dengan entitas dari *polity* lain.

Fakta yang ditunjukkan di poin (1) dan (2) di atas muncul dalam sejumlah kajian tentang konflik etnik dan tuntutan rekognisi akan klaim nasionalisme dari kelompok etnik tertentu yang tinggal di sebuah negara multi-etnik di mana keberadaan mereka, baik secara faktual maupun dipersepsikan, marginal. Isu Kurdi dan Tamil merupakan contoh dari kasus semacam itu yang mencuat menjadi isu internasional selama puluhan tahun. Situasi seperti itu menjadi obyek kajian ilmiah tentang kebangsaan, negara, dan etnisitas seperti dalam kajian O'Leary, Brendan; Ian S. Lustick; and Thomas Callaghy (eds.), 2001, *Right-Sizing the State: the Politics of Moving Borders*, Oxford University Press. Dihadapkan pada situasi ini, konsep negara-bangsa harus didesain sedemikian rupa untuk menjaga kohesifitas formasi sosial kebangsaan yang menjadi justifikasi utama *polity* yang disebut sebagai negara bangsa. Strategi yang digunakan untuk mendesain konsep kebangsaan dan terefleksi dalam kebijakan negara terkait formasi kebangsaan yang diusung dan hubungannya dengan fakta keragaman etnis, dikategorikan menjadi dua kelompok pendekatan dalam kajian ini.

Pendekatan yang pertama adalah 'eliminasi keragaman'. Pendekatan ini mencakup strategi-strategi seperti genosida, pembersihan etnis (*ethnic expulsion*), eliminasi territorial (mencakup pula strategi pemisahan atau *secession*, dekolonialisasi aktif, dan partisi) dan homogenisasi politik (mencakup pula eliminasi kebudayaan tertentu dari domain politik dengan cara memperlakukan setiap individu secara setara dan seragam sebagai warga negara dan kebijakan akulturasi yang mendorong terjadinya asimilasi dan peleburan beragam kelompok sosial dalam sebuah negara bangsa). Yang dikategorikan sebagai strategi dengan pendekatan manajemen keragaman adalah kontrol; arbitrase; manajemen teritorial melalui otonomi; devolusi; atau federasi; dan konsosiasi.

Di samping kajian-kajian tentang perbatasan yang menyoroti diskrepansi antara batas-batas negara dan batas-batas etnis seperti di atas, muncul pula kajian-kajian tentang perbatasan yang bertitik tolak dari pengelolaan isu kebijakan sektoral tertentu. Salah satu contoh kajian semacam ini adalah kajian-kajian yang dirangkai oleh Shabir G. Cheema dkk. Kajian yang dilakukan oleh Cheema merepresentasikan cara pandang baru yang melihat bahwa sejumlah isu kebijakan merupakan isu-isu yang menuntut respon yang bersifat lintas batas negara. Cheema melihat bahwa cara pandang baru ini muncul, sebagian, disebabkan dan merupakan kelanjutan dari proses transformasi paradigma dari *government* ke *governance*, sebagai konsekuensi dari proses demokratisasi. Watak hirarkis dan rezim formal negara yang

didasarkan pada logika otoritas bertransformasi oleh proses modernisasi yang membuat aktor-aktor yang terlibat dalam proses governance menduduki posisi yang relatif setara. Sebagai kelanjutan dari proses penyetaraan tersebut, perspektif alternatif dalam melihat isu-isu kebijakan bermunculan dan salah satunya adalah perspektif yang melihat isu-isu kebijakan tertentu solusinya tidak terletak di dalam batas negara yang bersangkutan, tetapi juga ditentukan oleh proses governance yang terjadi di luar batas tersebut.

Secara keseluruhan kajian ini didasarkan pada asumsi yang melihat bahwa integrasi ekonomi di antara berbagai negara bangsa yang ada sekarang merupakan sebuah keniscayaan. Tantangan yang mengemuka kemudian adalah bagaimana proses governance yang beragam di tiap-tiap negara bisa diintegrasikan dalam sebuah proses yang sinergis untuk menghasilkan solusi bagi permasalahan yang dihadapi bersama. Dalam konteks semacam itulah pemikiran tentang *Cross-border governance* menjadi tema sentral dalam kajian-kajian yang dirangkai oleh Cheema dkk.

Sejumlah catatan menarik muncul dari kajian-kajian yang terkompilasi dalam buku tersebut. Salah satunya adalah dari Graeme Hugo yang menyoroti governance dan isu kelembagaan terkait migrasi di Asia. Berangkat dari realitas di mana isu migrasi telah berkembang menjadi salah satu isu sentral di Asia, Hugo melakukan analisisnya dengan melihat bahwa rezim governance formal bukanlah satu-satunya yang menstruktur pola dan praktek migrasi yang terjadi di Asia. Sebaliknya, praktek ini telah jauh lebih lama berlangsung dengan rezimnya sendiri, sebelum rezim governance formal ini mulai mengintervensi isu migrasi. Dalam salah satu poin kesimpulannya Hugo berpendapat, untuk mengelola isu ini perlu dilakukan pengkajian untuk membangun pemahaman yang komprehensif tentang rezim yang secara de facto menstruktur pola dan praktek migrasi yang terjadi. Harapannya, dengan pengetahuan tersebut proses governance dan kebijakan formal yang diinduksi untuk mengintervensi pola dan praktek yang sudah berjalan bisa mengena pada sasaran yang hendak dituju dan menghasilkan dampak yang diinginkan dan meminimalisir timbulnya dampak negatif yang tidak terduga.

Politik Identitas Perbatasan; Nasionalisme?

Terhadap literature review diatas, banyak pendekatan yang bisa dilakukan untuk melihat perbatasan secara jelas. Model *Cross Border governance* misalnya, selama ini di hegemoni oleh paradigma *hard-border*. kajian tentang *cross-borders governance* di negara-negara post-kolonial, didukung oleh fakta bahwa apa yang selama ini disebut sebagai *national*

borders di negara-negara tersebut, pada dasarnya adalah batas-batas kolonialisme. Hampir seluruh batas-batas tersebut merupakan hasil kesepakatan antara para penguasa kolonial untuk membagi tanah jajahan di antara mereka, dan pembagian ini lebih didasarkan oleh pertimbangan kepentingan ekonomi- politik penguasa, dan relatif *abai* terhadap keberadaan sebuah *komunitas sosio-kultural* yang terbelah oleh pembilahan territorial-administratif yang mereka buat. Hal ini memunculkan fenomena sebuah entitas sosio-kultural yang terpisah oleh batas negara.

Dalam kapasitas inilah misalnya kita harus melihat konsistensi sebuah nasionalisme dan kebangsaan suatu negara (Indonesia), apakah terhadap isu kebangsaan dan identitas ke Indonesia an konsisten berada diperbatasan, atau hanya karena daya paksa negara terhadap masyarakat yang ada diperbatasan?. Tunduk atau melakukan perlawanan diam-diam? Menjawab pertanyaan tersebut, teori-teori besar pasca colonial yang disampaikan oleh pemikir-pemikir, seperti Franz Fanon, Edward W. Said, Homi K. Bhabha bisa menjadi alternative jawaban terhadap kondisi empiric yang berlangsung di perbatasan Provinsi Riau dengan Malaysia.

Dalam kajiannya, Bhabha menyebutkan bahwa antara penjajah dan yang dijajah memiliki ruang antara, yang memungkinkan keduanya saling berinteraksi, dan diantara keduanya terdapat ruang yang longgar untuk saling resistensi. Konsep kunci Bhabha terhadap kondisi ini adalah Time Lag, yaitu, sebuah struktur keterbelahan dari wacana colonial. Kondisi terbelah ini, menjadikan subjek selalu berada pada the liminal space between cultures, dimana garis pemisah tidak pernah tetap dan tidak dapat diketahui batas dan ujungnya.

Selanjutnya, ketegangan antara penjajah dan terjajah menghasilkan apa yang disebut dengan hybriditas. Hybrid dipahami secara teknis dipahami sebagai persilangan antara dua spesies yang berbeda. Dalam hal ini, hybriditas mengacu pada pertukaran silang budaya. Hybriditas dilingkungan colonial dapat berfungsi sebagai sarana untuk mendefinisikan medan baru yang bebas dari ortodoksi rezim, maupun identitas nasionalis bayangan yang menggantikannya. Hybriditas misalnya dapat dilihat pada pengadopsian bentuk-bentuk kebudayaan seperti pakaian, makanan dan sebagainya. Akan tetapi hybriditas tidak hanya mengarahkan perhatian pada produk-produk perpaduan budaya, tetapi lebih kepada bagaimana cara produk-produk budaya ini ditempatkan didalam ruang social dan historis dibawah kolonialisasimenjadi bagian dari pemaksaan penolakan hubungan kekuasaan.

Strategi hibriditas dapat ditempuh dengan cara mimikri. Mimikri adalah reproduksi belang-belang subjektivitas penjajah dilingkungan colonial. Tindakan mimikri ini kemudian dapat dipahami sebagai akibat dari retakan-retakan dalam wacana colonial. Baik bagi penjajah, maupun terjajah menghasilkan efek yang ambigu dan kontradiktif.

Refleksi Akhir

Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa yang menjadi dasar ontologis konsep pasca kolonialisme Bhabha adalah prinsip displacement dan kondisi rupture. Keterpecahan wacana colonial inilah yang kemudian yang membawa subjek pada realitas yang liminal. Realitas liminal mencakup didalamnya hibriditas, mimikri, ambivalensi dan bahkan mockery.

Untuk melihat kemungkinan-kemungkinan tersebut, metode yang digunakan adalah dekonstruksi. Metode ini sekaligus menjadi dasar epistemology konsep-konsep pascakolonialisme Bhabha. Metode ini beroperasi setidaknya dengan dua cara, pertama, melakukan analisis terhadap wacana terjajah untuk menemukan kecenderungan kesatuan tematiknya, asumsi-asumsi dasarnya, dan sekaligus menemukan sarana retorik yang digunakannya yang mungkin bertentangan dan dapat menunda asumsi dasar itu (ruptured), terpecah. Kedua, melakukan analisa terhadap subjek yang dimarjinalkan untuk mendesentralisasi keatuan tematik wacana dominan.

Daftar Pustaka

1. Anindita Mondal, postcolonial theory : Bhaba and Fanon, International Journal of Science and Research (IJSR)
2. Brendan O Leary, Ian S. Lustick, Thomas Callaghy : right-sizing the state : the politics of moving border, 2001
3. Friederich Ratzel, politische geographie, muenchen und Leipzig, 1897
4. G. Shabbir Cheema ; cross border governance in Asia ; regional issues and mechanisms, united Nations university press
5. Homi K. Bhabha; the location of culture, rouledge, London and new york.

6. Liam O dowl and Jhon Coakley (eds), crossing the border new relationships between Ireland and the Republic of Ireland, irish academic press, 2007
7. Vladimir Kollosov, border studie : changing perspectives and theoretical approaches, routledge, 2005

Mengurai Fenomena Migrasi Modern di Indonesia dan Turki: Suatu Telaah Fungsional Negara

Wahyuni Kartikasari
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
wahyunikartikasari@yahoo.com

Pendahuluan

Paper ini bertujuan melihat imbas yang ditimbulkan oleh peristiwa migrasi modern dan kontemporer di Indonesia dan Turki. Perkembangan politik dunia yang menimbulkan konflik dan perang di beberapa negara memunculkan gelombang pengungsi sebagai bentuk migrasi baru. Kasus Indonesia dan Turki menggambarkan bahwa dua negara ini menjadi lalu lintas pengungsi asal Suriah, Afganistan dan Myanmar, sebagai fase baru orang berpindah ruang karena alasan politik.

Di sisi lain, perbatasan merupakan area pertama dari suatu negara yang bersinggungan dengan para migran dan merupakan pintu masuk bagi para pendatang. Maka area perbatasan terkait erat dengan persoalan migrasi untuk menyaring para pendatang yang dalam prosesnya banyak menimbulkan persoalan. Oleh karena itu, kebijakan perbatasan yang diambil oleh negara-negara yang saling berbatasan menjadi persoalan penting dan bahkan dapat menentukan eskalasi maupun deskalasi persoalan migran terutama migran korban konflik yang lewat diwilayahnya.

Dengan melihat fenomena-fenomena migrasi yang terjadi di kedua negara ini, diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bagi studi migrasi transnasional dan studi perbatasan dengan ditemukannya gejala-gejala, bentuk-bentuk dan karakter migrasi modern serta imbasnya bagi negara-negara yang terkait

Migrasi dari Masa ke Masa: Bentuk, Pola dan Jenis Migrasi

Walaupun migrasi dalam skala besar telah menjadi sejarah panjang pergerakan manusia sejak munculnya negara-negara pada kurang lebih 6 ribu tahun yang lalu, persoalan migrasi masih menjadi bahasan yang sangat menarik.

Karakteristik migrasi dapat diamati dari era ke era, yang terbagi dalam era *pre modern*, *early modern* hingga ke modern migration serta *contemporary migration* (Held and Mc Grew, Goldbatt and Perraton, 1999). Dalam era premodern, migrasi dilakukan dalam rangka ekspansi

kekaisaran dan kerajaan oleh migran elite seperti tentara, pedagang, misionaris dan birokrat secara massal dalam lingkup regional.

Pada masa awal migrasi modern (*early modern migration*) di abad 17 dan sesudahnya, negara yang berorientasi merkantilisme mendorong pergerakan orang sebagai migran buruh tenaga ahli. Migrasi-migrasi yang terjadi kemudian merupakan rentetan akhir dari penaklukan Eropa dan terbentuknya populasi Amerika dan Oceania, serta adanya perdagangan budak translantik yang dipicu oleh perkembangan ekonomi dari wilayah-wilayah koloni serta perpindahan massal para buruh Asia yang menggantikan perdagangan budak.

Pada masa *early modern* ke *modern migration* terjadi migrasi massal yang digambarkan sebagai *biological expansion of Europe* yaitu perpindahan orang-orang Eropa berikut flora dan fauna serta mikroba ke Oceania dan Amerika yang secara ekologi berbeda dengan Eropa (Crosby, 1983). Kecepatan dan skala migrasi meningkat disebabkan oleh sarana transportasi yang teratur, murah dan terpercaya selain alasan klasik penyebab migrasi yaitu karena faktor ekonomi. Faktor *supply* dan *demand* juga berperan menciptakan migrasi. Adanya surplus tenaga kerja di industri pertanian Eropa dan disisi lain ada ledakan industrial di tanah kaya Amerika Serikat namun kekurangan tenaga kerja, sehingga kemudian mendorong terjadinya migrasi massal buruh/*labour migrant*.

Penaklukan Eropa serta terbentuknya populasi Amerika di abad 17 dan 18 berkaitan dengan migrasi massal lainnya yaitu perdagangan budak (*slave trade*). Pada masa ini terjadi migrasi manusia secara paksa dari wilayah sub-Sahara Afrika menyeberangi Atlantic ke Amerika dan Karibia (Curtin, 1969; Fox-Genovese and Genovese, 1983; Blacburn, 1988,1997).

Setelah masa ini dunia mengenal Diaspora Asia. Dengan adanya penurunan dan pengurangan perdagangan budak di pertengahan abad 19, migasi massal tenaga kerja Asia yang disebut dengan istilah kuli (*Coolie Labour*), mulai tumbuh. Hal ini memungkinkan bagi penjajah ekonomi untuk menggantikan model perdagangan buruh dan di Australia menjadi cara untuk mendapatkan sumber buruh yang sangat murah serta mengurangi penggunaan tenaga kerja hukuman dari Inggris.

Di abad 19 yang merupakan awal era industrialisasi, negara Eropa kemudian mengenal pembagian untuk negara-negara pengimpor buruh dan pengekspor buruh. Migrasi yang terjadi adalah migrasi para buruh dalam jenis-jenis pekerjaan untuk tambang dan batu bara, pertanian dan transportasi. Pergerakan migrasi serupa dengan urbanisasi dimana para migran meninggalkan wilayah pedesaan untuk pindah ke daerah-daerah industri (Hollifield, 1992).

Di era perang global dan sesudahnya, perpindahan penduduk yang penting didorong oleh perang dan konflik etnis. Warga Rusia dan Austria Polandia ingin membentuk negara

Polandia merdeka. Warga Russia melarikan diri dari revolusi dan bermigrasi ke eropa sebelum 1922. Perang Dunia I yang diikuti Perang Dunia II mendorong terjadinya migrasi. Bahkan sesudah era perang dunia ini, gelombang migrasi akibat konflik masih terjadi seperti pada warga Palestina yang terusir dari negara yang baru terbentuk, Israel. Konflik Korea mendorong eksodus penduduk dari wilayah utara ke wilayah selatan. Pada masa setelah perang, kekuatan ekonomi membentuk pola migrasi di Eropa dan barat umumnya, sedangkan yang terjadi di negara berkembang adalah adanya kenaikan jumlah migrasi akibat konflik, perang dan pembentukan negara baru.

Tulisan diatas menggambarkan migrasi yang berkaitan dengan tranformasi secara global. Era globalisasi membuat tranformasi pada migrasi yang cenderung akan mempermudah dan mendorong meningkatnya migrasi dengan dibantu oleh perkembangan komunikasi, transportasi dan teknologi yang lebih bebas mendunia.

Selain sejarah dan perkembangan serta model migrasi, lebih banyak lagi riset-riset dan literature-literature migrasi mengkaitkannya dengan pendekatan ekonomi, salah satunya berfokus pada isu tenaga kerja yang lazim disebut sebagai buruh migran (*migrant workers*). Faktor ekonomi sebagai alasan klasik migrasi membuat mobilitas internasional pekerja semakin berkembang. Selama beberapa dekade terakhir, migrasi internasional pekerja menjadi suatu pilihan alternatif bagi banyak migran di berbagai negara. Pengalaman banyak negara di dunia menunjukkan bahwa penggunaan jasa tenaga kerja internasional yang makin tinggi dilakukan dalam rangka memenuhi berbagai kepentingan pembangunan (Moelinto T, 1987). Menjadi buruh migran merupakan strategi ekonomi alternatif bagi mereka dan secara makro dan mikro sumbangannya terhadap pembangunan ekonomi daerah sangat menonjol. Pengkajian persoalan migrasi internasional terutama dalam konteks pembangunan daerah maupun pembangunan nasional dapat menjadi satu bagian penting dalam upaya memahami berbagai gejala migrasi internasional yang terus berkembang (Haris, 2003). Persoalan menarik yang dapat dilihat dari perkembangan migrasi internasional dari kawasan timur Indonesia adalah terjadinya pergeseran bentuk migrasi legal ke bentuk migrasi ilegal (Harris, 1997).

Pembicaraan mengenai migrasi juga sangat erat terkait dengan kebijakan pemerintah baik di level internasional, regional dan nasional. Tuntutan untuk memahami persoalan migrasi bagi para pemegang keputusan didesak oleh tekanan politik, ekonomi dan sosial sejalan dengan meningkatnya fenomena migrasi itu sendiri. Riset-riset mengenai migrasi menjadi lebih

terkoneksi dengan keperluan pembuatan kebijakan. Kebijakan ini juga mendorong para periset untuk menyadari bahwa di masa sekarang migrasi menjadi suatu

Fenomena multidimensi yang tidak hanya keseluruhannya adalah persoalan ekonomi tapi juga persoalan kultural dan politik. Program transmigrasi Indonesia merupakan contoh yang baik dari politik migrasi di negara berkembang. Transmigrasi merangkum semua aspek pembangunan yang diciptakan oleh negara untuk mencapai tujuan yang bervariasi tidak saja bidang demografis, juga ekonomi dan politik (Riwanto Tirtosudarmo, 2015). Oleh sebab itu, transmigrasi dapat disebut sebagai suatu kebijakan ideologis. Migrasi menjadi suatu dimensi perantara atau jembatan hubungan triangular yang menjadi elemen penting dalam proses tidak terhentikannya aliran orang, barang, dan gagasan secara lokal, regional dan global. Sedikit yang tergambar dari buku ini, Riwanto juga menyebutkan bagaimana migrasi merupakan cara untuk lari dari area konflik. Namun, para migran ini kemudian menjadi ilegal migran yang harus menyembunyikan diri di tempat tujuan.

Dari perkembangan pola migrasi yang terjadi, kita dapat melihat bentuk-bentuk migrasi dan karakter para migran serta wacana yang terkait. Melihat era-era awal migrasi, bentuk migrasi yang terjadi adalah migrasi reguler yang dikehendaki, dibentuk dan di atur negara. Negara justru mendorong dan memerlukan para migran untuk kepentingan tertentu. Pada era sekarang, selain terjadi migrasi karena alasan ekonomi, terjadi pula migrasi akibat konflik. Migran akibat konflik yang disebut sebagai pengungsi, pencari suaka dan orang tanpa negara adalah migran yang tidak diharapkan dan tidak direncanakan yang membuat mereka tidak dapat memenuhi syarat-syarat untuk memasuki dan berdiam negara lain. Hal ini kemudian mendatangkan problem bagi negara tujuan dan potensial menimbulkan penolakan terutama bagi negara yang tidak memerlukannya.

Pengungsi Korban Konflik dan Perang sebagai Migrasi Kontemporer

Era migrasi kontemporer dimulai pada waktu berakhirnya Perang Dunia II dimana terdapat perpindahan orang secara masif. Salah satu bentuk migrasi kontemporer ini adalah pengungsi, pencari suaka, serta orang tidak bernegara (Held, 1999). Menurut United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) pengungsi, pencari suaka, serta orang tidak bernegara adalah:

A refugee is someone who has been forced to flee his or her country because of persecution, war or violence. A refugee has a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, political

opinion or membership in a particular social group. Most likely, they cannot return home or are afraid to do so. War and ethnic, tribal and religious violence are leading causes of refugees fleeing their countries.

Yang disebut sebagai orang tidak bernegara atau *stateless person* adalah:

A stateless person is someone who is not a citizen of any country. Citizenship is the legal bond between a government and an individual, and allows for certain political, economic, social and other rights of the individual, as well as the responsibilities of both government and citizen. A person can become stateless due to a variety of reasons, including sovereign, legal, technical or administrative decisions or oversights. The Universal Declaration of Human Rights underlines that Everyone has the right to a nationality.

Dan yang disebut sebagai pencari suaka (*asylum seeker*):

When people flee their own country and seek sanctuary in another country, they apply for asylum – the right to be recognized as a refugee and receive legal protection and material assistance. An asylum seeker must demonstrate that his or her fear of persecution in his or her home country is well-founded.

Peperangan demi peperangan yang terjadi di wilayah Arab membuat gelombang pengungsi semakin besar dan bertambah. Dua per tiga pengungsi dunia berasal dari negara Suriah, Afghanistan, Sudan Selatan, Myanmar dan Somalia. Perang di Suriah yang terus berlanjut melahirkan isu mengenai kebijakan penanganan pengungsi di beberapa negara Timur Tengah dan Eropa. Penduduk sipil Suriah harus mengungsi karena di Suriah tidak ada daerah yang disepakati sebagai *safe zone* dan *non-fly zone* oleh pihak yang saling bertikai. Kebanyakan dari pengungsi ini melarikan diri ke Turki karena perlakuan Turki terhadap para pengungsi korban perang dianggap lebih baik dengan kebijakan *open door policy* yang diterapkan oleh Erdogan kepada para pengungsi Suriah. Kebijakan serupa tidak dimiliki negara lain di sekitar Suriah seperti Israel, Kuwait, dan Arab Saudi.

Contoh lain migrasi pengungsi terdapat pula di Asia Tenggara, dalam hal ini di Indonesia dan Australia. Pemerintahan Canberra saat ini terus menghadapi gelombang pencari suaka yang tiba di Australia dengan perahu. UNHCR di Indonesia mengatakan, jumlah pengungsi yang datang ke Indonesia mengalami sedikit peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Kepala Perwakilan UNHCR di Indonesia Thomas Vargas memperkirakan peningkatan jumlah tersebut disebabkan oleh beberapa hal, pertama karena kondisi negara asal pengungsi yang masih mengalami konflik yang berkepanjangan dan belum kelihatan akan berakhir seperti di Myanmar, Afganistan, dan Suriah. Hal lain, mereka melarikan diri dari konflik pelanggaran HAM di negara asal, seperti Afganistan, Myanmar, Somalia, Iran dan Iraq.

Migrasi akibat konflik lainnya adalah migrasi pengungsi Rohingya. Vivian Tan juru bicara Badan PBB untuk pengungsi, UNHCR, memperkirakan jumlah pengungsi Muslim Rohingya melonjak pesat dalam sehari pada tanggal 7 September 2017, dari sekitar 164.000

menjadi 270.000 dan melarikan diri ke Bangladesh sejak maraknya kekerasan di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, setelah para pekerja bantuan menemukan sekelompok besar

pengungsi yang belum terhitung di kawasan perbatasan. Pada bulan Maret 2015, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi mengatakan total pengungsi muslim Rohingya yang berada di Indonesia sebanyak 11.941 orang.

Migrasi: Persoalan Bagi Perbatasan

Perbatasan merupakan area pertama dari suatu negara yang bersinggungan dengan para migran dan merupakan pintu masuk bagi para pendatang. Maka area perbatasan terkait erat dengan persoalan migrasi untuk menyaring para pendatang yang dalam prosesnya banyak menimbulkan persoalan.

Contoh paling baru dari persoalan perbatasan akibat migrasi adalah rencana Presiden Trump membangun tembok perbatasan. Setelah enam hari berkuasa, Presiden Donald Trump mengeluarkan perintah eksekutif kontroversial. Ia memerintahkan pembangunan tembok di perbatasan di sepanjang wilayah perbatasan AS dan Mexico. Pembangunan tembok perbatasan berarti penegasan secara fisik akan batas wilayah kedaulatan suatu negara, batas tegas dimana orang dinyatakan berada di dalam atau diluar suatu negara, batas dimana pergerakan orang dinyatakan sebagai masuk atau keluar dari suatu negara. Dan menjadi persoalan yang menghebohkan ketika itu karena otoritas Amerika Serikat (AS) mencabut hampir 60 ribu visa perjalanan sementara waktu setelah kebijakan Presiden Donald Trump melarang warganegara dari tujuh negara mayoritas muslim masuk ke AS diberlakukan. Isi perintah eksekutif Trump berupa penangguhan penerimaan pengungsi ke AS terhadap pengungsi asal Suriah berlaku selama batas waktu yang belum ditentukan dan melarang warga dari Irak, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Suriah dan Yaman masuk ke AS untuk 90 hari setelahnya meskipun memiliki visa AS yang sah. Kebijakan ini diberlakukan dengan alasan bahwa keamanan nasional menjadi prioritas utama otoritas AS, penangguhan dan larangan itu bertujuan untuk mencegah masuknya kaum militan dan menjauhkan AS dari para teroris.

Seruan Angela Merkel mengenai *border policy* di Eropa berupa anjuran kepada negara-negara Eropa untuk lebih terbuka dan suportif kepada para pengungsi Suriah karena lonjakan arus para pengungsi Suriah ke Eropa yang tidak akan terelakkan menghadapi tantangan dengan adanya rencana Hungaria akan membangun tembok perbatasan sepanjang 1757 kilometer dan menerapkan penolakan terhadap para pengungsi. Tembok ini diniatkan oleh Hungaria sebagai

penghalang bagi para pengungsi yang memakai jalur Serbia-Hungaria sebelum menuju ke negara Eropa yang makmur seperti Jerman dan Perancis. Hungaria bersikeras bahwa mereka berhak menjaga negaranya dari potensi ketidakstabilan domestik.

Menteri Luar Negeri Hungaria menyatakan bahwa keberadaan para pengungsi berdampak buruk bagi perekonomian dan keamanan di negaranya.

Sejak tahun 1980an, aliran migrasi yang terjadi di Turki membuat Turki berubah statusnya dari negara *sending*, menjadi negara *transit* dan negara *receiver* bagi para migran. Setelah Perang Dunia II, aliran migrasi keluar dari Turki diatur berdasarkan migrasi dalam kerangka ekonomi. Sebagai negara penandatangan The 1951 Geneva Convention yang dibuat pada masa Perang Dingin, Turki mempunyai kewajiban untuk menerima para pencari suaka dalam kerangka issue ancaman komunis di Eropa. Status hanya sebagai negara pengirim didasari pada kenyataan bahwa aliran pengungsi dari Blok Timur sangat terbatas.

Yang menjadi persoalan kemudian adalah sejak awal tahun 1980-an arus pengungsi pencari suaka dan para migran yang transit di Turki meningkat secara drastis. Revolusi Iran, gejolak politik di Timur Tengah, era akhir Perang Dingin, peristiwa Perang Teluk, dan lokasi geografinya menjadikan Turki tempat yang strategis sebagai zona transit diantara Benua Eropa, Benua Asia dan Benua Afrika. Tidak adanya kebijakan suaka yang dikeluarkan kecuali seperti apa yang telah tertera di *The 1951 Geneva Convention*, membuat Turki menghadapi krisis yang serius karena ada sejumlah besar pengungsi non-Eropa yang datang untuk mencari suaka. Pada bulan November 1994 Turki mulai menerapkan peraturan baru tentang pencari suaka, tetapi penetapan peraturan yang membuat Turki mengakui perubahan statusnya dari negara *sending* menjadi negara *transit* berimplikasi pada klausul yang tertera di di Konvensi Jenewa mengenai masalah penanganan pencari suaka non-Eropa yang akan menyinggung issue ancaman keamanan Eropa.

Beberapa negara di asia tenggara juga memainkan peran yang penting dalam lalulintas para pencari suaka dan *irregular migrants*, diantaranya Indonesia. Indonesia berfungsi sebagai tempat transit bagi para migran yang ingin mencapai daerah utara Australia. Fungsi Indonesia sebagai titik transit bagi pencari suaka dan *irregular migrants* tersebut yang memilih Australia sebagai tujuan akhir, bukanlah hal baru. Indonesia merupakan wilayah titik transit penting bersamaan dengan Malaysia dan negara Asia Tenggara dan Asia Timur lainnya bagi gelombang orang-orang Indo Cina (manusia perahu) pada tahun 1970-an, tahun 1980-an dan tahun 1990-an (Lander, 1996; Missbach, 2013).

Bagi para para pencari suaka masa kini, awalnya dari negara asal mereka terbang ke Malaysia dengan ijin visa wisatawan, sejak Malaysia menawarkan *visa on arrival* untuk warga negara lebih dari 60 negara terutama negara yang memiliki populasi Islam sebagai upaya untuk memfasilitasi kegiatan pariwisata mereka (Missbach & Sinanu, 2011). Dari Malaysia mereka ke Indonesia untuk kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan kapal ke Australia.

Seringkali para migran dan pencari suaka ini tidak dapat mencapai negara tujuan akhir mereka secara langsung karena tidak memiliki dokumentasi yang memenuhi syarat. Apalagi ke suatu negara seperti Australia yang termasuk dalam *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD). Negara dengan kombinasi antara benua yang letaknya terisolasi, mempunyai birokrasi dan lembaga imigrasi yang sangat terkontrol, maju dan modern serta teknologi pengawasan yang membuat negara ini dapat mengontrol perbatasannya dengan sangat efektif.

Masalah pengungsi yang datang ke Indonesia merupakan masalah pelik diantara pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia. Pada bulan Juli 2014, pemerintah Australia mengumumkan tidak akan menerima pencari suaka yang mendaftarkan diri melalui UNHCR. Berbagai upaya lain yang diberlakukan untuk para pencari suaka adalah “Operasi Perbatasan Kedaulatan” yang mencegah berbagai potensi masuknya para pencari suaka ke Australia. Hubungan Indonesia dan Australia sempat tegang ketika Tony Abbot membuat Indonesia kesal dengan kebijakannya mengirimkan kembali kapal Indonesia yang membawa pencari suaka. Angkatan Laut Australia melakukan patroli di perbatasan untuk mencegah masuknya perahu para pengungsi dan mendorong mereka kembali ke perairan Indonesia. Kebijakan tersebut, walaupun di dalam negeri Australia populer, namun membuat Indonesia marah dan menganggapnya sebagai pelanggaran kedaulatan.

Dari paparan diatas kita melihat, perjanjian migrasi Turki berkaitan *The 1951 Geneva Convention* dan persoalan *irregular migrant* antara Indonesia dan Australia dalam hal ini menyangkut perjanjian perbatasan nampaknya memang harus direvisi dan ditelaah kembali. Khusus bagi Indonesia sebagai negara *Irregular Maritime Arrivals* (IMAs), maka policy dan diplomasi perbatasan laut juga menjadi hal penting yang harus diperhatikan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Haris, 2003, *Kucuran Keringat dan Derap Pembangunan (Jejak Migran dalam Pembangunan Daerah)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Anderson and O'Dowd Anderson, James and O'Dowd, Liam. 1999, *Borders, Border Regions and Territoriality: Contradictory Meanings, Changing Significance. Regional Studies*, 33: 593–604

Asosiasi Hubungan Internasional Indonesia, 2009, *Lanskap Baru Politik Internasional, Proceeding Konvensi Nasional I Asosiasi Hubungan Internasional Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dalam David Held and Anthony Mc Grew, David Goldbatt and Jonathan Perraton, 1999, *Global Transformation : Politics, Economics and Culture*, Stanford University Press, California

Dino Patti Djalal, 1996 *The Geopolitics of Indonesia's Maritime Territorial Policy*, CSIS, Jakarta

Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar negeri Republik Indonesia, 2001, *Kerjasama ASEAN dalam Menanggulangi Kejahatan Lintas Negara*

Florianus Nahak, Ir, MSi, 2008, *Pengelolaan Wilayah Perbatasan Indonesia-Timor Leste (Pengalaman PemKab Belu)*, Makalah, Yogyakarta, 18 November 2008

Gatra, Edisi Khusus: *Di Laut Kita (Belum) Jaya*, No. 08 Tahun XII, Januari 2006

Hasjim Djalal, 1995, *Indonesia and The Law of The Sea*, CSIS, Jakarta

I Made Andi Arsana, 2007, *Batas Maritim Antar Negara Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

John Rennie Short, 1993, *An Introduction to Political Geography*, Second Edition, Routledge, London and New York

John W. Creswell, 1994, *Research Design: Qualitatif and Quantitative Approaches*,

California: SAGE

Ludiro Madu dkk, 2010, *Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan*, Graha Ilmu, Jakarta

Marie MCauliffe dan Khalid Koser, 2017, *A Long Way to Go*, ANU Press

Missbach, A., 2013, Waiting on the islands of „stuckedness“: Managing asylum seekers in island detention camps in Indonesia from the late 1970s to the Early 2000s. *ASEAS—Austrian Journal of South-East Asian Studies*, 6(2).

Missbach, A., & Sinanu, F. 2011. „The scum of the earth?“ Foreign people smugglers and their local counterparts in Indonesia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 30(4).

Mustafa Abubakar, 2006, *Menata Pulau-pulau Kecil Perbatasan Belajar dari Kasus Sipadan, Ligitan dan Sebatik*, KOMPAS, cetakan 1

O.C. Kaligis & Associates, 2003, *Sengketa Sipadan-Ligitan Mengapa Kita Kalah*, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta

Pengaturan Dalam Bidang Keamanan di Daerah-daerah Perbatasan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia Pasal I ayat e, Yogyakarta, 3 Desember 1984.

Riwanto Tirtosudarmo, 2015, *On the Politics of Migration: Indonesia and Beyond*, LIPI Press, Jakarta

Robert Jackson and Georg Sorensen, 1999, *Introduction to International Relations*, Oxford University Press, New York

Rohmad Supriyadi, MSi, 2008, *Strategi dan Model Pengelolaan Perbatasan*, Makalah, Yogyakarta

Stake, R., 2010, *Qualitative research, studying how things work*. New York-London: The Guilford Press

Stephen B Jones, 1945 *A Handbook for Statesmen, Treaty Editors and Boundary Commissioners*

S. Nasution, 1988, *Metode Penelitian Naturalistik – Kualitatif*, Bandung: transito

Tempo, 2005, Edisi Khusus 60 Tahun Kemerdekaan: *Merawat Indonesia*, No. 25/XXXIV/15-21 Agustus 2005

Tulus Warsito, DR, 2008, *Diplomasi Perbatasan*, Monograf, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Wahyuni Kartikasari, 1997, *Hubungan Kerjasama Perbatasan Indonesia-Malaysia Studi Kasus Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak*, Skripsi Jurusan Hubungan Internasional FISIPOL Universitas Gadjahmada

Arie Setyaningrum Pamungkas, 2016, *Produksi Ruang dan Revolusi Kaum Urban Menurut*

Henri Lefebvre, Jurnal Indoprogress LKIP edisi 31,
<https://indoprogress.com/2016/01/produksi-ruang-dan-revolusi-kaum-urban-menurut-henri-lefebvre/>

Denis Jallat, Sébastien Stumpp & Julien Fuchs, 2018, *Playing with the Border: Alsatian Sports Societies and Alsace's Problematic Return to France after the First World War*, Journal of Borderlands Studies, Published online: 18 July 2018

Global Governance, Vol. 6, No. 3 (July–Sept. 2000)

Hakki Fajriando, 2006, *Republik Federal Jerman (FRG) Jerman: Dari Bonn ke Berlin*, Jurnal Kajian Wilayah Eropa, Journal of European Studies, Volume II - No.2- 2006

International Journal of Refugee Law, Volume 30, Issue 1, 11 July 2018,
<https://doi.org.ezproxy.ugm.ac.id/10.1093/ijrl/eeey019>

Jurnal Ekonomi dan Pembangunan (LIPI), ISSN 0854-526X VOL.XIX(1), 2011

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Mengelola Perbatasan Negara, Volume 16 No 2
November 2012

*Journal of Borderlands Studies, Playing with the Border: Alsatian Sports Societies and
Alsace's Problematic Return to France after the First World War,*
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08865655.2018.1495096>

Journal of refugee studies, History of Refugee Protection, Oxford academic,
<https://academic.oup.com/jrs>

Wahyuni Kartikasari, 2012, *Mempelajari Wilayah Perbatasan Sebagai Ruang
Bersama*, Jurnal Hubungan Internasional, Vol 5 No 1 April 2012

BBC News

<http://www.bbc.com/news/world-asia>

BBC News Indonesia

<http://www.bbc.com/indonesia/dunia>

Detik News

<https://news.detik.com/internasional/d-3413610/dampak-kebijakan-imigrasi-trump-as-cabut-60-ribu-visa>

Info Migrant : By Wesley Dockery

<http://www.infomigrants.net/en/post/1837/how-does-the-united-nations-define-a-refugee>

SUAKA : Indonesian Civil Society Network for Refugee Rights Protection

<https://suaka.or.id/public-awareness/refugees-and-asylum-seekers-in-indonesia/>

The Migration Observatory at The University of Oxford

<http://migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/briefings/irregular-migration-in-the-uk-definitions-pathways-and-scale/>

USA for UNHCR, The UN Refugee Agency, <https://www.unrefugees.org/refugee-facts/what-is-a-refugee/>

Lander, B. (1996, 1 June). Indonesia: Far from paradise. *Refugees Magazine*, 104. Retrieved from www.unhcr.org/publications/refugeemag/3b558c2a4/refugees-magazine-issue-104-unhcrs-world-indonesia-far-paradise.html.

Route of Narcotics Smuggling in Southeast Asia Region (Case Study in Border of Riau Province)

Rendi Prayuda, S.IP, M.Si, Fitriisia Munir, S.IP, M.Phill
Universitas Islam Riau
rendiprayuda@soc.uir.ac.id; fitrisiamunir@soc.uir.ac.id

ABSTRACT

This paper describes the route of narcotics smuggling in Southeast Asia region especially in border of Riau Province. Southeast Asia are one of part region in the world that was have land area of 4,4 million square kilometers. Based on population data by ASEAN that the populations of ASEAN has increased from 563.7 million in 2006 to 631.8 million in 2015 at a rate of 1,14% per annum. The population growth in Southeast Asia in another side have give impact for increased used of drugs. Golden triangle are one of territory in border of Myanmar, Laos and Thailand that have a land for opium production and be a core for narcotics smuggling. Narcotics smuggling in Southeast Asia are sent to ASEAN member and Indonesia are have been a purpose states. Riau Province are one of gates for narcotics smuggling from another states in Southeast Asia.

This paper use of qualitative methods with descriptive as a technic of the research. Writer collects data from observation, interview, books, journal, mass media and websites to analyze the route of narcotics smuggling in Southeast Asia region especially in border of Riau Province. The theories applied in this paper are realism approach with international security concept, human securities, and narcotics smuggling.

This paper have some purposes are to explain the kinds and productions of drugs in Southeast Asia, the the route of narcotics smuggling in Southeast Asia region and the route of narcotics smuggling from sthe states in Southeast Asia region to border of Riau Province.

Keyword: *narcotics, smuggling and southeast asia.*

Latar Belakang

Dinamika dan perubahan polarisasi interaksi antar negara dalam arena politik internasional tentu saja berpengaruh dalam perkembangan pemikiran para ahli hubungan internasional dan *decision maker* negara-negara mengenai hubungan antar negara baik secara bilateral, regional ataupun multilateral. Mengemukanya isu-isu keamanan non tradisional dalam perspektif keamanan internasional pasca Perang Dingin merupakan sebuah fenomena besar dalam sejarah hidup sosial manusia dunia, terutama terkait masalah kejahatan transnasional. Pada tahun 1995, lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengidentifikasi adanya berbagai macam jenis dan bentuk dari aktivitas kejahatan transnasional, antara lain pencucian uang, aktifitas terorisme, pencurian benda-benda seni dan budaya, pencurian kekayaan intelektual, peredaran gelap senjata, pembajakan laut, penipuan asuransi, kejahatan

komputer, kejahatan lingkungan, perdagangan manusia, perdagangan bagian tubuh manusia, perdagangan narkoba dan obat-obat terlarang (narkoba), kebangkrutan atas penipuan, infiltrasi bisnis yang legal, korupsi dan suap pejabat publik, serta pelanggaran lainnya yang dilakukan terorganisir oleh kelompok kriminal (9th United Nations Congress on The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders, 1995)

Fenomena globalisasi yang merasuk dalam kehidupan masyarakat antar negara saat ini baik dari sisi kemajuan teknologi, informasi, transportasi, serta inovasi-inovasi baru lainnya telah menciptakan *borderless* dan mengakibatkan pengaburan kedaulatan negara sehingga hal ini berdampak kepada akselerasi dan infiltrasi para pelaku kejahatan internasional untuk melancarkan aksi demi keuntungan pribadi dan atau kelompoknya semata. Pergeseran isu keamanan internasional dari isu yang fokus pada keamanan negara (*State Centric*) menuju keamanan manusia (*human security*), salah satunya dipengaruhi oleh perkembangan arus globalisasi di dunia internasional. Seiring dengan berkembangnya arus teknologi dan informasi, maka dunia berubah sangat cepat sehingga memunculkan sebuah tatanan kehidupan yang baru dalam berbagai dimensi yang juga memunculkan implikasi kompleks yaitu saling ketergantungan dan terintegrasi.

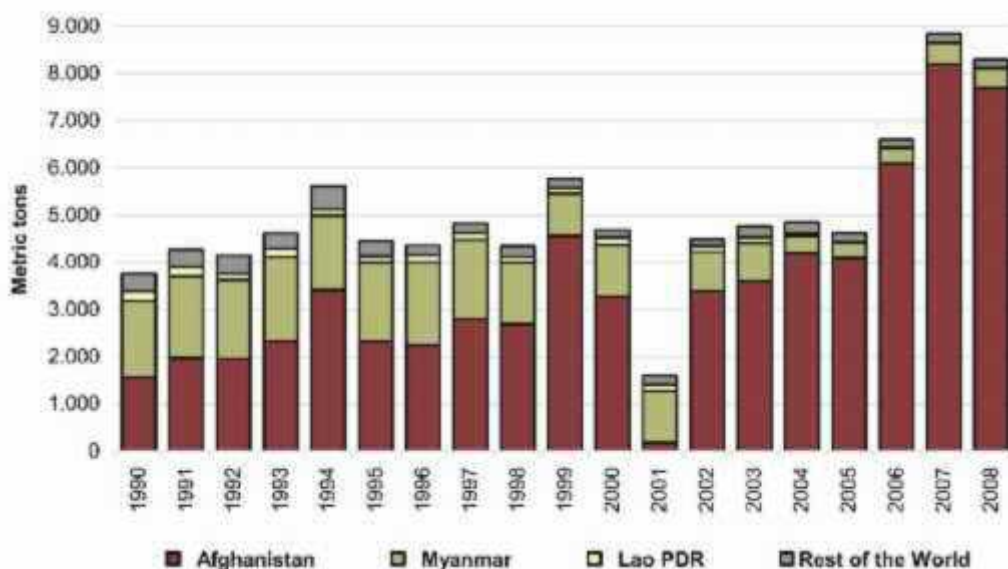
Mobilitas yang tinggi antar negara ini mengakibatkan memudarnya batas negara dan kewenangan negara sehingga hal ini berdampak pada berbagai permasalahan baru salah satunya peluang kejahatan lintas negara atau yang biasa disebut kejahatan transnasional. Salah satu wujud dari kejahatan transnasional yang paling krusial karena menyangkut masa depan generasi suatu bangsa, terutama kalangan generasi muda dunia ini adalah kejahatan di bidang penyalahgunaan narkoba. Peredaran narkoba dengan mudah dapat menembus batas-batas negara di dunia melalui jaringan manajemen yang rapi dan teknologi yang canggih (Broome, 2000). Sebanyak 49% dari peredaran narkoba dunia saat ini diserap oleh pasar Asia Tenggara yang diperoleh dari negara-negara pemasok seperti China, Afghanistan, Iran dan Belanda. (ma'sum, 1987)

Dalam perkembangan jaringan peredaran narkoba internasional ini, maka wilayah Asia Tenggara juga dipergunakan sebagai jalur perdagangan narkoba tingkat internasional. Persoalan produksi dan peredaran gelap narkoba skala internasional menurut data dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia terdiri atas tiga bentuk kawasan. Kawasan yang merupakan salah satu dari tiga kawasan penghasil narkoba terbesar di dunia bersama dengan wilayah Afganistan, Pakistan dan Iran yang sering disebut *Golden Crescent* serta wilayah

Kolombia, Peru dan Bolivia yang sering disebut *Golden Peacock* serta di kawasan Asia Tenggara sendiri yang disebut dengan “Segitiga Emas” atau *Golden Triangle*. (BNN, 2014).

Keberadaan kawasan *Golden Triangle* yang terletak di perbatasan Thailand, Myanmar, dan Laos menghasilkan 60% produksi opium dan heroin di dunia. Produksi narkoba di kawasan tersebut termasuk dalam kategori narkotika dan *potential addictive* yang terbuat dari jenis-jenis tumbuhan *poppy* dan *papaver somniferum* yang menghasilkan heroin. Wilayah Segi Tiga Emas ini memberikan sumbangan pada industri heroin yang bernilai US\$ 160 Milyar pertahun (Othman, 2004). Pertumbuhan lahan poppy di kawasan segitiga emas ini dalam perspektif budaya menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat terutama di Myanmar. Sejak tahun 1997 Pemerintah Myanmar mulai menerapkan kebijakan pelarangan penanaman perkebunan poppy di Myanmar akan tetapi hal ini mendapatkan reaksi penolakan dan protes dari berbagai masyarakat dikarenakan bagi masyarakat Myanmar sendiri sebagian besar menggantungkan pendapatannya dari bidang pertanian dan perkebunan *poppy* (Tom& Martin, 2009). Selain itu juga bagi Pemerintah Myanmar sendiri perkebunan poppy ini menjadi sumber devisa negara dengan jumlah produksi opium sekitar 470 ton sekitar 5% dari produksi opium global dan produksi opium di Afganistan sekitar 8.200 ton atau sekitar 93% dari produksi global opium di dunia internasional (Tom& Martin, 2009). Berikut ini merupakan data perkembangan pertumbuhan opium di kawasan *Golden Triangle* menurut laporan UNODC, yaitu:

Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan Opium di kawasan Segitiga Emas (Laos, Myanmar dan Thailand)



Sumber: Opium cultivation in the Golden Triangle (1998-2007) – UNODC Report.

Berdasarkan grafik gambar diatas, maka sejak tahun 1997 sampai dengan 200 pertumbuhan opium di kawasan segitiga emas antara Laos, Myanmar dan Thailand semakin meningkat mulai dari 4.000 ton pada tahun 1990 dan sampai pada 90.000 metric ton pada tahun 2008. Oleh karena itu, beberapa negara di kawasan Asia Tenggara seperti Myanmar, Laos dan Thailand dikenal sebagai negara produsen dan pengolah bahan narkotika seperti opium, kokain dan heroin. Negara tujuan produksi dari tumbuhan opium di kawasan segitiga emas ini awalnya adalah Amerika Serikat, Eropa dan Australia yang transit di Indonesia. Akan tetapi dalam perkembangannya Indonesia tidak hanya menjadi salah satu negara transit dari narkotika menuju Australia saja melainkan menjadi negara tujuan (*Market brief*) dari narkotika.

Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki ± 17.000 pulau dengan garis pantai sepanjang ± 95.181 Km. Letak geografis yang sangat strategis dan memiliki perbatasan darat, perbatasan perairan atau pantai yang cukup panjang menjadikan Indonesia sebagai daerah rawan kegiatan penyelundupan barang ilegal. Selain itu, jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 270 juta jiwa juga mengakibatkan Indonesia adalah pangsa pasar internasional. Meluasnya perdagangan gelap narkotika di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal pertama karena adanya permintaan dari konsumen yang membutuhkan pasokan narkotika import. Kedua Indonesia dianggap lahan yang bagus untuk perdagangan narkoba dengan kondisi geografis Indonesia yang sangat strategis, bentuk negara yang sebagian besar adalah kepulauan terpisah dan terdapat 10 titik rawan pintu masuk yang memudahkan para pengedar untuk memasukkan narkoba ke Indonesia.

Menurut data dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri), jumlah kasus narkotika dan obat-obatan terlarang di Indonesia terus meningkat, sejak tahun 2010 sebanyak 26.614 kasus narkotika, dan meningkat menjadi 26.500 kasus pada tahun 2011. Pada tahun 2012, kenaikan jumlah kasus narkotika dan obat-obatan terlarang tidak terlalu signifikan dari tahun 2011, hanya sebesar 0,23 persen atau meningkat sebesar 61 kasus menjadi 26.561 kasus. Pada tahun 2013, jumlah kasus narkotika dan obat-obatan terlarang di Indonesia kembali meningkat, kali ini dengan jumlah kasus yang signifikan yakni 32.470 kasus pada tahun 2013 dan sampai pada tahun 2015 kasus yang terjadi di Indonesia sekitar 44.321 kasus (ASEAN...)

Berdasarkan data dari laporan BNN, maka Indonesia merupakan negara dengan peringkat tertinggi dalam persebaran narkotika di wilayah kawasan Asia Tenggara. Menurut data Mabes Polri bahwa beberapa kota di Indonesia seperti Bali, Jakarta, Medan, Surabaya,

Batam dan Pekanbaru merupakan kota dengan tingkat peredaran narkoba yang cukup tinggi. Salah satu wilayah Indonesia yang merupakan pintu gerbang masuknya narkoba dari Asia Tenggara melalui jalur laut adalah wilayah Provinsi Riau. Hal ini dikarenakan sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura maka Provinsi Riau memiliki mobilitas yang cukup tinggi dalam arus lalu lintas barang dan orang.

Letak geografis wilayah Provinsi Riau yang strategis dan berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan Singapura mengakibatkan jaringan kejahatan transnasional menjadikan Wilayah Provinsi Riau sebagai daerah transit narkoba dari Malaysia terutama dari jenis sabu-sabu yang dikirim secara ilegal atau tidak resmi melalui jalur pelabuhan tidak resmi di wilayah Provinsi Riau. Beberapa kerangka kerjasama yang telah dilakukan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara melalui forum ASEAN masih belum mampu untuk meminimalisir penyeludupan narkoba di kawasan Asia Tenggara terutama narkoba yang diseludupkan ke Indonesia melalui jalur masuk Provinsi Riau. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tulisan ini fokus pada telaah terhadap bagaimana dinamika kejahatan transnasional terkait jalur penyelundupan narkoba di kawasan Asia Tenggara khususnya di wilayah Provinsi Riau?

Metode

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan kualitatif. Akan tetapi dalam penelitian ini juga menggunakan beberapa data kuantitatif seperti data statistik tabel, grafik dan diagram kuantitatif mengenai perkembangan skala angka sebuah fenomena empirik. Penelitian ini adalah penelitian studi kasus (*study case*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data dalam tulisan ini berasal dari penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*).

Hasil

Perdagangan narkoba diidentifikasi sebagai aktivitas kejahatan transnasional yang paling memberikan keuntungan uang yang besar bagi pelaku kejahatan dan dibutuhkan penanggulangan yang masif. Produksi dan perdagangan narkoba sangat mengancam negara dan dibutuhkan keseriusan negara untuk menghentikan peredaran narkoba ini melalui perjanjian ekstradisi dan perjanjian lainnya dengan cara kebijakan pencegahan dan program pendidikan sejak dini mengenai bahaya narkoba terhadap negara. Tipe kejahatan transnasional narkoba bahwa mafia hanya akan beraktivitas di pasar gelap dan caraantisipasi negara adalah dengan meningkatkan respon terhadap teknologi komunikasi, transportasi, adaptasi pasar dari investasi internasional, internasionalisasi keuangan dan perbankan, internasionalisasi

manufaktur dan peningkatan pengawasan terhadap perdagangan ilegal di wilayah perbatasan negara.

Penelitian yang dilakukan Vignette mengenai *International drugs trafficking, organized crime, and terrorism in Afghanistan* (Mccarthy, 2001) Menemukan bahwa Perkembangan kejahatan transnasional narkoba di Afghanistan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor geografi dan ekonomis. Secara geografis Afghanistan diapit oleh dua lembah yang dikenal dengan Wakhan Corridor menghubungkan dengan Cina dan the Pamir Knot menghubungkan dengan Himalaya India. Secara ekonomis Afghanistan dikenal sebagai negara potensi pertambangan dan penghasil tumbuhan poppy di yang merupakan jenis tumbuhan sumber dari opium yang jika diproses menjadi heroin dan dilegalkan oleh Pemerintah. Tumbuhan ini diproduksi secara massal di Provinsi Helmand dan merupakan produksi opium terbesar melampaui produksi opium di Burma (Myanmar).

Istilah '*transnational crime*' diperkenalkan untuk menjelaskan kaitan kompleks yang ada antara *organized crime, white-collar crime* dan korupsi yang merupakan masalah serius yang dimunculkan akibat "kejahatan sebagai bisnis" . Pengaturan kegiatan kejahatan melangkaui perbatasan negara dan berdampak pada pelanggaran hukum berbagai negara, telah menjadi karakteristik yang paling membahayakan dari kelompok kejahatan yang bergiat di tingkatan internasional. Dalam perkembangannya, bentuk kejahatan yang diistilahkan tersebut, telah seringkali dikaitkan dengan konteks globalisasi (yang merupakan representasi dari kondisi sosial, ekonomi dan kultural sekarang ini). Oleh karenanya, perdebatan yang sering terjadi terpusatkan pada kesempatan melakukan berbagai tindak kejahatan atau pun tindakan yang sah yang diberikan oleh dunia yang berkembang tanpa batas, kepada beragam pelaku yang umumnya didefinisikan sebagai *transnational organized groups, transnational organizations, dan transnational networks*.

Pasca berakhirnya perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet mengakibatkan terjadinya perubahan dalam polarisasi ilmu Hubungan Internasional dari yang awalnya bersifat bipolar ketat kearah multipolar dengan yang awalnya fokus pada isu keamanan negara berubah pada konsep keamanan manusia. Perkembangan ancaman terhadap kemanusiaan ini yang bersifat antar negara (transnasionalisasi isu) maka diperlukan kerjasama dan koordinasi antar negara dalam mengatasi permasalahan ancaman tersebut.

Salah satu bentuk ancaman yang nyata hari ini terhadap keamanan manusia adalah perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkoba. Prevalensi penyalahgunaan narkoba di dunia sejak tahun 2006 hingga 2018 mengalami peningkatan. Walaupun kurva terlihat landai

namun secara jumlah totalnya cukup tinggi. Besaran prevalensi penyalahgunaan di dunia diestimasi sebesar 4,9% atau 208 juta pengguna di tahun 2006 kemudian mengalami sedikit penurunan pada tahun 2008 dan 2009 menjadi 4,6% dan 4,8%. Namun kemudian meningkat kembali menjadi 5,2% di tahun 2011 dan tetap stabil hingga 2013. Secara absolut, diperkirakan ada sekitar 167 hingga 315 juta orang penyalahguna dari populasi penduduk dunia yang berumur 15-64 tahun yang menggunakan narkoba minimal sekali dalam setahun sejak tahun 2013 (UNODC, 2015).

Dalam lima tahun terakhir terindikasi tren jenis ekstasi menurun sekitar 15% di berbagai negara, sementara itu penggunaan Amphetamine dilaporkan stabil. Namun, ada yang meningkat drastis (158%) dalam lima tahun terakhir yaitu konsumsi jenis metha amphetamine. Selain itu, beberapa jenis narkoba sintesis muncul dan berkembang dalam perdagangan narkoba, bahkan semakin banyak negara yang melaporkan setiap tahunnya. Pada tahun 2014, jenis narkoba baru dilaporkan di lebih dari 90 negara, jumlah negara yang melaporkan narkoba jenis baru meningkat sekitar 1,5 kali dibanding tahun 2009. Narkoba jenis sintesis ini menjadi komoditas "*legal highs*" dan menggantikan narkoba jenis stimulan seperti kokain dan *ecstasy*. Narkoba sintesis ini dijual melalui internet dan secara online serta memiliki toko-toko khusus. Penggunaan ganja juga meningkat di sebagian besar negara. Penyalahgunaan ganja merupakan kelompok penyalahgunaan terbanyak yang memerlukan pengobatan khusus bagi pengguna. Penggunaan ATS juga meningkat secara global. Ini mungkin disebabkan karena ATS digunakan juga sebagai obat mengatasi gangguan penggunaan opiate. (UNODC, 2015)

Pasca terjadinya Perang Dingin, maka pada tahun 1990 kawasan Asia Tenggara khususnya negara Thailand dijadikan rute utama perdagangan opium dari Myanmar dan heroin yang juga masuk ke Thailand melalui perbatasan Laos. Melonjaknya produksi ilegal methamphetamine Myanmar di tahun 1990, diikuti pula oleh semakin deras nya arus peredaran narkotika ilegal di wilayah Thailand yang berasal dari Myanmar. Sampai dengan saat ini, Thailand merupakan negara di kawasan Asia Tenggara dengan peredaran narkotika yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Hampir semua jenis narkotika dijual dan diperdagangkan di Thailand secara ilegal.

Pasca perang dingin, kawasan Asia Tenggara khususnya Thailand dijadikan rute utama perdagangan opium dari Myanmar dan heroin yang juga masuk ke Thailand melalui perbatasan Laos. Melonjaknya produksi ilegal narkoba Myanmar di tahun 1990-an, diikuti pula oleh semakin deras nya arus peredaran narkotika di wilayah Thailand dari Myanmar. Di Laos tempat budidaya opium banyak dilakukan di bagian utara negara ini, seperti propinsi Phongsaly, dan

bagian barat, propinsi Xieng Khouang, khususnya di distrik Nonghet dan Xam Nue. Sedangkan di Myanmar lahan budidaya opium banyak ditemukan di dua distrik yang berada di provinsi Shan, khususnya distrik Wa dan distrik Kokang yang terletak di sepanjang perbatasan antara Myanmar dengan Cina, bagi produksi narkoba di perbatasan Myanmar dan China mempermudah pemasaran dan penyebaran dikawan ini. Sedangkan di Thailand wilayah utama pembudidayaan opium terletak pada pegunungan Doi Tung dan Doi Mae Salong di Chiang Rai. Ladang opium dalam skala besar juga ditemukan di beberapa desa sebelah barat dan barat daya kota Chiang Mai. Selain di tiga negara penanam Opium juga di temukan di perbatasan Vietnam namun penanaman masih dalam skala terbatas dan kecil saja. Berikut ini merupakan data tabel jenis-jenis opium yang ditemukan di wilayah Asia Tenggara, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1 Tren Jenis Narkoba di Asia Tenggara

Drug type	Trend in abuse		
	Increase	Stable	Decrease
Methamphetamine pills	Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Viet Nam		Thailand
Methamphetamine crystal	Cambodia, Indonesia**, Thailand	Philippines**	Brunei, Malaysia, Singapore
Ecstasy	Brunei, Indonesia**, Viet Nam	Cambodia	Malaysia, Singapore, Thailand
Heroin	Cambodia, Indonesia**, Lao PDR, Singapore, Viet Nam		Malaysia, Myanmar, Thailand
Opium	Singapore		Cambodia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Thailand, Viet Nam
Cocaine		Thailand	
Cannabis	Brunei, Philippines**, Singapore, Thailand (herb)	Cambodia, Lao PDR	Malaysia, Thailand (resin)
Ketamine			Singapore, Thailand
Barbiturates	Thailand		
Benzodiazepines	Thailand		Brunei, Myanmar, Singapore
Inhalants	Thailand	Cambodia	Malaysia

Sumber: *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Tahun 2016.*

Berdasarkan data-data diatas setidaknya dapat memberi gambaran bahwa tingkat bahaya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya di kawasan Asia Tenggara sudah pada tahap urgensi tinggi. Setiap negara ASEAN memiliki jenis narkoba tertentu disertai dengan jumlah tertentu. Mulai dari jenis narkoba yang masih berbahan mentah seperti opium mentah hingga jenis narkoba yang sudah dalam bentuk olahan seperti heroin maupun ATS (*amphetamine*) tersebar merata di masing-masing negara. Sejak tahun 2006 ini jenis-jenis narkoba semakin banyak hingga mengakibatkan tren nasional di setiap negara berubah seiring dengan tren konsumen. Berikut ini merupakan alur penyelundupan narkotika di kawasan Asia Tenggara, yaitu:

Gambar 1.2 Jalur Penyelundupan Narkoba Melalui Perbatasan Indonesia



Sumber: Media Indonesia (Utami, 2016)

Gambar diatas menggambarkan proses masuknya narkoba dari negara Malaysia kemudian ke Indonesia melalui perbatasan baik itu perbatasan laut maupun perbatasan darat Indonesia perairan tanjung balaim Batam dan terus tersebar melalui jalur darat, laut dan udara disebarkan ke kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya dll, di wilayah tengah dan timur narkoba masuk dari perairan nunukan dan tawao di Kalimantan dan juga tersebar melalui jalur darat, udara dan laut menuju kota-kota besar di daerah tengah dan timur Indonesia.

Diskusi

Secara geografis, Provinsi Riau terletak diantara 1°15 lintang selatan dan 2°25 lintang utara. Sebelum pemekaran, Provinsi ini terdiri dari daerah daratan dan lautan/perairan, dengan luas lebih kurang 329.867,61 Km². Adapun posisi wilayah merentang dari pantai timur tengah Sumatera sampai pesisir barat Kalimantan. Luas daratan 235.306 Km² atau sekitar 71,33 persen dan daerah lautan Riau sekitar 94.561,61 Km² atau 28,67 persen. Secara geografis Provinsi Riau memiliki posisi yang sangat strategis, yaitu berbatasan langsung dengan Malaysia, Singapura dan Thailand; berhadapan langsung dengan Selat Malaka yang merupakan jalur perlintasan perdagangan dunia. Ditambah lagi dikawasan regional Sumatera Provinsi Riau berada di bagian tengah Pulau Sumatera pada lintasan pergerakan antar wilayah yang memberikan peluang untuk membangun akses yang tinggi bagi lalu-lintas barang, orang,

informasi dan modal. Provinsi Riau secara geografis berbatasan langsung dengan beberapa wilayah, yaitu:

- Sebelah Utara : Selat Malaka (berbatasan Malaysia)
- Sebelah Selatan : Provinsi Jambi dan Sumatera Barat
- Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau
- Sebelah Barat : Provinsi Sumatera Utara

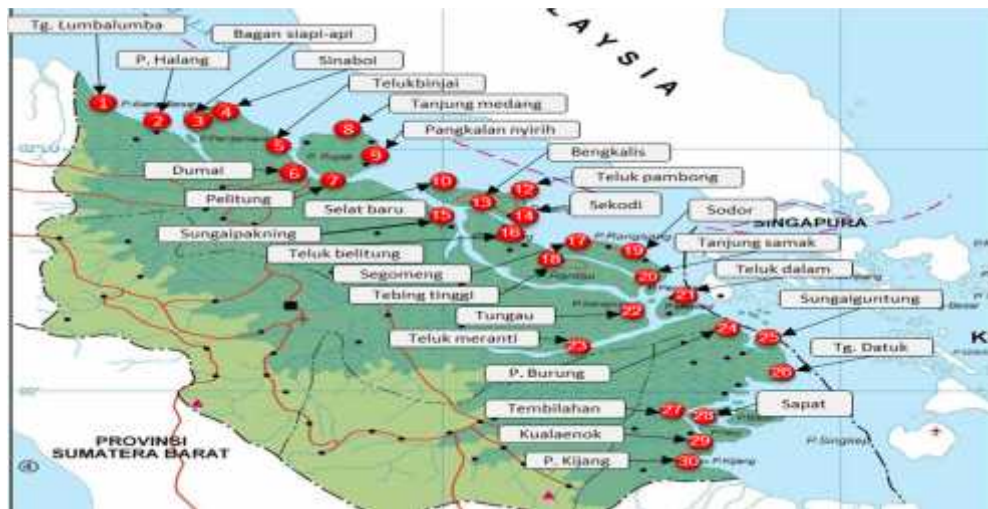
Provinsi Riau memiliki panjang garis pantai yang membentang dari wilayah Panipahan Kabupaten Rokan Hilir sampai ke wilayah Pulau Kijang Kabupaten Indragiri Hilir sekitar sepanjang 370 Mil atau setara dengan 685,24 km dengan jumlah pulau di Provinsi Riau sebanyak 139 Pulau dengan rincian terdapat Pulau bernama 73 pulau dan pulau tanpa nama 66 pulau. Selain itu Provinsi Riau juga memiliki beberapa wilayah atau Pulau dengan status pulau terdepan, yaitu:

1. Pulau Jemur berjarak dengan wilayah Batu Kuching sekitar 45 mil (83,34 km) Malaysia
2. Pulau Tokong berbatasan dengan Batu Kuching Malaysia
3. Pulau Sinaboi berbatasan dengan Port Dickson Malaysia
4. Tanjung Medang berbatasan dengan Tanjung Rachado Malaysia
5. Tanjung Parit berbatasan dengan Tanjung Tohor Malaysia
6. Tanjung Kedabu berbatasan dengan Pulau Pisang

Dengan posisi tersebut, maka Provinsi Riau merupakan salah satu gerbang perdagangan internasional terutama dari Malaysia dan Singapura. Beberapa wilayah Provinsi Riau yang merupakan gerbang masuk barang-barang dari Malaysia adalah Pelabuhan Tanjung Buton, Pelabuhan Selat Panjang, Pelabuhan Pulau Rumat Bengkalis, Pelabuhan Dumai, Pelabuhan Sinaboy Rokan Hilir dan Pelabuhan Bagan Siapi-api.

Pesatnya hubungan perdagangan antara Indonesia terutama Provinsi Riau dengan Malaysia satu sisi memberikan keuntungan secara ekonomi bagi masyarakat. Akan tetapi disisi lain hubungan perdagangan kedua wilayah ini kerap juga disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan kegiatan transaksi penyeludupan narkoba dari wilayah Malaysia ke wilayah Indonesia melalui Provinsi Riau sebagai jalur transit dari penyeludupan narkoba tersebut. Berikut ini merupakan jalur pintu masuk narkoba dari Malaysia melalui pelabuhan di sepanjang pesisir pantai di wilayah Provinsi Riau, yaitu:

Gambar 1.3 Peta Jalur Masuk Wilayah Provinsi Riau



Sumber: Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Provinsi Riau. Tahun 2016.

Berdasarkan jalur masuk wilayah Provinsi Riau diatas, maka terdapat beberapa lima Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang berada di wilayah pesisir Provinsi Riau seperti Kabupaten Rokan Hilir, Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Indragiri Hilir. Penyeludupan narkoba dari kawasan Asia Tenggara melalui jalur laut diindikasi masuk ke Indonesia melalui jalur pelabuhan laut disepanjang pesisir wilayah Provinsi Riau. Disamping itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 57 Tahun 1983 Provinsi Riau memiliki wilayah zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 379.000 Km². Berikut ini merupakan gambaran umum tentang wilayah peta Provinsi Riau, yaitu:

Gambar 1.4 Peta Wilayah Provinsi Riau



Sumber: Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau. Tahun 2017.

Berdasarkan peta tersebut maka dapat dijelaskan bahwa Provinsi Riau berbatasan langsung dibagian utara dengan Selat Malaka dan hanya berjarak 83 KM dari Batu Kching Malaysia. Di daerah perairan terdapat 3.214 pulau besar dan kecil yang tersebar secara strategis. Karena sebahagian berada di Selat malaka dan laut Cina selatan yang merupakan salah satu jalur lintas laut/pelayaran utama dalam dunia perdagangan global. Wilayah geografis Riau ini berbatasan langsung dengan negara-negara Asia Tenggara yaitu Malaysia – Singapura – Thailand – Kamboja, Myanmar dan Vietnam. Secara geografis Provinsi Riau memiliki posisi yang sangat strategis, yaitu berbatasan langsung dengan Malaysia, Singapura dan Thailand; berhadapan langsung dengan Selat Malaka yang merupakan jalur perlintasan perdagangan dunia. Ditambah lagi dikawasan regional Sumatera Provinsi Riau berada di bagian tengah Pulau Sumatera pada lintasan pergerakan antar wilayah yang memberikan peluang untuk membangun akses yang tinggi bagi lalu-lintas barang, orang, informasi dan modal.

Dengan posisi yang strategis tersebut, menjadikan Provinsi Riau merupakan salah satu gerbang perdagangan internasional, antara lain melalui pelabuhan Dumai, Buatn, Tanjung Buton, Sungai Pakning, Perawang, Pekanbaru, Selat Panjang dan Kuala Enok. Akan tetapi letak

wilayah yang strategis ini juga memiliki ancaman dari sisi keamanan negara terutama dalam konsep keamanan manusia (*human security*). Salah satu ancaman nyata adalah kejahatan transnasional berupa penyeludupan narkoba di wilayah Asia Tenggara. Peredaran dan perdagangan narkoba (*drugs trafficking*) merupakan isu kejahatan transnasional yang berkembang di kawasan Asia Tenggara, faktor lemahnya penegakan hukum dan pengawalan kelembagaan pemerintah menjadi faktor mengapa bisnis perdagangan obat-obatan di kawasan Asia Tenggara sangat mudah berkembang (Cipto, 2007). Beberapa faktor yang mendorong perkembangan bisnis narkoba di Asia Tenggara terutama Indonesia, yaitu:

1. Perbedaan harga jual yang sangat signifikan diantara negara-negara kawasan Asia Tenggara
2. Angka pengangguran yang sangat tinggi di beberapa negara Asia Tenggara terutama Indonesia
3. Kondisi kemiskinan di beberapa negara Asia Tenggara menyebabkan proses untuk merekrut dan biaya perekrutan kurir cukup murah
4. Jumlah pemakai narkoba saat ini terutama di Indonesia sudah melebihi dari 5 juta orang (Direktorat Reserse dan Narkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau. 2017).

Oleh karena itu, faktor-faktor tersebut tentu saja berdampak pada meningkatnya peredaran narkoba di wilayah Indonesia. Berdasarkan observasi penulis dilapangan maka ditemukan fakta bahwa peredaran atau penyeludupan modus operandi narkoba dari negara Malaysia ke Indonesia terutama wilayah Provinsi Riau menurut Direktur Reserse Narkoba Polda Riau bahwa masuknya narkoba melalui masuk di Pelabuhan resmi dengan menyamarkan isi muatan, masuk melalui Pelabuhan kecil atau pelabuhan ilegal dengan menggunakan kapal laut. Selain itu modus operandi lainnya adalah dengan narkoba tersebut ditelan didalam perut atau dimasukkan kedalam anus, disamarkan dalam Koper/Travel Bag dan dalam kemasan makanan, selanjutnya menggunakan perusahaan jasa pengiriman paket serta melalui pelayaran kapal *Ship To Ship*.

Sebagian besar narkoba yang masuk ke wilayah Provinsi Riau masuk melalui jalur laut. Narkoba yang masuk ke Provinsi Riau berasal dari Malaysia merupakan narkoba yang transit dan dikirim oleh agen dari China. Beberapa pelabuhan di Malaysia yang disinyalir sebagai wilayah transit narkoba sebelum sampai di Provinsi Riau adalah Pelabuhan Port Klang, Port Dickson, Pelabuhan Malaka, Pelabuhan Muar dan Pelabuhan Batu Pahat. Sedangkan pelabuhan tujuan narkoba tersebut berada di beberapa wilayah pelabuhan yaitu

Bagan Siapi-Api, Pulau Rupa, Selat Panjang, Dumai dan Tembilahan. Berikut ini merupakan peta jalur masuk narkotika melalui darat dan laut di wilayah Provinsi Riau, yaitu:

Gambar 1.4 Peta Jalur Masuk Narkotika di Wilayah Provinsi Riau



Sumber: Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau. Tahun 2017.

Berdasarkan peta tersebut maka dapat dijelaskan bahwaabuhan Port Klang akan membawa barang menuju pelabuhan di wilayah Bagan Siapi-Api sehingga paket narkotika tersebut nantinya akan dikirim ke wilayah Sumatera Utara terutama Kota Medan. Sedangkan untuk wilayah Port Klang akan masuk menuju Pulau Rupa dan dari pelabuhan tersebut paket narkotika akan dikirim ke Bengkalis menuju Kota Pekanbaru sedangkan dari Pelabuhan Malaka dan Muar akan dikirim ke Bengkalis dan Meranti dan akan dikirim ke Pekanbaru Jambi sedangkan dari Pelabuhan Batu Pahat akan masuk ke Pelabuhan Meranti dan Indragiri Hili (Tembilahan) dan akan menuju kota Palembang, Bandar Lampung dan Jakarta. Oleh karena itu penyeludupan narkotika dari jaringan internasional kawasan Asia Tenggara ini merupakan jalur yang sangat strategis dan rasional bagi mafia narkotika untuk menyeludupkan narkotika dan disebarkan di kota-kota besar di Indonesia.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Perkembangan bisnis Narkotika di kawasan Asia Tenggara mengalami peningkatan pesat dikarenakan adanya hukum bisnis terutama terkait permintaan dan penawaran negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Pertumbuhan ladang opium yang semakin pesat dikawasan *golden triangle* Asia Tenggara antara Myanmar, Laos dan Thailand mengakibatkan penyeludupan narkotika semakin menggiurkan hal ini ditambahkan lagi dengan keuntungan yang didapat dalam bisnis narkotika tersebut. Sehingga jaringan kejahatan transnasional ini sangat rapi dan terorganisir

serta memiliki mata rantai jaringan terputus, sehingga dalam pelaksanaannya para pelaku memiliki perwakilan di setiap negara ASEAN. Provinsi Riau merupakan salah satu pintu gerbang masuknya narkoba secara ilegal dan penyelundupan narkoba ini terjadi melalui jalur – jalur pelabuhan tidak resmi disepanjang garis pantai Provinsi Riau melalui jalur transit dari negara Malaysia.

Daftar Pustaka

- Adam Edwards and Peter Gill. 2003. *Transnational Organised Crime Perspectives on global security* London. Routledge.
- Alifia, U, 2008. *Apa Itu Narkoba dan Napza*. PT Bengawan Ilmu, Semarang
- Badan Narkotika Nasional, 2014. *Laporan Kinerja BNN Tahun 2014*, Jakarta. BNN.
- Bambang Cipto, *Hubungan Internasional di Asia Tenggara “Teropong Terhadap Dinamika, Kondisi Riil dan Masa Depan: Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2007.*
- Della Porta, D. 1999, ‘*Politics, the Mafia and the Corruption Market*’. In *Corrupt Exchanges*, Aldine de Gruyter.
- Dennis M. P. McCarthy. 2001. *An Economic History of Organized Crime A national and transnational approach*. New York. Routledge.
- Direktorat Reserse dan Narkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau. 2017. *Paparan Kapolda Riau mengenai Kejahatan Transnasional Narkoba di Provinsi Riau*. Pekanbaru. Seminar Nasional Universitas Riau.
- Kramer Tom and Jelsma Martin. 2009. *Withdrawal Symptoms in the Golden Triangle A Drugs Marketings Disarray*. Amsterdam. Netherlands. Transnational Institute.
- Sumarno Ma’sum, 1987. *Penanggulangan Bahaya Narkoba dan Ketergantungan Obat*, Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Zarina Othman. 2004. *Myanmar. Illicit Drugs Trafficking and Security Implication*, Jakarta. Akademika.
- John Broome. 2000. *Transnational Crime in The Twenty-First Century*.<http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/1238/1143>. diakses 18 Maret 2016.
- Ninth United Nations Congress on The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders, Cairo, Egypt, 29 April-8 May 1995, p. 6-14.

Buzan, Barry and Lene Hansen. *The Evolution Of International Security Studies*.

<http://www.UNODC.org>. 2015. *Report of the Years*. Publisher.

<http://www.asean.org/communities/asean-political-security-community/item/asean-declaration-on-transnational-crime-manila-20-december-1997>. Diakses 23 Maret 2016.

<http://www.asean.org/news/asean-secretariat-news/item/asean-reaffirmed-commitment-towards-drug-free-vision>.

BAGIAN II
SEMINAR HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT



**Program Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta Dalam Rangka Mengurangi Tingkat Ketergantungan Lulusan pada Dunia
Kerja¹**

Oleh :

Sugito, SIP., M.Si.

Rr. Sri Handari Wahyuningsih, S.E., M.Si.

Ir. Agus Nugroho Setiawan, MP

ABSTRAK

Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK) adalah salah satu skema hibah pengabdian pada masyarakat yang diselenggarakan oleh Ristek Dikti RI. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta telah memperoleh hibah ini untuk meningkatkan motivasi kewirausahaan dan iklim pembelajaran kewirausahaan bagi mahasiswa dan tenan usaha binaan UMY. Program ini dilatarbelakangi oleh belum idealnya rasio antara kelompok kewirausahaan dan jumlah mahasiswa serta tingginya ketergantungan lulusan UMY pada dunia kerja. Target peserta PPK UMY adalah kelompok mahasiswa pemenang Program Kreatifitas Mahasiswa Kewirausahaan, kelompok kewirausahaan dari lingkungan program studi, Pemenang Program SEBI UMY, alumni atau masyarakat binaan.

Pelaksanaan program meliputi penumbuhan motivasi dan *skill* berwirausaha, kompetisi *business plan*, pendampingan, festival kewirausahaan dan monitoring evaluasi program. Penumbuhan motivasi dan *skill* berwirausaha dilakukan melalui pelatihan ide dan *business plan*. Hasil dari pelatihan ini adalah terbentuknya beberapa kelompok usaha mahasiswa yang kemudian mereka berkompetisi untuk mendapatkan pendanaan awal dari UMY serta pendampingan dari PPK UMY.

Hasil dari pelaksanaan pengabdian PPK ini adalah 13 kelompok usaha baru hasil dari kompetisi *business plan* dan semuanya mendapatkan pendampingan dari dosen dan SEBI. Ketiga belas kelompok memiliki kekhasan pada produk makanan, jasa, teknologi, dan pertanian. Guna meningkatkan penjualan dan jejaring bisnis, maka SEBI PPK mengadakan Festival Kewirausahaan Mahasiswa yang diikuti oleh 100 tenant. Monitoring dan Evaluasi juga dil

¹ Makalah ini adalah hasil dari Pengabdian Masyarakat dalam Skema Program Pengembangan Kewirausahaan yang didanai Oleh Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi RI tahun anggaran 2018.

akukan untuk menjaga keberlanjutan usaha dan pertanggungjawaban kegiatan tiap kelompok usaha.

Pendahuluan

Pengembangan kewirausahaan di perguruan tinggi dipandang sebagai terobosan dalam upaya mengurangi permasalahan pengangguran yang pada tahun 2016 dilaporkan Badan Pusat Statistik mencapai 7,02 juta orang. Kemajuan ekonomi suatu bangsa ditentukan oleh semangat kewirausahaan yang dimiliki masyarakat. Untuk menjadi bangsa maju, minimal diperlukan 2% pengusaha dari jumlah penduduknya (Mc Clelland, 1961). Dari capaian bangsa Indonesia yang berada pada angka 0,18%, masih banyak agenda besar yang perlu dilakukan oleh setiap komponen bangsa, termasuk oleh perguruan tinggi di Indonesia.

Kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan semakin sulit mengingat mulai 1 Januari tahun ini mereka juga bersaing dengan tenaga kerja asing dari negara-negara ASEAN sebagai dampak berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Sulitnya lulusan universitas lokal memperoleh pekerjaan sudah terlihat dari angka pengangguran terdidik Indonesia yang meningkat setiap tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2014, di Indonesia ada 9,5 persen (688.660 orang) dari total penganggur yang merupakan alumni perguruan tinggi. Mereka memiliki ijazah diploma tiga atau ijazah strata satu (S-1). Dari jumlah itu, penganggur paling tinggi merupakan lulusan universitas bergelar S-1 sebanyak 495.143 orang. Angka pengangguran terdidik pada 2014 itu meningkat dibandingkan penganggur lulusan perguruan tinggi pada 2013 yang hanya 8,36 persen (619.288 orang) dan pada 2012 sebesar 8,79 persen (645.866 orang) (<https://www.bps.go.id>).

Pengembangan kewirausahaan di dunia pendidikan tinggi sejalan dengan upaya strategis menuju perguruan tinggi modern seperti disebutkan UNESCO (<https://unevoc.unesco.org/>). Dalam paparan kebijakan, diungkapkan bahwa universitas modern merupakan tempat pengembangan ketrampilan kewirausahaan yang mampu memfasilitasi kompetensi lulusan sehingga mampu menciptakan lapangan kerja. Pendidikan kewirausahaan menjadi

bagian penting dalam meningkatkan kreativitas, jiwa inovasi, keberanian pengambilan resiko, fleksibilitas, kemampuan futuristik mahasiswa, kemampuan mendelegasikan pekerjaan, kemampuan merespon kritik dan saran, mobilitas, kepemimpinan, dan keyakinan diri.

Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi bangsa Indonesia. Pelaksanaan Tridharma Perguruan tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat diharapkan mampu melahirkan karya-karya inovatif yang mendukung pengembangan kewirausahaan di Indonesia. Hal ini karena kewirausahaan pada dasarnya mencakup skills seperti inovasi, kreatifitas, keberanian memulai usaha, pengambilan resiko, pengambilan keputusan dan kepemimpinan. Saat ini, pendidikan kewirausahaan disadari semakin memperoleh perhatian dari berbagai pihak seperti pemerintah, akademisi, dan pihak swasta. Pengembangan kewirausahaan berhubungan dengan kesiapan calon lulusan menghadapi lingkungan kerja (Kuttim, 2014).

Konsep pendidikan kewirausahaan diungkapkan Kuttim (2014) sebagai berikut :

1. Pendidikan kewirausahaan dalam artian sempit dimaknai sebagai pengakuan, proses penyiapan sumberdaya untuk menghadapi risiko, dan membangun usaha bisnis (Kourilsky, 1995).
2. Pendidikan kewirausahaan dimaknai sebagai "kumpulan pengajaran formal yang mendorong dan mendidik setiap individu yang tertarik dalam penciptaan bisnis, atau pengembangan usaha kecil "(Bechard & Toulouse, 1998; Information Resources Management Association, 2017).
3. Pendidikan kewirausahaan dalam makna yang luas merupakan usaha mempersiapkan individu agar siap bekerja, siap menjadi pemilik bisnis, memiliki jiwa wirausaha dan menjadi karyawan inovatif.

Berdasar pada permasalahan minimnya minat mahasiswa dan lulusan UMY untuk berwirausaha dan semakin kompetitifnya persaingan mendapatkan pekerjaan, serta perlunya perguruan tinggi mengembangkan kewirausahaan, maka perlu adanya program yang

terstruktur dan komprehensif untuk meningkatkan minat dan keterampilan berwirausaha mahasiswa UMY.

A. METODE PELAKSANAAN

Secara sistematis, metode pelaksanaan Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK) dirangkai dalam kegiatan sebagai berikut.



B. PERSIAPAN

- a. Program Pengembangan Kewirausahaan diawali dengan melakukan sosialisasi program kepada mahasiswa dan dosen. Berdasar evaluasi, secara keseluruhan program studi di UMY telah memiliki kegiatan kewirausahaan yang semakin menggeliat, yang diinisiasi oleh masing-masing program, baik melalui mata kuliah maupun ekstra kurikuler. Sosialisasi program dilakukan untuk memberikan informasi yang mendorong partisipasi mahasiswa di seluruh program studi. Program ini didukung dengan peralatan promosi seperti leaflet, pamphlet, dan rapat koordinasi mengundang perwakilan unit. Target peserta adalah kelompok mahasiswa penerima PKMK Hibah Kemenristek Dikti, Kelompok kewirausahaan/perencanaan bisnis yang ada di setiap program studi, komunitas kewirausahaan di tingkat fakultas, dan kelompok kewirausahaan yang tergabung dalam inkubasi kewirausahaan SEBI UMY dari kalangan mahasiswa dan kelompok binaan.
- b. Rekrutmen calon tenan dari kelompok mahasiswa.

Rekrutmen kelompok mahasiswa dimaksudkan untuk menciptakan wirausaha baru/tenant dari kalangan mahasiswa secara berkelompok atau individual. Target yang ingin dicapai adalah menciptakan lapangan kerja sendiri oleh mahasiswa, sehingga ketergantungan pada dunia kerja semakin berkurang dan menyerap tenaga kerja. Program ini dilakukan berkoordinasi dengan program studi dan pengampu mata kuliah untuk menjaring calon peserta secara lebih luas. Tahap rekrutmen dilanjutkan dengan tahap seleksi dengan mengisi form isian yang berisi motivasi kepesertaan, dan kesediaan atau komitmen dalam mengikuti program PPK. Hasil seleksi dilanjutkan dengan penetapan peserta program PPK.

C. PELAKSANAAN

Pelaksanaan program pengabdian dilakukan dengan metode pelatihan, pendampingan usaha, dan keberlanjutan usaha. Pelatihan bagi mahasiswa dilakukan untuk menumbuhkan minat mahasiswa dan keterampilan berwirausaha. Selanjutnya, mahasiswa akan diberikan fasilitas bantuan pendanaan usaha setelah melalui tahapan kompetisi business plan. Pelaksanaan bisnis mahasiswa akan didampingi oleh Tim Pendamping melalui kunjungan dan coaching, maupun monitoring dan evaluasi program. Keberlanjutan program dilakukan melalui festival kemahasiswaan dan inkubasi bisnis.

D. MONITORING DAN EVALUASI

Monev dilakukan untuk mengetahui kinerja Tim. Monev dilakukan di kelas dengan skema mahasiswa presentasi dan dilanjutkan tanya jawab. Mahasiswa diwajibkan untuk membuat laporan kemajuan usaha. Setelah monev di kelas, monev dilanjutkan ke tempat usaha.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelatihan Ide Usaha dan Workshop Business Plan

Pada tahap awal pelaksanaan program, PPK UMY melakukan rapat koordinasi dengan Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni yang membawahi Divisi Inkubasi Bisnis dan Kewirausahaan atau sering disebut Student Entrepreneur and Business Incubator

(SEBI). Hal ini dilakukan mengingat PPK akan berkolaborasi dengan SEBI UMY dalam menjalankan programnya. Program-program PPK akan memperkuat dan mempercepat ketercapaian target-target yang dimiliki oleh SEBI. Secara kelembagaan, PPK menjadi bagian dari SEBI UMY. Pada tahap selanjutnya, SEBI melakukan sosialisasi kepada Dekan dan Kaprodi se UMY dalam rangka memperkenalkan program-program SEBI PPK dan meminta dukungan.

Program pertama PPK adalah melakukan penjangkaran peserta. Penjangkaran ini dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan mahasiswa motivasi berwirausaha. Salah satu cara yang kami laksanakan adalah pelatihan ide usaha. Ide usaha dapat dimunculkan dari kisah sukses para pengusaha yang sudah mapan. Ide dan motivasi yang telah ada di mahasiswa kemudian dilanjutkan dengan penuangan ide dalam bentuk proposal bisnis.

Pelaksanaan Pelatihan Business Plan dilaksanakan dalam rangka merekrut calon peserta program dengan memberikan pada mereka pelatihan ide dan business plan. Pada pelatihan ini diikuti oleh 120 mahasiswa dari berbagai prodi yang ada di UMY. Ada dua materi dalam pelatihan ini, yaitu "Passion To be Entrepreneur : Success Story dan Penyusunan Business Plan (Pengembangan Jaringan Bisnis). Sebagai narasumber adalah Puthut Ardianto, M.Pd. (Owner Lemos Pires: Batik Jumputan) dan Iskandar Bukhori, SE., SH., M.Si. Tindak lanjut dari pelatihan ini adalah kompetisi business plan.

2. Kompetisi Business Plan

Kompetisi Business Plan diawali dengan sosialisasi dan pendaftaran. Pendaftaran dan Pengumpulan Proposal dibuka dari tanggal 1 sampai dengan 14 Maret 2018. Sebanyak 80 kelompok mahasiswa mendaftar dan selanjutnya mengikuti proses seleksi. Selama proses penyusunan proposal, mahasiswa harus mendapatkan pembimbingan dari dosen pendamping.

Proses seleksi dilaksanakan dalam 2 tahapan. Tahapan pertama adalah penilaian kelayakan proposal dan tahap kedua adalah presetas dan uji produk. Tim Juri terdiri atas : Sugito, Rr. Sri Handari, Taufik Akhbar, dan Oki Wijaya. Seleksi berhasil menghasilkan 13 kelompok

pemenang yang akan mendapatkan bantuan dana dari Universitas dan pembinaan oleh SEBI PPK.

3. Implementasi Business dan Pendampingan

Kelompok mahasiswa pemenang diminta untuk mengimplementasikan rencana bisnisnya dengan didampingi oleh dosen pendamping dan mentor dari SEBI. Pelaksanaan program dimonitoring dengan logbook dan juga diskusi-diskusi antara mahasiswa dengan dosen pendampingnya dan juga SEBI.

Berikut adalah profil 13 kelompok yang menjadi peserta PPK

:

No	Nama Kelompok	Deskripsi Usaha
1	Decocraft: Inovasi Dekorasi Ramah Lingkungan	Decocraft merupakan usaha dibidang pembuatan home-decor yang menggunakan bahan kayu Jati Belanda dan merupakan limbah dari pallet pembuatan peti kemas. Saat ini decocraft memiliki beberapa varian produk seperti jam dinding kayu, lampu meja, frame souvenir, dan varian jam yang lain.
2	Bule Pekarangan	Usaha budidaya lele pekarangan layak untuk diperhitungkan. Hal ini dikarenakan penggunaan lahan pekarangan menjadi lahan produktif dapat membantu perekonomian masyarakat. Atas dasar pertimbangan tersebut, usaha Bule pekarangan hadir sebagai solusi atau alternatif bagi mahasiswa yang ingin memanfaatkan lahan kontrakannya. Bule pekarangan hadir dengan sistem sewa rumah yang juga sekaligus menyewa lahan pekarangan untuk dijadikan kolam budidaya. Sistem pembuangan air kolam yang terintegrasi langsung dengan lahan budidaya jahe merah membuat usaha ini ramah lingkungan dan tidak meninggalkan limbah. Karena limbah kolam yang dihasilkan akan langsung diproses secara alami menjadi pupuk untuk budidaya jahe merah. Usaha Bule pekarangan juga didukung oleh Kementerian Koperasi dan UKM melalui program Gerakan Kewirasusahaan Nasional (GKN). Setelah melalui beberapa tahapan seleksi Bule pekarangan mendapatkan supporting dana sebesar dua belas juta rupiah untuk digunakan sebagai pengembangan usaha.

No	Nama Kelompok	Deskripsi Usaha
3	Shoes Medical	Shoes medical merupakan usaha dibidang jasa pencucian sepatu. Usaha ini berawal dari tugas perencanaan dan pengembangan bisnis yang kemudian ditekuni hingga saat ini. Usaha kemudian diikuti dalam kompetisi business plan dan mendapat dana hibah dari SEBI UMY. Saat ini Shoes Medical telah mempekerjakan sebanyak tiga orang karyawan freelance yang merupakan mahasiswa. Keberadaan shoes medical memberikan dampak positif bagi mahasiswa karena membuka kesempatan untuk mahasiswa tersebut.
4	Pemberian Nilai Tambah Bonggol Pisang Sebagai Cemilan Kaya Serat	Bonggol pisang biasanya dianggap sebagai barang yang sudah tidak memiliki nilai ekonomis. Namun ditangan kelompok mahasiswa pertanian, bonggol pisang diolah menjadi camilan yaitu keripik bonggol pisang yang kaya serat. Kelompok ini memberikan edukasi serta memberikan nilai tambah dari bonggol pisang. Saat ini keripik bonggol pisang sudah sering diikuti dalam pameran atau expo diberbagai event. Bahan baku yang mudah dicari dan jarang dimanfaatkan orang justeru menjadi keunggulan dari produksi keripik bonggol pisang. Dengan modal yang sedikit namun mampu memproduksi keripik dalam jumlah yang banyak.
5	BENGI (Briket Wangi) Ramah Lingkungan Upaya Meminimalisir Limbah Sebagai Bahan Bakar Produksi	Briket wangi merupakan usaha yang bergerak dalam produksi briket dengan inovasi penambahan bahan pengharum sehingga briket yang diproduksi mengandung aroma wangi dan menyegarkan. Dengan memproduksi varian bentuk briket serta memiliki ukuran yang berbeda-beda, Bengi dapat diterima dengan baik di pasaran, terutama dikalangan penjual angkringan di wilayah sekitar Yogyakarta.
6	Tropical Waffle	Tropical waffle merupakan usaha dibidang kuliner dengan bahan utamanya adalah waffle. Waffle tersebut kemudian disajikan dengan ice cream dan disertai juga dengan topping dari berbagai selai organik seperti selai srikaya, nanas dan strawberry. Perpaduan yang pas antara waffle yang crunchy, ice cream yang lumer, serta selai yang menyegarkan menjadikan tropical waffle mampu diterima dengan baik di pasaran terutama dikalangan mahasiswa.
7	Grilled Mocha	Grilled mocha merupakan usaha dibidang kuliner yang mengkombinasikan pare dengan racikan bolu sehingga menghasilkan bolu kering pare. Proses inovasi yang menggunakan bahan utama pare sehingga menjadikan pare memiliki nilai tambah, tidak terlepas dari usaha kelompok mahasiswa ini untuk lebih mengenalkan kepada masyarakat betapa pare yang pahit tersebut dapat diolah menjadi makanan atau kue yang lezat dan mengandung gizi yang tinggi.

No	Nama Kelompok	Deskripsi Usaha
		Keunikan dari bolu kering yang terbuat dari pare tersebut membuat olahan makanan ini digemari oleh pelanggan. Perpaduan rasa yang pas serta harganya yang ekonomis membuat usaha olahan pare tersebut laris manis. Saat ini usaha Grilled Mocha masih dikerjakan sendiri oleh dua orang mahasiswa dan belum memiliki karyawan.
8	Portal Pertanian Akatani.id	Akatani.id hadir memberikan solusi kepada penggerak pertanian di Indonesia untuk memberikan informasi seputar ilmu pertanian. Sebuah media daring masa kini yang mempermudah petani maupun pihak-pihak yang tertarik dibidang pertanian untuk mempelajari berbagai hal tentang ilmu pertanian. Usaha jasa ini menghasilkan profit dengan cara perhitungan jumlah viewer yang mengunjungi portal websitenya. Selain itu, profit juga diperoleh dari iklan yang masuk kedalam portal website tersebut. Keunggulan dari website ini, berita atau postingan yang masuk secara kontinu mengikuti trend pertanian saat ini.
9	Kreasi Tanaman Hias Kaktus Menggunakan Cat Glow in The Dark	Kaktus merupakan tanaman yang mudah dijumpai di Indonesia. Perawatannya yang mudah dan tidak membutuhkan banyak air membuat tanaman ini digemari oleh banyak kalangan. Beberapa orang justeru menjadikan tanaman kaktus sebagai souvenir pernikahan, hadiah ulang tahun, wisuda serta acara-acara lainnya. Atas latar belakang ini lah kelompok Kreasi Tanaman Kaktus kemudian berinovasi yaitu dengan membuat usaha penjualan aneka jenis kaktus menggunakan berbagai vas lucu yang bisa menghasilkan warna atau cahaya di kegelapan. Desain serta ukuran vas dilukis dengan berbagai warna dan karakter kemudian di cat menggunakan cat khusus yang dapat menghasilkan cahaya ketika ditempatkan ditempat yang gelap. Dengan mengambil bahan vas langsung dari pengrajin gerabah di daerah Bantul, membuat bisnis ini laku keras dikalangan mahasiswa karena harganya yang sangat terjangkau namun memiliki kualitas bunga serta vas yang tak kalah saing dari produk sebangsanya.

No	Nama Kelompok	Deskripsi Usaha
10	Fur-Craft "Furniture Crafting"	Fur-craft adalah usaha rintisan dari mahasiswa lintas program studi. Usaha ini bergerak dibidang pembuatan home decor dengan bahan dasar kayu pallet. Proses pemasaran yang menggunakan jejaring mitra serta mengedepankan sistem custom desain membuat usaha ini terus berjalan hingga saat ini. Fur-craft juga telah mendapatkan dana hibah dari Program Kreativitas Mahasiswa (PKM-K). Suntikan dana yang diperoleh dari program SEBI serta PKM-K digunakan dengan optimal oleh kelompok tersebut untuk mengembangkan usaha. Saat ini fur-craft telah memiliki workshop yang digunakan untuk mendisplay produk-produk yang telah dihasilkan.
11	Zaynah (Sabun Halal Herbal Spirulina dengan Ekstra Minyak Zaitun)	Zaynah merupakan usaha berbasis kelompok yang memproduksi sabun herbal khusus untuk wajah. Bahan dasar yang digunakan untuk membuat sabun yaitu ekstrak minyak zaitun. Kandungan vitamin yang ada dalam minyak zaitun, membuat tanaman ini sering diracik untuk digunakan dalam dunia kosmetik. Zaynah mampu mengkombinasikan spirulina dan ekstrak minyak zaitun menjadi perpaduan sabun yang harum, lembut serta bermanfaat untuk membersihkan kotoran diwajah dengan sangat baik. Didukung oleh respon pasar yang sangat baik, saat ini Zaynah tengah mengembangkan produknya menjadi sabun cair.
12	Mantera (Masker Kain Anti Kanker Alami)	Masker saat ini menjadi kebutuhan primer bagi semua kalangan. Meningkatnya jumlah kendaraan mempengaruhi pula peningkatan polusi udara yang dihasilkan. Kelompok mahasiswa dari program studi farmasi ini kemudian menciptakan inovasi masker anti kanker (Mantera). Penggunaan daun lidah mertua sebagai bahan dasarnya membuat mantera menjadi salah satu masker anti kanker alami. Saat ini sistem penjualan Mantera masih dalam tahap direct selling. Namun berdasarkan hasil dari Monitoring dan Evaluasi yang telah dilakukan, sistem pemasaran dari usaha ini akan dikembangkan dengan cara bermitra dengan apotek-apotek dan beberapa franchise di Yogyakarta
13	Pasal Sabu Alinea 2 In 1	Pasal Sabu Alinea 2 in 1 adalah kelompok usaha mahasiswa dari prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Pasal Sabu saat ini memproduksi sepatu dan sandal wanita yang menggunakan kombinasi corak kain bugis sebagai bahan utamanya. Beberapa varian produknya seperti wedges, high heels, flat shoes, dan flip flop didesain sedemikian rupa menggunakan kombinasi khas kain bugis. Target pasar yang dibidik meliputi hotel, home stay, pusat oleh-oleh khas bugis, serta wanita karier yang berada di rentang usia 25 - 35 tahun. Saat ini produk pasal sabu juga sudah dapat di

No	Nama Kelompok	Deskripsi Usaha
		peroleh di beberapa e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee.

4. Festival Kewirausahaan Mahasiswa

Festival Kewirausahaan Mahasiswa (FKM) dilaksanakan pada tanggal 28 April 2018. Festival ini ditujukan untuk memfasilitasi mahasiswa binaan untuk mempromosikan produk barang dan jasa. Dalam pelaksanaannya FKM merupakan rangkaian dari acara pameran produk atau expo serta seminar kewirausahaan yang diisi oleh praktisi bisnis yaitu Muhammad Assad.

Penyelenggaraan acara ini berkolaborasi dengan BEM UMY dalam Judul “UMY Creative Student Festival” yang terdiri atas dua agenda besar yaitu pameran Pendidikan dan Kewirausahaan. Acara ini diikuti oleh 100 stand terdiri atas 75 stand kewirausahaan dan 25 stand pendidikan. Festival dihadiri oleh 500 pengunjung dan peserta seminar. Dari jumlah stand yang mengikuti pameran, 10 stand diantaranya adalah kelompok binaan yang lolos dalam kompetisi business plan.

5. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan pada 26 Juli 2018. Monev dilakukan oleh Tim terhadap 13 kelompok yang memperoleh hibah kewirausahaan. Monev ditujukan untuk melihat kemajuan dan pertanggungjawaban dari kelompok penerima hibah. Hasil monev menunjukkan bahwa semua kelompok dapat menjalankan usahanya dengan baik. Tiga kelompok memiliki capaian terbaik terdiri dari Fur Craft, Shoes Medical, dan Deco Craft dari aspek profit dan inovasi usaha. Monev juga dilanjutkan dengan kunjungan ke tempat usaha mahasiswa.

A. KESIMPULAN DAN SARAN

Program pengembangan kewirausahaan yang telah dilaksanakan dalam payung SEBI berhasil mencetak 13 kelompok wirausaha baru di UMY. Jumlah ini masih terlalu kecil bila dibandingkan dengan jumlah mahasiswa baru UMY yang rata-rata 5000 mahasiswa. Prospek pengembangan wirausaha mahasiswa semakin terbuka seiring dengan sulitnya lapangan pekerjaan dan banyaknya start up muda dari kalangan mahasiswa yang bisa menjadi role model. Oleh karena itu, berdasarkan pada pelaksanaan PPK tahun 2018, maka ada beberapa permasalahan yang harus bisa diselesaikan pada tahap selanjutnya :

Kurangnya minat berwirausahaan di kalangan mahasiswa. Terbukti hanya 120 orang yang mendaftar untuk mengikuti program PPK SEBI. Hal ini perlu adanya upaya meningkatkan minat dan motivasi berwirausaha mahasiswa. Perlu adanya lesson learn yang bisa diadopsi oleh UMY dalam rangka meningkatkan jumlah mahasiswa yang berminat dan menjalankan kewirausahaan.

Keberlanjutan kewirausahaan mahasiswa yang masih sangat rentan. Beberapa kelompok mengalami perpecahan dan usaha tidak berjalan baik. Faktor kesibukan studi juga menjadi hambatan bisnis mahasiswa. Selain itu dorongan orang tua sangat diperlukan bagi berjalannya bisnis mahasiswa. Orang tua justru sering menghalangi anaknya untuk berwirausaha agar tetap fokus pada studi. Oleh karena perlu sinergi antara SEBI-Mahasiswa dan orang tua.

Pola pelatihan dan pendampingan yang masih lemah sehingga menyebabkan keterampilan dan motivasi berwirausaha mahasiswa menjadi lemah. Perlu adanya pola pelatihan yang terstruktur dan pendampingan yang intensif dari dosen maupun sebi.

Masih minimnya pola kemitraan usaha dengan UMKM maupun perusahaan menjadi salah satu kelemahan juga dalam pengembangan bisnis mahasiswa.

Referensi

“Ciputra: Kita Terlalu Banyak Ciptakan Sarjana Pencari Kerja!” , dalam <https://edukasi.kompas.com/read/2009/08/31/11374948/Ciputra.Kita.Terlalu.Banyak.Ciptakan.Sarjana.Pencari.Kerja>, 24 September 2018.

Gewati, Mikhael. (2014). “Kenapa Lulusan Perguruan Tinggi Makin Susah Mendapat Pekerjaan?” Dalam <https://edukasi.kompas.com>, 24 September 2018.

Information Resources Management Association. (2017). *Enterpreunership: Concepts, Methodologies, Tools and Applications*, United States of America : IGI Global.

Kourilsky, M. (1995). Entrepreneur education: Opportunity in search of curriculum, Business Education Forum, 1-18.

Kuttim, Merle. (2014). “Entrepreneurship Education at University Level and Students’ Entrepreneurial Intentions”, *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, Volume 110, 24 January 2014, Pages 658-668.

Mc Clelland, David. C. (1961). *The achieving society*, Van Nostrand : Princeton, N.J.

<https://unevoc.unesco.org/>

<https://www.bps.go.id>

Pengabdian Masyarakat : Peningkatan Pemahaman Siswa SMA terhadap Prosedur Sidang PBB

Tim Pengabdian : Sofia Trisni, Rika Isnarti , Anita Afriani S, Poppy Irawan

Multilateral assembly simulation is a practice commonly conducted by students and college students in Indonesia's metropolis where students of International Relations department is an example of active students to attend various simulation in national level. From interview with headmaster of SMA 3 Padang as our community service partner, we found out that the students of this senior high school have not understand the procedure of multilateral assembly. Considering assembly simulation offers many benefits such as public speaking skills, negotiation skills, lobby and developing argument skills, we conducted this community services with involving our experience students. Questioner that we delivered after the activities indicates that students understand the procedure of United Nation general assembly, however it requires regular practice for them to be able to fluently execute the assembly.

Abstrak

Simulasi sidang multilateral merupakan praktek yang lazim dilaksanakan oleh siswa dan mahasiswa di kota besar di Indonesia, dimana mahasiswa jurusan Ilmu Hubungan Internasional merupakan mahasiswa yang aktif dalam mengikuti berbagai simulasi di tingkat nasional. Dari interview dengan kepala sekolah SMA 3 Padang yang menjadi mitra, kami menemukan bahwa siswa sekolah ini masih belum mengetahui mengenai prosedur sidang multilateral. Mengingat bahwa simulasi sidang ini memberikan banyak manfaat bagi siswa, seperti kemampuan *public speaking*, negosiasi, lobby dan menyusun argumen. Praktek simulasi sidang ini kami laksanakan selama dua hari dengan membawa mahasiswa yang telah berpengalaman dalam mengikuti simulasi sidang. Hasil kuesioner akhir setelah pengabdian menunjukkan bahwa siswa telah memahami prosedur sidang PBB, akan tetapi membutuhkan latihan yang regular untuk membuat mereka lancar dalam pelaksanaan simulasi.

Pendahuluan

Diplomasi merupakan teori sekaligus praktek yang sering kita laksanakan dalam keseharian. Tanpa kita sadari, kita telah melaksanakan praktek diplomasi mulai dalam keluarga, dengan teman, dengan guru dan dalam pergaulan lainnya. Selain praktek diplomasi yang telah biasa dilaksanakan dalam keseharian, terdapat juga pula praktek diplomasi yang dilakukan oleh negara dan aktor internasional lainnya. Salah satu contoh pelaksanaan diplomasi tersebut adalah sidang PBB, dimana simulasi sidangnya dilaksanakan dalam berbagai formasi dengan berbagai nama, seperti salah satu yang terkenal yaitu Model United Nation (MUN). Siswa-siswi ataupun mahasiswa-mahasiswi diberbagai universitas di kota besar Indonesia maupun dunia telah terbiasa melaksanakan simulasi sejenis ini. Bahkan, Universitas Padjadjaran telah menggagas model mereka sendiri dibawah nama PadMUN /Padjadjaran Model United Nation (Kompas, 2018).

Simulasi sidang memberikan beberapa manfaat bagi siswa ataupun mahasiswa. Kegiatan ini mengasah skill mahasiswa dalam berbicara didepan umum dan mengasah kemampuan mahasiswa dalam menulis. Selain itu, kegiatan ini juga mengasah kemampuan mahasiswa dalam melakukan negosiasi, melatih mahasiswa untuk melakukan riset, mengasah skill dalam membangun argumen, membangun kerjasama dalam tim dan mengasah skill mahasiswa untuk membuat keputusan yang tepat dalam waktu yang singkat. Melalui kegiatan ini, mahasiswa menambah pengetahuannya mengenai bahasa-bahasa diplomatis yang biasa digunakan serta melatih keberanian untuk menyampaikan pendapat dan berbicara didepan umum. Selain itu, siswa/mahasiswa dilatih untuk melakukan riset, karena negosiasi yang dilakukan pada sidang tersebut adalah negosiasi yang sesuai data dan fakta, mahasiswa diwajibkan untuk berbicara sesuai dengan konteks asli kejadiannya. Menilik pada manfaat yang diberikan oleh simulasi tersebut, berbagai institusi dikota besar saat ini giat dalam mengadakan berbagai simulasi sidang, baik sidang regional ataupun multilateral.

Simulasi sidang merupakan salah satu praktek yang ditawarkan pada matakuliah praktek Diplomasi di jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Pada mata kuliah ini, mahasiswa dituntut untuk memahami proses dan regulasi dalam pelaksanaan sidang PBB. Disamping itu, mahasiswa jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas sendiri telah memiliki klub bahasa Inggris yang salah satunya memiliki program simulasi sidang PBB. Klub ini bernama English Club of International Relations atau yang lebih dikenal dengan Eclair. Klub ini aktif dalam melaksanakan simulasi sidang dan menjadi wadah bagi mahasiswa untuk berlatih sebelum mengikuti simulasi sidang yang biasanya dilaksanakan oleh universitas di pulau Jawa. Dapat dikatakan bahwa jurusan kami memiliki skuad yang telah mampu menjadi *trainer* dalam pelaksanaan simulasi sidang.

SMA Negeri 3 Padang merupakan salah satu sekolah terbaik di kota Padang. Sekolah ini telah menorehkan berbagai prestasi mahasiswa dalam berbagai bidang seperti lomba debat bahasa Inggris, lomba debat bahasa Indonesia, berbagai olimpiade pada tingkat provinsi ataupun nasional, serta berbagai prestasi lainnya (website SMA 3 Padang). Wawancara kami dengan kepala sekolah SMA Negeri 3 Padang Drs. Ramadansyah, M.Pd memberikan informasi bahwa siswa-siswi sekolah ini belum pernah mengikuti pelatihan simulasi sidang dan tidak memiliki pengetahuan mengenai kegiatan tersebut. Selanjutnya, informasi yang sama juga kami dapatkan dari Wakil Kepala Sekolah bidang Humas Dra. Ifna Sukmi, M.Pd. Berdasarkan pertimbangan diatas, tim memutuskan untuk melaksanakan pengabdian masyarakat ini di SMA Negeri 3 Padang

Permasalahan Mitra

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh mitra kami yaitu :

1. Mitra memiliki siswa yang berkemampuan bahasa Inggris yang sangat baik, sekolah ini memiliki mahasiswa yang telah sering memenangkan lomba debat bahasa Inggris.
2. Sayangnya mahasiswa belum pernah mengetahui sama sekali mengenai simulasi sidang PBB, sampel awal kami menyatakan bahwa mereka belum pernah melihat video simulasi sidang sama sekali.
3. Siswa belum mengetahui prosedur sidang PBB
4. Siswa belum mengetahui bahasa diplomatik yang biasa digunakan dalam sidang
5. Siswa belum mengetahui cara menulis *position paper*

SMA Negeri 3 Padang dipilih sebagai mitra pelaksanaan pengabdian masyarakat karena SMA ini memenuhi kriteria sekolah yang layak untuk diberikan pelatihan simulasi sidang ini. Pelatihan sidang PBB ini dilaksanakan dengan menggunakan bahasa Inggris, sehingga syarat mutlak pelaksanaan pelatihan ini adalah bahwa mitra telah

mahir berbahasa Inggris. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa SMA Negeri 3 Padang merupakan salah satu SMA terbaik di kota Padang; sekolah ini memiliki siswa yang telah sering mengikuti perlombaan debat bahasa Inggris, sehingga sekolah ini kami rasa merupakan mitra yang tepat dalam pelatihan ini.

Metode Pengabdian

Persiapan

Pelatihan ini melibatkan 23 orang mahasiswa yang telah terlatih dalam simulasi sidang. Pada tahap persiapan, kami melakukan pencarian topik, penyusunan mode pelatihan dan simulasi. Pada tahap ini kami memastikan bahwa mahasiswa memahami sepenuhnya cara mendampingi siswa SMA dalam simulasi. Pada tahapan ini kami memastikan bahwa mahasiswa telah memahami cara membuat *position paper*, *working paper* dan *draf resolusi*, kemampuan inilah yang akan diberikan kepada siswa SMA. Tahapan persiapan juga diisi dengan tahapan penulisan modul pelatihan yang akan dibagikan kepada siswa pada saat pelatihan. Modul ini kami rangkum dari berbagai buku teks dan juga bahan pelatihan yang pernah diberikan oleh kolega kami dari kementerian Luar Negeri RI. Tahap persiapan juga diisi dengan pemesanan dan pembuatan berbagai keperluan untuk sidang multilateral, seperti plakat dan bendera negara. Adapun metode pelaksanaan pengabdian adalah sebagai berikut. Hari pertama, pengabdian ini berisikan mengenai pemberian pemahaman teoritis mengenai sidang PBB berupa prosedur, tata tertib, pembuatan *position paper*, *working paper* dan *draf resolusi*. Hari pertama pelaksanaan pengabdian adalah hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2017. Setelah pemberian kuliah mengenai sidang PBB secara teoritis, siswa dibagi kedalam kelompok yang terdiri atas 12 negara. Masing-masing kelompok beranggotakan 3 orang, dengan 1 orang anggota kelompok merupakan mahasiswa. Setelah kelompok dibentuk, masing-masing kelompok diberikan kesempatan untuk berkumpul, berkoordinasi dan berbagi tugas. Topik yang dipilih untuk simulasi sidang ini adalah *Livelihood and Education for Displaced person and refugees*. Adapun 12 negara yang dipergunakan untuk simulasi ini adalah Australia, Indonesia, Perancis, USA, Rusia, Bangladesh, India, Kenya, Turki, Kanada, Malaysia, Jerman dan Norwegia. Keduabelas negara ini merupakan negara yang memiliki kepentingan yang bertentangan dalam isu yang diangkat, sehingga diharapkan isu ini dapat mengasah *softskill* siswa dalam hal lobby dan negosiasi. Hari kedua pelaksanaan pengabdian ini adalah hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017. Waktu pengabdian sengaja dijarakkan 1 minggu untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan riset terhadap isu yang dipilih. Siswa juga berkesempatan untuk berdiskusi dengan mahasiswa pendamping mereka untuk mematangkan pemahaman mereka mengenai persiapan menuju simulasi sidang.

Pelaksanaan Pengabdian

Pengabdian hari pertama diisi dengan pemberian materi mengenai prosedur sidang PBB. Berikut adalah materi yang diberikan kepada siswa :

Waktu	Kegiatan
	A. Pemberian materi mengenai <i>diplomatic course</i> yang meliputi :
	1. Prosedur dan alur Sidang PBB

Hari Pertama	2. Bahasa yang dipergunakan dalam sidang
	B. Pengelompokan siswa (berdasarkan negara)
	C. Panduan untuk melakukan riset untuk isu dan negara yang akan diwakili
	E. Pemanduan pembuatan <i>position paper</i>
	F. Pemberian materi mengenai teknik lobby dan negosiasi
	G. Materi mengenai pembuatan resolusi
	Simulasi konferensi yang meliputi :
Hari Kedua	1. Praktek menyiapkan <i>position paper</i>
	2. Praktek Presentasi
	3. Praktek lobby dan negosiasi
	4. Praktek pembuatan <i>working paper</i>
	5. Praktek pembuatan resolusi

Pada hari pertama pelaksanaan kegiatan, kami memberikan kuliah mengenai prosedur pelaksanaan sidang PBB kepada siswa. Sangat penting untuk mengetahui alur baku dan tata tertib pelaksanaan sidang sebelum melakukan simulasi sidang. Pada pemberian materi ini juga dijelaskan anggota pelaksana sidang yang meliputi *chair*, *co-chair* dan *notulensi*. Kami menjabarkan tugas masing-masing anggota sidang dan peranan mereka selama sidang. Selanjutnya kami menjelaskan prosedur awal pelaksanaan sidang, apa yang dilakukan *chair* pada saat membuka sidang, apa yang dilakukan oleh anggota sidang dan bagaimana cara menentukan topik awal yang hendak dibicarakan. Pada bagian ini, kami menjelaskan bahasa-bahasa yang biasa digunakan dalam sidang resmi seperti sidang PBB ini. Setelah menyelesaikan tahap pertama ini, kami menyontohkan cara untuk melakukan riset terkait isu tertentu kepada mahasiswa. Kami memberikan informasi mengenai sumber-sumber valid yang bisa mereka percayai dan jadi penguat argumen ketika sedang melaksanakan simulasi.

Selanjutnya kami memberikan materi mengenai pembuatan *position paper*, formatnya dan informasi apa saja yang harus dimasukkan kedalam *position paper* tersebut. Pada tahapan ini, kami juga mengajarkan siswa untuk secara jeli memperhatikan *position paper* negara lain yang menguntungkan bagi negaranya, sehingga negara tersebut menjadi negara yang potensial untuk di *lobby* sehingga lebih mudah untuk mencapai suara mayoritas. Selain *position paper*, kami juga memberikan materi mengenai cara pembuatan *working paper* dan *draft resolution*. *Working paper* merupakan draf negosiasi yang dipersiapkan pada saat berlangsungnya sidang, kegunaannya adalah untuk memastikan bahwa negara lain memahami atensinya, sehingga *working paper* merupakan upaya untuk memastikan bahwa kepentingan negara tetap terjaga / tercapai. Yang terakhir adalah *draft resolution* yang merupakan hasil keputusan akhir dari sidang. Pembuatan draf ini biasanya dipenuhi dengan interupsi, karena masing-masing negara akan terus memastikan bahwa negaranya tidak pada posisi yang terugikan.

Setelah menyelesaikan penjelasan ini, kami membagi mahasiswa kedalam kelompok-kelompok negara. Pada tahapan ini, kami memberikan pendampingan dengan menyertakan satu orang mahasiswa yang telah berpengalaman kedalam setiap kelompok. Kami memberikan waktu kepada mereka untuk saling berinteraksi dan saling berbagi.

Pada sesi ini kami berharap siswa merasa lebih leluasa untuk mendiskusikan hal-hal yang masih belum mereka mengerti, sehingga mereka berkesempatan untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai topik yang dibicarakan. Kami meminta masing-masing pendamping untuk langsung membagi hal-hal yang perlu diteliti lebih lanjut oleh para siswa. Kami meminta mahasiswa untuk memberikan pendampingan mengenai pembuatan ketiga hal yang telah dijelaskan diatas.

Hari kedua merupakan hari pelaksanaan simulasi sidang. *Chair* sidang sengaja kami pilih dari mahasiswa, mengingat posisi ini sangat krusial dalam simulasi sidang. *Chair* didampingi oleh dua orang yang berasal dari siswa, begitu pula setiap kelompo negara terdiri dari dua orang siswa dan satu orang mahasiswa. Pada hari kedua ini, simulasi sidang dilaksanakan. Pendampingan dari mahasiswa dirasa sangat krusial, karena mereka telah sangat paham dengan alur sidang dan telah lebih paham akan respon yang perlu dilakukan pada situasi tertentu. Pendampingan ini lebih memudahkan dan memperlancar pelaksanaan simulasi, karena setiap siswa kebingungan dalam menangani situasi yang mereka hadapi, mahasiswa dapat memberikan bantuan kepada mereka. Simulasi sidang dilaksanakan sampai jam lima sore, dengan langsung melakukan role play.



Foto 1 dan foto 2 : Pemberian Materi kepada siswa



Foto 2





Hasil

Simulasi sidang ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa mengenai prosedur pelaksanaan sidang PBB. Selain memberikan pemahaman, kami juga ingin memberikan pengalaman mengikuti simulasi sidang kepada siswa-siswi. Kami menyebarkan kuesioner untuk mengetahui pemahaman mahasiswa mengenai materi yang diberikan terkait prosedur sidang PBB. Pada dasarnya, hasil kuesioner mengindikasikan bahwa siswa telah memahami alur sidang PBB, artinya secara teoritis dan pemahaman, tujuan kami telah terlaksana. Akan tetapi jika dilihat pada praktek simulasinya, terlihat bahwa siswa masih kaku dan terkadang bingung untuk mengambil sikap dan menggunakan bahasa. Kami rasa hal ini sangatlah wajar, mengingat kesiapan dalam menanggapi argumen negara lain merupakan kemampuan yang diasah melalui latihan. Artinya untuk membuat mereka sangat memahami pelaksanaan sidang ini, diperlukan latihan secara reguler.

Penutup

Pelatihan mengenai simulasi sidang multilateral memberikan berbagai manfaat kepada siswa dan mahasiswa. Telah diuraikan diatas bahwa kegiatan ini mengasah kemampuan mahasiswa dalam berbagai hal. Sayangnya simulasi sejenis belum populer dikalangan siswa-siswi SMA di kota Padang, walaupun sebenarnya kegiatan serupa merupakan kegiatan yang telah biasa dilakukan oleh siswa-siswi di kota besar. Pelatihan yang kami lakukan merupakan pelatihan yang pertama bagi SMA 3 Padang. Kami menemukan bahwa siswa-siswi sangat antusias dalam mempelajari dan memahami mengenai simulasi sidang ini. Para siswa aktif dalam bertanya dan mengkonfirmasi pemahaman mereka mengenai simulasi sidang PBB. Kami menilai bahwa untuk sebuah kegiatan pelatihan yang baru pertama kali dilaksanakan, capaian siswa-siswi SMA 3 ini tergolong cukup baik. Kami berharap bahwa mereka akan terinspirasi untuk memasukkan materi ini sebagai bagian dari ekstra kurikuler mereka dan mulai mengikuti berbagai perlombaan simulasi sidang untuk meningkatkan skil mereka dalam kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Harusulilo, Yohanes Enggar, “Simulasi Sidang PBB di Unpad”, Kompas, 17.05.2018,
view onlie 12 Oktober 2018

<https://edukasi.kompas.com/read/2018/05/17/21443761/simulasi-sidang-pbb-di-unpad>

Wawancara dengan kepala Sekolah SMA 3 Padang, Drs. Ramadansyah, M.Pd

Wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah bidang Humas Dra. Ifna Sukmi, M.Pd

Website SMA 3 Padang

<http://sman3padang.sch.id/?id=profil&kode=86&profil=Prestasi%20Siswa>

Moral Pancasila Terinspirasi Kode Moral Al Quran

Djumadi M. Anwar²

Seminar Nasional Hasil Pengabdian Masyarakat,
Vennas 9 AIHI, Tanjung Pinang 22-25 Oktober 2018

Abstrak

Dalam al Quran ada ayat kode moral ahklaq tercela dan ahklaq terpuji. Pancasila dasar negara Indonesia mempunyai 45 nilai moral. Moralitas Pancasila dapat dicari rujukan ayatnya, sehingga menjalankan moral sila Pancasila identik dengan menjalankan sebagian Kode moral al Quran. Umat Islam perlu mengetahui hubungan makna filosofis inspirational ayat al Quran dengan nilai moral tiap sila Pancasila, sehingga dapat mensepakati bahwa 45 moralitas sila Pancasila diduga terinspirasi kode moral al Quran. Implikasinya bahwa Pancasila sudah islami tidak perlu diganti, karena menjalankan nilai moral Pancasila identik dengan menjalankan sebagian Kode Moral al Quran. Pembelajaran ahklaq terpuji dan ahklaq tercela pada program pengabdian masyarakat dengan mengkaitkan ayat ayat kode moral al Quran, dapat mengurangi atau menghilangkan fikiran radikal untuk mengubah dasar negara Pancasila dengan Idiologi selain Pancasila.

Kata kunci: kode moral al Quran, sila Pancasila.

Abstract

There are more than 100 noble and vice moral code within al Quran. Pancasila has 45 moral values embedded in every sila. The research finds Pancasila morality has reference verses in the Quran. Muslim society need to know the philosophical inspiration relationship among each Pancasila morality with verses of moral code al Quran. Ultimately muslims can agree to hyphotize that list of 45 moral code Pancasila has been inspired by moral code al Quran. This will have Implication that implementing moral code of every sila Pancasila means identically implementing parts of moral code al Quran. Consequently there is no need to develop aspiration to change Pancasila. Educate people by university lecurer in the framework program of social community services inwhich the socialization of noble morals to acquire and vice morals to distance from, hopely can reduce radical type of thinking to change Pancasila with other foreign idiology.

Keyword : Sila Pancasila, Moral Code al Quran

² Drs.Djumadi M.Anwar, M.Si lulus S1 Jurusan Ilmu Hubungan Internasional UGM 1980, S2 Program Studi Ketahanan Nasional UGM 1995, Dosen tetap Fisipol, Hubungan Intenasional, Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, mengajar Politik Luar Negeri Indonesia, Perdagangan dan Investasi Internasional, Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Email: djumadi2003@yahoo.com

I. Pendahuluan

Penyebaran agama islam ke Nusantara diteorikan melalui Gujarat sejak abad 7 melalui Persia (Suryanegara & Mansur, 1995) langsung dari Mekkah (Hamka, 1998). Menurut Hamka, motivasi penyebaran agama islam oleh orang arab langsung dari Makkah tidak dimotivasi oleh ekonomi tetapi motivasi spiritual. Semua penyebaran agama dilakukan dengan damai. Nilai-nilai moral agama islam sejak abad 7 sudah menyebar di Pesantren-Pesantren Jawa dan Sumatra, nilai moral islam telah masuk sanubari Pemuka Islam yang berjuang melawan Belanda hingga pembahasan dalam siding BPUPKI maupun PPKI.

Bahan pengabdian menggunakan hasil penelitian pengabdian tahun 2014/2015 tentang jumlah nama serta nomer ayat ahklaq terpuji dan nama serta nomer ahklaq mulia dalam al Quran yang menghasilkan identifikasi 200 lebih daftar perintah kerjakan dan larangan dikerjakan untuk dihindari . Kami memilih 60 ahklaq tercela dan 30 ahklaq terpuji. Sementara itu 5 sila Pancasila juga mengandung 45 nilai moralitas, sila 1= 9 moral, sila 2 = 11 moral, sila 3 = 8 moral, sila 4= 10 moral, sila 5 = 7 moral. Tiap butir nama etika moral pancasila kami cari kaitan makna filosofisnya dengan ayat ayat al Quran. Selanjutnya berkolaborasi dengan mahasiswa peserta mata kuliah Pendidikan Pancasila tahun 2016, kami membagi mahasiswa dalam 5 kelompok beranggotakan 8 orang yang masing masing kami tugasi untuk mendiskusikan dan menghubungkan kedekatan makna tiap butir nilai etika dari tiap sila Pancasila dengan ahklaq terpuji dan moral perintah kerjakan yang sudah kami identifikasi lokasi nama surat dan nomer ayatnya. Sekalipun satu nama nilai moral tiap sila Pancasila bisa dikaitkan dengan beberapa nomer ayat, kami memilih 1-2 ayat yang terjemahan ke bahasa Indonesia mempunyai inspirasi makna filosofi paling dekat. Sebagai Dosen Pembimbing Lapangan DPL KKN 2017/2018 kami melatih peserta KKN mahasiswa UMY sebanyak 10 orang untuk mempelajari ahklaq terpuji, ahklaq tercela dikaitkan dengan nilai moral 45 butir moral Pancasila. Pesan DPL agar tiap mahasiswa memegang 1 handouts berisi daftar nama butir butir moral 5 sila pancasila , dengan didalamnya ada referensi nama surat dan nomer ayat dalam al Quran yang dan tiap ayat yang terkait tiap butir sila , sudah ada terjemahan bahasa Indonesianya. Lokasi Pengabdian Desa Polengan, Kecamatan Srumbung, Kabupaten, Magelang. Kami membuat kesepakatan tertulis dengan kelompok masyarakat yang bersedia bersama melaksanakan beberapa program kkn. Mereka kelompok masyarakat Takmir Masjid Jamik, Kelompok Ibu Dasa Wisma, Kelompok Pengajian Bapak, Sekolah MTs Srumbung Klas 1,2,3 (200 siswa).

II. Metode Pengabdian dan Hasil

Kami membuat handout nama 30 ahklaq terpuji dan 60 nama ahklaq tercela. Kami juga membuat handout butir butir tiap sila Pancasila dan rujukan ayat inspiratif kode moral al Quran.

Pengabdian dan Mahasiswa KKN menginformasikan dalam arti mensosialisasikan semua bahan dalam handouts selama waktu kkn 30 hari. Tiap minggu butir butir Pancasila satu sila hingga dua sila dalam handouts bisa diinformasikan atau dikomunikasikan tatap muka kepada warga masyarakat. Kami mengadakan Pengajian Akbar mengundang Ustaz dari luar Desa/ dari Yogya dengan mengarahkan Ustaz menggunakan bahan yang kami sediakan yaitu tema ahklaq terpuji dan ahklaq tercela yang dikaitkan dengan butir butir nilai sila Pancasila. Kami Pengabdian dan mahasiswa Kkn liwat Pak Ustaz Juru dakwah agar isi ceramah dakwahnya mengenai ayat ayat al Quran yang menjadi Inspirator nilai moral Pancasila. Hadirin sebagian mendapatkan copy dari materi yang disiapkan. Hasil dan Diskusi Pengabdian dengan guru dan 300 siswa MTs yang paling produktif karena mereka memang sudah mempunyai sebagian informasi ahklaq terpuji atau tercela menurut al Quran. Sebagian besar siswa mendapat copy materi bahasan diskusi/ceramah. Sedang pengabdian di Masjid Jamik tiap habis sholat mahgrib hingga saat Isya memberikan informasi kepada Remaja masjid. Untuk Ibu Ibu Dasa Wisma sesuai jadwal kegiatan pertemuan bulan yang disepakati .

III. Moral Pancasila dan ayat Inspiratornya

Butir-butir Pancasila ke-1 dan Ayat Al-Qur'an

1. Bangsa Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sesuai dengan [QS.Al-A'raf:158]terjemahannya Katakanlah: "Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk" (Alquran).
2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Sesuai dengan [QS.Al-Baqar;h:21-22]terjemahannya : Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa, Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu; karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui.
3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

[QS.Al-Ankabut:46] terjemahannya “Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka, dan katakanlah: "Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu; dan kami hanya kepada-Nya berserah diri".

4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Sesuai dengan [QS.Al-Hujurat:13] terjemahannya:”Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.

Sesuai dengan [QS.Al-Baqarah:256] terjemahannya :”Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

Sesuai dengan [QS.Al-Kafirun:1-6] terjemahannya , Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan utukkulah, agamaku".

7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

Sesuai dengan [QS.Al-Baqarah:256] terjemahannya :”Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Butir-butir Pancasila Sila ke-2 : Kemanusiaan yang Beradil dan Beradab Dan Ayat Al-Qur’an

1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk tuhan yang maha esa;

Sesuai dengan (QS. Luqman : 18) terjemahannya :”Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi

membanggakan diri. Juga Sesuai dengan (QS. An-Nahl : 90) Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.

Sesuai dengan (QS. Al-Hujurat 49 : 13) Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

3. Kita perlu menyadari bahwa kita hidup memang berbeda-beda dari suku, ras, maupun agama yang berbeda jadi perbedaan saling mencintai sesama manusia. Sesuai (QS. Al-Hujurat 49 : 10) terjemahannya :” Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.

4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepak slira.

Sesuai dengan (QS. At-Taubah : 6) terjemahannya;”Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui”.

5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Sesuai dengan (QS. Al-Baqarah : 273) terjemahannya:” (Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.

Butir 5 sila 2 ini Juga Sesuai dengan (Qs. Al- Furqon : 72) terjemahannya:”Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya”(Alquran).

6. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Sesuai dengan (QS. Al-Hujurat : 12) terjemahannya :”Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya

yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Juga sesuai dengan (QS. Luqman : 18) terjemahannya:”Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri”I .

7..Gemar melakukan kegiatan amal baik menolong sesama manusia.

Sesuai dengan (QS. Al-Hujurat 49 : 11) Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

8.Berani membela kebenaran dan keadilan

Sesuai dengan (QS. An-Nisa : 135) Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

9.Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia Sesuai dengan (QS. Al-Hujurat 49 : 10) terjemahannya :” Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itudamaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.

Butir 9 Juga Sesuai dengan (QS.Al-hujurat:13) Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain
Contoh : manusia merupakan makhluk sosial. Jadi manusia tidak dapat hidup sendiri, perlu adanya saling membantu satu sama lain.Sesuai dengan (QS. Ali-Imran : 103) Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan

hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.

Butir-butir Pancasila Sila ke-3 dan Ayat Al-Qur'an

1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
Sesuai dengan rujukan ayat Q.S Ali 'Imran 3:103 yang berbunyi :
“Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.”
2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Sesuai dengan rujukan ayat Al-Qur'an pada Q.S An-Nisa 4:71 yang berbunyi:
“Wahai orang yang beriman! Bersiap siagalalah kamu, dan majulah (ke medan pertempuran) secara berkelompok, atau majulah bersama-sama (serentak)”
3. Mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Sesuai dengan rujukan ayat Al-Qur'an pada Q.S Al Hujurat 49:10 yang berbunyi :
“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”
4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Sesuai dengan rujukan ayat Al-Qur'an pada Q.S Ar-Ruum 30:41 yang berbunyi :
“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”
5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sesuai dengan rujukan ayat Al-Qur'an pada Q.S At-Taubah 9:111 yang berbunyi :
“Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh, (sebagai) janji yang benar dari Allah dalam Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya

selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung.”

6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Sesuai dengan rujukan ayat Al-Qur'an pada Q.S Al-Hujurat 49:13 yang berbunyi :
“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu bisa saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”
7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Sesuai dengan rujukan ayat Al-Qur'an pada Q.S An-Nisa 4:59 yang berbunyi :
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

(Sumber i-vii Al-Qur'an dan Terjemahannya Special for Women, Syaamil Quran, Bandung, 2009.)

Butir Sila ke 4 Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan.

1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia, mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.

Sesuai dengan (QS.al Hujarat 49:13) terjemahannya : "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal"

2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.

Sesuai dengan QS.Al Baqarah 2:256, terjemahanya: "Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.

3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.

Sesuai dengan Qs.Ali Imran 03:159 terjemahannya: "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras

lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya."

4. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.

Sesuai dengan QS. As Syura 32 : 42 terjemahannya : "dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka,"

5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah

Juga Sesuai dengan (Qs. Al Imron 159)" terjemahannya:"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu [246]. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya."

6. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.

Sesuai dengan (Qs. alBaqarah 2:216)" terjemahannya : "diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui."

7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi dan golongan

Sesuai dengan (Qs. Al Hasr 59:5)terjemahannya : "Dan orang-orang (Ansar) yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (Muhajirin), atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung."

8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.

Sesuai (Qs.Al Imran ayat 159) terjemahannya : “Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakkal.”

9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.

Sesuai dengan Qs. As Syra 42: 38, terjemahannya “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”

10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan.

Sesuai dengan (Qs.An Nissa 4: 59) terjemahannya "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Butir butir nilai Sila 5 Pancasila , Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia..

1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan

Sesuai dengan (QS. Al-Hujurat: 11) terjemahannya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”.

2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Sesuai dengan (QS. An-Nisa: 135) yang artinya “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”.

3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sesuai dengan (QS. Ar-Rahman: 9) yang terjemahannya ” Dan tegakanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu ‘.

4. Menghormati hak orang lain. Sesuai dengan (QS. Al-Maidah: 8) yang artinya “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”.

5. Suka member pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Sesuai dengan (QS. Al-Maidah: 2) yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”.

6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Sesuai dengan (QS. An-Nahl: 71) yang artinya “Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?.”.

7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Sesuai dengan (QS. Adz-Dzaariyaat: 19) yang artinya “Dan pada harta-

harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”.

8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Sesuai dengan (QS. Al-Ahzab: 58) yang artinya “Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.”.

9. Suka bekerja keras. Sesuai dengan (QS. At-Taubah: 105) yang artinya “Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”.

10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Sesuai dengan (QS. Al-Fath: 29 dan QS. Al-Insyirah: 5-7) yang artinya “Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku’ dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mukmin). Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.”.

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

“Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.”

11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Sesuai dengan (QS. Al-Maidah: 32) yang arti terjemahannya : “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain,

atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”

Juga sesuai Qs. Al Bqarah :267 yang terjemahannya :“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-

buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Kesimpulan

1. Tiap butir nilai moral dari tiap sila Pancasila mempunyai rujukan ayat dalam al Quran.
2. Menjalankan butir butir moral sila Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara identik menjalankan sebagian ajaran Kode Moral al Quran.
3. Secara Filosofis moral Pancasila tidak bertentangan dengan nilai Islam, bahkan sejalan.
4. Ummat Islam tidak perlu mengembangkan pemikiran untuk secara radikal mengubah dasar negara Pancasila, karena Pancasila sudah Islami.

Daftar Pustaka

1. *Al-Quran dan Terjemahnya Special for Women*, (Bandung: Syaamil Quran), 3:103, hal. 63
2. *Al-Quran dan Terjemahan, Departemen Agama RI, Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006;*
3. BP7, 45 Butir butir nilai sila Pancasila.
4. Darr,BA; *Ethical Teaching of the Quran*, Institute of Islamic Cultural, Lahore, Pakistan. www.alislam.com.
5. Djumadi, *Laporan Hasil Penelitian ahklaq terpuji dan ahklaq tercela*, 2015.
6. Sharif,MM; *Philosophical Teaching of the Quran*, dalam *History of Philosophy Teaching*, Vol.1. Buku 2. Publisher Pakistan Philosophical Congress.; <http://www.muslimphilosophy.com> The Glorious Moral Code; www.quransearch.com

Pendampingan BP3TKI Kota Tanjungpinang Dalam Menanggulangi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal

Dhani Akbar¹, M. Riza Widyarsa²

Penyediaan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bisa diperbaiki dengan menciptakan kesadaran akan hak TKI di kalangan pemangku kepentingan dan para TKI sendiri. Tingkat pendidikan sebagian besar TKI yang rendah menjadikan mereka tidak memahami hak asasi dasar dan hak kerja mereka. Dengan demikian sangatlah penting bila pemangku kepentingan lain dalam proses migrasi memberikan akses yang lebih baik terhadap informasi dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran. TKI yang memilih bekerja di luar negeri sering kali tidak menyadari kondisi di luar negeri dan kadang-kadang tidak tahu di mana mereka bisa mendapatkan informasi yang benar tentang bekerja di luar negeri. Masalah utamanya adalah mahalnya biaya perekrutan. TKI yang mau bekerja ke Hong Kong misalnya, harus membayar sekitar 15 juta rupiah (US\$ 1,600)¹ untuk biaya perekrutan, termasuk jumlah yang cukup besar kalau dilihat gaji mereka perbulan yang sebesar HKD 3,580 (USD 460).² Bagi tenaga kerja, satu-satunya cara untuk menutupi biaya ini adalah dengan mengambil pinjaman baik dari agen perekrutan atau dari para rentenir di desa dengan bunga yang sangat tinggi. Disimpulkan bahwa permasalahan yang dialami oleh para tenaga kerja Indonesia merupakan masalah yang umum terjadi sehingga bukanlah sebuah penyelesaian masalah yang kita perlukan melainkan sebuah solusi bagaimana agar mencegah terjadinya masalah tersebut.

Kata Kunci: BP3TKI, TKI, Imigrasi, Ilegal, Pendampingan.

PENDAHULUAN

Penyediaan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bisa diperbaiki dengan menciptakan kesadaran akan hak TKI di kalangan pemangku kepentingan dan para TKI sendiri. Tingkat pendidikan sebagian besar TKI yang rendah menjadikan mereka tidak memahami hak asasi dasar dan hak kerja mereka. Dengan demikian sangatlah penting bila pemangku kepentingan lain dalam proses migrasi memberikan akses yang lebih baik terhadap informasi dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran. TKI yang memilih bekerja di luar negeri sering kali tidak menyadari kondisi di luar negeri dan kadang-kadang tidak tahu di mana mereka bisa mendapatkan informasi yang benar tentang bekerja di luar negeri. Banyak orang yang melihat migrasi ke luar negeri

sebagai satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan, membantu saudara melanjutkan sekolah, utang atau masalah kesehatan sehingga informasi mengenai hak-hak mereka menjadi tidak begitu penting. Rata-rata calon TKI hanya berpendidikan SMP atau dibawahnya, sehingga diperlukan pelatihan lebih lanjut atau pendidikan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan majikan di luar negeri. Pendidikan dan pelatihan ini bisa membantu meningkatkan kesadaran akan hak-hak mereka. Menurut Razak, *Adding to the complexity of the problem is the fact that the domestic sector, in which most Indonesian migrant workers are working, is often unregulated in many countries.* (Razak, 2012)

Semua praktek-praktek yang tercakup dalam perumusan tentang perdagangan orang, seperti perhambaan karena hutang, kerja paksa dan pelacuran terpaksa, juga harus dijadikan tindak pidana. Perundang-undangan juga harus secara tepat diberlakukan, dimana pidana untuk badan-badan hukum atas kejahatan perdagangan orang disamping pertanggungjawaban perseorangan. Juga penting untuk mengkaji undang-undang, pengawasan dan usaha-usaha yang mungkin berfungsi sebagai kedok untuk perdagangan orang seperti misalnya biro jodoh, perusahaan jasa tenaga kerja, perusahaan jasa perjalanan, hotel dan pelayanan pengantar. (Hidayati, 2012, p. 7)

Tingkat pendidikan dan pelatihan yang memadai sangatlah penting untuk memberikan perlindungan bagi TKI di luar negeri karena mereka mungkin menghadapi berbagai situasi yang harus bisa mereka atasi agar sukses menyelesaikan kontraknya. Hal ini termasuk membiasakan diri dengan budaya lokal dan kondisi kerja, kemampuan berbahasa, kesadaran hak-hak mereka dan ketrampilan khusus yang diperlukan di tempat kerja. TKI mengharapkan mendapat banyak keuntungan dari migrasi. Apabila hal ini dikombinasikan dengan minimnya pengetahuan tentang kondisi di luar negeri dan hak-hak mereka, maka tak mengherankan bila TKI lebih sering memilih diam bila mengalami penganiayaan. Tabel 13 menunjukkan tingkat kesadaran hukum di antara TKI yang bekerja sebagai PRT di Hong Kong SAR. Tabel menjelaskan bahwa 41 persen TKI yang bekerja tidak memiliki kesadaran akan hak-hak mereka atau hukum

di negara tujuan. Ini sangat memprihatinkan karena banyak TKI yang bekerja di Hong Kong SAR sudah mempunyai pengalaman kerja yang signifikan di negara tujuan lainnya. Seperti yang dikatakan oleh Hidayati, eksploitasi seksual dan tenaga kerja, kekerasan, serta perlakuan sewenang-wenang terhadap para korbannya. Para pelaku perdagangan orang secara licik telah mengeksploitasi kemiskinan. (Hidayati, 2012: 3)

Tujuan-tujuan dari kejahatan transnasional memang susah ditebak, namun beberapa pengamat sudah membatasi tujuan-tujuan daripada mereka yang mencari orang yang ingin bekerja di luar negeri dengan tujuan seperti yang disebut oleh Sakharina, *used with the purposed of: prostitution and exploitation (included paedophilia), migrant worker either legal or illegal, child adoption, working on jermal, servant for household, begger, pornographic industry, forbidden drugs seller, human body organ seller and any other form of exploitation.* (Sakharina, 2016) Kemudian, mengapa pekerja migran bisa dikategorikan ke dalam tindak pidana perdagangan orang, seperti disebutkan oleh Majeed, *Human trafficking generally is organized around five participants. First, it involves migrant victims who are trafficked and transported. Second, involves those who recruit victims for transport, and in most cases take charge of finances by paying for all transportation costs. Third, are buyers who claim ownership of possession of the victim.* (Majeed, 2011)

Dalam mengurus migrasi tenaga kerja, Pemerintah Indonesia melibatkan banyak departemen penting, khususnya mereka yang terkait dengan kebijakan dan pelaksanaan migrasi tenaga kerja, kesejahteraan TKI, penegakan hukum dan kantor-kantor di berbagai misi pemerintah Indonesia di luar negeri sebagai pusat sumber daya bagi berbagai isu migrasi tenaga kerja. Sementara UU No. 39/2004 membahas kerja sama antar badan pemerintah dalam situasi darurat dan hubungan antara pemerintah pusat, regional dan daerah, peraturan ini tidak berhasil menjelaskan pembagian wilayah hukum antar badan pemerintah. Seperti yang disebutkan oleh Riadi, dalam rangka membantu pencegahan perdagangan orang, Pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah meluncurkan program investasi padat karya dengan

berikan pelatihan dan lapangan kerja bagi calon tenaga kerja diantaranya korban trafficking. (Riadi, 2017)

Instruksi Presiden No. 6/2006 digunakan untuk meralat ini dengan menetapkan keterlibatan departemen utama. Menurut Instruksi ini, pemerintah pusat merupakan fokus utama dalam manajemen migrasi tenaga kerja termasuk pembuatan kebijakan, eksekusinya, pengawasannya dan mobilisasi badan-badan pemerintah yang terkait. Setiap badan pemerintah pusat memainkan peranan penting dalam manajemen kegiatan migrasi tenaga kerja yang efisien. Tanpa kerjasama yang terpadu antar badan pemerintah, TKI akan terus terkena dampak berbagai macam masalah. Seperti yang dikatakan oleh Yunus, bahwa *Some countries have significant growth in the economies. Therefore, these countries have led to a strong demand for low-skilled labor especially from migrant workers from Southeast Asian Countries*, lebih lanjut, *as the recruitment of migrants enables women in less developed countries to seek employment in skilled positions, instead of performing care-related and household tasks full-time*. Dan ditambahkan bahwa pekerja migran seringkali dieksploitasi, *Migrant workers do not have skill therefore they could be exploited such as working days or hours and low or no salary*. (Yunus & Seniwati, 2016: 892).

Dengan minimnya kesadaran dan pengetahuan dari calon tenaga kerja Indonesia yang ada di Kota Tanjungpinang, maka, dengan ini, pemberian penyuluhan dan pengarahan tentang hal hal penting selama bekerja di luar negeri perlu disampaikan. Berangkat dari permasalahan tersebut, pengabdian ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memenuhi keterbatasan pengetahuan dan wawasan daripada para calon tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berasal dari wilayah yang rentan terhadap penyelundupan orang dan berangkatnya mereka melalui jalur ilegal.

MASALAH

Tingkat pendidikan sebagian besar TKI yang rendah menjadikan mereka tidak memahami hak asasi dasar dan hak kerja mereka. Dengan demikian sangatlah penting bila pemangku kepentingan lain dalam proses migrasi memberikan akses yang lebih

baik terhadap informasi dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran. TKI yang memilih bekerja di luar negeri sering kali tidak menyadari kondisi di luar negeri dan kadang-kadang tidak tahu di mana mereka bisa mendapatkan informasi yang benar tentang bekerja di luar negeri. Banyak orang yang melihat migrasi ke luar negeri sebagai satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan, membantu saudara melanjutkan sekolah, utang atau masalah kesehatan sehingga informasi mengenai hak-hak mereka menjadi tidak begitu penting. Rata-rata calon TKI hanya berpendidikan SMP atau dibawahnya, sehingga diperlukan pelatihan lebih lanjut atau pendidikan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan majikan di luar negeri. Pendidikan dan pelatihan ini bisa membantu meningkatkan kesadaran akan hak-hak mereka.

Pelaksanaan pencegahan perdagangan orang dalam bentuk sosialisasi/pemberdayaan serta penegakan hukum tidak optimal karena lemahnya Satuan Tugas Kelembagaan yang hanya memiliki kapasitas koordinatif dan sistem dan praktik pengiriman tenaga kerja Indonesia yang tidak memberikan perlindungan dini karena kurangnya kemampuan pertahanan nirmiliter mereka. Kelemahan penegakan hukum juga disebabkan beberapa petugas hukum yang terlibat karena rendahnya nasionalisme mereka. (Riadi, 2017, p. 7)

Masalah utamanya adalah mahal biaya perekrutan. TKI yang mau bekerja ke Hong Kong misalnya, harus membayar sekitar 15 juta rupiah (US\$ 1,600), 1) untuk biaya perekrutan, termasuk jumlah yang cukup besar kalau dilihat gaji mereka perbulan yang sebesar HKD 3,580 (USD 460). 2) Bagi tenaga kerja, satu-satunya cara untuk menutupi biaya ini adalah dengan mengambil pinjaman baik dari agen perekrutan atau dari para rentenir di desa dengan bunga yang sangat tinggi. Menurut Farhana, *migrants, reports on TIP demonstrate migrate abroad for work in a variety of industries, including manufacturing, agriculture, construction and domestic work*. (Farhana, Masruchin, & Sugiri, 2015). Reformasi terakhir pelayanan repatriasi meningkatkan pelayanan pemulangan TKI. Terminal IV Bandara Soekarno Hatta di Jakarta dikelola oleh BNP2TKI dan menyediakan beberapa jasa pemulangan TKI.

BAHAN DAN METODE

Adapun metode pelaksanaan dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah dengan membuat sebuah pendampingan bersama BP3TKI kota Tanjungpinang dan instansi dan lembaga terkait dengan permasalahan tenaga kerja migran. Kegiatan dilakukan dalam bentuk ilmiah dan didampingi praktisi yang ahli di bidangnya, dengan beberapa sajian telaah kajian ilmiah dari ilmu Hubungan Internasional, tentang pentingnya perlindungan dan pendampingan selama bekerja di luar negeri, hak apa saja yang dapat diterima oleh WNI selama berada di Negara orang dengan tidak mengesampingkan fungsi dan perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri.

Adapun pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan ke daerah-daerah di Tanjungpinang yang menjadi ‘penyumbang’ utama dalam hal tenaga kerja Indonesia. Pelaksanaannya menggunakan teknik penyukuhan dalam sebuah seminar yang akan dibimbing langsung bersama para praktisi di bidangnya. Dalam hal ini melibatkan BP3TKI Kota Tanjungpinang.

PEMBAHASAN

Kementerian Luar Negeri telah mengambil langkah penting dalam meningkatkan perlindungan bagi TKI yang bekerja di luar negeri. Agen perekrutan sekarang diminta untuk mendaftarkan semua TKI yang tiba di luar negeri di kantor KBRI atau KJRI di negara tujuan. KBRI atau KJRI akan memegang salinan kontrak kerja para TKI dan mencatat alamat perusahaan yang mempekerjakan mereka, sehingga lebih mudah untuk mengetahui dimana lokasi mereka kalau ada laporan tentang eksploitasi atau siksaan. Namun, banyak agen perekrutan gagal dalam mendaftarkan para TKI ini di kantor KBRI atau KJRI setiba mereka di negara tujuan tersebut, sehingga menyulitkan KBRI atau KJRI untuk menyediakan pelayanan dan

perlindungan bagi TKI di negara tujuan. Setidaknya sebagian dari masalah yang dihadapi pada tahap perekrutan di Indonesia turut menjadi penyebab ketidakberdayaan TKI saat tiba di negara tujuan sehingga rentan dieksploitasi dan mengalami kekerasan. Terdapat dua kategori masalah yang sering dialami TKI di negara tujuan, yakni masalah ketenagakerjaan yang umum terjadi (misalnya: gaji di bawah jumlah yang disetujui atau tidak dibayarkan, paspor dan dokumentasi lainnya ditahan oleh si majikan, jam kerja berlebihan, waktu istirahat yang tidak cukup atau bahkan tidak ada sama sekali, kondisi kerja yang tidak manusiawi, terbatasnya akses kepada informasi dan komunikasi, tidak cukup makanan) dan masalah yang berkaitan dengan kekerasan (misalnya pelecehan seksual, pemerkosaan, penganiayaan dan pembunuhan).

Masalah utamanya adalah mahal biaya perekrutan. TKI yang mau bekerja ke Hong Kong misalnya, harus membayar sekitar 15 juta rupiah (US\$ 1,600)¹ untuk biaya perekrutan, termasuk jumlah yang cukup besar kalau dilihat gaji mereka perbulan yang sebesar HKD 3,580 (USD 460).² Bagi tenaga kerja, satu-satunya cara untuk menutupi biaya ini adalah dengan mengambil pinjaman baik dari agen perekrutan atau dari para rentenir di desa dengan bunga yang sangat tinggi. Reformasi terakhir pelayanan repatriasi meningkatkan pelayanan pemulangan TKI. Terminal IV Bandara Soekarno Hatta di Jakarta dikelola oleh BNP2TKI dan menyediakan beberapa jasa pemulangan TKI. Jika lapangan pekerjaan kita dirasa cukup untuk menyerap tenaga kerja yang banyak, masih ada 970.000 jiwa masyarakat kita yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali dan berpotensi untuk menjadi korban *trafficking*. (Afifah & Yuningsih, 2016)

Ada pelayanan dokter jaga selama 24 jam dan bagian khusus yang diberikan untuk menyediakan bantuan dalam klaim asuransi. Namun, pelayanan tertentu masih bisa diperbaiki; khususnya akses ke transportasi yang murah dari terminal ke tempat tujuan lain di Indonesia. Masalah lain, kebebasan gerak bagi TKI yang menggunakan terminal IV. Pada saat TKI tiba melalui Jakarta, mereka diharuskan menggunakan terminal ini. TKI juga dipaksa untuk kembali ke alamat yang tertera dalam paspor

mereka. Hal ini agak merepotkan khususnya bagi TKI yang keluarganya sudah pindah alamat pada saat mereka masih bekerja di luar negeri, atau TKI yang mau pulang menuju ke tempat yang berbeda untuk mengunjungi anggota keluarga yang lain atau teman. Laporan ini juga menemukan bahwa masih banyak TKI yang membutuhkan layanan atau bantuan dari pemerintah setelah mereka kembali. Khususnya, mereka yang membutuhkan bantuan dalam menangani kasus klaim asuransi, pelatihan dan bantuan pengelolaan usaha. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan BNP2TKI berusaha keras untuk melatih beberapa TKI yang kembali untuk menjadi pengusaha, namun keberhasilan program ini sangat terbatas karena minimnya sumber daya. Idealnya diupayakan lebih banyak sumber daya untuk membantu TKI mengelola penghasilan mereka dan memastikan bahwa ada cukup banyak peluang kerja dan usaha bagi mereka yang kembali dari luar negeri.

Banyaknya klaim asuransi dari TKI yang pulang berarti banyak klaim yang tidak pernah diproses, namun ada lumayan banyak kasus yang terpecahkan. Kemungkinan lain ada banyak kasus yang tidak dilaporkan karena TKI tidak tahu kemana mencari bantuan. Secara keseluruhan, upaya-upaya harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran para TKI tentang hak-hak tenaga kerja, hak-hak asasi dan juga jalur hukum yang terbuka bagi mereka dalam kasus pelanggaran hak. Bagian kedua dari laporan ini menjelaskan kondisi dan pengalaman TKI yang bekerja di luar negeri. Meskipun hasil survei menunjukkan keragaman kondisi dan pengalaman TKI antara 4 negara tujuan, namun ditemukan juga beberapa kesamaan.

Pengawasan agen perekrutan masih kurang memadai dan perlu diperbaiki, baik di tingkat pemerintah nasional maupun regional. Pengawasan agen perekrutan yang lebih baik akan mengarah ke perlindungan TKI yang lebih baik juga sekaligus penertiban kegiatan perekrutan ilegal. Sebuah sistem perlindungan harus dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia dengan tujuan membangun mekanisme efektif untuk mengawasi lembaga perekrutan, agen serta majikan. Mekanisme

pengawasan harus didampingi oleh aplikasi sanksi yang lebih jelas terhadap lembaga perekrutan, agen, dan majikan yang melanggar hukum. Agen dan majikan yang melanggar hukum harus dimasukkan daftar hitam dan tidak lagi diijinkan merekrut TKI dan kesemua ini harus ditegakkan.

Dibutuhkan pula perbaikan dalam hal pengumpulan data migrasi untuk memberitahu pembuat kebijakan. Kartu identitas nasional seperti yang disarankan, akan dapat membantu menurunkan tingkat pemalsuan dokumen. Di tahap sebelum keberangkatan, ada beberapa hal yang bisa diperbaiki untuk mempersiapkan TKI dengan lebih baik. TKI memang seharusnya mendapatkan Pembekalan Akhir Keberangkatan (PAP), namun laporan ini justru menemukan hal sebaliknya (tidak terdapat pelatihan), atau pelatihan sering kali tidak memadai. Dengan demikian, laporan ini mengusulkan semua TKI menerima pengenalan budaya negara tujuan, pelatihan bahasa, informasi tentang hak-hak dan kewajiban, informasi yang jelas tentang kondisi kerja di negara tujuan dan nomor kontak untuk situasi darurat serta informasi tentang prosedur yang tepat untuk menghadapi situasi darurat. Laporan juga menyarankan bahwa pelatihan seperti ini sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah atau pihak ketiga seperti LSM, daripada agen perekrutan. Manajemen yang lebih baik untuk menangani TKI yang pulang kampung atau program repatriasi, seharusnya dikembangkan ke arah yang aman dan mudah bagi TKI yang pulang ke negara asal. Di sisi lain, program reintegrasi sebaiknya memaksimalkan hasil positif migrasi bagi TKI perorangan, masyarakat setempat dan pembangunan nasional. Ini bisa dilakukan dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan TKI untuk berinventasi pada pekerjaan layak yang produktif dan berpotensi membangun komunitas lokal.

Dari hasil penelitian yang tim kami lakukan dapat diketahui bahwa permasalahan tenaga kerja Indonesia di kepulauan riau cukup banyak. Secara garis besar, permasalahan yang dihadapi TKI di Kepulauan Riau adalah mengenai pemulangan TKI, gaji tidak dibayar, pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja

berakhir, overstay dan TKI gagal berangkat. Permasalahan seperti ini seringkali dialami oleh tenaga kerja Indonesia. Permasalahan lain yang kami temukan adalah kurangnya pengetahuan TKI mengenai aturan di Negara tempat mereka bekerja, contohnya seperti pelanggaran mengenai berapa lama jam kerja yang diperbolehkan dalam sehari dan jenis pekerjaan apa yang mereka lakukan di Negara tempat mereka bekerja.

Menurut laporan yang diterima dari BP3TKI kota Tanjungpinang, mereka telah melakukan berbagai tinni masalah TKI ilefdakan dalam mengatasi permasalahan TKI diantaranya dalam mengatasi masalah TKI illegal, BP3TKI memulangkan TKI illegal yang telah di deportasi dari Negara tempat mereka bekerja, salah satunya pada tanggal 6 Maret 2018 lalu, BP3TKI berhasil memulangkan 27 TKI illegal ke daerah asalnya. BP3TKI juga mengadakan pelatihan bagi tenaga kerja. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kulaitas dan pengetahuan TKI sehingga mereka tidak bingung ketika bekerja kelak.

Informasi lain yang didapatkan adalah diketahui mayoritas TKI illegal atau yang dideportasi berasal dari luar Tanjungpinang. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Kepulauan Riau khususnya kota Tanjungpinang merupakan salah satu wilayah penting dalam penampungan TKI yang bermasalah. Seharusnya pemerintah lebih memperhatikan wilayah Kepulauan Riau karena wilayah ini sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Negara tetangga. Dalam mengatasi masalah TKI seharusnya banyak instansi dapat bekerjasama membantu BP3TKI. Pemerintah juga dituntut aktif dalam melihat perkembangan masalah ini dan ikut mencari solusi terbaik atas masalah yang dialami. Kalau instansi tersebut tidak saling bekerjasama maka akam sulit menyelesaikan masalah tersebut.

Permasalahan TKI juga menimbulkan sebuah keimpulan bahwa TKI masih butuh perbekalan sebelum mereka bekerja. Hal ini berkaitan dengan pemahaman

tenaga kerja mengenai Negara tempat mereka bekerja dan segala aspek di dalamnya. Jangan sampai mereka melanggar aspek tersebut karena kurangnya pemahaman mengenai Negara tempat mereka bekerja. BP3TKI juga menerangkan bahwa untuk mengatasi permasalahan ini, TKI haruslah berkoordinasi dengan lembaga terkait demi kelancaran penyelesaian masalah. Tapi yang terjadi adalah sulitnya penyampaian informasi dari TKI ke BP3TKI karena kurangnya aksesibilitas dan teknis dalam proses penyampaian informasi sehingga penyelesaian masalah berjalan lama.

Untuk permasalahan pemutusan hubungan kerja sepihak harusnya diatasi dengan adanya perjanjian kerjasama yang jelas antara TKI dan majikan dan di tengah oleh lembaga hukum agar jelas sanksinya apabila terjadi pelanggaran perjanjian. Masalah gaji yang tak kunjung dibayarkan, BP3TKI melakukan tindakan mediasi dengan pihak terkait guna menyelesaikan masalah ini. Seharusnya proses pembayaran gaji berlangsung aman dan transparan sehingga tidak ada pihak yang melakukan kecurangan. Pada kasus gagalnya TKI yang berangkat, bias disimpulkan bahwa kurangnya dokumen atau aspek yang mengakibatkan gagalnya keberangkatan mereka. Harusnya dari awal sudah diadakan pengecekan dokumen agar hal seperti ini tidak terulang lagi.

Dari seluruh hasil informasi yang kami dapatkan, disimpulkan bahwa permasalahan yang dialami oleh para tenaga kerja Indonesia merupakan masalah yang umum terjadi sehingga bukanlah sebuah penyelesaian masalah yang kita perlukan melainkan sebuah solusi bagaimana agar mencegah terjadinya masalah tersebut. Hal ini memutuhkan banyak aspek pendukung agar bias terwujud dan adanya kesadaran dari semua pihak sehingga hal seperti permasalahan ini tidak terulang kembali

KESIMPULAN

Laporan ini bertujuan untuk membantu tenaga kerja Indonesia dan memberikan mereka gambaran agar mereka memahami apa saja yang harus mereka lakukan ketika

mereka bekerja kelak. Kami mengimbau kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini agar dapat bekerjasama dalam mewujudkan tenaga kerja Indonesia yang dapat bersaing di era modern ini. Kami juga berharap agar pihak yang terlibat dalam kegiatan ini untuk dapat membantu tenaga kerja Indonesia yang memiliki masalah dan berbagai kendalanya.

Pada tahapan selanjutnya, penyusun berencana untuk melakukan kegiatan tahap berikutnya yaitu dengan melakukan sebuah sosialisasi *door to door*. Sosialisasi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung mengenai keadaan tenaga kerja yang ada di kta Tanjungpinang. Diharapkan dengan sosialisasi ini tenaga kerja Indonesia lebih memahami tata cara supaya mereka mengerti aturan yang diterapkan di luar negeri.

Migrasi tenaga kerja mempunyai potensi positif dalam pembangunan angkatan tenaga kerja Indonesia. Namun masih ada kebutuhan yang sangat mendesak untuk memberikan keseimbangan antara manfaat ekonomi dari migrasi tenaga kerja internasional dan memastikan adanya perlindungan tenaga kerja yang efektif. Indonesia merupakan negara pengirim tenaga kerja luar negeri utama. Manfaat migrasi selain didapat oleh TKI perorangan, juga keluarga mereka dan masyarakat Indonesia. Laporan ini mengidentifikasi beberapa isu dan tantangan mengenai pengelolaan migrasi di Indonesia. Hukum yang ada saat ini diakui cukup komprehensif, tetapi masih diperlukan perbaikan lebih lanjut, khususnya hal yang berkaitan dengan hak migran dan keluarganya di Indonesia maupun luar negeri. Pemerintah pusat perlu memperbaiki kerja sama internal antar badan pemerintah juga antar pemerintah pusat, regional dan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan migrasi tenaga kerja.

Tingkat keterlibatan pihak yang berwenang dengan migran sangat kecil. Seharusnya ada konsultasi yang lebih baik dengan para TKI dan keluarga mereka di setiap tingkat dan selama proses migrasi. Masalah migrasi ilegal yang bisa ditangani oleh pemerintah, khususnya adalah masalah ikatan utang yang sering kali mengarah ke bentuk migrasi ilegal atau perdagangan orang. Ikatan utang bisa diperkecil dengan

menyediakan akses pinjaman yang lebih baik: melalui bank pinjaman pemerintah, koperasi maupun lembaga keuangan mikro. Hal lain yang patut diperhatikan adalah akses ke jalur migrasi resmi yang lebih transparan dan lebih murah, serta penyediaan akses informasi mengenai resiko migrasi ilegal agar TKI tidak memilih bermigrasi secara ilegal.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan nikmat Nya. penyusun dapat menyelesaikan laporan perpanjangan ini. Laporan ini bertujuan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan tenaga kerja di Indonesia khususnya kawasan Tanjungpinang. Penyusun melakukan penelitian ini dengan maksud untuk memberikan kemudahan bagi tenaga kerja Indonesia yang ingin pergi ke luar negeri supaya mengerti bagaimana aturan dan adab yang di terapkan di Negara tersebut.

Kegiatan ini tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa ada dukungan dari seluruh pihak baik dari tim panitia dan pihak universitas atas kerjasamanya selama penelitian ini berlangsung. Penyusun juga meminta maaf apabila dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan ini terdapat kesalahan, mohon dimaafkan, oleh karena itu kritik dan saran dibutuhkan demi kesempurnaan kegiatan ini untuk kesempatan yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, D. F., & Yuningsih, N. Y. (2016). Analisis kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan (trafficking) perempuan dan anak di kabuoaten Cianjur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–9.
- Farhana, Masruchin, A., & Sugiri, B. (2015). Trafficking in Persons in Indonesia : A Review on Current Anti- Trafficking Legislation Development, 42(2010), 154–159.
- Hidayati, maslihati nur. (2012). Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan

Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL*, 1(3), 163. Retrieved from <http://jurnal.uai.ac.id/index.php/SPS/article/download/59/46>

Majeed, A. R. (2011). Human Trafficking in the era of Globalization: The case of Trafficking in the Global Market Economy. *Transcience Journal*, 2(1), 54–71. <https://doi.org/10.1145/1053291.1053327>.

Razak, T. B. U. (2012). Eliminating Trafficking in Persons and People Smuggling : Indonesia ' S Experience Presented By Director for Protection of Indonesian Citizens and Legal Entities Overseas Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia Eliminating Trafficking. *Asean Security Governance and Order*.

Riadi, W. (2017). Implementasi Pencegahan Perdagangan Orang Ditinjau Dari Perspektif Pertahanan Negara. *Jurnal Prodi Strategi Perang Semesta*, 3(2), 1–7.

Sakharina, I. K. (2016). Victim Protection of Human Trafficking in Indonesia According to the International law Iin Karita Sakharina. *Quest Journals*, 4(12), 32–37.

Yunus, R., & Seniwati, et al. (2016). Strategies Against Human Trafficking: The Role of Education In Jeneponto District, South Sulawesi, Indonesia. *International Journal of Social Science and Humanity*, 6(11), 892. <https://doi.org/10.18178/ijssh.2016.V6.767>